



PENINGKATAN
KOMITMEN KOMUNIKASI
DAN PERUBAHAN BUDAYA
MENUJU PLNE JUARA

ANNUAL REPORT 2019

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report





Tumpal M. Simarmata

Komisaris Utama

President Commissioner



Laporan Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Report

Sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar PT Prima Layanan Nusantara Enjiniring ("PLNE" atau "Perseroan") dan peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris PLNE ("Dekom") telah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian pengarahannya kepada Direksi PLNE ("Direksi") dengan penuh tanggung jawab. Dekom bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat atas kebijakan Direksi dalam mengelola Perseroan yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dekom telah menjalankan perannya dengan senantiasa berupaya memastikan bahwa PLNE telah dikelola sesuai kepentingan para pemangku kepentingan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dekom senantiasa menjaga obyektivitas dan independen dalam menjalankan tugas, sehingga tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Perseroan, kecuali hal-hal yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dekom menyampaikan penghargaan atas kinerja Direksi yang telah mampu melaksanakan usaha sesuai RJPP Perseroan tahun 2018-2023 untuk mendukung korporasi PT PLN (Persero) ("PLN"), dengan menghasilkan produk-produk enjiniring untuk mendukung PLN dalam memenuhi pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik dengan membangun pembangkit, transmisi dan gardu induk dan dalam upayanya untuk menurunkan biaya pokok produksi.

Dalam Laporan ini, Dekom melaporkan penilaian kinerja Direksi, Pandangan atas Prospek Usaha dan Laporan kegiatan pengawasan oleh Komite-Komite Dekom yang dijelaskan sebagai berikut:

It is stated in the Articles of Association of PT Prima Jasa Nusantara Enjiniring ("PLNE" or "The Company") and in the applicable laws and regulations, that the PLNE Board of Commissioners ("Dekom") has carried out the task of supervising and of providing the referrals to the PLNE Directors ("Directors") in a full responsibility. The Board of Commissioners is responsible to the Shareholders in carrying out supervisory duties and in providing advices on the policies of the Board of Directors in managing the Company which have been stipulated in the Shareholders General Meeting ("GMS"), and in ensuring compliance with all applicable laws and regulations.

Dekom has carried out their role to always ensure that PLNE has been managed according to the interests of stakeholders. In this matter, Dekom always maintains its objectivity and independency in carrying out its duties, so that Dekom does not involved in the Company's operational decisions making, except for the matters that have been regulated and stipulated in the Articles of Association and in the applicable laws and regulations.

Dekom has expressed its appreciations for the performance of the Board of Directors who has been able to carry out the Company's business according to the 2018-2023 Corporation's RJPP to support the corporate of PT PLN (Persero) ("PLN") on producing engineering products to support PLN in fullfiling the growing demands for electricity by building power plants, building transmission and substations and in its efforts to lower the cost of production.

The report of the performance of the Board of Directors, the opinions on business prospects and the report of supervisory activities by the Dekom Committees that have been assessed by Dekom described as follow;

Penilaian Atas Kinerja Direksi

Penilaian Dewan Komisaris atas kinerja Direksi pada tahun anggaran 2018, meliputi:

1. Kinerja Operasional dan Keuangan;
2. Tingkat Kesehatan Perseroan;
3. Good Corporate Governance ("GCG");

dan atas hal tersebut Dewan Komisaris berpendapat bahwa kinerja Direksi pada tahun anggaran 2019 adalah masuk kategori baik.

Kinerja Operasional dan Keuangan

Realisasi Pendapatan Usaha (konsolidasi) sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai Rp 1.000.48,- milyar yang terdiri dari:

1. Pendapatan dari pekerjaan Enjiniring sebesar Rp 442,2 milyar;
2. Pendapatan dari Anak Perusahaan PT PPN (dari pekerjaan EPC) sebesar Rp 444,6 milyar; dan
3. Pendapatan dari pekerjaan pengembangan enjiniring berupa penyediaan jasa gas processing CNG di Bangkanai sebesar Rp 108,4 milyar.

Realisasi Pendapatan Usaha sebesar Rp.1000.48 milyar tersebut adalah hanya 77.9% dari target RKAP 2019, dan hanya 89.5% dari Pendapatan Usaha tahun 2018, artinya terjadi penurunan pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan Laba Bersih sebelum pajak Rp. 132.34 Milyar, atau 97.4% dari target RKAP 2019 sebesar Rp. 135.81 milyar, dan ini juga lebih rendah atau hanya 77.2% dari laba pada tahun 2018 yang mencapai Rp. 167.72 milyar.

Sesungguhnya target RKAP 2019 direncanakan berdasarkan adanya market yang besar di PT PLN(Persero), namun PLNE belum dapat memanfaatkan market tersebut pada tahun 2019, yang dibuktikan bahwa sebagian besar pendapatan berasal dari pekerjaan luncuran tahun 2018 dan hanya sekitar 12% yang berasal dari pekerjaan hasil pemasaran di tahun 2019.

Dekom berpendapat bahwa Pendapatan Usaha belum dapat dicapai seluruhnya karena target pemasaran di 2019 tidak dilaksanakan secara maksimal dan juga beberapa

The Board of Directors Performance's Assessment

The Board of Commissioners' assessment of the Board of Directors' performance in the 2018 fiscal year includes:

1. Operational and Financial Performance;
2. Company's Health Level;
3. Good Corporate Governance ("GCG");

The Board of Commissioners believes that the performance of the Board of Directors in the 2019 fiscal year is in the **good** category.

Operational and Financial Performance

The Operating Revenues Realization (consolidated) up to December 31, 2019 that reached IDR 1,000.48 billion, consisting of:

1. The engineering works revenue is Rp. 442.2 billion;
2. The PT PPN's subsidiary (from EPC work) revenue is Rp. 444.6 billion; and
3. The engineering development work in the form of providing CNG gas processing services in Bangkanai revenue is amounted to IDR 108.4 billion.

The realization of operating revenue of Rp. 1,000.48 billion was only 77.9% of the 2019 RKAP's target, and it was only 89.5% of the 2018 Operating Revenue, meaning that there was a decrease in income compared to the previous year. Meanwhile, the net profit before the tax payment is Rp. 132.34 billion, or 97.4% of the 2019 RKAP's target of Rp. 135.81 billion, and this is also lower or only 77.2% of the profit in 2018 which had reached Rp. 167.72 billion.

In fact, the 2019 RKAP target has been planned based on the large market having by PT PLN (Persero), but PLNE has not been able to take advantage of this market in 2019, which has been proven that most of the revenues have come from launch work in 2018 and only about 12% came from the result of marketing works in 2019.

Dekom has considered that the Operating Revenue has not been fully achieved because the marketing target in 2019 has not been implemented optimally

pekerjaan engineering yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2019 ternyata tidak dapat diselesaikan sehingga tidak dapat dibukukan sebagai Pendapatan Usaha pada tahun 2019, dan apabila PLNE tidak serius mengambil Langkah-langkah untuk melaksanakan pekerjaan engineering dari market yang besar tersebut, maka ada potensi PLNE terdilusi dari market.

Untuk itu Dekom mengingatkan agar Direksi melakukan marketing yang proaktif dan efektif, dengan strategi pemasaran yang luar biasa (extraordinary) dan membangun networking yang luas serta melakukan langkah kongkrit dalam menyelesaikan pekerjaan engineering dengan mutu baik dan waktu penyelesaian sesuai kontrak serta mengatasi masalah administrasi yang diperlukan dengan meningkatkan koordinasi bersama Pemberi Kerja lebih awal.

Tingkat Kesehatan Perseroan

Tingkat kesehatan Perseroan yang dihitung berdasarkan Surat Edaran No. 0008. E/DIR/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Direktorat dan Unit yang merupakan penjelasan lebih lanjut dari pasal 8 ayat 5 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Manajemen Kinerja Korporasi dan Penilaian Kinerja Organisasi Nomor 0065.P/DIR/2015 tanggal 16 September 2015, menghasilkan tingkat kesehatan Perseroan pada tahun 2019 digolongkan dalam kondisi "SEHAT" kategori "AA" dengan nilai sebesar 89,64.

Walaupun tingkat Kesehatan Perseroan berdasarkan pencapaian KPI tahun 2019 dengan skor 89.64 adalah SEHAT (AA), namun pencapaian kinerja keuangan pada tahun 2019 sebetulnya kurang menggembirakan, karena Perseroan tidak memperoleh Pendapatan sesuai target RKAP 2019, bahkan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi Pendapatan yang diperoleh hanya 77.9% dari target.

Diukur dari Rasio Operasi (RO), realisasi RO pada tahun 2019 adalah 86.8%. Dibandingkan dengan realisasi RO pada tahun 2018 yang mencapai 84.3%, tampaknya Perseroan mengalami penurunan kinerja operasi. Namun RO 86.8% ini sedikit lebih baik dari target RKAP 2019 yang ditetapkan 88%. Dengan kata lain, RO yang nilainya membesar ini, dibandingkan RO tahun lalu sebetulnya telah direncanakan dalam RKAP 2019. Hal ini karena

and also some engineering works that should have been completed in 2019 have not been completed yet so that it cannot be recorded as Operating Revenue in 2019, and if PLNE is not serious about taking its steps to carry out its engineering works from those large market, then there is the potential for PLNE to be diluted from the market.

For those reasons, Dekom reminds the Board of Directors to carry out proactive and effective marketing, with extraordinary marketing strategies and to build extensive networking and to take concrete steps in completing engineering works with a good quality and finishing work time according to the contracts as well as overcoming administrative problems required by improving an earlier good coordination with the Employer.

The Level of Company's Health

The level of the Company's health which is calculated based on the Decree No.0008.E/DIR/2015 concerning the Guidelines for Implementing the Calculation of Organizational Performance Values of Directorates and Units which is a further explanation of article 8 paragraph 5 of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Regulation on Corporate Performance Management and Organizational Performance Assessment Number 0065.P/DIR/2015 dated on September 16, 2015, resulting in the Company's health level being classified in the "HEALTHY" category "AA" with a score of 89.64 in 2019.

Although the Company's health level with a score of 89.64 based on the 2019 KPI achievement is HEALTHY (AA), the achievement of financial performance in 2019 is actually less encouraging, because the Company did not receive revenues according to the 2019 RKAP target, even further the Company experienced a decrease compared to the previous year. Revenue realization was only 77.9% of the target.

The RO realization measured from the Operating Ratio (RO) in 2019 was 86.8%. Compared to the RO realization in 2018 which reached 84.3%, it seems that the Company has experienced a decline in operating performance. However, this 86.8% RO is slightly better than the 2019 RKAP target which was set at 88%. In the other words, the RO which has increased in value, compared to last year's RO, has actually been planned in the 2019 RKAP.

Perseroan telah mengambil strategi untuk meningkatkan mutu produk enjiniring dalam melayani PLN Group dengan mengalokasikan biaya yang lebih besar, walaupun dapat berdampak pada tingkat laba yang lebih rendah.

Namun demikian upaya Perseroan untuk meningkatkan mutu produk enjiniring di tahun 2019 belum sepenuhnya berhasil. Hal ini melihat dari pencapaian item kinerja Engineering First Pass Yield (EFPY/mutu produk enjiniring) dari target 91% realisasinya 72.2%, On Time Delivery (OTD) produk enjiniring dari target 100% realisasinya 75%, Produktivitas Supervisi Konstruksi dari target 100% realisasinya 89.7% dan Indeks Kepuasan Pelanggan dari target 83% realisasinya 76.6%.

Good Corporate Governance

Implementasi **Good Corporate Governance** (“GCG”) merupakan suatu syarat kunci dalam mencapai kinerja Perseroan yang berkelanjutan sehingga implementasi GCG menjadi perhatian utama bagi Dekom.

Dekom berpendapat bahwa pada tahun 2019 Direksi telah menerapkan GCG dengan baik. Assesment telah dilakukan secara mandiri dengan menggunakan indicator/parameter penilaian berdasarkan keputusan Sekretaris Kementerian BUMN nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas penerapan Tata Kelola Perseroan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”).

Hasil assesment GCG untuk tahun 2019 menunjukkan capaian skor 90.09 sedikit menurun dibandingkan tahun 2018 yang menunjukkan capaian skor sebesar 90.2.

Pandangan Atas Prospek Usaha Perseroan

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP) tahun 2017-2019 dan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan 2017, PT PLNE mendapat arahan dari pemegang saham untuk mengimplementasikan hasil kajian arah dan strategi pengembangan portfolio bisnis PLN Group dengan istilah “PLN SOLID” yaitu alignment bisnis portofolio PLN Group.

This, because the Company has taken a strategy to improve the quality of engineering products in serving the PLN Group by allocating higher costs, although it can have an impact on a lower profit level.

However, the Company’s efforts to improve the quality of engineering products in 2019 have not been fully successful. This can be seen from the achievement of Engineering First Pass Yield (EFPY/quality of engineering products) of the 72.2% realization from the target of 91%, On Time Delivery (OTD) of engineering products of the 75% realization from the target of 100%, Productivity of Construction Supervision of the 89.7% realization from the target of 100% and the Customer Satisfaction Index of the 76.6% realization from the target of 83%.

Good Corporate Governance

The implementation of Good Corporate Governance (“GCG”) is a required key in achieving sustainable Company performance, thus the GCG implementation is a major concern for the Board of Commissioners.

Dekom believes that in 2019 the Board of Directors has implemented GCG well. The assessment has been carried out independently using assessment indicators/parameters based on the Decree of the Secretary of the Ministry of State Owned Enterprises number: SK-16/.MBU/2012 dated on June 6, 2012 concerning the Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the implementation of Good Corporate Governance (Good Corporate Governance) in State Owned Enterprises (“BUMN”).

The results of the GCG assessment for 2019 showed the achievement score of 90.09 decreased slightly compared to 2018 which showed an achievement score of 90.2.

The Company’s Business Prospects Outlook

Through the General Meeting of Shareholders of the Company’s Work Plan and Budget (RUPS RKAP) for 2017-2019 and the AGMS for the Approval of the 2017 Annual Report, PT PLNE received some referalls from shareholders to implement the results of the study on the direction and development strategy of the PLN Group business portfolio with the term “PLN SOLID” namely the alignment of the PLN Group portfolio business.

PT PLNE dialokasikan pada bidang engineering untuk lingkup generation, transmission, dan distribution. Walaupun demikian, PT PLN (Persero) melalui RUPS LPT RKAP PT PLNE 2017 telah menerapkan bahwa "PT PLNE diminta untuk lebih proaktif meningkatkan kontribusi pada jasa konsultasi di setiap lini aktivitas bisnis PT PLN (Persero)". Berdasarkan arahan pemegang saham tersebut, PT PLNE juga akan mengembangkan lini produk di lingkup konsultasi engineering di bidang primary energy dan sales and services.

Sesuai dengan isi misi "PLN SOLID", PT PLNE diharapkan mampu menjadi perusahaan yang memiliki kapabilitas dan kualitas di bidang engineering dengan focus pada optimizing cost efficiency dan leading industry capability, untuk menjadi acuan kapabilitas yang dimiliki oleh PLN Group, dalam hal ini kapabilitas engineering terintegrasi dalam lingkup Development & Construction yang mumpuni dan selalu berkembang serta optimasi struktur biaya Perusahaan. Pendapatan engineering dipengaruhi oleh jumlah proyek investasi baru PT PLN (Persero) yang tercantum pada RUPTL, kompetisi dengan competitor perusahaan engineering dalam meningkatkan market share existing PT PLNE, serta potensi dilusi market share dalam trend penurunan proyek investasi baru RUPTL 2019-2028. Hingga saat ini bisnis atau lingkup usaha PT PLNE sebagian besar bersifat Partial Solution. Artinya, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan Pembangkit, Transmisi dan Gardu Induk dalam Bidang Ketenagalistikan khususnya, dikemas dan dilaksanakan sebagai bagian yang terpisah.

Akan tetapi ke depannya, dalam menjaga keberlangsungan pendapatan engineering, maka PT PLNE melakukan pengembangan dalam pekerjaan engineering terintegrasi (dari mulai feasibility study hingga commissioning) untuk PLN Group melalui penyediaan jasa engineering integrated total solution yang terdiri dari paket-paket pekerjaan engineering secara menyeluruh untuk setiap proyek investasi PT PLN (Persero) mulai engineering tahap inisiasi, engineering tahap procurement, engineering tahap construction sampai dengan engineering tahap operation & maintenance.

Dalam menjaga keberlangsungan bisnis dan mengatasi kondisi bisnis jasa engineering yang bersifat fluktuatif. Perusahaan berupaya untuk tetap berada dalam bisnis jasa layanan yang memberikan fixed income dan berkelanjutan, melalui pendapatan jasa pengembangan engineering (jasa kompresi gas) PLNE menjadi asset owner atas CNG Plant Bangkanai.

PT PLNE is located in the engineering sectors for the scope of generation, transmission, and distribution. Nevertheless, PT PLN (Persero) through the 2017 LPT RKAP GMS has implemented that "PT PLNE is required to more proactively increase contributions to consultancy services in each line of business activities of PT PLN (Persero)". Based on the referrals of the shareholders, PT PLNE will also develop product lines in the scope of engineering consultancy in the field of primary energy and sales and services.

Based on the contents of the mission "PLN SOLID", PT PLNE is expected to be able to become a company that has the capability and quality in the engineering sector with a focus on optimizing cost efficiency and leading industry capability, to become a reference for the capabilities of the PLN Group, in this case, an integrated engineering capabilities within the scope of Development & Construction which is capable and always developing as well as optimizing the Company's cost structure. Engineering revenue is influenced by the number of new investment projects of PT PLN (Persero) listed in the RUPTL, some competitions to another engineering company in increasing PT PLNE's existing market share, as well as the potential for market share dilution in the downward trend of new investment projects RUPTL 2019-2028. Up to date, the business or scope of business of PT PLNE is mostly Partial Solution. This means that works related to Generating, Transmission and Substation in the Electricity Sector in particular, are packaged and carried out as a separate part.

However, in order to maintain the sustainability of engineering revenues in the near future, PT PLNE will develop integrated engineering work (from feasibility studies to commissioning) for the PLN Group through the provision of integrated total solution engineering services consisting of comprehensive engineering work packages for each PT PLN's (Persero) investment project starts from the initiation stage of engineering, procurement stage engineering, construction stage engineering to operation & maintenance stage engineering.

In maintaining the business continuity and in overcoming the fluctuating conditions of the engineering service business. The company strives to remain in the service business that provides fixed income and is sustainable, through revenues from engineering development services (gas compression services) PLNE becomes the asset owner of the Bangkanai CNG Plant.

Investasi yang erat kaitannya terhadap kebutuhan yang diperlukan perusahaan guna menghadapi tantangan strategis, termasuk tantangan terhadap penyelarasan Portofolio Proses Bisnis "PLN SOLID". Komposisi Portofolio bisnis PT PLNE akan berubah, diantaranya adalah pelaksanaan investasi dan divestasi atas portofolio PT PLNE antara lain divestasi kepemilikan saham Perseroan dalam perusahaan EPC transmisi & distribusi (PT PPN), penyertaan modal pada perusahaan Joint Venture pabrik manufaktur Air Insulated Switchgear (PT CPSI) dan divestasi kepemilikan saham Perseroan dalam pengelolaan perusahaan IPP afiliasi (saham minoritas).

Dekom mendukung peran PLNE untuk lebih proaktif meningkatkan kontribusi pada jasa konsultasi engineering di setiap lini aktivitas bisnis internal PT PLN (Persero) maupun eksternal, pengembangan engineering gas dan mempertahankan bisnis CNG Bangkanai dan PPN agar bisnis Perseroan tetap berkembang.

Laporan Pengawasan Oleh Komite – Komite Dekom

Dalam melaksanakan tugasnya, Dekom dibantu oleh 2 (dua) organ Dekom, yaitu Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko & GCG. Dekom menilai bahwa selama tahun 2019, Komite-Komite tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Adapun pelaksanaan tugas Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko & GCG adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian terhadap Laporan Keuangan Tahun Buku 2018;
2. Mengevaluasi kinerja Perseroan serta kinerja SPI terhadap kinerja Perseroan;
3. Mengevaluasi Laporan Kegiatan Manajemen Risiko;
4. Mengevaluasi kepatuhan terhadap tata kelola Perseroan;
5. Melakukan evaluasi terhadap Profil Risiko Perseroan Tahun 2018;
6. Melakukan evaluasi terhadap RJPP 2018-2023 dan Profil Risiko RJPP 2018-2023;
7. Melakukan evaluasi terhadap RKAP 2019 dan Profil Risiko Perseroan;
8. Melakukan evaluasi tentang pengawasan pengendalian kontrak dan pelaksanaan pekerjaan.

Investments that are closely related to the needs that companies need to face strategic challenges, including challenges to aligning the "PLN SOLID" Business Process Portfolio. The composition of the PT PLNE business portfolio will change, including the implementation of investment and divestment of the PT PLNE portfolio, including divestment of the Company's share ownership in the EPC transmission & distribution company (PT PPN), equity participation in the Air Insulated Switchgear (PT CPSI) manufacturing plant Joint Venture company and the divestment of the Company's share ownership in the management of affiliated IPP companies (minority shares).

Dekom supports the role of PLNE to be more proactive in increasing its contribution to engineering consulting services in every line of internal and external business activities of PT PLN (Persero), developing gas engineering and maintaining the Bangkanai CNG and VAT business so that the Company's business continues to grow.

Oversight Reports by the Committees of the Committee

The Board of Commissioners is assisted by 2 (two) Board of Commissioners organs in carrying out its duties, namely the Audit Committee and the Risk Management & GCG Committee. Dekom considered that during 2019, the Committees had carried out their duties properly.

The duties of the Audit Committee and Risk Management & GCG Committee are as follow:

1. *Reviewing the Financial Statements for the 2018 Fiscal Year;*
2. *Evaluating the performance of the Company as well as the performance of the SPI toward the performance of the Company;*
3. *Evaluating the Risk Management Activity Report;*
4. *Evaluating compliance with corporate governance;*
5. *Evaluating the Company's 2018 Risk Profile;*
6. *Evaluating 2018-2023 RJPP and 2018-2023 RJPP Risk Profile;*
7. *Evaluating the 2019 RKAP and the Company's Risk Profile;*
8. *Evaluating the supervision of contract control and work implementation.*

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2019 tidak terjadi perubahan susunan Dekom sebagai berikut:

1. Sdr Tumpal Simarmata : Komisaris Utama
2. Sdr Julius Bobo : Komisaris
3. Sdr. Djoko Prasetyo : Komisaris
4. Sdr. Marzuqi : Komisaris

Penutup

Demikian laporan tugas pengawasan Dekom atas kinerja dan pelaksanaan usaha Perseroan di tahun 2019.

Dekom akan selalu berupaya untuk profesional dan independen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat agar kinerja Perseroan dapat selalu meningkat di masa yang akan datang.

Dekom sekali lagi menyampaikan penghargaan kepada Direksi dan seluruh karyawan PLNE yang berkat dedikasi dan kerja kerasnya, Perseroan telah mampu mencapai kinerja yang sangat baik pada tahun 2019.

Jakarta, 27 April 2019

Atas nama Dewan Komisaris

PT PLN Enjiniring

Tumpal M Simarmata

PLT Komisaris Utama

The Board of Commissioners Composition Change

There was no change in the composition of the The Board of Commissioners composition During 2019. The composition as follows:

1. Mr. Tumpal Simarmata : President Commissioner
2. Mr. Julius Bobo : Commissioner
3. Mr. Djoko Prasetyo : Commissioner
4. Mr. Marzuqi : Commissioner

Closing

This is the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners on the performance and implementation of the Company's business in 2019.

The Board of Commissioners will always strive to be independent and professional in carrying out its supervisory and advisory functions so that the Company's performance can always be improving in the future.

The Board of Commissioners once again expressed appreciation to the Board of Directors and all PLNE employees to their dedication and hard work. The Company has been able to achieve excellent performance in 2019.

Jakarta, 27 April 2019

On behalf of the Board of Commissioners

PT PLN Enjiniring

Tumpal M Simarmata

President Commissioner (executor of duties)

Hernadi Buhron

Direktur Utama
President Director



Laporan Direksi

The Board of Directors Report

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat, Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas semua usaha yang telah dilakukan dalam pencapaian prestasi yang telah diraih PLN Enjiniring pada tahun 2019. Perusahaan telah membukukan kinerja yang baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019.

Pada tahun 2019 ini PLN Enjiniring mencapai tingkat kesehatan Perusahaan digolongkan dalam kondisi "SEHAT" kategori "AA" dengan nilai 89,64. Di masa yang akan datang, Perusahaan tetap akan berusaha untuk mencapai kinerja terbaiknya.

Perusahaan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah disepakati oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk memenuhi harapan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sustainable business. Sehubungan dengan hal tersebut, kami atas nama Direksi PT PLN Enjiniring melaporkan kinerja Perusahaan tahun 2019, semoga penyajian laporan ini memberikan nilai tambahan yang signifikan baik bagi PLN Enjiniring dan Pemegang Saham.

Strategi Bisnis Perusahaan

Kondisi ekonomi 2019 yang membaik dibanding tahun 2018 telah memberikan tantangan sekaligus peluang bisnis bagi Perusahaan untuk mengokohkan eksistensi dalam industri ketenagalistrikan melalui penentuan sasaran dan strategi bisnis yang tepat. Penetapan strategi telah didasarkan pada Misi PT PLN Enjiniring sebagai berikut:

1. Menyediakan solusi enjiniring terpadu di bidang ketenagalistrikan
2. Mengembangkan bisnis EPC, IPP dan O&M dibidang ketenagalistrikan

The honorable Stakeholders and Shareholders, We give thanks to the Almighty God for all the efforts put to the achievements that have been accomplished by PLN Enjiniring in 2019. The company has recorded good performance according to the targets set in the Work Plan and the 2019 Corporate Budget (RKAP).

PLN Enjiniring reached the level of health in 2019. The company was classified in the "HEALTHY" category "AA" with a score of 89.64. The Company will continue to strive to achieve its best performance in the future.

The company is always guided by the vision and mission agreed upon all levels of management and employees to meet the expectations of shareholders and stakeholders in an effort to achieve a sustainable business. We on behalf of the Board of Directors of PT PLN Enjiniring report the Company's performance in 2019. We Hope that the presentation of this report will provide significant additional value for both PLN Enjiniring and Shareholders.

Company Business Strategy

The improved economic conditions in 2019 compared to the conditions in 2018 have provided challenges as well as business opportunities for the Company to strengthen its existence in the electricity industry through the determination of the right targets and business strategies. The strategy setting has been based on the PT PLN Enjiniring Mission as follows:

1. Provide integrated solutions in electrical engineering
2. Develop EPC, IPP and O&M ventures in the electricity field

3. Meningkatkan kompetensi enjiniring ketenagalistrikan
4. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

Dalam mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar PLN Enjiniring, Perusahaan fokus kepada pemenuhan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan harmonis dengan pelanggan. Pemenuhan kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan cara mendengarkan suara pelanggan, baik pelanggan saat ini maupun pelanggan potensial. Sedangkan untuk membangun hubungan dengan pelanggan dilakukan dengan pengelolaan hubungan pelanggan dan pengelolaan complain pelanggan.

Upaya kerjasama dengan berbagai pihak juga telah dilaksanakan untuk mendukung peningkatan tersebut antara lain: kerjasama dengan BUMN, mitra usaha lain, dan kerjasama luar negeri dengan CG Power dalam hal pembentukan Joint Venture pabrik switchgear yang telah diresmikan pada 20 Agustus 2018.

Kinerja Keuangan Tahun 2019

Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, kinerja PLN Enjiniring tahun 2019 telah menunjukkan hasil yang baik. Perusahaan mampu memenuhi harapan Pemegang Saham (shareholders) dengan pencapaian kinerja sesuai target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Kinerja PLN Enjiniring di 2019 menunjukkan hasil yang cukup baik dari sisi operasional maupun sisi keuangan.

Pendapatan PLN Enjiniring di 2019 tercatat sebesar Rp 1.000,48 miliar, menurun 10,45% atau Rp 116,78 miliar jika dibandingkan dengan 2018 yaitu sebesar Rp 1.117,27 miliar. Penurunan ini khususnya berasal dari pendapatan dari bidang konstruksi yang mencapai penurunan sebesar Rp 88,89 miliar atau 27,23% dari Rp 326,41 miliar di 2018 menjadi Rp 237,52 miliar di tahun 2019 serta penurunan dari operasional dan perawatan sebesar Rp 33,85 miliar atau 87,42% dari Rp 38,72 miliar di 2018 menjadi Rp 4,87 miliar di 2019.

Pencapaian target PLN Enjiniring di 2019 menunjukkan hasil yang bervariasi. Dari sisi posisi keuangan, jumlah asset, jumlah liabilitas, dan jumlah ekuitas perusahaan melampaui target yang telah di anggarkan pada RKAP 2019. Dari sisi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan

3. Raise competence in electrical engineering
4. Raise loyalty and satisfaction of customers

The Company focuses on meeting the customer satisfactions and building harmonious relationships in maintaining and increasing PLN Enjiniring's market share. The customer satisfaction fulfillment is done by listening to the customers' views and opinions, both current and potential customers. Meanwhile, relationships building with customers is done by managing customer relationships and managing customer complaints.

Collaborating efforts with various parties have also been carried out to support the increase of PLN Enjiniring's market share, including: cooperation with State Owned Enterprises (BUMN), cooperation with other business partners, and foreign cooperation with CG Power in terms of establishing a Switchgear Factory Joint Venture which was inaugurated on August 20, 2018.

Financial Performance in 2019

PLN Enjiniring's performance in 2019 has shown good results even with all those various challenges and opportunities. The company is able to meet the expectations of shareholders by performing achievements according to the target of the Company's Work Plan and Budget (RKAP). PLN Enjiniring's performance in 2019 has shown good results from both the operational and financial sector.

PLN Enjiniring revenue in 2019 was recorded at Rp. 1,000.48 billion, a decrease of 10.45% or Rp. 116.78 billion when compared to 2018's revenue, which was Rp. 1,117.27 billion. This decrease mainly came from the income of the construction sector which reached a decrease of IDR 88.89 billion or 27.23% from IDR 326.41 billion in 2018 to IDR 237.52 billion in 2019 and a decrease from operations and maintenance of IDR 33.85 billion or 87.42% from Rp 38.72 billion in 2018 to Rp 4.87 billion in 2019.

The achievement of PLN Enjiniring targets in 2019 has shown mixed results. In terms of financial position, total assets, total liabilities, and total equity of the company exceeded the targets which have been budgeted in the 2019 RKAP. In terms of Profit and Loss and other

Komprehensif lain,realisasi pendapatan mencapai 77,90% atau sebesar Rp 1.000,49 miliar dari RKAP 2019 yang ditargetkan sebesar Rp 1.284,34 miliar. Beban Operasi 2019 pada triwulan IV 2019 mencapai Rp 868.66 miliar atau 76,47% dibandingkan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 1.135,92 miliar. Realisasi laba rugi operasi pada triwulan IV 2019 sebesar Rp 131,82 miliar atau mencapai88,82% dari RKAP 2019 yang di targetkan sebesar Rp 148,42 miliar. Realisasi laba tahun berjalan pada triwulan IV 2019 sebesar Rp124,94miliar atau mencapai 93,17% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp 134,10 miliar. Sedangkan untuk realisasi kas dan setara kas akhir tahun pada Laporan Arus Kas tercatat sebesar Rp 226,82 miliar atau mencapai 72,09% dari RKAP yang telah dianggarkan sebesar Rp 314,64 miliar.

Comprehensive Income, revenue realization reached 77.90% or IDR 1,000.49 billion of The 2019 RKAP which was targeted at IDR 1,284.34 billion. Operating Expenses in the fourth quarter of 2019 reached IDR 868.66 billion or 76.47% compared to the 2019 budget of IDR 1,135.92 billion. The realization of operating profit and loss in the fourth quarter of 2019 was IDR 131.82 billion or 88.82% of the 2019 RKAP which was targeted at IDR 148.42 billion. The realization profit for the current year in the fourth quarter of 2019 was IDR 124.94 billion or reached 93.17% of the 2019 budget of IDR 134.10 billion. Meanwhile, the realization of cash and cash equivalents at the end of the year was recorded at Rp. 226.82 billion or 72.09% of the RKAP which had been budgeted at Rp. 314.64 billion.

Kinerja Non Keuangan 2019

Direksi berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Hal ini tercermin dari upaya Perusahaan melakukan pengelolaan hubungan pelanggan dan pengelolaan komplain pelanggan. Dalam menjalankan operasional usaha, PLN Enjiniring didukung oleh 869 sumber daya manusia, yang dilengkapi dengan keahlian dan kompetensi sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Perusahaan terus meningkatkan engagement pegawai melalui berbagai kegiatan, termasuk mengadakan acara coffee morning yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Berbagai program pelatihan dan pengembangan telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja pegawai. Sedangkan pada aspek pengakuan masyarakat/ stakeholder atas pengelolaan Perusahaan, PLN Enjiniring telah mendapatkan berbagai penghargaan. Penghargaan yang diperoleh Perusahaan antara lain Top 5 Electrical Service Company, Indonesia Best Electricity Award. SNI Award 2018 – Peringkat Perunggu

Non Financial Performance in 2019

The Board of Directors is committed to improving services to the customers. This is reflected in the Company's efforts to manage customer relationships and to manage customer complaints. PLN Enjiniring is supported by 869 human resources in carrying out its business operations, who are equipped with skills and competencies according to their duties and responsibilities. The company continues to improve employee engagement through various activities, including holding a coffee morning which is routinely held every month. Various training and development programs have been carried out in order to improve employee competency and work quality. Meanwhile, in the aspect of public/stakeholder recognition for the management of the Company, PLN Enjiniring has received various awards. The awards received by the Company include the Top 5 Electrical Service Company, Indonesia Best Electricity Award. SNI Award 2018 - Bronze Rating.

Key Performance Index (KPI)

Dalam kesempatan ini kami laporkan terkait KPI PT PLN Enjiniring. KPI terdiri dari 5 (lima) perspektif sesuai Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Perspektif Fokus Pelanggan
 - a. Indeks Kepuasan Pelanggan

Key Performance Index (KPI)

We will be reporting the KPI of PT PLN Enjiniring in this occasion. KPI consists of 5 (five) perspectives according to the Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Company's Shareholders, that follows :

1. Customer Focus Perspective
 - a. Customer Satisfaction Index

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Perspektif Efektivitas Produk dan Proses <ol style="list-style-type: none"> a. Engineering First Pass Yield b. Engineering On-Time Delivery (OTD) c. Produktivitas Supervisi Konstruksi 3. Perspektif Fokus Tenaga Kerja <ol style="list-style-type: none"> a. HCR (Human Capital Readiness) b. OCR (Organizational Capital Readiness) c. Komposisi Enjinir Subletting untuk Produk Enjiniring (FS, Biddoc dan Engineering Design) 4. Perspektif Keuangan dan Pasar <ol style="list-style-type: none"> a. Pencapaian Investasi b. Sinergi Antar Anak Perusahaan Lain c. Efisiensi Biaya Enjiniring oleh Sub Consultant dan Outsourcing 5. Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Good Corporate Governance (GCG) b. Penyelesaian Temuan Auditor c. Kepatuhan pada K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lingkungan Hidup) | <ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Product and Process Effectiveness Perspective</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Engineering First Pass Yield</i> b. <i>Engineering On-Time Delivery (OTD)</i> c. <i>Construction Supervision Productivity</i> 3. <i>Manpower Focus Perspective</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>HCR (Human Capital Readiness)</i> b. <i>OCR (Organizational Capital Readiness)</i> c. <i>Composition of Subletting Engineers for Engineering Products (FS, Biddoc and Engineering Design)</i> 4. <i>Market and Financial Perspectives</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Investment Achievements</i> b. <i>Synergy Among Other Subsidiaries</i> c. <i>Engineering Cost Efficiency by Sub Consultants and Outsourcing</i> 5. <i>Leadership, Governance and Social Responsibility Perspectives</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> b. <i>Auditor Findings Settlement</i> c. <i>Compliance to K3LH (Health, Safety & Environment)</i> |
|--|---|

Dari hasil pencapaian realisasi KPI PLNE sampai dengan TW IV (audited) Tahun 2019, diperoleh skor sebesar 89.64 berdasarkan Edaran Direksi PT PLN (Persero) No 0001.E/DIR/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Direktorat, Unit dan Anak Perusahaan.

Based on the Decree of the Directors of PT PLN (Persero) No. 0001.E/DIR/2019 concerning Guidelines for the Implementation of the Calculation of the Organizational Performance Score of the Directorate, Units and Subsidiaries, a score of 89.64 was obtained from the results of the realization of the PLNE KPI up to Q IV (audited) in 2019.

Berdasarkan penilaian tersebut, tingkat kesehatan Perusahaan sampai dengan Triwulan IV tahun 2019 (audited) digolongkan dalam kondisi "SEHAT" kategori "AA" dengan nilai "89,64".

Based on this assessment, the Company's health level up to the fourth quarter of 2019 (audited) was classified as "HEALTHY" in the "AA" category with a score of "89.64".

Kendala-kendala yang Dihadapi

Direksi menyadari bahwa pencapaian kinerja dan prestasi yang telah diraih oleh PLN Enjiniring tidak terlepas dari berbagai kendala. Namun demikian, Perusahaan telah berhasil melakukan upaya kebijakan terhadap kendala yang ada sehingga tidak mempengaruhi kinerja Perusahaan secara signifikan.

Obstacles Faced by PLN Enjiniring

The Board of Directors realizes that the achievements and the performances that have been achieved by PLN Enjiniring are inseparable from various obstacles. However, the Company has succeeded in making policy measures against these existing obstacles so that it does not significantly affect the Company's performance.

Kendala-kendala yang dihadapi Perseroan di 2019 berasal dari pihak eksternal dan internal. Kendala eksternal antara lain adalah mudahnya muncul perusahaan konsultan sebagai pesaing dengan billing rate rendah yang tidak mencerminkan kualitas sehingga menyebabkan penurunan harga pasar. Kendala eksternal utama lainnya adalah perubahan nilai kurs yang mempengaruhi siklus kas bisnis enjiniring.

Sedangkan, kendala internal utama terkait dengan kurangnya enjinir yang berpengalaman untuk mendukung perkembangan bisnis. Di samping itu, Perusahaan merupakan pemain baru dalam bisnis EPC dan IPP sehingga belum memiliki pengalaman yang cukup.

Untuk mengatasi kendala-kendala eksternal, Perusahaan telah melakukan strategi strategi antara lain dengan memitigasi risiko, melakukan efisiensi dan penyederhanaan proses bisnis, dan melakukan currency hedging yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan, untuk mengatasi kendala-kendala internal, telah dilakukan strategi pengembangan system manajemen SDM yang berbasis kompetensi dan melaksanakan program sertifikasi enjinir.

Prospek Usaha

Prospek Perusahaan di masa depan tidak terlepas dari Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik jangka panjang PT PLN (Persero) 2019-2028 sebagai perusahaan induk. Merujuk pada Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PLN selaku Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus, dalam jumlah yang cukup dan dengan mutu dan keandalan yang baik. Dengan demikian PLN harus mampu melayani kebutuhan tenaga listrik saat ini maupun di masa yang akan datang agar PLN dapat memenuhi kewajiban yang diminta oleh Undang-Undang tersebut. Kebutuhan tenaga listrik pada suatu daerah didorong oleh tiga faktor utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, program elektrifikasi dan pengalihan captive power ke jaringan PLN. Pertumbuhan ekonomi dalam pengertian yang sederhana adalah proses meningkatkan output barang dan jasa. Dampak dari pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang mendorong

The obstacles faced by the Company in 2019 came from external and internal parties. External obstacles include the the easily emerge of consulting firms with low billing rates that do not reflect quality as competitors causing a decline in market prices. Another major external obstacle is changes in exchange rates which affect the cash cycle of the engineering business.

Meanwhile, the main internal obstacle relates to the lack of experienced engineers to support business development. In addition, the Company is a new player in the EPC and IPP business and thus does not have sufficient experience yet.

The Company has implemented some strategies to overcome these external obstacles, by mitigating risks, carrying out efficiency and simplification of business processes, and implementing currency hedging as needed. Meanwhile, to overcome the internal obstacles, a competency-based HR management system development strategy and an engineer certification program has been implemented.

Business Prospects

The prospect of the company in the future is inseparable from the long-term General Plan for the Provision of Electricity for PT PLN (Persero) 2019-2028 as the holding company. Referring to Article 28 and Article 29 of Law Number 30 of 2009 concerning Electricity, PLN as the Holder of a Business Permit to Supply Electricity for the public interest is required to provide electricity continuously, in sufficient quantities and in good qualities and reliabilities. Therefore, PLN must be able to serve current and future electricity needs so that PLN can fulfill the obligations required by the Law. The need for electricity in an area is driven by three main factors, namely economic growth, the electrification program and the transfer of captive power to the PLN network. Economic growth in a more simple term is the process of increasing the output of goods and services. The impact of economic growth is an increase in people's income which will encourage an increase in demand for electrical goods/equipment such as televisions, air conditioners,

peningkatan permintaan barang-barang/peralatan listrik seperti televisi, pendingin ruangan, lemari es dan lainnya. Akibatnya permintaan tenaga listrik akan meningkat.

Faktor kedua adalah program elektrifikasi yang berdampak terhadap penambahan jumlah pelanggan. Sebagai upaya PLN untuk mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi maka PLN perlu melistriki semua masyarakat yang ada dalam wilayah usahanya. PLN dalam RUPTL berencana untuk menambah pelanggan baru yang besar, penambahan pelanggan baru tersebut tidak hanya mencakup mereka yang berada di wilayah usaha PLN saat ini tetapi juga mencakup mereka yang berada di luar wilayah usaha.

Penambahan pelanggan terbesar masih terjadi pada sektor rumah tangga, yaitu rata-rata 3,2 juta per tahun, diikuti sektor bisnis dengan rata-rata 140 ribu pelanggan per tahun, sektor publik rata rata 82 ribu pelanggan per tahun, dan terakhir sektor industri rata-rata 2 ribu pelanggan per tahun.

Faktor ketiga yang menjadi pendorong pertumbuhan permintaan tenaga listrik PLN adalah pengalihan dari captive power (penggunaan pembangkit sendiri berbahan bakar minyak) menjadi pelanggan PLN. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kebutuhan listrik adalah kemampuan finansial perusahaan untuk melakukan investasi dalam rangka melayani pertumbuhan kebutuhan pelanggan dan masyarakat untuk mendapatkan pasokan listrik yang cukup dan andal. Selain itu, terdapat beberapa peluang yang dimiliki oleh PLN Enjiniring yang dapat dijadikan sebagai prospek usaha ke depan antara lain, yaitu:

- a. Rencana investasi PT PLN (Persero) setiap tahun masih relatif besar untuk mengejar Rasio elektrifikasi nasional yang masih rendah.
- b. Jumlah pesaing terbatas, terutama dalam pekerjaan enjiniring hulu.
- c. UU No.30 tahun 2009 membuka peluang untuk pengembangan listrik tidak hanya oleh PT PLN (Persero) sehingga terbuka peluang pasar di PEMDA dan IPP
- d. Dapat menjadi pendorong atau pemrakarsa untuk implementasi teknologi baru

refrigerators and others. As a result, the demand for electricity will increase.

The second factor is the electrification program which has an impact on increasing the number of customers. As PLN's effort to support the Government's program in increasing the electrification ratio, PLN needs to provide electricity to all people in its business area. PLN in the RUPTL plans is about to add large new customers, the addition of new customers does not only include those who are in the current PLN business area but also include those who are outside the business area.

The largest increase in customers still occurred in the household sector, namely an average of 3.2 million per year, followed by the business sector with an average of 140 thousand customers per year, the public sector with an average of 82 thousand customers per year, and finally the industrial sector with an average of 2 thousand customers per year.

The third factor which drives the growth in demand for PLN electricity is the transfer from captive power (the use of self-propelled oil-fired power plants) to become PLN customers. Another factor that can affect the growth of electricity demand is the company's financial ability to invest in serving the growing needs of customers and the public to get adequate and reliable electricity supply. In addition, there are several opportunities owned by PLN Enjiniring that can be used as future business prospects, including:

- a. *The annual investment plan of PT PLN (Persero) is still relatively large to catch up with the low national electrification ratio.*
- b. *The number of competitors is limited, especially in upstream engineering jobs.*
- c. *Law of The Republic of Indonesia Number 30 of 2009 opens up opportunities for electricity development not only by PT PLN (Persero) so there are market opportunities in Regional Governments (PEMDA) and IPP*
- d. *The initiator for the implementation of new technology*

- e. Kecenderungan untuk mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan khususnya di bidang energi terbarukan
 - f. Mitra kerja cukup banyak
 - g. Masih terbuka pasar di negara-negara Asia Tenggara yang perkembangan ketenagalistrikan nya belum maju dalam rangka kerja sama negara – negara ASEAN
 - h. Regulasi yang membuka peluang penunjukkan langsung dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan Perusahaan Terafiliasi BUMN, maupun sebaliknya melalui PERMEN BUMN No:PER-15/MBU/2015.
- e. *The tendency to implement environmentally friendly technology, especially in the field of renewable energy*
 - f. *A large number of partners*
 - g. *The market is still open in Southeast Asian countries where electricity development is not yet advanced in the framework of cooperation between ASEAN countries*
 - h. *Regulations that open up opportunities for direct appointment of SOEs (BUMN), SOEs (BUMN) Subsidiaries and SOEs (BUMN) Affiliated Companies, or vice versa through SOEs Ministerial Regulations (PERMEN BUMN) No: PER-15 / MBU / 2015.*

Dalam menjawab berbagai peluang usaha tersebut dan sejalan dengan transformasi bisnis Perusahaan yang sudah tertuang pada Visi – Misi di dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) tahun 2019-2024, PLN Enjiniring telah melakukan beberapa pengembangan usaha, antara lain: bisnis EPC, bisnis IPP dan bisnis O&M). Pengembangan Bisnis Operation & Maintenance (O&M) diawali dengan pekerjaan O&M CNG Plant Sei Gelam – Jambi, Owner dan O&M CNG Plant Bangkanai dan O&M PLTMG Bangkanai.

Responding to these various business opportunities and in line with the Company's business transformation as stated in the Vision - Mission in the 2019-2024 Long Term Plan (RJP), PLN Enjiniring has carried out several business developments, including: EPC business, IPP business and O&M business. The Operation & Maintenance (O&M) Business Development began with the O&M work of the Sei Gelam CNG Plant - Jambi, the owner and the O&M of the Bangkanai CNG Plant and the O&M PLTMG Bangkanai.

Penerapan Good Corporate Governance

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan proses jangka panjang yang memberikan hasil berupa sustainable values. Aktualisasi GCG sebagai sebuah sistem dilakukan melalui proses internal yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai.

Untuk meninjau praktek GCG 2019, PT PLN Enjiniring telah menunjuk Auditor Independen untuk melaksanakan Self Assessment GCG di PLN Enjiniring. Hasil Self Assessment yang dilakukan oleh Auditor Independen, Perusahaan mendapatkan skor 90.09. Dengan demikian, Perusahaan masuk dalam kategori "Sangat Baik" atas pelaksanaan GCG di tahun 2019. Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG, PLN Enjiniring telah menyempurnakan berbagai GCG Soft Structure diantaranya dengan melakukan review terhadap kebijakan/prosedur pengadaan barang/jasa dan Pedoman GCG yang disempurnakan. Pada tahun yang sama, Perusahaan melaksanakan acara Customer Gathering dengan mengundang sebagian stakeholder PLN Enjiniring.

Implementation of Good Corporate Governance

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a long-term process that results in sustainable values. GCG actualization as a system is carried out through an internal process involving the Board of Commissioners, Directors and all employees.

PT PLN Enjiniring has appointed an Independent Auditor to carry out a GCG Self Assessment at PLN Enjiniring to make some reviews on the 2019 GCG practice. The Company received a score of 90.09 as the result of the Self Assessment conducted by the Independent Auditor. Thus, the Company was included in the "Very Good" category for the implementation of GCG in 2019. In order to improve the quality of GCG implementation, PLN Enjiniring has perfected various GCG Soft Structures by reviewing its policies/procedures for procurement of goods/services and enhancing the GCG Guidelines. In the same year, the Company held a Customer Gathering event by inviting some PLN Enjiniring stakeholders.

Perubahan Komposisi Direksi

Sampai dengan bulan Desember tahun 2019, struktur Direksi PLN Enjiniring tidak mengalami perubahan dengan komposisi seorang sebagai Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur. Secara keseluruhan Kepengurusan Direksi sampai dengan tahun 2019, adalah sebagai berikut: Hernadi Buhron sebagai Direktur Utama, Ultrisza Mednawarman sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha, Alfi Zamzami sebagai Direktur Keuangan dan SDM, dan Yanuar Hakim sebagai Direktur Enjiniring.

Penutup

Akhir kata, kami atas nama Direksi menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah, regulator, masyarakat, pemegang saham, pelanggan, mitra usaha serta seluruh pegawai dan keluarga besar PLN Enjiniring atas seluruh dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan. Semoga dengan dukungan tersebut, PLN Enjiniring akan semakin maju mewujudkan kinerja terbaik dan terus berperan dalam mensejahterakan masyarakat.

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring

HERNADI BUHRON

Direktur Utama

Change in the Composition of the Board of Directors

As of December 2019, the structure of the PLN Enjiniring Board of Directors has not been changed with the composition of one President Director and 3 (three) Directors. The overall Board of Directors management until 2019 is as follows: Hernadi Buhron as President Director, Ultrisza Mednawarman as Director of Marketing and Business Development, Alfi Zamzami as Director of Finance and Human Resources, and Yanuar Hakim as Director of Engineering.

Closing

Finally, on behalf of the Board of Directors, we would like to express our appreciation and gratitude to the government, regulators, society, shareholders, customers, business partners and all employees and the extended family of PLN Enjiniring for all the support and trust that have been given. We deliver this report in the hope that PLN Enjiniring will progressively achieve the best performance and continue to play a role in the welfare of the community.

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring

HERNADI BUHRON

President Director



Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Tahunan 2019

Management Responsibility On Annual Report 2019

**Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris
Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2019
Pt Prima Layanan Nasional Enjiniring**

*Letter Of Statement Of Members Of The Board Of Commissioners
Responsibility For Annual Report And Consolidated Financial Statements Year 2019
Pt Prima Layanan Nasional Enjiniring*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Prima Layanan Nasional Enjiniring tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Prima Layanan Nasional Enjiniring.

We, the undersigned hereby declare that all information in the Annual Report of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring of 2018 has been fully recorded and fully responsible for the accuracy of the contents of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring's Annual Report and Consolidated Financial Statements.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
This statement was made with actual.

Jakarta, 23 Mei 2020
Jakarta, 23 May 2020

Dewan Komisaris
Boards of Commissioners



Tumpal M Simarmata
Komisaris Utama
President Commissioner



Djoko Prasetyo
Komisaris
Commissioner



Marzuqi
Komisaris
Commissioner



Julius Bobo
Komisaris
Commissioner

Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Tahunan 2019

Management Responsibility On Annual Report 2019

**Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris
Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2019
Pt Prima Layanan Nasional Enjiniring**

*Letter Of Statement Of Members Of The Board Of Commissioners
Responsibility For Annual Report And Consolidated Financial Statements Year 2019
Pt Prima Layanan Nasional Enjiniring*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Prima Layanan Nasional Enjiniring tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Prima Layanan Nasional Enjiniring.

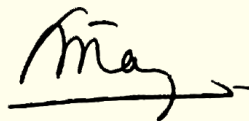
We, the undersigned hereby declare that all information in the Annual Report of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring of 2018 has been fully recorded and fully responsible for the accuracy of the contents of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring's Annual Report and Consolidated Financial Statements.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
This statement was made with actual.

Jakarta, 23 Mei 2020
Jakarta, 23 May 2020

Dewan Direksi

Boards of Commissioners



Hernadi Buhron

Direktur Utama
President Director



Yanuar Hakim
Direktur Enjiniring
Engineering Director



Ultrisza Mednawarman
Direktur Pemasaran dan
Pengembangan Usaha
*Director of Marketing and
Business Development*



Alfi Zamzami
Direktur Keuangan dan
SDM
*Director of Finance
and Human Resources*

PROFIL PERUSAHAAN

The Company's Profile





Profil Perusahaan

The Company Profile

Identitas Perusahaan

Company identity

Nama Perusahaan <i>Name of the Company</i>	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring <i>PT Prima Layanan Nasional Enjiniring</i>
Kantor Pusat <i>Head Office</i>	Jalan Ciputat Raya No. 123, Kebayoran Lama – Jakarta 12310 Telephone. (62-21) 275 10363, Fax. (62-21) 2751062 <i>Ciputat Raya Street, No. 123, Kebayoran Lama – Jakarta 12310 Phone. (62-21) 275 10363, Fax. (62-21) 2751062</i>
Bidang Usaha <i>Business Fields</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Enjiniring dan/atau manajemen proyek, termasuk integrator ketenagalistrikan • <i>Engineering consulting and/or project management services, including the electricity project integrator;</i> • Studi Sistem Kelistrikan; • <i>Electrical system studies;</i> • Studi AMDAL; • <i>Environmental impact analysis (AMDAL);</i> • Teknologi Informasi ; • <i>Information Technology (IT);</i> • Pemeliharaan dan/atau pengoperasian nidadang pembangkit, transmisi dan/atau distribusi ; • <i>Maintenance and/or generator operating, transmission and/or distribution;</i> • Pengolahan, penimbunan, transportasi, niaga, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi minyak dan/atau gas bumi. • <i>Processing, stockpiling, transporting, trading, operating and oil and/or natural gas installation's maintaining;</i>
Status Perusahaan <i>Status of the Company</i>	Entitas anak PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) <i>Subsidiary entities of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)</i>
Kepemilikan <i>Ownership</i>	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 99.90% <i>PT Perusahaan Listrik Negara 99.90%</i> Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN (Persero) 0.10% <i>Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN 0.10%</i>
Tanggal Pendirian <i>Date of Establishment</i>	3 Oktober 2002 <i>October 3, 2002</i>

Dasar Hukum Pendirian <i>Legas Basis Establishment</i>	Akta Nomor 9 oleh Notaris Haryanto, SH <i>The Deed of Incorporation Number 9 by Haryanto, SH., as a notary in Jakarta</i>
Modal Dasar <i>Authorized Capital</i>	Rp25.000.000.000; <i>Rp25.000.000.000;</i>
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh <i>Fully Deposited And Issued Capital</i>	Rp25.000.000.000; <i>Rp25.000.000.000;</i>
Jumlah Karyawan <i>Number of Employees</i>	1114 Orang <i>1114 employees</i>
Website <i>Website</i>	www.plne.co.id <i>www.plne.co.id</i>
Layanan Informasi <i>Information Services</i>	Sekretaris Perusahaan Jalan Ciputat Raya No. 123, Kebayoran Lama - Jakarta 12310 Telp. (62-21) 275 10363 Fax. (62-21) 2751062 Email : contact@plne.co.id <i>Company's Secretary</i> <i>Jalan Ciputat Raya No. 123, Kebayoran Lama - Jakarta 12310</i> <i>Phone. (62-21) 275 10363,</i> <i>Fax. (62-21) 2751062</i> <i>Email : contact@plne.co.id</i>

Riwayat Singkat

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (untuk selanjutnya disebut dengan PLN Enjiniring atau Perusahaan) merupakan perusahaan terkemuka di bidang konsultasi dan enjiniring. PLN Enjiniring yang merupakan Entitas Anak PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) didirikan berdasarkan akta No.9 tanggal 3 Oktober 2002 oleh Haryanto, SH., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-00184.HT.01.01TH.2003 tanggal 6 Januari 2003 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 19, Tambahan No. 1891 tanggal 7 Maret 2003.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dengan akta No. 22 tanggal 12 Desember 2012 Lenny Janis Ishak, SH., notaris di Jakarta mengenai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi perubahan tersebut telah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No.AHU-05116.AH.01.02 tanggal 8 Februari 2013. Sampai dengan tahun 2016 perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama.

Bidang Usaha

■ Kegiatan usaha menurut anggaran dasar

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi usaha enjiniring, pengadaan dan konstruksi, operasi, serta pemeliharaan pada bidang ketenagalistrikan dan non-ketenagalistrikan sebagai berikut :

1. Jasa konsultasi enjiniring dan/atau manajemen proyek, termasuk integrator proyek ketenagalistrikan;
2. Studi sistem kelistrikan;
3. Studi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
4. Teknologi Informasi (TI);
5. Pendidikan dan pelatihan;
6. Penelitian dan pengembangan;

A Brief History

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (herein after referred as PLN Enjiniring or the Company) is a leading company in the field of consulting and of engineering. PLN Enjiniring which is a subsidiary of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) was established based on the Deed of Incorporation Number 9 dated on October 3, 2002 by Haryanto, SH., as a notary in Jakarta. The deed of incorporation was approved by the Minister of Justice and Human Rights in The Decree Number C-00184.HT.01.01TH.2003 dated on January 6, 2003 and announced in the State Gazette Number 19, and in the Appendix of the State Gazzete Number 1891 dated on March 7, 2003.

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment was by the Deed of Incorporation Number 22 dated on December 12, 2012 by Lenny Janis Ishak, SH., as a notary in Jakarta regarding the duties, the authorities and the obligations of the Board of Directors. These changes have been registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with The Decree Number AHU-05116.AH.01.02 dated on February 8, 2013. The Company has never made a change on its name until 2016.

Business Scopes

■ Business activities according to the articles of association

In accordance to the article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the company activities includes engineering, procurement and construction, operation and maintenance in the electricity and non-electricity sectors as follows:

1. *Engineering consulting and/or project management services, including the electricity project integrator;*
2. *Electrical system studies;*
3. *Environmental impact analysis (AMDAL);*
4. *Information Technology (IT);*
5. *Educational and training;*
6. *Research and development;*

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 7. Penyediaan tenaga listrik; 8. Perencanaan, pengadaan, pembangunan dan/atau pemasangan (jasa konstruksi) bidang pembangkitan, transmisi dan/atau distribusi; 9. Pemeliharaan dan/atau pengoperasian bidang pembangkitan, transmisi dan/atau distribusi; 10. Pengolahan, penimbunan, transportasi, niaga, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi minyak dan/atau gas bumi; 11. Penyediaan/manufaktur berbagai peralatan elektrik untuk transmisi dan distribusi listrik. | <ul style="list-style-type: none"> 7. <i>Electric power supply;</i> 8. <i>Planning, procurement, construction and/or installation (construction services) in the field of power plants, transmission and/or distribution;</i> 9. <i>Maintaining and/or power plants operating, transmission and/or distribution;</i> 10. <i>Processing, stockpiling, transporting, trading, operating and oil and/or natural gas installation's maintaining;</i> 11. <i>Provision/manufacture of various electrical equipment for transmission and electricity's distribution.</i> |
|---|---|

Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Kegiatan usaha yang berjalan saat ini dikelompokkan kedalam tiga bidang usaha, yaitu:

■ Jasa Enjiniring

Jasa Enjiniring berupa jasa konsultansi enjiniring di industri ketenagalistrikan meliputi bidang Pembangkit, Transmisi dan Distribusi, serta jasa supervisi Konstruksi.

■ Jasa Non Enjiniring

Jasa Non Enjiniring berupa penyediaan jasa kompresi gas, bisnis *Engineering Procurement Construction* (EPC), bisnis manufaktur Material Transmisi Utama (MTU), serta bisnis *Independent Power Producer* (IPP).

Business Activities Undertaken

The business activities currently running are grouped into three business major, namely:

■ Engineering Services

Engineering services in the form of engineering consultant services in electricity industry covering the fields of Power Plant, Transmission and Distribution, as well as construction supervision services.

■ Non Engineering Service

Non-engineering services include the provision of gas compression services, the Business Engineering, Procurement, Construction (EPC), manufacture business, the Main Transmission Material (MTU) manufacture, and the Independent Power Producer (IPP).

Produk/jasa yang Dihasilkan*Products / Services Produced***Tabel Produk dan Jasa yang Dihasilkan***Table of Products and Service Produced*

Pembangkitan <i>Generation</i>	Transmisi dan Distribusi <i>Transmission and Distribution</i>	Konstruksi <i>Construction</i>
Studi Kelayakan <i>Feasibility Study</i>	Survei <i>Survey</i>	Supervisi Konstruksi <i>Construction Supervision</i>
Penyelidikan Tanah <i>Soil Investigation</i>	Penyelidikan Tanah <i>Soil Investigation</i>	Pengawasan QA QC <i>QA/QC Supervision</i>
Penyusunan Bid Dokumen <i>Bidding Document Preparation</i>	Penyusunan Basic Design <i>Basic Design Preparation</i>	
Penyusunan Request for Proposal <i>Request for Proposal Preparation</i>	Penyusunan Bid Dokumen <i>Bidding Document Preparation</i>	
Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir <i>Establish Estimated Engineer Price</i>	Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir <i>Establish Estimated Engineer Price</i>	
Pendampingan dalam Proses Tender <i>Assistance in Tendering Process</i>	Pendampingan dalam Proses Tender <i>Assistance in Tendering Process</i>	
Pendampingan dalam proses Contract Discussion Agreement <i>Assistance in Contract Discussion Agreement</i>	Pendampingan dalam proses Contract Discussion Agreement <i>Assistance in Contract Discussion Agreement</i>	
Review Desain <i>Design Review</i>	Review Desain <i>Design Review</i>	
Pengawasan QA QC <i>QA/QC Supervision</i>	Pengawasan QA QC <i>QA/QC Supervision</i>	
Studi AMDAL dan UKL/UPL <i>Study on Environment Impact and UKL/UPL</i>	Pendampingan dalam Due Diligent Visit <i>Assistance in Due Diligent Visit</i>	
Studi Lainnya <i>Other Studies</i>	Studi Sistem Ketenagalistrikan <i>Electrical Power System Study</i> Studi AMDAL dan UKL/UPL <i>Study on Environment Impact and UKL/UPL</i> Studi Lainnya <i>Other Studies</i>	

Jasa Non Enjiniring

Jasa non enjiniring meliputi pembangunan Transmisi dan Gardu Induk melalui Anak Perusahaan EPC, penyediaan Material Transmisi Utama (MTU) yang terdiri dari *Circuit Breaker, Current Transformer, Capacitor Voltage Transformer, Lightning Arrester* melalui perusahaan joint venture, dan bisnis *Independent Power Producer (IPP)* melalui perusahaan afiliasi/kepemilikan saham.

Jasa lainnya

Jasa lainnya meliputi Bidang Informasi dan Teknologi, yaitu berupa usaha pengembangan, rollout dan pendampingan kepatuhan pengguna aplikasi PINTAR yang merupakan aplikasi pengurusan pengadaan tanah dan perizinan pembangunan ketenagalistrikan di seluruh Indonesia.

Non-Engineering Services

Non-engineering services include the Transmission and Substation construction through EPC Subsidiaries, provision of Main Transmission Material (MTU) consisting of Circuit Breakers, Current Transformers, Capacitor Voltage Transformers, Lightning Arrester through joint venture companies, and Independent Power Producer (IPP) business through company through affiliate/share owned.

Other Services

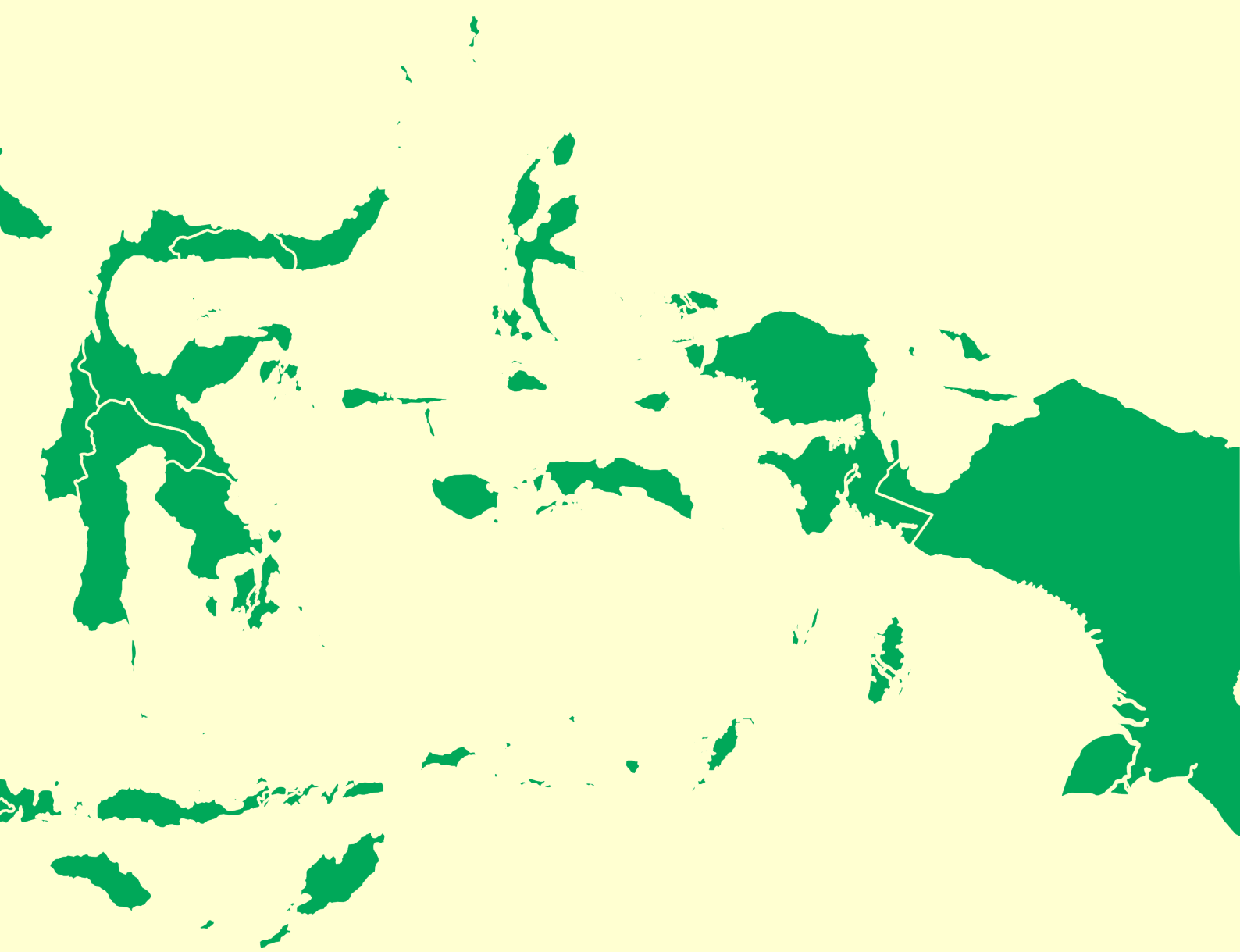
Other services include the Information and Technology Sector, namely in the form of development efforts, rollouts and assistance for compliance with PINTAR application users, which are applications for land acquisition management and electricity development licensing throughout Indonesia.

Peta Lokasi Proyek

Project Location Map



1. Ambon, Maluku
2. Arun, NAD
3. Balikpapan, Kalimantan Timur
4. Bandung, Jawa Barat
5. Bangka Belitung
6. Bangkanai, Kalimantan Tengah
7. Batam
8. Cilegon, Banten
9. Gorontalo, Sulawesi
10. Grati, Jawa Timur
11. Jakarta
12. Jayapura, Papua
13. Kalimantan Barat
14. Kotabaru, Kalimantan
15. Lampung
16. Makassar



17. Maros, Sulawesi Selatan
18. Medan, Sumatera Utara
19. Nagan Raya, NAD
20. Nias, Sumatera Utara
21. Padang Sidempuan, Sumatera Utara
22. Pangkalan Susu, Sumatera Utara
23. Pamaron, Bali
24. Peranap, Riau
25. Siberida, Kepulauan Riau
26. Sorong, Papua
27. Sumedang, Jawa Barat
28. Takalar, Sulawesi
29. Tarakan
30. Timika, Papua
31. Yogyakarta
32. NTT

Struktur Organisasi

Organization Structure

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

VISION, MISSION AND COMPANY CULTURE

VISI | VISION

Menjadi Perusahaan Enjiniring Ketenagalistrikan Terkemuka di Asia yang Tumbuh Berkembang dan Memenuhi Harapan Stakeholders

To become Asia's leading power engineering company sustainably growing and satisfying its stakeholders.

MISI

1. Menyediakan solusi enjiniring terpadu di bidang ketenagalistrikan
2. Mengembangkan bisnis EPC, IPP dan O&M di bidang ketenagalistrikan
3. Meningkatkan kompetensi enjiniring ketenagalistrikan
4. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan

MISSION

1. Provide integrated solutions in electrical engineering
2. Develop EPC, IPP and O&M ventures in the electricity field
3. Raise competence in electrical engineering
4. Raise loyalty and satisfaction of customers

Visi dan Misi PLN Enjiniring tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor. 13.001.K/010/DIR/II/2012 tentang Perumusan Visi Misi Tata Nilai dan Motto Perusahaan tanggal 13 Februari 2012.

The vision and mission of PLN Enjiniring has been stipulated in the Decree of the Board of Directors Number. 13.001.K / 010 / DIR / II / 2012 concerning the Formulation of the Vision, Mission, Values and Motto of the Company dated February 13, 2012.

Budaya Perusahaan

PLN Enjiniring menanamkan nilai-nilai budaya yang kuat dalam menjalin hubungan yang berkesinambungan dengan para pemangku kepentingan. Hal ini tidak lepas dari tata nilai budaya Perusahaan yang disebut IPTEC.

The Company's Culture

PLN Enjiniring instills strong cultural values in establishing sustainable relationships with stakeholders. This cannot be separated from the Company's cultural values called IPTEC.

■ Integrity (Integritas)

Wujud dari sikap anggota Perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan, perbuatan dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan Perusahaan dan pemanfaatan kekayaan Perusahaan untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang, serta rasa tanggung jawab kepada seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

■ Integrity

The manifestation of the attitude of the Company's members who consistently show honesty, harmony between words, actions and a sense of responsibility for the management of the Company and the use of the Company's assets for short and long term interests, as well as a sense of responsibility to all interested parties (stakeholders).

■ Professionalism (Professionalisme)

Perilaku kerja positif yang dimiliki anggota Perseroan dengan kesadaran tinggi untuk selalu memberikan total komitmen pada paradigm kerja integral. Meningkatkan kemampuan dan menguasai bidang keahlian sehingga menciptakan unjuk kerja (performance) yang unggul dalam bidangnya untuk mendukung citra Perseroan.

■ Trust (Dapat Dipercaya Penuh)

Sikap percaya dan saling menghargai diantara sesama anggota Perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, itikad baik, dan kompetensi dari pihak-pihak yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang bersih dan etik.

■ Excellent (Unggul)

Memberikan kualitas hasil terbaik dari segi biaya, mutu dan waktu.

■ Customer Focus (Fokus pada pelanggan)

Mengutamakan kepentingan pelanggan dengan solusi yang efektif dan efisien.

■ Professionalism

Positive work behavior owned by members of the Company with high awareness to always give a total commitment to the integral work paradigm. Increasing their abilities and mastering their field of expertises to create an excellent performance of their field to support the image of the Company.

■ Trust (Fully Trustworthy)

An attitude of trust and mutual respect among fellow members of the Company which is based on the belief in the integrity, goodwill and competence of the related parties in implementing ethical and clean business practices.

■ Excellent

Providing the best quality results in terms of cost, quality and time.

■ Customer Focus (Focus on the customer)

Prioritizing customer's interests with the effective and the efficient solutions.

Motto Perusahaan

Motto of The Company

"Your Best Engineering Partner"



STRATEGI PERUSAHAAN

Strategi Perusahaan

Perumusan sasaran strategis perusahaan dilakukan dengan menggunakan yang didasarkan atas enam perspektif yakni Pelanggan, Produk dan Layanan, Proses Bisnis Internal, Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan dan Leadership sesuai dengan hasil perumusan menghasilkan 24 dimensi sasaran strategis yang harus dijadikan sebagai acuan oleh PLN Enjiniring dalam mencapai visi 2021 sebagai berikut :

1. Perspektif Pelanggan (Customer)
 - a. Meningkatkan kepuasan pelanggan.
 - b. Meningkatkan loyalitas pelanggan.
 - c. Meningkatkan keterikatan pelanggan.
 - d. Meningkatkan market share.

2. Perspektif Produk dan Layanan (Business)
 - a. Mewujudkan komitmen ketepatan waktu.
 - b. Mewujudkan komitmen ketepatan mutu.
 - c. Mewujudkan komitmen ketepatan dan akurasi desain.
 - d. Meningkatkan jumlah inovasi produk dan layanan.

3. Perspektif Proses Bisnis Internal (Business)
 - a. Meningkatkan efisiensi biaya produksi.
 - b. Mewujudkan standarisasi Enjiniring.
 - c. Memantapkan system pengendalian mutu (kualitas).
 - d. Meningkatkan teknologi informasi untuk proses bisnis.
 - e. Memantapkan sistem knowledge management.

4. Perspektif SDM (Human Capital)
 - a. Meningkatkan Kompetensi pegawai.
 - b. Meningkatkan produktifitas pegawai.
 - c. Mewujudkan kepuasan pegawai.

THE STRATEGY OF THE COMPANY

Company's Strategy

The company's strategic goals' drafting is carried out by using some strategies based on six perspectives namely Customers, Products and Services, Internal Business Processes, Human Resources (HR), Finance and Leadership in accordance to the results of the drafting, resulting in 24 dimensions of strategic goals that must be used as a reference by PLN Enjiniring in achieving the vision of 2021 as follows:

1. *Customer Perspective (Customer)*
 - a. *Raise customer satisfaction.*
 - b. *Raise customer loyalty.*
 - c. *Raise customer engagement.*
 - d. *Raise market share.*

2. *Product and Service (Business) Perspective*
 - a. *Establish A Commitment of punctuality.*
 - b. *Establish A Commitment for the quality of accuracy.*
 - c. *Establish A Commitment for the precision and the accuracy of the design.*
 - d. *Raise the number of product and service innovations.*

3. *The Internal Business Process Perspective*
 - a. *Raise the efficiency of production costs.*
 - b. *Achieve Engineering standards.*
 - c. *Strengthening the quality control system (quality).*
 - d. *Improve information technology for business processes.*
 - e. *Strengthening knowledge management systems.*

4. *Human Capital Perspective*
 - a. *Improve employee competence.*
 - b. *Raise employee productivity.*
 - c. *Create employee satisfaction.*

5. Perspektif Keuangan (Finance)
 - a. Meningkatkan laba.
 - b. Meningkatkan penjualan.
 - c. Meningkatkan pendapatan.
 - d. Mempertahankan likuiditas.
 - e. Sinergi antar anak perusahaan/BUMN.

6. Perspektif Leadership
 - a. Meningkatkan score Malcolm Baldrige.
 - b. Meningkatkan score GCG.
 - c. Meningkatkan score PLNE Berintegrasi.

5. *Financial Perspective (Finance)*
 - a. *Raise profit.*
 - b. *Raise sales.*
 - c. *Raise income.*
 - d. *Maintain liquidity.*
 - e. *Synergy between subsidiaries /State-Owned Enterprises*

6. *Leadership Perspective*
 - a. *Raise Malcolm Baldrige score.*
 - b. *Raise GCG score.*
 - c. *Raise the score of Integrated PLNE.*

Sasaran-sasaran strategis tersebut di atas dijabarkan dalam program-program kegiatan yang diuraikan sebagai berikut.

The strategic targets mentioned above are described in the activity programs which are described as follows;

1. Pemasaran dan Penjualan

Disamping pekerjaan jasa utama (core business) di bidang enjiniring ketenagalistrikan, PT PLN Enjiniring berencana untuk melakukan pengembangan bisnis lainnya guna sebagai portofolio dan media informasi bidang enjiniring. Pada tahun 2016 mendirikan anak perusahaan PT Prima Power Nusantara (PPN) dengan bidang usaha Engineering, Procurement and Construction (EPC).

2. Produksi

Untuk mendukung pencapaian sasaran usaha tahun 2019 akan dilakukan pekerjaan enjiniring yaitu dengan menyelesaikan kontrak supervisi disain, supervisi konstruksi dan pekerjaan non enjiniring terkait pembangunan CNG Bangkanai sesuai dengan jadwal, mutu dan biaya serta pekerjaan EPC PT PPN. Sesuai dengan implementasi misi PLN SOLID, pekerjaan Operasi dan pemeliharaan di PLTMG Bangkanai sejak Desember 2018 telah dialihkan kepada PLN Tarakan.

1. *Sales and Marketing*

In addition to the main service work (core business) in the electricity engineering sector, PT PLN Enjiniring plans to carry out other business developments to serve as a portfolio and information media in the engineering sector. In 2016, PT PLN Enjiniring established a subsidiary, PT Prima Power Nusantara (PPN), in the business of Engineering, Procurement and Construction (EPC).

2. *Production*

Engineering works will be carried out to support the achievement of business goals in 2019 by completing the design supervision contract, construction supervision and non-engineering work related to the construction of Bangkanai CNG in accordance to the schedule, the quality and the cost as well as PT PPN's EPC work. In accordance to the implementation of the PLN SOLID mission, the operation and the maintenance work at PLTMG Bangkanai since December 2018 have been transferred to PLN Tarakan.

3. Keuangan dan Akuntansi

Program kerja Keuangan dan Akuntansi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menerapkan Aplikasi Business One
- b. Menerapkan Aplikasi Project Integrated Monitoring Application (PRIMA)
- c. Meningkatkan Efektivitas penagihan sehingga COP maksimum 40 hari
- d. Meningkatkan tertib administrasi pajak
- e. Mengusulkan penghapusan sebagian Aktiva
- f. Menyempurnakan sistem IT untuk Integrasi ERP dan mendukung konsolidasi Laporan Keuangan Korporat
- g. Meningkatkan Internal Control atas Laporan Keuangan

4. SDM dan Umum

Untuk mendukung implementasi strategi perusahaan dan mendukung kegiatan proses bisnis PT PLN Enjiniring baik bidang Enjiniring maupun non Enjiniring maka dilakukan pengembangan Program SDM melalui Human Capital Readiness (HCR) dan Organizational Capital Readiness (OCR) dan pelaksanaan Program Konsolidasi bidang SDM sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesiapan kompetensi SDM dalam segi kapasitas dan kapabilitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis
- b. Peningkatan kesiapan motivasi kerja dengan mengacu pada hasil Employee Engagement Survey (EES) 2014 yang secara khusus memperhatikan butir-butir yang harus diperbaiki.
- c. Peningkatan kesiapan produktifitas pegawai melalui evaluasi beban kerja pegawai dan melalui evaluasi beban kerja pegawai dan jumlah man month yang terjual.
- d. Peningkatan kesiapan budaya kerja dengan melakukan survei Budaya Kerja dan menindaklanjutinya.
- e. Peningkatan kesiapan leadership dengan menyusun mekanisme perencanaan

3. Finance and Accounting

The Finance and Accounting work program can be described as follows:

- a. Implement the Business One Application
- b. Implement the Integrated Monitoring Project Application (PRIMA)
- c. Raise billing effectivity so that the COP is on maximum of 40 days
- d. Improve orderly tax administration
- e. Propose to write some of the assets off
- f. Improve the IT systems for ERP integration and support the consolidation of Corporate Financial Statements
- g. Improve Internal Control over Financial Statements

4. Human Resources and General Affairs

To support the implementation of the company's strategy and support the business process activities of PT PLN Enjiniring both in the Engineering and non-Engineering fields, the development of an HR Program through Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR) and the implementation of the HR Consolidation Program are as follow:

- a. Increase the readiness of HR competencies in terms of capacity and capability to adapt to the business process needs.
- b. Raise readiness of work motivation referring to the results of the Employee Engagement Survey (EES) 2014 which specifically pays attention to some points that need to be improved.
- c. Increase employee productivity readiness through employee workloads evaluation and through the number of month's man sold.
- d. Increase work culture readiness by conducting Work Culture surveys and following them up.
- e. Increase leadership readiness by developing a leadership succession

- suksesi kepemimpinan dan pelaksanaan diklat penjenjangan.
- f. Peningkatan kesiapan aspek alignment dengan melaksanakan internalisasi visi, misi dan arah strategi organisasi serta menyelaraskan antara target kinerja individu pegawai dan kinerja organisasi.
 - g. Peningkatan kesiapan teamwork dengan melaksanakan knowledge management yang meliputi penyediaan infrastruktur Knowledge Management, Knowledge Sharing, Knowledge Capturing dan Inovasi.
 - h. Menyempurnakan Man Power Planning dan rekrutmen terkait Enjiniring, pembangunan dan penyertaan dalam anak perusahaan pabrik switchgear, Operasi dan Pemeliharaan CNG Plant Bangkanai.
 - i. Mengembangkan sistem informasi SDM berbasis TI – HRIS (Human Resource Information System).
 - j. Pengembangan sistem pembinaan karir
 - k. Menyempurnakan Sistem Penilaian Kinerja dan penerapan SIMKP
 - l. Menyempurnakan Road Map Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - m. Capacity Building bagi Manajemen dan Dewan Komisaris
- planning mechanism and practicing staged training.*
- f. *Improve readiness of alignment aspects by carrying out the internalization of the vision, the mission and the direction of the organization's strategy and aligning individual employee performance targets and the performance organization*
 - g. *Increase teamwork readiness by implementing knowledge management which includes the provision of Knowledge Management infrastructure, Knowledge Sharing, Knowledge Capturing and Innovating.*
 - h. *Improve Man Power Planning and recruitment related to Engineering, construction and participation in switchgear factory subsidiaries, Operation and Maintenance of the Bangkanai CNG Plant.*
 - i. *Develop an IT-based HR information system - HRIS (Human Resource Information System).*
 - j. *A career coaching system development*
 - k. *Improve the Performance Appraisal System and implement SIMKP*
 - l. *Accomplish the Human Resources Development Road Map*
 - m. *Capacity Building for the Board of Commissioners and Management*
5. Pengembangan Usaha dan Inovasi
 - a. Meningkatkan Pendapatan Eksternal Pada tahun 2016 PT PLN Enjiniring merencanakan untuk bekerja sama dengan swasta pemerintah daerah dan sinergi antar BUMN serta anak perusahaan BUMN dalam rangka perhitungan KPI, pendapatan eksternal yang diperhitungkan adalah pendapatan dari klien eksternal (selain PT PLN (Persero)) serta pendapatan dari PT PLN (Persero) yang diperoleh dari pelelangan. Pendapatan eksternal di tahun 2016 sebesar Rp9,76 miliar
5. *Business Development and Innovation*
 - a. *PT PLN Enjiniring plans to collaborate with private local governments and to make some synergies between State Owned Enterprises and State Owned Enterprises subsidiaries in the framework of calculating the KPI to raise the external income, the calculated external income is an income from external clients (other than PT PLN (Persero)) and an income from PT PLN (Persero) obtained from the auction. External income amounted to Rp9.76 billion in 2016*

b. Survei Pelanggan

Survei Kepuasan Pelanggan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan salah satu pengukuran kinerja sistem manajemen mutu yang dilakukan secara berkala 1 kali setahun sebagaimana tercantum dalam Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan. Survei Kepuasan Pelanggan dilakukan untuk memperoleh data-data mengenai kepuasan pelanggan terkait dengan delivery product PLN Enjiniring dalam memberikan solusi terhadap kebutuhan pelanggan

c. Pengembangan Bisnis Anak Perusahaan PT Prima Power Nusantara

Sesuai RUPS Sirkuler tanggal 25 Juli 2014 mengenai persetujuan pemegang saham tentang pendirian Anak Perusahaan PT Prima Power Nusantara (PT PPN), yang bidang usahanya meliputi antara lain bidang investasi, operasi dan pemeliharaan pembangkit, Engineering Procurement and Construction (EPC) Transmisi dan Gardu Induk RKAP Tahun 2015 PT Prima Layanan Nasional Enjiniring 16 Induk Tenaga Listrik, oil dan gas serta penyediaan peralatan pendukung dalam bidang ketenagalistrikan sebagai vehicle bisnis PT PLN Enjiniring.

Modal Setor ke AP : Rp15 Miliar (Saham Mayoritas)

Realisasi : Tahun 2016

d. CNG PLANT Bangkanai 5,2 MMSCFD

Berdasarkan Surat PT PLN (Persero) No. 1917/122/DIRUT/2014 tanggal 25 Juli 2014 dan Surat PT PLN (Persero) No. 1012/122/DIVGBM/2014-R Perihal penugasan sebagai investor pembangunan CNG Plant, PT PLN Enjiniring disetujui sebagai investor pembangunan CNG Bangkanai di Kalimantan Tengah.

CNG Bangkanai direncanakan akan menyalurkan gas kepada PLTMG Bangkanai 155 MW pada saat peaking hour 5 jam.

Perkiraan CAPEX : USD 27.801.616,60

Perkiraan SHL : USD 19.461.131,62

Perkiraan Operasi : tahun 2017

b. Customer Survey

The Customer Satisfaction Survey is carried out in order to carry out one of the quality management system performance measurements which is conducted regularly once in a year as stated in the Customer Satisfaction Measurement Procedure. The Customer Satisfaction Survey was conducted to obtain some data on customer satisfaction related to the PLN Enjiniring delivery product in providing solutions to the customer needs

c. PT Prima Power Nusantara Subsidiary Business Development

In accordance to the Circular GMS dated on July 25, 2014 regarding the approval of the shareholders on the establishment of PT Prima Power Nusantara (PT PPN) subsidiary, on its business fields include investment, operation and maintenance of power plants, Engineering Procurement and Construction (EPC), Transmission and RKAP Substation of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring 16 Mains Power in 2015, oil and gas as well as the provision of supporting equipment in the electricity sector as a business vehicle for PT PLN Enjiniring.

Paid-up Capital to AP: IDR 15 Billion (Majority Shares)

Realization: 2016

d. CNG PLANT Bangkanai 5,2 MMSCFD

Based on the Decree of PT PLN (Persero) No.1917/122/DIRUT/2014 dated on July 25, 2014 and the Decree of PT PLN (Persero) No. 1012/122 / DIVGBM / 2014-R Regarding the assignment as an investor for the construction of the CNG Plant, PT PLN Enjiniring was approved as an investor for the development of CNG Bangkanai in Central Kalimantan.

Bangkanai CNG is planned to supply gas to the 155 MW PLTMG Bangkanai at 5 hours peaking hour.

Estimated CAPEX : USD 27,801,616.60

Estimated SHL : USD 19,461,131.62

Estimated Operation : 2017

Struktur Dewan Komisaris

Board of Commissioners Structure



Tumpal M. Simarmata

Komisaris Utama

President Commissioner



Julius Bobo

Komisaris

Commissioner



Djoko Prasetyo

Komisaris

Commissioner



Marzuqi

Komisaris

Commissioner

Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners



Tumpal M. Simarmata

Komisaris Utama
President Commissioner



Julius Bobo

Komisaris
Commissioner



Djoko Prasetyo

Komisaris
Commissioner



Marzuqi

Komisaris
Commissioner



Tumpal M. Simarmata

Komisaris Utama

President Commissioner

■ Tumpal M. Simarmata

Warga Negara Indonesia, umur 59 tahun. Berdomisili di Bandung. Menjabat sebagai Komisaris Utama PT PLN Enjiniring sejak 19 Desember 2016. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Kepala Divisi Konstruksi pada Pembangkit dan Jaringan Kalimantan pada tahun 2015-2016, Kepala Divisi Konstruksi Jaringan di PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2014-2015, General Manager PT PLN (Persero) UIP VII Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali pada tahun 2013-2014, General Manager PT PLN (Persero) UIP IV Interkoneksi Sumatera – Jawa pada tahun 2011-2013. Menyelesaikan Pendidikan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1987.

1. Penugasan Khusus : -
2. Riwayat Dasar Pengangkatan :
 - RUPS Pengangkatan tanggal 2 Desember 2016
 - Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 28 tanggal 19 Desember 2016.

■ Tumpal M. Simarmata

Indonesian citizen, 59 years old. Domiciled in Bandung. Served as President Commissioner of PT PLN Enjiniring since December 19, 2016. Previously he had experience as Head of the Construction Division of the Kalimantan Plant and Network in 2015-2016, Head of the Network Construction Division at PT PLN (Persero) Head Office in 2014-2015, General Manager of PT PLN (Persero) UIP VII Central Java, East Java and Bali in 2013-2014, General Manager of PT PLN (Persero) UIP IV Sumatra-Java Interconnection in 2011-2013. Completed Electrical Engineering Education at the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1987.

1. *Special assignment: -*
2. *Basic History of Appointment:*
 - *Appointment by General Meeting of Shareholders on December 2, 2016*
 - *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 28 dated December 19, 2016.*

Julius Bobo**Komisaris***Commissioner*

■ **Julius Bobo**

Warga Negara Indonesia, umur 59 tahun. Berdomisili di Bekasi. Menjabat sebagai Komisaris PT PLN Enjiniring sejak 29 September 2010. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum Koperasi Pengembang Briket Bara Nusantara. Ketua Bidang MIGAS YPEI (Yayasan Peduli Energi Indonesia), PLT Komisaris Utama pada Juni – Desember tahun 2016, Ketua Umum POROS DAERAH (2009-sekarang), Sekjen MEHI (Masyarakat Energi Hijau Indonesia) pada tahun 2009 hingga saat ini, dan Tenaga Ahli SPS-RI (Dewan Perwakilan Daerah) sejak tahun 2009 hingga saat ini. Menyelesaikan Sarjana Muda Akuntansi (AAI Jakarta) pada tahun 1983, yang kemudian dilanjutkan dengan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di STIE YAI pada tahun 1992 sebelum akhirnya mendapatkan gelar Magister Manajemen Jurusan Sumber Daya Manusia pada Universitas Satyagama, Jakarta pada TAHUN 2002.

■ **Julius Bobo**

Indonesian citizen, 59 years old. Domiciled in Bekasi. H Served as Commissioner of PT PLN Enjiniring since September 29, 2010. Currently serves as Chairman of the Koperasi Pengembang Briket Bara Nusantara. Head of the MIGAS YPEI (Yayasan Peduli Energi Indonesia), Acting as President Commissioner in June - December 2016, Chairman of POROS DAERAH (2009-present), Secretary General of MEHI (Masyarakat Energi Hijau Indonesia) in 2009 until now, and Expert of SPS-RI (Dewan Perwakilan Daerah) since 2009 until now. He completed his Bachelor of Accounting in Jakarta (AAI Jakarta) in 1983, then continued with a Bachelor of Economics majoring in Accounting at STIE YAI in 1992 before finally earning a Master of Management majoring in Human Resources at Satyagama University, Jakarta in 2002.

1. Penugasan Khusus : Ketua Komite Audit
2. Riwayat Dasar Pengangkatan :
 - RUPS Pengangkatan tanggal 31 Agustus 2010
 - RUPS Perpanjangan Sementara tanggal 31 Agustus 2014
 - RUPS Pergantian Komisaris Utama tanggal 22 Juni 2016
 - RUPS Pengangkatan tanggal 2 Desember 2016
 - Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 43 tanggal 29 September 2010
 - Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 89 tanggal 22 September 2014
 - Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 01 tanggal 14 Juli 2016
 - Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 28 tanggal 19 Desember 2016

1. *Special Assignment: Chairman of the Audit Committee*
2. *Basic History of Appointment:*
 - *Appointment by General Meeting of Shareholders on August 31, 2010*
 - *Temporary Extension by General Meeting of Shareholders on August 31, 2014*
 - *Replacement of President Commissioner by General Meeting of Shareholders on June 22, 2016*
 - *Appointment by General Meeting of Shareholders on December 2, 2016*
 - *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 43 dated September 29, 2010*
 - *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 89 dated September 22, 2014*
 - *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 01 dated July 14, 2016*
 - *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 28 dated December 19, 2016*

Djoko Prasetyo

Komisaris

Commissioner



■ Djoko Prasetyo

Warga Negara Indonesia, umur 61 tahun. Berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris PT PLN Enjiniring sejak 19 Desember 2016. Saat ini menjabat sebagai Advisor di Perusahaan Konsultan PT Rekadaya Elektriika Consult (REC) sejak tahun 2014 hingga saat ini. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Konsultan Independen di Bank Dunia Jakarta pada tahun 2013-2015, Konsultan Independen di Asian Development Bank pada tahun 2014-2015, Advisor PT PLN (Persero) untuk Lintas Batas Daya Interkoneksi Proyek antara Sumatera dan Semenanjung Malaysia pada tahun 2013-2014, Kepala Divisi Sistem Perencanaan PT PLN (Persero) pada tahun 2008, General Manajer PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2004-2008, General Manajer PT PLN (Persero) Transmisi Wilayah Sumatera Bagian Utara pada tahun 2004-2008. Menyelesaikan Pendidikan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1981, kemudian melanjutkan pendidikan di University of New South Wales, Australia dan mendapatkan gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) of Electrical Engineering pada tahun 1997.

1. Penugasan Khusus : Ketua Komite Manajemen Risiko dan Ketua Komite *Good Corporate Governance*.
2. Riwayat Dasar Pengangkatan :
 - RUPS Pengangkatan tanggal 2 Desember 2016
 - Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 28 tanggal 19 Desember 2016

■ Djoko Prasetyo

Indonesian citizen, 61 years old. Domiciled in Jakarta. Served as Commissioner of PT PLN Enjiniring since December 19, 2016. Currently serves as an Advisor in the Consultant Company of PT Rekadaya Elektriika Consult (REC) since 2014 until now. Previously, he had experience as an Independent Consultant at the World Bank Jakarta in 2013-2015, Independent Consultant at the Asian Development Bank in 2014-2015, Advisor of PT PLN (Persero) for Project Interconnection Power Transboundary between Sumatra and Peninsular Malaysia in 2013-2014, Head of the Planning System Division of PT PLN (Persero) in 2008, General Manager of PT PLN (Persero) for Research and Development Center in 2004-2008, General Manager of PT PLN (Persero) for Transmission in the Northern Sumatra Region in 2004-2008. He completed his Electrical Engineering Education at the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1981, then continued his education at the University of New South Wales, Australia and obtained the Doctor of Philosophy (Ph.D) of Electrical Engineering in 1997.

1. *Special Assignment: Chairman of the Risk Management Committee and Chairman of the Good Corporate Governance Committee.*
2. *Basic History of Appointment:*
 - *Appointment by General Meeting of Shareholders on December 2, 2016*
 - *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 28 dated December 19, 2016*



■ Marzuqi

Warga Negara Indonesia, umur 48 tahun. Berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris PT PLN Enjiniring sejak 17 Juli 2017. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Tenaga Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2010 – 2016, Tenaga Ahli DPR- RI pada tahun 1997 – 2009. Menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Tarbiyah di IAIN Sunan Ampel Malang pada tahun 1991, kemudian melanjutkan Pendidikan Magister Manajemen di STIE IPWI Jakarta pada tahun 1997.

1. Riwayat Dasar Pengangkatan
 - RUPS Pengangkatan tanggal 17 Juli 2017
 - Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 1 tanggal 4 September 2017

■ Marzuqi

Indonesian citizen, 48 years old. Domiciled in Jakarta. Served as Commissioner of PT PLN Enjiniring since July 17, 2017. Previously he had experience as an Expert in the Audit Board of the Republic of Indonesia in 2010-2016, Expert in the DPR-RI (People's Representative Council of the Republic of Indonesia) in 1997 - 2009. Completed Education at the Tarbiyah Faculty at IAIN Sunan Ampel Malang in 1991, then continued Education in the Masters in Management at STIE IPWI Jakarta in 1997.

1. *Basic History of Appointment*
 - *Appointment by General Meeting of Shareholders on July 17, 2017*
 - *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 1 dated September 4, 2017*



Peta Lokasi Proyek
Project Location Map

Struktur Direksi

Board of Directors Structure



Hernandi Buhron

Direktur Utama

President Director



Yanuar Hakim

Direktur Enjinering

Director of Engineering



Ultrisza Mednawarman

Direktur Pemasaran dan
Pengembangan Usaha

*Director of Marketing and Business
Development*



Alfi Zamzami

Direktur Keuangan dan
SDM

*Director of Finance and
Human Resources*

Profil Direksi

Profile of the Board of Directors



Hernandi Buhron

Direktur Utama
President Director



Yanuar Hakim

Direktur Enjiniring
Director of Engineering



Ultrisza Mednawarman

Direktur Pemasaran
dan Pengembangan Usaha

Director of Marketing and Business Development



Alfi Zamzami

Direktur Keuangan dan SDM

Director of Finance and Human Resources



Hernadi Buhron

Direktur Utama

President Director

■ Hernadi Buhron

Warga Negara Indonesia, umur 57 tahun. Berdomisili di Bandung. Menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN Enjiniring sejak 27 Desember 2016. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Kepala Divisi Pengadaan *Independent Power Producer* (IPP) di PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Senior Manajer Pengadaan Divisi Gas dan BBM, Manajer Divisi Perencanaan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, Tenaga Ahli Sistem Perencanaan Distribusi di Sub Direktorat Pemberdayaan Distribusi Direktorat Transmisi dan Distribusi PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Menyelesaikan pendidikan Teknik Elektro di Institut Teknologi Surabaya (ITS) tahun 1985.

1. Riwayat Dasar Pengangkatan :

- RUPS Pengangkatan tanggal 8 Desember 2016
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 47 tanggal 27 Desember 2016
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 76 tanggal 19 November 2019

■ Hernadi Buhron

Indonesian citizen, 57 years old. Domiciled in Bandung. Served as President Director of PT PLN Enjiniring since December 27, 2016. Previously he had experience as Head of the Procurement Division of Independent Power Producer (IPP) at PT PLN (Persero) for Head Office, Senior Procurement Manager in the Gas and Fuel Division, Planning Division Manager at PT PLN (Persero) for Distribution in West Java and Banten, Distribution Planning System Expert in the Distribution Empowerment Sub Directorate of the Transmission and Distribution Directorate of PT PLN (Persero) for Head Office. Completed his Electrical Engineering Education at the Surabaya Institute of Technology (ITS) in 1985.

1. *Basic History of Appointment:*

- *Appointment by General Meeting of Shareholders on December 8, 2016*
- *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 47 dated December 27, 2016*
- *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 76 dated November 19, 2019*



Yanuar Hakim
 Direktur Enjiniring
 Director of Engineering

■ Yanuar Hakim

Warga Negara Indonesia, umur 58 tahun. Berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Direktur Enjiniring PT PLN Enjiniring sejak 27 Desember 2016. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai General Manajer PT PLN (Persero) Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan pada tahun 2014-2016, Komite Pejabat Pengadaan pada Jaringan HVDC Sumatera-Jawa pada tahun 2013-2014, General Manajer Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali pada tahun 2012-2013, Kepala Divisi Direktorat Transmisi Indonesia Bagian Barat. Menyelesaikan pendidikan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1986, sebelum akhirnya mendapat gelar *Master of Electrical Engineering (Power)* di Universitas Wollongong, NSW, Australia pada tahun 2004.

1. Riwayat Dasar Pengangkatan :
 - RUPS Pengangkatan tanggal 8 Desember 2016
 - Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 47 tanggal 27 Desember 2016
 - Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 76 tanggal 19 November 2019

■ Yanuar Hakim

Indonesian citizen, 58 years old. Domiciled in Jakarta. Served as Engineering Director of PT PLN Enjiniring since December 27, 2016. Previously he had experience as General Manager of PT PLN (Persero) for Electricity Engineering Center in 2014-2016, Procurement Officer Committee on the Sumatra-Java HVDC Network in 2013-2014, General Manager of Distribution and Load Control Center Java-Bali in 2012-2013, Head of the Western Indonesia Transmission Directorate Division. He completed his Electrical Engineering Education at the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1986, before finally obtaining a Master of Electrical Engineering (Power) at Wollongong University, NSW, Australia in 2004.

1. *Basic History of Appointment:*
 - *Appointment by General Meeting of Shareholders on dated December 8, 2016*
 - *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 47 dated December 27, 2017*
 - *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 76 dated November 19, 2019*



Ultrisza Mednawarman
 Direktur Pemasaran
 dan Pengembangan Usaha
*Director of Marketing and Business
 Development*

■ Ultrisza Mednawarman

Warga Negara Indonesia, umur 57 tahun. Berdomisili di Tangerang. Menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT PLN Enjiniring sejak 27 Desember 2016. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Manajer Senior Manajemen IPP di PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2015-2016, Manajer Senior Pengadaan IPP Jawa – Bali di PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2010-2015, Manajer Niaga PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya & Tangerang pada tahun 2009-2010, Asisten Deputi Direktur Sistem Informasi Manajemen Program di Sub Direktorat Perencanaan dan Teknologi PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2008-2009, Manajer Komersial dan Pelayanan Pelanggan di PT PLN (Persero) Wilayah Lampung pada tahun 2007-2008. Menyelesaikan Pendidikan Teknik Elektro di Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1986 sebelum akhirnya menyelesaikan Pendidikan di PPM Sekolah Tinggi Manajemen.

1. Riwayat Dasar Pengangkatan :
 - RUPS Pengangkatan tanggal 8 Desember 2016
 - Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 47 tanggal 27 Desember 2016
 - Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 76 tanggal 19 November 2019

■ Ultrisza Mednawarman

Indonesian citizen, 57 years old. Domiciled in Tangerang. Served as Director of Marketing and Business Development of PT PLN Enjiniring since December 27, 2016. Previously he had experience as Senior Manager of IPP Management at PT PLN (Persero) for Head Office in 2015-2016, Senior Manager of IPP Procurement Java-Bali at PT PLN (Persero) for Head Office in 2010-2015, Commercial Manager of PT PLN (Persero) for Jakarta Raya & Tangerang Distribution in 2009-2010, Assistant Deputy Director of Program Management Information Systems at the Sub-Directorate of Planning and Technology of PT PLN (Persero) for Head Office in 2008-2009, Manager of Commercial and Violation Services at PT PLN (Persero) for Lampung Region in 2007-2008. Completed Electrical Engineering Education at the University of Indonesia, Jakarta in 1986 before finally completing Education at PPM School of Management.

1. *Basic History of Appointment:*
 - *Appointment by General Meeting of Shareholders on December 8, 2016*
 - *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 47 dated December 27, 2016*
 - *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 76 dated November 19, 2019*



■ Alfi Zamzami

Warga Negara Indonesia, umur 52 tahun. Berdomisili di Bekasi. Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT PLN Enjiniring sejak 27 Desember 2016. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Manajer Senior Manajemen Pembelanjaan Divisi Treasury di PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Manajer Senior Administrasi dan Keuangan di PT PLN Enjiniring, Deputy Manager General Affair pada Divisi SDM dan General Affair di PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Selatan. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Andalas, Padang pada tahun 1991 sebelum akhirnya mendapatkan gelar Master of Business di University of Tenaga Nasional, Kuala Lumpur – Malaysia pada tahun 2006.

1. Riwayat Dasar Pengangkatan

- RUPS Pengangkatan tanggal 8 Desember 2016
- Akta Notaris Lenny Jannis Ishak, SH Nomor 47 tanggal 27 Desember 2016
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 76 tanggal 19 November 2019

■ Alfi Zamzami

Indonesian citizen, 52 years old. Domiciled in Bekasi. Served as Director of Finance and Human Resources of PT PLN Enjiniring since December 27, 2016. Previously he had experience as a Senior Manager of Spending Management at the Treasury Division at PT PLN (Persero) for Head Office, Senior Administration and Finance Manager at PT PLN Enjiniring, Deputy Manager of General Affair at the HR and General Affairs Division at PT PLN (Persero) for Generation of South Sumatra. He completed his Bachelor of Accounting education at Andalas University, Padang in 1991 before finally obtaining Master of Business degree at the University of Tenaga Nasional, Kuala Lumpur - Malaysia in 2006.

1. Basic History of Appointment:

- *Appointment by General Meeting of Shareholders on December 8, 2016*
- *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 47 dated December 27, 2016*
- *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 76 dated November 19, 2019*

Profil Pejabat Eksekutif

Profile of Executive Officers

■ TOTOT FREGATTANTO

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, umur 53 tahun. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak Mei 2018. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Senior Engineer I Perencanaan Sistem pada Divisi Perencanaan Sistem Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-2016). Menyelesaikan Pendidikan S1 Listrik dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan S2 Bidang Manajemen dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

■ SURYATI

Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko

Warga Negara Indonesia, umur 55 tahun. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko sejak Oktober 2015. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Deputy Manajer Sumber Daya Manusia PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan (2012-2015). Menyelesaikan Pendidikan S1 Teknik Nuklir dari Universitas Gajah Mada.

■ MUKIYI

Kepala Satuan Pengawasan Internal

Warga Negara Indonesia, umur 50 tahun. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal sejak Mei 2017 – Juni 2019. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Deputy Group Audit Regional 12A PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2016). Menyelesaikan Pendidikan S1 Listrik di IKIP Negeri, S1 Mesin di STT PLN dan S2 Teknologi dan Bisnis Kelistrikan di Institut Teknologi Bandung.

■ IZRAL SYAFRIL

Kepala Satuan Pengawasan Internal

Warga Negara Indonesia, umur 51 tahun. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern sejak 01 Juli 2019, sebelumnya menjabat sebagai Group Head Audit Maluku Papua pada 01 Maret 2018. Menamatkan pendidikan D3 Mesin UNSRI 1990, S1 Teknik Mesin UNITAS tahun 2001.

■ TOTOT FREGATTANTO

Corporate Secretary

Indonesian citizen, 53 years old. Served as Corporate Secretary since May 2018. Previously, he served as Senior Engineer I of System Planning in the System Planning Division of the Corporate Planning Directorate of PT PLN (Persero) for Head Office (2015-2016). Completed his Bachelor's Education in Electrical Power Engineering at Sepuluh Nopember Institute of Technology and Master's Education in Management at Institute for Research and Community Service.

■ SURYATI

Head of Procurement, Quality and Risk Management Unit

Indonesian citizen, 55 years old. Served as Head of Procurement, Quality and Risk Management Unit since October 2015. Previously served as Deputy Manager of Human Resources at the PLN for Electricity Research and Development Center (2012-2015). Completed his Bachelor's Education in Nuclear Engineering at Gajah Mada University.

■ MUKIYI

Head of Internal Supervision Unit

Indonesian citizen, 50 years old. Served as Head of the Internal Supervision Unit since June 2017. Previously he served as Deputy of Regional Audit Group 12A of PT PLN (Persero) for Head Office (2016). Completed his Bachelor's Education in Electrical Engineering at IKIP Negeri, Bachelor's Education in Mechanical Engineering at STT PLN and Master's Education in Technology and Electrical Business at Bandung Institute of Technology.

■ IZRAL SYAFRIL

Head of Internal Supervision Unit

Indonesian citizen, 51 years old. Served as Head of the Internal Supervision Unit since July 2019. Previously he served as Group Head Audit for Maluku Papua on March 2018. Graduated from D3 Mechanical Engineering UNSRI 1990, S1 Mechanical Engineering UNITAS in 2001.

PROFIL KARYAWAN

Employee Profile



PROFIL KARYAWAN

Employee Profile

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Composition Based on Civil Service Status



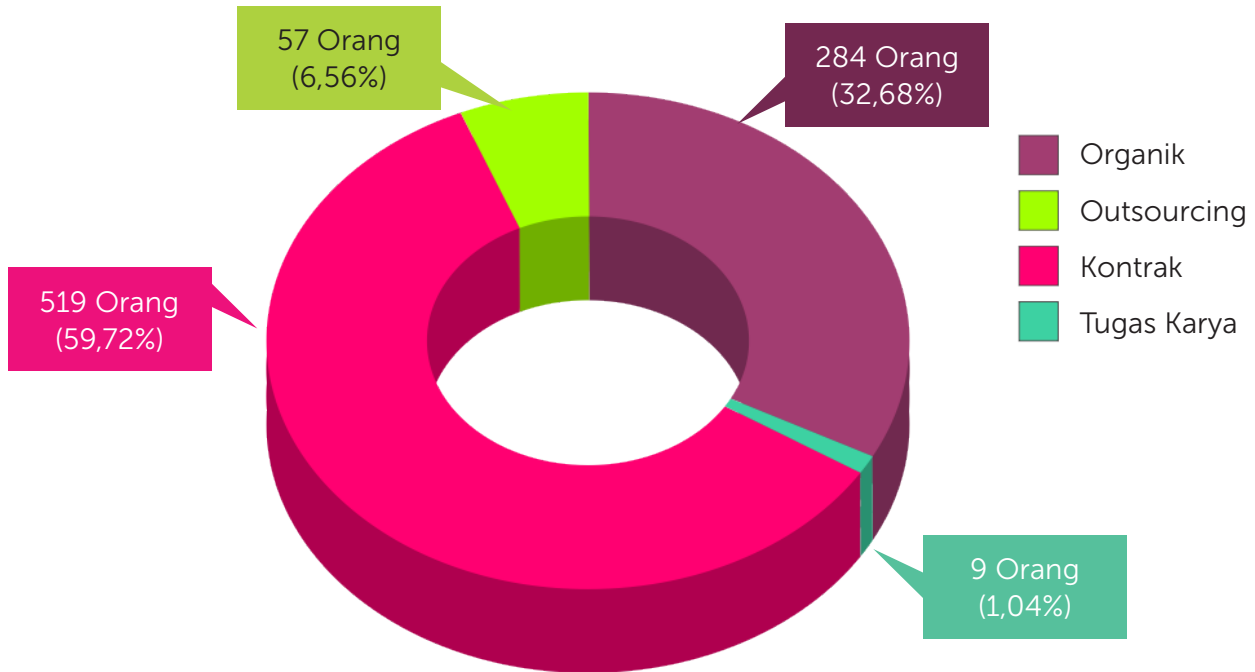
Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Table of Employee Composition Based on Civil Service Status

Status Kepegawaian Employment Status	Tahun 2019		Tahun 2018		Perubahan Change	
	(Orang) (person)	(%)	(Orang) (Person)	(%)	(Orang) (Person)	(%)
Organik Organic	284	32.68	175	15.71	109	62.29
Tugas Karya Work Assigment	9	1.04	12	1.08	-3	-25.00
Kontrak Contract	519	59.72	861	77.29	-342	-39.72
Outsourcing Outsourcing	57	6.56	66	5.92	-9	-13.64
TOTAL	869	100	1114	100	-245	-16.07

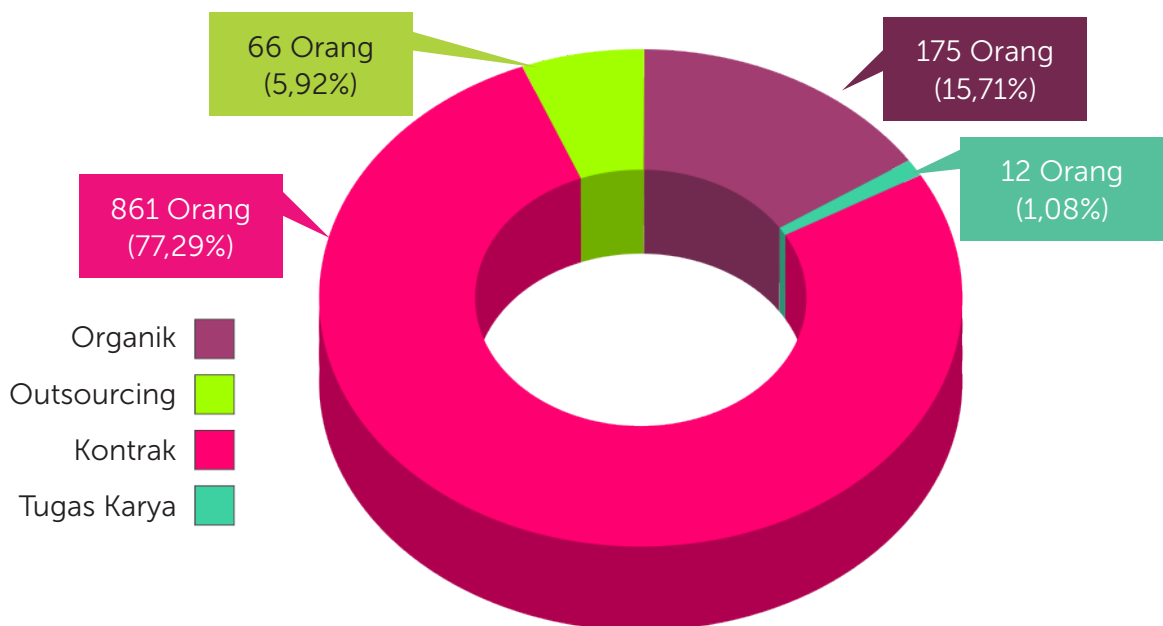
Grafik Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2019

Graph of Employee Composition Based on Civil Service Status in 2019



Grafik Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2018

Graph of Employee Composition Based on Civil Service Status in 2018



Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Organisasi

Employee Composition Based on Organization Position Levels



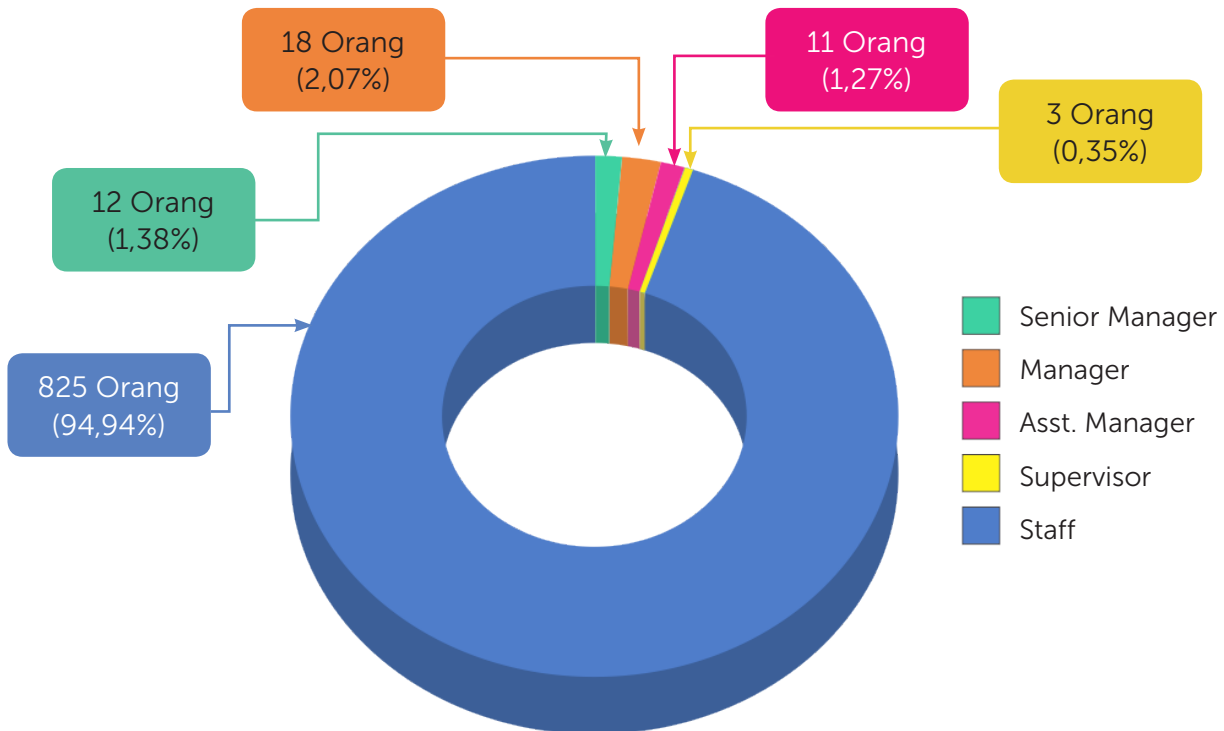
Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Organisasi

Table of Employee Composition Based on Organization Position Levels

Level Jabatan Organisasi <i>Organization Position Levels</i>	Tahun 2019		Tahun 2018		Perubahan <i>Change</i>	
	(Orang) <i>(person)</i>	(%)	(Orang) <i>(Person)</i>	(%)	(Orang) <i>(Person)</i>	(%)
Senior Manager	12	1.38	12	1.08	0	0.00
Manager	18	2.07	19	1.71	-1	-5.26
Asst. Manager + Project Team leader	11	1.27	7	0.63	4	57.14
Supervisor	3	0.35	3	0.27	0	0.00
Staff	825	94.94	1.073	96.32	-248	-23.11
TOTAL	869	100	1114	100	-245	28.77

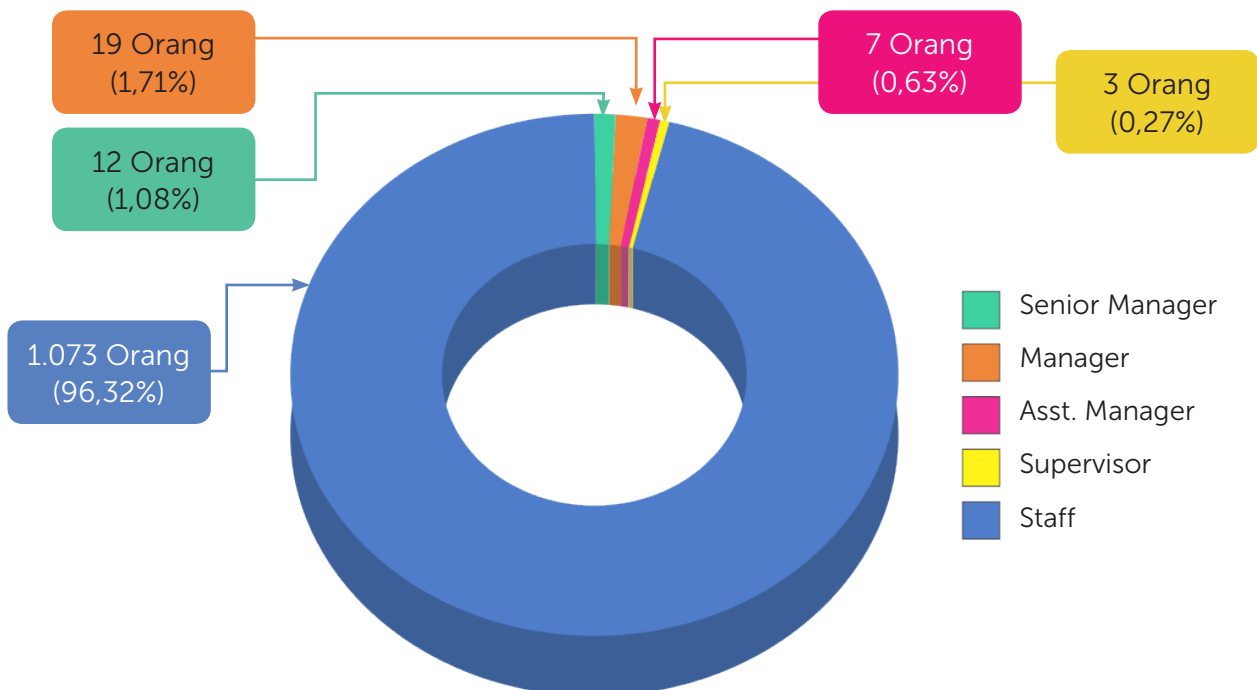
Grafik Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Organisasi Tahun 2019

Graph of Employee Composition Based on Organization Position Levels in 2019



Grafik Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Organisasi Tahun 2018

Graph of Employee Composition Based on Organization Position Levels in 2018



Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Pendidikan

Employee Composition Based on Education Levels



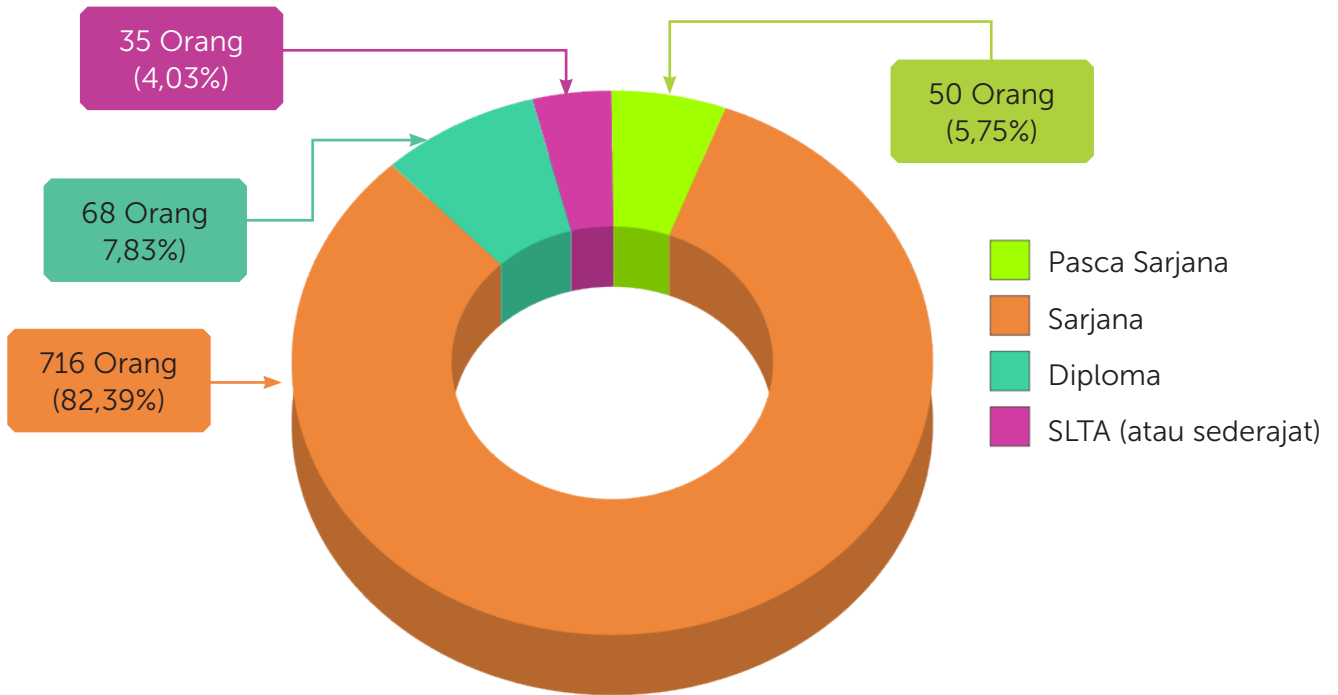
Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Pendidikan

Table of Employee Composition Based on Education Levels

Level Pendidikan <i>Education Levels</i>	Tahun 2019		Tahun 2018		Perubahan <i>Change</i>	
	(Orang) <i>(person)</i>	(%)	(Orang) <i>(Person)</i>	(%)	(Orang) <i>(Person)</i>	(%)
Pasca Sarjana <i>Post Graduate</i>	50	5.75	57	5.12	-7	-12.28
Sarjana <i>Bachelor</i>	716	82.39	752	67.50	-36	-4.79
Diploma <i>Diploma</i>	68	7.83	115	10.32	-47	-40.87
SLTA (atau sederajat) <i>High School (or equivalent)</i>	35	4.03	190	17.06	-155	-81.58
TOTAL	869	100	1114	100	-245	-139.52

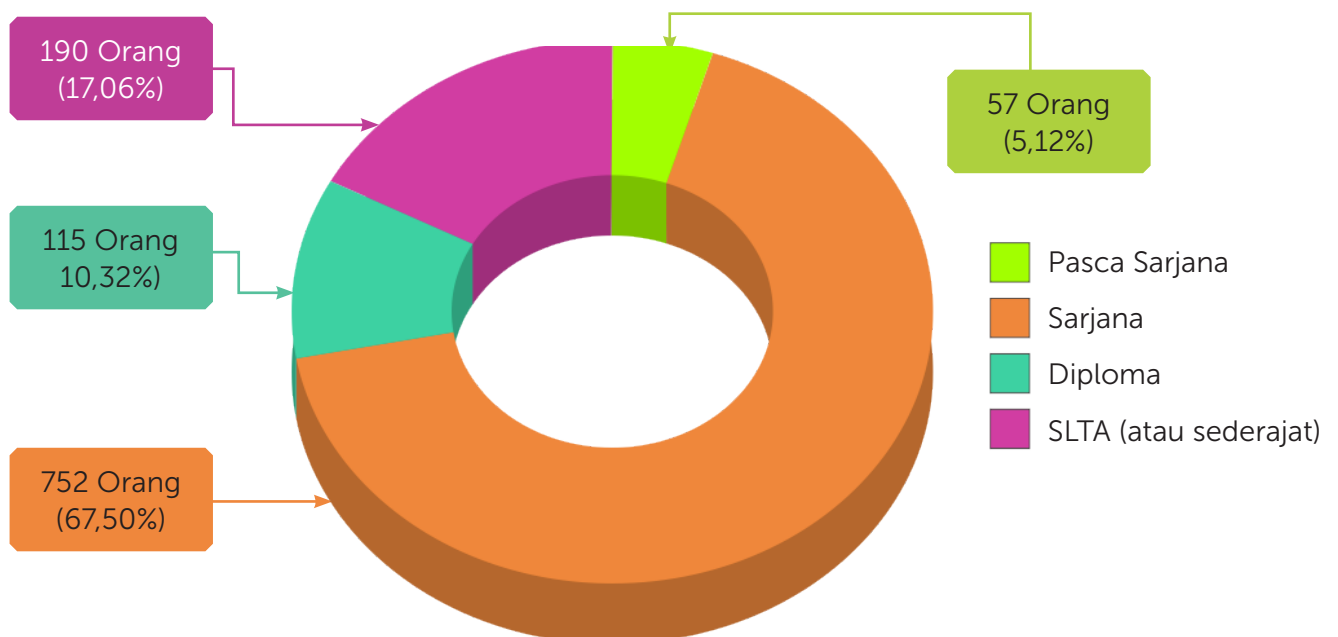
Grafik Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Pendidikan Tahun 2019

Graph of Employee Composition Based on Education Levels in 2019



Grafik Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Pendidikan Tahun 2018

Graph of Employee Composition Based on Education Levels in 2018



Pengembangan Kompetensi Karyawan

Employee Competency Development

Selama tahun 2019, Perusahaan melaksanakan pengembangan kompetensi karyawan yang terdiri dari 49 Program Pelatihan dengan diikuti oleh 316 orang, serta 27 Program Sertifikasi dengan diikuti oleh 159 orang terdiri dari Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai, dan Karyawan Kontrak/ Outsourcing. Pengembangan kompetensi dilakukan dengan menerapkan menerapkan prinsip persamaan kesempatan bagi semua karyawan.

During 2019, the Company carried out employee competency development which consisted of 49 Training Programs with 316 participants, consisting of Members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Employees, and Contract Employees / Outsourcing, and 27 Certification Programs attended by 159 Employees. Competency development is carried out by applying the principle of equality of opportunity for all employees.

Tabel Pelaksanaan Pelatihan Tahun 2019

Table of Training Implementation for 2019

No.	Waktu Pelaksanaan <i>Execution Time</i>	Jenis/Judul Pelatihan <i>Type / Title of Training</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Jumlah Peserta* <i>Number of Participants*</i>
1	Januari <i>January</i>	Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Resource Management</i>	PPM Manajemen	1
2	Januari <i>January</i>	Effective Communication Skills <i>Effective Communication Skills</i>	LONDON SCHOOL PUBLIC RELATION	67
3	Januari <i>January</i>	Pelatihan Software TEKLA <i>TEKLA Software Training</i>	BIDANG TND	12
4	Maret <i>Mach</i>	Akuntansi Pendapatan Sesuai PSAK 72 <i>Revenue Accounting in accordance with PSAK 72</i>	IKATAN AKUNTANSI INDONESIA	1
5	Maret	Awareness dan Audit Internal ISO 9001:2015 <i>ISO 9001: 2015 Internal Audit and Awareness</i>	PT SUCOFINDO	10
6	Maret <i>Mach</i>	Survei Proyek, Inspeksi dan Manajemen Risiko (HAZID / HAZOP / SIL) Peralatan Mekanikal dan Perpipaan pada Industri, Tanker (Kapal), dan Platform Lepas Pantai (ISO 17776, ISO 31000, IMO) <i>Project Survey, Inspection and Risk Management (HAZID/HAZOP/SIL) Mechanical Equipment and Piping on Industries, Tanker (Ship), and Offshore Platform (ISO 17776, ISO 31000, IMO)</i>	CIGRE	6
7	Maret <i>Mach</i>	Seminar Manajemen Proyek <i>Project Management Seminar</i>	SGS	2
8	April <i>April</i>	Loka Karya Manajemen SDM dengan Big Data <i>Workshop Human Capital Management With Big Data</i>	ASIA ANTI FRAUD	1
9	Mei <i>May</i>	Pengenalan KPKU <i>Pengenalan KPKU</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	6

10	Mei <i>May</i>	Training Pendalaman HPE (Level Instruktur) <i>Training Pendalaman HPE (Level Instruktur)</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	6
11	Juni <i>June</i>	Pelatihan Software ETAP <i>ETAP Software Training</i>	LMPI	11
12	Juni <i>June</i>	Integrated GRC <i>Integrated GRC</i>	ASIA ANTI FRAUD	1
13	Juli <i>July</i>	Pelatihan Software ETAP <i>ETAP Software Training</i>	LMPI	14
14	Juli <i>July</i>	Manajemen Kualitas Proyek Peralatan Mekanikal dan Perpipaan, Studi Kasus: Minyak dan Gas Bumi, Pembangkit Listrik, dan Pertambangan, (ISO / TS 29001, API Q 1) <i>Project Quality Management Mechanical Equipment and Piping, Case Study : Oil and Gas, Power Plant, and Mining, (ISO/TS 29001, API Q 1)</i>	BKM PII (Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur Indonesia)	7
15	Juli <i>July</i>	Kontrak Berbasis FIDIC <i>FIDIC Based Contracts</i>	Emlil Training	23
16	Agustus <i>August</i>	Kontrak Berbasis FIDIC <i>FIDIC Based Contracts</i>	Emlil Training	27
17	Agustus <i>August</i>	Legal For Non Legal <i>Legal For Non Legal</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	1
18	Agustus <i>August</i>	Manajemen Proyek Berbasis ARCGIS <i>Project Management Based on ARCGIS</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
19	Agustus <i>August</i>	Pembelajaran Karya Inovasi <i>Pembelajaran Karya Inovasi</i>	Ir. Yani Hadiani Soegito, MSIE	29
20	Agustus <i>August</i>	Pelatihan Penggunaan Software Engineering UNISIM Bagian I dan II <i>Training on the Use of UNISIM Software Engineering Parts I and II</i>	PT Advance Technology Solution (ATS)	15
21	September <i>September</i>	K2 dan K3 Instalasi TT/TET Untuk Pelaksana Pekerjaan <i>K2 dan K3 Instalasi TT/TET Untuk Pelaksana Pekerjaan</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
22	September <i>September</i>	ISO 27001 <i>ISO 27001</i>	ISACA Indonesia	2
23	September <i>September</i>	Pengembangan Diri <i>Self-development</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	7
24	September <i>September</i>	Pengelolaan Dokumen Perusahaan <i>Company Documents Management</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	1

25	September <i>September</i>	Pendalaman Materi Boardgames Power Marketer <i>Pendalaman Materi Boardgames Power Marketer</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	1
26	September <i>September</i>	Manajemen Risiko Hukum <i>Legal Risk Management</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	1
27	Oktober <i>October</i>	Proyeksi Harga Gas/LNG dan BBM Terhadap Perubahan Makro Ekonomi dan Pasar Dunia <i>Gas / LNG and BBM Price Projection on Macroeconomic and World Market Changes</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
28	Oktober <i>October</i>	Manajemen Alat Pengukur dan Pembatas <i>Measuring and Limiting Management</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	4
29	Oktober <i>October</i>	Bank Garansi dan Aplikasinya <i>Bank Guarantee and Application</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	3
30	Oktober <i>October</i>	Pemeliharaan Peralatan Gardu Induk <i>Maintaining Substation Equipment</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
31	Oktober <i>October</i>	Perhitungan Keekonomian Gas Hulu, Midstream dan Hilir <i>Calculation of Upstream, Midstream and Downstream Gas Economy</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	1
32	Oktober <i>October</i>	Gas Engine Electric Set Operation & Maintenance <i>Gas Engine Electric Set Operation & Maintenance</i>	PT Trakindo	4
33	Oktober <i>October</i>	Non Destructive Test (NDT) <i>Non Destructive Test (NDT)</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	3
34	Oktober <i>October</i>	Workshop and Training for Smart Energy Solution <i>Workshop and Training for Smart Energy Solution</i>	PT PLN (Persero) Kantor Pusat	2
35	Oktober <i>October</i>	GE Relay Training <i>GE Relay Training</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
36	Oktober <i>October</i>	Teknik Presentasi <i>Presentation Techniques</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
37	Oktober <i>October</i>	Storage Workshop <i>Storage Workshop</i>	USAID ASIA	1
38	Oktober <i>October</i>	W2 - FS <i>W2 - FS</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
39	Oktober <i>October</i>	Seminar PJB Connect 2019 <i>Seminar PJB Connect 2019</i>	PT PJB	2
40	Oktober <i>October</i>	Analisa Proteksi Sistem Distribusi <i>Distribution System Protection Analysis</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	5

41	November <i>November</i>	Analisa Kondisi Trafo Distribusi <i>Distribution Transformer Condition Analysis</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
42	November <i>November</i>	Workshop Corporation, Merger & Akuisisi dan Mengelola Anak Perusahaan <i>Workshop Corporation, Merger & Acquisition and Managing Subsidiaries</i>	PT PLN (Persero) Kantor Pusat	2
43	November <i>November</i>	W3 - Environmental Ecological Flow <i>W3 - Environmental Ecological Flow</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
44	November <i>November</i>	W4 - Cumulative Impacts Assesment <i>W4 - Cumulative Impacts Assesment</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
45	November <i>November</i>	Sistem Pemeliharaan Listrik <i>Electrical Maintenance System</i>	CV Berdiklat	2
46	November <i>November</i>	Workshop Pengelolaan PPh Pasal 21 yang Efektif dengan Ms Excel dan E-SPT <i>Workshop Pengelolaan PPh Pasal 21 yang Efektif dengan Ms Excel dan E-SPT</i>	ORTAX	2
47	Desember <i>December</i>	Bimbingan Teknis Pengurusan Perizinan OSS Versi 1.1 <i>Technical Guidance for OSS Licensing Management Version 1.1</i>	P2KP	2
48	Desember <i>December</i>	Workshop Organization Design 4.0 <i>Workshop Organization Design 4.0</i>	GML - Knowcap	2
49	Desember <i>December</i>	Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan <i>Problem Solving and Decision Making</i>	Ir. Yani Hadiani Soegito, MSIE	9
Total Jumlah Peserta Pelatihan <i>Total Number of Training Participants</i>				316

(Catatan: jumlah peserta* sebanyak 316 orang karena terdapat beberapa orang Pegawai yang mendapatkan pelatihan lebih dari satu kali)

Tabel Pelaksanaan Sertifikasi Tahun 2019
Table of Certification Implementation for 2019

No.	Waktu Pelaksanaan <i>Execution Time</i>	Jenis/Judul Sertifikasi <i>Type / Title of Certification</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants*</i>
1	Januari <i>January</i>	Ahli Bangunan Gedung - Muda <i>Building Expert - Junior</i>	LPJK	1
2	Januari <i>January</i>	Ahli Bangunan Gedung - Madya <i>Building Expert - Intermediate</i>	LPJK	3
3	Januari <i>January</i>	Ahli Geodesi - Madya <i>Geodetic Expert - Intermediate</i>	LPJK	1
4	Januari <i>January</i>	Ahli Geodesi - Madya <i>Geodetic Expert - Senior</i>	LPJK	1
5	Januari <i>January</i>	Ahli Geoteknik - Madya <i>Geotechnician - Intermediate</i>	LPJK	5
6	Januari <i>January</i>	Ahli Geoteknik - Muda <i>Geotechnician - Junior</i>	LPJK	1
7	Januari <i>January</i>	Ahli Teknik Jembatan - Madya <i>Bridge Engineer - Intermediate</i>	LPJK	1
8	Januari <i>January</i>	Ahli Teknik Tenaga Listrik - Muda <i>Electric Power Engineer Expert - Junior</i>	LPJK	3
9	Februari <i>February</i>	Ahli Bangunan Gedung - Utama <i>Building Expert - Senior</i>	LPJK	1
10	Februari <i>February</i>	Ahli Bendungan Besar - Utama <i>Large Dam Expert - Senior</i>	LPJK	1
11	Februari <i>February</i>	Ahli Teknik Mekanikal - Madya <i>Mechanical Engineering Expert - Intermediate</i>	LPJK	2
12	Februari <i>February</i>	Ahli Teknik Tenaga Listrik - Madya <i>Electric Power Engineer Expert - Intermediate</i>	LPJK	4
13	Februari <i>February</i>	Ahli Teknik Tenaga Listrik - Utama <i>Electric Power Engineer Expert - Senior</i>	LPJK	3
14	Februari <i>February</i>	Pengadaan Barang dan Jasa - PLN <i>Procurement of goods and services - PLN</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	39
15	Mei <i>May</i>	Pelatihan Operasi Produksi <i>Production Operations Training</i>	PPSDM MIGAS CEPU	4
16	Juli <i>July</i>	Certified Risk Government Professional (CRGP) <i>Certified Risk Government Professional (CRGP)</i>	RAP/LSPMR	12
17	Juli <i>July</i>	Sertifikasi Profesi Manajer SDM <i>HR Manager Professional Certification</i>	PPM Manajemen	1

18	Juli <i>July</i>	Pelatihan Operasi Produksi <i>Production Operations Training</i>	PPSDM MIGAS CEPU	4
19	Agustus <i>August</i>	Qualified Risk Management Professional (QRMP) <i>Qualified Risk Management Professional (QRMP)</i>	CRMS	10
20	September <i>September</i>	Pengadaan Barang dan Jasa - PLN <i>Procurement of goods and services - PLN</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	11
21	Oktober <i>October</i>	Qualified Risk Management Analyst (QRMA) <i>Qualified Risk Management Analyst (QRMA)</i>	CRMS	16
22	Oktober <i>October</i>	Ahli K3 Listrik <i>Electrical Safety Expert</i>	PT Mitra Dinamis Yang Utama	16
23	Oktober <i>October</i>	Qualified Internal Auditor (QIA) - Intermediate <i>Qualified Internal Auditor (QIA) - Intermediate</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	1
24	Oktober <i>October</i>	Qualified Internal Auditor (QIA) - Junior <i>Qualified Internal Auditor (QIA) - Junior</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
25	November <i>November</i>	Qualified Risk Management Analyst (QRMA) <i>Qualified Risk Management Analyst (QRMA)</i>	CRMS	14
26	Desember <i>December</i>	Ahli K3 Umum <i>General Safety Expert</i>	PT Phitagoras	1
27	Desember <i>December</i>	Qualified Internal Auditor (QIA) - Junior <i>Qualified Internal Auditor (QIA) - Junior</i>	YPIA	1
Total Jumlah Peserta Sertifikasi <i>Total Number of Certification Participants</i>				159

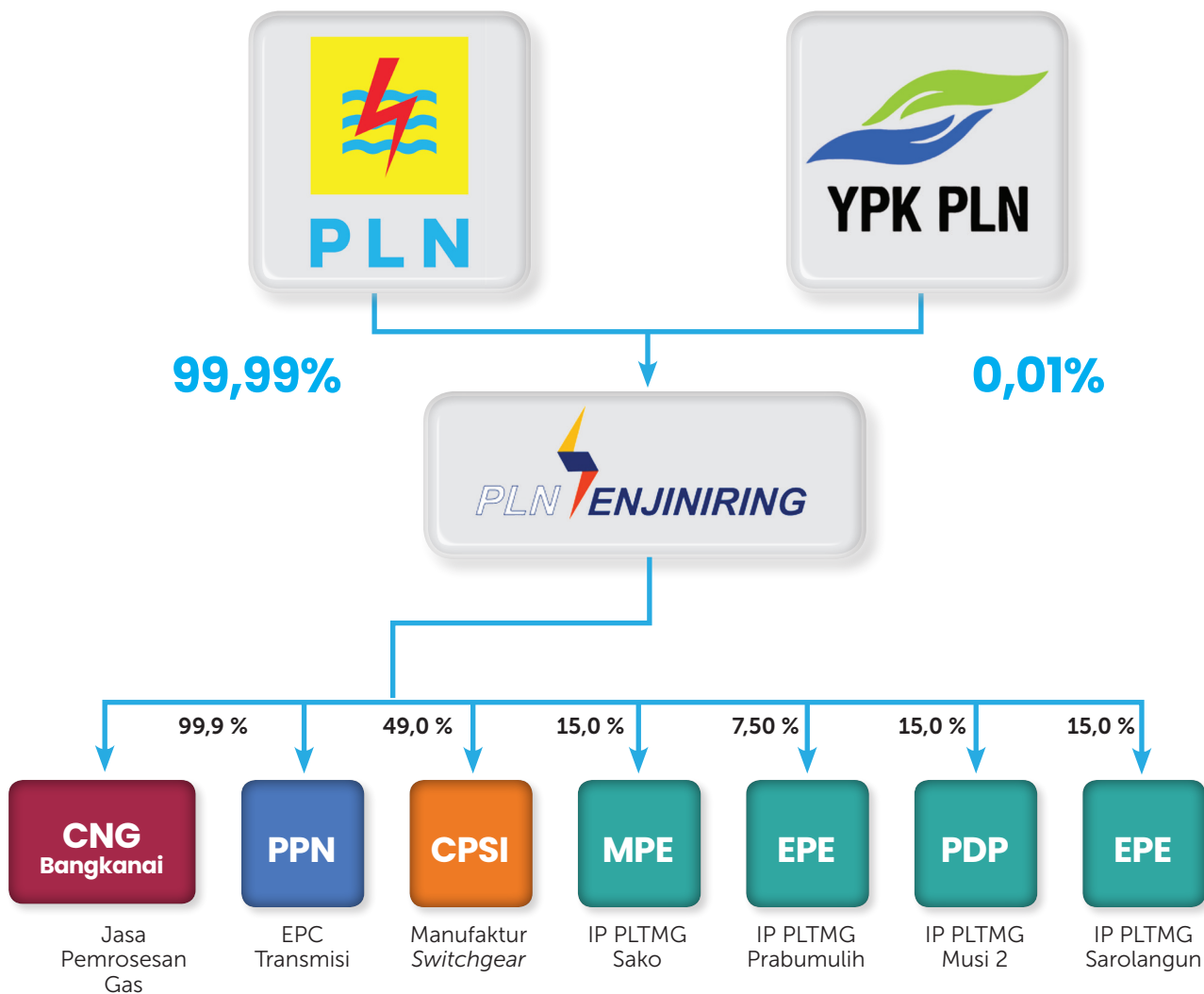
Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan *Employee Competency Development Costs*

Total biaya pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan sertifikasi pada tahun 2019 sebesar Rp 3.986.726.936, atau rata-rata sebesar Rp 12.616.225 per orang. Biaya pengembangan kompetensi karyawan untuk tahun 2019 menurun sebesar 8,72% dibandingkan dengan 2018 sebesar Rp 4.367.642.356. Hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2018 terdapat program training yang dilaksanakan Korea Selatan selama 2 bulan untuk 10 orang Pegawai. Sementara pada tahun 2019 hanya dilakukan di lembaga training dalam negeri, serta jumlah Hari Orang Pelatihan (HOP) yang lebih kecil.

The total cost of employee competency development through training and certification in 2019 amounted to Rp 3,986,726,936, or an average amounted to Rp 12,616,225 per person. The cost of employee competency development for 2019 decreased by 8.72% compared to 2018 which amounted to Rp 4,367,642,356, due to in 2018 there was a training program conducted by South Korea for 2 months for 10 employees. Meanwhile in 2019 is only conducted at domestic training institutions, as well as smaller number of people training days (HOPS).

Struktur Korporasi

Corporate Sctructure



- Unit Usaha**
- Anak Perusahaan**
- Joint Venture Company**
- Afiliasi/Penyertaan Saham**

CNG Bangkanai : Compressed Natural Gas Bangkanai
 PPN : PT Prima Power Nusantara
 CPSI : PT Crompton Power Switchgear Indonesia
 MPE : PT Multidaya Prima Elektrindo
 EPE : PT Energi Prima Elektrika
 PDP : PT Putra Daya Prima
 PPE : PT Permata Prima Elektrindo

Kronologi Pencatatan Saham

Chronology of Registered Shares

PLN Enjiniring merupakan badan usaha *non listed* yang belum melakukan pencatatan saham.

PLN Enjiniring is a non-listed business entity that has not yet registered the shares.

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Other Securities Registers

PLN Enjiniring belum melakukan pencatatan efek lainnya.

PLN Enjiniring has not yet registered the other securities.

Daftar Entitas Anak dan/Entitas Asosiasi

List of Subsidiary Companies and / Associated Entities

Tabel Entitas Anak dan Asosiasi

Tabel of Subsidiaries and Associatesy

Nama Perusahaan <i>Name of Company</i>	Kepemilikan Saham <i>Stock Ownership</i>	Bidang Usaha <i>Business Fields</i>	Status Operasi <i>Operational Status</i>	Kedudukan <i>Position</i>
Entitas Anak <i>Subsidiary Entity</i>				
PT Prima Power Nusantara	99,9%	Investasi, operasi dan pemeliharaan pembangkit, Engineering Procurement and Construction (EPC) Transmisi dan Gardu Induk Tenaga Listrik, oil dan gas serta penyediaan peralatan pendukung dalam bidang ketenagalistrikan <i>Investment, Operation and Generation Maintenaince, Engineering Procurement and Construction (EPC) of Electric Power Transmission and Substation, Oil and Gas and the provision of supporting equipment in the electricity sector</i>	Beroperasi <i>Operating</i>	Jakarta
Entitas Asosiasi <i>Associated Entities</i>				
PT Energi Prima Elekrika	7,5%	Pembangkit <i>Generator</i>	Beroperasi <i>Operating</i>	Jakarta Selatan
PT Pura Daya Prima	15,0%	Pembangkit <i>Generator</i>	Beroperasi <i>Operating</i>	Jakarta
PT Multidaya Prima Elektrindo	15,0%	Pembangkit <i>Generator</i>	Beroperasi <i>Operating</i>	Jakarta Selatan
PT Permata Prima Elektrindo	15,0%	Pembangkit <i>Generator</i>	Beroperasi <i>Operating</i>	Jakarta
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia	49,0%	Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik <i>Industrial electric control and distribution equipment</i>	Beroperasi <i>Operating</i>	Jakarta Selatan

Profil Anak Perusahaan

Profile of Subsidiary Companies

PT PRIMA POWER NUSANTARA

Didirikan berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 16 Juni 2016 oleh Notaris Lenny Janis Ishak. Telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0029883.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 21 Juni 2016. PLN Enjiniring memiliki saham sebesar 99,9%.

Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah bergerak di bidang pengembangan usaha dalam bidang investasi, operasi dan pemeliharaan pada sektor ketenagalistrikan dan non-ketenagalistrikan, menyelenggarakan usaha enjiniring, pengadaan dan konstruksi/pembangunan EPC, operasi dan pemeliharaan pada sektor ketenagalistrikan dan konstruksi/pembangunan EPC, operasi dan pemeliharaan pada sektor ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan, minyak dan gas serta penyediaan peralatan pendukung dalam bidang ketenagalistrikan dan menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Prima Power Nusantara sebagai berikut.

- Komisaris Utama : Ir. Septa Hamid, Msc
- Komisaris : Mochamad Sofyan
- Direktur Utama : Ir. Saron
- Direktur Teknik : Ir. Setyo Heru Purwoko
- Direktur Keuangan : Abdul Fadil

PT PRIMA POWER NUSANTARA

Established based on Deed No. 21 dated June 16, 2016 by Notary Lenny Janis Ishak. Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Law and Human Rights number AHU-0029883.AH.01.01.Year2016 dated June 21, 2016. PLN Enjiniring owns 99.9% of shares.

The purposes and objectives of the Company engaged in business development in the fields of investment, operation and maintenance in the electricity and non-electricity sectors, conducting engineering business, procurement and construction / development of EPC, operation and maintenance in the sector of electricity and construction / development of EPC and maintenance in the electricity and non-electricity sectors, oil and gas sectors as well as procurement of supporting equipment in the electricity sector and conducting electricity business.

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Prima Power Nusantara as follows.

- *Chief Commissioner : Ir. Septa Hamid, Msc*
- *President Commissioner : Mochamad Sofyan*
- *President Director : Ir. Saron*
- *Technical Director : Ir. Setyo Herupurwoko*
- *Finance Director : Abdul Fadil*

Profil Perusahaan Asosiasi

Associated Company Profile

PT ENERGI PRIMA ELEKTRIKA

Didirikan sesuai Akta Pendirian No. 1 tanggal 24 Mei 2004 oleh Notaris Jafrizoli, SH dengan bidang usaha pembangkit (IPP Prabumulih). Telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-18964 HT.01.01.TH.2004 tanggal 29 Juli 2004. PLN Enjiniring memiliki penyertaan usaha sebesar 7,5% atas modal disetor.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Energi Prima ElektriKa sebagai berikut.

- Komisaris Utama : Budi Nugroho
- Komisaris : Fransiska Widiastuti
- Direktur Utama : Noor Wahyu Hidayat
- Direktur : Susilowati

Saat ini PT Energi Prima ElektriKa memiliki 1 lini bisnis yang bergerak dibidang pembangkit yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Lokasi : Prabumulih
- Kapasitas : 2 x 6 MW
- Jenis : Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)
- Jumlah : 7,5% penyertaan
- Status : Pembangunan selesai, mulai operasi 2006
- Investor lainnya : PT Medco Power Indonesia (92,5%)

PT PURA DAYA PRIMA

Didirikan sesuai Akta Pendirian No.34 tanggal 30 Maret 2005 oleh Notaris Eddi Setiadi, SH dengan bidang usaha pembangkit (IPP Musi II). Telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-28440 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Oktober 2005. PLN Enjiniring memiliki penyertaan usaha sebesar 15% atas modal disetor.

PT ENERGI PRIMA ELEKTRIKA

Established under the Deed of Incorporation No. 1 dated May 24, 2004 by Notary Jafrizoli, SH in the business field of power generation (IPP Prabumulih). Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights Number: C-18964 HT.01.01.TH.2004 dated July 29, 2004. PLN Enjiniring has a business participation by 7.5% of paid-up capital.

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Energi Prima ElektriKa as follows.

- *President Commissioner : Budi Nugroho*
- *Commissioner : Fransiska Widiastuti*
- *President Director : Noor Wahyu Hidayat*
- *Director : Susilowati*

Currently PT Energi Prima ElektriKa has 1 business line which is engaged in the power plant, which is detailed as follows:

- *Location : Prabumulih*
- *Capacity : 2 x 6 MW*
- *Type : Gas Engine Power Plant (PLTMG)*
- *Amount : participation by 7.5%*
- *Status : Construction completed, commencing operations in 2006*
- *Other investors : PT Medco Power Indonesia (92.5%)*

PT PURA DAYA PRIMA

Established under the Deed of Incorporation No.34 dated March 30, 2005 by Notary Eddi Setiadi, SH in the business field of power generation (IPP Musi II). Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights Number: C-28440 HT.01.01.TH.2005 dated October 17, 2005. ENG Engineering has a business participation by 15% of paid-up capital.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pura Daya Prima sebagai berikut.

- Komisaris Utama : Ir. Setiadi Wiogo MBA
- Komisaris : Aris Setiawan
- Komisaris : Slamet Sugiyono
- Komisaris : Budi Setyawan
- Direktur Utama : Robertus Dimas Prakasa
- Direktur : Alexander Tjandra
- Direktur : Bob Surahno
- Direktur : Wahyu

Saat ini PT Pura Daya Prima memiliki 1 lini bisnis yang bergerak dibidang pembangkit yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Lokasi : Musi II Palembang
- Kapasitas : 3 x 4,7 MW dan 6 MW
- Jenis : Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)
- Jumlah : 15% Penyertaan
- Status : Pembangunan selesai, mulai operasi – Juni 2006 dan combine cycle mulai awal tahun 2009.
- Investor lainnya : PT Manggala Gita Karya (85%)

PT MULTIDAYA PRIMA ELEKTRINDO

Didirikan sesuai Akta Pendirian No. 50 tanggal 15 Juli 2005 oleh Notaris Kun Hidayat, SH dengan bidang usaha pembangkit (IPP Sako). Telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-23107 HT.01.01.TH.2006 tanggal 7 Agustus 2006. PLN Enjiniring memiliki penyertaan usaha sebesar 15% atas modal disetor.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Multidaya Prima Elektrindo sebagai berikut.

- Komisaris Utama : Budi Nugroho
- Komisaris : Sutiyo
- Direktur Utama : Noor Wahyu Hidayat
- Direktur : Susilowati

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pura Daya Prima as follows.

- *President Commissioner : Ir. Setiadi Wiogo MBA*
- *Commissioner : Aris Setiawan*
- *Commissioner : Slamet Sugiyono*
- *Commissioner : Budi Setyawan*
- *President Director : Robertus Dimas Prakasa*
- *Director : Alexander Tjandra*
- *Director : Bob Surahno*
- *Director : Wahyu*

Currently PT Pura Daya Prima has 1 business line which is engaged in the power plant, with the following details:

- *Location : Musi II Palembang*
- *Capacity : 3 x 4.7 MW and 6 MW*
- *Type : Gas Engine Power Plant (PLTMG)*
- *Amount : Participation by 15%*
- *Status : Construction completed, commencing operations in June 2006 and combining cycles starting in early 2009.*
- *Other investors : PT Manggala Gita Karya (85%)*

PT MULTIDAYA PRIMA ELEKTRINDO

Established under the Deed of Incorporation No. 50 dated July 15, 2005 by Notary Kun Hidayat, SH in the business field of power generation (IPP Sako). Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights Number: C-23107 HT.01.01.TH.2006 dated 7 August 2006. PLN Enjiniring has a business participation by 15% of paid-up capital.

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Multidaya Prima Elektrindo as follows.

- *President Commissioner : Budi Nugroho*
- *Commissioner : Sutiyo*
- *President Director : Noor Wahyu Hidayat*
- *Director : Susilowati*

Saat ini PT Multidaya Prima Elektrindo memiliki 1 lini bisnis yang bergerak dibidang pembangkit yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Lokasi : Sako, Palembang
- Kapasitas : 2 x 6 MW
- Jenis : Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)
- Jumlah : 15 % penyertaan
- Status : Pembangunan selesai, mulai operasi Juni 2008
- Investor lainnya : PT Medco Power Indonesia (85%).

Currently PT Multidaya Prima Elektrindo has 1 business line which is engaged in the power plant, with the following details:

- *Location: Sako, Palembang*
- *Capacity : 2 x 6 MW*
- *Type : Gas Engine Power Plant (PLTMG)*
- *Amount : Participation by 15%*
- *Status : Construction completed, commencing operations in June 2008*
- *Other investors : PT Medco Power Indonesia (85%).*

PT PERMATA PRIMA ELEKTRINDO

Didirikan sesuai Akta Pendirian No. 43 tanggal 22 September 2006 oleh Notaris Edi Priyono,SH dengan bidang usaha pembangkit (IPP Sarolangun). Telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: W7-02476 HT.01.01.TH.2006 tanggal 14 November 2006. PLN Enjiniring memiliki penyertaan usaha sebesar 15% atas modal disetor.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Permata Prima Elektrindo sebagai berikut.

- Komisaris : Herwan
- Direktur Utama : Avit Alfaserian

Saat ini PT Permata Prima Elektrindo memiliki 1 lini bisnis yang bergerak dibidang pembangkit yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Lokasi : Sarolangun, Jambi
- Kapasitas : 2 x 7 MW
- Jenis : Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
- Jumlah : 15 % penyertaan
- Status : Pembangunan selesai, Mei 2010
- Investor Lainnya : PT Perwira Inti Megah (85%).

PT PERMATA PRIMA ELEKTRINDO

Established under the Deed of Incorporation No. 43 dated September 22, 2006 by Notary Edi Priyono, SH in the business field of power generation (IPP Sarolangun). Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights Number: W7-02476 HT.01.01.TH.2006 dated November 14, 2006. PLN Enjiniring has a business participation by 15% of paid up capital.

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Permata Prima Elektrindo as follows.

- *Commissioner : Herwan*
- *President Director : Avit Alfaserian*

Currently PT Permata Prima Elektrindo has 1 business line which is engaged in the power plant, with the following details:

- *Location : Sarolangun, Jambi*
- *Capacity : 2 x 7 MW*
- *Type : Steam Power Plant (PLTU)*
- *Amount : Participation by 15%*
- *Status : Construction completed, commencing operations in May 2010*
- *Other Investors : PT Perwira Inti Megah (85%).*

PT CROMPTON PRIMA SWITCHGEAR INDONESIA

PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (CPSI) merupakan perusahaan yang didirikan atas dasar kerja sama antara PT PLN Persero dengan Crompton Greaves Limited perusahaan asal India yang bergerak di bidang produksi peralatan ketenagalistrikan, dengan melakukan sinergi antar anak perusahaan yaitu PT PLN Enjiniring dan PT CG International Holdings Singapore PTE., LTD. PLN Enjiniring memiliki penyertaan usaha sebesar 49% atas modal disetor.

Didirikan sesuai Akta Pendirian No.3 tanggal 7 Mei 2014 oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH. dengan bidang usaha industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik. Telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-08265.40.10.2014 tanggal 12 Mei 2014. Tujuan pendirian CPSI adalah untuk alih teknologi switchgear dan sebagai bagian dari upaya meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam setiap peralatan untuk infrastruktur ketenagalistrikan. CPSI diharapkan mampu memproduksi komponen switchgear yang dibutuhkan dalam menunjang pembangunan infrastruktur kelistrikan di Indonesia.

PT Crompton Prima Switchgear Indonesia telah melaksanakan RUPS Pertama pada tanggal 10 Juli 2014 dan peningkatan modal disetor pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar USD3.900.000. CPSI telah membeli lahan sebagai lokasi pabrik di daerah Cikande pada triwulan IV/2014 dan telah dilaksanakan Ground breaking pada bulan November 2015 dan diresmikan pada Senin, 20 Agustus 2018.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Crompton Prima Switchgear Indonesia sebagai berikut.

- Komisaris Utama : Lloyd Pinto
- Komisaris : Tonny Sarief
- Direktur Utama : Manoj Gajanan Naphade
- Direktur Keuangan : Sapta Hidayat Nurdin
- Direktur Operasi : Rajesh Motiram Jadhav

PT CROMPTON PRIMA SWITCHGEAR INDONESIA

PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (CPSI) is a company established on the basis of cooperation between PT PLN Persero and Crompton Greaves Limited an Indian company engaged in the field of production of electricity equipment, by synergizing between its Subsidiary Companies namely PT PLN Enjiniring and PT CG International Holdings Singapore PTE., LTD. PLN Enjiniring has a business participation by 49% of paid up capital.

Established under the Deed of Incorporation No.3 dated May 7, 2014 by Notary Lenny Janis Ishak, SH. in the business field of electricity control and distribution equipment industry. Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights No. AHU-08265.40.10.2014 dated May 12, 2014. The purpose of establishing the CPSI is to transfer switchgear technology and as part of efforts to increase the use of local components in each equipment for electricity infrastructure. CPSI is expected to be able to produce switchgear components needed to support electricity infrastructure development in Indonesia.

PT Crompton Prima Switchgear Indonesia held the First General Meeting of Shareholders on July 10, 2014 and increased paid-up capital on July 24, 2014 amounted to USD3,900,000. CPSI purchased land as a factory location in the Cikande area in the fourth quarter of 2014 and a ground breaking was held in November 2015 and was inaugurated on Monday, August 20, 2018.

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Crompton Prima Switchgear Indonesia as follows.

- *President Commissioner : Lloyd Pinto*
- *Commissioner : Tonny Sarief*
- *President Director : Manoj Gajanan Naphade*
- *Finance Director : Sapta Hidayat Nurdin*
- *Operations Director : Rajesh Motiram Jadhav*

Lembaga Profesi Penunjang

Supporting Professional Agencies



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

- Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
- RSM Indonesia
- Plaza ASIA, Level 10
- Jl. Jned. Sudirman Kav. 59
- Jakarta 12190 - Indonesia

PUBLIC ACCOUNTING FIRM

- *Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan*
- *RSM Indonesia*
- *Plaza ASIA, Level 10*
- *Jl. Jend. Sudirman Kav. 59*
- *Jakarta 12190 - Indonesia*

NOTARIS

- Kantor Notaris & PPAT Lenny Janis, SH
- Jl. Hang Lekir 9 No. 1
- Jakarta, 12120

NOTARY

- *Notary & Land-Deed Official Office of Lenny Janis, SH*
- *Jl. Hang Lekir 9 No. 1*
- *Jakarta, 12120*

KONSULTAN HUKUM

- NAH'R Murdono Law Office
- Gedung Mitra Lantai 9, Suite 902
- Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 21
- Jakarta 12930

LAW CONSULTANT

- *NAH'R Murdono Law Office*
- *Gedung Mitra Lantai 9, Suite 902*
- *Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 21*
- *Jakarta 12930*

BAHAR Law Office

- Menara Prima Lantai 18
- Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2.
- Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950

BAHAR Law Office

- *Menara Prima Lantai 18*
- *Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2.*
- *Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950*

Penghargaan dan Sertifikasi

Award and Certification



Jenis Penghargaan/ Jenis Sertifikasi ISO 9001 : 2015

Type of Award / Type of Certification ISO 9001: 2015

Bidang Usaha yang di Sertifikasi :

Certified Business Fields:

- Desain Enjiniring (Feasibility Study, Review Desain, Bid Doc)
- Supervisi Konstruksi Instalasi Ketenagalistrikan

- Engineering Design (Feasibility Study, Design Review, Bid Doc)
- Construction Supervision of Electricity Installation

Pemberi Penghargaan/ Sertifikasi

Award Giver / Certification

- LMK - Certification
- Komite Akreditasi Nasional

- LMK - Certification
- National Accreditation Committee

Tahun Perolehan : 2017

Award Year: 2017

Periode : 2017 – 2020

Period: 2017 – 2020



Scanned by CamScanner

Jenis Penghargaan :
Sertifikat Penghargaan Sistem
Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja – PT PLN Enjiniring

Type of Award:
Certificate of Appreciation for
Occupational Safety and Health
Management System – PT PLN
Enjiniring

Nama dan Alamat Kantor Induk, Perwakilan dan Proyek

Name and Address of Main, Representative and Project Offices



KANTOR INDUK

Menara Enjiniring
Jl. Ciputat Raya No. 123
Kebayoran Lama - Jakarta 12310
Telp.(62-21) 560 8432, 560 8918, 560 9044
Fax.(62-21) 564 0132
Website : www.plne.co.id
Email : contact@plne.co.id
Instagram : @pln_enjiniring

KANTOR REPRESENTATIF

CNG Plant Bangkanai

Desa Karendan, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara,
Kalimantan Tengah

ANAK PERUSAHAAN

PT PRIMA POWER NUSANTARA
Menara Enjiniring Lt. 7
Jl. Ciputat Raya No. 123
Kebayoran Lama - Jakarta 12310
Telp.(62-21) 227 68719, 278 28556
Fax.(62-21) 227 69986
Email : info@primponus.co.id

MAIN OFFICE

Menara Enjiniring
Jl. Ciputat Raya No. 123,
Kebayoran Lama - Jakarta 12310
Phone.(62-21) 560 8432, 560 8918, 560 9044
Fax.(62-21) 564 0132
Website : www.plne.co.id
Email : contact@plne.co.id
Instagram : @pln_enjiniring

REPRESENTATIVE OFFICE

CNG Plant Bangkanai

Desa Karendan, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara,
Kalimantan Tengah

SUBSIDIARY COMPANY

PT PRIMA POWER NUSANTARA
Menara Enjiniring
Jl. Ciputat Raya No. 123,
Kebayoran Lama - Jakarta 12310
Phone.(62-21) 227 68719, 278 28556
Fax.(62-21) 227 69986
Email : info@primponus.co.id

PERUSAHAAN AFILIASI

■ PT PURA DAYA PRIMA

Jl. Raya Kelapa Hibrida Blok PF 23 No. 11-12
Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250

■ PT PERMATA PRIMA ELEKTRINDO

Panin Tower Lantai 11, Senayan City Lot 19
Jl. Asia Afrika, Jakarta Selatan, 10270

■ PT ENERGI PRIMA ELEKTRIKA

Panin Tower Lantai 11, Senayan City Lot 19
Jl. Asia Afrika, Jakarta Selatan, 10270
Telp.(62-21) 29953300

■ PT MULTIDAYA PRIMA ELEKTRINDO

The Energy Building Lantai 50, SCBD Lot 11 A
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53. Jakarta, 12190

■ CROMPTON PRIMA SWITCHGEAR INDONESIA

Menara Enjiniring
Jl. Ciputat Raya No. 123 Pondok Pinang
Kebayoran Lama - Jakarta 12310
Indonesia
Telp.(62-21) 2751-0363

Alamat Pabrik :

Kawasan Industri Modern Cikande
Jl. Modern Industri VI Blok A No. 4
Desa Nambo Ilir Kec. Kibin
Serang – Banten 42185
Telp. (62-254) 840 8448
Fax. (62-254) 840 8848

AFFILIATED COMPANIES

■ PT PURA DAYA PRIMA

*Jl. Raya Kelapa Hibrida Blok PF 23 No. 11-12
Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250*

■ PT PERMATA PRIMA ELEKTRINDO

*Panin Tower Lantai 11, Senayan City Lot 19
Jl. Asia Afrika, Jakarta Selatan, 10270*

■ PT ENERGI PRIMA ELEKTRIKA

*Panin Tower Lantai 11, Senayan City Lot 19
Jl. Asia Afrika, Jakarta Selatan, 10270
Phone.(62-21) 29953300*

■ PT MULTIDAYA PRIMA ELEKTRINDO

*The Energy Building Lantai 50, SCBD Lot 11 A
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53. Jakarta, 12190*

■ CROMPTON PRIMA SWITCHGEAR INDONESIA

*Menara Enjiniring
Jl. Ciputat Raya No. 123 Pondok Pinang
Kebayoran Lama - Jakarta 12310
Indonesia
Phone.(62-21) 2751-0363*

Factory Address :

*Cikande Modern Industrial Estate
Jl. Modern Industri VI Blok A No. 4
Desa Nambo Ilir Kec. Kibin
Serang – Banten 42185
Phone. (62-254) 840 8448
Fax. (62-254) 840 8848*

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis





Tinjauan Industri

Perekonomian Global

Beberapa pergeseran struktural di perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir terus menguat pada 2019. Pergeseran dipicu empat hal yang saling terkait, dimulai dari kebijakan banyak negara yang lebih berorientasi domestik (inward looking orientation) dan volatilitas arus modal dunia yang meningkat, hingga kepada digitalisasi ekonomi yang naik pesat dan perilaku agen ekonomi yang berubah sebagai respons atas perkembangan digital tersebut. Pergeseran ini menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan makroekonomi, sehingga berimplikasi pada pergeseran lain dari aspek kebijakan.

Perubahan perilaku ekonomi sejalan dengan perkembangan digitalisasi yang menguat berimplikasi pada berubahnya efektivitas kebijakan yang sebelumnya pernah ditempuh. Strategi kebijakan tidak hanya dapat bertumpu pada satu kebijakan dan satu instrumen, namun perlu didukung kebijakan lain sehingga menjadi satu bauran kebijakan yang terintegrasi. Pergeseran dalam perekonomian global tersebut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dunia 2019 yang belum kuat. Pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 2,9% serta diikuti menurunnya pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas sejalan dengan menguatnya kebijakan yang berorientasi domestik.

Perkembangan dunia ini memicu tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global sehingga kembali meningkatkan volatilitas arus modal dunia. Ketidakpastian tetap tinggi karena saat bersamaan terjadi proses pergeseran perilaku agen ekonomi dunia yang didorong oleh dampak digitalisasi dalam perekonomian global yang terus meluas. Kondisi ini mendorong berbagai otoritas di banyak negara menempuh bauran kebijakan secara terintegrasi. Pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter banyak ditempuh pada 2019 guna memitigasi risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut juga ditopang oleh kebijakan reformasi struktural sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan ekonomi, meskipun dengan kecepatan yang belum sesuai harapan akibat siklus ekonomi dunia yang belum kuat.

Industry Overview

Global Economy

Several structural shifts in the global economy that have occurred in the last few years have continued to strengthen in 2019. The shifts were triggered by four interrelated things, starting from policies of many countries that are more domestic-oriented (inward looking orientation) and the increasing volatility of world capital flows, to a rapidly growing economic digitization as well as the changing behavior of economic agents in response to these digital developments. This shift creates complexity in macroeconomic management, thus implicating other shifts in policy aspects.

Changes in economic behavior in line with the development of stronger digitalization have implications on changing the effectiveness of policies that have previously been taken. A policy strategy can not only rely on one policy and one instrument, but also needs to be supported by other policies so that it becomes an integrated policy mixture. This shift has contributed to the weak 2019 world economic growth in the global economy. Global economic growth slowed down to 2.9% and was accompanied by a decline in world trade volume growth and commodity prices in line with the strengthening policies that were domestic oriented.

This global development has triggered high levels of uncertainty in global financial markets, thereby, it will be increasing the volatility of world capital flows. These Uncertainties remain high because there is a process of shifting in the behavior of world economic agents driven by the impact of digitalization in the global economy expanding at the same time. This condition has prompted various authorities in many countries to adopt an integrated policy mixture. Many fiscal and monetary policy's loosening was taken in 2019 to mitigate the risk of slowing economic growth. This policy was also supported by structural reform policies as a measure to strengthen economic resilience, albeit at a pace that was not yet as expected due to the weak global economic cycle.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat berdampak kepada kinerja ekspor Indonesia, meskipun secara keseluruhan ekonomi Indonesia 2019 tetap berdaya tahan. Dengan karakter sebagai negara dengan perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat berdampak pada ekspor 2019 yang menurun. Namun demikian, permintaan domestik yang tetap kuat dapat menopang perekonomian Indonesia tetap baik, sehingga mampu mencatat pertumbuhan 5,02% pada 2019. Permintaan domestik yang kuat antara lain didorong oleh bauran kebijakan akomodatif Bank Indonesia dan stimulus kebijakan fiskal, serta dampak positif pelaksanaan Pemilihan Umum sampai dengan triwulan III 2019.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik berkontribusi pada aliran masuk modal asing yang meningkat pada 2019 dan menopang surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Kondisi ini kemudian berkontribusi pada nilai tukar yang menguat dan inflasi yang tetap berada dalam kisaran target 3,5+1%. Stabilitas sistem keuangan juga tetap terkendali, meskipun belum kuatnya pertumbuhan kredit perbankan yang dipengaruhi oleh sisi permintaan dan penawaran menjadi perhatian.

Sumber : Perkembangan Ekonomi Global – Bank Indonesia

Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan ekonomi global yang melambat berdampak pada turunnya kinerja ekspor Indonesia 2019 (Diagram 1). Ekspor 2019 berkontraksi 0,87%, berbalik arah dari kinerja 2018 yang tumbuh 6,55%. Penurunan ekspor tercatat cukup dalam pada semester I 2019, sebelum sedikit berkurang pada semester II 2019 ditopang oleh peningkatan permintaan beberapa produk ekspor, seperti crude palm oil (CPO) dan batu bara. Perbaikan ekspor di beberapa komoditas merupakan dampak diversifikasi produk dan tujuan ekspor, serta beberapa kebijakan domestik.

The global economic growth that is not yet strong has an impact on Indonesia's export performances, even though the overall Indonesian economy in 2019 remains resilient. With the character of being a country with an open economy, slowing world economic growth has resulted in a decline in exports in 2019. However, domestic demand that remains strong can sustain the Indonesian economy to remain sound, enabling it to record a growth of 5.02% in 2019. Strong domestic demand is driven by the accommodative policy mixture of Bank Indonesia and fiscal policy stimulus, as well as the positive impact of the implementation of the General Election, up to the third quarter of 2019.

Indonesia's continued good economic growth contributed to the increased foreign capital inflows in 2019 and sustained Indonesia's balance of payments (BOP) surplus. This condition contributed to a stronger exchange rate and inflation that remained within the target range of 3.5 + 1%. Financial system stability has also remained under control, although the insufficient growth in bank credit, influenced by the demand and supply sides, is still a concern.

Source: Global Economic Development - Bank Indonesia

The Economy of Indonesia

A slowing global economic growth has resulted in a decline in Indonesia's export performance in 2019 (Diagram 1). The number of exports contracted 0.87% in 2019, reversing direction from 2018's performance which grew by 6.55%. The decline in exports numbers was recorded quite deep in the first semester of 2019, before it decreased slightly in the second semester of 2019, supported by increased demand for several export products, such as crude palm oil (CPO) and coal. The improvement in the number of exports in several commodities was the impact of product diversification and export destinations, as well as several domestic policies.

Diversifikasi produk ekspor didukung daya saing yang membaik sehingga menopang kinerja positif beberapa produk ekspor seperti produk besi baja, otomotif, pulp dan waste paper, emas, dan serat tekstil. Tujuan ekspor juga meluas seperti ke pasar ASEAN dan Arab Saudi, khususnya untuk produk besi baja. Sementara itu, beberapa kebijakan domestik memengaruhi perbaikan kinerja ekspor komoditas nikel dan tembaga. Di tengah kinerja sektor eksternal yang kurang menguntungkan, permintaan domestik tetap kuat sehingga menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 tetap baik yakni 5,02%.

Konsumsi swasta sedikit meningkat didukung oleh daya beli yang terpelihara sejalan dengan pendapatan yang terjaga dan inflasi yang rendah, serta keyakinan konsumen yang baik. Konsumsi swasta juga didukung oleh dampak penyelenggaraan Pemilu 2019 sehingga meningkatkan pertumbuhan konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRRT). Kinerja investasi tetap baik, terutama didukung investasi bangunan yang tetap tinggi didorong oleh pembangunan infrastruktur dan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta kinerja konstruksi swasta yang meningkat. Sementara itu, investasi nonbangunan menurun dipengaruhi kontraksi ekspor dan permintaan domestik yang tidak sekuat tahun sebelumnya.

Daya tahan perekonomian yang tetap baik juga dipengaruhi proses penyesuaian ekonomi domestik terhadap gejolak eksternal sehingga mendorong penurunan impor. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi domestik yang terjaga pada 2019 berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, tercermin pada menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Daya tahan pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap baik ditopang respons banyak daerah yang mengoptimalkan perdagangan antardaerah serta meningkatkan nilai tambah produk. Kondisi ini tergambar pada perdagangan antardaerah yang meningkat seperti pada produk minyak sawit terkait implementasi program B20 yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera.

Pertumbuhan ekonomi Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) yang meningkat juga didukung oleh perbaikan ekspor komoditas tembaga dan bijih nikel. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan ditopang oleh perbaikan ekspor komoditas primer, antara lain ekspor batu bara ke Tiongkok. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa dan Sulampua (Sulawesi-Maluku-Papua) melambat

Diversification of export products is supported by an improved competitiveness, which supports the positive performance of several export products, such as steel products, automotive products, pulp and waste paper, gold, and textile fibers. Export destinations also expand to the ASEAN market and Saudi Arabia, especially for steel products. Meanwhile, several domestic policies affected the improvement in export performance of nickel and copper commodities. Amid the unfavorable performance of the external sector, domestic demand remains strong, thus supporting Indonesia's 2019 economic growth to remain good, which was 5.02%.

Private consumption has increased slightly on the back of maintained purchasing power in line with controlled income and low inflation, as well as good consumer confidence. Private consumption is also supported by the impact of holding the 2019 General Election, thereby increasing the consumption growth for Non-Profit Institutions Serving on Households (LNPRRT). Investment performance remains good, mainly supported by high investment in construction, driven by infrastructure development and the construction of National Strategic Projects (PSN), as well as the improving performance of private construction. Meanwhile, non-construction investment declined due to contraction in exports and less strong domestic demand.

The continued resilience of the economy was also influenced by the process of adjusting the domestic economy to external shocks, which led to a decline in imports. Overall, sustained domestic economic growth in 2019 had a positive impact on the welfare of the people, as reflected in the reduction in poverty and unemployment rates. The resilience of domestic economic growth that remains sound is supported by the response of many regions that optimize inter-regional trade and increase product added value. This condition is reflected in the increasing inter-regional trade, such as in palm oil products related to the implementation of the B20 program which supports economic growth in Sumatra.

The increasing economic growth of Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) was also supported by improved exports of copper and nickel ore. Kalimantan's economic growth has been supported by some improvements in primary commodity exports, including coal exports to China. Meanwhile, economic growth in the Java and Sulampua (Sulawesi-Maluku-Papua) regions has been slowed down

terutama dipengaruhi ekspor yang menurun serta kendala produksi tembaga di Sulampua. Perekonomian domestik yang tetap berdaya tahan mendorong kenaikan aliran masuk modal asing, menopang surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), dan memperkuat nilai tukar Rupiah. NPI 2019 tercatat surplus 4,68 miliar dolar AS, berbalik arah dari kondisi 2018 yang mengalami defisit sebesar 7,13 miliar dolar AS.

Surplus NPI 2019 didukung oleh kenaikan surplus Transaksi Modal dan Finansial (TMF) sejalan terjaganya optimisme investor terhadap prospek perekonomian domestik dan tingginya daya tarik pasar keuangan domestik, serta menurunnya ketidakpastian pasar keuangan dunia pada triwulan IV-2019. Defisit transaksi berjalan yang menurun menjadi 2,72% dari PDB juga mendukung surplus NPI 2019. Cadangan devisa juga meningkat menjadi 129,18 miliar dolar AS atau setara dengan pembayaran 7,33 bulan impor dan ULN pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Kinerja sektor eksternal yang positif kemudian berkontribusi pada apresiasi nilai tukar Rupiah, yang secara rerata menguat 0,76% dan secara point-to-point (ptp) menguat 3,58% sehingga ditutup di level Rp13.883 per dolar AS pada akhir 2019. Stabilitas nilai tukar Rupiah juga didukung struktur pasar valas yang makin dalam dan efisien, termasuk pasar Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) yang terus meningkat. Inflasi juga tetap rendah dan terkendali sehingga mendukung stabilitas makroekonomi. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2019 tercatat 2,72%, menurun dibandingkan dengan capaian 2018 yang mencapai 3,13%. Perkembangan ini membawa inflasi IHK kembali berada dalam kisaran sasaran $3,5 \pm 1\%$, melanjutkan pencapaian 4 tahun terakhir yang juga konsisten berada dalam kisaran sasarannya.

Inflasi 2019 yang rendah dipengaruhi faktor siklikal permintaan domestik yang terjaga dan nilai tukar yang terapresiasi, serta inflasi kelompok Administered Prices yang rendah. Selain itu, inflasi yang tetap rendah juga dipengaruhi oleh perbaikan struktural seperti peran ekspektasi inflasi dalam pembentukan inflasi yang makin besar dan terjangkau, dampak nilai tukar ke inflasi yang menurun, serta dampak positif sinergi koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi pangan. Stabilitas sistem keuangan juga tetap

mainly due to declining exports and constraints on copper production in Sulampua. The domestic economy, which remains resilient, encourages an increase in foreign capital inflows, supports the Indonesian balance of payments (BOP) surplus, and strengthens the rupiah exchange rate. The 2019 balance of payments recorded a surplus of 4.68 billion US dollars, reversing the direction of 2018 which experienced a deficit of 7.13 billion US dollars.

The 2019 balance of payments surplus was supported by an increase in the Capital and Financial Transaction (TMF) surplus in line with maintained investor optimism regarding the domestic economic outlook and the high attractiveness of the domestic financial market, as well as reduced uncertainty on world financial markets in Q4 2019. The current account deficit which decreased to 2.72% of GDP also supports the 2019 balance of payments surplus. Foreign exchange reserves also increased to 129.18 billion US dollars, equivalent to 7.33 months of imports and government external debt payments, and is above the international adequacy standard of around three months of imports.

Positive external sector performance contributed to the appreciation of the Rupiah exchange rate, which on average strengthened 0.76% and point-to-point (ptp) strengthened 3.58%, closing at Rp13,883 per US dollar at the end of 2019. The stability of the Rupiah exchange rate was also supported by the structure of the foreign exchange market that is getting deeper and more efficient, including the domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) market which continues to grow. Inflation also remains low and under control, thus supporting macroeconomic stability. Consumer Price Index (CPI) inflation in 2019 was recorded at 2.72%, a decrease compared to the 2018 achievement of 3.13%. This development brought CPI inflation back to within the target range of $3.5 \pm 1\%$, continuing the achievement of the last 4 years which was also consistently within the target range.

The low 2019 inflation was influenced by cyclical factors of maintained domestic demand and an appreciated exchange rate, as well as low Administered Prices inflation. In addition, inflation that remains low is also influenced by structural improvements, such as the role of inflation expectations in shaping inflation that is getting bigger and more anchored, the impact of the exchange rate to lower inflation, and the positive impact of coordination between the Government and Bank Indonesia in controlling food inflation. Financial

terkendali, didukung transmisi kebijakan moneter yang baik. Pada 2019, Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) berada dalam zona normal didukung oleh kinerja institusi keuangan dan pasar keuangan yang baik. Hal ini tercermin pada rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) yang terjaga, risiko kredit bermasalah (Non Performing Loans) yang aman, dan rasio alat likuid bank terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang tinggi. Transmisi pelonggaran kebijakan moneter yang tetap berjalan baik juga mendukung perkembangan ini. Likuiditas di pasar uang dan perbankan tetap memadai sehingga mendukung cukup baiknya transmisi suku bunga di pasar uang. Transmisi kepada suku bunga perbankan juga berlanjut, meskipun belum optimal.

Di tengah stabilitas sistem keuangan yang terjaga, fungsi intermediasi perbankan menjadi perhatian. Pertumbuhan kredit perbankan 2019 tercatat sebesar 6,08%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 sebesar 11,75%. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit yang lambat dipengaruhi perilaku korporasi yang menahan permohonan kredit sejalan dengan kinerja ekspor dan kegiatan investasi nonbangunan yang menurun. Sementara dari sisi penawaran, perbankan lebih berhati-hati menyalurkan kredit mempertimbangkan perkembangan ketidakpastian global yang dapat memengaruhi kinerja korporasi domestik. Pertumbuhan kredit yang rendah berpengaruh pada pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) yang belum meningkat kuat. Pertumbuhan M2 tercatat 6,5% pada 2019, hanya sedikit naik dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 sebesar 6,3%. Sejalan dengan stabilitas sistem keuangan yang terkendali, kelancaran sistem pembayaran tetap terjaga baik.

Pertumbuhan uang tunai tetap positif di tengah pesatnya inovasi dan pertumbuhan instrumen nontunai. Sementara itu, transaksi pembayaran nontunai menggunakan ATM, Kartu Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik (UE) posisi Desember 2019 tumbuh 2,45% (yoy), didominasi oleh instrumen kartu ATM/Debit dengan pangsa 92,92%. Transaksi UE juga meningkat signifikan mencapai 188,31% (yoy), yang mengindikasikan terus menguatnya preferensi masyarakat terhadap penggunaan uang digital dalam bertransaksi.

Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia 2019

system stability was also under control, supported by a well monetary policy transmission. The Financial System Stability Index (ISSK) was in the normal zone in 2019, supported by the good performance of financial institutions and financial markets. This is reflected in the capital adequacy ratio (Capital Adequacy Ratio) that is maintained, the risk of non-performing loans (Non-Performing Loans), and the ratio of bank liquid assets to third party funds (LA / TPF). The steady transmission of monetary policy easing has also supported these developments. Liquidity on the money market and banking sector remains adequate, thus supporting adequate transmission of interest rates on the money market.

The transmission to banking interest rates also continued, although it was not yet optimal. Amid maintained financial system stability, the banking intermediary function has become a concern. Banking credit growth in 2019 was recorded at 6.08%, much lower than 2018 growth of 11.75%. On the demand side, slow credit growth is influenced by corporate behavior holding back credit applications in line with the decline in export performance and non-construction investment activity. Meanwhile, on the supply side, banks are more careful in extending credit considering developments in global uncertainty that could affect the performance of domestic corporations. Low credit growth has influenced the growth of the money supply in a broad sense (M2), which has not increased strongly. M2 growth was recorded at 6.5% in 2019, only a slight increase compared to 2018 growth of 6.3%. Aligning the controlled financial system stability, the smooth operation of the payment system was maintained.

Cash growth remains positive amid rapid innovation and growth in non-cash instruments. Meanwhile, non-cash payment transactions using ATMs, Debit Cards, Credit Cards, and Electronic Money (EU) grew 2.45% (yoy) in December 2019, dominated by ATM/Debit card instruments with a share of 92.92%. The EU transactions also increased significantly to reach 188.31% (yoy), which indicates the continued strengthening of people's preferences for the use of digital money in transactions.

Source: 2019 Indonesian Economic Report

Kondisi Kelistrikan Nasional

Penjualan tenaga listrik selama lima tahun (2013-2017) terakhir PLN (Holding) tumbuh rata-rata 5,1% per tahun. Pertumbuhan penjualan tenaga listrik mulai pulih dari dampak krisis keuangan global mulai tahun 2010. Sejak tahun 2012, PLN sangat aktif dalam penyambungan pelanggan. Rata-rata penambahan pelanggan pertahun dari tahun 2012-2017 yaitu sekitar 3,7 juta pelanggan pertahun.

Pada tahun 2015, penjualan PLN turun drastis yaitu hanya sekitar 2,1%. Namun di sisi lain jumlah pelanggan tetap bertambah signifikan, yaitu sebesar 3,7 juta pelanggan. Pada tahun 2016, PLN dapat meningkatkan penjualan menjadi 6,4%. Penjualan ini turun kembali menjadi 3,6% pada tahun 2017. Penjualan tenaga listrik di Regional Sumatera pada 5 tahun terakhir (2013-2017) tumbuh lebih tinggi di banding penjualan Holding, yaitu rata-rata 6,1% per tahun. Pada tahun 2017, Regional Sumatera tumbuh sebesar 5,1%, lebih tinggi dari estimasi pertumbuhan penjualan yaitu 4,5%. Untuk Regional Jawa-Bali dan Nusa Tenggara, rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir adalah sebesar 4,7%. Pertumbuhan ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata di Regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua. Penurunan penjualan pada tahun 2015 terlihat drastis pada sektor industri. Sektor ini turun hingga -2,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 sektor ini mulai pulih dan tumbuh sebesar 6,5%. Penjualan Regional Jawa Bali dan Nusa Tenggara pun naik menjadi 6,3%. Namun pada 2017, penjualan di regional ini kembali mengalami penurunan penjualan menjadi 3,1%. Penjualan di semua sektor pelanggan turun dan sektor pelanggan residensial mengalami penurunan yang paling drastis. Penjualan tenaga listrik di Kalimantan tumbuh rata-rata 8,5% per tahun dari tahun 2011-2017.

Porsi penjualan tenaga listrik masih didominasi oleh sektor rumah tangga. Sektor bisnis cukup berkembang di Regional Kalimantan. Kegiatan disektor industri pun nampak mulai didorong sehingga bertahap penjualan di sektor ini makin meningkat. Penjualan tenaga listrik di Sulawesi tumbuh rata-rata 9,0% per tahun dari tahun 2011-2017. Cukup tingginya realisasi pertumbuhan penjualan ini dan masih banyaknya daftar tunggu

National Electricity Condition

The PLN (Holding) Electricity sales during the last five years (2013-2017) grew an average of 5.1% per year. Electricity sales growth has begun to recover from the impact of the global financial crisis starting in 2010. Since 2012, PLN has been very active in customer connection. The average addition of customers from 2012-2017 is around 3.7 million customers per year.

PLN sales fell drastically to only about 2.1% in 2015. On the other hand, the number of customers continued to increase significantly, namely by 3.7 million customers. PLN can increase sales to 6.4% in 2016. This sales fell back to 3.6% in 2017. Electric power sales in the Sumatra Region in the last 5 years (2013-2017) grew higher than Holding sales, which was an average of 6.1% per year. The Sumatra Region sales grew by 5.1%, higher than the estimated sales growth of 4.5% in 2017. The average growth rate of the Java-Bali and Nusa Tenggara regions in the last five years has been 4.7%. This growth is relatively lower than the average growth in the Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, and Maluku-Papua regions. The decline in sales in 2015 was seen drastically in the industrial sector. This sector fell by -2.8% compared to the previous year. This sector started to recover and grew by 6.5% in 2016. Regional sales for Java Bali and Nusa Tenggara also increased to 6.3%. However, in 2017, sales in this region experienced another decline in sales to 3.1%. Sales in all customer sectors fell and the residential customer sector experienced the most drastic decline. The electricity sales in Kalimantan grew by an average of 8.5% from 2011-2017 per year.

The share of electricity sales is still dominated by the household sector. The business sector is quite developed in the Kalimantan Region. Activities in the industrial sector are starting to be encouraged so that sales in this sector have gradually increased. Electricity sales in Sulawesi grew by an average of 9.0% from 2011-2017 per year. The high realization of sales growth and the large number of waiting lists for large customers have resulted in the

pelanggan besar menyebabkan perlunya proyek-proyek infrastruktur ketenagalistrikan untuk beroperasi tepat waktu serta penambahan unit-unit pembangkit. Untuk pelanggan besar yang membutuhkan listrik dalam waktu dekat yang belum dapat dilayani dari rencana pengembangan pembangkit kedepan akan dilayani dengan sewa ataupun mobile powerplant (MPP). Hal yang samajuga terjadi di daerah Indonesia Timur lainnya, yaitu Maluku dan Papua. Pada umumnya upaya penyelesaian krisis daya jangka pendek adalah dengan memperpanjang sewa pembangkit ataupun dengan MPP. Pertumbuhan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur diperkirakan masih berpotensi untuk meningkat karena daftar tunggu yang tinggi akibat keterbatasan pasokan dan rasio elektrifikasi yang akan terus ditingkatkan. Hingga Oktober 2018, total kapasitas terpasang pembangkit di Indonesia adalah 56.509,53 MW yang terdiri atas pembangkit PLN 40.486,60 MW, swasta 13.350,79 MW dan sewa 2.672,14 MW, seperti ditunjukkan pada Tabel 4.19. Sebagian besar pembangkit tersebut berupa PLTU batubara (49%), disusul PLTG/PLTGU/PLTMG sekitar 27%, PLTD sekitar 12%, PLTA/PLTM sekitar 11%, PLTP sekitar 3% dan sisanya EBT lain. Hingga Oktober 2018, total daya mampu neto pembangkit di Indonesia adalah 51.186 MW. Hingga Oktober 2018, terdapat 6.671 unit pembangkit di Indonesia yang terdiri atas 5.921 unit pembangkit PLN, 313 unit pembangkit swasta dan 437 unit pembangkit sewa.

Realisasi bauran energi hingga Oktober 2018 masih didorninasi oleh batubara sebesar 59,6%. PLN telah berhasil menurunkan pemakaian BBM dari 23,7% pada tahun 2011 menjadi hanya 5,8% hingga Oktober 2018, dengan beroperasinya beberapa PLTU batubara dan beberapa PLTU IPP. Selain itu PLN juga telah berhasil meningkatkan pemakaian bahan bakar gas dari 20,5% pada tahun 2011 menjadi 22,5% hingga Oktober 2018. Sedangkan bauran energi dari energi baru dan terbarukan (EBT) mengalami sedikit peningkatan yaitu 12,2% pada tahun 2011 menjadi 12, 1 % hingga Oktober 2018.

(Sumber : Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) 2019-2028).

need for electricity infrastructure projects to operate on time as well as the additional for power plants units. For the large-scaling customers who need electricity in the near future who cannot yet be served from the future power plant development plan will be served by lease or mobile power plant (MPP). The same thing happened in other areas of Eastern Indonesia, namely Maluku and Papua. In general, the effort to resolve the short-term power crisis is to extend the power plant lease or the MPP. It is estimated that the growth in Sumatera, Kalimantan, Sulawesi and East Indonesia still has the potential to increase due to the high waiting list due to limited supply and the electrification ratio that will continue to be increased. As of October 2018, the total installed capacity of power plants in Indonesia is 56,509.53 MW, consisting of 40,486.60 MW PLN plants, 13,350.79 MW private plants and 2,672.14 MW rental power plants, as shown in Table 4.19. Most of the power plants are coal power plant (PLTU) (49%), followed by Gas Power Plant (PLTG)/Gas and Steam Power Plant (PLTGU)/ Gas Engine Power Plant (PLTMG) around 27%, Diesel Power Plant (PLTD) around 12%, Hydroelectric Power Plant (PLTA)/ Mini-Hydro Power Plant (PLTM) around 11%, Geothermal Power Plant (PLTP) around 3% and the rest are from the other EBT. As of October 2018, the total net power of power plants capacity in Indonesia is 51,186 MW. As of October 2018, there were 6,671 power plant units in Indonesia, consisting of 5,921 PLN power plant units, 313 private power plant units and 437 rental power plant units.

The realization of the energy mixture was still dominated by coal at 59.6% until October 2018. PLN has succeeded in reducing fuel consumption from 23.7% in 2011 to only 5.8% by October 2018, with the operation of several coal power plants and several IPP power plants. In addition, PLN has also succeeded in increasing the use of natural gas from 20.5% in 2011 to 22.5% by October 2018. Meanwhile, the energy mixture of a new and renewable energy (EBT) has increased slightly, namely 12.2% in 2011 to 12, 1% until October 2018.

(Source: PT PLN (Persero) Electricity Supply Business Plan 2019-2028).

Posisi PLN Enjiniring di Industri Kelistrikan

Menggunakan Internal-External-Matrix, dapat digambarkan posisi PLNE saat ini, untuk menentukan strategi selanjutnya yang tepat dapat di tempatkan dalam suatu Matriks Internal-Eksternal (Matriks IE). Matriks IE membagi posisi perusahaan atas tiga kelompok strategi yang akan diterapkan (terdapat pada gambar matrix dibawah), yakni:

1. Grow and Build
2. Hold and Maintain
3. Harvest or Divest

Melalui expert judgement, penilaian posisi PT PLNE berada di:

- i. Untuk faktor internal (IFE) masih dibawah standar rata – rata (skor 2.17)
- ii. Untuk faktor eksternal (EFE) dalam kondisi baik atau favorable (skor 2.83)

Dengan demikian posisi PLN Enjiniring saat ini adalah berada di Hold and Maintain. Pada periode lima tahun ke depan, perusahaan harus fokus melakukan penguatan serta konsolidasi pada core business PLN Enjiniring; yaitu dengan fokus strategi utama pada Market Penetration dan Product Development.

1. Market Penetration (Penetrasi Pasar): Fokus pada peningkatan pendapatan dengan meningkatkan nilai kontrak untuk tiap proyek pekerjaan. Nilai kontrak penjualan produk atau layanan yang sudah ada (existing) adalah sebesar 1-2% dari capex proyek menuju ke kontrak yang memiliki nilai 10-15% dari capex proyek.
2. Product Development (Pengembangan Produk): Fokus pada pengembangan produk dan jasa existing (FS, BD, ED, SPV) dan jasa Engineering Integrator (Detail Engineering Design).

PLN Engineering Position in the Electrical Industry

It can be described, using the Internal-External-Matrix, that the current position of the PLNE, to determine the next appropriate strategy that can be implemented in an Internal-External Matrix (IE Matrix). The IE matrix divides the company's position into three groups of strategies to be implemented (shown in the matrix images below), namely:

1. *Grow and Build*
2. *Hold and Maintain*
3. *Harvest or Divest*

Through expert judgment, PT PLNE's position assessment is in:

- i. *Internal factors (IFE) are still below the average standard (score 2.17)*
- ii. *For external factors (EFE) in good or favorable conditions (score 2.83)*

Thus the current position of PLN Enjiniring is at Hold and Maintain. In the next five years, the company must focus on strengthening and consolidating the core business of PLN Enjiniring; namely with the main strategic focus on Market Penetration and Product Development.

1. *Market Penetration : Focus on increasing revenue by increasing the contract value for each work project. The value of the existing product or service sales contract is 1-2% of the project capex leading to the contract which has a value of 10-15% of the project capex.*
2. *Product Development : Focus on developing existing products and services (FS, BD, ED, SPV) and Engineering Integrator services (Detail Engineering Design).*

Tinjauan Operasional

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi usaha injiniring, pengadaan dan konstruksi, operasi, pemeliharaan pada bidang ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan sebagai berikut :

- a. Jasa konsultasi injiniring dan atau manajemen proyek termasuk integrator proyek ketenagalistrikan;
- b. Studi sistem kelistrikan;
- c. Studi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
- d. Informasi teknologi;
- e. Pendidikan dan pelatihan;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Penyediaan tenaga listrik;
- h. Perencanaan, pengadaan, pembangunan dan atau pemasangan (jasa konstruksi) bidang bidang pembangkitan, transmisi dan/atau distribusi;
- i. Pemeliharaan dan atau pengoperasian bidang pembangkitan, transmisi dan atau distribusi;
- j. Pengolahan, penimbunan, transportasi, niaga, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi minyak dan atau gas bumi;
- k. Penyediaan/manufaktur berbagai peralatan elektrikal untuk transmisi dan elektrikal untuk transmisi dan distribusi listrik.

Kegiatan usaha yang berjalan saat ini dikelompokkan ke dalam tiga bidang usaha yaitu Jasa Enjiniring, Jasa Non Enjiniring, dan Jasa Lainnya. Jasa Enjiniring meliputi Pembangkitan (jasa mendisain), Transmisi dan Distribusi (jasa mendisain) dan Konstruksi (jasa supervisi). Sedangkan untuk Jasa Non Enjiniring berupa jasa dalam bidang Operation and Maintenance, dan Jasa Lainnya berupa berupa jasa di bidang Informasi dan Teknologi.

Rincian dari bidang usaha Jasa Enjiniring dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Operational Review

Based on the Article 3 of the Company's articles of association, the Company's scope of activities includes engineering, procurement and construction, operation, maintenance in the electricity and non-electricity sectors as follows:

- a. Engineering consulting and/or project management services including electricity project integrators;*
- b. Electrical system study;*
- c. Environmental impact analysis study (AMDAL);*
- d. Information technology;*
- e. Education and training;*
- f. Research and development;*
- g. Electricity supply;*
- h. Planning, procurement, construction and or installation (construction services) in the field of power plants, transmission and/or distribution;*
- i. Maintenance and or operation of power plant sector, transmission and or distribution;*
- j. Processing, stockpiling, transporting, trading, operating and maintaining oil and or natural gas installations;*
- k. Supply/manufacture of various electrical equipment for transmission and distribution of electricity.*

The current business activities are grouped into three business sectors, namely Engineering Services, Non-Engineering Services, and Other Services. Engineering services include power plants (design services), transmission and distribution (design services) and construction (supervision services). Meanwhile, non-engineering services are in the form of operating and maintaining services, and other services in the form of information and technology services sector.

Details of the Engineering Services business sectors are described in the table below:

Tabel Jenis Jasa Enjiniring PLN Enjiniring

Table of Types of Engineering Services for PLN Engineering
(for more updated information please coordinate with SAR)

Pembangkitan <i>Generation</i>	Transmisi dan Distribusi <i>Transmission and Distribution</i>	Konstruksi <i>Construction</i>
Studi Kelayakan <i>Feasibility Study</i>	Survei <i>Survey</i>	Supervisi Konstruksi <i>Construction Supervision</i>
Penyelidikan Tanah <i>Soil Investigation</i>	Penyelidikan Tanah <i>Soil Investigation</i>	Pengawasan QA QC <i>QA/QC Supervision</i>
Penyusunan Bid Dokumen <i>Bidding Document Preparation</i>	Penyusunan Basic Design <i>Basic Design Preparation</i>	
Penyusunan Request for Proposal <i>Request for Proposal Preparation</i>	Penyusunan Bid Dokumen <i>Bidding Document Preparation</i>	
Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir <i>Establish Estimated Engineer Price</i>	Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir <i>Establish Estimated Engineer Price</i>	
Pendampingan dalam Proses Tender <i>Assistance in Tendering Process</i>	Pendampingan dalam Proses Tender <i>Assistance in Tendering Process</i>	
Pendampingan dalam proses Contract Discussion Agreement <i>Assistance in Contract Discussion Agreement</i>	Pendampingan dalam proses Contract Discussion Agreement <i>Assistance in Contract Discussion Agreement</i>	
Review Desain <i>Design Review</i>	Review Desain <i>Design Review</i>	
Pengawasan QA QC <i>QA/QC Supervision</i>	Pengawasan QA QC <i>QA/QC Supervision</i>	
Studi AMDAL dan UKL/UPL <i>Study on Environment Impact and UKL/UPL</i>	Pendampingan dalam Due Diligent Visit <i>Assistance in Due Diligent Visit</i>	
Studi Lainnya <i>Other Studies</i>	Studi Sistem Ketenagalistrikan <i>Electrical Power System Study</i> Studi AMDAL dan UKL/UPL <i>Study on Environment Impact and UKL/UPL</i> Studi Lainnya <i>Other Studies</i>	

Strategi Perusahaan

Perumusan sasaran strategis perusahaan dilakukan dengan menggunakan framework Balanced Scorecard yang didasarkan atas empat perspektif yakni :

1. Perspektif Keuangan dan Pasar (Financial)
2. Perspektif Pelanggan (Customer)
3. Perspektif Proses Internal (Internal Process)
4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth):

Arah Strategis yang ditetapkan PLN Enjiniring adalah Hold and Maintain. Arah strategis tersebut dijabarkan ke dalam Tujuan Strategis (Strategic Objectives-SO) perusahaan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard dengan empat perspektif. Strategic Objectives (SO) yang tercantum melalui Balanced Scorecard akan terdapat 14 Strategic Objectives (SO) dengan rincian 3 SO pada perspektif keuangan, 2 SO pada perspektif customer, 4 SO pada perspektif internal, dan 5 SO pada perspektif learning & growth. Rincian 14 SO tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perspektif Keuangan dan Pasar (Financial):
 - SO-1 F1. Peningkatan Pendapatan PLN Enjiniring.
 - SO-2 F2. Peningkatan Kesehatan Keuangan,
 - SO-3 F3. Kemandirian.
2. Perspektif Pelanggan (Customer):
 - SO-4 C1. Kepuasan dan Keterikatan Pelanggan,
 - SO-5 C2. Kecepatan Penanganan Keluhan Pelanggan
3. Perspektif Proses Internal (Internal Process):
 - SO-6 I1. Kapasitas Produksi,
 - SO-7 I2. Kapabilitas Perusahaan,
 - SO-8 I3. Peningkatan Kinerja Operasional
 - SO-9 I4. Pengembangan Usaha, Portfolio, dan Perencanaan Korporat

Corporate Strategy

The drafting of the company's strategic goals is carried out using the Balanced Scorecard framework which is based on four perspectives, namely:

1. *Financial and Market Perspectives (Financial)*
2. *Customer Perspective (Customer)*
3. *The Internal Process Perspective*
4. *Learning and Growth Perspective:*

The strategic direction set by PLN Enjiniring is a Hold and Maintain. This strategic direction is translated into the company's Strategic Objectives (SO) using the Balanced Scorecard approach with four perspectives. There are 14 Strategic Objectives (SO) listed through the Balanced Scorecard with the details of 3 SOs from a financial perspective, 2 SOs from a customer perspective, 4 SOs from an internal perspective, and 5 SOs from a learning & growth perspective. Details of the 14 SOs are as follow:

1. *Financial and Market Perspectives (Financial):*
 - SO-1 F1. PLN Engineering Revenue Improvement,*
 - SO-2 F2. Financial Health Improvement,*
 - SO-3 F3. Independency.*
2. *Customer Perspective (Customer):*
 - SO-4 C1. Customer Satisfaction and Engagement,*
 - SO-5 C2. Velocity of Customer Complaint Handling*
3. *Internal Process Perspective:*
 - SO-6 I1. Production capacity,*
 - SO-7 I2. Company Capabilities,*
 - SO-8 I3. Operational Performance Improvement*
 - SO-9 I4. Business Development, Portfolios and Corporate Planning*

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (*Learning and Growth*):

- SO-10 L1. Peningkatan Manajemen Stakeholder dan Regulasi,
- SO-11 L2. Peningkatan Efektivitas Sistem SDM dan Organisasi,
- SO-12 L3. Peningkatan Proses Bisnis PT PLNE,
- SO-13 L4. Peningkatan K3LH,
- SO-14 L5. Peningkatan pemanfaatan IT dan Teknologi Ketenagalistrikan

4. *Growth and Learning Perspective:*

- SO-10 L1. *Stakeholder Management and Regulation Improvement,*
- SO-11 L2. *Effectiveness of HR Systems and Organizations Improvement,*
- SO-12 L3. *PT PLNE Business Process Improvement,*
- SO-13 L4. *Occupational Health and Safety (OHS) and Environmental Improvement,*
- SO-14 L5. *The use of IT and Electricity Technology Improvement*

Sasaran-sasaran strategis tersebut di atas dijabarkan dalam program-program kegiatan yang diuraikan sebagai berikut.

The strategic targets mentioned above are described in the activity programs which are described as follow;

1. Pemasaran dan Penjualan

Di samping pekerjaan jasa utama (core business) di bidang enjiniring ketenagalistrikan, PT PLN Enjiniring telah melakukan pengembangan bisnis antara lain yaitu: O&M CNG dan investasi aset. Beberapa investasi aset yang telah dilakukan oleh PT PLN Enjiniring sejak tahun 2016 mencakup antara lain : Pembangunan dan penyertaan modal dalam perusahaan joint venture pabrik switchgear, dan Pembangunan CNG Plant Bangkanai.

1. *Sales and Marketing*

In addition to the main service work (core business) in the electricity engineering sector, PT PLN Enjiniring has undertaken business development including: O&M CNG and asset investment. Some of the asset investments that have been made by PT PLN Enjiniring since 2016 include: Development and equity participation in a switchgear factory joint venture company, and the construction of the Bangkanai CNG Plant.

2. Produksi

PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (PT CPSI) merupakan perusahaan yang didirikan atas dasar kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan Crompton Greaves Limited (CG). Perusahaan asal India tersebut bergerak di bidang pabrikasi peralatan ketenagalistrikan. yang kemudian dilakukan sinergi antar anak perusahaan yaitu PLN Enjiniring dan CG International Holdings Singapore PTE, LTD. PLN Enjiniring memiliki penyertaan usaha sebesar 49% atas modal disetor. Akta pendirian PT CPSI telah berlaku sejak tahun 2014, adapun operasional pabrik switchgear telah berlangsung sejak peresmian Agustus 2018.

2. *Production*

PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (PT CPSI) is a company founded on the basis of a collaboration between PT PLN (Persero) and Crompton Greaves Limited (CG). The Indian company is engaged in the manufacture of electricity equipment which then carried out a synergy between its subsidiaries, namely PLN Enjiniring and CG International Holdings Singapore PTE, LTD. PLN Enjiniring has an investment of 49% of the paid-up capital. The deed of establishment of PT CPSI has been valid since 2014, while the switchgear factory operations have been going on since the inauguration of August 2018.

3. Keuangan dan Akuntansi Program kerja

Keuangan dan Akuntansi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan (Business One).
- b. Meningkatkan Efektivitas penagihan sehingga COP maksimum 40 hari.
- c. Meningkatkan tertib administrasi pajak.
- d. Mengusulkan penghapusan sebagian Aktiva.
- e. Menyempurnakan sistem IT untuk Integrasi ERP dan mendukung konsolidasi Laporan Keuangan Korporat.
- f. Meningkatkan Internal Control atas Laporan Keuangan.

4. SDM dan Umum

Untuk mendukung implementasi strategi perusahaan dan mendukung kegiatan proses bisnis PT PLN Enjiniring baik bidang Enjiniring maupun non Enjiniring maka dilakukan pengembangan Program SDM melalui Human Capital Readiness (HCR) dan Organizational Capital Readiness (OCR) dan pelaksanaan Program Konsolidasi bidang SDM sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesiapan kompetensi SDM dalam segi kapasitas dan kapabilitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis.
- b. Peningkatan kesiapan motivasi kerja dengan mengacu pada hasil Employee Engagement Survey (EES) 2014 yang secara khusus memperhatikan butir-butir yang harus diperbaiki.
- c. Peningkatan kesiapan produktifitas pegawai melalui evaluasi beban kerja pegawai dan jumlah man month yang terjual.
- d. Peningkatan kesiapan budaya kerja dengan melakukan survei Budaya Kerja dan menindaklanjutinya.
- e. Peningkatan kesiapan leadership dengan menyusun mekanisme perencanaan suksesi kepemimpinan dan pelaksanaan diklat penjenjangan.

3. Finance and Accounting Work Program

Finance and Accounting can be described as follows:

- a. Implementing a Financial Management Information System App (Business One).
- b. Increasing the billing effectiveness so that the COP is in a maximum of 40 days.
- c. Improving orderly tax administration.
- d. Proposing to write part of the assets off.
- e. Improving the IT system for ERP integration and support the consolidation of Corporate Financial Statements.
- f. Improving Internal Control over Financial Statements.

4. Human Resources and General Affairs

To support the implementation of the company's strategy and to support the business process activities of PT PLN Enjiniring both in the Engineering and non-Engineering sectors, the development of an HR Program through Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR) and the implementation of the HR Consolidation Program are as follow:

- a. The improvement of HR competencies readiness in terms of capacity and capability to adapt to business process needs.
- b. The improvement of work motivation readiness by referring to the results of the 2014 Employee Engagement Survey (EES) which specifically pays attention to points that need to be improved.
- c. The improvement of employee productivity readiness through evaluation of employee workload and number of man months sold.
- d. The improvement of work culture readiness by conducting Work Culture surveys and following it up.
- e. The improvement of leadership readiness by developing a leadership succession planning mechanism and implementing training in rankings.

- f. Peningkatan kesiapan aspek alignment dengan melaksanakan internalisasi visi, misi dan arah strategi organisasi serta menyelaraskan antara target kinerja individu pegawai dan kinerja organisasi.
- g. Peningkatan kesiapan teamwork dengan melaksanakan Knowledge Management yang meliputi penyediaan infrastruktur Knowledge Management, Knowledge Sharing, Knowledge Capturing dan Inovasi.
- h. Menyempurnakan ManPower Planning dan rekrutmen terkait Enjiniring, pembangunan dan penyertaan dalam anak perusahaan pabrik switchgear, Operasi dan Pemeliharaan CNG Plant Bangkanai.
- i. Mengembangkan sistem informasi SDM berbasis TI – HRIS (Human Resource Information System).
- j. Pengembangan sistem pembinaan karir.
- k. Menyempurnakan Sistem Penilaian Kinerja dan penerapan SIMKP.
- l. Menyempurnakan Road Map Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- m. Capacity Building bagi Manajemen dan Dewan Komisaris.
5. Pengembangan Usaha dan Inovasi
- a. Meningkatkan Pendapatan Eksternal
- Pada tahun 2016 PT PLN Enjiniring merencanakan untuk bekerja sama dengan swasta pemerintah daerah dan sinergi antar BUMN serta anak perusahaan BUMN dalam rangka perhitungan KPI. Pendapatan eksternal yang diperhitungkan adalah pendapatan dari klien eksternal (selain PT PLN (Persero)) serta pendapatan dari PT PLN (Persero) yang diperoleh dari pelelangan.
- b. Survei Pelanggan
- Survei Kepuasan Pelanggan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan salah satu pengukuran kinerja sistem manajemen mutu. Kategori survei mulai tahun 2018 dibagi menjadi 2 kategori, yaitu :
- Survei Kepuasan Pelanggan Per Proyek
 - Survei Kepuasan Pelanggan Korporat
- f. *The improvement of the readiness of the alignment aspects by internalizing the vision, mission and direction of the organization's strategy as well as aligning individual employee performance targets and organizational performance.*
- g. *The improvement of teamwork readiness by implementing Knowledge Management which includes the provision of Knowledge Management infrastructure, Knowledge Sharing, Knowledge Capturing and Innovation.*
- h. *The improvement of ManPower Planning and of recruitment related to Engineering, construction and participation in switch-gear plant subsidiaries, Operation and Maintenance of the Bangkanai CNG Plant.*
- i. *Developing an IT-based HR information system - HRIS (Human Resource Information System).*
- j. *The Development of a career coaching system.*
- k. *Improving the Performance Appraisal System and the SIMKP implementation.*
- l. *Improving the Human Resources Development Road Map.*
- m. *Management and the Board of Commissioners Capacity Building.*
5. *Business Development and Innovation*
- a. *Raising External Revenue*
- PT PLN Enjiniring plans to collaborate with private regional governments and to make some synergies between BUMN and BUMN subsidiaries in the framework of calculating KPIs in 2016. A calculated external revenue is a revenue from external clients (other than PT PLN (Persero)) as well as an income from PT PLN (Persero) obtained from the auction.*
- b. *Customer Survey*
- The Customer Satisfaction Survey is carried out to measure the performance of the quality management system. The survey categories are divided into 2 categories started on 2018, namely:*
- *Customer Satisfaction Survey Per Project*
 - *Corporate Customer Satisfaction Survey*

yang mana Survei Kepuasan Per Proyek dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus proyek dan Survei Kepuasan Pelanggan Korporat dilakukan setiap semester selama 1 (satu) tahun, dimana hal ini sesuai dengan Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan. Survei Kepuasan Pelanggan dilakukan untuk memperoleh data-data mengenai kepuasan pelanggan terkait dengan produk dan layanan terhadap dimensi biaya, mutu, waktu yang diberikan PLN Enjiniring dalam memberikan solusi terhadap kebutuhan pelanggan.

c. Pengembangan Bisnis Anak Perusahaan

Sesuai RUPS Sirkuler tanggal 25 Juli 2014 mengenai persetujuan pemegang saham tentang pendirian Anak Perusahaan PT Prima Power Nusantara (PT PPN). Bidang usaha PT PPN meliputi antara lain bidang investasi, operasi dan pemeliharaan pembangkit, Engineering Procurement and Construction (EPC) Transmisi dan Gardu Induk dan telah resmi berdiri di tahun 2016.

d. Proyek O&M PLTMG Bangkanai 155MW

Berdasarkan Surat PT PLN (Persero) No. 1917/122/DIRUT/2014 tanggal 25 Juli 2014 dan Surat PT PLN (Persero) No. 1012/122/DIVGBM/2014-R Perihal penugasan sebagai investor pembangunan CNG Plant, PT PLN Enjiniring disetujui sebagai investor pembangunan CNG Bangkanai di Kalimantan Tengah. CNG Bangkanai direncanakan telah menyalurkan gas kepada PLTMG Bangkanai 155 MW. Selain itu pula PLN Enjiniring mendapat kesempatan untuk menjadi operator O&M PLTMG Bangkanai 155 MW. Pekerjaan O&M tahap Supporting diselesaikan oleh PLNE tahun 2018, dan tidak pekerjaan tersebut dilanjutkan dengan Pekerjaan O&M tahap Performance Based (dilanjutkan dengan tahap transisi dengan PLN Tarakan) sesuai dengan implementasi PLN SOLID.

The Per Project Satisfaction Survey is conducted periodically in accordance to the project cycle. The Corporate Customer Satisfaction Survey is conducted every semester for 1 (one) year, which is in accordance with the Customer Satisfaction Measurement Procedure. The Customer Satisfaction Survey was conducted to obtain data on customer satisfaction related to products and services on the dimensions of cost, quality, time given by PLN Enjiniring in providing solutions to customer needs.

c. Subsidiary Business Development

Based on the Circular GMS on July 25, 2014 regarding the approval of shareholders on the establishment of a subsidiary, PT Prima Power Nusantara (PT PPN). PT PPN's business scopes include, the investment sectors, the operation and maintenance of power plants, engineering procurement and construction (EPC) of transmission and substation and they were officially established in 2016.

d. Bangkanai 155MW PLTMG O&M Project

Based on the Decree of PT PLN (Persero) No. 1917/122 / DIRUT / 2014 dated on 25 July 2014 and Decree of PT PLN (Persero) No. 1012/122/DIVGBM /2014-R Regarding the assignment as an investor for the construction of the CNG Plant, PT PLN Enjiniring was approved as an investor for the development of CNG Bangkanai in Central Kalimantan. It is planned that CNG Bangkanai will supply gas to Gas Engine Power Plant (PLTMG) Bangkanai of 155 MW. Futhermore, PLN Enjiniring also had the opportunity to become the O&M operator of the 155 MW PLTMG Bangkanai. The Supporting phase of O&M work was completed by PLNE in 2018, and the work was not continued with the O&M work of the Performance Based stage (continued with the transition stage with PLN Tarakan) in accordance to the implementation of PLN SOLID.

PROYEK UNGGULAN

Leading Projects

Tabel Proyek Unggulan
Leading Projects Table

Nama Proyek Project Name	Nilai Proyek Project Value		Durasi Duration	Lokasi Location
	IDR	USD		
Pengadaan Jasa Konsultansi Untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC Pembangunan PLTU Parit Baru (2x50 MW) <i>Consulting Service Providing for Construction Supervision and QA/QC of PLTU Development of Parit Baru (2x50 MW)</i>	45.965.104.900	6.828.590	Desember 2013 – 30 September 2019	Bengkayang, Kalimantan Barat <i>Bengkayang, West Kalimantan</i>
Jasa Konsultansi Untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC Pembangunan PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4 (2x200 MW). <i>Consulting Service for Construction Supervision and QA/QC of PLTU Development of Pangkalan Susu 3 and 4 (2x200 MW)</i>	65.514.746.550	10.059.956	Desember 2014 – 16 Agustus 2019	Pangkalan Susu, Sumatera Utara <i>Pangkalan Susu, North Sumatera</i>
Jasa Konsultansi Untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC Pembangunan PLTU Takalar (2x100 MW). <i>Consulting Service for Construction Supervision and QA/QC of PLTU Development of Takalar (2x100 MW)</i>	43.592.051.305	8.498.983	Desember 2014 – 16 Maret 2019	Takalar, Sulawesi Selatan <i>Takalar, South Sulawesi</i>
Jasa Konsultansi Untuk Supervisi Desain dan Konstruksi PLTA Jatigede (2x55 MW). <i>Consulting Service for Design and Construction Supervision of PLTA of Jatigede (2x55 MW)</i>	40.868.268.100	6.827.576	September 2014 – 24 Agustus 2019	Jatigede, Jawa Barat <i>Jatigede, West Java</i>
Jasa Konsultan Supporting Konstruksi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Peaker Grati Extension 450 MW. <i>Consulting Service of project Construction Supporting of PLTGU of Peaker Grati Extension 450 MW</i>	146.883.330.440	-	Nopember 2015 - Oktober 2019	Grati, Jawa Timur <i>Grati, East Java</i>

KINERJA OPERASI PER SEGMENT USAHA

OPERATING PERFORMANCE PER BUSINESS SEGMENT

JASA ENJINIRING

Realisasi penjualan jasa Enjiniring internal adalah sebesar Rp. 513,431.93 juta, lebih tinggi 4.62% dibandingkan realisasi penjualan di tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 490,769.50 juta. Sedangkan penjualan jasa Enjiniring eksternal adalah sebesar Rp. 9,825.05 juta turun 43.73% dibandingkan realisasi penjualan di tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 17,460.03 juta. Secara total keseluruhan perolehan kontrak jasa enjiniring, pertumbuhannya naik sebesar 2.96%

ENGINEERING SERVICES

The realization sales of internal engineering services were Rp. 513,431.93 million, 4.62% higher than the sales in 2016 which amounted to Rp. 490,769.50 million. Meanwhile, sales of external engineering services amounted to Rp. 9,825.05 million, decreased by 43.73% compared to the sales in 2015 which was Rp. 17,460.03 million. The overall total acquisition of engineering service contracts' growth increased by 2.96%

Tabel Perolehan Kontrak Jasa Enjiniring

Engineering Services Contract Gains Table

(dalam jutaan rupiah)

(in million rupiah)

Uraian <i>Description</i>	2017	2016	Pertumbuhan (%) <i>Growth (%)</i>
Internal <i>Internal</i>	513,431.93	490,769.50	4.62%
Eksternal <i>External</i>	9,825.05	17,460.03	-43.73%
Jumlah <i>Total</i>	523,256.98	508,229.53	2.96%

BIDANG PEMBANGKIT

Pada tahun 2017 Bidang Pembangkit masih melanjutkan lima pekerjaan yang termasuk proyek strategis, yaitu : pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC PLTU Parit Baru, pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi Enjiniring, Konstruksi dan QA/QC PLTU Pangkalan Susu, pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC PLTU Takalar, Supervisi Desain Enjiniring PLTA Jati Gede 2x55 MW, serta Penugasan Design Review, Supervisi Konstruksi dan QA/QC Proyek PLTGU Peaker Grati Extension.

POWER PLANTS SECTOR

The Power Plant sector still continued five jobs that had been included on strategic projects in 2017, namely: Consulting Services for Construction Supervision and QA / QC of Parit Baru Electric Steam Power Plants, Consulting Services for Engineering Supervision, Construction and QA/QC for Pangkalan Susu Electric Steam Power Plants, Consultation Services for Construction Supervision and QA / QC of Takalar Electric Steam Power Plants, Supervision of the 2x55 MW Jati Gede Hydroelectric Power Plants Engineering Design, as well as Design Review Assignments, Construction Supervision and QA / QC for the Peaker Grati Extension PLTGU Project.

Di tahun 2017 ini, Bidang Pembangkit juga menerima penugasan baru yang termasuk strategis yaitu Pekerjaan Enjiniring dan Supervisi Konstruksi Upper Cisokan Pumped Storage serta penugasan-penugasan lainnya yang masih didominasi penugasan yang terkait dengan pembangkit listrik berbahan bakar gas, serta pembuatan kajian / assessment proyek-proyek lama yang masih mengalami kendala dalam penyelesaiannya.

Total nilai perolehan kontrak baru Bidang Pembangkit pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 93,994.15 Juta, naik 30.59% dibandingkan perolehan nilai kontrak di tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 71,974.73 Juta. Bidang Pembangkit sepanjang tahun ini sudah melaksanakan 92 pekerjaan, dimana 23 kontrak 2017 dan 45 kontrak lanjutan masih berlanjut pelaksanaannya ke tahun 2018. Sementara, 23 kontrak internal dan 1 kontrak eksternal selesai dikerjakan di tahun ini.

The Power Plants Sector also received new assignments considered as strategic in 2017, namely Engineering Works and Construction Supervision for Upper Cisokan Pumped Storage as well as other assignments that are still dominated by some assignments related to gas-fired power plants, as well as making studies/making assessment on some old projects that are still facing some problems to be solved.

The total value of Power Plants Sector's new contracts in 2017 amounted to Rp. 93,994.15 million, an increase of 30.59% compared to the acquisition of the contract value in 2016 which amounted to Rp. 71,974.73 Million. The Power Plant sector has carried out 92 jobs during this year, of which 23 contracts in 2017 and 45 follow-up contracts are still being carried out into 2018. Meanwhile, 23 internal contracts and 1 external contract have been completed this year.

Tabel Nilai Kontrak Baru Bidang Pembangkit

Power Generation New Contract Value Table

(dalam jutaan rupiah)
(in million rupiah)

Uraian <i>Description</i>	2017	2016	Pertumbuhan (%) <i>Growth (%)</i>
Internal <i>Internal</i>	93,260.25	66,784.61	39.64%
Eksternal <i>External</i>	733.90	5,190.12	-85.86%
Jumlah <i>Total</i>	93,994.15	71,974.73	30.59%

Tabel Perolehan Kontrak Bidang Pembangkit

Power Generation Contract Gains Table

Uraian <i>Description</i>	Jumlah Kontrak 2017 (Unit)		Jumlah Kontrak 2016 (Unit)		Perubahan (%)	
	<i>Total Contract of 2017 (Unit)</i>		<i>Total Contract of 2016 (Unit)</i>		<i>Change (%)</i>	
	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kontrak 2017* <i>Contract 2017*</i>	23	0	5	1	360%	-100%
Pekerjaan Lanjutan ** <i>Carry Over**</i>	45	0	45	0	0%	0%
Kontrak selesai di tahun 2017 <i>Contracts Completed in 2017</i>	23	1	41	6	-44%	-83%

*kontrak tahun 2017 yang berlanjut ke tahun berikutnya

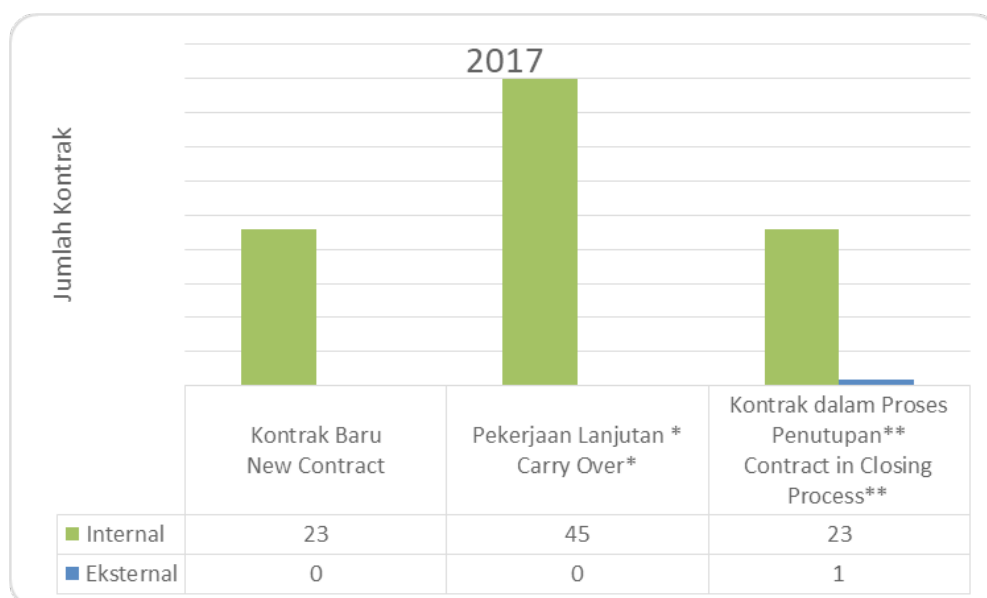
**2017 Contracts that continues to next year*

** kontrak tahun 2016 kebawah dan berlanjut ke tahun berikutnya

***2016 downwards Contracts that continues to next year*

Perolehan Kontrak Bidang Pembangkitan

Power Plants Sector Contract Acquisition



BIDANG TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

Total nilai perolehan kontrak baru Bidang Transmisi dan Distribusi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 87,174.02 Juta, turun 59,13% dari tahun 2018 dengan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp. 213,274.47 Juta. Bidang Transmisi dan Distribusi pada tahun 2019 melaksanakan 49 pekerjaan, dimana 24 kontrak 2019 dan 25 kontrak lanjut masih dilanjutkan pelaksanaan pekerjaannya ke tahun 2019, dan 62 kontrak lainnya sudah selesai dilaksanakan di tahun ini.

Mayoritas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Bidang Transmisi dan Distribusi pada tahun 2019, masih didominasi oleh pelaksanaan Survey, Soil Investigation, pembuatan Bid Dokumen dan HPE, serta Pendampingan Lelang untuk Gardu Induk maupun Transmisi. Selain pekerjaan tersebut, Bidang Transmisi dan Distribusi juga pada tahun ini melaksanakan beberapa pekerjaan Desain Review, Study dan juga pekerjaan Supervisi QA/QC Transformer.

TRANSMISSION AND DISTRIBUTION SECTOR

The total acquisition value of new contracts in the Transmission and Distribution Sector in 2019 amounted to Rp. 189,091.50 million, decreasing 26.31% from year 2018 with the acquisition of a new contract value of Rp. 253,660.42 million. The Transmission and Distribution Sector carried out 122 jobs in 2019, of which 23 contracts in 2019 and 27 further contracts are still continued to be implementing in 2018, and 72 other contracts have been completed this year.

The majority of work carried out by the Transmission and Distribution Sector in 2019, was still dominated by the implementation of surveys, Soil Investigation, Bid Documents and HPE making, as well as Tender Assistance for substations and transmission. Apart from those works, the Transmission and Distribution Sector has also carried out several Set Up works and Asset Management Certification, the Master Plan for the Sumatra Electricity System as well as the Transformer QA/QC Supervision work in this year alone.

Tabel Nilai Kontrak Baru Bidang Transmisi dan Distribusi

Transmission and Distribution New Contract Value Table

(dalam jutaan rupiah)
(in million rupiah)

Uraian <i>Description</i>	2019	2018	Pertumbuhan (%) <i>Growth (%)</i>
Internal <i>Internal</i>	85,040.22	210,816.45	-59,66 %
Eksternal <i>External</i>	2,133.80	2,458.02	-13,19 %
Jumlah <i>Total</i>	87,174.02	213,274.47	-59,13 %

Tabel Perolehan Kontrak Bidang Transmisi dan Distribusi

Transmission and Distribution Contract Gains Table

Uraian <i>Description</i>	Jumlah Kontrak 2019 (Unit)		Jumlah Kontrak 2018 (Unit)		Perubahan (%)	
	<i>Total Contract of 2019 (Unit)</i>		<i>Total Contract of 2018 (Unit)</i>		<i>Change (%)</i>	
	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kontrak 2019* <i>Contract 2019*</i>	23	1	45	7	-48%	-85%
Pekerjaan Lanjutan** <i>Carry Over**</i>	18	7	15	2	16%	71%
Kontrak selesai di tahun 2019 <i>Contracts Completed in 2019</i>	54	8	45	7	16%	12%

*kontrak tahun 2019 yang berlanjut ke tahun berikutnya

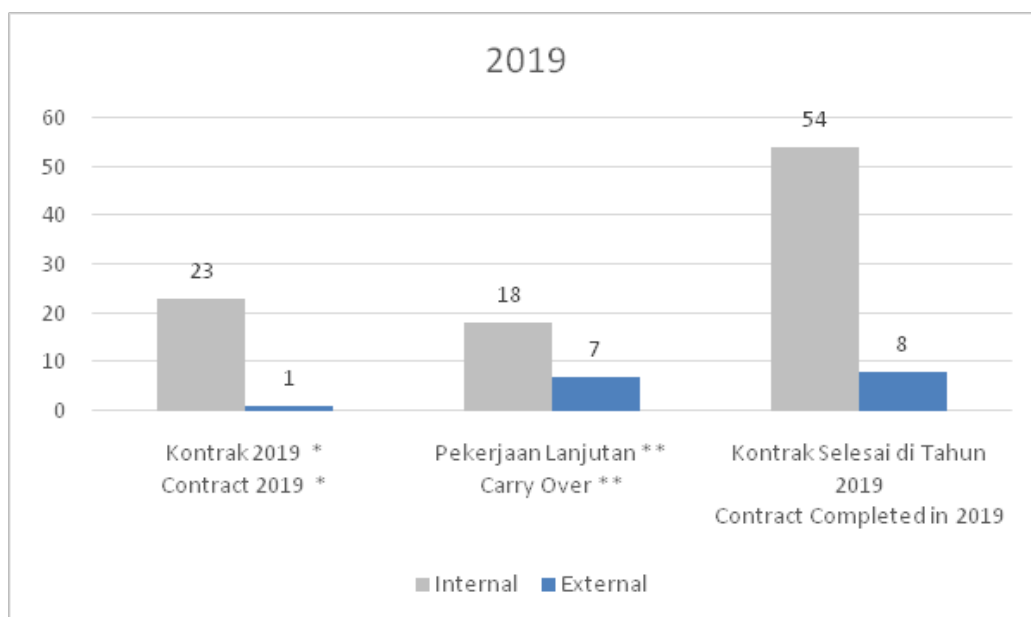
*2019 Contracts that continues to next year

** kontrak tahun 2019 kebawah dan berlanjut ke tahun berikutnya

**2019 downwards Contracts that continues to next year

Perolehan Kontrak Bidang Transmisi dan Distribusi

Transmission and Distribution Contract Acquisition



BIDANG KONSTRUKSI

Pada tahun 2018, Bidang konstruksi sama halnya dengan Bidang Pembangkitan, masih melaksanakan 5 proyek strategis, yaitu: pekerjaan Supervisi Konstruksi dan QA/QC QA/QC PLTU Parit Baru, pekerjaan Supervisi Konstruksi dan QA/QC PLTU Pangkalan Susu, pekerjaan Supervisi Konstruksi dan QA/QC PLTU Takalar, pekerjaan Supervisi Konstruksi dan QA/QC PLTA Jatigede, serta pekerjaan Supervisi Konstruksi dan QA/QC PLTGU Grati Extension. Sehingga pada tahun 2018 ini total pekerjaan yang dilaksanakan oleh Bidang Konstruksi adalah 68 pekerjaan yang terdiri dari : 34 kontrak 2018 dan 34 kontrak lanjutan yang pelaksanaannya dilanjutkan ke tahun 2018 serta 9 kontrak yang sudah selesai dilaksanakan tahun ini. Sementara untuk perolehan nilai kontrak baru, di tahun 2018 Bidang Konstruksi mendapat Rp. 238.449,77 juta, naik 61,60% dari tahun 2017 dengan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp. 147,559.12 juta.

CONSTRUCTION SECTOR

The construction sector as well as the Generation Sector are still carrying out 5 strategic projects in 2019, namely: Construction Supervision and QA/QC Parit Baru Electric Steam Power Plants, Construction Supervision and QA / QC Pangkalan Susu Electric Steam Power Plants, Construction Supervision and QA/QC Takalar Electric Steam Power Plants, Construction Supervision and QA /QC Jatigede Hydroelectric Power Plants, as well as Construction Supervision work and QA/QC Grati Extension Gas and Steam Power Plants. Hence the total work carried out by the Construction Sector in 2019 is 56 jobs consisting of : 4 contracts in 2019 and 52 follow-up contracts in which the implementation will be continued in 2019 and 9 contracts that have been completed this year. Meanwhile, for the acquisition of a new contract value, the Construction Sector received Rp. 11,184.37 million in 2019, decreasing 95.31% from 2018 with the acquisition of a new contract value of Rp. 238,449.77 million.

Tabel Nilai Kontrak Baru Bidang Konstruksi

Construction New Contract Value Table

(dalam jutaan rupiah)
(in million rupiah)

Uraian <i>Description</i>	2018	2017	Pertumbuhan (%) <i>Growth (%)</i>
Internal <i>Internal</i>	238.449,77	147,559.12	61,60
Eksternal <i>External</i>	-	-	-
Jumlah <i>Total</i>	238.449,77	147,559.12	61,60

Tabel Perolehan Kontrak Bidang Konstruksi

Construction Contract Gains Table

Uraian <i>Description</i>	Jumlah Kontrak 2018 (Unit)		Jumlah Kontrak 2017 (Unit)		Perubahan (%)	
	<i>Total Contract of 2018 (Unit)</i>		<i>Total Contract of 2017 (Unit)</i>		<i>Change (%)</i>	
	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kontrak 2018* <i>Contract 2018*</i>	34	0	7	0	385,71%	0
Pekerjaan Lanjutan** <i>Carry Over**</i>	34	1	16	1	112,50%	0
Kontrak selesai di tahun 2018 <i>Contracts Completed in 2018</i>	9	0	10	4	-10%	-400%

*kontrak tahun 2018 yang berlanjut ke tahun berikutnya

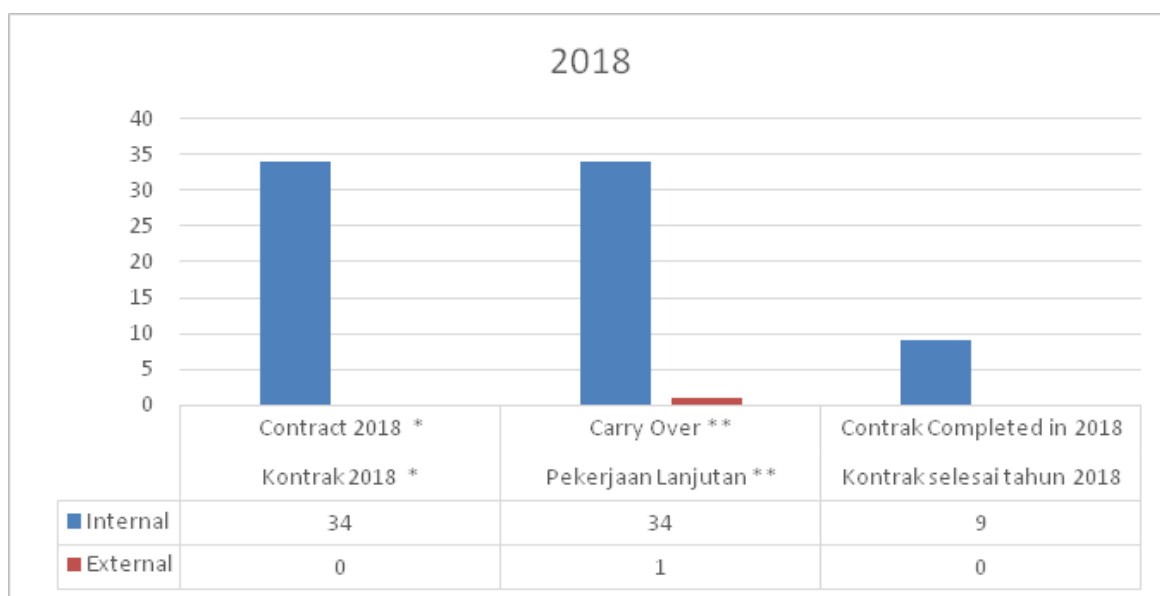
**2018 Contracts that continues to next year*

** kontrak tahun 2017 kebawah dan berlanjut ke tahun berikutnya

***2017 downwards Contracts that continues to next year*

Perolehan Kontrak Bidang Konstruksi

Construction Contract Acquisition



Jasa Lainnya

Leading Projects

Bidang Informasi dan Teknologi Tidak ada.

Information and Technology Sector None.

Aspek Pemasaran

Sesuai dengan visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan layanan enjiniring terintegrasi di ketenagalistrikan yang terkemuka dan salah satu misi perusahaan, yaitu menyediakan jasa enjiniring serta jasa pengembangan dan konstruksi yang terkemuka, memiliki keunggulan daya saing strategis bagi PLN Group dan sesuai dengan standar desain yang berlaku secara internasional, maka pelanggan utama PLN Enjiniring adalah PLN Group. Dengan kata lain, produksi dan jasa yang dilakukan oleh PLN Enjiniring sebagian besar merupakan pekerjaan yang diterima dari PT PLN (Persero) sebagai induk perusahaan.

Selain mendapatkan pekerjaan dari PLN Group, PLN Enjiniring juga memiliki kebijakan untuk menyediakan jasa bagi pihak eksternal (pelanggan di luar PLN Group).

Strategi Pemasaran

■ Strategi Pemasaran Pelanggan Internal dan Eksternal

Pangsa pasar PLN Enjiniring sampai dengan saat ini masih didominasi oleh pelanggan internal (PLN Group) dan sebagian lagi pelanggan eksternal (pelanggan di luar PLN Group), sehingga strategi pemasarannya lebih difokuskan kepada pemenuhan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Pemenuhan kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan cara mendengarkan suara pelanggan, baik pelanggan saat ini maupun pelanggan potensial. Sedangkan untuk membangun hubungan dengan pelanggan dilakukan dengan pengelolaan hubungan pelanggan dan pengelolaan keluhan/aspirasi pelanggan.

1. Pemenuhan Kepuasan Pelanggan

PLN Enjiniring mendengarkan, berinteraksi dan mengamati perilaku pelanggan untuk memperoleh informasi atas produk dan layanan yang diberikan Perseroan kepada pelanggan internal dan eksternal melalui rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh PLN Group maupun yang diinisiasikan sendiri oleh PLN Enjiniring. Sedangkan untuk pelanggan eksternal dilakukan dengan surat permintaan penawaran jasa.

Marketing Aspects

Based on the company's vision, which is to become a leading integrated engineering services company in electricity and one of the company's missions, which is to provide a leading engineering, construction, and developing services, as well as to have advantages on competitive strategy for the PLN Group and in accordance to the internationally accepted design standards, therefore the main customer of PLN Enjiniring is PLN Group. In the other words, the production and services performed by PLN Enjiniring are mostly jobs that have been received from PT PLN (Persero) as the holding company.

PLN Enjiniring has also a policy to provide services to external parties (customers outside the PLN Group) apart from getting a job from the PLN Group.

Marketing Strategy

■ Internal and External Customer Marketing Strategy

PLN Enjiniring's market share is still dominated by internal customers (PLN Group) and some external customers (customers outside the PLN Group) up until now, so that its marketing strategy is more focused on fulfilling customer satisfaction and building relationships with customers. Fulfilling customer satisfaction is done by listening to the customers' aspirations, either current customers or potential customers. Meanwhile, building relationships with customers is carried out by managing customer relationships and managing customer complaints/aspirations.

1. Customer Satisfaction Compliance

PLN Enjiniring listens, interacts and observes customer behavior to obtain some informations on products and services provided by the Company to internal and external customers through coordination meetings organized either by the PLN Group or those initiated by PLN Enjiniring. Meanwhile, for external customers, it has been done by requesting a service offer letter.

Perusahaan mendengarkan suara pelanggan saat ini untuk memperoleh informasi dan umpan balik (feedback) dengan melakukan pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

- Rapat koordinasi mingguan dan bulanan untuk mendapatkan informasi/masukan dan umpan balik pada setiap tahapan pekerjaan;
- Media komunikasi (telepon, SMS, email, website dan aplikasi "PLN Enjiniring Commit") untuk menampung masukan dan keluhan;
- Survei kinerja proyek yang dilakukan pada setiap proyek pekerjaan yang dilakukan oleh PLN Enjiniring;
- Survei kepuasan pelanggan korporat yang dilakukan pada semester 1 dan 2 untuk memperoleh informasi terkait nilai indeks kepuasan pelanggan berdasarkan penilaian dari persepsi pelanggan serta menampung kritik dan saran pelanggan;
- Pendekatan personal yang dilakukan oleh management PLN Enjiniring dan;
- Customer Day yang dihadiri oleh Pemberi Kerja.
- PLN Enjiniring menindaklanjuti informasi dan umpan balik yang diperoleh dari pelanggan untuk memperbaiki mutu produk dan layanan dengan cara:
 - Mengoptimalkan fungsi tim proyek untuk berkoordinasi dengan pelanggan dan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan bulanan;
 - Kunjungan lapangan yang dilakukan oleh management PLN Enjiniring untuk mendengarkan suara pelanggan, sehingga petugas dapat merespon langsung keluhan pelanggan

Terkait dengan pelanggan potensial, suara pelanggan diperoleh melalui media rapat formal, diskusi informal, survei kepuasan pelanggan, pameran dan Customer Day serta media elektronik. Media elektronik yang digunakan yaitu website, email, telepon, dan pesan singkat/SMS. Selain beberapa metode yang disebutkan, pada tahun bulan Oktober 2018 PLN Enjiniring telah meluncurkan aplikasi "PLN Enjiniring Commit", yaitu aplikasi yang digunakan untuk mendengarkan/menampung keluhan/aspirasi pelanggan dan melakukan survei kepuasan pelanggan kinerja proyek.

The company listens to the current customers' aspirations to obtain information and feedback by taking the following approaches:

- *Perform some coordination meetings to obtain information/input and feedback at each stage of work weekly and monthly;*
- *Communication media (telephone, SMS, email, website and the "PLN Enjiniring Commit" app) to accommodate input and complaints;*
- *Project performance survey conducted on each project work carried out by PLN Enjiniring;*
- *Corporate customer satisfaction surveys conducted in semester 1 and in semester 2 to obtain information related to the customer satisfaction index scores based on assessments of customer perceptions and to accommodate customer criticism and suggestions;*
- *The personal approach taken by the management of PLN Enjiniring and;*
- *Customer Day attended by the Employer.*
- *PLN Enjiniring follows up on feedback and information obtained from the customers to improve products and services quality by taking the following approaches:*
 - *Optimize the function of the project team to coordinate with customers and deliver monthly work progress reports;*
 - *Field visits conducted by PLN Enjiniring management to listen to the customers' aspirations so that the officers can respond directly to the customers' complaints*

Regarding the potential customers, their aspirations are obtained through the media of formal meetings, informal discussions, customer satisfaction surveys, exhibitions and Customer Day as well as electronic media. The electronic media used are the website, email, telephone, and short message/SMS. PLN Enjiniring launched the "PLN Enjiniring Commit" app apart from some of the methods mentioned in October 2018, which is an app used to listen/accommodate the customer complaints/aspirations and conduct customer satisfaction surveys on project performance.

PLN Enjiniring juga membandingkan kepuasan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan pesaing berdasarkan hasil survei. Berdasarkan data tersebut, PLN Enjiniring membuat analisis untuk menentukan target kepuasan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan pesaing di tahun berikutnya. Aktifitas ini dilakukan oleh Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha bekerja sama dengan Direktorat Enjiniring

2. Membangun Hubungan dengan Pelanggan

PLN Enjiniring memasarkan, membangun dan mengelola hubungan dengan pelanggan melalui kegiatan "Customer Day", yang bertujuan untuk menyediakan dukungan pelanggan agar mendapatkan feedback dari pelanggan serta agar keluhan pelanggan dapat diselesaikan dengan tuntas.

Dalam membangun hubungan dengan pelanggan, PLN Enjiniring juga mengelola keluhan dan aspirasi pelanggan. PLN Enjiniring menetapkan Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha sebagai pihak yang mengelola keluhan dan aspirasi pelanggan.

Data dan informasi keluhan dan aspirasi pelanggan dikumpulkan dan diidentifikasi melalui:

1. Surat keluhan yang dikirimkan oleh pelanggan;
2. Keluhan yang disampaikan secara langsung dan dicatat dalam formulir keluhan dan aspirasi pelanggan;
3. Survei kepuasan pelanggan kinerja proyek dan survei kepuasan pelanggan korporat;
4. Aplikasi "PLN Enjiniring Commit"
5. Customer Day

Setelah diidentifikasi berdasarkan jenis keluhan, keluhan segera disampaikan kepada Direktorat terkait agar keluhan dapat ditangani secara efektif dan tuntas. Selain itu, Perseroan juga mengelola keluhan berdasarkan data rekaman (record) keluhan pelanggan selama pekerjaan berjalan. Untuk memastikan agar keluhan dapat ditangani dengan tuntas, PLN Enjiniring telah membuat Prosedur Enjiniring Penanganan Keluhan dan Aspirasi Pelanggan.

PLN Enjiniring also compares customer satisfaction to competitor customer satisfaction based on survey results. Based on this data, PLN Enjiniring makes an analysis to determine a target on customer satisfaction over competitor customer satisfaction in the following year. This activity is carried out by the Marketing and Business Development Directorate in collaboration with the Engineering Directorate

2. Customers Relationships Building

PLN Enjiniring markets, builds and manages relationships with customers through "Customer Day" activities, which aim to provide customer support in order to get feedback from customers so that customer complaints can be resolved completely.

PLN Enjiniring also manages customer complaints and aspirations in building relationships with customers. PLN Enjiniring establishes the Directorate of Marketing and Business Development as the party that manages customer complaints and aspirations.

Data and information on customer complaints and aspirations are collected and identified through:

1. *Letter of complaint sent by the customer;*
2. *Complaints that are being submitted directly and are being recorded in the complaint form and customer aspirations;*
3. *Project performance customer satisfaction surveys and corporate customer satisfaction surveys;*
4. *An App called "PLN Enjiniring Commit"*
5. *Customer Day*

Customer complaints are immediately submitted to the relevant Directorate after being identified by the type of complaint, so that those complaints can be handled effectively and thoroughly. In addition, the Company also manages complaints based on customer complaint records during work. To ensure that complaints can be handled thoroughly, PLN Enjiniring has developed an Engineering Procedure for Handling Customer Complaints and Aspirations.

Pangsa Pasar

Pada periode tahun 2019 - 2028 kebutuhan listrik diperkirakan akan meningkat dari 245 TWh pada tahun 2019 menjadi 433 TWh pada tahun 2028. Realisasi Kapasitas Terpasang Pembangkit pada tahun 2018 sebesar 56.509 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik pada tahun 2028 diperkirakan diperlukan peningkatan Realisasi Kapasitas Terpasang Pembangkit pada tahun 2028 sebesar 70.000 MW. Untuk menunjang hal ini pekerjaan – pekerjaan Konsultansi untuk pembangkit akan meningkat pada tahun 2020 ke atas.

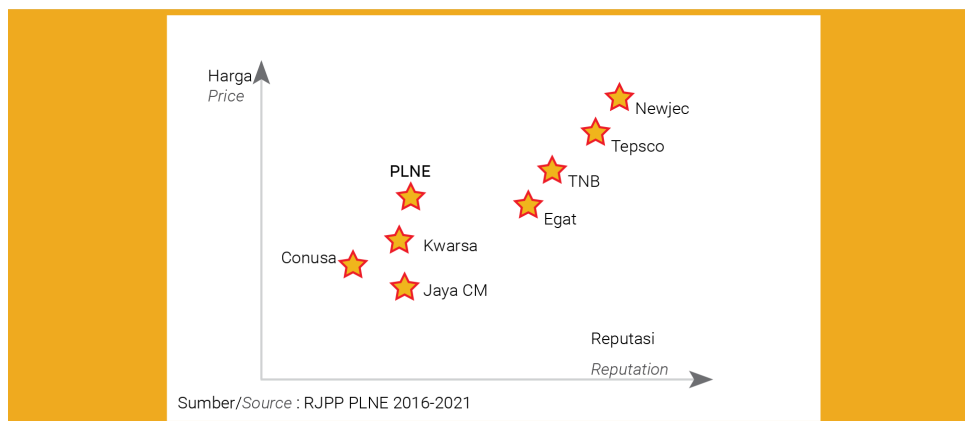
Pada periode tahun 2019 – 2028 pengembangan sistem penyaluran berupa pembangunan jaringan transmisi akan pada tahun 2019 sebesar 13.509 kms dan akan meningkat pada tahun 2028 sebesar 57.292 kms.

Analisis Perbandingan dengan Kompetitor

PLN Enjiniring membandingkan dirinya dengan perusahaan-perusahaan lain yang dianggap kompetitor-nya dalam tiga dimensi yakni Billing Rate, ketepatan waktu penyampaian produk, dan kepuasan pelanggan.

1. Billing Rate

Billing rate merupakan elemen yang penting dalam penentuan harga jasa konsultansi, tidak terlepas jasa konsultansi enjiniring. Billing rate mengambil porsi besar dari tiap-tiap nilai kontrak, yakni dalam kisaran 40% sampai dengan 60%. Dalam hal billing rate, posisi PLN Enjiniring jika dibandingkan dengan beberapa konsultan enjiniring lain adalah sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut.



Market Share

Electricity's demand is expected to be increasing from 245 TWh in 2019 to 433 TWh in 2028 In the 2019 – 2028 period. The using of Installed Power Plant Capacity in 2018 amounting to 56,509 MW in order to meet electricity's demand in 2028 is estimated to be needed of an improvement to the Installed Power Plant Capacity Usage in 2028 amounting to 70,000 MW. Consultant works for power plants will increase in 2020 and later to support this work.

The development of the distribution system in the form of transmission network construction in 2019 will be 13,509 kms and will increase in 2028 by 57,292 kms In the period of 2019-2028.

Competitors Comparative Analysis

PLN Enjiniring compares itself with other companies considered as its competitors in three dimensions, namely the Billing Rate, timeliness of product delivery, and customer satisfaction.

1. Billing Rate

The billing rate is an important element in determining the price of consulting services, not to mention engineering consulting services. The billing rate takes a large portion of each contract value, namely in the range of 40% to 60%. PLN Enjiniring's position when compared to several other engineering consultants is as shown in the following figure in terms of the billing rate.

Posisi Billing Rate PLN Enjiniring dibandingkan Kompetitor

Dapat dilihat dari Gambar bahwa positioning dari PLN Enjiniring memiliki harga yang bersaing dengan mutu yang lebih baik jika dibandingkan dengan konsultan lokal. Sedangkan untuk mengerjakan proyek-proyek di Indonesia, PLN Enjiniring dapat memberikan kualitas yang sepadan untuk harga yang jauh lebih murah.

2. Reputasi

Dari sisi operasional, PLN Enjiniring sebagaimana konsultan-konsultan lain juga menyampaikan laporan sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam kontrak. Secara konsisten, hal ini telah dipertahankan oleh PLN Enjiniring sejak tahun 2002 sampai dengan 2019. Mengenai kepuasan pelanggan, perlu ditingkatkan khususnya terkait dengan kualitas hasil pekerjaan jasa. Ketersediaan tenaga konsultan yang dipercaya oleh klien perlu diperbanyak sehingga mutu pekerjaan meningkat. Perlu dilakukan survei kepuasan pelanggan yang mampu menyajikan kinerja layanan PLNE seperti yang sebenarnya.

Untuk dapat menggambarkan kondisi umum, secara cepat telah dilakukan quick survey dalam penyusunan RJPP ini, untuk memastikan posisi kinerja dari aspek pelanggan secara lebih baik, dengan gambaran hasil yang juga dapat dipertanggung jawabkan. Quick survey yang dilakukan selanjutnya dapat dipergunakan untuk melihat strategic positioning PLNE dibandingkan pesaing lainnya di Indonesia, dimana hasilnya dapat dilihat melalui gambar diatas.

Berdasarkan hasil diskusi dan angket terbatas, data menunjukkan bahwa secara rata-rata untuk semua jenis pekerjaan pelanggan cenderung memberikan penilaian 'agak baik' terhadap kualitas pekerjaan PLNE. Ada beberapa keterangan yang menyebutkan bahwa hasil pekerjaan dari PLN-E belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pelanggan.

Untuk memberikan kepuasan pelanggan yang optimal, sangat besar dipengaruhi oleh ketersediaan yang cukup dalam hal tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan pengalaman, masalah SDM lainnya yang masih perlu ditingkatkan adalah komposisi pegawai yang juga mendapat sorotan adalah gap generasi.

PLN Enjiniring Billing Rate Position compared to Competitors

It can be seen from the Figure that the positioning of PLN Enjiniring is competitive with a better quality compared to local consultants. Meanwhile, PLN Enjiniring can provide comparable quality for a much cheaper price on projects in Indonesia.

2. Reputation

PLN Enjiniring as well as other consultants also submit reports according to the schedule agreed in the contract from the operational side. This has consistently been maintained by PLN Enjiniring from 2002 to 2019. Regarding customer satisfaction, it needs to be improved, especially in relation to the quality of service work results. The availability of consultants who are trusted by the client needs to be multiplied so that the quality of work improves. It is necessary to conduct a customer satisfaction survey that is able to present the PLNE service performance as it is.

In order to describe the general condition, a quick survey was carried out in the drafting of this RJPP, to ensure a better position of performance from the customer aspect, with an accountable description of the results. The quick survey carried out can then be used to see the strategic positioning of PLNE compared to other competitors in Indonesia, where the results can be seen in the picture above.

Based on the results of limited questionnaires and discussions, the data show that, on average, for all types of work, customers tend to give a "rather good" assessment of the quality of PLNE work. There are several statements that state that the work results from PLNE are not yet fully in line with customer expectations.

It is greatly influenced by sufficient availability in terms of experts who have competences and experiences to provide optimal customer satisfaction. Another HR problem that still needs to be improved is the composition of the employees, which is also under the spotlight, it is the generation gap.

Penyempurnaan terkait pekerjaan PLN-E didapat dengan cara meningkatkan kinerja kualitas layanan pelanggan, yakni;

- Meningkatkan kompetensi di bidang engineering
- Menyediakan database terkait engineering
- Meningkatkan quality control terkait hasil kerja sebelum diserahkan kepada user
- Menjaga komitmen waktu penyampaian hasil kerja

Improvements related to PLNE works were obtained by improving the performance of customer service quality, namely;

- *Improve the competence in engineering sector*
- *Provide related databases on engineering*
- *Improve quality control regarding work results before being handed over to the user*
- *Maintain a commitment to delivery time*

Prospek Usaha 2019

Prospek Perusahaan di masa depan tidak terlepas dari perencanaan investasi Pemegang Saham yang secara umum tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) sebagai perusahaan induk. Merujuk pada Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PLN selaku Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum wajib menyediakan tenaga listrik secara terus-menerus, dalam jumlah yang cukup dan dengan mutu dan keandalan yang baik. Dengan demikian PLN harus mampu melayani kebutuhan tenaga listrik saat ini maupun di masa yang akan datang agar PLN dapat memenuhi kewajiban yang diminta oleh Undang-Undang tersebut. Sebagai langkah awal PLN harus dapat memperkirakan kebutuhan tenaga listrik paling tidak hingga 10 tahun ke depan.

Kebutuhan tenaga listrik pada suatu daerah didorong oleh tiga faktor utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, program elektrifikasi dan pengalihan captive power ke jaringan PLN. Pertumbuhan ekonomi dalam pengertian yang sederhana adalah proses meningkatkan output barang dan jasa. Proses tersebut memerlukan tenaga listrik sebagai salah satu input untuk menunjangnya, disamping input-input barang dan jasa lainnya. Di samping itu hasil dari pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang mendorong peningkatan permintaan barang-barang/peralatan listrik seperti televisi, pendingin ruangan, lemari es dan lainnya. Akibatnya permintaan tenaga listrik akan meningkat.

Faktor kedua adalah program elektrifikasi. Sebagai upaya PLN untuk mendukung program Pemerintah. Dalam meningkatkan rasio elektrifikasi maka PLN perlu melistriki semua masyarakat yang ada dalam wilayah usahanya. Hal ini secara langsung akan menjaga eksistensi wilayah usaha PLN dan sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia khususnya pada daerah-daerah yang telah menjadi wilayah usaha PLN.

Faktor ketiga yang menjadi pendorong pertumbuhan permintaan tenaga listrik PLN adalah pengalihan dari captive power (penggunaan pembangkit sendiri berbahan bakar minyak) menjadi pelanggan PLN. Captive power ini timbul sebagai akibat dari ketidakmampuan

Business Prospects 2019

The Company's prospect cannot be separated from the Shareholders' investment planning in the near future which is generally stated in the General Plan of Electricity Supply (RUPTL) of PT PLN (Persero) as the holding company. Referring to Article 28 and Article 29 of Law Number 30 of 2009 concerning Electricity, PLN as the Holder of a Business Permit to Supply Electricity for the public interest is obliged to provide electricity continuously, in sufficient quantities and with good quality and reliability. Thus, PLN must be able to serve the current and the future electricity needs so that PLN can fulfill its obligations required by the Law. First off, PLN must be able to estimate the electricity needs for at least the next 10 years.

The electricity's needs in an area are driven by three main factors, namely the economic growth, the electrification program and the transfer of captive power to PLN's network. Economic growth in a more simple term is the process of increasing the output of goods and services. This process, in addition to other inputs for goods and services, requires electricity power to support it. In addition, the result of economic growth is an increase in people's income which will be encouraging increases in electrical goods' demands/ equipments such as televisions, air conditioners, refrigerators and others. As a result, the demand for electricity will increase.

The second factor is the electrification program. It is one of PLN's efforts to support Government programs. PLN needs to establish electricity for all the people inside its business area to increase the electrification ratio. This will directly maintain the existence of PLN's business areas and at the same time will increase the electrification ratio in Indonesia, especially in areas that have become PLN's business areas.

The third factor that drives the demand growth for PLN electricity is the transfer from the captive power (the use of self-propelled oil-fired power plants) to become PLN customers. This captive power arises as a result of PLN's inability to meet customer demand in

PLN memenuhi permintaan pelanggan di suatu daerah, terutama pelanggan industri dan bisnis. Bilamana kemampuan PLN untuk melayani di daerah tersebut telah meningkat, maka captive power ini dengan berbagai pertimbangannya akan beralih menjadi pelanggan PLN. Pengalihan captive power ke PLN juga didorong oleh tingginya harga BBM untuk membangkitkan tenaga listrik milik konsumen industri/bisnis, sementara harga jual listrik PLN relatif lebih murah. Faktor ketiga ini sangat bergantung kepada kemampuan pasokan PLN di suatu daerah/sistem kelistrikan dan skema bisnis jual beli listrik PLN dengan captive power, jadi tidak berlaku umum.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kebutuhan listrik adalah kemampuan finansial perusahaan untuk melakukan investasi dalam rangka melayani pertumbuhan kebutuhan pelanggan dan masyarakat untuk mendapatkan pasokan listrik yang cukup dan andal.

Sesuai dengan prakiraan kebutuhan tenaga listrik yang telah dikemukakan oleh PLN tersebut serta kebutuhan investasi dalam rangka melayani pertumbuhan permintaan pelanggan, maka terlihat bahwa prospek PLN Enjiniring ke depan sangatlah terbuka lebar.

Selain itu, terdapat beberapa peluang yang dimiliki oleh PLN Enjiniring yang dapat dijadikan sebagai prospek usaha ke depan antara lain, yaitu:

1. Rencana investasi PT PLN (Persero) setiap tahun masih relatif besar untuk mengejar rasio elektrifikasi nasional yang masih rendah.
2. Jumlah pesaing terbatas, terutama dalam pekerjaan enjiniring hulu;
3. UU No.30 tahun 2009 membuka peluang untuk pengembangan listrik tidak hanya oleh PT PLN (Persero) sehingga terbuka peluang pasar di PEMDA dan IPP;
4. Dapat menjadi pendorong atau pemrakarsa untuk implementasi teknologi baru;
5. Kecenderungan dunia untuk mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan khususnya di bidang energi baru dan terbarukan;
6. Mitra kerja yang cukup banyak;
7. Akses pendanaan dari pasar modal akan diperoleh setelah Initial Public Offering (IPO);

an area, especially industrial and business customers. If PLN's ability to serve in the area has increased, then this captive power with various considerations will turn to become PLN customers. The transfer of captive power to PLN is also driven by the high price of fuel to generate electricity belonging to industrial/business consumers, while the selling price of PLN's electricity is relatively cheaper. This third factor really depends on the ability of PLN's supply in an area/electricity system and the PLN electricity buying and selling business scheme with captive power, so it does not apply in general.

Another factor that can affect the growth of electricity demand is the company's financial ability to invest in serving the growing of customers' and the public's needs to get an adequate and reliable electricity supply.

In accordance to the electricity estimated demand that has been put forward by PLN as well as the investment needs in order to serve customer demand's growth, it seems that the prospects for PLN Enjiniring are very wide open in the near future.

There are several opportunities owned by PLN Enjiniring that can be used as the future business prospects :

1. *PT PLN's (Persero) investment plan is still relatively large every year to catch up with the low national electrification ratio.*
2. *Limited number of competitors, particularly in upstream engineering work;*
3. *Laws of Republic of Indonesia Number 30 of 2009 opens up opportunities for electricity development not only by PT PLN (Persero) therefore there are market opportunities in Regional Government (PEMDA) and in IPP;*
4. *To be a driving force or initiator for the implementation of new technologies;*
5. *The world's trends to implement environmentally friendly technologies, especially in the field of new and renewable energy;*
6. *A considerable number of partners;*
7. *Access to funding from the capital market will be obtained after the Initial Public Offering (IPO);*

- | | |
|---|--|
| <p>8. Masih terbuka pasar di negara-negara Asia Tenggara yang perkembangan ketenagalistrikannya belum maju dalam rangka kerja sama negara-negara ASEAN;</p> <p>9. PERMEN BUMN No:PER-15/MBU/2012 yang membuka peluang penunjukan langsung dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan Perusahaan terafiliasi BUMN, maupun sebaliknya;</p> <p>10. PERMEN BUMN No:PER-15/MBU/2012 juga membuka peluang penunjukan langsung walaupun sudah Perusahaan Terbuka dengan syarat tertentu;</p> <p>11. Rencana pemerintah untuk membangun infrastruktur pembangkit dengan total 35.000 MW dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, yang terdiri atas 10.000 MW oleh PLN dan 25.000 MW oleh swasta/IPP.</p> | <p>8. <i>There is still an open market in Southeast Asian countries where the electricity development is not yet advanced in the framework of cooperation between ASEAN countries;</i></p> <p>9. <i>State Owned Enterprises Ministerial Regulations (PERMEN BUMN) No: PER-15 / MBU / 2012 which opens opportunities for direct appointment of State Owned Enterprises (BUMN), State Owned Enterprises (BUMN) Subsidiaries and State Owned Enterprises (BUMN) affiliated companies, or vice versa;</i></p> <p>10. <i>State Owned Enterprises Ministerial Regulations (PERMEN BUMN) No: PER-15 / MBU / 2012 also opens opportunities for direct appointment even though it is already a Public Company with certain conditions;</i></p> <p>11. <i>The government's plan to build a power plants infrastructure with a total of 35,000 MW in the next 5 years, consisting of 10,000 MW by PLN and 25,000 MW by the private sectors/IPP.</i></p> |
|---|--|

PLN Enjiniring juga tengah berupaya untuk masuk ke dalam bisnis jasa layanan yang memberikan income berkelanjutan, antara lain dengan mengembangkan produk – produk seperti model engineering integrated total solution dengan membentuk paket pekerjaan engineering dimana setiap proyek investasi PT PLN (Persero), PLN Enjiniring diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan enjiniring secara menyeluruh dari mulai enjiniring tahap inisiasi, enjiniring tahap procurement, sampai dengan enjiniring tahap construction.

PLN Enjiniring is also making a serious effort to get into the service business that provides a sustainable income by developing some products such as an engineering integrated total solution model by forming an engineering work packages of which PLN Enjiniring is given the opportunity to undertake comprehensive engineering work starting from the initiation stage of engineering, the procurement stage of engineering, and at the construction stage of engineering at each investment project of PT PLN (Persero).

Strategi Pengembangan Usaha

Pada tahun 2018, PT PLN (Persero) melakukan redefinisi dan konsolidasi seluruh kegiatan usahanya. Dalam kegiatan ini, PLN (Persero) mengarahkan portofolio bisnisnya kedepan agar menjadi lebih optimal ke dalam sebuah pernyataan yang bernama "SOLID" (Securing Business Sustainability, Optimizing Cost Efficiency, Leading Industry Capabilities, Increasing Profit Contribution, and Developing New Edge).

Business Development Strategy

PT PLN (Persero) redefined and consolidated all of its business activities in 2018. PT PLN (Persero) directs its future business portfolio to be more optimal in a statement called "SOLID" (Securing Business Sustainability, Optimizing Cost Efficiency, Leading Industry Capabilities, Increasing Profit Contribution, and Developing New Edge).

Sesuai dengan Core Business PLN Enjiniring sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa enjiniring, PLN Enjiniring mengemban misi strategis Optimizing Cost Efficiency dan Leading Industry Capabilities. Dengan 2 misi strategis tersebut, PLN Enjiniring mengaplikasikan pengembangan kegiatan bisnis yang selaras dengan misi strategis "PLN SOLID" sebagai berikut:

1. Optimizing Cost Efficiency, "mengoptimalkan struktur biaya PLN Group di sepanjang rantai nilai, sehingga PT PLN (Persero) dapat menjadi "price setter" dan memaksimalkan penciptaan nilai PLN Group melalui efisiensi biaya secara keseluruhan."
2. Leading Industry Capabilities, "mengembangkan kemampuan dalam bentuk pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang memberikan daya saing, dan atau keunggulan strategis ("capability setter") bagi PLN Group dengan standar terbaik dalam industri ketenagalistrikan nasional dan sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional atau global."

Sehubungan dengan kedua misi di atas, beberapa hal yang menjadi fokus PLN Enjiniring, yaitu:

1. Pemantapan PLN Enjiniring sebagai Enjiniring terintegrasi
Sebagai suatu entitas bisnis, PT PLNE diharapkan tumbuh dan berkembang dengan efisien dan kompetitif sehingga unggul dan dapat mendukung proses bisnis di PT PLN (Persero) sesuai misi "PLN SOLID". Pada kenyataannya, dalam menjalankan roda bisnis PLN Enjiniring terkadang mengalami benturan kepentingan dengan Anak Perusahaan dan Unit PT PLN (Persero), terutama dalam pengerjaan proyek – proyek PT PLN (Persero), karena misi "PLN SOLID" belum sepenuhnya mendapat dukungan. Oleh karena berkaitan dengan masalah di atas, perlu kiranya ditegaskan kembali dukungan penuh dari PT PLN (Persero) sesuai dengan misi "PLN SOLID", agar PLN Enjiniring dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat sesuai harapan Pemegang Saham. Sisi lain yang perlu pula mendapat perhatian dari seluruh jajaran PLN Enjiniring, adalah mayoritas pekerjaan PT PLNE adalah berasal dari PT PLN (Persero), sehingga diperlukan program – program untuk

Based on the PLN Enjiniring's Core Business as an engaged company in engineering services, PLN Enjiniring has a strategic mission of Optimizing Cost Efficiency and Leading Industry Capabilities. With these 2 strategic missions, PLN Enjiniring applies the development of business activities which is in line with the strategic mission of "PLN SOLID" as follows:

1. *Optimizing Cost Efficiency, "optimizing the PLN Group's cost structure along the value chain, so that PT PLN (Persero) can become a "price setter" and maximizing the PLN Group value creation through the entire cost efficiency."*
2. *Leading Industry Capabilities, "developing capabilities in the form of knowledge, expertise and skills that provide competitiveness and /or strategic advantages (" capability setters") for the PLN Group with the best standards in the national electricity industry and in accordance to the internationally or globally accepted standards."*

In connections to the two missions above, PLN Enjiniring has several things to focus on, namely:

1. *Consolidating PLN Enjiniring as an integrated Engineering*
As a business entity, PT PLNE is expected to growing and developing competitively and efficiently so that it is to be excellent and is able to support PT PLN (Persero) business processes in accordance to the "PLN SOLID" mission. In fact, there are several conflicts of interest in running the PLN Enjiniring business with the Subsidiaries and PT PLN (Persero) Units, because the mission of "PLN SOLID" has not been fully supported especially when working on PT PLN (Persero) projects. Therefore, relating to those mentioned problems, it is necessary of PT PLN (Persero) to reaffirm the full support in accordance to the mission of "PLN SOLID", so that PLN Enjiniring can grow and develop as rapidly as expected by the Shareholders. The other part that needs to receive some attentions from all levels of PLN Engineering, is that the most important work for PT PLNE is from PT PLN (Persero), therefore, some programs which will have a positive

meningkatkan keterikatan PT PLN (Persero) yang akan berdampak positif bagi kelangsungan dan pertumbuhan usaha PLN Enjiniring, salah satunya adalah dengan memperkuat hubungan antara PT PLN (Persero) dengan PLN Enjiniring melalui sistem Key Account Management, yang dimonitor dan dimitigasi langsung oleh Top Management PLN Enjiniring melalui aplikasi "PLN Enjiniring Commit" yang telah diluncurkan sejak bulan Oktober 2018.

2. Lingkup Usaha Enjiniring

Pada kenyataannya, bisnis jasa konsultasi enjiniring bersifat fluktuatif, tergantung dari potensi pasar dan kondisi persaingan di industri jasa enjiniring ketenagalistrikan itu sendiri. Tentunya hal ini juga akan mengakibatkan berfluktuasinya "income" bagi PLN Enjiniring, terutama pada Jasa Conceptual Design. Untuk dapat mengatasi hal ini, PT PLNE tengah berupaya untuk masuk ke dalam bisnis jasa layanan yang memberikan income berkelanjutan, antara lain dengan mengembangkan produk – produk seperti model engineering integrated total solution dengan membentuk paket pekerjaan engineering. Dimana untuk setiap proyek investasi PT PLN (Persero), PLN Enjiniring diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan enjiniring secara menyeluruh dari mulai enjiniring tahap inisiasi, enjiniring tahap procurement, sampai dengan enjiniring tahap construction.

Hingga saat ini bisnis atau lingkup usaha PLN Enjiniring sebagian besar bersifat Partial Solution. Artinya, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan Pembangkit, Transmisi dan Gardu Induk dalam bidang ketenagalistrikan khususnya, dikemas dan dilaksanakan sebagai bagian yang terpisah. Akan tetapi ke depannya, PLN Enjiniring akan menjadikan kemasan atau pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan ini sebagai Engineering Integrated Total Solution, dimana PLN Enjiniring memulai pelaksanaan pekerjaan dengan menyusun Feasibility Study, Engineering Cost Estimate, Bid Document, Design Review, Construction Supervision, Performance Test Evaluation, Plant Diagnostic, Plant Assessment dan Demolish Plant.

impact on the growth and the sustainability of PT PLN (Persero) will be needed, to increase its engagement. One of PLN Enjiniring efforts is to improve the relationship between PT PLN (Persero) and PLN Enjiniring through the Key Account Management system, which is directly monitored and mitigated by PLN Enjiniring Top Management through an app called "PLN Enjiniring Commit" which has been launched since October 2018.

2. Scope of Engineering Business

In fact, the engineering consulting services business is fluctuating, it depends on the market potential and the competitive conditions in the electricity engineering services industry itself. Of course this will also result in fluctuating "income" for PLN Engineering, especially in Conceptual Design Services. To be able to overcome this matter, PT PLNE is also making a serious effort to get into the service business that provides a sustainable income by developing some products such as an engineering integrated total solution model by forming an engineering work packages of which PLN Enjiniring is given the opportunity to undertake comprehensive engineering work starting from the initiation stage of engineering, the procurement stage of engineering, and at the construction stage of engineering at each investment project of PT PLN (Persero).

Up to date, most of the PLN Enjiniring business or business scope have quality of Partial Solution. This means that some works relating to Power plants, Transmission and Substation particularly in the electricity sector are packaged and carried out as a separated part. However, PLN Enjiniring will make the packaging or the implementing of these works as an Engineering Integrated Total Solution in the near future, of which PLN Enjiniring starts the implementation of the works by compiling Feasibility Study, Engineering Cost Estimate, Bid Document, Design Review, Construction Supervision, Performance Test Evaluation, Plant Diagnostic, Plant Assessment and Demolish Plant.

One Package Engineering Integrated Total Solution ini akan memberikan nilai lebih, baik untuk PLN Enjiniring maupun PLN Group. Dengan paket pekerjaan ini, PLN Enjiniring dimungkinkan merencanakan Man Month (MM) dengan lebih baik dan mengkoordinasikan serta melakukan inventarisasi dokumen enjiniring dalam satu siklus pembangunan secara menyeluruh dan terstruktur. Selain itu juga membuat evaluasi dan koreksi atas penyempurnaan desain sesuai tahapannya, menyederhanakan proses pengadaan di PT PLN (Persero) yang memudahkan PT PLN (Persero) dalam melakukan koordinasi dan monitoring suatu proyek.

3. Lingkup Usaha Mendukung Pengembangan dan Konstruksi PLN Group

Bisnis atau lingkup usaha yang selama ini dilakukan oleh PLN Enjiniring masih berada dalam lingkup konsultasi di bidang Jasa Enjiniring berkaitan dengan sarana ketenagalistrikan. Untuk mencapai target yang dicita-citakan dalam mendukung optimizing cost dan leading capability, PLN Enjiniring tidak dapat hanya semata – mata mengandalkan business as usual, tetapi harus tumbuh dan berkembang sesuai harapan Pemegang Saham. Oleh karenanya, perusahaan secara bertahap akan berangsur – angsur masuk dalam bisnis yang mendukung Development and Construction PLN Group yang terdiri atas enjiniring terintegrasi (enjiniring untuk design, enjiniring untuk procurement dan enjiniring untuk konstruksi). Persiapan yang harus dilakukan untuk masuk dalam bisnis tersebut juga tidak sedikit (Keuangan, kepakaran, SDM, teknologi, budaya, dan seterusnya), sehingga PLN Enjiniring perlu menyusun rencana dan tahapan transformasi bisnis tersebut dengan baik. Pemupukan modal, pengalaman, reputasi, jaringan, sertifikasi internasional, dan seterusnya merupakan contoh – contoh aspek yang memerlukan penanganan serius. Berkaitan dengan masalah keuangan, PLN Enjiniring memerlukan dukungan dana yang cukup besar untuk mempersiapkan tercapainya cita – cita bisnis di lingkup Development and Construction tersebut. Pemupukan kapabilitas dan kapasitas perlu dilakukan sejak dini, dengan berusaha meningkatkan kepercayaan kepada PT

This One Package Engineering Integrated Total Solution will provide extended values, both for PLN Enjiniring and the PLN Group. It is possible for PLN Enjiniring to plan a better Man Month (MM) and to coordinate and to carry out an engineering documents inventory in a more comprehensive and structured development cycle, with this work package. In addition, it also makes evaluations and corrections for design improvements according to the stages, simplifies the process of procurement at PT PLN (Persero) which makes it easier for PT PLN (Persero) to coordinate and monitor a project.

3. Business Scope to Support the Development and Construction of the PLN Group

The business or the business scope that has so far been carried out by PLN Enjiniring is still within the scope of consultation in the field of Engineering Services related to electricity facilities. In order to achieve the desired targets in support of optimizing cost and leading capability, PLN Engineering can not rely, solely on business as usual, but it must grow and develop according to the expectations of shareholders. Therefore, the company will gradually get into the business that supports the Construction and the Development of the PLN Group which consists of integrated engineering (engineering for design, engineering for procurement and engineering for construction). The preparations that must be made to get into the business are also not insignificant (finance, expertise, human resources, technology, culture, and so on), thus PLN Enjiniring needs to prepare plans and stages of business transformation properly. Capital accumulations, experiences, reputations, networks, international certifications, and so on are examples of aspects that require serious handling. Regarding the financial problems, PLN Enjiniring requires substantial financial support to prepare the achievement of business goals in the scope of Construction and Development. Capability and capacity building needs to be done earlier by trying

PLN (Persero) terkait kemampuan PLN Enjiniring dalam hal tersebut. Pada titik ini PLN Enjiniring memerlukan dukungan dari berbagai pihak, khususnya PT PLN (Persero).

to increase trust in PT PLN (Persero) regarding the ability of PLN Enjiniring. At this point PLN Enjiniring needs some supports from various parties, especially PT PLN (Persero).

Rencana Investasi Bisnis Baru

Agar rencana strategis perusahaan yang searah dengan dinamika proses bisnis korporat dapat berjalan, maka PLN Enjiniring ke depan akan melakukan investasi pada bidang IT guna menunjang bisnis enjiniring, baik bisnis enjiniring eksisting maupun bisnis enjiniring detail design yang fokus pada:

1. alignment strategi teknologi informasi dengan proses bisnis perusahaan untuk membangun enterprise system.
2. optimalisasi penggunaan aplikasi melalui rasionalisasi, standarisasi, konsolidasi, dan integrasi antara aplikasi yang ada.
3. integrasi informasi dengan menggunakan arsitektur informasi dengan model tata kelola sesuai kebutuhan bisnis perusahaan.
4. pengelolaan infrastruktur dan teknologi yang mendukung agility, kehandalan, ketersediaan, dan keamanan layanan TI.

The New Business Investment Plan

PLN Enjiniring will invest in the IT sector in order to run the company's strategic plan to be in line with the dynamics of corporate business processes to support the engineering business in the near future, both the existing engineering business and the detailed design of engineering business that will be focusing on:

1. *alignment of information and technology strategies with the company's business processes to build an enterprise system.*
2. *optimize the use of apps through rationalization, standardization, consolidation, and integration among existing apps.*
3. *integration of information using the information architecture with a governance model according to the company's business needs.*
4. *infrastructure and technology management that supports the agility, reliability, availability and security of IT services.*

Tinjauan Keuangan

Tinjauan keuangan yang akan diuraikan dalam bagian ini mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2017. Laporan Keuangan Konsolidasian telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RSM Indonesia dan mendapat opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Prima Layanan Nasional Enjiniring tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Financial Review

The financial review that will be described in this section refers to the Consolidated Financial Reports for the years which were ended on December 31, 2016 and on December 31, 2017. The Consolidated Financial Reports have been audited by RSM Indonesia Public Accounting Firm and received a fair opinion in all material matters, PT Prima Jasa Nasional Enjiniring's financial position on the December 31, 2017 as well as the financial performance and cash flows for the year ended on that date have been in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Position Statements



Tabel Laporan Posisi Keuangan

Tabel of Financial Position Statement

(dalam jutaan rupiah)

(in million rupiah)

Uraian <i>Description</i>	2019	2018	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
ASET				
<i>ASSET</i>				
Aset Lancar	857.544	887.438	(29.894)	-3,37%
<i>Current Assets</i>				
Aset Tidak Lancar	327.287	358.056	(30.769)	-8,59%
<i>Non Current Assets</i>				
TOTAL ASET	1.184.831	1.245.494	(60.663)	-4,87%
<i>TOTAL ASSETS</i>				
LIABILITAS				
<i>LIABILITY</i>				
Liabilitas Jangka Pendek	390.969	465.777	(74.808)	-16,06%
<i>Short - Term Liability</i>				
Liabilitas Jangka Panjang	105.978	134.061	(28.083)	-20,95%
<i>Long Term Liability</i>				
TOTAL LIABILITAS	496.947	599.838	(102.891)	-17,15%
<i>TOTAL LIABILITY</i>				
TOTAL EKUITAS	687.884	645.656	42.228	6,54%
<i>TOTAL EQUITY</i>				

Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Position

Aset

Jumlah Aset Perusahaan di 2019 sebesar Rp 1.184,83 miliar, mengalami penurunan sebesar 4,87% atau Rp 60,663 miliar dibandingkan 2018, yaitu sebesar Rp 1.245,49 miliar. Penurunan ini berasal dari penurunan aset tidak lancar.

■ Aset Lancar

Jumlah Aset lancar perusahaan di 2019 sebesar Rp 857,54 miliar, mengalami penurunan sebesar 3,37% atau Rp 29,89 miliar dibandingkan 2018, yaitu sebesar Rp 887,43 miliar. Penurunan ini berasal dari kas dan setara kas, rekening bank yang dibatasi penggunaannya serta biaya dibayar dimuka.

Assets

Total Assets of the Company in 2019 amounted to Rp 1,184.49 billion, an increase of 4.87% or in amount of Rp 60.663 billion compared to 2018, which amounted to Rp 1,245.49 billion. This increase came from an increase in current assets.

■ Current assets

The company current assets in 2019 amounted to Rp 857.54 billion, an decrease of 3.37% or Rp 28.89 billion compared to 2018, which amounted to Rp 887.43 billion. This decrease came from cash and cash equivalents, restricted bank accounts and prepaid expenses.

Tabel Aset Lancar (dalam jutaan rupiah)

Current Asset Table (in million rupiah)

Uraian <i>Description</i>	2019	2018	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Kas dan Setara Kas <i>cash and cash equipment</i>	226.822	319.314	(92.492)	-28,97%
Rekening bank yang dibatasi <i>Restricted bank account</i>	23.128	25.026	(1.898)	0,00%
Piutang usaha <i>Accounts receivable</i>	204.548	171.511	33.037	19,26%
Piutang Lain lain <i>Other receivable</i>	27.632	20.075	7.557	37,64%
Tagihan bruto kepada pelanggan <i>Gross bill to customers</i>	232.066	207.788	24.278	11,68%
Pajak dibayar dimuka <i>Prepaid taxes</i>	91.354	78.111	13.243	16,95%
Biaya dibayar dimuka dan uang muka <i>Prepaid expenses and down payment</i>	51.994	65.613	(13.619)	-20,76%
Jumlah aset lancar <i>Total Current Assets</i>	857.544	887.438	(29.894)	-3,37%

■ Aset Tidak Lancar

Perusahaan membukukan jumlah Aset Tidak Lancar sebesar Rp 327,28 miliar pada 2019, menurun sebesar 8,59% atau Rp 30,76 miliar bila dibandingkan dengan 2018 yang tercatat sebesar Rp 358,05 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh perhitungan impairment investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama serta penambahan penyusutan pada aset tetap.

■ Non-current Assets

The company posted total Non-current Assets amounted to Rp 327.28 billion in 2019, a decrease of 8.59% or in amount of Rp 30.76 billion when compared to 2018 which recorded in amount of Rp 358.05 billion. The decrease caused by calculation of investment impairments in associates and joint ventures and the addition of depreciation on fixed assets.

Tabel Aset Tidak Lancar (dalam jutaan rupiah)

Non-Current Asset Table (in million rupiah)

Uraian <i>Description</i>	2019	2018	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Investasi pada asosiasi dan ventura bersama <i>Investment in association and joint venture</i>	13.426	26.908	(13.482)	-50,10%
Aset Tetap <i>Fixed Asset</i>	296.821	309.307	(12.486)	-4,04%
Aset Lain - lain <i>Other Assets</i>	17.040	21.841	(4.801)	-21,98%
Jumlah Aset Tidak Lancar <i>Total - Non Current Assets</i>	327.287	358.056	(30.769)	-8,59%

Liabilitas

Liabilities

Jumlah Liabilitas Perusahaan di 2019, mengalami penurunan sebesar 17,15%. Liabilitas pada 2019 tercatat sebesar Rp 496,94 miliar, menurun sebesar Rp 102,89 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp 599,84 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 74,80 miliar atau 16,06%.

Total Liabilities of the Company in 2019, decreased by 17.15%. Liabilities in 2019 were recorded amounted to Rp 495.94 billion, an decrease in amount of Rp 102.89 billion compared to the previous year that is Rp 599.84 billion. This decrease mainly due to an decrease in Short-term Liabilities amounted to Rp 74.80 billion or 16.06%.

■ Liabilitas Jangka Pendek

Perusahaan membukukan liabilitas jangka pendek di 2019 yaitu sebesar Rp 390,96 miliar, menurun sebesar Rp 74,80 miliar atau 16,06% dari Rp 465,77 miliar di 2018. Penurunan tersebut antara lain disebabkan penurunan dari utang lain-lain, utang bruto kepada pelanggan dan uang muka dari pelanggan.

■ Short-term liabilities

The company recorded a short-term liability in 2019 amounted to Rp 390.96 billion, an decrease in amount of Rp 74.80 billion or 16.06% from in amount of Rp 465.77 billion in 2018. The decrease partly due to an decrease from other payables, gross payables to customers and advances from customers

Tabel Liabilitas Jangka Pendek (dalam jutaan rupiah)

Table of Short - Term Liabilities (in million rupiah)

Uraian <i>Description</i>	2019	2018	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Utang Usaha <i>Account Payable</i>	134.096	116.175	17.921	15,43%
Uang Muka dari Pelanggan <i>Advances From Costumer</i>	35.393	64.133	(28.740)	-44,81%
Utang Lain - lain <i>Other Payable</i>	5.472	41.243	(35.771)	-86,73%
Utang bruto kepada pelanggan <i>Gross debt to customers</i>	114.143	145.030	(30.887)	-21,30%
Utang pajak <i>Tax payable</i>	14.264	14.354	(90)	-0,63%
Biaya masih harus dibayar <i>Accured expenses</i>	54.623	51.864	2.759	5,32%
Pinjaman japan jatuh tempo dalam 1 tahun <i>Japan loan that matures in 1 year</i>	32.978	32.978	-	0,00%
Jumlah liabilitas jangka pendek <i>Total Short Term Liabilities</i>	390.969	465.777	(74.808)	-16,06%

■ Liabilitas Jangka Panjang

Pada 2019, Liabilitas Jangka Panjang Perusahaan tercatat sebesar Rp 105,97 miliar, mengalami penurunan sebesar 20,95% dibandingkan 2018 yaitu sebesar Rp 134,06 miliar. Penurunan tersebut berasal dari utang lain-lain dan pinjaman jangka Panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan.

■ Long-term liabilities

In 2019, the Company's Long-Term Liabilities recorded in amount of Rp 105.97 billion, a decrease of 20.95% compared to 2018 which amounted to Rp 134.06 billion. The decrease derived from other debt and long-term loans that are due in the current year.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang (dalam jutaan rupiah)

Table of Long - Term Liabilities (in million rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
<i>Description</i>			<i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Utang Lain - lain	156	156	-	0,00%
<i>Other payable</i>				
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	87.062	119.074	(32.012)	-26,88%
<i>Long term loan after deducting by part of maturity due within one year</i>				
Liabilitas imbalan kerja	18.760	14.831	3.929	26,49%
<i>Employee benefits liabilities</i>				
Jumlah liabilitas Jangka Panjang	105.978	134.061	(28.083)	-20,95%
<i>Total Long Term Liabilities</i>				

Ekuitas

Equity

Pada 2019, Ekuitas Perusahaan meningkat sebesar Rp 42,22 miliar atau 6,54% dari Rp 645,65 miliar di 2018 menjadi Rp 687,88 miliar di 2019. Peningkatan Ekuitas ini sejalan dengan kenaikan Saldo Laba yaitu sebesar Rp 42,91 miliar atau 6,92%.

In 2019, the Company's Equity increased by Rp 42.22 billion or 6.54% from Rp 645.65 billion in 2018 to Rp 687.88 billion in 2019. This increase in Equity in line with the increase in Profit Balance in amount of Rp 42.91 billion or 6.92%.

Tabel Ekuitas (dalam Juta Rupiah)

Table of Equity (in million rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
Description			Growth	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Modal Saham	25.000	25.000	-	0,00%
Capital Stock				
Saldo Laba				
Retain earning				
Ditentukan penggunaanya	5.169	5.169	-	0,00%
Determined to use				
Tidak ditentukan penggunaanya	663.318	620.413	42.905	6,92%
Unappropriated				
Penghasilan Komprehensif Lainnya	(5.616)	(4.937)	(679)	13,75%
Other Comprehensive Income				
Kepentingan Non Pengendali	13	11	2	18,18%
Non-Controlling Interests				
Jumlah Ekuitas	687.884	645.656	42.228	6,54%
Total Equity				

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statements of Income (Loss) and Other Comprehensive Income

Tabel Laporan Laba Rugi Penghasilan Komprehensif Lain

Table of Other Comprehensive Income Statement

(dalam jutaan rupiah)

(in million rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
Description			Growth	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Pendapatan	1.000.489	1.117.269	(116.780)	-10,45%
<i>Income</i>				
Beban Pokok Pendapatan	(731.924)	(812.914)	80.990	-9,96%
<i>Cost Of Revenue</i>				
Laba Bruto	268.565	304.355	(35.790)	-11,76%
<i>Gross Profit</i>				
Beban Usaha	(136.740)	(129.098)	(7.642)	5,92%
<i>Operating Expenses</i>				
Laba Sebelum Pos Keuangan dan Lain-lain	131.825	175.257	(43.432)	-24,78%
<i>Gain Before Financial Post and Other</i>				
Pos Keuangan dan Lain-lain Netto	514	(6.117)	6.631	-108,40%
<i>Financial and Other Posts - Net</i>				

Laba Sebelum Pajak <i>Profit Before Taxes</i>	132.339	169.140	(36.801)	-21,76%
Beban Pajak Penghasilan <i>Income Taxes Expense</i>	(7.392)	(5.056)	(2.336)	46,20%
Laba Tahun Berjalan <i>Current Year Profit</i>	124.947	164.084	(39.137)	-23,85%
Pendapatan Komprehensif Lain Tahun Berjalan <i>Other Comprehensive Income Of The Current Year</i>	(679)	(1.509)	830	-55,00%
Jumlah Pendapatan Komprehensif <i>Total Comprehensive Income</i>	(679)	(1.509)	830	-55,00%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan <i>Total Comprehensive Income In Current Year</i>	124.268	162.575	(38.307)	-23,56%
Laba Per Saham (nilai penuh) <i>Earning per share (full amount)</i>	4.998	6.563	(1.565)	-23,85%

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statements of Income (Loss) and Other Comprehensive Income

Pendapatan

Revenue

Pendapatan PLN Enjiniring di 2019 tercatat sebesar Rp 1.000,48 miliar, menurun 10,45% atau Rp 116,78 miliar jika dibandingkan dengan 2018 yaitu sebesar Rp 1.117,27 miliar. Penurunan ini khususnya berasal dari pendapatan dari bidang konstruksi yang mencapai penurunan sebesar Rp 88,89 miliar atau 27,23% dari Rp 326,41 miliar di 2018 menjadi Rp 237,52 miliar di tahun 2019 serta penurunan dari operasional dan perawatan sebesar Rp 33,85 miliar atau 87,42% dari Rp 38,72 miliar di 2018 menjadi Rp 4,87 miliar di 2019.

PLN Enjiniring revenue in 2019 recorded amounted to Rp 1,000.48 billion, an decrease of 10.45% or in amount of Rp 116.78 billion compared to 2018, which in amount of Rp 1.117.27 billion. This decrease mainly derived from revenue from the construction sector which reached an decrease in amount of Rp 88.89 billion or 27.23% from Rp 326.41 billion in 2018 to Rp 237.52 billion in 2019 and an decrease in operational and treatment amounted to Rp 33.85 billion or 87.42% from Rp 38.72 billion in 2018 to Rp 4.87 billion in 2019.

Tabel Kontribusi Pendapatan Jasa Perbidang (segmen)

Table of Service Revenue Contribution Per Sector (Segment)
(dalam jutaan rupiah)
(in million rupiah)

Uraian <i>Description</i>	2019	2018	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Pembangkitan <i>Power Plant</i>	93.444	48.863	44.581	91,24%
Konstruksi <i>Construction</i>	237.516	326.405	(88.889)	-27,23%
Transmisi & Distribusi <i>Transmission and Distribution</i>	121.004	161.278	(40.274)	-24,97%
Operasional dan Perawatan <i>Operation and Maintenance</i>	4.872	38.723	(33.851)	-87,42%
Kompresi GAS <i>Compression Nature Gas</i>	103.651	103.594	57	0,06%
Enjiniring, Prokuremen dan Konstruksi <i>Engineering , Procurement and Construction</i>	440.002	438.406	1.596	0,36%
Jumlah Pendapatan <i>Total Revenue</i>	1.000.489	1.117.269	(116.780)	-10,45%

■ Beban Pokok Pendapatan

Di 2019, Perusahaan mengalami penurunan beban pokok pendapatan sebesar 9,96%. Beban Pokok Pendapatan di 2019 tercatat sebesar Rp 731,92 miliar sedangkan untuk 2018 sebesar Rp 812,91 miliar. Penurunan Beban pokok pendapatan ini salah satunya diakibatkan oleh turunnya beban Sub Kontraktor yang merupakan komponen beban terbesar bagi Beban pokok pendapatan, penurunan beban Sub Kontraktor tersebut mencapai sebesar Rp 51,69 miliar atau menurun sebesar 10,97% dibandingkan tahun lalu. Adapun rincian terkait Beban pokok pendapatan disajikan dalam tabel berikut ini.

■ Cost of Revenue

In 2019, the Company experienced an decrease in cost of revenue amounted to 9.96%. Cost of Revenue in 2019 recorded in amount of Rp 731.92 billion, while for 2018 amounted to Rp 812.91 billion. The decrease in cost of revenue partly due to the decrease in expenses of the Sub-Contractor, which is the largest component of cost of revenue, the increase in Sub-Contractor expenses reached in amount of Rp 51.69 billion, a decrease of 10.97% compared to last year. The details related to cost of revenue presented in the following table.

Tabel Beban Jasa

Table of Company Service Expense
(dalam jutaan rupiah)
(in milion rupiah)

Uraian <i>Description</i>	2019	2018	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Sub - Kontraktor <i>Sub - Contractor</i>	419.566	471.257	(51.691)	-10,97%
Remunerasi Enjiniring <i>Engineering Remuneration</i>	151.570	164.028	(12.458)	-7,60%
Peralanan Dinas dan Tansportasi <i>Travel Service and Transportation</i>	48.566	46.915	(1.651)	3,52%
Beban Pajak Final <i>Final Tax Expense</i>	28.563	35.328	(6.765)	-19,15%
Sewa <i>Rent</i>	29.928	26.590	3.338	12,55%
Lain-lain <i>Others</i>	53.741	68.796	(15.005)	-21,88%
Jumlah Beban Jasa <i>Total Service Load</i>	731.924	812.914	(80.990)	-9,96%

■ Laba Bruto

Labanya Bruto Perusahaan di 2019 tercatat sebesar Rp 268,56 miliar, menurun 11,76% dibanding 2018 yaitu tercatat sebesar Rp 304,35 miliar. Penurunan laba bruto tersebut sejalan dengan penurunan Pendapatan Bersih di 2019.

■ Beban Usaha

Pada 2019, Perusahaan membukukan Beban Usaha sebesar Rp 136,74 miliar, meningkat 5,92% dibanding 2018 yang tercatat sebesar Rp 129,09 miliar. Peningkatan beban usaha ini khususnya berasal dari jasa tenaga kerja, perjalanan dinas dan transportasi, asuransi serta beban konsumsi.

■ Gross profit

The Company Gross Profit in 2019 recorded amounted to Rp 268.56 billion, an decrease of 11.76% compared to 2018 which recorded in amount of Rp 304.35 billion. The decrease in gross profit is in line with the decrease in Net Revenue in 2019.

■ Operating expenses

In 2019, the Company recorded Operating Expenses of Rp 136.74 billion, an increase of 5.92% compared to 2018 which recorded in amount of Rp 129.09 billion. The increase in operating expenses mainly came from employee service, travel service and transportation, insurance and consumption expenses

Tabel Beban Usaha

Table of Operating Expense

(dalam jutaan rupiah)

(in million rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
Description			Growth	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Gaji dan kesejahteraan karyawan <i>Salary and employe benefit</i>	81.853	83.007	(1.154)	-1,39%
Jasa tenaga kerja <i>Emloye services</i>	4.525	2.626	1.899	72,32%
Tunjangan pajak penghasilan karyawan <i>Employee income tax benefits</i>	8.385	8.576	(191)	-2,23%
Alat keperluan kantor <i>Office suplies</i>	3.436	3.089	347	11,23%
Sewa <i>Rent</i>	6.895	6.879	16	0,23%

Peralanan Dinas dan Tansportasi <i>Travel Service and Transportation</i>	5.965	4.156	1.809	43,53%
Beban Imbal Kerja <i>Employee Benefit Expense</i>	3.250	3.760	(510)	-13,56%
Telekomunikasi <i>Telecommunication</i>	2.036	1.054	982	93,17%
Konsultan <i>Consultant</i>	1.227	829	398	48,01%
Alat Tulis Kantor <i>Office stationary</i>	1.784	1.735	49	2,82%
Asuransi <i>Insurance</i>	2.164	1.118	1.046	93,56%
Konsumsi <i>Consumption</i>	2.580	1.534	1.046	68,19%
Pemeliharaan <i>Maintenance</i>	581	1.363	(782)	-57,37%
Srtifikasi dan Perijinan <i>Certification and licensing</i>	7	60	(53)	-88,33%
Iklan dan promosi <i>Ads and promotion</i>	191	328	(137)	-41,77%
Penyusutan <i>Depreciation</i>	1.390	542	848	156,46%
Beban Kerugian Penurunan Piutang Usaha <i>Impairment Losses on Trade Receivables</i>	523	152	371	244,08%
Lain-lain <i>Other</i>	9.948	8.290	1.658	20,00%
Jumlah beban usaha <i>Total oprating expense</i>	136.740	129.098	7.642	5,92%

■ Laba Sebelum Pos Keuangan dan Lain-Lain

Labanya Sebelum Pos Keuangan dan lain-lain di 2019, tercatat sebesar Rp 131,82 miliar, mengalami penurunan sebesar 24,78% atau Rp 43,43 miliar dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 175,25 miliar.

■ Profit Before Financial Posts and Others

Profit Before Financial Post and others in 2019, recorded in amount of Rp 131.82 billion, an decrease of 24.78% or in amount of Rp 43.43 billion compared to 2018 which amounted to Rp 175.25 billion.

■ Pos Keuangan dan Lain-Lain Bersih

Di 2019, Perusahaan mencatat Pos Keuangan dan Lain-lain sebesar Rp 514 miliar, naik sebesar 108,40% dibanding tahun 2018 yang sebesar -Rp 6.117 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan lain-lain.

■ Financial Posts and Others

In 2019, the Company recorded Financial Post and Others amounted to Rp 514 billion, increased by 104.40% compared to 2018 which amounted to -Rp 6.117 billion. The incline mainly due to net other income.

Pos Keuangan dan Lain-Lain Bersih

Net Financial Position and Other

(dalam jutaan rupiah)

(in million rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
Description			Growth	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Penghasilan bunga <i>Interest Income</i>	13.955	11.361	2.594	22,83%
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - neto <i>Gain (losses) on foreign exchangerates - net</i>	394	365	750	-210,67%
Rugi atas investasi saham yang tidak tercatat <i>loss on stock investment not listed on the exchange</i>	13.482	5.145	8.337	162,04%
Beban bunga <i>Interest expense</i>	15.644	19.231	3.587	
Lain-lain - neto <i>Other - net</i>	15.291	7.254	8.037	110,80%
Jumlah pos keuangan dan lain-lain - neto <i>umber of financial post and other - net</i>	514	6.117	6.631	-108,40%

■ Laba Sebelum Pajak

Perusahaan mencatat Laba Sebelum Pajak di 2019 sebesar Rp 132,34 miliar mengalami penurunan 21,76% dibanding 2018 yaitu sebesar Rp 36,80 miliar.

■ Beban Pajak Penghasilan

Beban Pajak Penghasilan Perusahaan tercatat mengalami peningkatan 46,20% dari tahun 2018 sebesar Rp 5,05 miliar menjadi Rp 7,3 miliar di 2019. Hal ini seiring dengan meningkatnya persentase pendapatan non final perusahaan dari tahun 2018.

■ Laba Tahun Berjalan Dan Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Di 2019, Perusahaan membukukan Laba Tahun Berjalan dan Jumlah Laba Komprehensif sebesar Rp 124,95 miliar dan Rp 124,27 miliar. Laba Tahun Berjalan dan Jumlah Laba Komprehensif mengalami penurunan sebesar 23,85% dan 23,56% dibandingkan 2018 yang sebesar Rp 164,08 miliar dan Rp 162,57 miliar.

■ Laba Bersih Per Saham

Laba per saham di tahun 2019 tercatat sebesar Rp 4,998, menurun sebesar 23,85% atau Rp 1,565 dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp 6,503.

■ Profit before tax

The company recorded a Profit Before Tax in 2019 amounted to Rp 132.34 billion, an decrease of 21.76% compared to 2018 which amounted to Rp 36.80 billion.

■ Income Tax Expense

The Company income tax expense recorded to increase 46.20% since 2018 from Rp 5.05 billion to Rp 7.3 billion in 2019. This is in line with increase in the percentage of the company's non-final income from 2018.

■ Profit for Current Year and Comprehensive Profit for Current Year

In 2019, the Company recorded a Profit for Current Year and Comprehensive Profit amounted to Rp 124.95 billion and Rp 124.27 billion. Profit for Current Year and Total Comprehensive Profit decreased by 23.85% and 23.56% compared to 2018 which amounted to Rp 164.08 billion and Rp 108.15 billion.

■ Net Income Per Share

Earnings per share in 2019 recorded amounted to Rp 4,998, an decrease of 23.85% or in amount of Rp1,565 compared to 2018 which amounted to Rp 6,503.

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Cash Flows Statements

Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas di 2019 sebesar Rp 92,49 miliar atau sebesar -28,97% menurun dibanding tahun 2018 dengan penurunan sebesar Rp 23,43 miliar atau sebesar 6,84%. Penurunan tersebut disebabkan oleh pemanfaatan Arus Kas untuk Operasi pada 2019 sebesar -Rp 43,79 miliar atau 51,66% dibanding tahun 2018 yang sebesar Rp 84,78 miliar.

The net decrease in cash and cash equivalents in 2019 amounted to Rp 92.49 billion, or -28.97%, down compared to 2018 with a decrease in amount of Rp 23.43 billion or 6.84%. The decrease caused by the use of Cash Flows for Funding in 2019 in amount of -Rp 43.79 billion or 51.66% compared to 2018 which amounted to Rp 84.78 billion.

Tabel Arus Kas

Table of Cash Flow
(dalam jutaan rupiah)
(in million rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
Description			Growth	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Arus Kas dari Aktivitas Operasi <i>Cash Flows from Operating Activities</i>	40.985	84.870	43.795	-51,66%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi <i>Cash Flows from Investing Activities</i>	3.781	4.511	730	-16,18%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan <i>Cash Flows from Financing Activities</i>	129.696	103.702	25.994	25,07%
Penurunan Neto Kas dan Setara Kas <i>Decrease in Net Cash and Cash Equivalents</i>	92.492	23.433	69.059	294,71%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun <i>Cash and Cash Equivalents Early Years</i>	319.314	342.747	23.433	-6,84%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun <i>Cash and Year end Cash Equivalents</i>	226.822	319.314	92.492	-28,97%

**Laba (Rugi) Dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian**

**Consolidated Profit (Loss) And Other
Comprehensive Income**

■ Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi di 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 43,79 miliar atau -51,66% dari Rp 84,78 miliar di 2018 menjadi Rp 40,98 miliar di 2019.

■ Arus Kas Untuk Aktivitas Investasi

Kas Bersih Yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi di 2019 tercatat sebesar -Rp 3,78 miliar, meningkat sebesar Rp 0,73 miliar atau -16,18% dibanding tahun 2018 sebesar -Rp 4,51 miliar. Penggunaan arus kas dari Aktivitas Investasi disebabkan oleh pembelian software.

■ Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan di 2019 tercatat sebesar -Rp 129,69 miliar yang berasal dari pembayaran dividen senilai Rp 81,95 miliar. Arus kas dari aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar 25,07% atau -Rp 25,99 miliar dari tahun 2018 senilai -Rp 103,70 miliar.

■ Peningkatan/Penurunan Neto Kas Dan Setara Kas

Secara keseluruhan di 2019, terjadi penurunan bersih Kas dan Setara Kas jika dibandingkan dengan tahun 2018. Penurunan bersih Kas dan Setara Kas di 2019 sebesar -Rp 69,06 miliar atau sebesar 294,71% dibanding tahun 2018 sebesar -Rp 23,43 miliar.

■ Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun

Besarnya Kas dan Setara Kas Akhir Tahun pada 2019 tercatat sebesar Rp 226,82 miliar, menurun Rp 92,49 miliar atau -28,97% dibanding 2018 yang sebesar Rp 319,31 miliar.

■ Cash Flow From Operating Activities

Net Cash Provided from Operating Activities in 2019 decreased by Rp 43.79 billion or -51.66% from Rp 84.78 billion in 2018 to Rp 40.98 billion in 2019.

■ Cash Flows for Investment Activities

Net Cash Used in Investment Activities in 2019 recorded amounted to -Rp3.78 billion, an increase in amount of Rp 0.73 billion or -90.48% compared to 2017 amounted to -Rp4.51 billion. The use of cash flow from Investment Activities caused by software purchases.

■ Cash Flow From Funding Activities

Net cash used for funding activities in 2019 recorded amounted to -Rp129.69 billion, which came from the dividend payments amounted to Rp 81.95 billion. Cash flow from funding activities increased by 25.07% or -Rp 25.99 billion from 2018 amounted to -Rp 103.70 billion.

■ Increase / decrease in net cash and cash equivalents

Overall in 2019, there a net decrease in Cash and Cash Equivalents compared to 2018. The net decrease in Cash and Cash Equivalents in 2019 amounted to -Rp 69.06 billion or amount to -294.71% compared to 2018 amounted to -Rp23.43 billion.

■ End of Year Cash and Cash Equivalents

The amount of Cash and Cash Equivalents at the end of the year in 2019 recorded amounted to Rp 226.82 billion, a decrease in amount of Rp 92.49 billion or -28.97% compared to 2018 which amounted to Rp 319.31 billion.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company Health Level

Pencapaian realisasi KPI PLNE sampai dengan TW IV Tahun 2019 sesuai dengan perhitungan berdasarkan Edaran Direksi PT PLN (Persero) No.0001.E/DIR/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Direktorat, Departemen, Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Perusahaan, Divisi, Unit Induk, Pusat-Pusat dan Anak Perusahaan dengan penggolongan penilaian tingkat kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN adalah sebesar 89,64 dengan nilai rincian sebagai berikut:

Achievement of the KPI PLNE realization up to TW IV 2019 in accordance with the calculation based on the Circular of the Directors of PT PLN (Persero) No.0001.E/DIR/2019 dated May 22, 2019 concerning the Implementation Guidelines for Calculating Organizational Performance Value of Directorates, Units and Subsidiaries by classifying the level of health assessment in accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) of the Republic of Indonesia No. KEP-100 / MBU / 2002 dated June 4, 2002 concerning Assessment of the Health Level of BUMN amounted in amount of 89.64 with the following breakdown values:

Tabel Tingkat Kesehatan Perusahaan

Table of Company Health Level
(dalam jutaan rupiah)
(in million rupiah)

No	Indikator Kinerja Kunci <i>Key Performance Indicators</i>	Bobot <i>Weight</i>	Nilai <i>Value</i>
1	Pelanggan <i>Customer</i>	10,00	9,23
2	Produk dan Layanan <i>Products and Services</i>	39,00	31,62
3	SDM <i>HR</i>	16,00	15,53
4	Keuangan dan Pasar <i>Finance and Markets</i>	29,00	27,31
5	Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan <i>Leadership, Governance and Community Responsibility</i>	6,00	5,95
TOTAL BOBOT <i>TOTAL WEIGHT</i>		100,00	89,64

Rasio Keuangan

Financial Ratios

- Kolektibilitas Piutang**
 Umur Piutang (Collection Period) merupakan indikator dengan polaritas negatif yang pencapaiannya semakin baik jika realisasinya semakin kecil. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan rata-rata saldo piutang usaha dengan jumlah pendapatan dikalikan dengan jumlah hari dalam setahun (365 hari). Pada 2019, tingkat kolektibilitas piutang perusahaan tercatat sebesar 69 hari, lebih lama dari target yang ditetapkan sebesar 30 hari, sedangkan pada 2018, tingkat kolektibilitas piutang perusahaan tercatat sebesar 35 hari, lebih lama dari target yang ditetapkan sebesar 30 hari.
- Kemampuan Membayar Utang**
 Kemampuan membayar utang dapat dilihat melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas yang menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek antara lain dapat diukur melalui rasio kas dan rasio lancar.
- Rasio Kas** menjelaskan kemampuan perusahaan untuk melunasi liabilitas jangka pendeknya melalui kas dan setara kas (asset yang paling likuid) yang dimiliki.
- Rasio Lancar** merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dengan menggunakan aktiva.
- Receivable Collectibility**
The age of accounts receivable (Collection Period) is an indicator with negative polarity, the better the achievement if the realization is smaller. The measurement carried out by comparing the average trade receivable balance with the amount of income multiplied by the number of days in a year (365 days). In 2019, the company receivables collectibility level recorded at 69 days, longer than the target set at 30 days, while in 2018, the company receivables collectibility level recorded at 35 days, longer than the target set at 30 days.
- Ability to Pay Debt**
The ability to pay debts can be seen through liquidity ratios and solvency ratios. Liquidity ratios that show the ability of the Company to meet short-term liabilities can be measured among others through cash ratios and current ratios.
- The Cash Ratio describes the company's ability to pay off short-term liabilities through cash and cash equivalents (the most liquid assets) owned.*
- Current Ratio is a ratio used to see the company ability to pay debts using assets.*

Tabel Likuiditas

*Table of Liquidity
(dalam jutaan rupiah)
(in million rupiah)*

Uraian	2019	2018
<i>Description</i>		
1	2	3
Rasio Kas (%)	0,58	0,69
<i>Cash Ratio (%)</i>		
Rasio Lancar (%)	2,19	1,91
<i>Current Ratio (%)</i>		

- Rasio likuiditas 2019 mengalami penurunan dibandingkan 2018, diukur dengan menggunakan Rasio Lancar. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar utang PLN Enjiniring di 2019 meningkat. Rasio likuiditas masih menunjukkan kondisi yang bagus yaitu dengan nilai 2,19.
- Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas yang menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya antara lain dapat diukur melalui rasio liabilitas terhadap ekuitas, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, dan rasio liabilitas terhadap aset, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset.
- *The liquidity ratio 2019 has decreased compared to 2018, both measured using Current Ratios. This shows that the ability to pay PLN Enjiniring debt in 2019 is increased. Liquidity ratio still shows good conditions, which is 2.19 poin.*
- *Solvency Ratio*
The solvency ratio that shows the ability of the Company to pay its obligations can be measured, among others, through the ratio of liabilities to equity, which is calculated by comparing the total liabilities with the total equity, and the ratio of liabilities to assets, which is calculated by comparing the total liabilities with the total assets.

Tabel Solvabilitas

Table of Solvency
(dalam jutaan rupiah)
(in million rupiah)

Uraian	2019	2018
<i>Description</i>		
1	2	3
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas <i>Ratio of Liabilities to Equity</i>	0,72	0,93
Rasio Liabilitas Terhadap Aset <i>Ratio of Liabilities to Assets</i>	0,42	0,48

Rasio solvabilitas Perusahaan mengalami penurunan, baik untuk rasio liabilitas terhadap ekuitas maupun rasio liabilitas terhadap aset. Hal ini menunjukkan kemampuan PLN Enjiniring dalam membayar kewajiban-kewajiban meningkat di tahun 2019.

The Company solvency ratio has decreased, both for the ratio of liabilities to equity and the ratio of liabilities to assets. This shows the ability of PLN Enjiniring to pay obligations increases in 2019.

Struktur Modal

Capital Structure

■ Rincian Struktur Modal

Komposisi struktur modal di 2019 yang dimiliki oleh Perusahaan adalah 41,94% berasal dari Liabilitas dan 58,06% berupa Ekuitas, komposisi ini mengalami perubahan jika dibandingkan dengan 2018, dengan komposisi struktur modal yang berasal dari Liabilitas mengalami penurunan 17,15% sedangkan Ekuitas meningkat 6,54%.

■ Details of Capital Structure

The composition of the capital structure in 2019 owned by the Company by 41.94% originating from Liabilities and 58.06% in the form of Equity, this composition experienced a change compared to 2018, with the composition of capital structure originating from Liabilities experiencing an decreased of 17.15% while Equity increased by 17.15%.

Tabel Struktur Modal

Table of Capital Structure

(dalam jutaan rupiah)

(in million rupiah)

Uraian <i>Description</i>	2019	Kontribusi (%) <i>Contribution (%)</i>	2018	Kontribusi (%) <i>Contribution (%)</i>	Perubahan (%) <i>Change (%)</i>
Liabilitas <i>Liabilities</i>	496.947	41,94	59.838	48,16	-17,5
1. Jangka Pendek <i>Short - Term</i>	390.969	33,00	465.777	37,40	-16,06
2. Jangka Panjang <i>Long - Term</i>	105.978	8,94	134.061	10,76	-20,95
Ekuitas <i>Equity</i>	687.884	58,06	645.656	51,84	6,54
Total Modal yang Diinvestasikan <i>Total Capital Invested</i>	1.184.831	100	1.245.494	100	-4,87

■ Kebijakan Struktur Modal

Perusahaan memiliki kebijakan menggunakan ekuitas sebagai sumber modalnya. Tahun 2019, rasio ekuitas terhadap liabilitas sebesar 138,42%.

■ Capital Structure Policy

The company has a policy of using equity as its capital source. In 2019, the ratio of equity to liabilities will be 138,42%.

■ Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal

Selama 2019, Perusahaan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal.

■ Material Commitments for Capital Goods Investment

During 2019, the Company has no material commitments for capital investment.

■ Investasi Barang Modal

Selama 2019, Perusahaan melakukan penambahan barang modal untuk Aset Tetap dan Properti Investasi sebagai berikut.

■ Capital Investment

During 2019, the Company will add capital goods to Fixed Assets and Investment Properties as follows.

Tabel Investasi Barang Modal

Table of Capital Goods Investment

(dalam jutaan rupiah)

(in million rupiah)

Uraian <i>Description</i>	Nilai Investasi <i>Investment Value</i>	Tujuan Investasi <i>Investment Objective</i>
1	2	3
Tanah Soil	9	Ekspansi/Pengembangan usaha Expansion/Business Development
Kendaraan Vehicle	-	-
Perabotan dan Peralatan Furniture and equipment	3.622	Kegiatan operasional Operational Activities
Perlengkapan Kantor Office supplies	-	Kegiatan operasional Operational Activities
CNG Combine Nature Gas	38.379	Ekspansi/Pengembangan usaha Expansion/Business Development
Jumlah <i>Amount</i>	42.010	

Perbandingan Target dan Realisasi

Comparison of Targets and Realization



Pencapaian target PLN Enjiniring di 2019 menunjukkan hasil yang bervariasi. Dari sisi posisi keuangan, jumlah asset, jumlah liabilitas, dan jumlah ekuitas perusahaan melampaui target yang telah di anggarkan pada RKAP 2019. Dari sisi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain,realisasi pendapatan mencapai 77,90% atau sebesar Rp 1.000,49 miliar dari RKAP 2019 yang ditargetkan sebesar Rp 1.284,34 miliar. Beban Operasi 2019 pada triwulan IV 2019 mencapai Rp 868.66 miliar atau 76,47% dibandingkan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 1.135,92 miliar. Realisasi laba rugi operasi pada triwulan IV 2019 sebesar Rp 131,82 miliar atau mencapai 88,82% dari RKAP 2019 yang di targetkan sebesar Rp 148,42 miliar. Realisasi laba tahun berjalan pada triwulan IV 2019 sebesar Rp 124,94 miliar atau mencapai 93,17% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp 134,10 miliar. Sedangkan untuk realisasi kas dan setara kas akhir tahun pada Laporan Arus Kas tercatat sebesar Rp 226,82 miliar atau mencapai 72,09% dari RKAP yang telah dianggarkan sebesar Rp 314,64 miliar.

Achievement of the PLN Enjiniring target in 2019 shows mixed results. In terms of financial position, total assets, total liabilities and total equity of the company exceeded the target budgeted for in the 2019 RKAP. From the side of the Income Statement and Other Comprehensive Income, revenue realization reached 77.90% or Rp 1.000.49 billion from the 2019 RKAP which targeted at Rp1.284.34 billion. Operating Expenses in 2019 in fourth quarter of 2019 reached Rp868.66 billion or 76.47% compared to the 2019 budget of Rp1,135.92 billion. Realization of operating profit and loss in the fourth quarter of 2019 amounted to Rp175.26 billion or reached 66.16% of the 2018 RKAP which targeted at Rp264.92 billion. The realization of profit for the current year in the fourth quarter of 2019 amounted to Rp 131.82 billion or reached 88.82% of the 2019 RKAP target budget in amount of RP 148.42 billion. As for the realization of cash and cash equivalents at the end of the year on the Cash Flow Report recorded amounted to Rp226.82 billion or reached 72.09% of the budgeted RKAP in amount of Rp314.16 billion.

Tabel Realisasi dan Target 2019

Table of 2019 Realization and Target

(dalam jutaan rupiah)

(in million rupiah)

Uraian	Realisasi 2019	RKAP 2019	Pencapaian (%)
Description	Realization 2019		Achievement (%)
1	2	3	4=(2/3)
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
FINANCIAL POSITION REPORT			
ASET			
ASSET			
Aset Lancar	857.544	588.737	145,66%
Current Assets			
Aset Tidak Lancar	327.287	438.932	74,56%
Non Current Assets			
TOTAL ASET	1.184.831	1.027.669	115,29%
TOTAL ASSETS			
LIABILITAS			
LIABILITY			
Liabilitas Jangka Pendek	390.969	139.336	280,59%
Short - Term Liability			
Liabilitas Jangka Panjang	105.978	114.967	92,18%
Long Term Liability			
TOTAL LIABILITAS	496.947	254.303	195,42%
TOTAL LIABILITY			
TOTAL EKUITAS	687.884	773.366	88,95%
TOTAL EQUITY			
Laba Rugi dan Penghasilan Lainnya			
Income Statement and Other Comprehensive Income			
Pendapatan	1.000.489	1.284.344	77,90%
Income			
Beban Pokok Pendapatan	(731.924)	(944.665)	77,48%
Cost Of Revenue			

Laba Bruto	268.565	339.679	79,06%
<i>Gross Profit</i>			
Beban Usaha	(136.740)	(191.259)	71,49%
<i>Operating Expenses</i>			
Laba Sebelum Pos Keuangan dan Lain-lain	131.825	148.420	88,82%
<i>Gain Before Financial Post and Other</i>			
Pos Keuangan dan Lain-lain Netto	514	(12.602)	-4,08%
<i>Financial and Other Posts - Net</i>			
Laba Sebelum Pajak	132.339	135.818	97,44%
<i>Profit Before Taxes</i>			
Beban Pajak Penghasilan	(7.392)	(1.715)	431,02%
<i>Income Taxes Expense</i>			
Laba Tahun Berjalan	124.947	134.103	93,17%
<i>Current Year Profit</i>			
Pendapatan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	(679)		
<i>Other Comprehensive Income Of The Current Year</i>			
Jumlah Pendapatan Komprehensif	(679)	134.103	-0,51%
<i>Total Comprehensive Income</i>			
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	124.268	134.103	92,67%
<i>Total Comprehensive Income In Current Year</i>			
Laporan Arus Kas			
<i>Cash Flow Statement</i>			
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	40.985	123.171	33,27%
<i>Cash Flows from Operating Activities</i>			
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(3.781)	(45.983)	8,22%
<i>Cash Flows from Investing Activities</i>			
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(129.696)	(32.011)	405,16%
<i>Cash Flows from Financing Activities</i>			
Penurunan Neto Kas dan Setara Kas	(92.492)	45.177	-204,73%
<i>Decrease in Net Cash and Cash Equivalents</i>			
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	319.314	269.463	118,50%
<i>Cash and Cash Equivalents Early Years</i>			
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	226.822	314.640	72,09%
<i>Cash and Year and Cash Equivalents</i>			

Proyeksi Tahun 2019

Projection of 2019

Proyeksi keuangan 2019 didasarkan pada asumsi nilai Kurs 1 US \$ sama dengan Rp13.400,- berdasarkan asumsi tersebut, Perusahaan memproyeksikan jumlah aset di tahun 2019 sebesar Rp 1.027,67 miliar, jumlah liabilitas sebesar Rp 254,30 miliar, dan jumlah ekuitas diproyeksikan sebesar Rp 773,36 miliar. Dari sisi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Perusahaan memproyeksikan pendapatan operasi di tahun 2019 sebesar Rp 1.284,34 miliar. Biaya Operasi Perusahaan diproyeksikan sebesar Rp 1.135,92 miliar di tahun 2019. Terkait Laba Rugi Operasi, Perusahaan memproyeksikan pendapatan laba operasi sebesar Rp 148,42 miliar. Laba Bersih tahun berjalan dan laba komprehensif tahun berjalan diproyeksikan mencapai Rp 134,10 miliar. Dari sisi Laporan Arus Kas, Perusahaan memproyeksikan kas dan setara kas akhir tahun 2019 sebesar Rp 314,64 miliar.

The financial projection of 2019 based on an assumption of a US \$ 1 exchange rate equal to Rp13,400. Based on this assumption, the Company projects total assets in 2019 in amount of Rp1,027 billion, total liabilities in amount of Rp254.30 billion, and total projected equity in amount of Rp773.36 billion. In terms of the Income Statement and Other Comprehensive Income, the Company projects operating income in 2019 in amount of Rp1,284.34 billion. The Company's Operating Costs are projected to reach Rp1,135.92 billion in 2019. Regarding Operating Profit and Loss, the Company projects operating profit income in amount of Rp148.42 billion. Net income for the current year and comprehensive income for the current year are projected to reach Rp134.10 billion. In terms of the Cash Flow Report, the Company projects cash and cash equivalents at the end of 2019 in amount of Rp314.64 billion.

Informasi Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Selama tahun 2019, Perseroan tidak menerima informasi material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

Material Information that Occurs after the Date of the Accountant's Report

During 2019, the Company did not receive material information that occurred after the date of the accountant's report.

Kebijakan Deviden

Atas saldo laba tahun 2019, Perseroan tidak menerima informasi terkait pembagian Deviden.

Dividend Policy

On the balance of profit in 2019, the Company does not receive information related to the distribution of dividends

Program Kepemilikan Saham Oleh Manajemen dan/atau Karyawan

Perusahaan tidak melaksanakan program kepemilikan saham oleh manajemen dan/atau karyawan (ESOP/MSOP), hal ini dikarenakan PLN Enjiniring belum menjadi perusahaan publik.

Share Ownership Program By Management and/or Employees

The company does not implement a share ownership program by management and / or employees (ESOP / MSOP), this is because PLN Enjiniring has not yet become a public company.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Perusahaan tidak memiliki catatan mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, hal ini dikarenakan PLN Enjiniring belum menjadi perusahaan publik.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi Atau Restrukturisasi Utang/Modal

■ Investasi

Pada tahun 2019, Perseroan telah menjelaskan investasi sebagai berikut:

1. PT Crompton Prima Switchgear Indonesia, dimana merupakan perusahaan afiliasi PLN Enjiniring dengan kepemilikan saham sebesar 49% telah menyelesaikan pembangunan pabrik switchgear di kawasan industri modern Cikande, Banten pada tanggal 20 Agustus 2018.
2. CNG Plant Bangkanai, dimana merupakan unit bisnis PLN Enjiniring dengan ruang lingkup sebagai aset owner dan aset operator.

■ Ekspansi

Selama 2019, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait dengan Ekspansi.

■ Divestasi

Selama 2019, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait dengan Divestasi.

■ Penggabungan/Peleburan Usaha

Sepanjang 2019, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait dengan penggabungan/peleburan usaha.

Realization of the Use of Funds from Public Offering

The company does not have a record of the realization of the use of funds resulting from a public offering, this is because PLN Enjiniring has not become a public company.

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Combinations, Acquisitions or Debt / Capital Restructuring

■ Investment

In 2019, the Company has explained the investment as follows:

1. *PT Crompton Prima Switchgear Indonesia, which is an PLN Enjiniring affiliated company with 49% ownership, has completed the construction of the switchgear plant in the modern industrial area of Cikande, Banten on August 20, 2018.*
2. *CNG Plant Bangkanai, which is the PLN Enjiniring business unit with scope as the owner's assets and operator assets.*

■ Expansion

During 2019, the Company has no information or activities related to the Expansion.

■ Divestment

During 2019, the Company have no information or there were no activities related to Divestment.

■ Business Merger/Consolidation

During 2019, the Company has no information or there were no activities related to business mergers / consolidations.

■ Akuisisi

Selama tahun 2019, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait dengan akuisisi perusahaan.

■ Restrukturisasi Utang dan/atau Restrukturisasi Modal

Selama tahun 2019, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait dengan Restrukturisasi utang atau/Modal.

■ Acquisition

During 2019, the Company has no information or activities related to the company's acquisition.

■ Debt Restructuring And/Or Capital Restructuring

During 2019, the Company has no information or there were no activities related to debt or / capital restructuring.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Material Transaction Information Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Related Parties

Perusahaan menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

The company applies PSAK No. 7 (Revised 2010), "Disclosure of Related Parties". This PSAK requires disclosure of relationships, transactions and related party balances, including commitments, in the financial statements.

Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang berlaku bagi pihak ketiga.

The Company carries out certain transactions with related parties with the same terms and conditions as those applicable to third parties.

Perusahaan tidak memiliki alasan khusus terkait pemberian transaksi dengan pihak berelasi. Pemberian transaksi kepada pihak berelasi dilakukan secara wajar sesuai ketentuan yang berlaku dengan tujuan yang sama terhadap transaksi dengan pihak ketiga lainnya.

The company has no specific reason related to the provision of transactions with related parties. The giving of transactions to related parties is carried out appropriately according to the provisions in force with the same purpose to transactions with other third parties.

Transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan sebagai berikut.

Significant transactions with related parties are disclosed as follows.

- Sifat Hubungan Berelasi
 - Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PLN dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - PLN dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham Perusahaan.
 - PT Indonesia Power (IP), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan), PT Haleyora Power (HP), dan PT Indonesia Comnets Plus merupakan perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham utama Perusahaan dan atau sebagian pengurusnya sama dengan Perusahaan.
 - Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.
- *The Nature of Relationships*
 - *The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of PLN and a State-Owned Enterprise (BUMN).*
 - *PLN and the Education and Welfare Foundation of PT PLN (Persero) are the Company's shareholders.*
 - *PT Indonesia Power (IP), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan), PT Haleyora Power (HP), and PT Indonesia Comnets Plus are companies whose shareholders are the same as the major shareholders The company and / or some of its management are the same as the Company.*
 - *The Board of Commissioners and Board of Directors are key management personnel of the Company.*

Transaksi Pihak Berelasi**Related Party Transactions**

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan :

The following is a list of related parties that have transactions with the Company:

Tabel Transaksi Pihak Berelasi*Related Parties Table***(dalam jutaan rupiah)***(in million rupiah)*

Uraian	2019		2018	
<i>Description</i>	<i>Rp</i>	<i>%</i>	<i>Rp</i>	<i>%</i>
Kas dan Setara Kas	dalam Rp. Juta			
<i>Cash and Cash equivalents</i>	<i>In Rp Million</i>			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	87.622	7,40%	142.852	11,47%
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk	13.935	1,18%	34.796	2,79%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	111.959	9,45%	121.473	9,75%
Sub - Jumlah	213.516		299.121	
<i>Sub - Total</i>				
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya				
<i>Restricted account</i>				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.189	0,52%	8.277	0,66%
Piutang usaha neto				
<i>Account receivable - net</i>				
PT PLN (Persero)	189.762	16,02%	156.621	12,58%
PT Crompton Prima Switchgear	9.168	0,77%	-	0,00%
PT PLN Gas Geothermal	2.884	0,24%	2.887	0,23%
PT PLN Batam	1.118	0,09%	1.799	0,14%
PT Indonesia Power	1.007	0,08%	8.173	0,66%
PT Waskita Tbk (Persero)	240	0,02%	240	0,02%
Sub - Jumlah	204.179		169.720	
<i>Sub - Total</i>				

Piutang Lain-lain				
<i>Other Receivables</i>				
PT Crompton Prima Switchgear	11.000	0,93%		0,00%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	253	0,02%	162	0,01%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	32	0,00%	77	0,01%
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk		0,00%	22	0,00%
PT PLN (Persero)		0,00%	83	0,01%
Sub - Jumlah	11.285		344	
Sub - Total				
Tagihan bruto kepada pelanggan				
<i>Gross bill to customers</i>				
PT PLN (Persero)	216.478	43,56%	199.770	16,04%
PT Indonesia Power	338	0,07%	1.851	0,15%
PT PLN Batam	111	0,02%	-	0,00%
PT Wijaya Karya (Persero)	48	0,01%	-	0,00%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	5	0,00%	-	0,00%
PT Angkasa Pura II (Persero)		0,00%	21	0,00%
Sub - Jumlah	216.980		201.642	
Sub - Total				
Uang muka dari pelanggan				
<i>Advances from Customer</i>				
PT PLN (Persero)	32.239	6,49%	60.443	10,08%
Utang Lain-lain				
Other Liabilities				
PT PLN (Persero)	2.370	0,48%	39.303	6,55%
PT Haleyora Power	2.630	0,53%	470	0,08%
PT Indonesia Comnet Plus	390	0,08%	741	0,12%
Sub - Jumlah	5.390		40.514	
Sub - Total				

Utang bruto kepada pelanggan				
<i>Gross liabilities to customers</i>				
PT PLN (Persero)	100.180	20,16%	141.347	23,56%
PT Indonesia Power	8.555	1,72%	2.476	0,41%
PT PLN Gas Geothermal	1.415	0,28%		0,00%
PT Crompton Prima Switchgear	1.356	0,27%		0,00%
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	347	0,07%	174	0,03%
PT Angkasa Pura II (Persero)	174	0,04%		0,00%
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	130	0,03%	202	0,03%
Sub - Jumlah	112.157		144.199	
Sub - Total				
Pinjaman jangka panjang				
<i>Long term loan</i>				
PT PLN (Persero)	120.040	24,16%	152.052	25,35%
Pendapatan jasa konsultasi pihak berelasi				
<i>Revenue from consulting service to related parties</i>				
PT PLN (Persero)	957.118	95,67%	1.079.512	96,62%
PT Indonesia Power	11.750	1,17%	14.915	1,33%
PT Crompton Prima Switchgear	10.093	1,01%		0,00%
PT PLN Gas Geothermal	4.057	0,41%	2.887	0,26%
PT Pembangkitan Jawa Bali	2.167	0,22%		0,00%
PT PLN Batam	2.086	0,21%	1.799	0,16%
PT PLN Batubara		0,00%	431	0,04%
Sub - Jumlah	987.271		1.099.544	
Sub - Total				

Pada 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan memberikan kompensasi kepada Komisaris dan Direksi perusahaan berupa gaji, fasilitas, tunjangan dan tantiem masing-masing sebesar Rp 14.04 miliar dan Rp.12.51 miliar. Perusahaan memiliki kebijakan untuk mereview setiap transaksi dengan pihak berelasi agar tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang terkait.

As of December 31, 2019 and 2018, the Company provided compensation to the company's Commissioners and Directors in the form of salaries, facilities, benefits and tantiem amounting to Rp 14.04 billion and Rp.12.51 billion, respectively. The company has a policy to review each transaction with related parties so that it does not violate the relevant rules and regulations.

Perubahan Peraturan Perundang Undangan Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

Amendments to the Law and Regulations which have a Significant Effect on the Company

Selama Tahun 2019, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

During 2019, the Company has no information or there were no activities related to changes in laws and regulations that have a significant effect on the financial statements.

■ Perubahan Kebijakan Akuntansi

1. PSAK Baru dan Revisi, serta ISAK yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019

Pengesahan amandemen dan penyesuaian atas PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, adalah sebagai berikut:

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018): Kombinasi Bisnis;
- PSAK 24 (Amandemen 2018): Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program;
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018): Biaya Pinjaman;
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018): Pajak Penghasilan;
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018): Pengaturan Bersama;
- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka;
- ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

■ Changes in Accounting Policies

1. *New and Revised PSAK, as well as ISAK effective for the financial year beginning on or after January 1, 2019*

Application of New and Revised Financial Accounting Standards (Penerapan Standar Akuntansi Keuangan "PSAK"), and Interpretation of Financial Accounting Standards (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan "ISAK") that are effective for the financial year beginning on or after January 1, 2019

- *PSAK 22 (Adjustment 2018): Business Combination.*
- *PSAK 24 (Amendment 2018): Employee Benefits regarding Amendments, Excursions or Completion of Programs.*
- *PSAK 26 (Adjustment 2018): Loan Costs.*
- *PSAK 46 (Adjustment 2018): Income Tax.*
- *PSAK 66 (2018 Adjustment): Joint Settings.*
- *ISAK 33: Foreign Exchange Transactions and Upfront Rewards.*
- *ISAK 34: Uncertainty in the Treatment of Income Taxes.*

The implementation of these standards did not have a significant impact on the amount reported in the current period or the previous year.

2. PSAK Baru dan Revisi, serta ISAK yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan setelahnya

Interpretasi standar berikut ini efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 62 (Amandemen): Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 71: Instrumen Keuangan;
- PSAK 71 (Amandemen): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa;
- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba;
- PSAK 1 (Amendemen 2019): Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan;
- PSAK 1: (Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan;
- PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba;
- PSAK 25 (Amendemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan;
- PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah;
- ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan;
- ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah.

Standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: Akuntansi Wakaf;
- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis.

2. *New and Revised PSAK, as well as ISAK effective for the financial year beginning on or after January 1, 2020.*

The following standards and amendments are effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early application permitted, namely:

- *PSAK 15 (Amendment): Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long-Term Interests in Associates and Joint Ventures.*
- *PSAK 62 (Amendments): Insurance Contracts - Implement PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts.*
- *PSAK 71: Financial Instruments.*
- *PSAK 71 (Amendments): Financial Instruments concerning the Accelerated Features of Repayment with Negative Compensation.*
- *PSAK 72: Revenues from Contracts with Customers.*
- *PSAK 73: Rental.*
- *ISAK 35: Presentation of Financial Statements of Non-Profit Oriented Entities.*
- *PSAK 1 (Amendment 2019): Presentation of Financial Statements on The Title of Financial Statements.*
- *PSAK 1: (Annual Adjustment 2019): Presentation of Financial Statements.*
- *PPSAK 13: Revocation of PSAK 45: Financial Reporting of Non-Profit Entities.*
- *PSAK 25 (Amendment 2019): Accounting Policy, Changes in Accounting Estimates and Errors.*
- *SAK 102 (Revised 2019): Murabahah Accounting.*
- *ISAK 101: Recognition of Tangguh Murabahah Income Without Significant Risk related to Inventory Ownership.*
- *ISAK 102: Decrease in The Value of Murabahah Receivables.*

The following standards are effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early application permitted, namely:

- *PSAK 112: Endowments Accounting*
- *PSAK 22 (Amendment 2019): Business Combination on Business Definitions.*

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi atas standar serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.

At the time of issuance of the consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are still studying the impacts that may arise from the adoption of new standards, amendments to standards, and interpretations of the standards and their effects on the consolidated financial statements of the Company and subsidiaries.

Informasi Kelangsungan Usaha

Business Continuity Information

Hal-hal yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

PLN Enjiniring tidak sedang menghadapi hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha.

Matters that have a Significant Effect on Business Continuity

PLN Engineering is not facing things that have a significant effect on business continuity.

Assessment Manajemen Atas Hal-hal Yang Berpengaruh Terhadap Kelangsungan Usaha

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Perusahaan tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usahanya.

Management Assessment of Matters Affecting Business Continuity

The Company management has assessed the Company ability to continue the continuity of its business and believes that the Company has the resources to continue in the future. In addition, the Company's management does not see any material uncertainty that can raise significant doubts about the Company's ability to continue its business.

Asumsi Yang Digunakan Manajemen Dalam Melakukan Assessment

Beberapa Faktor yang menjadi pertimbangan manajemen dalam melakukan assessment terhadap kelangsungan usaha adalah sebagai berikut.

- Kebijakan Pemegang Saham
- Kinerja Keuangan
- Likuiditas
- Solvabilitas
- Masalah Internal
- Perkara Hukum

Assumptions Used by Management in Conducting Assessments

Some factors that are considered by management in conducting an assessment of business continuity are as follows.

- *Shareholder Discretion*
- *Financial performance*
- *Liquidity*
- *Solvency*
- *Internal Problems*
- *Legal matters*

SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCE





SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES

Bagian SDM pada PLN Enjiniring terdiri dari sub bagian Pengembangan Organisasi dan Kinerja SDM, Administrasi dan Kesejahteraan SDM, dan Pengembangan SDM, sesuai dengan Keputusan Direksi no.20.001.K/DIR/PLNE/VIII/2018 tentang Formasi Jabatan dan Formasi Tenaga Kerja. Keputusan Direksi tersebut menunjukkan bahwa dimana secara tidak langsung fungsi dari Bagian SDM PLN Enjiniring tidak sekedar sebagai fungsi administratif ataupun supporting, melainkan mempunyai fungsi yang besar yaitu mengembangkan sumber daya manusia dan organisasi.

The HR section of PLN Enjiniring consists of sub-sections of Organizational and HR Performance Development, HR Administration and Welfare, and HR Development, in accordance with Decree of the Board of Directors No. 20.001.K / DIR / PLNE / VIII / 2018 regarding Position Formation and Workforce Formation. The Board of Directors decision shows that indirectly the function of the PLN Enjiniring Section is not just as personnel, but also has a function as for the development of human resources and organizations.

Aktivitas Bagian SDM yang menunjang kinerja perusahaan dalam setiap tahun tertuang dalam Kontrak Manajemen, dimana Key Performance Indicator (KPI) untuk perspektif tenaga kerja adalah kesiapan sumber daya manusia (Human Capital Readiness – HCR) dan kesiapan organisasi (Organizational Capital Readiness – OCR). Pada tahun 2019, PT PLN (Persero) memberikan tambahan KPI perspektif tenaga kerja kepada PLN Enjiniring, yaitu Rasio Enjinir Subletting. Selain tiga aktivitas penunjang KPI Perusahaan tersebut, Bagian SDM PLN Enjiniring tetap melaksanakan fungsi SDM sebagaimana mestinya, yang juga dikenal dengan sebutan “Tujuh Pilar SDM”, yaitu :

1. pengembangan organisasi dan perencanaan tenaga kerja,
2. rekrutmen dan seleksi,
3. pembinaan kompetensi dan karir,
4. pengelolaan pembelajaran,
5. pengelolaan manajemen kinerja (performance appraisal),
6. pengelolaan kompensasi dan manfaat, dan
7. pengelolaan hubungan industrial.

The HR Department activities that support the company's performance every year are contained in the Management Contract, where the Key Performance Indicator (KPI) for the workforce perspective is the Human Capital Readiness 'HCR' and Organizational Capital Readiness 'OCR'. In 2019, PT PLN (Persero) provided an additional KPI of labor perspective to PLN Enjiniring, namely the Subletting Engineering Ratio. In addition to the three supporting activities of the Company's KPI, the Human Resources Department PLN Enjiniring continues to carry out the HR function as it should, also known as the "Seven Pillars of HR", namely:

1. organizational development and workforce planning,
2. recruitment and selection,
3. competency and career development,
4. learning management,
5. performance management (performance appraisal),
6. compensation and benefit management, and
7. industrial relations management.

ORGANISASI PENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA

PLN Enjiniring menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan elemen penting yang akan menunjang produktivitas kinerja PLN Enjiniring. Persaingan dunia bisnis yang semakin ketat menuntut manusia untuk selalu berkembang menjadi lebih baik dan kompetitif. Untuk menjawab tantangan zaman yang semakin global saat ini, PLN Enjiniring berkomitmen untuk terus melakukan program pengembangan karyawan secara intensif guna mencetak insan PLN Enjiniring yang handal dan kompeten dalam dunia bisnis. Komitmen ini ditunjukkan dengan mengikutsertakan karyawan dalam berbagai pelatihan dan sertifikasi serta program pengembangan lainnya. Pengelolaan SDM PLN Enjiniring berada di bawah tanggung jawab Direktorat Keuangan dan SDM dan dijalankan oleh Bidang SDM dan Umum yang dipimpin oleh Manajer Senior SDM dan Umum. Struktur organisasi pengelola SDM adalah sebagai berikut.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ORGANIZATION

PLN Enjiniring is aware that human resources are an important element that supporting PLN Enjiniring's productivity performance. The increasingly fierce competition in the business world requires humans to always develop for the better and competitive. To answer the challenges of the increasingly global era today, PLN Enjiniring committed to continuing to conduct intensive employee development programs in order to produce PLN Enjiniring people who are reliable and competent in the business world. This commitment demonstrated by involving employees in various training and certifications and other development programs. The management of human resources PLN Enjiniring is under the responsibility of the Directorate of Finance and HR and is carried out by the HR and General Affairs Division which is led by the Senior HR and General Managers. The organizational structure of the HR manager is as follows.

Struktur organisasi pengelola SDM HR management organizational structure



PROFIL MANAJER SENIOR SDM DAN UMUM

■ Fransiska Widyastuti

PH Manajer Senior SDM dan Umum

Warga Negara Indonesia, usia 41 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi dari Universitas Indonesia Depok pada tahun 2003. Menjabat sebagai PH Manajer Senior SDM dan Umum sejak tahun 2019, sebelumnya menjabat sebagai Manajer Senior Anggaran dan Keuangan pada PT PLN Enjiniring (2017-2019).

Fungsi Dan Ruang Lingkup Tugas Bidang Sdm & Umum

Pada Bidang SDM & Umum terdapat dua bagian yaitu:

1. Bagian SDM, memiliki fungsi dan ruang lingkup sebagai berikut:
 - Pengembangan organisasi dan perencanaan tenaga kerja,
 - Rekrutmen dan seleksi,
 - Pembinaan kompetensi dan karir,
 - Pengelolaan pembelajaran (pendidikan dan pelatihan),
 - Pengelolaan manajemen kinerja,
 - Pengelolaan kompensasi dan manfaat,
 - Pengelolaan hubungan industrial,
2. Bagian Umum, memiliki fungsi dan ruang lingkup sebagai berikut:
 - Rumah tangga kantor
 - Manajemen gedung dan aset
 - Pengelolaan keamanan dan kebersihan kantor
 - Pengelolaan kendaraan dan fasilitas dinas
 - Pengelolaan perjalanan dinas

SENIOR MANAGER OF HR AND GENERAL PROFILE

■ Fransiska Widyastuti

PH Senior Manager of HR and General

Indonesian citizen, 41 years old. He completed his Bachelor's degree in accounting from the University of Indonesia in 2003. Serves as PH Senior Manager of HR and General since 2019, previously served as Senior Manager of Budget and Finance at PT PLN Enjiniring (2017-2019)

Functions and Scope of Duty in the Sector of Human Resources & General Affairs

In the field of HR & General there are two parts, namely:

1. HR, has the following functions and scope:
 - Organizational development and workforce planning,
 - Recruitment and selection,
 - Competency and career development,
 - Management of learning (education and training),
 - Management of performance management,
 - Management of compensation and benefits,
 - Management of Industrial Relations,
2. General Section, has the following functions and scope:
 - Office household
 - Management of building and asset
 - Management of office security and cleanliness
 - Management of vehicles and service facilities
 - Management of official travel

KEBIJAKAN REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Seiring dengan perkembangan bisnis perusahaan, PLN Enjiniring membutuhkan peningkatan SDM dalam hal kualitas maupun kuantitas. Rekrutmen yang dilakukan terutama untuk mengisi formasi jabatan dan formasi tenaga kerja berdasarkan keputusan Direksi Perusahaan. Rekrutmen dilakukan dengan pertimbangan hasil analisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan penguatan kompetensi bisnis Perusahaan serta peningkatan target kinerja dan pendapatan. Keberagaman latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keahlian menjadi kriteria dalam melakukan seleksi calon pegawai PLN Enjiniring.

Terhitung mulai tahun 2019, rekrutmen calon pegawai PLN Enjiniring dilakukan melalui rekrutmen terpusat dalam lingkup PLN Grup. Rekrutmen tersebut dilakukan oleh PT PLN (Persero) melalui rekrutmen terbuka untuk umum, dengan membuka seluas-luasnya kesempatan rekrutmen dengan tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. PLN Enjiniring menghitung jumlah kebutuhan tambahan tenaga kerja sekaligus klasifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi formasi tenaga kerja, kemudian diserahkan kepada Bagian Rekrutmen PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang bertindak sebagai pelaksana rekrutmen. Sedangkan untuk proses rekrutmen karyawan outsourcing dan karyawan PKWT dilakukan berdasarkan kebutuhan proyek.

Dalam proses rekrutmen calon pegawai PLN Enjiniring, terdapat sejumlah tahap yang harus dilalui oleh para pelamar, yaitu (1) Seleksi administrasi, (2) Tes Potensi Akademik (TPA) dan Bahasa Inggris, (3) General Aptitude Test (GAT), (4) Psikotes, (5) Wawancara, dan (6) Tes Kesehatan.

Calon pegawai yang telah lulus melewati seluruh tahapan seleksi tersebut wajib mengikuti program pra-jabatan yang terdiri dari pendidikan dan pelatihan bimbingan fisik dan mental, pendidikan dan pelatihan pengenalan perusahaan, dan on-the-job training (OJT) dalam bentuk terjun langsung ke dalam pekerjaan di lingkungan PLN Enjiniring. Setelah selesai mengikuti program pra-jabatan, calon pegawai diangkat menjadi Pegawai terhitung sejak tanggal selesai masa OJT dan/

HUMAN RESOURCES RECRUITMENT POLICY

Along with the company's business development, PLN Enjiniring requires an increase in human resources in terms of quality and quantity. Recruitment carried out primarily to fill in the position formation and workforce formation based on the decision of the Company's Board of Directors. Recruitment carried out with consideration of the analysis results of workforce needs based on strengthening the Company business competencies and increasing performance and revenue targets. The diversity of educational backgrounds, experiences, and expertise become the criteria in selecting the candidates for PLN Enjiniring.

Starting from 2019, the recruitment of prospective PLN Enjiniring employees carried out through a centralized recruitment within the scope of the PLN Group. The recruitment carried out by PT PLN (Persero) through open recruitment to the public, by opening up the broadest recruitment opportunities by not distinguishing ethnicity, religion, race, and between groups. PLN Enjiniring calculates the number of additional workforce needs as well as the classification of workforce needed to fill workforce formation, then submitted to the Recruitment Section of PT PLN (Persero) Head Office which acts as a recruitment executor. Whereas the recruitment process for outsourced employees and PKWT employees carried out based on project needs.

In the recruitment process of prospective PLN Enjiniring employees, there are a number of stages that must be passed by the applicants, namely (1) Administration selection, (2) Academic Potential Test (TPA) and English Test, (3) General Aptitude Test (GAT), (4) Psychology test, (5) Interview, and (6) Health Test.

Prospective employees who have passed all stages of the selection are required to take a pre-service program consisting of education and training in physical and mental guidance, education and company introduction training, and on-the-job training (OJT) in the form of working directly into employment within the environment of PLN Enjiniring. After completing the pre-service program, prospective employees appointed as Employees from the date of completion of the OJT

atau terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai melalui Keputusan Direksi. Selama tahun 2019, secara akumulasi PLN Enjiniring telah mendapatkan rekrutan PLN Grup sejumlah 62 orang untuk calon Pegawai organik dan 137 orang karyawan PKWT. Selain itu, PLN Enjiniring mengalami pengurangan tenaga kerja sebanyak 131 orang karyawan PKWT dengan alasan masa kontrak kerja telah habis dan tidak diperpanjang dan 2 orang Pegawai organik karena mengundurkan diri.

period and / or the issuance of a Decision Letter on Appointment of Employees through a Decree of the Board of Directors. During 2019, in accumulation PLN Enjiniring has received 62 PLN Group recruits for prospective organic employees and 137 PKWT employees. In addition, PLN Enjiniring experienced a workforce reduction of 131 PKWT employees on the grounds that the work contract period had expired and not extended and 2 organic employees resigned.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM

Pengembangan kompetensi SDM dilakukan untuk memastikan ketersediaan SDM yang handal dalam menjalankan aktivitas bisnis PLN Enjiniring. Salah satu media pengembangan kompetensi SDM adalah melalui pemberdayaan program pelatihan, sertifikasi, dan penugasan. PLN Enjiniring memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan dalam mendapatkan program pengembangan tersebut.

Program pengembangan didasarkan pada kebutuhan Perusahaan untuk mendukung pencapaian keberhasilan kinerja dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam Kontrak Manajemen. Selain itu, program pengembangan bagi tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan sikap dalam menghadapi setiap pekerjaan atau penugasan.

Dalam melaksanakan pengembangan SDM, PLN Enjiniring bekerja sama dengan PLN Corporate University dan lembaga pelatihan dalam maupun luar negeri. Selama tahun 2019, Perusahaan melaksanakan pengembangan kompetensi karyawan yang terdiri dari 49 Program Pelatihan dengan diikuti oleh 316 orang, serta 27 Program Sertifikasi dengan diikuti oleh 159 orang terdiri dari Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai, dan Karyawan Kontrak/Outsourcing. Pengembangan kompetensi dilakukan dengan menerapkan menerapkan prinsip persamaan kesempatan bagi semua karyawan.

HR DEVELOPMENT PROGRAM

HR competency development carried out to ensure the availability of reliable HR in carrying out PLN Enjiniring's business activities. One of the media for developing HR competencies is through empowering training programs, certifications, and assignments. PLN Enjiniring gives the same opportunity to all employees in getting the development program.

The development program is based on the Company's needs to support the successful achievement of the Company's performance and objectives stipulated in the Management Contract. In addition, the development program for the workforce aims to increase knowledge, competencies, and attitudes in the face of each job or assignment.

In implementing HR development, PLN Enjiniring works with PLN Corporate University and training institutions at home and abroad. During 2019, the Company implemented employee competency development consisting of 49 Training Programs with 316 participants, and 27 Certification Programs attended by 159 participants consisting of Members of the Board of Commissioners, Directors, Employees, and Contract / Outsourcing Employees. Competency development is carried out by applying the principle of equality of opportunity for all employees.

Tabel Pelaksanaan Pelatihan Tahun 2019

Table of Training Implementation for 2019

No.	Waktu Pelaksanaan <i>Execution Time</i>	Jenis/Judul Pelatihan <i>Type / Title of Training</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Jumlah Peserta* <i>Number of Participants*</i>
1	Januari <i>January</i>	Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Resource Management</i>	PPM Manajemen	1
2	Januari <i>January</i>	Effective Communication Skills <i>Effective Communication Skills</i>	LONDON SCHOOL PUBLIC RELATION	67

3	Januari <i>January</i>	Pelatihan Software TEKLA <i>TEKLA Software Training</i>	BIDANG TND	12
4	Maret <i>Mach</i>	Akuntansi Pendapatan Sesuai PSAK 72 <i>Revenue Accounting in accordance with PSAK 72</i>	IKATAN AKUNTANSI INDONESIA	1
5	Maret	Awareness dan Audit Internal ISO 9001:2015 <i>ISO 9001: 2015 Internal Audit and Awareness</i>	PT SUCOFINDO	10
6	Maret <i>Mach</i>	Survei Proyek, Inspeksi dan Manajemen Risiko (HAZID / HAZOP / SIL) Peralatan Mekanikal dan Perpipaian pada Industri, Tanker (Kapal), dan Platform Lepas Pantai (ISO 17776, ISO 31000, IMO) <i>Project Survey, Inspection and Risk Management (HAZID/HAZOP/SIL) Mechanical Equipment and Piping on Industries, Tanker (Ship), and Offshore Platform (ISO 17776, ISO 31000, IMO)</i>	CIGRE	6
7	Maret <i>Mach</i>	Seminar Manajemen Proyek <i>Project Management Seminar</i>	SGS	2
8	April <i>April</i>	Loka Karya Manajemen SDM dengan Big Data <i>Workshop Human Capital Management With Big Data</i>	ASIA ANTI FRAUD	1
9	Mei <i>May</i>	Pengenalan KPKU Pengenalan KPKU	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	6
10	Mei <i>May</i>	Training Pendalaman HPE (Level Instruktur) <i>Training Pendalaman HPE (Level Instruktur)</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	6
11	Juni <i>June</i>	Pelatihan Software ETAP <i>ETAP Software Training</i>	LMPI	11
12	Juni <i>June</i>	Integrated GRC <i>Integrated GRC</i>	ASIA ANTI FRAUD	1
13	Juli <i>July</i>	Pelatihan Software ETAP <i>ETAP Software Training</i>	LMPI	14
14	Juli <i>July</i>	Manajemen Kualitas Proyek Peralatan Mekanikal dan Perpipaian, Studi Kasus: Minyak dan Gas Bumi, Pembangkit Listrik, dan Pertambangan, (ISO / TS 29001, API Q 1) <i>Project Quality Management Mechanical Equipment and Piping, Case Study : Oil and Gas, Power Plant, and Mining, (ISO/TS 29001, API Q 1)</i>	BKM PII (Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur Indonesia)	7
15	Juli <i>July</i>	Kontrak Berbasis FIDIC <i>FIDIC Based Contracts</i>	Emlli Training	23
16	Agustus <i>August</i>	Kontrak Berbasis FIDIC <i>FIDIC Based Contracts</i>	Emlli Training	27
17	Agustus <i>August</i>	Legal For Non Legal <i>Legal For Non Legal</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	1
18	Agustus <i>August</i>	Manajemen Proyek Berbasis ARCGIS <i>Project Management Based on ARCGIS</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2

19	Agustus <i>August</i>	Pembelajaran Karya Inovasi <i>Pembelajaran Karya Inovasi</i>	Ir. Yani Hadiani Soegito, MSIE	29
20	Agustus <i>August</i>	Pelatihan Penggunaan Software Engineering UNISIM Bagian I dan II <i>Training on the Use of UNISIM Software Engineering Parts I and II</i>	PT Advance Technology Solution (ATS)	15
21	September <i>September</i>	K2 dan K3 Instalasi TT/TET Untuk Pelaksana Pekerjaan <i>K2 dan K3 Instalasi TT/TET Untuk Pelaksana Pekerjaan</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
22	September <i>September</i>	ISO 27001 <i>ISO 27001</i>	ISACA Indonesia	2
23	September <i>September</i>	Pengembangan Diri <i>Self-development</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	7
24	September <i>September</i>	Pengelolaan Dokumen Perusahaan <i>Company Documents Management</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	1
25	September <i>September</i>	Pendalaman Materi Boardgames Power Marketer <i>Pendalaman Materi Boardgames Power Marketer</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	1
26	September <i>September</i>	Manajemen Risiko Hukum <i>Legal Risk Management</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	1
27	Oktober <i>October</i>	Proyeksi Harga Gas/LNG dan BBM Terhadap Perubahan Makro Ekonomi dan Pasar Dunia <i>Gas / LNG and BBM Price Projection on Macroeconomic and World Market Changes</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
28	Oktober <i>October</i>	Manajemen Alat Pengukur dan Pembatas <i>Measuring and Limiting Management</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	4
29	Oktober <i>October</i>	Bank Garansi dan Aplikasinya <i>Bank Guarantee and Application</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	3
30	Oktober <i>October</i>	Pemeliharaan Peralatan Gardu Induk <i>Maintaining Substation Equipment</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
31	Oktober <i>October</i>	Perhitungan Keekonomian Gas Hulu, Midstream dan Hilir <i>Calculation of Upstream, Midstream and Downstream Gas Economy</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	1
32	Oktober <i>October</i>	Gas Engine Electric Set Operation & Maintenance <i>Gas Engine Electric Set Operation & Maintenance</i>	PT Trakindo	4
33	Oktober <i>October</i>	Non Destructive Test (NDT) <i>Non Destructive Test (NDT)</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	3
34	Oktober <i>October</i>	Workshop and Training for Smart Energy Solution <i>Workshop and Training for Smart Energy Solution</i>	PT PLN (Persero) Kantor Pusat	2
35	Oktober <i>October</i>	GE Relay Training <i>GE Relay Training</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
36	Oktober <i>October</i>	Teknik Presentasi <i>Presentation Techniques</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2

37	Oktober <i>October</i>	Storage Workshop <i>Storage Workshop</i>	USAID ASIA	1
38	Oktober <i>October</i>	W2 - FS <i>W2 - FS</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
39	Oktober <i>October</i>	Seminar PJB Connect 2019 <i>Seminar PJB Connect 2019</i>	PT PJB	2
40	Oktober <i>October</i>	Analisa Proteksi Sistem Distribusi <i>Distribution System Protection Analysis</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	5
41	November <i>November</i>	Analisa Kondisi Trafo Distribusi <i>Distribution Transformer Condition Analysis</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
42	November <i>November</i>	Workshop Corporation, Merger & Akuisisi dan Mengelola Anak Perusahaan <i>Workshop Corporation, Merger & Acquisition and Managing Subsidiaries</i>	PT PLN (Persero) Kantor Pusat	2
43	November <i>November</i>	W3 - Environmental Ecological Flow <i>W3 - Environmental Ecological Flow</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
44	November <i>November</i>	W4 - Cumulative Impacts Assesment <i>W4 - Cumulative Impacts Assesment</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
45	November <i>November</i>	Sistem Pemeliharaan Listrik <i>Electrical Maintenance System</i>	CV Berdiklat	2
46	November <i>November</i>	Workshop Pengelolaan PPh Pasal 21 yang Efektif dengan Ms Excel dan E-SPT <i>Workshop Pengelolaan PPh Pasal 21 yang Efektif dengan Ms Excel dan E-SPT</i>	ORTAX	2
47	Desember <i>December</i>	Bimbingan Teknis Pengurusan Perizinan OSS Versi 1.1 <i>Technical Guidance for OSS Licensing Management Version 1.1</i>	P2KP	2
48	Desember <i>December</i>	Workshop Organization Design 4.0 <i>Workshop Organization Design 4.0</i>	GML - Knowcap	2
49	Desember <i>December</i>	Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan <i>Problem Solving and Decision Making</i>	Ir. Yani Hadiani Soegito, MSIE	9
Total Jumlah Peserta Pelatihan <i>Total Number of Training Participants</i>				316

(Catatan: jumlah peserta* sebanyak 316 orang karena terdapat beberapa orang Pegawai yang mendapatkan pelatihan lebih dari satu kali)

(Note: the number of participants* is 316 people because there are some employees who received training more than once)

Tabel Pelaksanaan Sertifikasi Tahun 2019
Table of Certification Implementation for 2019

No.	Waktu Pelaksanaan <i>Execution Time</i>	Jenis/Judul Sertifikasi <i>Type / Title of Certification</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants*</i>
1	Januari <i>January</i>	Ahli Bangunan Gedung - Muda <i>Building Expert - Junior</i>	LPJK	1
2	Januari <i>January</i>	Ahli Bangunan Gedung - Madya <i>Building Expert - Intermediate</i>	LPJK	3
3	Januari <i>January</i>	Ahli Geodesi - Madya <i>Geodetic Expert - Intermediate</i>	LPJK	1
4	Januari <i>January</i>	Ahli Geodesi - Madya <i>Geodetic Expert - Senior</i>	LPJK	1
5	Januari <i>January</i>	Ahli Geoteknik - Madya <i>Geotechnician - Intermediate</i>	LPJK	5
6	Januari <i>January</i>	Ahli Geoteknik - Muda <i>Geotechnician - Junior</i>	LPJK	1
7	Januari <i>January</i>	Ahli Teknik Jembatan - Madya <i>Bridge Engineer - Intermediate</i>	LPJK	1
8	Januari <i>January</i>	Ahli Teknik Tenaga Listrik - Muda <i>Electric Power Engineer Expert - Junior</i>	LPJK	3
9	Februari <i>February</i>	Ahli Bangunan Gedung - Utama <i>Building Expert - Senior</i>	LPJK	1
10	Februari <i>February</i>	Ahli Bendungan Besar - Utama <i>Large Dam Expert - Senior</i>	LPJK	1
11	Februari <i>February</i>	Ahli Teknik Mekanikal - Madya <i>Mechanical Engineering Expert - Intermediate</i>	LPJK	2
12	Februari <i>February</i>	Ahli Teknik Tenaga Listrik - Madya <i>Electric Power Engineer Expert - Intermediate</i>	LPJK	4
13	Februari <i>February</i>	Ahli Teknik Tenaga Listrik - Utama <i>Electric Power Engineer Expert - Senior</i>	LPJK	3
14	Februari <i>February</i>	Pengadaan Barang dan Jasa - PLN <i>Procurement of goods and services - PLN</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	39
15	Mei <i>May</i>	Pelatihan Operasi Produksi <i>Production Operations Training</i>	PPSDM MIGAS CEPU	4
16	Juli <i>July</i>	Certified Risk Government Professional (CRGP) <i>Certified Risk Government Professional (CRGP)</i>	RAP/LSPMR	12

17	Juli <i>July</i>	Sertifikasi Profesi Manajer SDM <i>HR Manager Professional Certification</i>	PPM Manajemen	1
18	Juli <i>July</i>	Pelatihan Operasi Produksi <i>Production Operations Training</i>	PPSDM MIGAS CEPU	4
19	Agustus <i>August</i>	Qualified Risk Management Professional (QRMP) <i>Qualified Risk Management Professional (QRMP)</i>	CRMS	10
20	September <i>September</i>	Pengadaan Barang dan Jasa - PLN <i>Procurement of goods and services - PLN</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	11
21	Oktober <i>October</i>	Qualified Risk Management Analyst (QRMA) <i>Qualified Risk Management Analyst (QRMA)</i>	CRMS	16
22	Oktober <i>October</i>	Ahli K3 Listrik <i>Electrical Safety Expert</i>	PT Mitra Dinamis Yang Utama	16
23	Oktober <i>October</i>	Qualified Internal Auditor (QIA) - Intermediate <i>Qualified Internal Auditor (QIA) - Intermediate</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	1
24	Oktober <i>October</i>	Qualified Internal Auditor (QIA) - Junior <i>Qualified Internal Auditor (QIA) - Junior</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
25	November <i>November</i>	Qualified Risk Management Analyst (QRMA) <i>Qualified Risk Management Analyst (QRMA)</i>	CRMS	14
26	Desember <i>December</i>	Ahli K3 Umum <i>General Safety Expert</i>	PT Phitagoras	1
27	Desember <i>December</i>	Qualified Internal Auditor (QIA) - Junior <i>Qualified Internal Auditor (QIA) - Junior</i>	YPIA	1
Total Jumlah Peserta Sertifikasi <i>Total Number of Certification Participants</i>				159

Tabel Pelaksanaan Penugasan Tahun 2019

Table of Assignment Implementation for 2019

No	Waktu Pelaksanaan <i>Execution Time</i>	Jenis/Judul Penugasan <i>Type / Title of Assignment</i>	Direktorat/ Bidang Terkait <i>Related Directorate / Field</i>	Jumlah Anggota <i>Number of Members</i>
1	Januari 2019 - Januari 2020 <i>January 2019 - January 2020</i>	Manajemen Risiko Perusahaan <i>Enterprise Risk Management</i>	SPMR, KIT, TND, KONS, SDM, KEU, AKT, PPK, USH, SAR, SETPER <i>SPMR, KIT, TND, KONS, SDM, KEU, AKT, PPK, USH, SAR, SETPER</i>	22
2	Februari 2019 - Februari 2020 <i>February 2019 - February 2020</i>	Tim Peninjauan dan Penyusunan Prosedur Enjiniring dan Petunjuk Teknis Enjiniring <i>The Engineering Procedur and Guidelines Review and Forming Team</i>	SPMR, KIT, TND, KONS, SDM, KEU, AKT, PPK, USH, SAR, SETPER <i>SPMR, KIT, TND, KONS, SDM, KEU, AKT, PPK, USH, SAR, SETPER</i>	29

3	Februari 2019 - Februari 2020 <i>February 2019 - February 2020</i>	Tim Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi <i>Integrated Management System Internal Audit Team</i>	SPMR, KIT, TND, SDM, PPK, SETPER <i>SPMR, KIT, TND, SDM, PPK, SETPER</i>	17
4	Februari 2019 - Desember 2019 <i>February 2019 - December 2019</i>	Tim Imbangan Integrated Risk Management <i>The Integrated Risk Management Balance Team</i>	SPMR, SETPER, PPK, KEU, AKT, KIT, KONS, TND, SAR, SDM, USH <i>SPMR, SETPER, PPK, KEU, AKT, KIT, KONS, TND, SAR, SDM, USH</i>	12
5	September 2019 - September 2020 <i>September 2019 - September 2020</i>	Wakil Manajemen <i>Management Representatives</i>	SPMR <i>SPMR</i>	1
6	Februari 2019 - Desember 2019 <i>February 2019 - December 2019</i>	Tim Monitoring Kinerja dan Penyusunan Laporan Manajemen Tahun 2019 PT PLN Enjiniring <i>2019 Performance Monitoring and Management Report Team</i>	SPMR, KIT, TND, KONS, SDM, KEU, AKT, PPK, USH, SAR, SETPER <i>SPMR, KIT, TND, KONS, SDM, KEU, AKT, PPK, USH, SAR, SETPER</i>	16
7	Maret 2019 - Desember 2019 <i>March 2019 - December 2019</i>	Kriteria Penilaian Kinerja Unggul/Malcolm Baldrige 2019 <i>Superior Performance Assessment Criteria / Malcolm Baldrige 2019</i>	SPMR, SETPER, PPK, KEU, AKT, KIT, KONS, TND, SAR, SDM, USH <i>SPMR, SETPER, PPK, KEU, AKT, KIT, KONS, TND, SAR, SDM, USH</i>	38
8	Maret 2019 - Desember 2019 <i>March 2019 - December 2019</i>	Tim Champion SNI Award Tahun 2019 <i>2019 SNI Award Champion Team</i>	SPMR, SETPER, PPK, KEU, AKT, KIT, KONS, TND, SAR, SDM, USH <i>SPMR, SETPER, PPK, KEU, AKT, KIT, KONS, TND, SAR, SDM, USH</i>	38
9	Maret 2019 - Februari 2020 <i>March 2019 - February 2020</i>	Tim Pemantauan Penerapan dan Counterpart Assessment Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2018 <i>2018 Good Corporate Governance (GCG) Implementation and Counterpart Monitoring Team</i>	SPMR, SETPER, PPK, KEU, AKT, KIT, KONS, TND, SAR, SDM, USH <i>SPMR, SETPER, PPK, KEU, AKT, KIT, KONS, TND, SAR, SDM, USH</i>	35
10	Maret 2019 - Januari 2020 <i>March 2019 - January 2020</i>	Tim Penyusunan Annual Report Tahun Buku 2018 <i>2018 Annual Report Compilation Team</i>	SPMR, SETPER, PPK, KEU, AKT, KIT, KONS, TND, SAR, SDM, USH <i>SPMR, SETPER, PPK, KEU, AKT, KIT, KONS, TND, SAR, SDM, USH</i>	20
11	April 2019 - April 2019 <i>April 2019 - April 2019</i>	Tim Pelaksana Forum Enjiniring PT PLN (Persero) Tahun 2019 <i>2019 PT PLN (Persero) Engineering Forum Implementing Team</i>	SPMR, SETPER, PPK, KEU, KIT, TND, SAR, SDM, , MUM <i>SPMR, SETPER, PPK, KEU, KIT, TND, SAR, SDM, MUM</i>	38

Untuk mengukur efektivitas atas program pengembangan yang telah dilakukan, Perusahaan melakukan evaluasi dengan menghitung tingkat pengembalian investasi pada pelatihan/sertifikasi (Return on Training Investment – ROTI) dan evaluasi pencapaian kinerja Perusahaan serta Hari Orang Pelatihan (HOP).

Total biaya pengembangan kompetensi karyawan pada tahun 2019 melalui pelatihan/sertifikasi sebesar Rp 3.986.726.936, menurun sebesar 8,72% dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 4.367.642.356. Di lain hal, pendapatan Perusahaan tahun 2019 (stand alone/ bukan konsolidasi) adalah sebesar Rp 560.486.827.815, menurun sebesar 17,44% dibandingkan dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp 678.862.730.745. Maka, dengan asumsi best practice tingkat dampak pelatihan/sertifikasi sebesar 10%, didapatkan nilai ROTI 2019 sebesar 13,06, sedangkan nilai ROTI 2018 sebesar 14,54. Nilai pencapaian KPI/kinerja Perusahaan tahun 2019 (audited) adalah 89,64, sementara itu pencapaian Kinerja tahun 2018 adalah 85,28. Sedangkan untuk HOP tahun 2019 adalah 2,49, sementara HOP tahun 2018 adalah 2,99.

Berdasarkan nilai ROTI, nilai ROTI tahun 2019 lebih kecil 1,48 poin dibandingkan tahun 2018. Sedangkan pencapaian skor KPI tahun 2019 lebih tinggi 4,36 poin dibandingkan tahun 2018. Maka didapatkan kesimpulan bahwa tingkat efektivitas program pengembangan tahun 2019 adalah efektif secara parsial karena mengakibatkan pendapatan menurun sebesar 17,44% dan nilai ROTI menurun sebesar 10,21%, tetapi pencapaian KPI meningkat 5,11% dibandingkan tahun 2018. Sementara tingkat efisiensi program pengembangan tahun 2019 adalah lebih efisien 8,72% dari segi biaya dan 16,72% dari segi jumlah HOP dibandingkan tahun 2018.

To measure the effectiveness of the development program that has been carried out, the Company conducts an evaluation by calculating the return on investment in training / certification (Return on Training Investment - ROTI) and evaluates the achievement of the Company performance and Hari Orang Pelatihan (HOP).

The total cost of developing employee competencies in 2019 through training / certification amounted to Rp 3,986,726,936, an decrease of 8.72% compared to 2018 which amounted to Rp 4,367,642,356. On the other hand, the Company's revenue in 2019 (stand alone / not consolidated) amounted to Rp 560,486,827,815, an decrease of 17.44% compared to 2018 which amounted to Rp 678,862,730,745. Then, assuming best practice the impact level of training / certification is 10%, the 2019 ROTI score is 13.06, while the 2018 ROTI value is 14.54. The achievement value of KPI / Company's performance in 2019 (audited) is 89.64, while the achievement of 2018 performance is 85.28. Whereas the HOP for 2019 is 2.49 while the HOP for 2018 is 2.99.

Based on the ROTI value, the 2019 ROTI value is smaller 1.48 points compared to 2018. Likewise, the achievement of the 2019 KPI score is bigger 4.36 points compared to 2018. Then it can be concluded that the effectiveness of the development program in 2019 is partial effective enough, this is due to make decrease in development costs up by 17.44% and ROTI Value decreased by 10.21%, but the achievement of KPI increased by 5.11% compared to 2018. While the efficiency rate of the development program in 2019 is more efficient 8.72% in terms of cost and 16.72% in terms of HOP amount compared to 2018.

RENCANA PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2020

Dalam menjaga kualitas SDM, kesinambungan program pengembangan kompetensi pegawai menjadi komitmen Perusahaan agar dapat mendukung kinerja perusahaan dan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan. PLN Enjiniring telah merencanakan dan merumuskan kebutuhan pelatihan dan sertifikasi bagi Pegawai untuk periode tahun 2020 dalam kegiatan Learning Need Analysis (LNA) secara mandiri mengikuti Prosedur Enjiniring (PE) 6.13, sebagai berikut.

TRAINING AND CERTIFICATION PLANNING 2020

In maintaining the quality of human resources, the sustainability of employee competency development programs is the Company's commitment to be able to support the company's performance and make a positive contribution to the sustainability of the company's business. PLN Enjiniring has planned and formulated the training and certification needs for Employees for the 2020 period in Learning Need Analysis (LNA) activities independently following the 6.13 Engineering Procedure (PE), as follows.

Tabel Pelaksanaan Sertifikasi Tahun 2019
Table of Certification Implementation for 2019

No.	Kebutuhan Pembelajaran <i>Learning Needs</i>	Peserta Pembelajaran <i>Learning Participants</i>	Tujuan Pembelajaran <i>Learning Objectives</i>
1	Kontrak Berbasis FIDIC <i>FIDIC Based Contracts</i>	Staf TND,KON,HUK,PGD <i>Staf TND,KON,HUK,PGD</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menyusun proposal dan kontrak sesuai dengan standard FIDIC atau PLN <i>After participating in this learning, the participants able to prepare proposals and contracts in accordance with FIDIC or PLN standards</i>
2	Dasar - Dasar AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) <i>The Basics of Environmental impact assessment</i>	Staf TND, KIT, USH <i>Staf TND, KIT, USH</i>	Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu menyusun kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup <i>After participating this training the participants were able to compile a study of the major and significant impacts of a planned business and / or activity on the environment</i>
3	Program Magang di IKPT <i>Internship Program at IKPT</i>	Staf KIT <i>Staf KIT</i>	Setelah mengikuti program ini peserta dapat mengembangkan kompetensi dalam bidang enjiniring detil desain sub bidang pembangkitan <i>After participating in the program, participants can develop competencies in the engineering design details of the power generation</i>
4	Teknologi Energi Baru Terbarukan (PLTMH, PLTS, PLTB, GEOTHERMAL, BIOMASS) <i>Renewable Energy Technology (PLTMH, PLTS, PLTB, GEOTHERMAL, BIOMASS)</i>	Staf KIT <i>Staf KIT</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai teknologi EBT <i>After participating in this learning, the participants able to master renewable energy technology</i>

5	Negotiation and Communication Skill <i>Negotiation and Communication Skill</i>	Staf KIT, TND, SAR <i>Staf KIT, TND, SAR</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu melaksanakan negosiasi dan lobbying dengan baik <i>After participating in this learning, the participants able to carry out negotiations and lobbying well</i>
6	Pengadaan Barang/Jasa <i>Goods / Services Procurement</i>	Staf HUK,SAR <i>Staf HUK,SAR</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai prosedur dan metodologi perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa <i>After participating in this learning, the participants able to master the procedures and methodology of planning and implementing the procurement of goods / services</i>
7	Manajemen Proyek (dengan Aplikasi Arcgis) <i>Project Management (dengan Aplikasi Arcgis)</i>	Staf TND <i>Staf TND</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu melaksanakan project management dengan baik <i>After participating in this learning, the participants able to carry out project management well</i>
8	Pelatihan Software (Simple E, STAAD Pro, MS Tower, Primavera) <i>Software Training (Simple E, STAAD Pro, MS Tower, Primavera)</i>	Staf TND, KONS <i>Staf TND, KONS</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai software teknis pekerjaan enjiniring <i>After participating in this learning, the participants able to master the technical software engineering work</i>
9	Pelatihan transmisi dan distribusi (Proteksi, Manajemen Power, Scada, Relay, Survey) <i>Transmission and distribution training (Protection, Power Management, Scada, Relay, Survey)</i>	Staf TND <i>Staff TND</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai keilmuan teknis bidang transmisi dan distribusi <i>After participating in this learning, the participants are able to master the technical knowledge in the field of transmission and distribution</i>
10	PMBOK (Project Management Body of Knowledge) <i>PMBOK (Project Management Body of Knowledge)</i>	Staf KIT, KONS, TND, SDM, PPK <i>Staf KIT, KONS, TND, SDM, PPK</i>	Setelah pelatihan ini peserta akan dibekali dengan pemahaman mengelola proyek berdasarkan Project Management Body of Knowledge (PMBOK) <i>After this training participants will be equipped with an understanding of managing projects based on the Project Management Body of Knowledge (PMBOK)</i>
11	Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3 (K3 Umum, Auditor internal SMK3, K3 Listrik, Petugas Peran Damkar, Petugas Peran P3K) <i>Occupational Safety and Health (General OHS, OHS Internal Auditors, Electricity Safety, Firefighter Officer, First Aid Officer)</i>	Staf SDM, AKT, KIT, TND, KONS, SAR, USH, SETPER, SPMR <i>Staf SDM, AKT, KIT, TND, KONS, SAR, USH, SETPER, SPMR</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu melaksanakan K3 sesuai dengan peraturan yang berlaku <i>After participating in this learning, the participants able to carry out K2 and K3 in accordance with applicable regulations</i>
12	Manajemen Pemasaran <i>Marketing Management</i>	Staf SAR <i>Staf SAR</i>	Setelah pelatihan ini peserta dapat membuat suatu rencana pemasaran perusahaan <i>After participating this training participants can make a company marketing plan</i>

13	Pelatihan kepatuhan korporat (ISO 9001:2015, ISO 2701:2013, Manajemen Risiko, Auditor Internal) <i>Corporate compliance training (ISO 9001:2015, ISO 2701:2013, Manajemen Risiko)</i>	Staf KKO, HUK, MMR, SPI, KEU, AKT, SDM, MUM, KIT, TND, PPK <i>Staf KKO, HUK, MMR, SPI, KEU, AKT, SDM, MUM, KIT, TND, PPK</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu mengimplementasikan aturan-aturan kepatuhan berdasarkan aturan pemerintah <i>After participating in this learning, the participants able to implement compliance rules based on government rules</i>
14	Manajemen Kepuasan Pelanggan <i>Customer Satisfaction Management</i>	Staf PPK <i>Staf PPK</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat menciptakan standar layanan yang konsisten kepada para pelanggan <i>After participating this lesson participants can create consistent service standards for customers</i>
15	Brevet A, B, C <i>Brevet A, B, C</i>	Staf AKT, SDM <i>Staf AKT, SDM</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu memahami keterkaitan aturan pajak dan konsekuensi terhadap arah perusahaan dan pengembangan usaha perusahaan <i>After participating in this learning, the participants able to understand the relationship of tax rules and consequences to the direction of the company and the development of the company's business</i>
16	Analisa Laporan Keuangan dan Anggaran, Akuntansi Dasar dan Pajak, PSAK <i>Analysis of Financial and Budget Reports, Basic Accounting and Tax, PSAK</i>	Staf AKT, KEU <i>Staff AKT, KEU</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu membuat dan menganalisa laporan keuangan dan pembukuan akuntansi <i>After participating in this learning, the participants able to make and analyze financial statements and accounting books</i>
17	Sertifikasi Keahlian <i>Expertise Certification</i>	Seluruh Enjinir, Staf, dan Manajer Senior+Kepala Satuan <i>All Engineers, Staff and Senior Managers + Unit Heads</i>	Setelah mengikuti sertifikasi ini peserta mampu meningkatkan kompetensi teknis dan menjadi nilai jual bagi Perusahaan <i>After participating in this learning, the participants able to improve their technical competency and become a selling point for the Company</i>
18	QA/QC Aspek Engineering dan Konstruksi <i>QA / QC Engineering and Construction Aspects</i>	Staf KONS <i>Staf KONS</i>	Setelah mengikuti sertifikasi ini peserta mampu memastikan semua standar kualitas dipenuhi untuk memberikan jaminan kualitas sesuai standar yang diberikan oleh perusahaan <i>After participating in this certification participants are able to ensure that all quality standards are met to provide quality assurance according to the standards given by the company.</i>

Selain itu, PLN Enjiniring mengimplementasikan Knowledge Management dalam wadah knowledge sharing dalam lingkungan kerja PLN Enjiniring yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu. Setiap materi knowledge sharing tersebut di-upload dalam aplikasi Document Management (DM) sebagai media portal Knowledge Management.

In addition, PLN Enjiniring implements Knowledge Management in a knowledge sharing platform within the PLN Enjiniring work environment which is routinely carried out every Monday and Wednesday. Each knowledge sharing material is uploaded in the Document Management (DM) application as a Knowledge Management portal media.

Diharapkan media yang sekarang ini berguna sebagai data storage yang dapat berkembang menjadi media yang berfungsi menjembatani kebutuhan perusahaan akan knowledge sharing dari enjinir senior ke junior, pimpinan ke bawahan, dan juga sebagai sarana mempermudah proses coaching dan mentoring.

It is hoped that the current media is useful as data storage that can develop into a media that serves to bridge the needs of companies for knowledge sharing from senior to junior engineers, leaders to subordinates, and also as a means to facilitate the coaching and mentoring process.

EMPLOYEE ENGAGEMENT

Pada tahun 2019, tingkat kerekatan karyawan PLN Enjiniring diukur dalam Employee Engagement Survey (EES) dengan metode online survey. Persentase Employee Engagement Index (EEI) tahun 2019 sebesar 84,00%, dimana terbagi menjadi dua kategori yaitu fully engaged sebesar 55% dan moderately engaged sebesar 29%. Sementara hasil EEI tahun 2018 sebesar 81,44%. Maka dapat disimpulkan bahwa pada EEI tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,56%.

Penurunan EEI tahun 2019 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu remunerasi dan sumber daya, sedangkan nilai engagement karyawan meningkat disebabkan oleh faktor pengakuan, pengaruh dan kepemimpinan eksekutif. Untuk meningkatkan engagement karyawan, manajemen PLN Enjiniring harus memastikan kontribusi dan pencapaian karyawan diakui, manajemen menunjukkan bukti kuat mengenai kepemimpinan yang efektif, memastikan bahwa karyawan adalah aset terpenting perusahaan dan kesempatan untuk promosi dianggap adil dan transparan bagi karyawan.

EMPLOYEE ENGAGEMENT

In 2019, the level of stickiness of PLN Enjiniring employees is measured in the Employee Engagement Survey (EES) using the online survey method. The percentage of Employee Engagement Index (EEI) in 2019 by 84.00%, which is divided into two categories namely fully engaged by 55% and moderately engaged by 29%. While the EEI 2018 result was 81.44%. It can be concluded that in EEI in 2019 there was an increase of 2.56%.

The decrease in EEI in 2019 was due to several factors, namely remuneration and resources, while the value of employee engagement increased due to recognition, influence and executive leadership factors. To improve employee engagement, PLN Enjiniring management must ensure employee contributions and achievements are recognized, management shows strong evidence of effective leadership, ensures that employees are the company's most important asset and opportunities for promotion are considered fair and transparent to employees.

MANAJEMEN KINERJA

PLN Enjiniring melaksanakan penilaian kinerja berdasarkan Sistem Manajemen Kinerja yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 09.002.K/DIR/PLNE/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan PT PLN Enjiniring. Tujuan ditetapkannya Sistem Manajemen Kinerja Pegawai adalah (1) terwujudnya pengukuran kinerja yang berkeadilan guna membina budaya pembelajar dan berprestasi serta memotivasi Pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan kontribusi Pegawai bagi Perusahaan, dan (2) sebagai pedoman untuk mengevaluasi kinerja Pegawai secara transparan, terukur, dan obyektif. Siklus penilaian kinerja Pegawai dilaksanakan dalam setiap 1 (satu) semester yang terdiri atas kegiatan:

1. Perencanaan

Merupakan tahap diskusi formal antara Atasan Langsung dengan Pegawai atau yang bersangkutan, tentang rencana pekerjaan utama yang akan dilakukan pada semester tersebut.

2. Pemantauan

Pemantauan yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung terhadap kinerja Pegawai pada semester berjalan dengan cara melakukan pembinaan, bimbingan, konsultasi dan konseling serta penugasan-penugasan yang mendorong pegawai dalam pencapaian KPI.

3. Penilaian

Pelaksanaan penilaian yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung setiap akhir semester. Hasil penilaian diketahui dan divalidasi oleh Karyawan dan Atasan Langsung.

Kriteria penilaian kinerja pegawai adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Individu, adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan pemenuhan terhadap target kinerja individu Pegawai yang ditetapkan pada periode penilaian berjalan.

PERFORMANCE MANAGEMENT

PLN Enjiniring conducts a performance appraisal based on the Performance Management System stipulated in Decision Letter of the Board of Directors No. 09.002.K / DIR / PLNE / II / 2017 dated January 9, 2017 concerning the Employee Performance Management System in the PT PLN Enjiniring Environment. The objectives of establishing the Employee Performance Management System are (1) the realization of fair performance measurements in order to foster a culture of learners and achievement and motivate Employees to improve Employee competencies and contributions to the Company, and (2) as a guideline for evaluating Employee performance in a transparent, measurable, and objective manner. The employee performance appraisal cycle is carried out in every 1 (one) semester consisting of activities:

1. Planning

This is the formal discussion stage between the Direct Supervisor and the Employee or concerned, about the main work plan that will be carried out in the following semester.

2. Monitoring

Monitoring conducted by the Direct Supervisor on the performance of Employees in the current semester by providing guidance, guidance, consultation and counseling.

3. Rating

The assessment is carried out by the Direct Supervisor at the end of the semester. The assessment results are known and validated by Employees and Direct Supervisors.

The criteria for evaluating employee performance are as follows:

1. *Individual Targets, are assessments based on the fulfillment of the Employee's individual performance targets that are set in the current assessment period.*

2. Kompetensi individu, adalah daftar kompetensi yang dimiliki oleh individu pegawai yang merupakan pemetaan dari assessment individu dengan menggunakan alat ukur yang telah ditentukan dengan merujuk kepada Direktori Kompetensi dan Kebutuhan Kompetensi Jabatan.
 3. Kontribusi Individu yang terdiri dari:
 - Inovasi, yaitu inovasi alat, metode atau konsep yang memenuhi kriteria pada keputusan direksi yang berlaku.
 - Knowledge Management, adalah serangkaian langkah-langkah pengelolaan aset pengetahuan (mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan/menyebarkan pengetahuan) dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan secara berkelanjutan seperti knowledge sharing, knowledge capturing dan community of practice.
- 2. Individual competencies, is a list of competencies possessed by individual employees which is a mapping of individual assessments by using predetermined measurement tools by referring to the Competency Directory and Position Competency Needs.*
- 3. Individual contributions consisting of:*
- *Innovation, namely the innovation of tools, methods or concepts that meet the Company's innovation criteria.*
 - *Knowledge Management, is a series of steps for managing knowledge assets (collecting, storing, and using / disseminating knowledge) in order to continuously improve the Company's performance.*
 - *Special assignments, are assignments given by the Board of Directors to carry out / complete tasks outside of their job duties.*
 - *Education and Training, is a short and long term program to improve employee or employee competencies to support performance.*

Penilaian Kinerja setiap individu berdasarkan pada Key Performance Indicator (KPI), yaitu ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja Pegawai dalam menunjang kinerja Perusahaan yang dijabarkan dalam inisiatif strategis, ukuran kinerja, dan target. Penetapan KPI masing-masing individu Pegawai didasarkan pada KPI Perusahaan yang diturunkan ke KPI Direktorat. Dari KPI Direktorat akan diturunkan ke KPI Bidang dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penetapan KPI individu.

The performance appraisal of each individual is based on the Key Performance Indicator (KPI), which is a quantitative or qualitative measure that is used to measure the achievement of employee performance in supporting Company performance that is outlined in strategic initiatives, performance measures, and targets. The determination of the KPI for each individual employee is based on the Company's KPI which is downgraded to the Directorate's KPI. From the KPI the Directorate will be demoted to the Field KPI and subsequently used as the basis for determining individual KPIs.

KEBIJAKAN PENGHARGAAN KEPADA KARYAWAN

Kebijakan sistem penghargaan kepada Pegawai mengacu pada Keputusan Direksi No. 30.001.K/010/DIR/PLNE/IX/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Penghargaan dan Disiplin Pegawai, dimana bertujuan untuk menarik, memelihara, dan memotivasi Pegawai agar dapat memberikan kontribusi dan mendukung peningkatan kinerja Perusahaan.

Penghargaan yang diberikan oleh PLN Enjiniring terdiri dari dua jenis, yaitu penghargaan ekstrinsik dan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik diberikan kepada Pegawai dalam bentuk kompensasi dan manfaat. Kompensasi terdiri dari (1) kompensasi tetap bulanan (Pay for Person – P1), (2) tunjangan posisi (Pay for Position – P2), tunjangan prestasi (Pay for Performance – P3), tunjangan hari raya, cuti tahunan, cuti besar, bantuan ganti rugi, dan jaminan sosial pegawai, (3) imbal jasa dalam bentuk bonus kinerja. Manfaat terdiri dari (1) manfaat umum, antara lain pemeliharaan kesehatan, hak cuti, pakaian dinas, bantuan penggantian fasilitas perumahan, bantuan pinjaman pemilikan rumah, dan program pensiun, serta (2) manfaat khusus, antara lain bantuan pemilikan kendaraan, alat komunikasi, laptop, dan fasilitas kerja.

Penghargaan intrinsik diberikan kepada Pegawai dalam bentuk

1. Program pendidikan formal dan sertifikasi profesi, yang diberikan bagi Pegawai yang memenuhi persyaratan kriteria talenta tertentu,
2. Fasilitas kerja khusus, yang diberikan atas dasar kontribusi dan/atau pencapaian inovasi yang memberikan keuntungan bagi Perusahaan dalam bentuk efisiensi biaya dan/atau peningkatan pendapatan,
3. Program keseimbangan khusus, yang diberikan atas dasar efisiensi biaya kesehatan pribadi dan keluarga dan/atau pencapaian loyalitas kerja Pegawai,
4. Bantuan hukum, yang diberikan dalam bentuk pembelaan atas tuntutan hukum terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan,
5. Pengakuan, yang diberikan atas dasar penghargaan Direksi.

EMPLOYEE POLICY TO EMPLOYEES

The reward system policy for Employees refers to Decision Letter of the Board of Directors No. 30.001.K / 010 / DIR / PLNE / IX / 2013 dated 30 September 2013 concerning Employee Awards and Discipline, which aims to attract, maintain, and motivate Employees to be able to contribute and support the improvement of the Company's performance.

Awards given by PLN Enjiniring are of two types, namely extrinsic and intrinsic awards. Extrinsic awards are given to employees in the form of compensation and benefits. Compensation consists of (1) monthly fixed compensation (Pay for Person - P1), (2) position allowance (Pay for Position - P2), performance allowance (Pay for Performance - P3), holiday allowance, annual leave, large leave, compensation assistance, and employee social security, (3) compensation in the form of performance bonuses. Benefits consist of (1) general benefits, including health care, leave entitlements, official clothing, housing facility replacement assistance, housing loan assistance, and pension programs, and (2) special benefits, including vehicle ownership assistance, communication tools, laptops, and work facilities.

Intrinsic awards are given to employees in the form of

- 1. Formal education and professional certification programs, which are provided for employees who meet certain talent criteria requirements,*
- 2. Special work facilities, which are provided on the basis of contributions and / or achievement of innovations that benefit the Company in the form of cost efficiency and / or increased revenue,*
- 3. Special balance program, which is given on the basis of cost efficiency of personal and family health and / or achievement of employee work loyalty,*
- 4. Legal assistance, which is given in the form of defense of lawsuits related to the implementation of duties and responsibilities of the position,*
- 5. Recognition, which is given on the basis of the Directors' award.*

FASILITAS KESEHATAN

Fasilitas pemeliharaan kesehatan adalah bagian dari penghargaan ekstrinsik yang masuk dalam kategori manfaat umum. PLN Enjiniring memberikan bantuan pemeliharaan kesehatan kepada Pegawai dan keluarganya diatur dalam Keputusan Direksi No. 05.002.K/DIR/PLNE/2015 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai dan Keluarga yang Ditanggung PT PLN Enjiniring. Bentuk pemeliharaan kesehatan yang ditanggung Perusahaan terdiri dari:

1. Rawat jalan,
2. Rawat inap,
3. Pemeriksaan penunjang atas rekomendasi dokter untuk peneguhan diagnosa di laboratorium,
4. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan sampai dengan anak ketiga,
5. Gugur kandung,
6. Perawatan di Unit Gawat Darurat (UGD),
7. Program Keluarga Berencana (KB), imunisasi dan vaksinasi, khitan, pengobatan infertilitasi dan program bayi tabung,
8. Perawatan gigi,
9. Alat-alat rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi alat tubuh,
10. Alat-alat cangkok/transplantasi,
11. Alat-alat kesehatan terkait jantung,
12. Obat untuk penyembuhan sesuai dengan formularium obat dan Daftar Obat Perusahaan (DOP),
13. Tindakan bedah plastik khusus akibat kecelakaan kerja,
14. Terapi kejiwaan,

HEALTH FACILITIES

Health care facilities are part of extrinsic awards that fall into the general benefit category. PLN Enjiniring to provide health care assistance to employees and their families is regulated in Decision Letter of the Board of Directors No. 05.002.K / DIR / PLNE / 2015 concerning the Implementation of Health Care for Employees and Families Covered by PT PLN Enjiniring. Forms of health care borne by the Company consist of:

1. *Outpatient treatment,*
2. *Inpatient treatment,*
3. *Supporting examination of doctor's recommendation for diagnosis in laboratory,*
4. *Examination of pregnancy and childbirth assistance up to the third child,*
5. *Natural birth,*
6. *Care in the Emergency Unit (ER),*
7. *Family Planning (KB) program, immunization and vaccination, circumcision, infertilization treatment and IVF program,*
8. *Dental care,*
9. *Rehabilitation equipment to restore the functioning of body parts,*
10. *Graft / transplant equipment,*
11. *Heart related medical devices,*
12. *Medicines for healing in accordance with the formulary of the drug and List of Medicines Company (DOP),*
13. *Special plastic surgery procedures due to work accidents,*
14. *Psychiatric therapy,*

PROGRAM PENSIUN

PLN Enjiniring mengatur Program Pensiun Pegawai dalam Keputusan Direksi No. 01.001.K/DIR/PLNE/IX/2017. Usia pensiun untuk seluruh Pegawai PLN Enjiniring adalah 56 tahun. Bagi Pegawai yang telah berusia 55 tahun dapat mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP). Untuk mempersiapkan Pegawai yang memasuki masa MPP tersebut, PLN Enjiniring memberikan pelatihan purna bakti. Diharapkan dengan bekal pelatihan ini, Pegawai dapat mempersiapkan diri di masa pensiun. Sementara itu, bagi Pegawai yang telah memasuki usia purna bakti diberikan kompensasi. Pegawai diikutsertakan dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT), yaitu Kompensasi Jaminan Hari Tua sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dan PSAK 24.

Bagi Pegawai tugas karya dari PT PLN (Persero), ketentuan pensiun mengacu pada ketentuan yang berlaku pada PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) menanggung liabilitas imbalan pasca kerja meliputi imbalan pensiun lain berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian, tunjangan tambahan penghasilan, dan penghargaan purna jabatan, dan pemeliharaan kesehatan, serta menyediakan program dana pensiun imbalan pasti bagi Pegawai yang diperbantukan. Program dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN (Persero). Selama Pegawai diperbantukan bekerja di PLN Enjiniring, Perusahaan wajib membayar iuran program pensiun kepada PT PLN (Persero) berdasarkan keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 332.K/010/DIR/2003. Iuran yang dibayar Perusahaan diakui sebagai beban pada tahun berjalan, karena Perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut.

RETIREMENT PROGRAM

PLN Enjiniring regulates the Employee Pension Program in Decision Letter of the Board of Directors No. 01.001.K / DIR / PLNE / IX / 2017. The retirement age for all PLN Enjiniring Employees is 56 years. Employees who are 55 years old can take the Retirement Preparation Period (MPP). To prepare for the Employees entering the MPP period, PLN Enjiniring provides after-service training. It is expected that with the provision of this training, employees can prepare themselves in retirement. Meanwhile, employees who have entered retirement age are compensated. Employees are included in the Old Age Insurance Program (JHT), which is Old Age Insurance Compensation in accordance with applicable Labor Law and PSAK 24.

For employees of work assignments from PT PLN (Persero), the pension provision refers to the provisions that apply to PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) bears post-employment benefits liabilities including other pension benefits in the form of severance pay, long service awards and compensation, additional income allowances, and post-service awards, and health care, as well as providing a defined benefit pension plan for seconded employees. This pension program is managed by the PLN (Persero) Pension Fund. As long as an employee is employed to work at PLN Enjiniring, the Company is obliged to pay pension plan contributions to PT PLN (Persero) based on the decision letter of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 332.K / 010 / DIR / 2003. Contributions paid by the Company are recognized as expenses in the current year, because the Company has no legal or constructive obligation to pay further contributions.

PENGELOLAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PLN Enjiniring senantiasa berkomitmen untuk memelihara hubungan industrial yang baik antara karyawan dengan manajemen serta menghormati hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan organisasi diwujudkan dengan penyaluran aspirasi karyawan yang baik dan sesuai dengan etika. Media komunikasi yang dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi karyawan tersebut berupa forum komunikasi yang diadakan pada dalam peringatan acara-acara Perusahaan, hari besar kenegaraan dan keagamaan.

PLN Enjiniring belum memiliki Serikat Pekerja, namun pada tahun 2018, Perusahaan membentuk Tim Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang ditetapkan dalam Berita Acara Pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit antara PT PLN Enjiniring dengan Perwakilan Pegawai PT PLN Enjiniring No. 02.001.BA/PLNE/IV/2018 dan dicatat Dinas Ketenagakerjaan dalam Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 3335 Tahun 2018.

Kemudian pada Juni 2019, Perusahaan melaporkan adanya Pergantian Kepengurusan Lembaga Kerja Sama Bipartit yang dicatat dalam Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 2019/-1.838 Tanggal 28 Juni 2019.

PLN Enjiniring memiliki komitmen untuk menciptakan kondisi yang sehat dan serasi sekaligus terciptanya ketenangan kerja sesuai dengan azas hubungan industrial. Tidak pernah terjadi pemogokan kerja, demonstrasi atau gangguan lainnya, yang menghentikan kegiatan operasional PLN Enjiniring maupun gugatan terkait peradilan hubungan industrial. Hal ini dikarenakan adanya pemahaman dan saling pengertian yang baik antara manajemen PLN Enjiniring dengan karyawan sebagai mitra yang saling mendukung satu sama lain.

MANAGEMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS

PLN Enjiniring is always committed to maintaining good industrial relations between employees and management and respecting the rights and obligations of employees in accordance with applicable laws and regulations. Organizational freedom is realized by channeling the aspirations of good employees and in accordance with ethics. Communication media that can be used to channel employee aspirations are in the form of a communication forum held in commemoration of Company events, state and religious holidays.

PLN Enjiniring does not yet have a Workers Union, but in 2018, the Company formed a Bipartite Cooperation Institution Team (LKS) stipulated in the Minutes of Establishing a Bipartite Cooperation Institution (LKS) between PT PLN Enjiniring and Employee Representative of PT PLN Enjiniring No. 02.001.BA/PLNE/IV/2018 and recorded the Manpower Office in the Decree of the Head of the Employment and Transmigration Office of West Jakarta Administration City Number 3335 of 2018.

PLN Enjiniring has a commitment to create healthy and harmonious conditions while at the same time creating work peace in accordance with the principles of industrial relations. There were never any strikes, demonstrations or other disturbances, which stopped the PLN Enjiniring operational activities or lawsuits related to industrial relations justice. This is due to a good understanding and mutual understanding between PLN Enjiniring management and employees as partners who support each other.

SURVEI BUDAYA

Untuk mengetahui tentang kedalaman penghayatan visi, misi, dan tata nilai perusahaan, PLN Enjiniring melakukan pengukuran dalam bentuk survei budaya. Survei budaya dilaksanakan kepada pegawai organik dan tugas karya saja karena kedua golongan Pegawai tersebut adalah tenaga kerja yang wajib memiliki sense of belonging terhadap Perusahaan. Pegawai tersebut adalah tenaga kerja yang berkarir dan menjadi penentu kesuksesan perusahaan melalui kinerja dan kompetensinya. Hasil survei ini menjadi refleksi PLN Enjiniring dalam berkomunikasi dengan Pegawai dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan sumber daya yang dimiliki.

Pada tahun 2019 dilakukan survei budaya, dengan sebutan Survei Budaya Unggul Perusahaan, dengan persentase sebesar 65,45% dari pegawai struktural menunjukkan perilaku peduli dan kompeten serta 34,92% dari pegawai fungsional menunjukkan perilaku gigih dan gesit. Konten dalam pengukuran survei budaya terdiri dari visi misi dan tata nilai PLN Enjiniring, Budaya Unggul PLN Grup, Good Corporate Governance (GCG), Key Performance Indicator (KPI), dan PLN Bersih. Survei dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman pegawai terhadap tata nilai perusahaan dalam penerapan budaya unggul PLN Grup, serta untuk mengetahui seberapa baik Perusahaan dalam memfasilitasi pemahaman dan internalisasi tata nilai perusahaan serta PLN. Dengan hasil tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa.

CULTURAL SURVEY

To find out about the depth of the company's vision, mission, and values, PLN Enjiniring makes measurements in the form of a cultural survey. The cultural survey conducted for organic employees and only work assignments because the two classes of employees are workers who are required to have a sense of belonging to the company. These employees are career workers who are critical to the success of the company through their performance and competency. The results of this survey are a reflection of PLN Enjiniring in communicating with employees and become a material consideration in developing the available resources.

In 2019 a culture survey was conducted, called the Strategic Understanding Survey, with a percentage of 65.45% of structural employees exhibiting caring and competent behavior and 34.92% of functional employees exhibiting persistent and nimble behavior. The content in the measurement of cultural surveys consists of PLN Enjiniring vision and mission values, Good Corporate Governance (GCG), Key Performance Indicators (KPI), and Clean PLN. The survey conducted with the aim of knowing employee understanding of the company's values in the daily work implementation, and to find out how well the Company was in facilitating the understanding and internalization of the company's values. With these results, it was concluded that.

KESIMPULAN HASIL SURVEI

Dari hasil analisis terhadap pengumpulan dan pengolahan data, dilakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat diusahakan agar dapat menjadi jawaban dari tujuan survei. Kesimpulan dari pelaksanaan Survei Budaya Unggul tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Budaya perusahaan yang tertuang dalam visi, misi, dan tata nilai perlu diselaraskan dengan budaya PLN Terbaik milik PLN sehingga perilaku untuk setiap insan PLN dapat seragam,
2. Pemahaman terhadap Key Performance Indicator (KPI) termasuk dalam kategori persentase sedang yaitu sebesar 78,26% dan meningkat dari tahun 2018 yang hanya sebesar 72%, Hal ini disebabkan karena internalisasi setiap perspektif dalam KPI Perusahaan sudah dilakukan lebih baik dari tahun sebelumnya,
3. Program PLN Bersih (PLNE Berintegritas) telah terinternalisasi dengan baik kepada seluruh pegawai,
4. Program GCG telah terinternalisasi dengan baik kepada seluruh pegawai,
5. Mayoritas Pegawai telah paham tentang program budaya unggul dan strategi perusahaan. Sementara, hanya minoritas Pegawai yang belum paham terhadap program budaya unggul dan strategi perusahaan.

CONCLUSION OF SURVEY RESULTS

From the results of the analysis of data collection and processing, conclusions are drawn. Conclusions made attempt to be able to be the answer to the survey objectives. The conclusions of the Cultural Survey (Strategic Understanding) 2019 include the following:

- 1. The corporate culture contained in the vision, mission and values has been internalized well and has not become biased towards each other,*
- 2. Understanding of Key Performance Indicators (KPI) included in the category of moderate percentages of 78.26% and increased from 72% in 2018. This is because the internalization of each perspective in KPI has done better than the previous year.*
- 3. The Clean PLN Program (Integrative PLNE) has been well internalized,*
- 4. The GCG program has been well internalized,*
- 5. The majority of employees already understand the culture and strategy of the company. Meanwhile, a minority of Employees who do not understand the culture and strategy of the company .*

PEMBINAAN KOMPETENSI DAN KARIR

Pegawai diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk kinerja yang optimal. Sedangkan, Perusahaan wajib memberikan pembinaan dalam hal pengembangan kompetensi dan karir bagi Pegawai, dalam rangka memelihara dan memotivasi Pegawai untuk berkontribusi lebih dalam kinerja individu. Dalam hal ini, PLN Enjiniring telah memiliki ketentuan dalam Keputusan Direksi No. 05.001.K/DIR/PLNE/XII/2014 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir.

Pembinaan kompetensi terdiri dari pembinaan level kompetensi dan pembinaan grade. Level kompetensi didasarkan pada bidang keilmuan, pengalaman, dan/ atau kemampuan Pegawai dalam mengembangkan kompetensi sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Setiap level kompetensi terdiri dari beberapa grade yang menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi individu pada level kompetensi tertentu. Level kompetensi dan grade melekat pada Pegawai, bukan pada Jabatan.

Pembinaan karir terdiri dari pembinaan profesi dan pembinaan jabatan. Profesi adalah mengacu pada ketentuan tentang pohon profesi atau nama profesi, dimana belum diterapkan di PLN Enjiniring. Sedangkan jabatan terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional, dimana pembinaannya terdiri dari promosi, rotasi, dan demosi.

Promosi jabatan merupakan alih tugas dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang memiliki persyaratan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) dan level kompetensi yang lebih tinggi. Rotasi jabatan merupakan alih tugas dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang memiliki persyaratan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) dan level kompetensi yang sama. Demosi merupakan alih tugas dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang memiliki persyaratan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) dan level kompetensi yang lebih rendah. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pegawai yang memenuhi persyaratan pembinaan jabatan.

DEVELOPMENT OF COMPETENCY AND CAREER

Employees are expected to contribute in the form of optimal performance. Meanwhile, the Company is required to provide guidance in terms of competency and career development for employees, in order to maintain and motivate employees to contribute more in individual performance. In this case, PLN Enjiniring has the provisions in Decision Letter of the Board of Directors No. 05.001.K / DIR / PLNE / XII / 2014 concerning Competency and Career Development Systems.

Competency development consists of competency level and grade development. The competency level is based on the field of science, experience, and / or the ability of employees to develop competencies in accordance with job requirements. Each competency level consists of several grades that indicate the level of mastery of individual competencies at a certain level of competency. The level of competency and grade is inherent in the Employee, not the Position.

Career development consists of professional development and position development. Profession is referring to the provisions regarding the professional tree or the profession name, which has not been applied in PLN Enjiniring. While the position consists of structural positions and functional positions, where the development consists of promotion, rotation, and demotion.

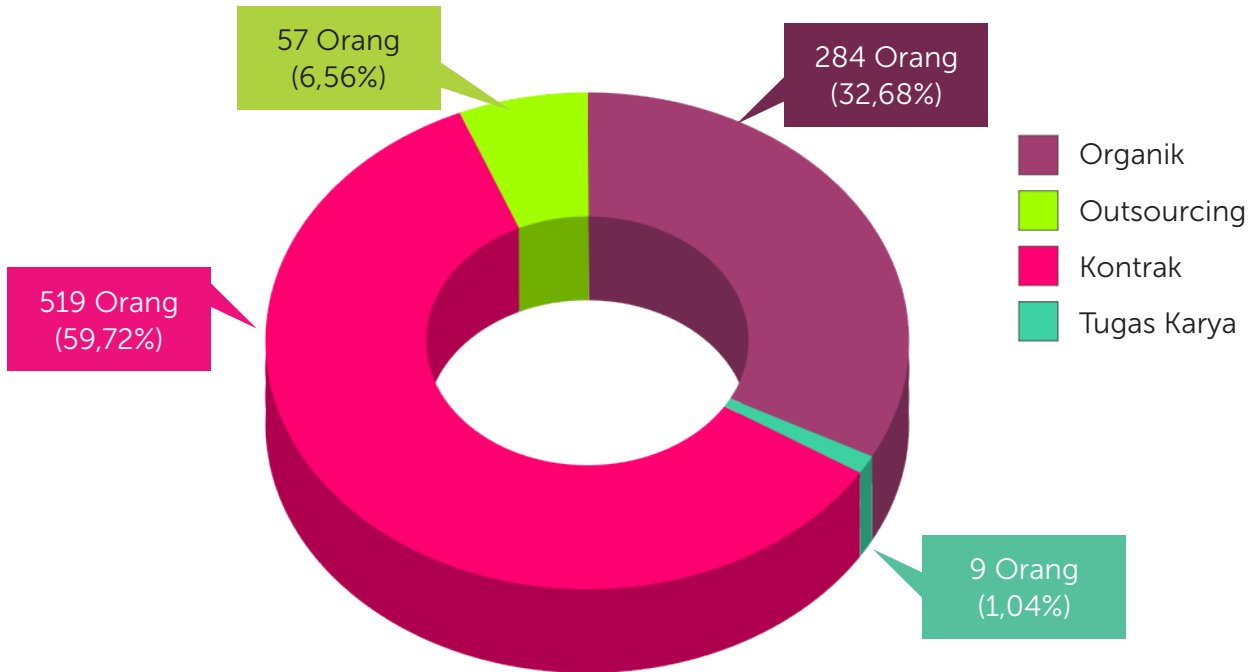
Job promotion is a transfer of duties from one position to another that has the requirements of the Position Competency Requirement (KKJ) and a higher level of competency. Position rotation is a transfer of duties from one position to another that has the requirements of the Position Competency Requirement (KKJ) and the same level of competency. Demotion is a shift of assignment from one position to another that has a requirement of Position Competency Requirement (KKJ) and a lower level of competency. The company provides equal opportunities for all employees who meet the requirements for coaching positions.

PROFIL KARYAWAN*Employee Profile***Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian***Employee Composition Based on Civil Service Status***Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian***Table of Employee Composition Based on Civil Service Status*

Status Kepegawaian <i>Employment Status</i>	Tahun 2019		Tahun 2018		Perubahan <i>Change</i>	
	(Orang) <i>(person)</i>	(%)	(Orang) <i>(Person)</i>	(%)	(Orang) <i>(Person)</i>	(%)
Organik <i>Organic</i>	284	32.68	175	15.71	109	62.29
Tugas Karya <i>Work Assignment</i>	9	1.04	12	1.08	-3	-25.00
Kontrak <i>Contract</i>	519	59.72	861	77.29	-342	-39.72
Outsourcing <i>Outsourcing</i>	57	6.56	66	5.92	-9	-13.64
TOTAL	869	100	1114	100	-245	-16.07

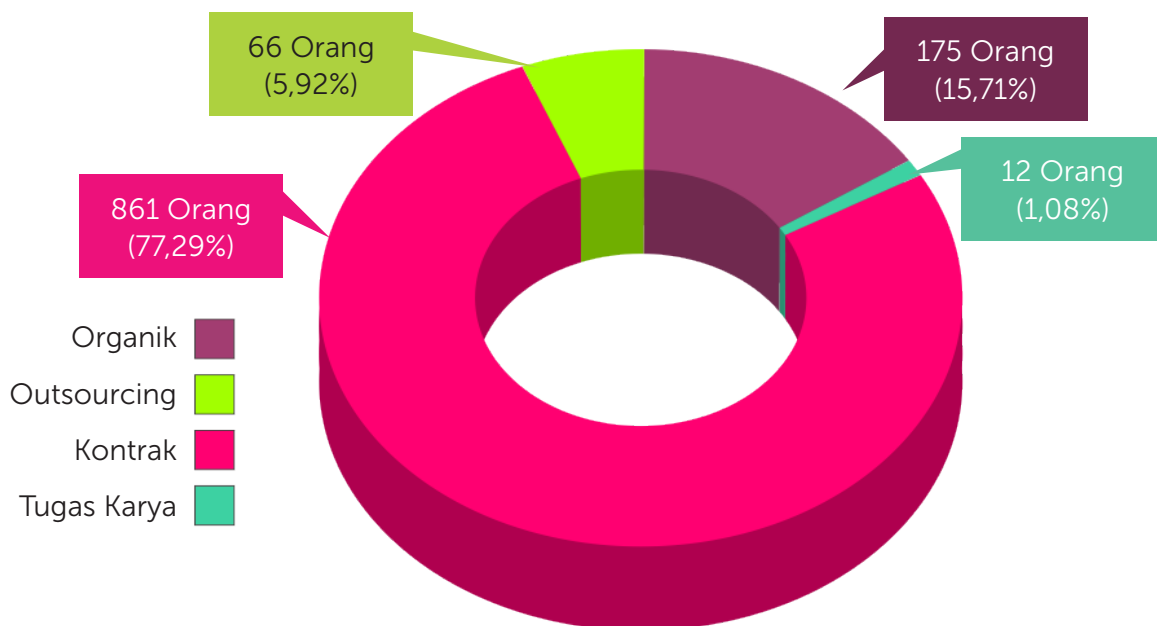
Grafik Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2019

Graph of Employee Composition Based on Civil Service Status in 2019



Grafik Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2018

Graph of Employee Composition Based on Civil Service Status in 2018



Komposisi karyawan PLN Enjiniring berdasarkan status kepegawaian didominasi oleh karyawan kontrak (PKWT), diikuti oleh pegawai organik, karyawan outsourcing, dan pegawai tugas karya. Pada 2019, komposisi karyawan kontrak (PKWT) sebesar 58,51%, pegawai organik sebesar 32,02%, karyawan outsourcing sebesar 6,43%, OJT sebesar 2,03% dan pegawai tugas karya sebesar 1,01%. Besarnya dominasi karyawan kontrak di PLN Enjiniring disebabkan oleh proses bisnis perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan enjiniring dan supervisi konstruksi, sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja ahli sangat tinggi, yang berbasis pada proyek, tetapi masa kerjanya tertentu. Hal ini dilakukan sebagai strategi perusahaan dalam mengefisienkan biaya kepegawaian dengan tidak memelihara tenaga kerja yang digunakan pada masa tertentu saja.

Pada tahun 2019, jumlah pegawai dengan status PKWT dan outsourcing mengalami penurunan karena mengundurkan diri dan habis masa kontrak proyeknya. Sementara Tugas Karya mengalami penurunan karena berakhir masa tugasnya di PLN Enjiniring. Sedangkan pegawai organik mengalami kenaikan dikarenakan adanya rekrutmen pegawai organik dengan tujuan menggantikan peran karyawan PKWT dan sesuai dalam batasan RKAP 2019.

The composition of PLN Enjiniring employees based on employment status is dominated by contract employees (PKWT), followed by organic employees, outsourcing employees, and work assignments. In 2019, the composition of contract employees (PKWT) by 58.51%, organic employees by 32.02%, outsourcing employees by 6.43%, on job training by 2.03% and work assignments by 1.01%. The large dominance of contract employees in PLN Enjiniring caused by the company's business processes that engaged in engineering consulting services and construction supervision, so that the need for skilled workers is very high, based on the project, but a certain working period. This is conducted as a corporate strategy in streamlining staffing costs by not maintaining the workforce that is used only at certain times.

In 2019, the number of employees with contract employees (PKWT) and outsourcing status has decreased due to resignation and end of contract. While PLN organic employee duties decreased due to the end of his tenure at PLN Enjiniring. While organic employees have increased due to the recruitment of organic employees with the aim of replacing the role of PKWT employees and in line with the 2019 RKAP limits.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Organisasi

Employee Composition Based on Organization Position Levels



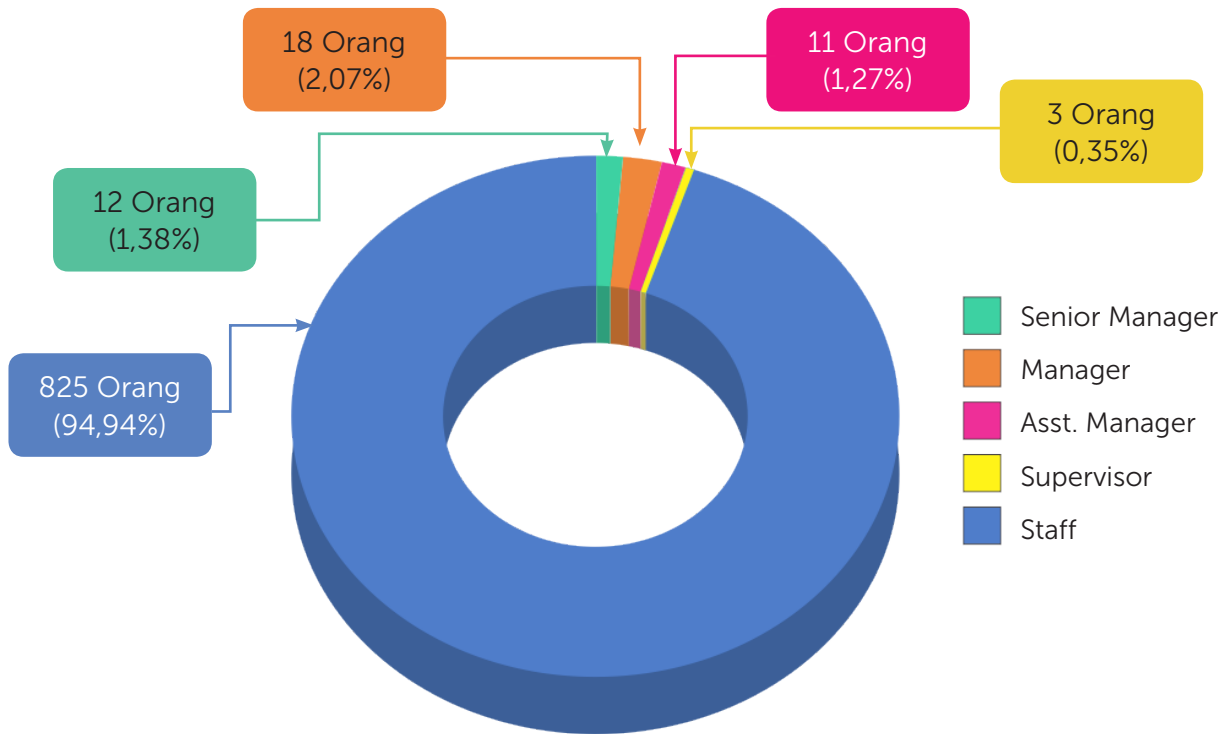
Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Organisasi

Table of Employee Composition Based on Organization Position Levels

Level Jabatan Organisasi <i>Organization Position Levels</i>	Tahun 2019		Tahun 2018		Perubahan <i>Change</i>	
	(Orang) <i>(person)</i>	(%)	(Orang) <i>(Person)</i>	(%)	(Orang) <i>(Person)</i>	(%)
Senior Manager	12	1.38	12	1.08	0	0.00
Manager	18	2.07	19	1.71	-1	-5.26
Asst. Manager + Project Team leader	11	1.27	7	0.63	4	57.14
Supervisor	3	0.35	3	0.27	0	0.00
Staff	825	94.94	1.073	96.32	-248	-23.11
TOTAL	869	100	1114	100	-245	28.77

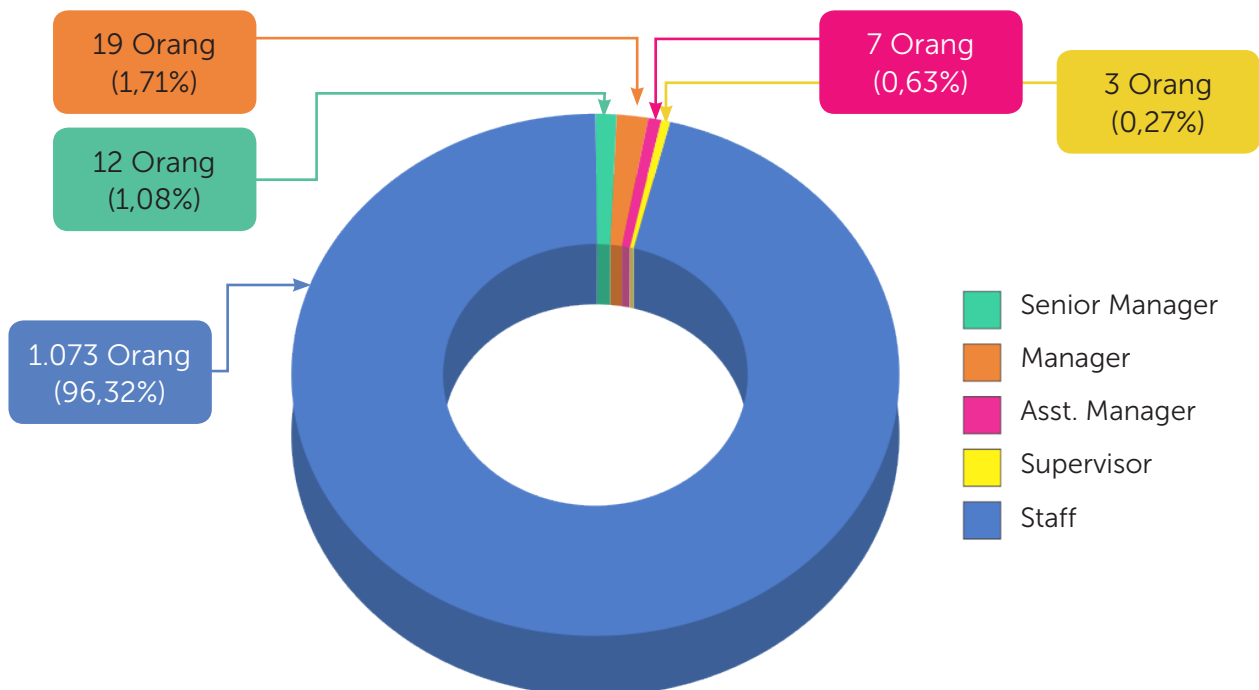
Grafik Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Organisasi Tahun 2019

Graph of Employee Composition Based on Organization Position Levels in 2019



Grafik Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Organisasi Tahun 2018

Graph of Employee Composition Based on Organization Position Levels in 2018



Komposisi karyawan PLN Enjiniring berdasarkan level organisasi didominasi oleh level staf yaitu sebesar 95,04%, selanjutnya diikuti level manager sebesar 2,03%, senior manager sebesar 1,35%, assistant manager sebesar 1,24%, dan supervisor 0,34%. Pada tahun 2019, terdapat penambahan 4 orang pada jabatan assistant manager. Terdapat pengurangan jumlah karyawan pada level staff sebesar 230 orang, yaitu karyawan PKWT, karena selesainya masa kontrak proyek dan disubstitusi oleh pegawai organik untuk pekerjaan enjiniring dan supervisi konstruksi di sepanjang tahun 2019.

The composition of PLN Enjiniring employees based on organizational level is dominated by staff level which is 95.04%, followed by manager level of 2.03%, senior manager of 1.35%, assistant manager of 1.24%, and supervisor of 0.34%. In 2019, there are increases, four person in the position of assistant manager. Meanwhile, there was reduction in the number of employees at the staff level of 230 people, namely PKWT employees due to the completion of the project contract period and being substituted by organic employees for engineering work and construction supervision work throughout 2019.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Pendidikan

Employee Composition Based on Education Levels



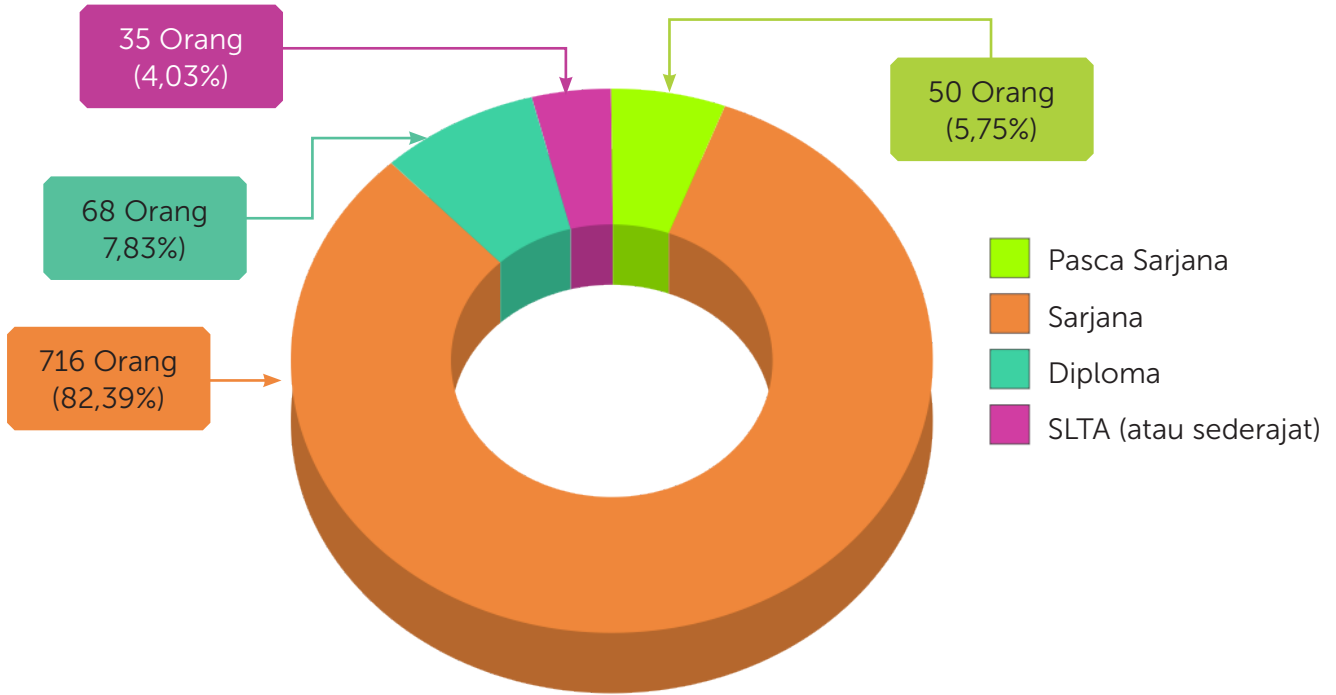
Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Pendidikan

Table of Employee Composition Based on Education Levels

Level Pendidikan <i>Education Levels</i>	Tahun 2019		Tahun 2018		Perubahan <i>Change</i>	
	(Orang) <i>(person)</i>	(%)	(Orang) <i>(Person)</i>	(%)	(Orang) <i>(Person)</i>	(%)
Pasca Sarjana <i>Post Graduate</i>	50	5.75	57	5.12	-7	-12.28
Sarjana <i>Bachelor</i>	716	82.39	752	67.50	-36	-4.79
Diploma <i>Diploma</i>	68	7.83	115	10.32	-47	-40.87
SLTA (atau sederajat) <i>High School (or equivalent)</i>	35	4.03	190	17.06	-155	-81.58
TOTAL	869	100	1114	100	-245	-139.52

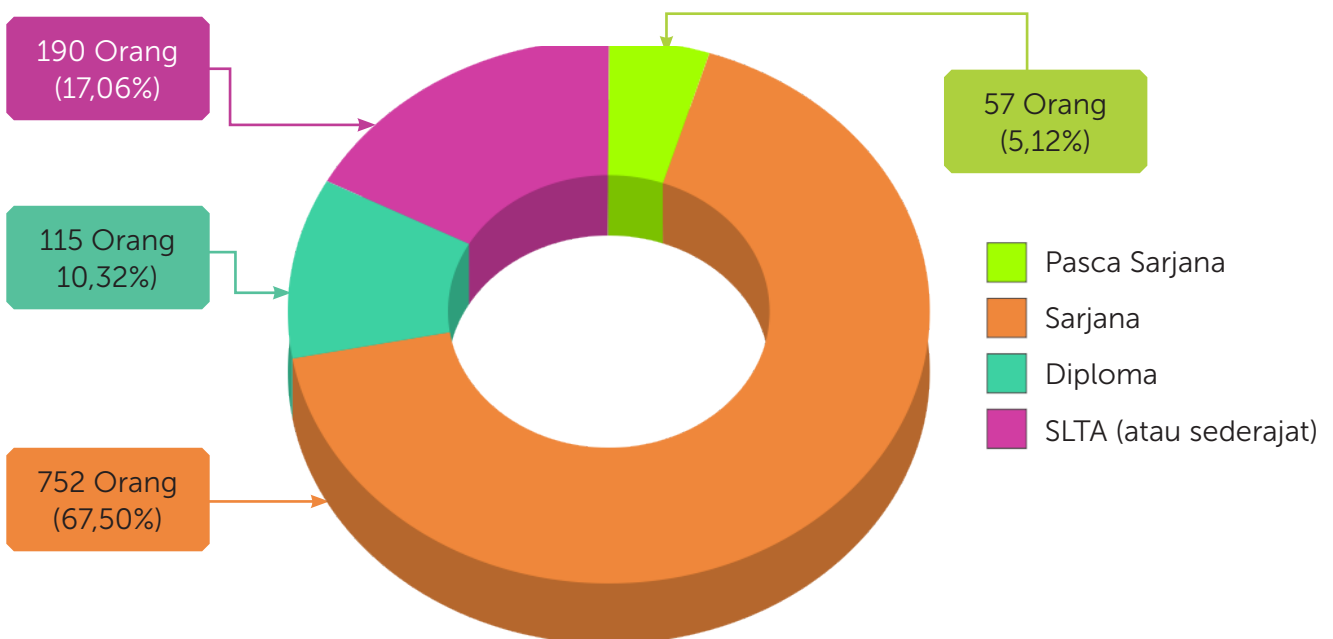
Grafik Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Pendidikan Tahun 2019

Graph of Employee Composition Based on Education Levels in 2019



Grafik Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Pendidikan Tahun 2018

Graph of Employee Composition Based on Education Levels in 2018



Komposisi karyawan PLN Enjiniring berdasarkan level pendidikan didominasi oleh karyawan dengan level pendidikan sarjana, yaitu berjumlah 82,8%, selanjutnya level diploma sebesar 7,7%, level pasca sarjana sebesar 7,1%, level pendidikan SLTA (sederajat) sebesar 3,9%. Jumlah tenaga kerja di seluruh level pendidikan mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2018 dikarenakan perubahan komposisi karyawan mulai dari Tugas Karya sampai dengan outsourcing.

The composition of PLN Enjiniring employees based on the level of education is dominated by employees with an undergraduate level of education by 82.8%, followed by a diploma level of 7.7%, a postgraduate level of 7.1%, and a high school level (equivalent) of 3.9%. The number of workers in all levels of education has changed compared to 2018 due to changes in the composition of employees ranging from Work Assignment to outsourcing.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Composition of Employees Based on Age



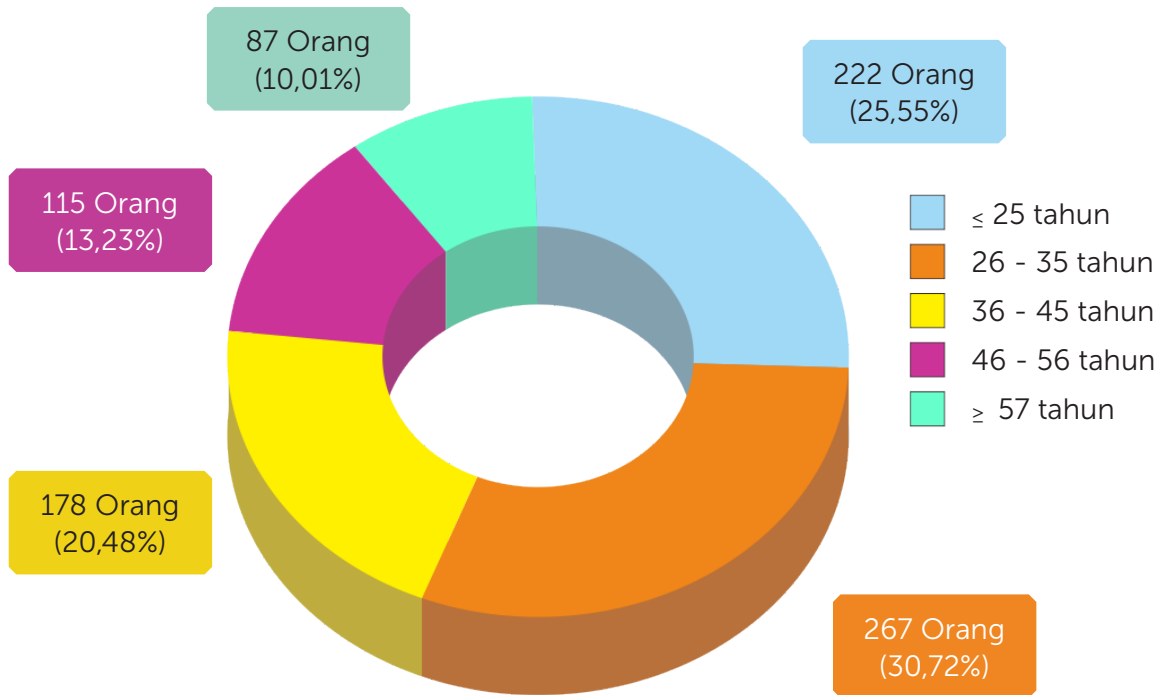
Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Table of Employee Composition by Age

Usia Age	Jumlah Pegawai Number of Employees				Perubahan (orang) Change (Person)	Perubahan (%) Change (%)
	Tahun 2019 Year 2019		Tahun 2018 Year 2018			
	Orang (Person)	(%)	Orang (Person)	(%)		
≤ 25 tahun ≤ 25 years	222	25.55	189	16.97	33	17.46
26 - 35 tahun 26 - 35 years	267	30.72	367	32.94	-100	-27.25
36 - 45 tahun 36 - 45 years	178	20.48	238	21.36	-60	-25.21
46 - 56 tahun 46 - 56 years	115	13.23	169	15.17	-54	-31.95
≥ 57 tahun ≥ 57 years	87	10.01	151	13.55	-64	-42.38
TOTAL	869	100	1114	100	-245	-109.33

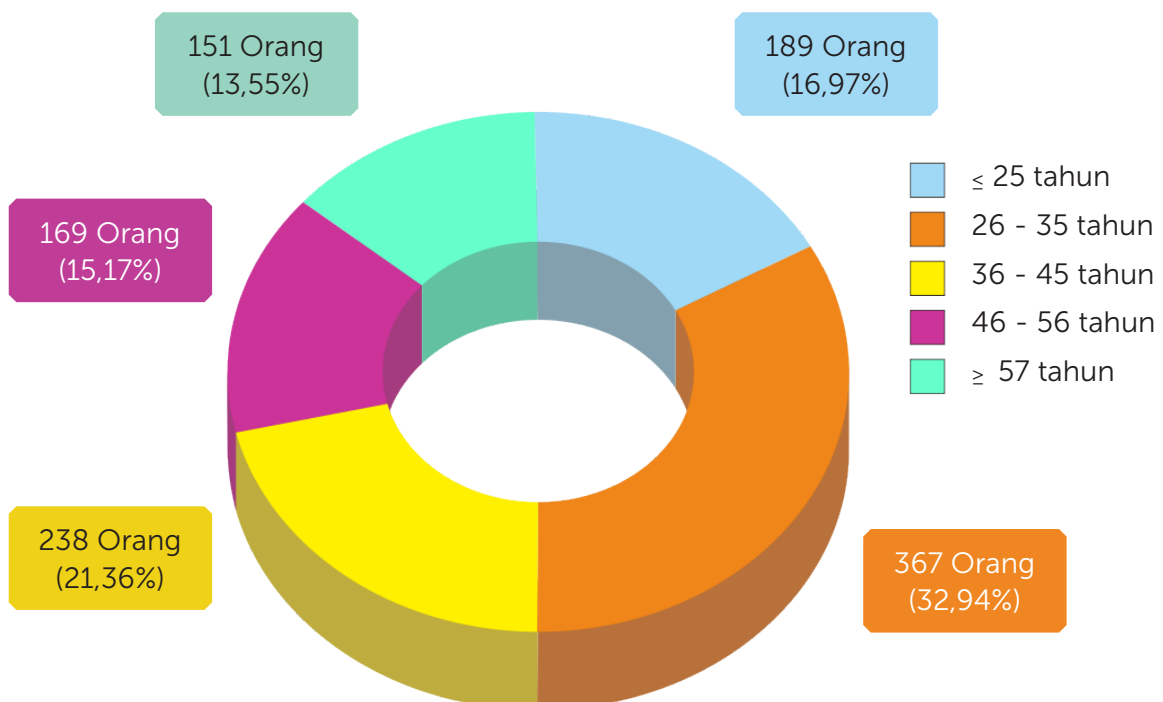
Grafik Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia Tahun 2019

Graph of Employee Composition by Age in 2019



Grafik Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia Tahun 2018

Graph of Employee Composition by Age in 2018



Komposisi karyawan PLN Enjiniring berdasarkan usia, paling banyak berada pada usia produktif yaitu 26-35 tahun sebesar 32%, selanjutnya diikuti oleh kelompok usia dibawah 25 tahun sebesar 25%, kelompok usia di bawah 36-45 tahun sebesar 20%, kelompok usia 46-56 tahun sebesar 13%, dan terakhir kelompok usia di atas 56 tahun yaitu sebesar 10%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi sedikit penurunan persentase pada kelompok usia produktif, 26-35 tahun, sebesar 0,94%. Sementara di lain hal terjadi penambahan persentase juga pada kelompok usia dibawah 25 tahun, sebesar 8,03%. Hal ini dikarenakan tahun 2019 PLN Enjiniring banyak melakukan rekrutmen organik dengan spesifikasi *freshgraduate*.

The composition of PLN Enjiniring employees based on age, most are in the productive age of 26-35 years by 32%, followed by the age group under 25 years by 25%, the age group under 36-45 years by 20%, the age group 46-56 years by 13%, and finally the age group above 56 years that is equal to 10%.

Compared to the previous year, there was a slight decrease in the percentage of the productive age group, ranging from 26 to 35 years, by 0.94%. While on the other hand, there was a slight increase in age group under 25 years, by 8.03%. This is because in 2019 PLN Enjiniring conducted a lot of organic recruitment with freshgraduate spesification.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Employee Composition Based on Gender



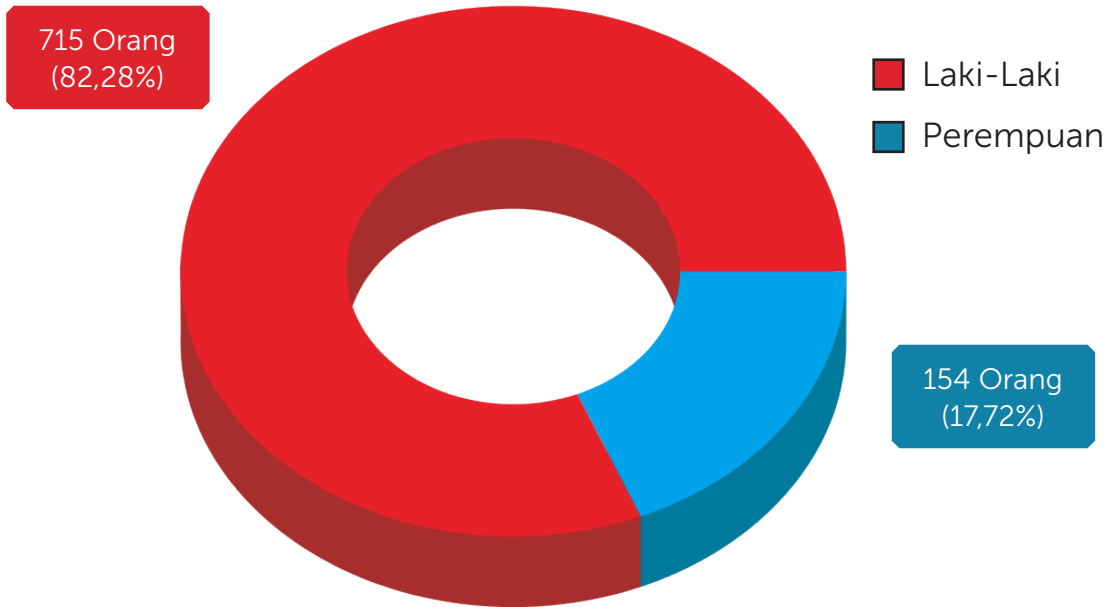
Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Table of Employee Composition Based on Gender

Jenis Kelamin <i>Gender</i>	Jumlah Pegawai <i>Number of Employees</i>				Perubahan (orang) <i>Change (Person)</i>	Perubahan (%) <i>Change (%)</i>
	Tahun 2019 <i>Year 2019</i>		Tahun 2018 <i>Year 2018</i>			
	Orang (Person)	(%)	Orang (Person)	(%)		
Laki-laki <i>Male</i>	715	82.28	916	82.23	-201	-21.94
Perempuan <i>Female</i>	154	17.72	198	17.77	-44	-22.22
TOTAL	869	100	1114	100	223	-44.17

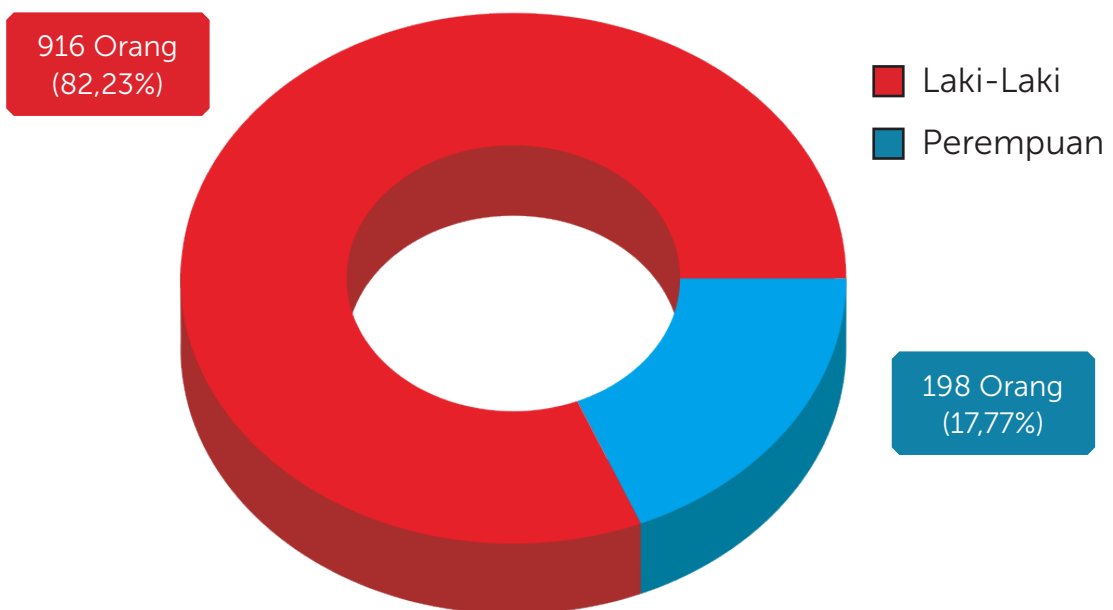
Grafik Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

Graph of Employee Composition Based on Gender in 2019



Grafik Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

Graph of Employee Composition Based on Gender in 2018



Komposisi karyawan PLN Enjiniring berdasarkan gender didominasi oleh pegawai laki-laki yaitu sebesar 82,5%, sedangkan pegawai perempuan sebesar 17,5%. Terjadi penurunan jumlah karyawan laki-laki maupun perempuan, karyawan laki-laki penurunan sebesar 20% dan karyawan perempuan sebesar 21%. Penurunan terjadi karena penurunan jumlah karyawan PLN Enjiniring dibanding tahun 2018.

PLN Enjiniring memberikan kesempatan yang sama bagi calon karyawan laki-laki maupun perempuan pada saat pelaksanaan rekrutmen, namun berdasarkan bidang usaha dan jenis pekerjaan maka jumlah karyawan lebih banyak didominasi oleh karyawan laki-laki.

The composition of PLN Enjiniring employees based on gender is dominated by male employees of 82.5%, while female employees of 17.5%. An decrease in the number of employees occurred for both male and female employees, male employees decreased by 20% and female employees decreased by 21% compared to 2018.

PLN Enjiniring provides equal opportunities for male and female prospective employees at the time of recruitment, but based on line of business and type of work, the number of employees is more dominated by male employees.

BIAYA TENAGA KERJA

Biaya Gaji dan Kesejahteraan Karyawan yang dikeluarkan oleh PLN Enjiniring pada 2019 mencapai Rp. 61.171.958.565. Besarnya biaya gaji dan kesejahteraan karyawan ini meningkat sebesar 10,22% atau sebesar Rp 5.673.958.565 jika dibanding biaya yang dikeluarkan pada tahun 2018, yaitu sebesar Rp 55.498.000.000. Hal ini dapat disebabkan oleh bertambahnya jumlah Pegawai Organik yang cukup signifikan pada tahun 2019 sebesar 62,29% dari tahun 2018.

LABOR COSTS

Employee Salary and Welfare Costs incurred by PLN Enjiniring in 2019 reach amounted to Rp. 61,171,958,565. The amount of salary and welfare costs of these employees increased by 10.22% or in amount of Rp. 5.673,958,565 when compared to costs incurred in 2018, which amounted to Rp.55,498,000,000. This can be caused by the increase in the number of organic employees in 2019 by 62.29% from 2018.

TINGKAT TURNOVER PEGAWAI

Tingkat turnover Pegawai menunjukkan level of engagement Pegawai dalam sebuah perusahaan, dimana semakin rendah tingkat turnover Pegawai menunjukkan bahwa Pegawai memiliki *level of engagement* yang rendah terhadap perusahaan. Selama 5 (lima) tahun terakhir tingkat *turnover* karyawan pada PLN Enjiniring relatif tinggi. Pada tahun 2015 tingkat turnover Pegawai hanya sebesar 0,95% dan tahun 2016-2017 tingkat turnover 0%. Tetapi pada 2 tahun berturut-turut (2018-2019) terjadi turnover Pegawai tertinggi yaitu sebesar 1,71% dan 1,06%. Pada tahun 2019 tercatat 2 orang Pegawai resign dikarenakan alasan keluarga dan 1 Pegawai PHK karena Pelanggaran Disiplin. Jumlah turnover didasarkan atas jumlah Pegawai dengan status kepegawaian Organik dapat dilihat pada tabel di bawah.

TURNOVER OF EMPLOYEES

Employee turnover rate shows the level of employee engagement in a company, where the lower employee turnover rate shows that employees have a high level of engagement towards the company. During the last 5 (five) years the employee turnover rate at PLN Enjiniring relatively very low. In 2015 the employee turnover rate only 0.95% and in 2016-2017 the employee turnover rate only 0%. The highest employee turnover rate occurred in 2018 and 2019 by 1.71% and 1.06% because there were 2 employees resign due to family reasons and 1 employee fired due to disciplinary violations. Turnover is based on the number of Employees with Organic employment status can be seen in the table below.

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Table of Employee Composition Based on Gender

Keterangan <i>Description</i>	Tahun <i>Year</i>				
	2019	2018	2017	2016	2015
Jumlah Pegawai di Awal Periode <i>Number of Employees in Early Period</i>	175	158	133	104	105
Jumlah Pegawai Masuk <i>Number of Employees Recruited</i>	115	25	25	29	0
Jumlah Pegawai Keluar (resign) <i>Number of Employees Resigned</i>	3	3	0	0	1
Jumlah Pegawai Keluar (tugas karya/tugas belajar) <i>Number of Employees Outgoing (work assignments/study assignments)</i>	1	4	0	0	0
Jumlah Pegawai Keluar (pensiun) <i>Number of Employees Retired</i>	2	1	0	0	0
Jumlah Pegawai di Akhir Periode <i>Number of Employees at End of Period</i>	284	175	158	133	104
Turnover <i>Turnover</i>	3	3	0	0	1
% Turnover <i>% Turnover</i>	1.06%	1.71%	0.00%	0.00%	0.96%

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

GOOD CORPORATE GOVERNANCE





Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Implementation of Corporate Governance



Dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat sehingga mampu mempertahankan keberadaan dan keberlanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan, PT PLN Enjiniring mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Penerapan GCG dilaksanakan secara konsisten sebagai salah satu alat untuk menjaga kelangsungan usaha dan kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta menumbuhkan budaya PLN berintegritas pada seluruh insan dalam organisasin

In order to maximize the value of the company in order to have strong competitiveness so as to maintain the existence and sustainability to achieve the goals and objectives of the company, PT PLN Enjiniring encourages the management of the company in a professional, transparent and efficient manner, as well as empowering functions and increasing the independence of the company's organs through the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

The implementation of GCG is carried out consistently as one of the tools to maintain business continuity and the trust of stakeholders (stakeholders), and foster a culture of PLN with integrity to all people in the organization

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Commitment to Implementing Corporate Governance

PLN Enjiniring sangat menyadari arti penting dari GCG dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sehingga mampu mempertahankan keberlangsungan usaha secara berkelanjutan. Perusahaan secara konsisten terus melakukan tindakan perbaikan, memperkuat komitmen, menetapkan strategi, sumber daya serta berupaya memperoleh dukungan penuh dari Pemegang Saham (*Shareholder*) dan Pemangku Kepentingan Lainnya (*Stakeholders*) dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG sehingga sasaran kinerja, tujuan perusahaan dan keberlangsungan usaha dapat dicapai.

Dalam penerapannya, komitmen seluruh insan perusahaan mulai dari level paling bawah sampai dengan *top manajemen*, untuk senantiasa menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat dengan menjunjung tinggi perilaku etis dengan penuh amanah dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran perusahaan. Perusahaan mewajibkan seluruh anggota perusahaan untuk menandatangani pernyataan komitmen untuk melaksanakan pedoman etika dan perilaku sesuai dengan Pedoman Perilaku yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Perusahaan melakukan evaluasi secara berkala terhadap *Infrastructure* dan *softstructure* GCG untuk mengantisipasi setiap perubahan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku agar selaras dengan perkembangan usaha. Dukungan *Infrastructure* dan *Softstructure* GCG memiliki peranan penting dalam memberikan kejelasan fungsi, tanggung jawab, hak dan kewajiban serta system yang digunakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan upaya peningkatan nilai perusahaan (*corporate value*) dalam jangka Panjang.

PLN Enjiniring is well aware of the importance of GCG and is committed to implementing the principles of Good Corporate Governance so as to be able to sustain business continuity on an ongoing basis. The Company has consistently taken corrective actions, strengthened commitment, set strategies, resources and sought full support from Shareholders and Other Stakeholders in implementing GCG principles so that performance targets, company goals and business sustainability can be achieved.

In its application, the commitment of all employees of the company starting from the lowest level to the top management, to always carry out healthy business practices by upholding ethical behavior with the utmost trust in order to achieve the company's vision, mission and goals. The company requires all members of the company to sign a statement of commitment to carry out ethical and behavioral guidelines in accordance with the Code of Conduct established based on the Directors' Decree in a sustainable and continuous manner.

The Company conducts periodic evaluations of the GCG Infrastructure and Softstructure to anticipate any changes to the rules and regulations that apply to be in line with business development. GCG Infrastructure and Softstructure Support has an important role in providing clarity of functions, responsibilities, rights and obligations as well as the system used so that it is expected to increase business success and efforts to increase corporate value in the long term.

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

The Purpose of Implementing Corporate Governance



Penerapan prinsip – prinsip GCG di PLN Enjiniring bertujuan untuk :

1. Menjaga kontinuitas usaha jangka Panjang;
2. Memaksimalkan nilai perusahaan (corporate value) agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat sehingga mampu mempertahankan eksistensinya secara berkelanjutan sesuai visi dan misi Perseroan;
3. Meningkatkan daya saing perusahaan sehingga memberikan keyakinan kepada Pemegang Saham, bahkan Perseroan dikelola secara benar dan baik agar memberikan 'return' yang wajar dan bernilai tinggi;
4. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara organ perusahaan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi), karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan berjalan dengan baik dan memenuhi harapan stakeholders;
5. Mendorong dan mendukung pengembangan SDM, organisasi dan bisnis PLN Enjiniring;
6. Melakukan analisis risiko dan mitigasi secara komprehensif dan lebih baik;
7. Meningkatkan etika dan budaya kerja yang bersih dan profesional;
8. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan benturan kepentingan dalam pengelolaan perusahaan dan oleh individu sebagai insan organisasi.

The application of GCG principles at PLN Enjiniring aims to:

1. *Maintain long-term business continuity;*
2. *Maximize the value of the company (corporate value) so that the Company has a strong competitiveness so that it can maintain its existence in a sustainable manner in accordance with the vision and mission of the Company;*
3. *Increase the company's competitiveness so as to provide confidence to Shareholders, even the Company is managed properly and properly in order to provide a reasonable and high-value return;*
4. *Control and direct the relationship between company organs (Shareholders, Board of Commissioners, Directors), employees, customers, business partners, as well as the community and the environment running well and meeting the expectations of stakeholders;*
5. *Encourage and supporting the development of HR, organization and business of PLN Enjiniring;*
6. *Conduct a comprehensive and better risk analysis and mitigation;*
7. *Enhancing clean and professional work ethics and culture;*
8. *Manage the procurement of goods and services to avoid the occurrence of deviations and conflicts of interest in the management of the company and by individuals as individuals of the organization.*

Landasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Platform for Implementing Corporate Governance



Dalam melaksanakan penerapan GCG, PLN Enjiniring menyadari bahwa Kebijakan GCG selain menjadi acuan yang wajib diterapkan oleh Perusahaan telah menjadi instrument yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Perusahaan menerapkan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan terkait dengan pelaksanaan GCG bagi Perusahaan. Dasar penerapan GCG di Perseroan mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian Pengurusan Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Umum Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No, PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

In implementing GCG implementation, PLN Enjiniring realizes that in addition to being a reference that must be applied by the Company, GCG Policy has become the instrument needed to ensure that the management of the company runs properly in accordance with applicable regulations. Therefore, the Company implements GCG at all levels and levels of the organization based on the provisions and regulations related to the implementation of GCG for the Company. The basis for implementing GCG in the Company refers to:

1. *Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;*
2. *Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;*
3. *Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information*
4. *Government Regulation Number 45 of 2005 concerning Establishment of Management of Supervision and Disbanding of State-Owned Enterprises;*
5. *Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Public Bodies;*
6. *Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-09 / MBU / 2012 dated July 6, 2012 concerning Amendment to SOE Minister of State Regulation No, PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises;*

- | | |
|---|---|
| <p>7. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;</p> <p>8. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;</p> <p>9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 16/MBU/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;</p> <p>10. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Umum Milik Negara;</p> <p>11. Anggaran Dasar Nomor 22 tahun 2012 yang telah disahkan melalui Akta Notaris Perusahaan yang telah disesuaikan dengan undang-undang Perseroan Terbatas;</p> <p>12. Pedoman Good Corporate Governance (GCG) Edisi ke-3 di Lingkungan PT Prima Layanan Nasional Enjiniring yang ditetapkan tanggal 7 November 2016;</p> <p>13. Surat Keputusan Direksi Nomor 03.001.K/010/DIR/III/2012 tanggal 3 Maret 2012 tentang Penunjukan Direksi Penanggung Jawab Monitoring Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) di Lingkungan PT Prima Layanan Nasional Enjiniring;</p> <p>14. Board Manual PT Prima Layanan Nasional Enjiniring Tahun 2015;</p> <p>15. Pedoman Ethical Code of Conduct PT PLN Enjiniring Tahun 2014;</p> <p>16. Buku Saku Pedoman Perilaku PT PLN Enjiniring Tahun 2016.</p> | <p><i>7. Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-10 / MBU / 2012 dated 24 July 2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners / Supervisory Board of State-Owned Enterprises;</i></p> <p><i>8. Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number PER-12 / MBU / 2012 dated 24 August 2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners / Supervisory Board of State-Owned Enterprises;</i></p> <p><i>9. Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number 16 / MBU / 2012 dated October 1, 2012 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number PER-01 / MBU / 2011 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners / Supervisory Board of State Owned Enterprises;</i></p> <p><i>10. Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Number SK-16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators / Evaluation and Evaluation Indicators of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Public Bodies;</i></p> <p><i>11. Articles of Association No. 22 of 2012 which has been ratified through a Company Notary Deed that has been adjusted to the laws of a Limited Liability Company;</i></p> <p><i>12. Good Corporate Governance (GCG) 3rd Edition Guidelines in the PT Prima Jasa Nasional Enjiniring Environment, which was established on 7 November 2016;</i></p> <p><i>13. Decree of the Board of Directors Number 03.001.K / 010 / DIR / III / 2012 dated March 3, 2012 concerning Appointment of Directors Responsible for Monitoring the Implementation of Good Corporate Governance in PT Prima Jasa Nasional Enjiniring;</i></p> <p><i>14. PT Prima's National Engineering Service Board Manual 2015;</i></p> <p><i>15. Guidelines for 2014 PT PLN Enjiniring Ethical Code of Conduct;</i></p> <p><i>16. 2016 PT PLN Enjiniring Code of Conduct Pocket Book.</i></p> |
|---|---|

Selain itu, untuk lebih mengefektifkan implementasi GCG, PLN Enjiniring juga melakukan penelaahan terhadap praktik – praktik bisnis terbaik yang meliputi antara lain ;

1. Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai acuan dalam pengelolaan dan penerapan GCG;
2. Prinsip-prinsip Corporate Governance yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);
3. ASEAN Corporate Governance Scorecard;

Memperhatikan kondisi pengalaman perusahaan di masa lalu, sudah menjadi keharusan bagi Perusahaan untuk menerapkan GCG sebagaimana yang tertuang dalam beberapa ketentuan yang berlaku yang meliputi undang-undang, Peraturan Menteri dan berbagai Pedoman Praktik Terbaik.

In addition, to make the GCG implementation more effective, PLN Enjiniring also conducts a review of the best business practices which include;

1. *General Guidelines for Indonesian GCG developed by the National Committee on Governance Policy (KNKG) as a reference in the management and implementation of GCG;*
2. *Principles of Corporate Governance developed by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);*
3. *ASEAN Corporate Governance Scorecard;*

Considering the condition of the company's experience in the past, it has become imperative for the Company to implement GCG as stated in several applicable provisions which include laws, Ministerial Regulations and various Best Practices Guidelines.

Tabel GCG Pedoman Praktik Terbaik

GCG Table Best Practice Guidelines

<p>Transparansi <i>Transparency</i></p>	<p>Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><i>Openness in carrying out the decision-making process and openness in disclosing material and relevant information about the company, which is easily accessible to stakeholders in accordance with the applicable laws and regulations.</i></p>
<p>Akuntabilitas <i>Accountability</i></p>	<p>Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan bertanggungjawab Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara transparan, wajar, efektif dan efisien. Setiap awal tahun, Perseroan memastikan ukuran kinerja setiap anggota perusahaan secara jelas terukur dan dievaluasi pada Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMKP) sehingga pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment) dapat dilaksanakan secara adil dan wajar.</p> <p><i>Clarity of functions, implementation and accountability of the Organ so that the company's management is carried out transparently, fairly, effectively and efficiently. At the beginning of each year, the Company ensures that the performance measures of each company member are clearly measured and evaluated in the Performance Management Information System (SIMKP) so that reward and punishment can be carried out fairly and fairly.</i></p>
<p>Tanggung Jawab <i>Responsibility</i></p>	<p>Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat sehingga kesinambungan usaha perusahaan dapat dipelihara dalam jangka panjang.</p> <p><i>Conformity in the management of the company against applicable laws and regulations and healthy corporate principles so that the sustainability of the company's business can be maintained in the long term.</i></p>

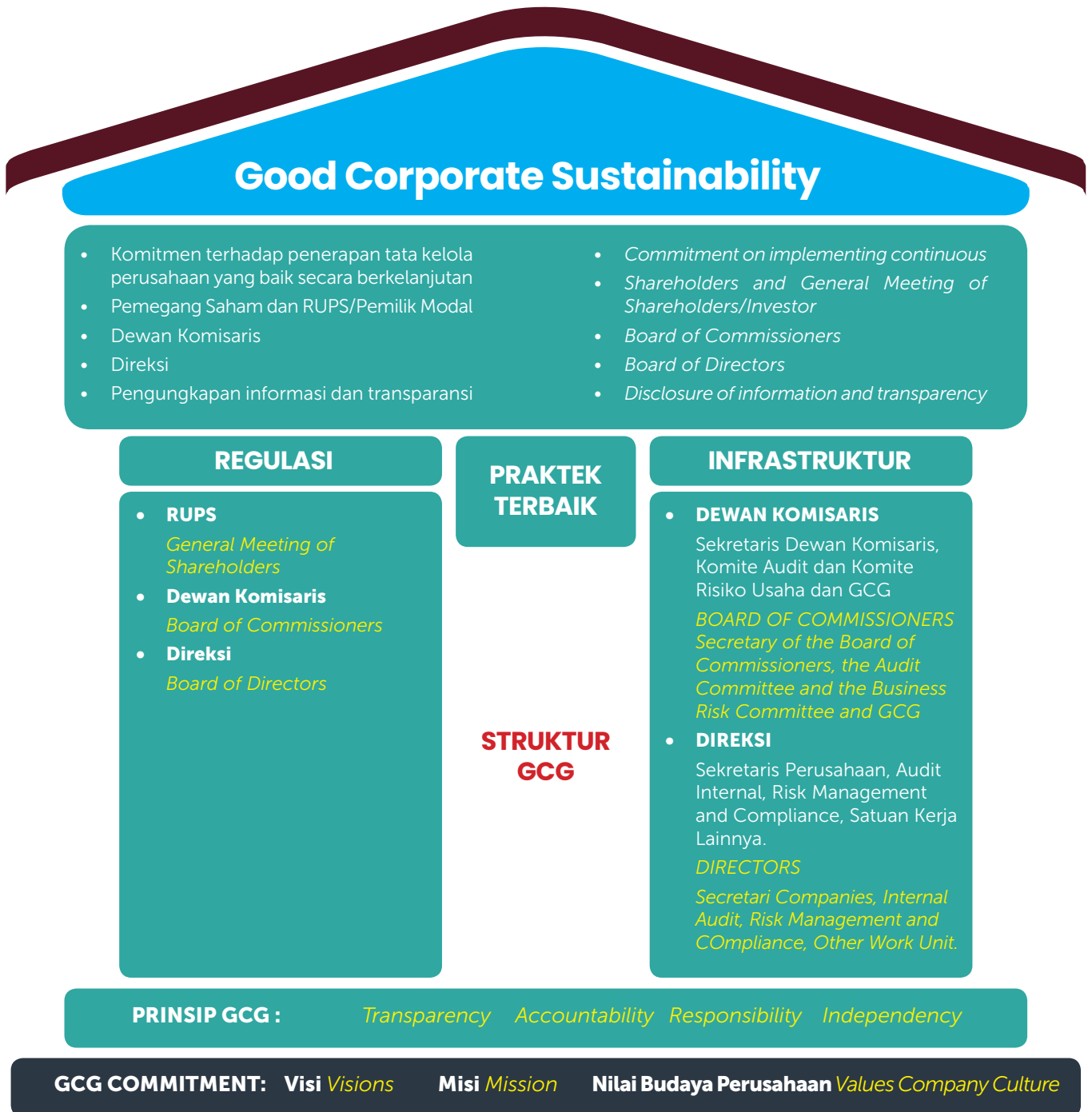
<p>Kemandirian <i>Independence</i></p>	<p>Keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan (conflict of interest) dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.</p> <p><i>The situation in which the company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the laws and regulations and the principles of a healthy corporation.</i></p>
<p>Kewajaran <i>Fairness</i></p>	<p>Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Prinsip kewajaran dan kesetaraan mengharuskan adanya perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya, baik yang timbul karena perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><i>Justice and equality in fulfilling the rights of Stakeholders that arise based on agreement and legislation. The principle of fairness and equality requires fair and equal treatment in fulfilling the rights of Stockholders and other Stakeholders, both arising from agreements and applicable laws and regulations.</i></p>

Prinsip-prinsip GCG senantiasa disosialisasikan keseluruhan elemen Perusahaan sebagai salah satu cara menyadarkan seluruh elemen Perusahaan akan nilai-nilai yang harus dipenuhi untuk mencapai praktik GCG. Internalisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan pedoman di atas ke dalam kebijakan internal Perusahaan merupakan komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi dan seluruh karyawan. Berdasarkan asas-asas GCG, PLN Enjiniring mengembangkan struktur GCG yang meliputi GCG Organ Utama dan Organ Pendukung guna menjalankan mekanisme GCG sesuai peraturan perundang-undangan serta best practices yang ada sehingga tercipta kesinambungan usaha dalam jangka Panjang. Komitmen Perusahaan terhadap penerapan GCG ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

The principles of GCG are always promoted to all elements of the Company as a way to make all elements of the Company aware of the values that must be met in order to achieve GCG practices. The internalization of various laws and regulations above into the Company's internal policies is a commitment of the Board of Commissioners and Directors and all employees. Based on the principles of GCG, PLN Enjiniring develops a GCG structure that includes GCG Main Organs and Supporting Organs in order to carry out the GCG mechanism in accordance with existing laws and best practices so as to create long-term business sustainability. The company's commitment to implementing GCG is shown in the figure below.

Gambar Good Corporate Sustainability

Picture of Good Corporate Sustainability

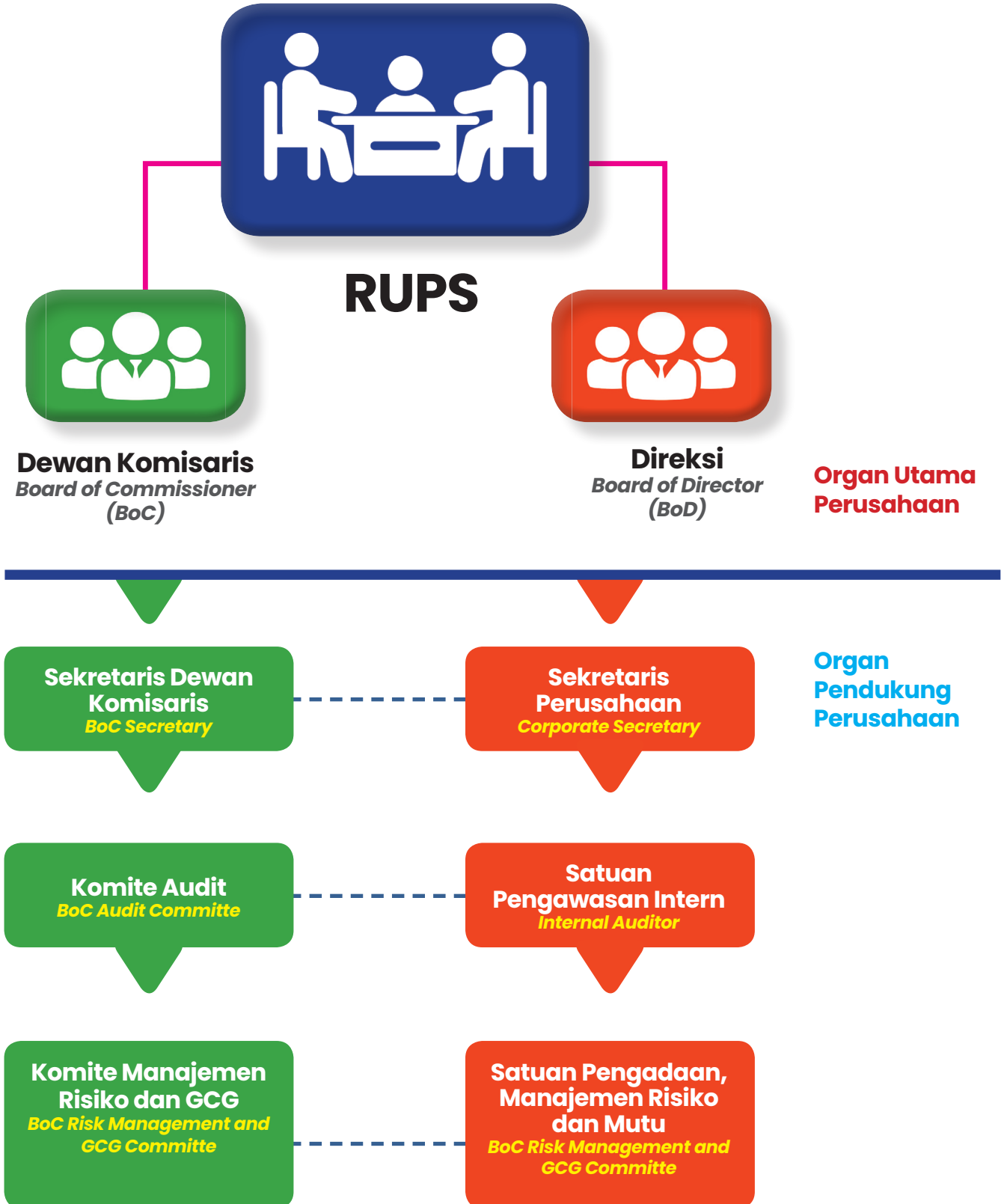


Sebagai infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, di bawah Dewan Komisaris telah dibentuk Komite Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris. Demikian juga di bawah Direksi dibentuk unit kerja yang bertanggung jawab dalam implementasi GCG serta menjadi mitra kerja dari Komite Dewan Komisaris.

As a supporting infrastructure in carrying out its duties and responsibilities, a Board of Commissioners and Secretary of the Board of Commissioners have been formed under the Board of Commissioners. Likewise, under the Board of Directors, a work unit responsible for implementing GCG was formed and a working partner of the Board of Commissioners' Committee was formed.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure



Setiap Organ Perusahaan memiliki peranan penting dalam penerapan GCG dengan menjalankan fungsi hak dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan meliputi fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan.

RUPS merupakan organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Para Pemegang Saham memiliki kewenangan utama untuk memperoleh informasi mengenai Perseroan baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menyusun kebijakan strategis Perseroan. Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menyusun kebijakan strategis Perseroan. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab penuh dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi baik atas kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan sesuai amanah yang diberikan. Kewenangan yang dimiliki Direksi secara tak terbatas dan tak bersyarat selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar serta Keputusan RUPS

Each Company Organ has an important role in implementing GCG by carrying out its rights and responsibilities for the interests of the Company, including the functions of policy making, implementation and supervision.

The GMS is an organ of a Limited Liability Company that has exclusive authority not given to the Directors and Board of Commissioners. The authority of the GMS, its form and extent is determined in the Limited Liability Company Law and the Company's Articles of Association. The Shareholders have the main authority to obtain information about the Company from both the Board of Directors and the Board of Commissioners as the basis for making decisions in formulating the Company's strategic policies. The Board of Commissioners is the basis for making decisions in formulating the Company's strategic policies. The Board of Commissioners has full responsibility in supervising the management of the Company by the Board of Directors both at the discretion of the Board of Directors in managing the Company. Directors are fully responsible for managing the Company in accordance with the mandate given. The authority of the Board of Directors is unlimited and unconditional as long as it does not conflict with the Law and the Articles of Association and the Resolution of the GMS

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan menetapkan Direktur Keuangan dan SDM sebagai Penanggung Jawab Penerapan GCG di lingkungan PLN Enjiniring dan untuk mengelola pelaksanaan program-program GCG yang telah direncanakan dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.

Perseroan membentuk Tim Penerapan GCG guna memaksimalkan pemantauan dan mengukur sejauh mana efektivitas program-program GCG dijalankan oleh Perusahaan. Kunci keberhasilan penerapan GCG di Perseroan menitikberatkan kepada :

1. Penerapan Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku guna memastikan pengelolaan perusahaan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan tata kelola perusahaan agar dapat terselenggara dengan baik dan terdokumentasikan dengan baik di setiap Bidang;
3. Melakukan evaluasi, koordinasi dan memantau pelaksanaan kebijakan/proses bisnis perusahaan agar sesuai dengan ketentuan yang ada;
4. Memonitor melakukan evaluasi dan mendorong pelaksanaan kegiatan penerapan Kode Etik Perseroan telah dilakukan dengan baik diseluruh kegiatan Perseroan;
5. Memonitor melakukan evaluasi dan mendorong pelaksanaan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) telah dilakukan dengan baik dan sesuai.

LIABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The Company appoints the Director of Finance and HR as Responsible for GCG Implementation within the PLN Enjiniring and to manage the implementation of the GCG programs planned by the Corporate Secretary.

The Company formed a GCG Implementation Team to maximize monitoring and measure the extent to which the effectiveness of GCG programs is carried out by the Company. The key to the successful implementation of GCG in the Company emphasizes:

- 1. Implementation of Compliance with applicable laws and regulations to ensure the management of the company is in accordance with applicable laws and regulations;*
- 2. Directing and controlling corporate governance activities so that they can be carried out properly and are well documented in each Sector;*
- 3. Evaluating, coordinating and monitoring the implementation of company policies / business processes in accordance with existing provisions;*
- 4. Monitoring to evaluate and encourage the implementation of the activities of the implementation of the Company's Code of Ethics has been carried out properly throughout the Company's activities;*
- 5. Monitor to evaluate and encourage the implementation of Good Corporate Governance practices that have been carried out properly and appropriately.*

ROAD MAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai panduan dalam penerapan GCG, Perseroan menyusun Roadmap GCG sebagai bagian dari perencanaan strategis dalam implementasi GCG secara berkelanjutan. Roadmap CGC menggambarkan tahapan-tahapan yang akan dicapai terkait dengan penerapan GCG dalam jangka panjang secara konsisten dan berkesinambungan.

ROAD MAP CORPORATE GOVERNANCE

As a guide in implementing GCG, the Company prepares a GCG Roadmap as part of strategic planning in implementing GCG on an ongoing basis. The CGC roadmap illustrates the stages that will be achieved in relation to long-term consistent and continuous implementation of GCG.

Roadmap GCG 2008 – 2022

GCG Roadmap 2008 – 2022



Pada saat ini, PLN Enjiniring telah berada pada fase Good Governance Conformance yang secara berkelanjutan dan berkesinambungan terus melakukan internalisasi implementasi prinsip-prinsip GCG dan melengkapi soft structure dan memutakhirnya pedoman yang ada. Perusahaan berupaya menerapkan prinsip-prinsip GCG pada semua proses bisnis dengan didukung oleh tersedianya pedoman perusahaan dari tingkat manajemen puncak hingga tingkat operasional dan terintegrasi antara rencana kerja dengan rencana strategis guna mencapai tujuan akhir tahapan penerapan GCG pada face Good Corporate Citizen.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Perusahaan guna mendukung fase Good Corporate Governance antara lain adalah :

1. Implementasi program PLNE Bersih dan Berintegritas dengan kegiatan : Multistakeholder Forum (collective action), Pengendalian Gratifikasi Pelaporan LHKPN.
2. Melakukan review dan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik edisi 3 (Pedoman GCG) , dan Buku Panduan bagi Dekom dan Direksi (Board Manual) khusus untuk organ utama dalam struktur GCG.
3. Melakukan review dan menyempurnakan Piagam Komite Audit dan Piagam Komite Manajemen Risiko sebagai pedoman bagi organ pendukung Dewan Komisaris.
4. Melakukan review dan menyempurnakan Buku Pedoman Perilaku (code of conduct) yang berlaku bagi seluruh organ dalam struktur perusahaan.

At this time, PLN Enjiniring has been in the Good Governance Conformance phase which continuously and continuously continues to internalize the implementation of GCG principles and complete the soft structure and update the existing guidelines. The company seeks to apply GCG principles in all business processes supported by the availability of company guidelines from the top management level to the operational level and is integrated between work plans and strategic plans in order to achieve the ultimate goal of implementing GCG on the face of Good Corporate Citizen.

Activities undertaken by the Company to support the Good Corporate Governance phase include:

- 1. Implementation of the Clean and Integrity PLNE program with activities: Multistakeholder Forum (collective action), LHKPN Report Gratification Control.*
- 2. Reviewing and refining Good Corporate Governance Guidelines edition 3 (GCG Guidelines), and a Special Board Manual for Board and Directors (Board Manual) for the main organs in the GCG structure.*
- 3. Reviewing and perfecting the Audit Committee Charter and the Risk Management Committee Charter as a guideline for the supporting organs of the Board of Commissioners.*
- 4. Reviewing and perfecting the Code of Conduct that applies to all organs in the company's structure.*

Penilaian (Assessment) Tahun Buku 2019

Assessment for Fiscal Year 2019

Penerapan GCG merupakan salah satu Key Performance Indicator (KPI) dalam Kontrak Manajemen Perseroan dalam bentuk pencapaian skor Penerapan GCG sejak tahun 2009. Penilaian atas Penerapan GCG di Perseroan dilakukan oleh Assesor Independen dan pada tahun 2013 Perseroan pertama kali melaksanakan penilaian secara mandiri (self assessment). Untuk penilaian secara mandiri dibentuk Tim Verifikator yang diketuai dari Satuan Pengawasan Intern bersama-sama dengan Tim Penerapan GCG PLNE. Sesuai dengan arahan Pemegang Saham, penilaian GCG dilakukan secara berkala.

Untuk tahun 2019, Penilaian Penerapan GCG dilaksanakan secara Self Assessment dengan menggunakan parameter Kementerian BUMN sebagai tercantum dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Aspek pengujian dalam assessment GCG meliputi :

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan,
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal,
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas,
4. Direksi,
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi,
6. Aspek lainnya. Indikator pengujian berjumlah 43 indikator sedangkan parameter pengujian berjumlah 153 parameter.

Berdasarkan hasil assessment, penerapan GCG di Perseroan masuk dalam kategori Sangat Baik dengan total skor sebesar 90,09 dari total bobot sebesar 100,00 atau memperoleh capaian sebesar 90,09%.

The implementation of GCG is one of the Key Performance Indicators (KPI) in the Company's Management Contract in the form of achieving the GCG Implementation score since 2009. Assessment of the Implementation of GCG in the Company was carried out by an Independent Assessor and in 2013 the Company first conducted an independent assessment (self assessment) . For an independent assessment, a Verification Team is formed which is chaired by the Internal Audit Unit together with the PLNE GCG Implementation Team. In accordance with the directions of the Shareholders, the GCG assessment is conducted periodically.

For 2019, the GCG Implementation Assessment is carried out independently by using the parameters of the Ministry of SOEs as listed in the Decree of the Minister of SOE Number SK-16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators / Evaluation and Evaluation Indicators / Parameters of the Implementation of Good Corporate Governance (Good Corporate Governance) in State-Owned Enterprises.

Test aspects in the GCG assessment include:

1. *Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance*
2. *Shareholders and GMS / Capital Owners,*
3. *Board of Commissioners / Board of Trustees,*
4. *Directors,*
5. *Information Disclosure and Transparency*
6. *Other aspects. The testing indicators are 43 indicators while the testing parameters are 153 parameters.*

Based on the results of the assessment, the implementation of GCG in the Company is included in the category of Very Good with a total score of 90.09 out of a total weight of 100.00 or gained an achievement of 90.09%.

Tabel Penilaian Assessment GCG 2019

GCG Assessment Assessment Table 2019

No.	Aspek Pengujian / Indikator	Capaian Tahun 2019		Tingkat Pemenuhan
		Bobot	Skor	(%)
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	6,57	93.84
2	Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal	9,00	7,48	83.13
3	Dewan Komisaris	35,00	33,45	95.57
4	Direksi	35,00	30,77	87.92
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	6,82	75.80
6	Aspek Lainnya	5,00	5,00	100,00
Total Skor		100,00	90,09	90.09

Penilaian (Assessment) Tahun Buku 2018

Pelaksanaan Assessment GCG untuk periode tahun 2018 dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Skor Penerapan GCG PT PLN Enjiniring mengalami penurunan dari semula 90,27% menjadi 90,09% dengan predikat "Sangat Baik".

Berikut ini disampaikan pencapaian skor untuk masing-masing aspek penilaian, sebagai berikut :

Assessment for 2018 Financial Year

The implementation of the GCG Assessment for the 2018 period was carried out by the Financial and Development Supervisory Agency of the Jakarta SKI Province (BPKP) and PT PLN Enjiniring's GCG Implementation Score decreased from 90.27% to 90.09% with the title "Very Good".

Following is the achievement of scores for each aspect of the assessment, as follows:

Tabel Penilaian Assessment GCG 2018

GCG Assessment Assessment Table 2018

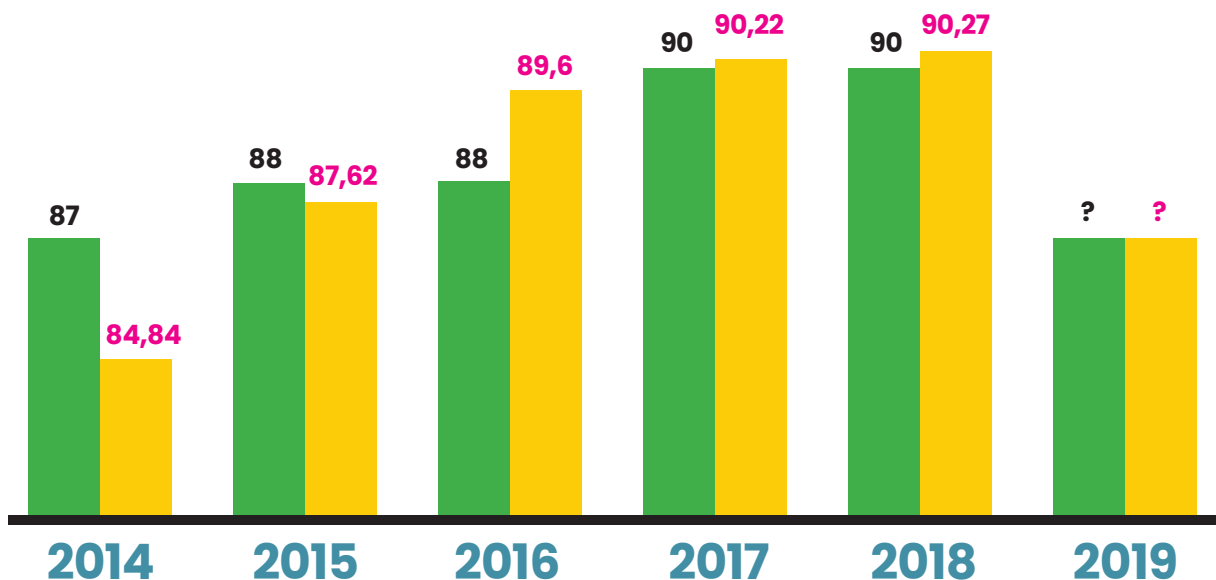
No.	Aspek Pengujian / Indikator	Capaian Tahun 2018		Tingkat Pemenuhan
		Bobot	Skor	(%)
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	6,892	98,46
2	Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal	9,00	7,807	86,74
3	Dewan Komisaris	35,00	31,752	90,72
4	Direksi	35,00	32,284	92,94
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	7,786	86,51
6	Aspek Lainnya	5,00	3,750	75,00
Total Skor		100,00	90,271	90,27

Sehingga pencapaian skor GCG pada Kontrak Manajemen PT PLN Enjiniring mengalami trend peningkatan setiap tahunnya, sebagai mana ditunjukkan pada grafik ini:

So that the achievement of GCG scores on PT PLN Enjiniring Management Contracts has an increasing trend every year, as shown in this graph:

Grafik Skor GCG

GCG Score Chart



Sinergi dengan Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan Perseroan berintegrasi dengan PLN Holding guna memonitoring dan mengendalikan secara efektif penerapan GCG di PLN dan Anak Perusahaannya dengan menggunakan aplikasi.

Perseroan merupakan salah satu anak perusahaan PT PLN (Persero), bersama-sama dengan Anak Perusahaan lainnya memandang perlunya sinergi dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi GCG di Perseroan. Perseroan membentuk "Forum GCG" AP PLN sejak tahun 2016 yang bertujuan :

1. Berkomitmen untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dalam organisasi perusahaan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan terpercaya guna meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan.
2. Membentuk dan meningkatkan komunikasi antar anak perusahaan sebagai wadah komunitas yang efektif di lingkungan Anak Perusahaan PT PLN (Persero).
3. Membentuk persepsi yang sama terhadap penerapan dan pengukuran prinsip-prinsip GCG sehingga mendukung peningkatan penerapan GCG di lingkungan Anak Perusahaan PT PLN (Persero).
4. Saling mendukung penerapan dan peningkatan tata kelola perusahaan yang baik antar anak perusahaan PT PLN (Persero).

Synergy with the Parent Company and Subsidiaries in the Implementation of Corporate Governance

To support the implementation of Corporate Governance, the Company integrates with PLN Holding to effectively monitor and control the implementation of GCG in PLN and its Subsidiaries using the application.

The Company is a subsidiary of PT PLN (Persero), together with other Subsidiaries see the need for synergies in the Implementation of Corporate Governance which has an important role in supporting the successful implementation of GCG in the Company. The Company established the AP PLN "GCG Forum" since 2016 which aims:

1. *Commit to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) in a transparent, accountable and trustworthy company organization in order to increase added value for the company.*
2. *Form and improve communication between subsidiaries as an effective community forum within the Subsidiary of PT PLN (Persero).*
3. *Forming the same perception of the application and measurement of GCG principles so as to support the increase in the application of GCG within the Subsidiary of PT PLN (Persero).*
4. *Mutually support the application and improvement of good corporate governance among subsidiaries of PT PLN (Persero).*

Forum GCG AP

GCG AP Forum



Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders



RUPS merupakan organ atau bagian Perseroan yang memiliki kewenangan tertinggi di dalam Perseroan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.

RUPS merupakan forum dimana para Pemegang Saham memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi mengenai Perseroan baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris. Informasi tersebut merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan langkah strategis Perseroan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum dalam RUPS, Pemegang Saham dapat menggunakan hak yang dimilikinya untuk mengemukakan pendapat dan memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perusahaan dari Dewan Komisaris dan/atau Direksi sepanjang berhubungan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan. RUPS dalam agenda lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali seluruh Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan agenda rapat. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah dan jenis saham yang dimilikinya.

RUPS Perseroan terdiri dari 2 yaitu RUPS Tahunan yang diadakan setiap tahun untuk pengesahan RKAP dan Laporan Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diadakan setiap saat bila dianggap perlu oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

GMS is an organ or part of the Company that has the highest authority in the Company that is not given to the Directors or Board of Commissioners within the limits determined by the Law and / or Articles of Association.

GMS is a forum where Shareholders have the authority to obtain information about the Company, both from the Board of Directors or the Board of Commissioners. The information is the basis for the GMS to determine the Company's policies and strategic steps in making decisions as a legal band in the GMS, Shareholders can use their rights to express opinions and obtain information relating to the company from the Board of Commissioners and / or Directors as long as they deal with meeting agenda and do not conflict with company interests. The GMS in other agendas is not entitled to make decisions, unless all Shareholders are present and / or represented at the GMS and approve the addition of the meeting agenda. Shareholders, both alone and represented based on power of attorney, are entitled to attend the GMS and use their voting rights in accordance with the number and type of shares they have.

The Company's General Meeting of Shareholders consists of 2, namely the Annual General Meeting of Shareholders held annually to ratify the RKAP and Annual Report and Extraordinary General Meeting of Shareholders held at any time if deemed necessary by 1 (one) or more Shareholders who together represent 1/10 (one tenth) part of the total number of shares with valid voting rights.

Hak-hak Pemegang Saham

RUPS berperan sebagai mekanisme utama untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak Pemegang Saham. Namun demikian, RUPS tidak dapat melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun hak-hak Pemegang Saham dalam menjalankan fungsinya, yaitu :

1. Menghadiri RUPS dan memberikan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki.
2. Menerima pembagian dari keuntungan Perseroan dalam bentuk dividen dan bentuk pembagian keuntungan lainnya sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.
3. Memperoleh informasi material mengenai Perseroan secara memadai, tepat waktu dan teratur.
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
5. Melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
6. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan (Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah)
7. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

Shareholder Rights

The GMS acts as the main mechanism to protect and implement the rights of shareholders. However, the GMS cannot intervene in the implementation of the duties, functions and authorities of the Board of Commissioners and Directors. Shareholders are not permitted to interfere with the Company's operational activities which are the responsibility of the Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations. The rights of the Shareholders in carrying out their functions, namely:

1. Attend GMS and vote according to the classification and number of shares held.
2. Receive a share of the Company's profits in the form of dividends and other forms of profit sharing in proportion to the number of shares held.
3. Obtain adequate, timely and regular material information about the Company.
4. Grant power of attorney with the right of substitution to individuals or legal entities to represent them at the GMS.
5. View the Register of Shareholders and Special Register during the Company's office hours.
6. File a lawsuit with the District Court against members of the Board of Directors who due to their mistakes and negligence caused losses to the Company (Shareholders representing at least 1/10 (one tenth) share of the total shares with valid voting rights)
7. Organize GMS in the event that the Board of Directors fails to hold an Annual GMS and Extraordinary GMS.



Kewajiban Pemegang Saham

Dalam menjalankan perannya, Pemegang Saham berkewajiban untuk:

1. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak melakukan kegiatan pengawasan dan kepengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, Perseroan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
4. Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi melalui mekanisme RUPS.

Akses Informasi Bagi Pemegang Saham

Perusahaan senantiasa memberikan informasi mengenai perusahaan secara memadai, tepat waktu, benar dan teratur sehingga memungkinkan pemegang saham membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

Perseroan menyediakan akses terhadap informasi untuk memungkinkan Pemegang Saham melaksanakan hak dan tanggung jawabnya antara lain melalui :

1. RUPS dimana Pemegang Saham dapat berkomunikasi dengan Manajemen dalam hal informasi mengenai Perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan.
2. Website PT PLN Enjiniring www.plne.co.id yang menyampaikan informasi terbaru dan relevan berbagai laporan dan publikasi mengenai PT PLN Enjiniring kepada Pemegang Saham.
3. Media Internal PT PLN Enjiniring, Prima News, yang menyampaikan informasi tentang kegiatan-kegiatan PT PLN Enjiniring terbaru sebagai publikasi kepada Shareholder dan Stakeholders.
4. Media Komunikasi lainnya, yaitu video conference, internal meeting, sosialisasi, kunjungan lapangan.

Shareholder Obligations

In carrying out its role, the Shareholders are obliged to:

1. *Comply with the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations.*
2. *Does not conduct supervision and management activities of the Company carried out by the Board of Commissioners and Directors.*
3. *Not use the Company for personal, family, corporate or business group interests in a spirit and manner that is contrary to the laws and regulations*
4. *Evaluate the performance of the Board of Commissioners and Directors through the GMS mechanism.*

Access to Information for Shareholders

The company always provides information about the company in an adequate, timely, correct and orderly manner so as to enable shareholders to make decisions based on accurate information.

The Company provides access to information to enable Shareholders to exercise their rights and responsibilities through:

1. *GMS where Shareholders can communicate with Management in terms of information about the Company as a basis for decision making.*
2. *PT PLN Enjiniring website www.plne.co.id which delivers the latest and relevant information on various reports and publications regarding PT PLN Enjiniring to Shareholders.*
3. *PT PLN Enjiniring Internal Media, Prima News, which convey information about the latest PT PLN Enjiniring activities as a publication to Shareholders and Stakeholders.*
4. *Other communication media, namely video conferences, internal meetings, outreach, field trips.*

Wewenang RUPS

Dalam menjalankan perannya sebagai organ Perseroan tertinggi, RUPS memiliki kewenangan untuk :

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Menetapkan tindakan dan perbuatan Direksi mengenai pengurusan perusahaan;
3. Memberikan persetujuan dalam pengalihan kekayaan perusahaan dan menjadikan jaminan utang kekayaan perusahaan;
4. Menetapkan jenis dan jumlah honorarium dan tunjangan termasuk santunan purna jabatan untuk Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Menyetujui rencana kerja dan anggaran perusahaan;
6. Menetapkan akuntan publik atas usulan Dewan Komisaris;
7. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan;
8. Menetapkan penggunaan laba bersih perusahaan;
9. Melakukan perubahan Anggaran Dasar.

Tata Cara Pelaksanaan RUPS

Perseroan menerapkan pelaksanaan tata cara RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

1. RUPS diadakan di wilayah tempat kedudukan Perseroan
2. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPSLB dengan didahului pemanggilan RUPS. Pelaksanaan Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat 14 hari sebelum tanggal rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal rapat dan tanggal pemanggilan
3. Semua keputusan yang diambil di RUPS berdasarkan musyawarah dan mufakat
4. Hasil Keputusan Pemegang Saham di dokumentasikan Sekretaris Perusahaan dan ditindaklanjuti dalam bentuk Akta Notaris apabila diperlukan sesuai peraturan yang berlaku
5. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, yaitu melalui Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (RUPS Sirkuler)

Authority of the General Meeting of Shareholders

In carrying out its role as the highest organ of the Company, the GMS has the authority to:

1. *Appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and Directors;*
2. *Determine the actions and actions of the Board of Directors regarding the management of the company;*
3. *Give approval in the transfer of company property and make guarantees of corporate wealth debt;*
4. *Determine the type and amount of honorarium and benefits including post-service compensation for the Board of Commissioners and Directors;*
5. *Approve the company's work plan and budget;*
6. *Establish a public accountant on the Board of Commissioners' proposal;*
7. *Give approval for the annual report;*
8. *Determine the use of the company's net profit;*
9. *Amend the Articles of Association.*

Procedure for GMS Implementation

The Company implements the implementation of the GMS procedures in accordance with the Articles of Association as follows:

1. *The GMS is held in the area of the Company's domicile*
2. *The Board of Directors holds an Annual GMS and EGMS preceded by a GMS summons. The GMS Summons are held by registered mail 14 days prior to the date of the meeting, excluding the date of the meeting and the date of the summons*
3. *All decisions taken at the GMS are based on deliberation and consensus*
4. *The Shareholders' Resolution results are documented by the Corporate Secretary and followed up in the form of a Notarial Deed if necessary in accordance with applicable regulations*
5. *Shareholders can also make legal decisions without holding a GMS, namely through a Circular Shareholder Decision (Circular RUPS)*

Pelaksanaan RUPS Tahun 2019

Pada tahun 2019, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali terdiri dari RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 dan RUPS Pengesahan RKAP 2019.

Seluruh kegiatan RUPS telah dilaksanakan Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku, baik terkait tempat, pemberitahuan, pemanggilan RUPS, pimpinan dan berita acara RUPS berikut ketentuan kuorum, hak suara dan keputusan RUPS. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Sekretaris Perusahaan, Manajer Senior dan Manajer terkait.

Dalam rangka menjalankan perannya, Pemegang Saham telah meminta penjelasan dan menyampaikan arahan secara langsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

- RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018
- Sebelum pelaksanaan RUPS, Perseroan menyampaikan undangan RUPS melalui surat tercatat Nomor : 24.017/M00/PLNE/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 dengan agenda RUPS :
- Persetujuan dari Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2018.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018.
- Penetapan Tantiem Tahun Buku 2018 dan Remunerasi Tahun Buku 2019 Bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2018.
- Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.

Implementation of the 2019 General Meeting of Shareholders

In 2019, the Company held 2 (two) RUPS, consisting of the 2018 Annual Report Approval GMS and the 2019 RKAP Approval RUPS.

All of the GMS activities have been carried out by the Company in accordance with applicable provisions, both related to the place, notification, summons to the GMS, leadership and minutes of the GMS following the quorum provisions, voting rights and GMS decisions. The GMS was attended by Shareholders, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, the Corporate Secretary, Senior Managers and related Managers.

In order to carry out its role, the Shareholders have requested an explanation and submitted directives at the General Meeting of Shareholders.

- *Annual General Meeting of Shareholders Approval for Fiscal Year 2018*
- *Prior to the GMS, the Company submitted the invitation to the GMS through registered letters Number: 24.017 / M00 / PLNE / V / 2019 dated May 24, 2019 with the agenda of the GMS:*
- *Approval of the Ratification of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2018 including the Report on the Implementation of Supervision of the Board of Commissioners during the 2018 Fiscal Year and the Granting of Volledig Acquit et de charge to the Directors and Board of Commissioners of the Company for Management and Supervision Actions That Have Been Done During the Year Book 2018.*
- *Determination of the Use of Net Profit for Fiscal Year 2018.*
- *Determination of Tantiem for Fiscal Year 2018 and Remuneration for Fiscal Year 2018 for Directors and Commissioners, and Employee Bonus for Fiscal Year 2018.*
- *Establishment of a Public Accountant Firm for Audit of the Company's Financial Statements for the 2019 Financial Year.*

Keputusan RUPS

■ RUPS Laporan Persetujuan Tahunan Tahun Buku 2018

1. Agenda Pertama :
 - RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan.
 - RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018.
 - RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana dimaksud dalam laporannya No. 00435/2.1030/AU.1/03/0499-3/1/III/2019, Tanggal 29 Maret 2019.
 - RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.
 - Pengesahan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku

Resolutions of the General Meeting of Shareholders

■ Annual GMS Approval Report for Fiscal Year 2018

1. First Agenda:
 - *The GMS approves and receives an Annual Report on the Situation and Progress of the Company during the 2018 Financial Year consisting of Financial Statements, Performance Evaluation Reports and Compliance Reports.*
 - *The GMS approves and receives a Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2018 Financial Year.*
 - *The GMS validates the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2018 which contains the Consolidated Financial Position Report, the Consolidated Comprehensive Income Statement, the Consolidated Cash Flow Statement and the Consolidated Changes in the Equity Changes and their explanations audited by the Amir Abadi Jusuf Public Accountant Office, Aryanto, Mawar & Partners with the opinion "Fair without exceptions" as referred to in report No. 0435 / 2.1030 / AU.1 / 03 / 0499-3 / 1 / III / 2019, March 29, 2019.*
 - *4) The GMS gives full exemption (Volledig Acquit Et De Charge) to the Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervision in accordance with their responsibilities and actions in their respective fields that have been carried out during Fiscal Year 2018, as long as these actions do not conflict with applicable laws and regulations as well as contained in the Financial Statements that have been audited by Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan's Public Accountants.*
 - *The endorsement and release of responsibility does not relinquish legal liability to the Board of Directors and / or the Board of Commissioners if the disclosed Report is proven to violate the applicable legal provisions and procedures and / or in the*

dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.

future there is evidence of deviant actions and / or harm to the Company.

2. Agenda Kedua :

RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018.

2. *Second Agenda:*

The GMS granted the Power of Attorney to the majority Shareholders to determine the Use of Net Profit for Fiscal Year 2018.

3. Agenda Ketiga :

RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2018 dan Remunerasi Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2018.

3. *Third Agenda:*

The GMS authorizes the majority shareholders to determine Tantiem for Fiscal Year 2018 and Remuneration for Fiscal Year 2019 for Directors and Board of Commissioners as well as Bonuses for employees for Fiscal Year 2018.

4. Agenda Keempat :

RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2019.

4. *Fourth Agenda:*

The GMS authorizes the majority Shareholders to determine the Appointment of a Public Accountant Office as an auditor who will audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Reports and Compliance Reports for Fiscal Year 2019.

■ RUPS Pengesahan RKAP 2019

Sebelum pelaksanaan RUPS, Perseroan menyampaikan undangan RUPS melalui surat tercatat nomor : 21.029/M00/PLNE/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Surat Undangan RUPS RKAP 2019 PT PLN Enjiniring dengan Agenda RUPS :

1. Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019
 - Isu Strategis
 - Sasaran Utama Perseroan
 - Program Prioritas Perseroan Tahun 2019
 - Asumsi RKAP 2019
 - Proyeksi Keuangan
 - Tindak Lanjut Arahan RUPS dan Rekomendasi Dekom
 - Tindak Lanjut Penugasan Pemegang Saham SHL
2. Persetujuan dan Pengesahan KPI
 - Pemaparan dan Penjelasan KPI 2018
 - Usulan Keputusan RUPS

■ RUPS for Ratification of the 2019 RKAP

Before the GMS, the Company submitted the invitation to the GMS through registered letter number: 21,029 / M00 / PLNE / XII / 2018 dated December 21, 2018 concerning the invitation letter for the GMS 2018 PT PLN Enjiniring with the AGMS Agenda:

1. *Approval and Ratification of the Work Plan and Corporate Budget (RKAP) of 2019*
 - *Strategic Issues*
 - *Company's Main Targets*
 - *The Company's Priority Program in 2019*
 - *Assumption of the 2019 RKAP*
 - *Financial Projection*
 - *Follow-up to GMS Direction and Board of Commissioners Recommendations*
 - *Follow-up Assignment of SHL Shareholders*
2. *KPI Approval and Ratification*
 - *Exposure and Explanation of KPI 2018*
 - *Proposed GMS Resolution*

Keputusan RUPS :

■ Agenda Pertama

Setelah menilai RKAP PT Prima Layanan Nasional Enjiniring Tahun Buku 2019 yang diajukan oleh Direksi dan dilakukan pembahasan serta memperhatikan pendapat dan saran Dewan Komisaris, maka RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 dengan pokok-pokok sasaran sebagai berikut :

1. Perhitungan Laba (Rugi)
Laba (Rugi) Setelah Pajak Tahun Buku 2019 dianggarkan sebesar Rp. 134,10 Miliar.
2. Perhitungan Neraca
Neraca per 31 Desember 2019 dianggarkan ditutup dengan jumlah Aktiva/Pasiva masing-masing sebesar Rp. 1.027,67 Milliar.
3. Perhitungan Arus Kas
Saldo Kas per 31 Desember 2019 dianggarkan sebesar Rp. 314,64 Milliar
4. Perhitungan Investasi
Investasi Tahun Buku 2019 dianggarkan sebesar Rp. 46,48 Milliar, dengan Disburse sebesar Rp. 45,98 Milliar.

■ Agenda Kedua

1. RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/Key Performance Indikator (KPI) 2019 antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT Prlma Layanan Nasional Enjiniring.
2. Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) 2019 PT Prima Layanan Nasional Enjiniring terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risalah ini.

Resolution of the GMS:

■ First Agenda

After assessing the RBAP of PT Prima Jasa Nasional Eniniring for the 2019 fiscal year submitted by the Board of Directors and conducting discussions and taking into account the opinions and suggestions of the Board of Commissioners, the GMS decided to approve and ratify the 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) with the following main targets:

1. *Calculation of Profit (Loss)
Profit (Loss) After Taxation for the 2019 Fiscal Year is budgeted at Rp. 134.10 billion.*
2. *Balance Sheet Calculation
The balance sheet as of December 31, 2019 is budgeted to be closed with total assets / liabilities of Rp. 1,027.67 Billion.*
3. *Cash Flow Calculation
Cash balances as of December 31, 2019 are budgeted at Rp. 316.64 billion*
4. *Investment Calculations
Investment for the fiscal year 2019 is budgeted at Rp. 46.48 Billion, with Disburse of Rp. 45.98 billion.*

■ Second Agenda

1. *The GMS approved and ratified the 2019 Management Contract / Key Performance Indicator (KPI) between the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Shareholders of PT Prlma Layanan Nasional Enjiniring.*
2. *The Management Contract / Key Performance Indicator (KPI) 2019 of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring is an integral part of this Agreement.*

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, peran Dewan Komisaris sangat strategis. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan harus memungkinkan pengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan anggaran dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam Board Manual yang berisi Petunjuk dan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perusahaan yang secara umum mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci, tugas pokok Dewan Komisaris yang berhubungan dengan pengawasan adalah:

Board of Commissioners

The Board of Commissioners have duty to supervise the management policies, the course of management in general both regarding the company and the company business undertaken by the Board of Directors, provide advice to the Board of Directors, including oversight of the implementation of the Company Long-Term Plan, Company Work Plan and Corporate Budget, provisions of the Articles of Association, Resolutions of the General Meeting of Shareholders, as well as applicable statutory regulations for the benefit of the company and in accordance with the aims and objectives of the company. Each member of the Board of Commissioners must have high integrity, knowledge, ability and commitment to provide time in carrying out their duties. Thus, the role of the Board of Commissioners is very strategic. Therefore, the composition of the Company Board of Commissioners must enable effective, precise and fast decision makers. In addition, the Board of Commissioners is also required to be able to act independently, within the meaning of not having a conflict of interest that can interfere with their ability to carry out their duties independently and critically, both in relation to one another and relations with the Board of Directors.

THE BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Board of Commissioners has clear functions, duties and responsibilities in accordance with the articles of association and authority granted by the GMS, which are stated in the Board Manual which contains the Work Guidelines and Work Procedures for the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Board of Commissioners is responsible to shareholders in terms of overseeing the policies of the Board of Directors regarding the Company's operations which generally refer to the approved business plan, as well as ensuring compliance with all applicable laws and regulations.

In details, the main duties of the Board of Commissioners relating to supervision are:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.¹
 2. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:²
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian dan akuntabilitas.
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
 3. Pengawasan oleh Komisaris dilakukan dengan cara:
 - a. Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan di Perusahaan.
 - b. Melakukan kunjungan ke unit kerja/pembangkit/proyek tertentu, baik dengan (atau tanpa) pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya.
 - c. Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Direksi.
1. *The Board of Commissioners is in charge of supervising management policies, general management of both the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors as well as providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company's Long-Term Plan, the Company's Work Plan and Budget as well as the provisions of the Articles of Association and Decisions. General Meeting of Shareholders, as well as applicable laws and regulations to the Company interests and in accordance with the aims and objectives of the Company.*
 2. *Each member of the Board of Commissioners in carrying out its duties must be:*
 - a. *Complying with the Articles of Association and the applicable laws and regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence and accountability.*
 - b. *Having a good faith, a prudence and a full responsibility in carrying out supervisory duties and providing advices to the Board of Directors for the benefit of the Company and in accordance to the aims and objectives of the Company.*
 - c. *The Board of Commissioners/Supervisory Board is responsible and authorized to supervise management policies, the course of management in general, both regarding the Company and the Company's business and provide advices to the Board of Directors.*
 3. *Supervision by the Commissioners is carried out by:*
 - a. *Request a written information to the Board of Directors regarding a problem in the Company.*
 - b. *Visit certain work units / generators / projects, either with (or without) prior notification to the Board of Directors.*
 - c. *Provide responses on periodic reports from the Board of Directors.*

Berdasarkan Board Manual Perusahaan, pembagian kerja diantara anggota Dewan Komisaris diatur sendiri oleh Perusahaan dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris dibagi atas bidang tugas sebagai berikut.

Based on the Company's Manual Board, the division of works among members of the Board of Commissioners is regulated by the Company and for the smooth running of its duties, the Board of Commissioners can be assisted by a Secretary of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners divided into the following areas of duty.

TABEL PEMBAGIAN BIDANG TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris selalu mengawasi kebijakan yang diambil Direksi berdasarkan laporan yang diterima atau temuan langsung di lapangan. Untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan penerapan kebijakan GCG tersebut, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan dengan tugasnya adalah melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

TABLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS DIVISION OF DUTIES

The Board of Commissioners always supervises the policies taken by the Board of Directors based on the reports received or direct field findings. To assist the duties of the Board of Commissioners in implementing the GCG policy, the Board of Commissioners has formed an Audit Committee and a Risk Management Committee which are stipulated in a Decree with the task of monitoring, evaluating and providing recommendations to the Board of Commissioners.

Tabel Pembagian Bidang Tugas Dewan Komisaris

Table of Division of The Board of Commisioners Duties

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Bidang Tugas <i>Task Field</i>	
Tumpal M. Simarmata	Komisaris Utama <i>Main Commissioner</i>	1	Bertanggung jawab mengkoordinasikan pengawasan perusahaan dan tugas Dewan Komisaris <i>Being responsible for coordinating company supervision and the duties of the Board of Commisioners.</i>
		2	Mengundang, memimpin rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, dan menandatangani dokumen Perseroan antara lain Risalah RUPS, Laporan Manajemen Tahunan dll. <i>Inviting, chairing the Board of Commissioners' meetings with the Board of Directors, and signing the Company's documents including Minutes of the General Meeting of Shareholders, Annual Management Reports, etc.</i>
		3	Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan perseroan; Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta perubahan dan tambahannya; laporan berkala, laporan-laporan lainnya dari Direksi, serta persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan. <i>Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the company's development plan; The Company's Annual Work Plan and Budget, as well as changes and additions; periodic reports, other reports from the Board of Directors, as well as other issues that are considered important for the management of the Company.</i>

		4	<p>Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta menyampaikan hasil penelitian dan pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p><i>Overseeing the implementation of the Company's Work Plan and Budget as well as submit the result of their research and opinions to the General Meeting of Shareholders.</i></p>
		5	<p>Mengikuti perkembangan Perseroan.</p> <p><i>Following the development of the Company.</i></p>
		6	<p>Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p><i>Performing other tasks determined by the General Meeting of Shareholders.</i></p>
		7	<p>Melakukan pengawasan secara keseluruhan terhadap KPI Manajemen.</p> <p><i>Carrying out overall supervision of the Management KPI.</i></p>
		8	<p>Meneliti dan menelaah laporan berkala dan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.</p> <p><i>Doing research and review the periodic and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the Annual Report.</i></p>
Julius Bobo	Komisaris <i>Commissioner</i>	1	<p>Bertanggung jawab utamanya pada bidang keuangan, Pengawasan Internal, bidang pemasaran dan Komite Audit, meliputi kegiatan antara lain sebagai berikut:</p> <p>(a) Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perusahaan</p> <p>(b) Mengawasi pelaksanaan pengawasan internal, memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan eksternal</p> <p>(c) Mengawasi organisasi perusahaan dan strategi pengembangan SDM</p> <p>(d) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.</p> <p><i>Mainly responsible for the financial sector, Internal Supervision, Marketing and Audit Committee, including the following activities:</i></p> <p>(a) <i>Supervising the implementation of the Annual Work Plan and Budget including Financial Statements and Company Performance Reports.</i></p> <p>(b) <i>Supervising the implementation of internal supervision, ensure the effectiveness of internal and external control systems.</i></p> <p>(c) <i>Supervising company organizations and HRD development strategies.</i></p> <p>(d) <i>Identifying matters that require the attention fo the Board of Commissioners.</i></p>
		2	<p>Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan perseroan; Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta perubahan dan tambahannya; laporan berkala; laporan-laporan lainnya dari Direksi, serta persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan.</p> <p><i>Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the company's development plan; The Company's Annual Work Plan and Budget, as well as changes and additions; periodic reports, other reports from the Board of Directors, as well as other issues considered important for the management of the Company.</i></p>
		3	<p>Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penelitian dan pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p><i>Overseeing the implementation of the Company's Work Plan and Budget as well as submit the result of their research and opinions to the General Meeting of Shareholders.</i></p>

		4	Melakukan monitoring terhadap KPI bidang administrasi, keuangan dan SDM <i>Monitoring KPI in the fields of administration, finance and HR.</i>
		5	Mengikuti perkembangan perusahaan. <i>Following the company development.</i>
		6	Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. <i>Performing other tasks determined by the General Meeting of Shareholders.</i>
Djoko Prasetyo	Komisaris Commissioner	1	<p>Bertanggung jawab utamanya pada Bidang Enjiniring, Pengembangan Usaha dan Investasi, Komite Manajemen Risiko dan GCG dan sasaran serta issue strategis lainnya, meliputi kegiatan antara lain:</p> <p>(a) Mengawasi pelaksanaan kegiatan Enjiniring, termasuk proses produksi dan pengendalian mutu</p> <p>(b) Mengawasi penyiapan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahunan</p> <p>(c) Mengawasi penyiapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan secara berkala melaksanakan review dan mengusulkan updating jika diperlukan.</p> <p>(d) Mengawasi pelaksanaan pengembangan usaha, rencana investasi termasuk sasaran strategis dan issue-issue strategis lainnya.</p> <p>(e) Mengawasi organisasi perusahaan dan strategi pengembangan SDM</p> <p>(f) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris</p> <p><i>Mainly responsible for Engineering, Bussiness Development and Investment, the Risk Management Committee and GCG and other strategic goals and issues, including activities below :</i></p> <p>(a) <i>Supervising the implementation of engineering activities, including the production process and quality control.</i></p> <p>(b) <i>Supervising the preparation of the Annual Corporate Budget Work Plan.</i></p> <p>(c) <i>Supervising the preparation of the Company's Long Term Plan and periodically carry out reviews and propose updating if needed.</i></p> <p>(d) <i>Overseeing the implementation of business development, investment plans including strategic targets and other strategic issues.</i></p> <p>(e) <i>Supervising company organizations and HR development strategies.</i></p> <p>(f) <i>Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners.</i></p>
		2	<p>Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan perseroan; Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta perubahan dan tambahannya; laporan berkala; laporan-laporan lainnya dari Direksi, serta persoalan lainnya yang dianggap penting pengurusan perusahaan.</p> <p><i>Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the company's development plan; The Company's Annual Work Plan and Budget, as well as changes and additions; periodic reports, other reports from the Board of Directors, as well as other issues considered important for the management of the Company.</i></p>
		3	<p>Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penelitian dan pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p><i>Overseeing the implementation of the Company's Work Plan and Budget and convey the result of the research and its opinions to the General Meeting of Shareholders.</i></p>
		4	<p>Melakukan monitoring terhadap KPI Bidang Enjiniring, Pengembangan Usaha serta Organisasi dan Pengembangan SDM.</p> <p><i>Monitoring KPI in the fields of administration, finance and HR.</i></p>

		5	Mengikuti perkembangan perusahaan. <i>Following the company development.</i>
		6	Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. <i>Performing other tasks determined by the General Meeting of Shareholders.</i>
Marzuqi	Komisaris Commissioner	1	Bertanggung jawab utamanya dalam Bidang Pemasaran, Bidang Pengusahaan, Komite Audit dan sasaran serta Issue Strategis lainnya, meliputi kegiatan antara lain: (a) Mengawasi pelaksanaan pemasaran termasuk pemasaran dan pricing policy (b) Mengawasi pelaksanaan pengusahaan (c) Mengawasi penyiapan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahunan (d) Mengawasi penyiapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan secara berkala melaksanakan review dan mengusulkan updating jika diperlukan. (e) Mengawasi Organisasi perusahaan dan pengembangan SDM (f) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris <i>Mainly responsible in the Marketing Area, Business Area, Audit Committees and other strategic objectives and issues including below :</i> (a) <i>Supervising the implementation of marketing including marketing and pricing policy.</i> (b) <i>Supervising the implementation of business.</i> (c) <i>Supervising the preparation of the Annual Corporate Budget Work Plan.</i> (d) <i>Supervising the preparation of the Company's Long Term Plan and Periodically carry out reviews and propose updating if necessary.</i> (e) <i>Supervising company organization and HR development.</i> (f) <i>Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners.</i>
		2	Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan perseroan, serta perubahan dan tambahannya; laporan berkala; laporan-laporan lainnya dari Direksi, serta persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan. <i>Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the company's development plan; The Company's Annual Work Plan and Budget, as well as changes and additions; periodic reports, other reports from the Board of Directors, as well as other issues considered important for the management of the Company.</i>
		3	Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penelitian dan pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham. <i>Overseeing the implementation of the Company's work Plan and Budget and convey the result of the research and its opinions to the General Meeting of Shareholders.</i>
		4	Melakukan monitoring terhadap KPI Bidang Pemasaran dan Pengusahaan, serta Organisasi dan Pengembangan SDM. <i>Monitoring KPI in the fields of marketing and business, as well as organization and human resource development.</i>
		5	Mengikuti perkembangan perusahaan <i>Following the company development.</i>
		6	Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham <i>Performing other tasks determined by the General Meeting of Shareholders.</i>

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas terbuka, maka dasar penetapan kriteria Dewan Komisaris PLN Enjiniring sesuai ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Seluruh ketentuan dimaksud telah tercantum di dalam Anggaran dasar dan *board manual* PLN Enjiniring. Adapun kriteria anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut.

1. Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. Dinyatakan Pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan di bidang usaha perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau

THE BOARD OF COMMISSIONERS CRITERIA

As a subsidiary of PT PLN (Persero) which is a State Owned Enterprise in the form of Public Limited Liability Company, the basis of determination on the criteria for the Board of Commissioners of PLN Enjiniring is in accordance to the Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. All of the provisions referred in that law have been stated in the Articles of Association and the PLN Enjiniring board manual. The criteria for members of the Board of Commissioners are as follow;

1. *A party who can be appointed as a member of the Board of Commissioners is an individual who is capable of taking legal actions, except within 5 (five) years prior to his appointment:*
 - a. *Declared bankrupt;*
 - b. *Become a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners or a member of the Supervisory Board who have been found guilty of causing a Company to be declared bankrupt; or*
 - c. *Convicted for committing a crime that caused some losses to the state finances and/or State Owned Enterprises finances and/or related to the financial sector.*
2. *The appointment of members of the Board of Commissioners is carried out by considering integrity, dedication, understanding of the company's management issues related to a management function, having knowledge in the company's business, and being able to provide sufficient time to carry out their duties and other requirements based on applicable law and regulations, in addition to meeting the criteria as referred in number 1.*
3. *Other requirements for members of the Board of Commissioners, namely:*
 - a. *They are not involved as administrators of political parties and/or candidates for legislative members and/or legislative*

- anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
- b. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
 - c. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
 - d. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;
 - e. Bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, batal demi hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
 5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
 6. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 7. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para pemegang saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.
- members. Candidates for legislative or legislative members consist of candidates/ members of the House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD), Provincial People's Representative Council (DPRD Provinsi), Regional People's Representative Council (DPRD Kabupaten/ Kota);*
- b. They are not a candidate for a regional leader and/or a regional leader*
 - c. They do not serve as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board of the State Owned Enterprises concerned for 2 (two) consecutive terms;*
 - d. Physically and mentally health (currently not suffering from a disease that can detain the performance of their duties as a member of the Board of Commissioners / Supervisory Board), as evidenced by a health certificate from a Doctor;*
 - e. For prospective candidates from the technical ministry or other government agencies, it is required to have a letter of recommendation from the ministry/agencies concerned.*
- 4. The appointment of members of the Board of Commissioners who do not meet the requirements as referred in number 1 and 2 above, is null and void by the time the other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors find out that these requirements have not been fulfilled.*
 - 5. The Appointment of the members of the Board of Commissioners does not coincide with the appointment of the members of the Board of Directors.*
 - 6. The members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders.*
 - 7. The members of the Board of Commissioners are appointed from among the candidates proposed by the shareholders and the nomination is binding to the General Meeting of Shareholders.*

BOARD MANUAL DEWAN KOMISARIS

Pedoman kerja Dewan Komisaris diatur dalam Board Manual. Board Manual antara lain berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris, yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan harus dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan. Dengan adanya Board Manual diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi, selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Adapun isi dari Board Manual sebagai berikut.

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Direksi;
- Bab III : Dewan Komisaris;
- Bab IV : Tata Laksana Wewenang Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris;
- Bab V : Tata Laksana Wewenang Direksi dengan Persetujuan RUPS Berdasarkan Rekomendasi Dewan Komisaris .

Beberapa pokok pedoman kerja Dewan Komisaris yang diatur dalam Board Manual dijabarkan sebagai berikut.

Wewenang Dewan komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan Verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan perusahaan.
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh perusahaan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan /atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan.

BOARD MANUAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners work guidelines are regulated in the Board Manual. The Board Manual, among others, contains guidelines for the work procedures of the Board of Commissioners, which explains the stages of activities in a structured, systematic, easy to understand manner and must be carried out consistently, so that it can be a reference for the Board of Commissioners in carrying out their respective duties to achieve the Company Vision and Mission. With the Board Manual it is expected that high work standards will be achieved in line with the principles of GCG.

The contents of the Board Manual are as follows.

- *Chapter I : Introduction;*
- *Chapter II : Board of Directors;*
- *Chapter III : Board of Commissioners;*
- *Chapter IV : Procedure for Board of Directors Authority with Board of Commissioners Approval;*
- *Chapter V : Procedure for Board of Directors Authority with General Meeting of Shareholders Approval Based on the Recommendations of the Board of Commissioners.*

Some of the work guidelines for the Board of Commissioners set out in the Board Manual are as follows.

Board of Commissioners Authority

In carrying out its duties, the Board of Commissioners has the authority to:

1. *Look at books, letters, and other documents, check the cash or treasury for verification and other securities and check the company assets.*
2. *Enter the lands, buildings and offices that are used by the company.*
3. *Request clarification from the Directors and/or other officials regarding all matters relating to the Company management.*

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi. 5. Meminta Direksi dan /atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris. 6. Mengangkat Sekretaris Dewan komisaris jika dianggap perlu. 7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan. 8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. 9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban perusahaan, jika dianggap perlu. 10. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan. 11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan. 12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan / atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Know all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors. 5. Request the Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners meeting. 6. Appoint the Board of Commissioners Secretary if deemed necessary. 7. Temporarily dismiss members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company Articles of Association. 8. Form other committees besides the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the company capabilities. 9. Use experts for certain things and within a certain period at the Company expense, if deemed necessary. 10. Take care of the company in certain circumstances for a certain period in accordance with the provisions of the Company Articles of Association. 11. Attend the Board of Directors meetings and provide views on matters discussed. 12. Carry out other supervisory authorities as long as they do not conflict with the statutory regulations, the Articles of Association, and/or Resolutions of the General Meeting of Shareholders. |
|--|--|

Kewajiban Dewan komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, maka Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Board of Commissioners Obligations

The Board of Commissioners obligations are as follows:

1. Give advice to the Directors in carrying out the Company management.
2. Research and analyze and sign the Company Long-Term Plan and Company Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Company Articles of Association.

3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJP dan RKAP.
 4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
 5. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala-gejala menurunnya kinerja Perseroan.
 6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menanda-tangani laporan tahunan.
 7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai laporan tahunan, apabila diminta.
 8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
 9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan perseroan lainnya.
 10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 12. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektifitas penerapan manajemen risiko.
 13. Mengawasi dan menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif.
 14. Mengawasi hal-hal terkait keterbukaan dan kerahasiaan informasi.
 15. Bertindak sesuai etika jabatan.
3. *Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Company Long-Term Plan and Company Work Plan and Budget regarding the reasons for the Board of Commissioners to sign the RJPP (Company Long-Term Plan) and RKAP (Company Work Plan and Budget).*
 4. *Follow the development of the Company activities, provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding any issues deemed important to the management of the company.*
 5. *Report immediately to the General Meeting of Shareholders if there are symptoms of a decline in company performance.*
 6. *Research and analyze periodic report and annual report prepared by the Directors and sign the Annual Report.*
 7. *Provide explanations, opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report, if requested.*
 8. *Make minutes of the Board of Commissioners meeting and keep the copy.*
 9. *Report to the company regarding ownership of its shares and/or its family in the company and other companies.*
 10. *Provide report on the supervisory tasks that have been carried out during the recent financial year to the General Meeting of Shareholders.*
 11. *Carry out other obligations in the context of supervisory duties and provide advices, as long as it does not conflict with statutory regulations, Articles of Association and/or Resolutions of the General Meeting of Shareholders.*
 12. *Oversee and provide advices to the Board of Directors on a regular basis regarding the effectiveness of the application of risk management.*
 13. *Oversee and establish effective internal control systems.*
 14. *Oversee matters related to information disclosure and confidentiality.*
 15. *Act in accordance with the ethics of the position.*

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Seluruh Dewan Komisaris PLN Enjiniring telah memenuhi kriteria dan ketentuan dalam Fit and Proper Test berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait, termasuk ketentuan tentang Komisaris Independen.

Assessment of Competency and Compliance

All of the Board of Commissioners PLN Enjiniring have fulfilled the criteria and provisions in the Fit and Proper Test based on the Limited Liability Company Law and GCG provisions, as well as other relevant rules and regulations, including the provisions regarding Independent Commissioners.

Tabel Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Table of Assessment of Capability and Compliance

Nama <i>Name</i>	Pelaksana <i>Administrator</i>	Hasil <i>Results</i>
Tumpal M. Simarmata	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>
Julius Bobo	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>
Djoko Prasetyo	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>
Marzuqi	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan. Pada Tahun 2019, Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang yang seluruhnya merupakan Komisaris Independen, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai.

Numbers and Composition of The Board of Commissioners

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. Per-01/MBU/2011, the composition of the Board of Commissioners must enable the effective, precise and fast decision maker and can act independently within the meaning of not having a conflict of interest. In 2018, the Board of Commissioners totaled 4 (four) people, all of whom were Independent Commissioners, consisting of 1 (one) President Commissioner, 3 (three) Commissioners. All members of the Board of Commissioners have adequate integrity, competence and reputation.

Tabel Komposisi Dewan Komisaris

Table of Board of Commissioners Composition

No	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Domisili <i>Domicile</i>	Tanggal Pengangkatan <i>Appointment Date</i>	Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>		
1	Tumpal M. Simarmata	Komisaris Utama	Bandung	-	Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris Utama tanggal 22 Juni 2016	-	RUPS Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris Utama tanggal 22 Juni 2016 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 28 tanggal 19 Desember 2016
				-	<i>Acting President Commissioner dated June 22, 2016</i>	-	<i>AGM Appointment of Acting President Commissioner on June 22, 2016 and Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 28 dated December 19, 2016.</i>
				-	Anggota Dewan Komisaris tanggal 17 Juli 2017	-	RUPS Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 17 Juli 2017 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 1 tanggal 4 September 2017.
				-	<i>Member of Board of Commissioner dated July 17, 2017</i>	-	<i>AGM Dismissal and Appointment of Board of Commissioner Members on July 17, 2017 and Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 1 dated September 4, 2017</i>
2	Julius Bobo	Komisaris	Bekasi	-	Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris Utama tanggal 22 Juni 2016	-	RUPS Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris Utama tanggal 22 Juni dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 28 tanggal 19 Desember 2016
				-	<i>Acting President Commissioner dated June 22, 2016</i>	-	<i>AGM Appointment of Acting President Commissioner on June 22, 2016 and Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 28 dated December 19, 2016.</i>
				-	Anggota Dewan Komisaris tanggal 17 Juli 2017	-	RUPS Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 17 Juli 2017 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 1 tanggal 4 September 2017.
				-	<i>Member of Board of Commissioner dated July 17, 2017</i>	-	<i>AGM Dismissal and Appointment of Board of Commissioner Members on July 17, 2017 and Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 1 dated September 4, 2017</i>

3	Djoko Prasetyo	Komisaris	Jakarta Selatan	-	Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris Utama tanggal 22 Juni 2016	-	RUPS Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris Utama tanggal 22 Juni dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 28 tanggal 19 Desember 2016
				-	<i>Acting President Commissioner dated June 22, 2016</i>	-	<i>AGM Dismissal and Appointment of Board of Commissioner Members on July 17, 2017 and Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 1 dated September 4, 2017</i>
				-	Anggota Dewan Komisaris tanggal 17 Juli 2017	-	RUPS Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 17 Juli 2017 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 1 tanggal 4 September 2017.
				-	Member of Board of Commissioner dated July 17, 2017	-	AGM Dismissal and Appointment of Board of Commissioner Members on July 17, 2017 and Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 1 dated September 4, 2017
4	Marzuqi	Komisaris	Jakarta Selatan	-	17 Juli 2017	-	RUPS Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 17 Juli 2017 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 1 tanggal 4 September 2017
				-	July 17, 2017	-	AGM Dismissal and Appointment of Board of Commissioner Members on July 17, 2017 and Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 1 dated September 4, 2017

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

PLN Enjiniring memiliki Pedoman *Good Corporate Governance* yang antara lain mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris. Berdasarkan pedoman tersebut, komposisi Dewan Komisaris hendaknya sedemikian rupa sehingga memungkinkan diambilnya keputusan secara efektif, tepat, cepat, dan independen.

Komposisi Dewan Komisaris merupakan bauran yang tepat antara pengalaman manajerial dan kepemimpinan, pendidikan yang memadai dan sesuai dengan tanggung jawab yang diemban, serta memiliki karakter yang baik. Perusahaan juga senantiasa berupaya agar komposisi Dewan Komisaris memiliki keberagaman dalam usia, pendidikan, pengalaman kerja dan keahlian.

Pada periode 2019, keberagaman komposisi Dewan Komisaris dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Policy on Diversity in the Composition of the Board of Commissioners

PLN Enjiniring has Guidelines of *Good Corporate Governance* which among others regulate the diversity of the composition of the Board of Commissioners. Based on these guidelines, the composition of the Board of Commissioners should be such that it allows decisions to be made effectively, accurately, quickly and independently.

The composition of the Board of Commissioners is an appropriate mix between managerial and leadership experience, adequate education and in accordance with the responsibilities assumed, and has good character. The company also strives to ensure that the composition of the Board of Commissioners has diversity in age, education, work experience and expertise.

In 2019, the diversity of the composition of the Board of Commissioners can be seen as in the table below:

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Table of Diversity in The Composition of The Board of Commissioners

Periode Pengangkatan tahun 2016					
Nama Dewan Komisaris	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
<i>Name of the Board of Commissioners</i>	<i>Age</i>	<i>Sex</i>	<i>Education</i>	<i>Work Experience</i>	<i>Expertise</i>
Tumpal Simarmata	59 tahun	Laki-laki	S1 Institut Teknologi Bandung	Sebelum menjadi PLT. Komisaris Utama PLN Enjiniring, beliau menjadi Kepala Divisi Konstruksi PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan, Kepala Divisi dan Konstruksi PT PLN (Persero), General Manajer PT PLN (Persero) UIP VII, General Manajer PT PLN (Persero) UIP IV	Teknik Mesin
	<i>59 years old</i>	<i>Male</i>	<i>S1 Bandung Institute of Technology</i>	<i>Before becoming a PLT of PLN Enjiniring Chief Commissioner, he was Head of Construction Division of PT PLN (Persero) Kalimantan Region, Head of Division and Construction of PT PLN (Persero) , General Manager of PT PLN (Persero) UIP VII, General Manager of PT PLN (Persero) UIP IV.</i>	<i>Mechanical Engineering</i>

Djoko Prasetyo	61 tahun	Laki-laki	PhD University of New South Wales, Australia	Saat ini beliau adalah Advisor Consulting Firm PT Rekadaya Elektriika Consult. Sebelumnya beliau pernah menjadi Konsultan Independen World Bank Jakarta dan Konsultan Independen Asia Development Bank	Electrical Engineer
	<i>61 years old</i>	<i>Male</i>		<i>Currently he is the Advisor Consulting Firm of PT Rekadaya Elektriika Consult. Previously he was an independent Consultant of Jakarta World Bank and Independent Consultant of Asia Development Bank.</i>	<i>Electrical Engineer</i>
Julius Bobo	58 tahun	Laki-laki	Magister Manajemen Jurusan Sumber Daya Manusia dari Universitas Satyagama	Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum KOPERASI BERIKET Bara Nusantara, Ketua Bidang MIGAS YPEI (Yayasan Peduli Energi Indonesia), Ketua Umum POROS DAERAH (2009-sekarang), Sekjen MEHI (Masyarakat Energi Hijau Indonesia) (2005-sekarang) dan anggota IKAL LEMHANAS (2001-sekarang). Dari tahun 2009, beliau juga sebagai Tenaga Ahli DPDRI (Dewan Perwakilan Daerah).	Manajemen SDM
	<i>58 years old</i>	<i>Male</i>	<i>Master of Management Department of Human Resources from the University Satyagama</i>	<i>Currently he serves as a General Chairperson of Bara Nusantara KOPERASI BERIKET , Chairman of the YPEI Oil and Gas Sector (Yayasan Peduli Energi Indonesia), General Chairman of the POROS DAERAH (2009 - Present), Secretary General of MEHI (Masyarakat Energi Hijau Indonesia) (2005-present) and member of IKAL LEMHANAS (2001-present). From 2009, he was also an expert of DPD RI.</i>	<i>HR Management</i>
Marzuqi	48 Tahun	Laki-laki	Magister Manajemen di STIE IPWI Jakarta	Beliau sempat menjadi Tenaga Ahli di DPR-RI kurang lebih selama 12 tahun, dilanjutkan menjadi tenaga ahli di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) hampir 7 tahun. Begitu juga di lembaga Beliau pernah menjadi wakil sekretaris Yayasan Universitas Sunan Giri Surabaya serta Direktur Lembaga Tunas Mandiri, sebuah lembaga yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia. Dan sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang dipercaya menjadi Komisaris PT. PLNE (Prima Layanan Nasional Enjiniring).	
	<i>48 years old</i>	<i>Male</i>	<i>Master of Management at STIE IPWI Jakarta</i>	<i>He had been an expert in the DPR RI for approximately 12 years, continued to become an expert at the Republic of Indonesia Supreme Audit Agency (BPK RI) for almost 7 years. Likewise at the institution he was the deputy secretary of the Sunan Giri University Foundation Surabaya and Director of the Tunas Mandiri Institute, an institution engaged in the development of human resources. And since August 2017 until now he has been trusted to be a Commissioner of PT PLNE (Prima Layanan Nasional Enjiniring)</i>	

Komisaris Independen

Anggota Dewan Komisaris PLN Enjiniring telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011. Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris harus merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan saat ini adalah 4 (empat) orang, yang 3 (tiga) orang diantaranya atau sama dengan 75% anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Dengan demikian, komposisi tersebut juga telah memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN mengenai Komisaris Independen.

■ Kriteria Penentuan Komisaris Independen

1. RUPS/Pemegang Saham menetapkan Anggota Komisaris Independen paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggota Dewan Komisaris secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya. Komisaris Independen memiliki kompetensi dibidang auditing, keuangan dan akuntansi.
2. Anggota Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Anggota Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

Independent Commissioner

Members of the Board of Commissioners of PLN Enjiniring have met the number, composition, criteria and independence in accordance with the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. Per-01/MBU/2011. The members of the Board of Commissioners must be Independent Commissioners at least 20% (twenty percent) of it. The number of members of the Company's Board of Commissioners is currently 4 (four) people, of which 3 (three) people or equal to 75% of the members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners. Thus, this composition has also fulfilled the regulations set by the Ministry of State Owned Enterprises regarding Independent Commissioners.

■ Appointment Criteria of Independent Commissioner

1. *The General Meeting of Shareholders / Shareholders determines the members of the Independent Commissioners at least 20% (twenty percent) of the members of the Board of Commissioners in their appointment decisions explicitly. Independent Commissioners have competencies in auditing, financing and accounting.*
2. *Member of Independent Commissioner is a Member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership and / or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors and / or controlling shareholders or a relationship with the Company, which may affect their ability to act independently.*
3. *The number of Independent Commissioners must be able to ensure that the supervisory mechanism runs effectively and runs in accordance with laws and regulations. One of the Independent Commissioners must have an accounting or finance background.*

■ Pernyataan Komisaris Independen

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, yang meliputi:

- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

■ Statement of the Independent Commissioner

Affiliations between members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Controlling Shareholders, which includes:

- Affiliations between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors.*
- Affiliations between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.*
- Affiliations between members of the Board of Directors and the Major and / or controlling Shareholders.*
- Affiliations between members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Commissioners; and*
- Affiliations between members of the Board of Commissioners and the Major and / or controlling shareholders.*
- Affiliations between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Controlling Shareholders, can be seen in the table below:*

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Table of Affiliation of The Board of Commissioners

Komisaris <i>Commissioners</i>	Hubungan Keuangan, Keluarga, dan Manajemen Komisaris <i>Financial, Family and Management Relations of the Commissioners</i>												Hubungan Manajemen <i>Management Relations</i>	
	Hubungan Keuangan Dengan <i>Financial Relations with</i>													
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direktur <i>Directors</i>		Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholders</i>		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direktur <i>Directors</i>		Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholders</i>			
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No		
Tumpal M. Simarmata		√		√		√		√		√		√		√
Julius Bobo		√		√		√		√		√		√		√
Djoko Prasetyo		√		√		√		√		√		√		√
Marzuqi		√		√		√		√		√		√		√

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan keluarga di PLN Enjiniring dan perusahaan lain, serta telah menandatangani Pakta Integritas. Hal ini merupakan bentuk komitmen Dewan Komisaris dalam menghindari aktivitas yang berpotensi benturan kepentingan.

The Board of Commissioners has held a Special Register that contains the share ownership of members of the Board of Commissioners and family in PLN Enjiniring and other companies, and has signed an Integrity Pact. This is a form of the Board of Commissioners commitment to avoid activities that have the potential for a conflict of interest.

Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki saham, baik di PLN Enjiniring maupun di perusahaan lainnya. Kepemilikan saham Dewan Komisaris sebagai berikut.

The Board of Commissioners does not have shares, either in PLN Enjiniring or in other companies. The Board of Commissioners share ownership is as follows.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Table of Share Ownership of the Board of Commissioners

Nama	Kepemilikan Saham di PLN Enjiniring	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain
<i>Name</i>	<i>Share Ownership at PLN Enjiniring</i>	<i>Share Ownership in Other Companies</i>
Tumpal M. Simarmata	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>
Julius Bobo	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>
Djoko Prasetyo	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>
Marzuqi	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Management of Conflicts of Interest of the Board of Commissioners

Untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan yang disebabkan adanya rangkap jabatan, setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas yang berisikan keterangan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewan Komisaris tidak akan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pakta Integritas tersebut disimpan dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

To minimize the occurrence of conflicts of interest caused by concurrent positions, each member of the Board of Commissioners is required to sign an Integrity Pact containing information that in carrying out their duties, members of the Board of Commissioners shall not do things that could cause a conflict of interest. The Integrity Pact shall be kept and administered by the Board of Commissioners Secretary.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2019

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris Perusahaan terus proaktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dan memberikan masukan kepada Direksi. Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris tentunya mengacu pada implementasi atas rekomendasi yang telah diberikan Dewan Komisaris terhadap Direksi maupun melalui komite-komite yang dibentuk. Pada periode Januari sampai dengan Desember 2019, Dewan Komisaris melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 14 kali yang diadakan pada setiap bulan.
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 16 kali yang diadakan pada setiap bulan.
3. Dewan Komisaris telah mengikuti RUPS sebanyak 2 kali.
4. Dewan Komisaris telah menerbitkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan 2019.
5. Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan bisnis atau proyek PLN Enjiniring.
6. Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan terhadap hal-hal yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap persoalan strategis, serta efektifitas pelaksanaan internal kontrol dan GCG di perusahaan.

The Implementation of the Board of Commissioners Duties in 2019

As part of their duties and responsibilities, the Company Board of Commissioners continues to proactively monitor the performance of the Board of Directors and provide input to the Board of Directors. The form of supervision carried out by the Board of Commissioners certainly refers to the implementation of the recommendations given by the Board of Commissioners to the Board of Directors and through established committees. In the period from January to December 2019, the Board of Commissioners did the following.

1. *The Board of Commissioners has held 14 Coordination Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors each month.*
2. *The Board of Commissioners has held 16 Internal Meetings of the Board of Commissioners each month.*
3. *The Board of Commissioners has attended the General Meeting of Shareholders 2 time.*
4. *The Board of Commissioners has issued the Annual Supervision Report of the Board of Commissioners 2019.*
5. *The Board of Commissioners has conducted a working visit related to the implementation of PLN Enjiniring business or project.*
6. *The Board of Commissioners has reviewed matters that require the Board of Commissioners approval.*
7. *The Board of Commissioners has carried out supervision and monitoring of strategic issues, as well as the effectiveness of the implementation of internal control and GCG in the company.*

Rapat Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Meetings

Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Rapat Intern Dewan Komisaris yang hanya dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris;
2. Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi.

Sepanjang tahun 2019, Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

The Board of Commissioners Meetings are meetings held by the Board of Commissioners. The Board of Commissioners Meetings consist of:

1. Internal Meeting of the Board of Commissioners which is only attended by members of the Board of Commissioners;
2. Meetings of the Board of Commissioner, inviting the Board of Directors.

Throughout 2019, the Agenda, Date and Participants of the Board of Commissioners Meetings are as follow.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Table of Attendance and Frequency of The Board of Commissioners Meeting

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Rapat Internal Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi		
		<i>Internal Meeting of the Board of Commissioner</i>			<i>Joint Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors</i>		
		Jumlah dan (%) Kehadiran <i>Number and (%) Attendance</i>			Jumlah dan (%) Kehadiran <i>Number and (%) Attendance</i>		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
		<i>Number of Meeting</i>	<i>Number of Attendance</i>		<i>Number of Meeting</i>	<i>Number of Attendance</i>	
Tumpal M. Simarmata	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	16	15	93%	14	12	85%
Julius Bobo	Komisaris <i>Commissioner</i>	16	16	100%	14	14	100%
Djoko Prasetyo	Komisaris <i>Commissioner</i>	16	15	93%	14	14	100%
Marzuqi	Komisaris <i>Commissioner</i>	16	16	100%	14	14	100%

Rapat Internal Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Internal Meetings

Dewan Komisaris mengadakan rapat intern Dewan Komisaris dengan ketentuan:

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
2. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh Anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.
4. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
5. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
6. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
8. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat memutuskan hasil rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 3.7 angka 2 di atas, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.
9. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
10. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan suatu alternatif dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang

The Board of Commissioners holds an internal meeting of the Board of Commissioners with the following conditions:

1. *All decisions of the Board of Commissioners are taken at the Board of Commissioners meeting.*
2. *Decisions can also be made outside the Board of Commissioners meeting as long as all the members of the Board of Commissioners agree on the method and material to be decided.*
3. *Meetings of the Board of Commissioners are valid and have the right to make binding decisions if they are attended or represented by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the members of the Board of Commissioners.*
4. *In the other agenda, the meeting of the Board of Commissioners is not entitled to make decisions unless all members of the Board of Commissioners or their authorized representatives attend and approve the addition of the agenda of the meeting.*
5. *All decisions in the Board of Commissioners meeting are taken by deliberation to reach consensus.*
6. *If no agreements is reached through deliberation, the decisions of the Board of Commissioners meeting shall be adopted by an ordinary majority vote.*
7. *Each member of the Board of Commissioners is entitled to cast 1 (one) vote plus 1 (one) vote for the member of the Board of Commissioners he/she represent.*
8. *If the number of votes agreeing and disagreeing is the same, then the chairman of the meeting will decide the result of the meeting, with due observance of the provisions concerning accountability as referred in point 3.7 number 2 above, except for individuals, meeting decisions shall be made by closed voting.*
9. *A blank vote (abstention) is deemed to agree with the proposal submitted at the meeting.*
10. *In the event that more than 2 (two) alternatives are proposed and the voting result has not received an alternative with a vote of more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the number of votes cast, a re-election of the 2 (two) proposals that*

terhadap 2 (dua) usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

11. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
12. Sepanjang tahun 2019, Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Internal Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

have received votes the most so that one of the proposals gets more than ½ (one half) of the total votes cast.

11. *Votes that are invalid are deemed non-existent and are not counted in determining the number of votes cast in the meeting.*
12. *Throughout 2019, the Agenda, Dates and Participants of the Board of Commissioners Internal Meetings are as follow.*

Tabel Rapat Internal Dewan Komisaris

Board of Commissioners Internal Meetings Table

No	Tanggal <i>Date</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i>
1	24 Januari 2019 <i>January 24, 2019</i>	1. Persiapan Rapat Dekom Direksi <i>1. Preparation for Board of Directors Board Meeting</i> 2. Laporan Komite Audit dan Komite MR & GCG <i>2. Audit Committee and MR & GCG Committee reports</i> 3. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>3. Other things that need attention</i>	1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
2	14 Februari 2019 <i>February 14, 2019</i>	1. Persiapan Rapat Dekom Direksi <i>1. Preparation for Board of Directors Board Meeting</i> 2. Laporan Komite Audit dan Komite MR & GCG <i>2. Audit Committee and MR & GCG Committee reports</i> 3. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>3. Other things that need attention</i>	1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
3	14 Maret 2019 <i>March 14, 2019</i>	1. Persiapan Rapat Dekom Direksi <i>1. Preparation for Board of Directors Board Meeting</i> 2. Laporan Komite Audit dan Komite MR & GCG <i>2. Audit Committee and MR & GCG Committee reports</i> 3. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>3. Other things that need attention</i>	1. Julius Bobo 2. Djoko Prasetyo 3. Marzuqi
4	24 April 2019 <i>April 24, 2019</i>	1. Persiapan Rapat Dekom Direksi <i>1. Preparation for Board of Directors Board Meeting</i> 2. Laporan Komite Audit dan Komite MR & GCG <i>2. Audit Committee and MR & GCG Committee reports</i> 3. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>3. Other things that need attention</i>	1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi

5	24 April 2019 <i>April 24, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Rapat Dekom Direksi <i>1. Preparation for Board of Directors Board Meeting</i> 2. Laporan Komite Audit dan Komite MR & GCG <i>2. Audit Committee and MR & GCG Committee reports</i> 3. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>3. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
6	07 Mei 2019 <i>May 7, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan usulan Organisasi PLNE <i>1. Discussion on the proposed PLNE Organization</i> 2. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>2. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
7	13 Mei 2019 <i>May 13, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Rapat Dekom Direksi <i>1. Preparation for Board of Directors Board Meeting</i> 2. Laporan Komite Audit dan Komite MR & GCG <i>2. Audit Committee and MR & GCG Committee reports</i> 3. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>3. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
8	24 Juni 2019 <i>June 24, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Rapat Dekom Direksi <i>1. Preparation for Board of Directors Board Meeting</i> 2. Laporan Komite Audit dan Komite MR & GCG <i>2. Audit Committee and MR & GCG Committee reports</i> 3. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>3. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
9	18 Juli 2019 <i>July 18, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Progres Proyek Pump Storage Upper Cisokan <i>1. Upper Cisokan Pump Storage Project Progress Report</i> 2. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>2. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
10	07 Agustus 2019 <i>August, 07 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Rapat Dekom Direksi <i>1. Preparation for Board of Directors Board Meeting</i> 2. Laporan Komite Audit dan Komite MR & GCG <i>2. Audit Committee and MR & GCG Committee reports</i> 3. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>3. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Marzuqi

11	20 Agustus 2019 <i>August, 20 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Rapat Dekom Direksi <i>1. Preparation for Board of Directors Board Meeting</i> 2. Laporan Komite Audit dan Komite MR & GCG <i>2. Audit Committee and MR & GCG Committee reports</i> 3. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>3. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
12	03 September 2019 <i>September 03, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Rapat Dekom Direksi <i>1. Preparation for Board of Directors Board Meeting</i> 2. Laporan Komite Audit dan Komite MR & GCG <i>2. Audit Committee and MR & GCG Committee reports</i> 3. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>3. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
13	19 September 2019 <i>September 19, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Rapat Dekom Direksi <i>1. Preparation for Board of Directors Board Meeting</i> 2. Laporan Komite Audit dan Komite MR & GCG <i>2. Audit Committee and MR & GCG Committee reports</i> 3. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>3. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
14	23 Oktober 2019 <i>October 23, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Rapat Dekom Direksi <i>1. Preparation for Board of Directors Board Meeting</i> 2. Laporan Komite Audit dan Komite MR & GCG <i>2. Audit Committee and MR & GCG Committee reports</i> 3. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>3. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
15	13 Nopember 2019 <i>November 13, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Rapat Dekom Direksi <i>1. Preparation for Board of Directors Board Meeting</i> 2. Laporan Komite Audit dan Komite MR & GCG <i>2. Audit Committee and MR & GCG Committee reports</i> 3. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>3. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
16	16 Desember 2019 <i>December 16, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Rapat Dekom Direksi <i>1. Preparation for Board of Directors Board Meeting</i> 2. Laporan Komite Audit dan Komite MR & GCG <i>2. Audit Committee and MR & GCG Committee reports</i> 3. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>3. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi

Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat dengan mengundang Direksi dengan ketentuan:

1. Rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri Direksi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
2. Panggilan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau Anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan kepada anggota Komisaris lain maupun Direksi dalam jangka waktu sekurang- kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

Sepanjang tahun 2019, Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

The Board of Commissioners and the Board of Directors Joint Meetings

The Board of Commissioners may hold a meeting and inviting the Board of Directors in following conditions:

1. The Board of Commissioner Meetings attended by Board of Directors are held as needed.
2. The Board of Commissioners meeting initiation as referred in number 1 above shall be made in writing by the President Commissioner or Member of the Commissioners appointed by the President Commissioner and submitted to other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors within a period, at least, 3 (three) days before the meeting is held.
3. The meeting invitation must stated the agenda, date, time and place of the meeting.

Throughout 2019, the Agenda, Dates and Participants of the Board of Commissioners and the Board of Directors join meetings are as follows.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Joint Meetings Table

No	Tanggal <i>Date</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Peserta Rapat – Dewan Komisaris <i>Meeting Participants - Board of Commissioners</i>	Peserta Rapat -Direksi <i>Meeting Participants - Directors</i>
1	24 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut rapat sebelumnya <i>1. Follow up on previous meetings</i> 2. Tindak lanjut hasil RUPS RKAP 2019 <i>2. Follow-up to the results of the 2019 RKAP GMS</i> 3. Program RKAP 2019 per TW <i>3. 2019 RKAP Program per TW</i> 4. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>4. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Alfi Zamzami 3. Yanuar Hakim 4. Ultrisza Mednawarman

2	14 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut rapat sebelumnya <i>1. Follow up on previous meetings</i> Laporan Realisasi RKAP 2018 per Bidang <i>2. 2018 RKAP Realization Report per Sector</i> Resource Planning untuk Pelaksanaan RKAP 2019 <i>3. Resource Planning for Implementation of the 2019 RKAP</i> Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>4. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Julius Bobo Djoko Prasetyo Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> Hernadi Buhron Alfi Zamzami Yanuar Hakim Ultrisza Mednawarman
3	14 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut rapat sebelumnya <i>1. Follow up on previous meetings</i> Progres masing-masing Bidang sd akhir Pebruari 2019 <i>2. Progress of each Sector until the end of February 2019</i> Laporan pemeliharaan Engineering Consultan untuk proyek Cisokan <i>3. Engineering Consultant maintenance reports for the Cisokan project</i> Business Process Improvement <i>4. Business Process Improvement</i> Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>5. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Tumpal M. simarmata Julius Bobo Djoko Prasetyo Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> Hernadi Buhron Alfi Zamzami Yanuar Hakim Ultrisza Mednawarman
4	24-Apr-19	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut rapat sebelumnya <i>1. Follow up on previous meetings</i> Laporan kinerja PerusahaanTW I tahun 2019 (KPI dan Kinerja Perusahaan) <i>2. Company performance reportTW I 2019 (KPI and Company Performance)</i> Perubahan Organisasi PLNE <i>3. Changes in the PLNE Organization</i> Fungsi IT dalam Organisasi PLNE <i>4. IT functions in the PLNE Organization</i> Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>5. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Tumpal M. simarmata Julius Bobo Djoko Prasetyo Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> Hernadi Buhron Alfi Zamzami Yanuar Hakim Ultrisza Mednawarman
5	07 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan usulan Organisasi PLNE <i>1. Discussion of the proposed PLNE Organization</i> Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>2. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Tumpal M. simarmata Julius Bobo Djoko Prasetyo Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> Hernadi Buhron Alfi Zamzami Yanuar Hakim Ultrisza Mednawarman

6	14 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut rapat sebelumnya <i>1. Follow up on previous meetings</i> Rencana tindak lanjut arahan RUPS LPT 2018 <i>2. Follow-up plans for the direction of the 2018 LPT GMS</i> Laporan kemajuan proyek sesuai target RKAP 2019 (Bidang Eng dan SAR) <i>3. Project progress reports according to the 2019 RKAP target (Eng and SAR Field)</i> Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>4. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Tumpal M. simarmata Julius Bobo Djoko Prasetyo Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> Hernadi Buhron Alfi Zamzami Yanuar Hakim Ultrisza Mednawarman
7	25 Juni 2019	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut rapat sebelumnya <i>1. Follow up on previous meetings</i> Laporan Kinerja Perusahaan TW II 2019 <i>2. Company Performance Report for TW II 2019</i> Tindak Lanjut RUPS LPT 2018 <i>3. Follow-up to the 2018 LPT GMS</i> Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>4. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Tumpal M. simarmata Julius Bobo Djoko Prasetyo Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> Hernadi Buhron Alfi Zamzami Yanuar Hakim Ultrisza Mednawarman
8	12 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut rapat sebelumnya <i>1. Follow up on previous meetings</i> Rencana kerja Semester II tahun 2019 <i>2. Work plan for Semester II in 2019</i> Persiapan RKAP 2020 <i>3. Prepare 2020 RKAP</i> Laporan hasil audit <i>4. Report on audit results</i> Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>5. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Tumpal M. simarmata Julius Bobo Djoko Prasetyo Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> Hernadi Buhron Alfi Zamzami Yanuar Hakim Ultrisza Mednawarman
9	08 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut rapat sebelumnya <i>1. Follow up on previous meetings</i> (i) Laporan Bidang SAR kontrak baru di bulan Agustus 2019 <i>(i) SAR Field Report for new contracts in August 2019</i> (ii) Laporan Bidang Eng untuk memenuhi target pendapatan tahun 2019 <i>(ii) Eng Sector Report to meet 2019 revenue target</i> Program merealisasikan pendapatan DED Rp 113 milyar Program Proyek Upper Cisokan <i>2. The program realized Rp. 113 billion of DED revenue from the Upper Cisokan Project Program</i> Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>3. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Tumpal M. simarmata Julius Bobo Djoko Prasetyo Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> Hernadi Buhron Yanuar Hakim Alfi Zamzami Ultrisza Mednawarman

10	19 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut rapat sebelumnya <i>1. Follow up on previous meetings</i> Pembahasan RKAP 2020 <i>2. Discussion of the 2020 RKAP</i> Laporan Kinerja Perusahaan sd mid Sep 2019 <i>3. Company Performance Report until mid Sep 2019</i> Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>4. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Tumpal M. simarmata Julius Bobo Djoko Prasetyo Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> Hernadi Buhron Alfi Zamzami Yanuar Hakim Ultrisza Mednawarman
11	01 Oktober 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan RKAP 2020 <i>2. Discussion of the 2020 RKAP</i> Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>2. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Tumpal M. simarmata Julius Bobo Djoko Prasetyo Marzuki 	<ol style="list-style-type: none"> Hernadi Buhron Yanuar Hakim Alfi Zamzami Ultrisza Mednawarman
12	24 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut rapat sebelumnya <i>1. Follow up on previous meetings</i> Progres implementasi RKAP 2019 <i>2. Progress on the implementation of the 2019 RKAP</i> Tindak lanjut kunjungan Dekom ke Jerman <i>3. Follow-up Dekom visit to Germany</i> Hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian <i>4. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Julius Bobo Djoko Prasetyo Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> Hernadi Buhron Alfi Zamzami Yanuar Hakim Ultrisza Mednawarman
13	14 Nopember 2019	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut rapat sebelumnya <i>1. Follow up on previous meetings</i> Masalah CPSI <i>2. The CPSI problem</i> Pembahasan draft final RKAP 2020 <i>3. Discussion of the final draft RKAP 2020</i> Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>4. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Tumpal M. simarmata Julius Bobo Djoko Prasetyo Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> Hernadi Buhron Alfi Zamzami Yanuar Hakim Ultrisza Mednawarman
14	16 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut rapat sebelumnya <i>1. Follow up on previous meetings</i> Laporan kinerja Perusahaan sd mid Desember 2019 <i>2. Company performance report until mid-December 2019</i> Persiapan RUPS RKAP 2019 <i>3. Preparation for the 2019 RKAP GMS</i> Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>4. Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Tumpal M. simarmata Julius Bobo Djoko Prasetyo Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> Hernadi Buhron Alfi Zamzami Yanuar Hakim Ultrisza Mednawarman

Agenda, tanggal dan peserta rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris telah dijabarkan pada bagian agenda, tanggal dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dalam laporan tahunan ini.

The agenda, dates and participants of the Board of Directors and the Board of Commissioners joint meetings have been described in the agenda, dates and participants of the Board of Commissioners and the Board of Directors joint meetings in this annual report.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
2. Jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislative, dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan/atau ;
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Untuk perangkapan jabatan Dewan Komisaris yang tidak termasuk dalam ketentuan di atas atau untuk pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud di atas maka diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Bagi anggota Direksi Perusahaan yang tidak lagi menjabat, tidak dapat diangkat menjadi Komisaris Utama Perusahaan yang sama selama 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan tidak menjabat anggota Direksi.

Dewan Komisaris telah mengungkapkan jabatan rangkap yang dimilikinya. Jabatan rangkap Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

Concurrent positions on the Board of Commissioners

Based on the Company's Articles of Association and Board Manual, members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as:

1. *Members of the Board of Directors of State Owned Enterprises, Regional Owned Enterprises, Private Owned Enterprises.*
2. *Other positions in accordance with the laws and regulations, officials or administrators of political parties and/or candidates for legislative members, and/or candidates for Regional Leader/Deputy Regional Leader and/or;*
3. *Other positions that could create a conflict of interest.*

For concurrent positions of the Board of Commissioners that are not included in the above provisions or for exceptions to the provisions referred to above, the approval of the General Meeting of Shareholders is required.

A member of the Board of Directors of the Company who is no longer serving, cannot be appointed as the President Commissioner of the same Company for 2 (two) years since he / she does not anymore serve as a member of the Board of Directors.

The Board of Commissioners have disclosed the multiple positions they hold. The concurrent positions of the Board of Commissioners can be seen in the table below as follows:

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Table of Concurrent Positions of the Board of Commissioner

Periode Pengangkatan 2019 <i>Appointment Period of 2019</i>			
Tumpal M Simarmata	Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i>	-	-
Djoko Prasetyo	Komisaris <i>Commissioner</i>	-	-
Julius Bobo	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	-	-
Marzuqi	Komisaris <i>Commissioner</i>	-	-

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan.

1. Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris.
3. Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2019, anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi, seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Board of Commissioners Competency Development

The Board of Commissioners carries out ongoing training / learning programs in order to improve Board of Commissioner Members competence as needed.

1. There is a work plan and budget for the Board of Commissioners training activities.
2. The Board of Commissioner Members training is carried out in accordance with Board of Commissioners work plan.
3. There is a report on the training results that has been done by members of the Board of Commissioners

Following are the Company's Board of Commissioner Members who have participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences, seminars, throughout 2019:

Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Competency Development Table

Komisaris <i>Commissioner</i>	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan <i>Competency/Training Development Materials</i>	Waktu dan Tempat Pelaksanaan <i>Time and Place of Implementation</i>	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara <i>Types of Training and Implementation</i>
Tumpal M. Simarmata	Seminar Komisaris Profesional Ke 5	9-10 April 2019	INTIPESAN
Julius Bobo	CRGP	1-3 Juli 2019	RAP/LSPMR
Djoko Prasetyo	CRGP	1-3 Juli 2019	RAP/LSPMR
Marzuqi	CRGP	1-3 Juli 2019	RAP/LSPMR

PROGRAM PENGENALAN PERSEROAN BAGI KOMISARIS BARU

1. Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.
 - a. Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris.
 - b. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan perusahaan.
 - c. Tingkat kehadiran/keaktifan anggota Dewan Komisaris dalam mengikuti program pengenalan perusahaan.
2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.
3. Program pengenalan meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
 - b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
 - d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
4. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan dimana program tersebut dilaksanakan.

Pada tahun 2019 tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Program orientasi telah diselenggarakan pada saat terdapat anggota Dewan Komisaris baru.

COMPANY INTRODUCTION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONERS

1. *The newly appointed Board of Commissioners attended an introduction program organized by the company.*
 - a. *The Board of Commissioners submits an introduction program for Board of Commissioner Members to the Board of Directors*
 - b. *Newly appointed members of the Board of Commissioners participate in the company introduction program.*
 - c. *The the Board of Commissioners members participating in the company introduction program attendance / activity.*
2. *The Corporate Secretary or whoever carries out the function as company secretary is responsible for organizing the introduction program.*
3. *The introductory program includes:*
 - a. *GCG principles implementation by the Company;*
 - b. *Description regarding Company (Persero) concerning the objectives, nature, and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short and long term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;*
 - c. *Related Information about delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee.*
 - d. *The Board of Commissioners and the Board of Director's duties and responsibilities description, as well as matters that are not allowed.*
4. *The Coorporate introduction program may take in the form of presentations, meetings, coorpote visits and document reviews, or other programs deemed appropriate to the coorporate where the program is being implemented.*

In 2019 there was no change in the Board of Commissioners' composition. An orientation program held when there are new members of the Board of Commissioners.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, telah dilakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris dan Assessment Good Corporate Governance (GCG).

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Adapun kriteria penilaian berdasarkan KPI yang telah ditetapkan dalam RUPS melalui Kontrak Manajemen adalah sebagai berikut:

1. Fokus Pelanggan
2. Efektifitas Produk dan Proses
3. Fokus Tenaga Kerja
4. Keuangan dan Pasar
5. Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat

PROSEDUR PELAKSANAAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui KPI dilakukan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN KPI

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris melalui Key Performance Indicator (KPI) tahun 2019 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham pada tanggal 09 Januari 2019.

PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is committed to continuously improving the achievement of its performance. To support this, a performance evaluation of the Board of Commissioners has been carried out through the Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Commissioners and the Assessment of Good Corporate Governance (GCG).

CRITERIA FOR PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The evaluation criteria based on KPIs that have been determined in the GMS through a management contract are as follows:

1. Customer Focus
2. Effectiveness of Products and Processes
3. Workforce Focus
4. Finance and Markets
5. Leadership, Governance and Community Responsibility

PROCEDURES FOR IMPLEMENTING THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The performance evaluation of the Board of Commissioners through KPI shall be carried out by the Shareholders through the mechanism of the Annual General Meeting of Shareholders.

PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS BASED ON KPIs

Performance evaluation of the Board of Commissioners through the Key Performance Indicator (KPI) 2019 approved by the Shareholders on January 09, 2019.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada periode 2019 dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

PARTIES WHO CONDUCTING THE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE

The party who evaluating the Board of Commissioners performance shall be the Shareholder in the General Meeting of Shareholders based on the obligations stated in the applicable statutory regulations and the Articles of Association and the mandate of the Shareholders. The Board of Commissioners will be held accountable for their performance in the period 2019 in the General Meeting of Shareholders which will be held in 2020.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris melekat pada KPI Perusahaan. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan KPI pada tahun 2019, sebagai berikut.

RESULTS OF THE BOARD OF COMMISSIONER PERFORMANCE EVALUATION

The performance evaluation of the Board of Commissioners shall be attached to the Company KPI. The results of the Board of Commissioners performance evaluation based on KPI in 2019 is as follows.

TABEL HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

TABLE OF RESULTS OF THE BOARD OF COMMISSIONER PERFORMANCE EVALUATION

No	Indikator <i>Indicator</i>	Bobot <i>Weight</i>	Nilai <i>Score</i>
1	Fokus Pelanggan <i>Customer Focus</i>	10	9,23
2	Efektifitas Produk dan Proses <i>Effectiveness of Products and Processes</i>	39	31,62
3	HR	16	15,53
4	Keuangan dan Pasar <i>Finance and Markets</i>	29	27,31
5	Kepemimpinan, Tata kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan <i>Leadership, governance and social responsibility</i>	6	5,95
	TOTAL	100	89,64

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris digolongkan dalam kondisi "BAIK" kategori "AA" dengan nilai 89.64.

The result of the performance evaluation of the Board of Commissioners is classified in the "GOOD" condition in the "AA" category with a value of 89.64.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Dewan Komisaris berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kinerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris melalui Assessment GCG. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris melalui Assessment Good Corporate Governance (GCG) yang telah dilakukan pada tahun 2019 adalah 33.45 poin dengan predikat "SANGAT BAIK"

PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS BASED ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) ASSESSMENT

The Board of Commissioners is committed to continuously improving the achievement of its performance. To support this, an evaluation of the performance of the Board of Commissioners shall be conducted through a GCG assessment. The performance evaluation of the Board of Commissioners through the Good Corporate Governance (GCG) assessment conducted in 2019 is classified in the "VERY GOOD" condition in category with a value is 33.45 Point

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris tersebut meliputi :

1. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran Dewan Komisaris.
2. Pembagian tugas dan penetapan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
3. Pemberian persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.
4. Pemberian arahan dan pengawasan kepada Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.
5. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.
6. Peran dalam pencalonan anggota Direksi, penilaian kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan pengusulan tantiem/insentif kinerja Direksi,

CRITERIA FOR PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The criteria for evaluating the performance of the Board of Commissioners include :

1. *Implementation of the Board of Commissioners training/learning program;*
2. *Division of duties and determination of the factors needed to support;*
3. *Provision of approval for the RJPP and RKAP plans submitted by the Directors;*
4. *Giving direction and supervision to the Board of Directors on the implementation of company plans and policies;*
5. *Implementation of supervision of the implementation of the management policies of subsidiaries/joint ventures;*
6. *Roles in nominating members of the Board of Directors, evaluating the performance of the Directors (individual and collegial) and proposing tantiem/incentives for performance of the Board of Directors;*

7. Pelaksanaan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut Dewan Komisaris.
8. Pemantauan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
9. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadirannya dalam rapat tersebut.
10. Terdapatnya Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite-Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

7. *Implementation of actions against potential conflicts of interest concerning the Board of Commissioners;*
8. *Monitoring the application of the principles of Good Corporate Governance;*
9. *Organizing Board of Commissioners meetings and the level of their attendance at the meeting;*
10. *The presence of Secretary of the Board of Commissioners and Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners*

PROSEDUR PELAKSANAAN ASSESSMENT KINERJA DEWAN KOMISARIS

Prosedur Pelaksanaan Assessment GCG terkait Kinerja Dewan Komisaris adalah, sebagai berikut.

1. BPKP menugaskan Tim Assessment dalam pelaksanaan Assessment GCG 2018 PT PLN Enjiniring.
2. Tim Assessment mengkoordinir seluruh unit kerja terkait termasuk berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan Assessment GCG 2018.
3. Tim Assessment memberikan nilai komposit termasuk faktor positif dan negatif untuk disampaikan kepada Direksi dan kemudian dimintakan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Pelaksanaan Assessment GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

PROCEDURES FOR IMPLEMENTING THE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The procedures for implementing GCG Assessment related to the Board of Commissioners Performance are as follows.

1. *BPKP assigns the Assessment Team in the implementation of GCG Assessment 2018 PT PLN Enjiniring.*
2. *The Assessment Team coordinates all relevant work units including coordinating with the Board of Commissioners in order to carry out the 2018 GCG Assessment.*
3. *The Assessment Team provides composite values including positive and negative factors to be submitted to the Board of Directors and then the Board of Commissioners approval is sought.*
4. *The GCG Assessment is carried out periodically every year.*

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada periode 2018 dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2019.

The Party Conducting the Performance Assessment of the Board of Commissioners

The parties that evaluates the performance of the Board of Commissioners consist of the PLN Enjiniring assessment team chaired by the Corporate Secretary.



KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

THE BOARD OF COMMISSIONERS REMUNERATION POLICY

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mendapat sejumlah remunerasi dan fasilitas lainnya. Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris didasarkan pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham.

In carrying out their duties and responsibilities, the Board of Commissioners receives a number of remuneration and other facilities. The policy for providing remuneration and other facilities for the Board of Commissioners is based on article 6 paragraph (1) of Act No. 40 year 2007 concerning about Limited Liability Companies and the Directors Decree of PT PLN (Persero) as the Shareholders authority.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh bertentangan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

REMUNERATION DETERMINATION PROCEDURE

Honorarium and allowances / facilities the Board of Commissioner Members are given including retirement benefits which types and amounts are determined by the Shareholder General Meeting with the provisions of the prevailing laws and regulations as consideration. The facilities can be given to the Board of Commissioner Members can be given adjusted to the Company's financial condition and capability, and shall not conflicted with laws and regulations, and with the Shareholder General Meeting decisions.

FASILITAS ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagai berikut:
 - a. Fasilitas kesehatan; dan
 - b. Fasilitas bantuan hukum
2. Ketentuan mengenai fasilitas kesehatan anggota Direksi, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas kesehatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Dalam hal seseorang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada lebih dari satu BUMN dan/atau pada anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas kesehatan.
3. Fasilitas kesehatan bagi anggota Dewan Komisaris diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan wajib memberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan kepada Anggota Dewan Komisaris.

THE FACILITIES GIVEN TO THE BOARD OF COMMISSIONER MEMBERS

1. *The Board of Commissioner Members/ Supervisory Board can be given the following facilities:*
 - a. *Medical facility; and*
 - b. *Legal aid facility)*
2. *The provisions regarding health facilities for the Board of Directors Members, mutatis mutandis applied to health facilities for the Board of Commissioner Members / Board of Trustees. In the event that a person serves as both the Board of Commissioner member and Board of Supervisors in more than one State-Owned Enterprises (BUMN) and / or in its subsidiary / joint venture company, then the person in concerned is only given one health facility.*
3. *Health facilities for the Board of Commissioner Members are provided with the following conditions:*
 - a. *The Corporate is bound to provide a*

- b. Fasilitas Kesehatan diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris beserta seorang isteri atau suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapat fasilitas kesehatan.
- c. Fasilitas kesehatan diberikan berupa: (i) Rawat jalan dan obat; (ii) Rawat inap dan obat; dan (iii) *Medical Check-up*.
- d. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.
- e. *Medical Check-up* diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- *Medical check-up* diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
 - *Medical check-up* dilakukan di dalam negeri.
- f. Dalam hal Direksi merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris anak perusahaan/ perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu fasilitas Kesehatan yaitu fasilitas kesehatan pada Perseroan.
7. Ketentuan mengenai fasilitas bantuan hukum anggota Direksi dan mantan anggota Direksi, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta mantan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
8. Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Dewan Komisaris diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
- health facilities in the form of health insurance or medical expenses reimbursement The Board of Commissioner Members.*
- b. *Health facilities are provided to a member of the Board of Commissioners along with their wife or husband and a maximum of 3 (three) childrens under the age of 25 (twenty five) years. Under the condition the child/s under the age of 25 years old has been married or has worked, then the person/s in concerned no longer entitled to health facilities provided by the cooperate.*
- c. *Health facilities are provided in the form of: (i) outpatient care and medicine; (ii) Hospitalization and medication; and (iii) Medical Check-up*
- d. *In the event that the doctor provided the medical care give a referral for a treatment abroad, the health facilities can be given in full or in part with consideration into the Company's financial capability.*
- e. *Medical Check-up is provided with the following conditions:*
- i. *Medical check-up is provided once a year.*
 - ii. *Medical check-up can only be conducted domestically*
- f. *In the event that the Directors is also the Board of Commissioners member of the company's subsidiary / joint venture, then the person concerned is only given one health facility, namely a health facility at the Company (Perseroan).*
7. *Regarding the legal aid facilities for the Board of Directors member and former the Board of Commissioner Members, mutatis mutandis applied to legal aid facilities for the Board of Commissioner Members / Supervisory Board as well as former Board of Commissioner Members / Supervisory Board.*
8. *Legal aid facilities for Board of Commissioner members are provided with the following conditions:*
- a. *Legal aid facilities are provided in the event of an action / actions for and on behalf of his position related to purpose and objectives, and also business activities of the Company (Perseroan).*

- b. Anggota Dewan Komisaris yang akan menggunakan fasilitas bantuan hukum, wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan fasilitas bantuan hukum tersebut kepada perusahaan apabila ternyata kepada perusahaan apabila ternyata terbukti posisi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi.
 - c. Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka dan terdakwa di lembaga peradilan.
 - d. Jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perseroan hanya untuk satu kantor pengacara /atau konsultan hukum untuk satu kasus tertentu.
 - e. Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perseroan.
 - f. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/konsultan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayar oleh Perseroan menjadi beban yang bersangkutan.
 - g. Dalam hal yang bersangkutan diputus bebas/ dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya kantor pengacara/konsultan hukum menjadi beban Perseroan.
 - h. Biaya kantor pengacara/konsultan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.
- b. The Board of Commissioner members who will use the legal aid facility are required to make a statement letter on sufficiently stamped paper explaining their position concerning to a certain cases not as an individual and are willing to return the legal aid facility to the company if it is proven that their position concerned in the case is as personal.*
 - c. Legal aid facilities are provided in the form of financing for attorney / legal consultant services including the examination process as witnesses, suspects and defendants in the judiciary.*
 - d. The financing of lawyer / legal consultant services can be charged to the Company but only for one law firm / or legal consultant for one particular case.*
 - e. The lawyer / legal consultant appointment is carried out by the Company (Perseroan) in accordance with company's (perseroan) applicable goods and services procurement provisions.*
 - f. In the event that the person in concerned abided by law found guilty and convicted, the lawyers / legal consultants fees that both have been issued and which have not been paid by the Company, will be borne by person in concerned.*
 - g. In the event that the person in concerned abided by law is acquitted / found not guilty by a court, the cost of the law firm / legal consultant will be borne by the Company.*
 - h. The lawyer / legal consultant fees is given by taking into consideration the principles of fairness, transparency and accountability in accordance with applicable regulations, as well as the Company's financial capability.*

- i. Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka santunan purna jabatan bagi anggota Dewan Komisaris tidak dibayarkan dan dimasukkan kedalam rekening khusus yang diadakan oleh Direksi Perseroan sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perseroan. Anggota Dewan Komisaris yang menerima fasilitas bantuan hukum wajib membuat surat pernyataan di atas kerta bermeterai cukup yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- j. Dalam hal anggota Dewan Komisaris menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perseroan.
- k. Anggota Dewan Komisaris yang dalam penggunaan kantor pengacara/konsultan hukum dibiayai Perseroan maka yang bersangkutan wajib membuat pernyataan akan mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- l. Perseroan tidak menanggung biaya pengacara/konsultan hukum dalam hal anggota Dewan Komisaris menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana yang dilaporkan oleh Perseroan yang bersangkutan, Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah) atau pihak tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- m. Anggota Dewan Komisaris yang diperkarakan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum.
- n. Dalam kasus Perdata atau Tata Usaha Negara, biaya perkara ditanggung oleh Perseroan sepanjang:
- i. *As long as the legal issues do not have permanent legal force, the Board of Commissioner Members retirement compensation will not be paid and will be placed into a special account held by the company's Board of Directors as a warranty for the cost of the case incurred by the Company. The Board of Commissioner Members who receive legal aid facilities are required to make a statement letter on sufficiently stamped paper stating that the person in concerned is willing to make his retirement insurance as a warranty for the cost of the case incurred by the Company.*
- j. *In the event that the Board of Commissioners member uses a lawyer / legal consultant of his own choice whether its on investigation, court of first instance, appeal, cassation or review, the lawyer / legal consultant cost are not borne / reimbursed by the Company.*
- k. *The Board of Commissioner Members whose lawyer / legal consultant office are financed by the Company, then they are required to make a statement that they will replace / refund the costs incurred by the Company if they abided by the law and the court found guilty.*
- l. *The Company does not bear the costs of a lawyer / legal consultant in the event that a member of the Board of Commissioners becomes a witness, suspect or defendant due to a criminal action reported by the Company, the State (State as a Legal Entity or State Institution or Government Institution) or certain parties determined by Shareholder General Meeting.*
- m. *The the Board of Commissioner Members, who are being prosecuted, are prohibited from being involved in the decisions making regarding the appointment of a law firm / legal consultant*
- n. *In Civil or State Administration cases, the cost of the case is borne by the Company as long as:*

- i. Pengacara/konsultan hukum yang digunakan hanya satu kantor pengacara/konsultan hukum untuk satu kasus tertentu.
 - ii. Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perseroan.
 - iii. Biaya pengacara/konsultan hukum adalah biaya-biaya yang resmi dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.
 - iv. Anggota Dewan Komisaris Perseroan digugat karena permasalahan hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - v. Penggugat atau tergugat adalah pihak selain Perseroan yang bersangkutan, Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Hukum atau Lembaga Pemerintah) atau pihak tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - o. Perseroan wajib memberikan fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - p. Ketentuan mengenai pemberian fasilitas bantuan hukum di atas, mutatis mutandis berlaku bagi pemberian fasilitas bantuan hukum bagi mantan anggota Dewan Komisaris.
- i. A lawyer / legal consultant is used by only one law firm / legal consultant for one particular case.*
 - ii. The lawyer / legal consultant appointment is carried out by the Company (Perseroan) in accordance with company's (perseroan) applicable goods and services procurement provisions.*
 - iii. The lawyer / legal consultant fees is are legal fees and can be justified by the law.*
 - iv. Members of the Board of Commissioners of the Company were sued because of legal problems that arose in the context of carrying out the Company's duties in accordance with applicable regulations.*
 - v. The plaintiff or defendant is a party other than the Company concerned, the State (the State as a Legal Entity or Legal Institution or Government Institution) or certain parties determined by the General Meeting of Shareholders.*
 - o. The Company is required in providing legal aid facilities to the Board of Commissioners former members in the event of a legal problem arising because the person in concerned has taken action / actions for and on behalf of their position intended and on purpose as well as the Company's business which been done in the time the person in concerned still act as a member of the company Board of Commissioner.*
 - p. The clause regarding legal aid facilities given by company, as per above, mutatis mutandis applied to the former member of Board of Commissioners.*



MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

THE BOARD OF COMMISSIONERS RESIGNATION/RESPECTION AND DISMISSAL MECHANISM

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan adalah sebagai berikut.

Following are the mechanism for resignation and dismissal of the Board of Commissioners as regulated in the Company's Articles of Association and Board Manual.

I. PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.
2. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan komisaris:
 - a. Tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau ketentuan Anggaran dasar Perseroan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
 - d. Dinyatakan bersalah sehubungan dengan huruf a, b dan c berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
 - e. Mengundurkan diri.
3. Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
4. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 2, diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh pemegang saham.
5. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, b dan c, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

1. THE BOARD OF COMMISSIONERS DISMISSAL

1. *The Board of Commissioner Members can be dismissed at any time with along with stating the reasons based on the General Meeting of Shareholders Decision.*
2. *Dismissal the Board of Commissioner member/ members as referred in number 1 above, is carried out, if based on facts, the member of the Board of Commissioners:*
 - a. *Unable to carry their responsibility to the fullest potential.*
 - b. *Not implementing or violating the laws and regulations and / or the provisions of the Company's Articles of Association;*
 - c. *Being involved in actions that are harmful to the Company and/or the State;*
 - d. *Found guilty in connection with letters a, b and c based on a court decision which has permanent legal force; and / or*
 - e. *Resigning*
3. *Beside, the dismissal of the Board of Commissioner member/members as referred in number 2 above, the Board of Commissioner member/members may be dismissed by the General Meeting of Shareholders for the company interests and objectives.*
4. *The plan on the dismissal of the Board of Commissioners as referred to in number 2, shall be notified to the member/members in concerned verbally or in writing by the shareholders.*
5. *The decision on the dismissal because of the reasons as referred to in number 2 letters a, b and c is taken after the person in concerned has been given the opportunity to defend themself.*

6. Dalam hal pemberhentian di luar forum Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada angka 4.
7. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
8. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dan d merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

II. PENGUNDURAN DIRI

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.
2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut diatas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun pada masa jabatan berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung-jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung-jawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. *In the event of dismissal outside the General Meeting of Shareholders forum, the self-defense, as referred to in number 5, shall be submitted in writing to the Shareholders within 15 (fifteen) days after the member of the Board of Commissioners in concerned is notified as referred to in number 4.*
7. *As long as the dismissal plan, as referred to in number 2, is still on process, then the member of the Board of Commissioners in concerned must carry out their duties as per usual.*
8. *Dismissal due to reasons as referred in number 3 letters c and d is a dishonorable discharge.*

II. RESIGNATION

1. *A member of the Board of Commissioners has the right to resigning from his position by notifying the company/corporate in a written letter with copies to shareholders, other Board of Commissioners members and the Board of Directors no later than 30 (thirty) days before the his/her resignation date. If the resignation letter states the effective date is less than 30 (thirty) days from the date the letter is received, it is considered that effective date of resignation did not mentioned.*
2. *If it is up to the date requested by the member of the Board of Commissioners the person in concerned or within 30 (thirty) days since the company received the resignation letter, in this matter, which has no effective date, and no decision from the General Meeting of Shareholders, then the member of the Board of Commissioners resigning by itself on the requested date above or by the expiration of 30 (thirty) days from the date when the resignation letter is received without the approval of the General Meeting of Shareholders.*
3. *For the Board of Commissioners members who resigning before or when the office term ends, then the responsible person remains responsible for his actions whose accountability has not been received by the Shareholders General Meeting.*



DIREKSI

DIRECTORS

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS dan dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang Anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Secara khusus, tugas Direksi mencakup beberapa hal sebagai berikut.

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas dan kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.

Director is a part of the company/corporate authorized and responsible to the company/corporate managerial for company benefit which is align with the company's goals and objectives as well as representing the company, both inside and outside the court, as Articles of Association required.

The Company is managed and led by a Board of Directors whose numbers are adjusted to the needs of the Company. In the event that the Board of Directors consists of more than 1 (one) Member of the Board of Directors, one of them is appointed as the President Director.

DUTIES, AUTHORITIES AND OBLIGATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is a company organ that is authorized and fully responsible for the management of the company in the interests of the company suitable with the company's goals and objectives, and represents the company, both inside and outside the court as per the Articles of Association provisions.

In particular, the Board of Directors the duties include the following.

1. *The Board of Directors is in charge of carrying out all actions related to the company's management for company benefits and suitable with company's objectives and purpose and represent the Company both inside and outside the Court regarding all matters and events with restrictions as regulated by laws and regulations, the Articles of Association and / or the General Meeting of Shareholders.*
2. *In carrying out their duties, the Board of Directors is obliged to devote their energy, thoughts, attention and full dedication to their duties and obligations and the achievement of the Company's goals.*

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban serta kewajaran.
 4. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.
 6. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi diluar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai tindakan tersebut disetujui oleh Rapat Direksi.
 7. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:
 - a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek (sampai dengan 1 (satu) tahun);
 - b. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerja sama dengan badan usaha/pihak lain dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 8. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas diantara Direksi ditetapkan oleh Direksi.
 9. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau Anggaran Dasar Perseroan.
 10. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
3. *In carrying out their duties, the Board of Director members must comply with the company's Articles of Association, and laws and regulations, and must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility and fairness.*
 4. *Each Member of the Board of Directors sPagel in good faith and full of responsibility in carrying out their duties for the company's interests and business in regard with the prevailing laws and regulations.*
 5. *Each member of the Board of Directors is fully responsible personally if he / she is guilty or negligent in carrying out his / her duties for the company's interests and business.*
 6. *Actions taken by the Board of Director members other than those decided by the Board of Directors Meeting are the personal responsibility of the person in concerned until the action is approved by the Board of Directors Meeting.*
 7. *The following actions of the Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners to:*
 - a. *Placing fixed assets for short-term credit withdrawals (up to 1 (one) year);*
 - b. *Enter into transactions, contracts, agreements, deals and / or colmanpowerations with business entities / other parties with a certain value or period determined by the General Meeting of Shareholders;*
 8. *The duties and powers distribution of each the Board of Directors members is determined by the General Meeting of Shareholders. In the case of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders does not assign the duties and powers distribution , so the duties distribution among the Directors is assigned by the Board of Directors.*
 9. *The Board of Directors in managing the Company carries out the instructions given by the General Meeting of Shareholders as long as it does not conflict with the laws and regulations or the Company's Articles of Association.*
 10. *Each Member of the Board of Directors takes full personal responsibility if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties for the interests and business of the Company.*

11. Tindakan yang dilakukan oleh Anggota Direksi diluar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan yang dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.
 12. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas tugas Direktur Utama.
 13. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melakukan tugas-tugas Direktur Utama.
 14. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 15 di atas yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
 15. Dalam hal salah seorang Anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang Anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas Anggota Direksi yang berhalangan tersebut.
 16. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawab sendiri berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
 17. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.
11. *Actions taken by members of the Board of Directors outside those decided by the Board of Directors Meeting shall be the personal responsibility of the person concerned until the said action is approved by the Board of Directors Meeting.*
 12. *If the President Director is absent or not present for any reason, which does not need to be proven to a third party, then one of the members of the Board of Directors who is appointed in writing by the President Director has the authority to act for and on behalf of the Board of Directors and carry out the duties of the President Director.*
 13. *In the event that the President Director does not appoint a representative, the Member of the Board of Directors who is holding the longest position has the authority to act for and on behalf of the Board of Directors as well as perform the duties of the President Director.*
 14. *In the event that there is more than 1 (one) member of the Board of Directors who is holding the longest position as the Board of Directors member, then the Board of Directors member as referred to in number 15 below whose the oldest member on age will be authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and carry out the duties of the President Director.*
 15. *In the event that a member of the Board of Directors other than the President Director is absent due to any reason, which does not need to be proven to a third party, then another Member of the Board of Directors shall appoint a member of the Board of Directors to carry out the duties of the member of the Board of Directors who is absent.*
 16. *The Board of Directors for certain actions on its own responsibility is also entitled to appoint one or more representatives, by giving them the power for certain actions regulated in a power of attorney.*
 17. *In order to implementing the company management policy, the President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company under the condition that all actions of the President Director have been approved by the Board of Directors Meeting.*

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Pembagian Tugas Direksi

1. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas diantara Direksi ditetapkan oleh Direksi.
2. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau Anggaran Dasar Perseroan.
3. Setiap Anggota Direksi bertanggung-jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
4. Tindakan yang dilakukan oleh Anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung-jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan yang dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.
5. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
6. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melakukan tugas-tugas Direktur Utama.
7. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi terlama dalam jabatan, maka Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada butir (6) di atas yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

SCOPE OF WORK AND RESPONSIBILITIES OF EACH BOARD OF DIRECTORS MEMBER AND THE BOARD OF DIRECTORS DUTIES DISTRIBUTION

Division Of The Board Of Directors

1. *The distribution of duties and powers of each Member of the Board of Directors is assigned by the General Meeting of Shareholders. In the event that the General Meeting of Shareholders does not assigning the duties and powers distribution, then the duties distribution among the Board of Directors sPagel be determined by the Board of Directors.*
2. *In managing the company, the Board of Directors performs the instructions given by the General Meeting of Shareholders as long as it does not contradict with the laws and regulations and / or the Company's Articles of Association.*
3. *Each of Board of Directors member has full responsibility if he / she is negligent towards his / her duties in the company.*
4. *Actions taken by the Board of Director members, other than, those which has been decided in the Board of Directors Meeting is considered personal and becomes the responsibility of the person concerned, until, the action referred to is approved by the Board of Directors Meeting.*
5. *In the time of the President Director absents, which does not need approval from the third party, a representative from the board of directors which has been appointed by the President Directors, is authorized to act for and on bePagef of the Board of Directors and carry out the President Director duties.*
6. *If President Director has not appointed a representative yet, the board of director's member which has been in the office with the longest will act and took the duties for and on bePagef of President Directors.*
7. *If there is more than 1 (one) Board of Directors with the longest time in the office, so as referred on point six (6) above are authorized to act for and on bePagef of the President Directors.*

8. Dalam hal salah seorang Anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang Anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas Anggota Direksi yang berhalangan tersebut.
9. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawab sendiri berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
10. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.
8. *Due to any reason the absent, in any reason, of the Board of Directors beside President Director, then the other Board of Directors members will assign on of its member to act for and on behalf of the absents member.*
9. *Director for a particular act/s responsible, also have the power to appointing a person/s as his/her representative by giving him/her or them the power in a particular act/s, validated in attorney letter.*
10. *implementation of company's policy, President Director have the right to act/s for and on bePagef of Board of Directors and the company, as long as has been approved by the Board of Directors Meeting.*

Tabel Pembidangan Tugas Direksi

Table of Assignments for Directors Duties

Jabatan <i>Position</i>	Bidang Tugas <i>Task Field</i>
Direktur Utama <i>President Director</i>	Menentukan, memutuskan dan menetapkan strategi perencanaan serta pelaksanaan seluruh kegiatan PLN Enjiniring. <i>Establish, decide and determine the planning strategy and implementation of all PLN Engineering activities.</i>
Direktur Enjiniring <i>Director of Engineering</i>	Menentukan, memutuskan, menetapkan dan mengendalikan kegiatan produksi dan operasi guna mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan secara efektif dan efisien. <i>Establish, decide, determine and control the production and operating activities to achieve the Company's goals and objectives effectively and efficiently.</i>
Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha <i>Director of Marketing and Business Development</i>	Menentukan, memutuskan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan kegiatan pemasaran serta pengembangan usaha dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. <i>Establish, decide, determine and control the policies of marketing and business development activities in order to achieve the targets determined.</i>
Direktur Keuangan dan SDM	Menentukan, memutuskan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan dan strategi keuangan dan SDM guna mencapai tujuan dan sasaran perusahaan secara efektif dan efisien.

Kriteria Direksi

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang Anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Adapun Kriteria Persyaratan Anggota Direksi adalah sebagai berikut.

1. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. Dinyatakan pailit.
 - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit, atau;
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon Anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas pengangkatan Anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan persyaratan peraturan perundangan.
4. Pengangkatan Anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 tersebut di atas batal demi hukum sejak saat Anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan

Seluruh Direksi PLN Enjiniring telah memenuhi kriteria dan ketentuan dalam *Fit and proper Test* berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait.

Board of Directors Requirement

The corporate led and manage by Board of Directors, which the number its member/s are depend on the corporate need/s. If Board of Directors only contain of 2 persons then one of them will be appointed as President Director.

The Requirements for Board of Director Members are as follows

1. *Those who can be appointed as Board of Directors members are individuals who are capable of taking legal actions, except 5 (five) years prior to their appointment, they have:*
 - a. *Declared Bankrupt*
 - b. *Proven guilty by causing a company went bankrupt, wheather as its Board of Directors, Board of Commisioners or Supervisory Board.*
 - c. *Sentenced from a criminal act that endangers the country finance and/or State-Owned Enterprise (BUMN) and/or other financial sectors.*
2. *The requirement stated in point 1 (one) above, proven with a statement letters signed by the Board of Directors candidate and corporate will kept the letter.*
3. *In addition to meet the requirements as referred in number 1 (one) above, designated member of the Board of Directors being done in consideration of proficiency, experience and other requirements based on the requirements of laws and regulations.*
4. *In the event of the Appointment of the Board of Director Members who do not eligible as referred to number 1 and number 3 above, will automatically canceled once others Board of Derictors and/or the Board of Commissioner member knows that the requirement did not fulfilled.*

Fit and Proper Test

All PLN Enjiniring has been fullfilled all Fit and Proper Test requirement based on The Law of Limited Liability Company and GCG's provision and other provision.

Tabel Penilaian Kemampuan Dan Kecepatan

Fit and Proper Test Table

Nama <i>Name</i>	Pelaksana <i>Administrator</i>	Hasil <i>Result</i>
Hernadi Buhron	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>
Alfi Zamzami	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>
Yanuar Hakim	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>
Ultrizza Mednawarman	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>

BOARD MANUAL DIREKSI

Pedoman kerja Direksi diatur dalam *Board Manual*, petunjuk tata laksana kerja Direksi yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan harus dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan. Dengan adanya *Board Manual* diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Adapun isi dari *Board Manual* sebagai berikut.

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Direksi;
- Bab III : Dewan Komisaris;
- Bab IV : Tata Laksana Wewenang Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris;
- Bab V : Tata Laksana Wewenang Direksi dengan Persetujuan RUPS Berdasarkan Rekomendasi Dewan Komisaris.

Beberapa pokok pedoman kerja Direksi yang diatur dalam *Board Manual* antara lain sebagai berikut.

BOARD MANUAL DIRECTORS

The Board of Directors work guidelines are set out in the Board Manual, the guidelines for the work procedures of the Board of Directors which explain the stages of activities in a structured, systematic, easy-to-understand manner and must be carried out consistently, so that they can become a reference for the Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the Company's Vision and Mission. With the existence of the Board Manual, it is hoped that high work standards will be achieved in line with GCG principles.

The contents of the Board Manual are as follows.

- Chapter I : Introductory*
- Chapter II: The Board of Directors*
- Chapter III: The Board of Commissioners*
- Chapter IV: Board of Directors Authority Procedure with the Board of Commissioners' Approval*
- Chapter V: Board of Directors Authority Procedure with GMS Approval Based on the Recommendation of the Board of Commissioners.*

Some of the main guidelines for the Board of Directors' work regulated in the Board Manual are as follows.

WEWENANG DIREKSI

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut.

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan perusahaan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain; Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengangkat seorang Sekretaris Perseroan.
6. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Direksi dapat memutuskan kegiatan-kegiatan dengan nilai per transaksi sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) dari ekuitas perusahaan didasarkan pada tahun buku terakhir yang telah diaudit.

THE BOARD OF DIRECTORS AUTHORITY

The Board of Directors has the following authority.

1. *Establishing company management policies*
2. *Arranging the Board of Directors transfer of power to represent the Company inside and outside the court to a person or several members of the Board of Directors who are especially appointed for this purpose or to one or more company's employees, either individually or collectively or to other people; Regulate the provisions concerning company employment includes determining the salary, pension or pension plan and other income for company employees based on the laws and regulations and the General Meeting of Shareholders.*
3. *Set the provisions regarding the Company's employment including the determination of the salary, pension or old age security and other income for the Company's employees based on the prevailing laws and regulations and the resolution of the General Meeting of Shareholders.*
4. *Appointing and dismissing Company employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations*
5. *Appointing a Corporate Secretary*
6. *Take all actions and deeds regarding the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties and / or other parties with the Company, and represent the Company inside and outside the court regarding all matters and events, with restrictions as regulated in law and regulation, Articles of Association and / or decisions of the General Meeting of Shareholders and all events, with limitations as regulated in statutory laws and regulations, Articles of Association and / or the General Meeting of Shareholders decision.*
7. *The Board of Directors may decide on all activities with a value per transaction of a maximum of 10% (ten percent) of the company's equity based on the last audited financial year.*

- a. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan pihak lain;
- b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dan jaminan lainnya termasuk (standby letter of credit/SLBC, Corporate Guarantee dan sejenisnya);
- c. Menerima atau memberikan pinjaman yang tidak bersifat operasional;
- d. Menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau Lembaga keuangan lainnya.

- a. *Enter into transactions, contracts, agreements, agreements and / or colmanpowerations with other parties*
- b. *Binding the Company as a guardian (borg or avalist) and other guarantees including (standby letter of credit / SLBC, Corporate Guarantee and the like);*
- c. *Receive or provide loans that are not operational;*
- d. *Receive short-term loans from banks or other financial institutions.*

Kewajiban Direksi

Adapun kewajiban Direksi adalah sebagai berikut.

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perusahaan dengan sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan perubahannya, serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah rapat Umum Pemegang Saham dan risalah rapat Direksi.
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan perusahaan, serta dokumen keuangan perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkannya kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan.
8. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan.

The Board Of Directors Responsibility

Following are The Board of Directors responsibility.

1. *Seek and ensure the implementation of the company's business and activities which suitable with its purposes and objectives and business activities.*
2. *Preparing Long Term Company's plan, Company Work Plan and Budget and it changes, as well as submitting it to Shareholders and the Board of Commissioners for approval at Shareholders General Meeting.*
3. *Expalining the Long Term Company's plan, Company Work Plan and Budget at Shareholders General Meeting.*
4. *Preparing the Shareholder List, Special list, minutes of General Meeting of Shareholders and minutes of meetings of the Board of Directors.*
5. *Making corporate financial documents, based on Company's Document Regulations and making annual report as one of its responsibility towards the company.*
6. *Arranging and submitted Financial Statements, based on Financial Accounting Standards, to and submit them to a Public Accountant to be audited.*
7. *Submitting the Annual Report including the Financial Report to the General Meeting of Shareholders for approval and ratification*
8. *Explaining the annual report to shareholders at Shareholder General Meeting.*

9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 10. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, laporan tahunan dan dokumen keuangan perusahaan, serta dokumen perusahaan lainnya.
 11. Menyimpan ditempat kedudukan perusahaan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perusahaan.
 12. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
 13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
 14. Menyiapkan susunan organisasi perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
 15. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
 16. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. *Presenting to the Minister of Law and Human Rights the Company's Income Statement that has been endorsed by shareholder at General Meeting.*
 10. *Maintaining Shareholders List, Special list, Minutes of Shareholders General Meeting, Minutes of Board of Commissioners Meetings and Minutes of Directors Meetings, annual reports, and corporate finance documents, and other company documents.*
 11. *Keeping Shareholders List, Special list, Minutes of Shareholders General Meeting, Minutes of Board of Commissioners Meetings and Minutes of Directors Meetings, annual reports, and corporate finance documents, and other company documents at the company office.*
 12. *Developing an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on internal management principles, data recording, storage and supervision.*
 13. *Provide periodic reports according and other reports as schedule or whenever requested by the Board of Commissioners and / or Shareholders.*
 14. *Prepare company organizational structure with complete details and tasks*
 15. *Provide an explanation of everything that is asked or requested by the Board of Commissioners and the Shareholders members.*
 16. *Performing other obligations that suitable with the provisions regulated in the company's Articles of Association and determined by the General Meeting of Shareholders based on the laws and regulations.*

Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi

PLN Enjiniring memiliki Buku Pedoman *Good Corporate Governance* yang antara lain mengatur keberagaman komposisi Direksi. Berdasarkan pedoman tersebut, komposisi Direksi hendaknya sedemikian rupa sehingga memungkinkan diambilnya keputusan secara efektif, tepat, cepat, dan independen. Komposisi Direksi merupakan bauran yang tepat antara pengalaman manajerial dan kepemimpinan, pendidikan yang memadai dan sesuai dengan tanggung jawab yang diemban, serta memiliki karakter yang baik.

The Board Of Directors Diversity Policy

PLN Enjiniring owned a Good Corporate Governance Guidebook which among others regulates the diversity the Board of Directors thus enabling decisions to be made effectively, precisely, quickly and independently. The Board of Directors composition is the right mix between managerial and leadership experience, educated in accordance with the responsibilities, and has a good character

Pada periode 2019, keberagaman komposisi Direksi yang tercermin dalam usia, pendidikan, dan pengalaman kerja, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

In the 2019 period, the diversity of the composition of the Board of Directors, reflected in age, education and work experience, can be seen as in the table below:

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi
Table of Composition Diversity of Board of Directors

Nama Direksi	Usia	Pendidikan	Pengalaman Kerja
<i>Name of Directors</i>	<i>Age</i>	<i>Education</i>	<i>Work Experience</i>
Hernadi Buhron	59 Tahun	Insinyur dari Institute Teknologi Surabaya	Distribution System Planning Expert PT PLN (Persero), Manajer Perencanaan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, Kepala Divisi Pengadaan untuk IPP PT PLN (Persero)
	<i>59 Years Old</i>	<i>Education Engineer of Surabaya Institute of Technology</i>	<i>Distribution System Planning Expert at PT PLN (Persero), Planning Manager of PT PLN (Persero) West Java and Banten Distribution, Head of Procurement Division at IPP PT PLN (Persero)</i>
Alfi Zamzami	54 Tahun	S1 Akuntansi Universitas Andalas , S2 Master Of Business University of Tenaga Nasional, Kuala Lumpur	Deputi Manajer General Affair PT PLN (Persero) Sumatera Selatan, Senior Manajer Keuangan PT PLN Enjiniring, Senior Manajer Expenditure Management PT PLN (Persero)
	<i>54 Years Old</i>	<i>Undergraduate Accounting Major of Andalas University, Master of Business from University of Tenaga Nasional, Kuala Lumpur</i>	<i>Deputi General Affair Manager of PT PLN (Persero) South Sumatera at PT PLN Enjiniring, Senior Manager of Expenditure Management at PT PLN (Persero)</i>
Yanuar Hakim	60 Tahun	Insinyur dari Institute Teknologi Bandung (1986), Master of Electrical Engineering dari University of Wollongong Australia (2004)	Kepala Divisi Transmisi Indonesia Bagian Barat PT PLN (Persero), General Manager Transmisi Jawa - Bali dan Pusat Pengiriman Beban, Ketua Panitia Pengadaan Sumatera - Jawa HVDC Connection, General Manajer PT PLN (Persero) PUSENLIS
	<i>60 Years Old</i>	<i>Engineer of Bandung Institute of Technology (1986), Master of Electrical Engineering from University of Wollongong Australia (2004)</i>	<i>Head of the Transmission Division of Western Indonesia at PT PLN (Persero), General Manager of Java-Bali Transmission and Load Delivery Center, Chairperson of the Sumatra-Java Procurement Committee of HVDC Connection, General Manager at PT PLN (Persero) PUSENLIS.</i>
Ultrisza Mednawarman	59 Tahun	PPM School of Management, Electrical Engineer dari Universitas Indonesia	Manager of Commerce PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya & Tangerang, Senior Manajer Pengadaan IPP Jawa Bali, Senior Manajer Manajemen IPP
	<i>59 Years Old</i>	<i>PPM School of Management, Electrical Engineer from Universitas Indonesia</i>	<i>Manager of Commerce at PT PLN (Persero) Jakarta Raya & Tangerang Distribusi, Senior Procurement Manager of IPP Jawa Bali, Senior Management Manager at IPP</i>

Jumlah Dan Komposisi Direksi

Sesuai Anggaran Dasar dan *Board Manual*, Perusahaan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang Anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Direksi PLN Enjiniring terdiri dari 4 orang, yaitu seorang Direktur Utama dan 3 orang Direktur. Seluruh Direksi telah memenuhi kriteria dan ketentuan dalam *fit and proper test* berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait. Setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai.

Komposisi Direksi PLN Enjiniring sebagai berikut.

The Board Of Directors Composition And Number

Based on the Articles of Association and Board Manual, the Company is managed and led by a Board of Directors whose numbers are adjusted to the needs of the Company. In the event that the Board of Directors consists 1 (one) or more member, one of them is appointed as the President Director

PLN Enjiniring Board of Directors consist 4 directors, 1 (one) President Director and 3 (three) other directors. All of them already fulfill required Fit ad Proper Test based on the Limited Liability Company Law, GCG and other provisions. Each of Board of Directors member has adequate integrity, competence and good reputation.

Following is PLN Enjiniring Board of Director Compositions:

Tabel Komposisi Direksi

Table of Board of Directors Composition

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Hernadi Buhron	PLT Direktur Utama PLT President Director
2	Alfi Zamzami	Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HR
3	Yanuar Hakim	Direktur Enjiniring Director of Engineering
4	Ultrisza Mednawarman	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha Director of Marketing and Business Development

Dasar Pengangkatan Anggota Direksi

Anggota Direksi diangkat berdasarkan akta persetujuan rapat RUPS. Dasar pengangkatan tiap-tiap anggota Direksi adalah sebagai berikut.

Primary Point on Appointing Board of Director Member

The Board of Director Members are appointed based on the GMS meeting deed. The basis in appointing each Board of Directors member is as follows.

Tabel Dasar Pengangkatan Direksi

Table of Basis of Directors Appointment

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>
Hernadi Buhron	PLT Direktur Utama <i>PLT President Director</i>	Akta Notaris Lenny Janis Ishak Nomor 76 tanggal 19 November 2019 <i>Notary Deed Lenny Janis Ishak Number 76 on 19 November 2019</i>
Alfi Zamzami	PLT Direktur Keuangan dan SDM <i>PLT Director of Finance and HR</i>	Akta Notaris Lenny Janis Ishak Nomor 76 tanggal 19 November 2019 <i>Notary Deed Lenny Janis Ishak Number 76 on 19 November 2019</i>
Yanuar Hakim	PLT Direktur Enjiniring <i>PLT Director of Engineering</i>	Akta Notaris Lenny Janis Ishak Nomor 76 tanggal 19 November 2019 <i>Notary Deed Lenny Janis Ishak Number 76 on 19 November 2019</i>
Ultrisza Mednawarman	PLT Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha <i>PLT Director of Marketing and Business Development</i>	Akta Notaris Lenny Janis Ishak Nomor 76 tanggal 19 November 2019 <i>Notary Deed Lenny Janis Ishak Number 76 on 19 November 2019</i>

Hubungan Afiliasi Direksi

Direksi senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

The Board of Directors Affiliate Relationship

The Board of Director always acts independently, meaning that their action did not have conflict of interest that can interuted their ability to fulfill their duties independently, weather in the relationships with each other or with The Board of Commisioners.

The Board of Director Members should not have financial relationship, managerial relationship, shareholding and/ or family relationships with each other, The Board of Commisioner Members and/or Controlling Shareholder or corporate relationships, to be able to fulfill their duties independently.

Based on Corporate Articles of Association and others applicable acts, director can not withheld same function as director or President Director in other State-Owned Enterprises or Private Company or other Managerial function, tructural function, and other function in Government Institution.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Affiliate relationship between the member of Board of Directors, Board of Commissioners, and Major Shareholder and/or controllers, are:

1. *Affiliate relationship between each of Board of Directors members.*
2. *Affiliate relationship between Board of Director and Board of Commissioner members.*
3. *Affiliate relationship between Board of Director members and Major Shareholder and/or controllers.*
4. *Affiliate relationship between each of Board of commissioner members .*
5. *Affiliate relationship between Board of Commissioners members and Major Shareholder and/or controllers*

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi
Tabel of Board of Directors Affiliation

Direksi <i>Directors</i>	Hubungan Keuangan dan Keluarga Direksi <i>Financial and Family Relations</i>													
	Hubungan Keuangan Dengan <i>Financial Relation With</i>						Hubungan Keluarga Dengan <i>Family Relations With</i>						Hubungan Kepengurusan Dengan <i>Management Relation With</i>	
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Directors</i>		Pemegang Saham <i>Shareholders</i>		Dewan Komisaris <i>Boards of Commissioners</i>		Direksi <i>Directors</i>		Pemegang Saham <i>Shareholders</i>		Perusahaan lain <i>Other Companies</i>	
	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>
Hernadi Buhron	√		√		√		√		√		√		√	
Alfi Zamzami	√		√		√		√		√		√		√	
Yanuar Hakim	√		√		√		√		√		√		√	
Ultrisza Mednawarman	√		√		√		√		√		√		√	

Antar anggota Direksi dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda.

Between members of the Board of Directors and between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, there is no family relationship up to the third generation, either in a straight line or a side line or an affinity.

Kepemilikan Saham Direksi

Direksi tidak ada yang memiliki saham, baik di PLN Enjiniring maupun di perusahaan lainnya. Kepemilikan saham Direksi sebagai berikut.

The Board Of Directors Share Ownership

The Directors do not own shares, either in PLN Enjiniring or in other companies. The share ownership of the Board of Directors is as follows.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi
Table of Board of Directors' Share Ownership

Direksi	Jabatan	Kepemilikan Saham di PLN Enjiniring	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain
<i>Board of Directors</i>	<i>Position</i>	<i>Share Ownership at PLN Enjiniring</i>	<i>Share Ownership in Other Companies</i>
Hernadi Buhron	PLT Direktur Utama <i>PLT President Director</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>
Alfi Zamzami	Direktur Keuangan dan SDM <i>Director of Finance and HR</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>
Yanuar Hakim	Direktur Enjiniring <i>Director of Engineering</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>
Ultrasza Mednawarman	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha <i>Director of Marketing and Business Development</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>

Rangkap Jabatan Direksi

Pada Tahun 2019 tidak ada Direksi yang melakukan rangkap Jabatan di Perusahaan lain.

Directors Double Job

In 2019, no Board of Directors held concurrent positions at other companies.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
Table Concurrent Positions of the Board of Commissioners

Nama Direksi	Rangkap Jabatan
<i>Name of Directors</i>	<i>Concurrent Positions</i>
Hernadi Buhron	-
Alfi Zamzami	-
Yanuar Hakim	-
Ultrasza Mednawarman	-

Untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan yang disebabkan adanya rangkap jabatan, setiap anggota Direksi diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas yang berisikan keterangan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi tidak akan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pakta Integritas tersebut disimpan dan diadministrasikan oleh Sekretaris

Pengelolaan Benturan Kepentingan

Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan.

1. Menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan, meliputi:
 - a. Menyusun mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi Direksi dan pejabat struktural Perusahaan yang disebabkan benturan kepentingan;
 - b. Mensosialisasikan kebijakan tentang mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan pejabat struktural Perusahaan;
 - c. Menandatangani surat pernyataan Direksi tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan Perusahaan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.
2. Menetapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.
 - a. Menyampaikan laporan kepemilikan Saham pada Perusahaan lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam daftar khusus;
 - b. Menandatangani Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS;
 - c. Tidak terdapat pengambilan keputusan transaksional yang mengandung benturan kepentingan.

To minimize conflicts of interest due to concurrent positions, each member of the Board of Directors is required to sign an Integrity Treaty which states that in carrying out their duties, members of the Board of Directors will not do things that could create a conflict of interest. The Integrity Treaty is kept and administered by the Secretary

Conflict Of Interest Management

The Board of Directors monitors and manages potential conflicts of interest.

1. *Establishing policies regarding mechanisms for the Board of Directors and structural officers, to prevent personal and other party profit taking due to conflicts of interest, including:*
 - a. *Formulating a mechanism to prevent personal gain from the Directors and structural officers of the Company due to a conflict of interest;*
 - b. *Disseminating policies on mechanisms to prevent the Board of Directors and company's structural officers gaining personal advantage;*
 - c. *Signing a statement that the Board of Directors does not have a conflict of interest between personal / family interests, other positions, or groups with the company's interests at the beginning of the appointment, which is renewed at the beginning of the year.*
2. *Establishing policies to prevent conflicts of interest*
 - a. *Submitting share ownership reports in other companies to the Company (Company Secretary) to be recorded in a special list;*
 - b. *Signing the Integrity Treaty attached to the Action Proposal of the Board of Directors which must obtain approval from the Board of Commissioners and / or a recommendation from the Board of Commissioners and approval from the GMS;*
 - c. *There is no transactional decision making that contains a conflict of interest*

Benturan Kepentingan

1. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan berbenturan kepentingan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh dan dari anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
2. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua Anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau diwakili oleh seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris secara tertulis.
3. Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka RUPS dapat mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut pada angka 1 dan 2 di atas.

Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi 2019

Selama 2019, Direksi telah melaksanakan tugas pengurusan PLN Enjiniring sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, antara lain:

1. Penyusunan perencanaan perusahaan, antara lain RKAP 2019.
2. Pemenuhan target kinerja perusahaan.
3. Pelaksanaan *Cost Revenue Management Program* (CRMP).
4. Penjajakan *Partnership* dengan investor *reputable* dalam pengembangan energi terbarukan.
5. Sistem penilaian kinerja Direksi secara Individu/ Direktorat dan Kolegial.
6. KKG, KKO, Kajian Risiko dan Mitigasinya untuk *project* yang didanai oleh SHL.
7. *Compliance* terhadap *covenant* obligasi
8. Penyelenggaraan rapat Direksi, menghadiri rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham;
9. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal; serta
10. Pelaksanaan tugas lainnya terkait kepemimpinan perusahaan.

Conflict of Interst

1. *If something happens where the interests of the Company conflict with one of The Board of Directors interests, the Company will be represented by another member of the Board of Directors appointed by and from members of the Board of Directors who have no conflict of interest.*
2. *If the conflict of interest concerns all Members of the Board of Directors, the Company will be represented by the Board of Commissioners or represented by one or more members appointed by the Board of Commissioners in written statement.*
3. *In the absence of the Board of Commissioners, the GMS may appoint one or more persons to represent the Company to perform the tasks mentioned in numbers 1 and 2 above.*

The Board Of Directors Duties And Responsibilities Implementation In 2019

During 2019, the Board of Directors has carried out its duties of managing PLN Enjiniring in accordance with the applicable laws and regulations and the Articles of Association, including:

1. *Drafting of company plans, including the 2019 RKAP.*
2. *Fulfillment of company performance targets.*
3. *Implementing Cost Revenue Management Program (CRMP).*
4. *Individual / directorate and collegial performance appraisal system for Directors*
5. *Board of Directors performance evaluation system by Individuals/Directorate and collegiality.*
6. *KKG, KKO, Risk and its mitigation Assessment for projects funded by SHL.*
7. *Compliance with covenants obligation*
8. *Organizing Board of Directors meetings, attending Board of Commissioners meetings and General Meeting of Shareholders;*
9. *Internal business supervision and improvement processes; and*
10. *Implementing other duties related to company management.*

Rapat Direksi

Pelaksanaan rapat Direksi PLN Enjiniring diselenggarakan minimal sekali dalam seminggu. Rapat Direksi tersebut dapat berupa rapat internal Direksi, maupun rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi.

The Board Of Directors Meetings

The PLN Enjiniring Board of Directors meeting is held at least once a week. The Board of Directors meeting can at the form of the Board of Directors internal meeting, as well as a the Board of Commissioners and the Board of Directors joint meeting.

Frekuensi Dan Kehadiran Rapat Direksi

The Board Of Directors Meeting Frequency And Attendance

Tabel Frekuensi Dan Kehadiran Rapat Direksi

Table of Frequency and Attendance of Board of Directors' Meetings

No	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris		
			<i>Board of Directors' Meeting</i>			<i>Joint Meeting of Boad of Directors and Board of Commissioners</i>		
			Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat	Persentase Tingkat Kehadiran	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat	Persentase Tingkat Kehadiran
			<i>Number of Meetings</i>	<i>Frequency of Meetings</i>	<i>Percentage of Attendance rate</i>	<i>Number of Meetings</i>	<i>Frequency of Meetings</i>	<i>Percentage of Attendance rate</i>
1	Hernadi Buhron	PLT Direktur Utama <i>PLT President Director</i>	14	14	100%	14	14	100%
2	Alfi Zamzami	PLT Direktur Keuangan dan SDM <i>PLT Director of Finance and HR</i>	14	14	100%	14	14	100%
3	Yanuar Hakim	PLT Direktur Enjiniring <i>PLT Director of Engineering</i>	14	14	100%	14	14	100%
4	Ultrisza Mednawarman	PLT Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha <i>PLT Director of Marketing and Business Development</i>	14	14	100%	14	14	100%

Agenda, Tanggal Dan Persiapan Rapat Internal Direksi

The Board Of Directors Internal Meeting Preparation Agenda And Date

Sepanjang tahun 2019, agenda, tanggal dan peserta Rapat Internal Direksi adalah sebagai berikut.

Throughout 2019, the agenda, dates and participants of the Board of Directors Internal Meeting are as follows.

Tabel Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Internal Direksi
The Agenda, Date and Participants of Internal Directors' Meetings

No	Tanggal Rapat <i>Date of Meeting</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i>
1	25 Februari 2019 <i>February 25, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut rapat sebelumnya Persiapan Sertifikasi K3 untuk CNG Bangkanai Progress Rencana Kerja Bidang s/d Februari 2019 Hal-hal lain yang perlu dibahas <p><i>1. Follow up on the previous meeting</i></p> <p><i>2. Preparation for K3 Certification for CNG Bangkanai</i></p> <p><i>3. Work Plans Progress up to February 2019</i></p> <p><i>4. Other things that need to be discussed</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Hernadi Buhron Ultrasza Mednawarman Yanuar Hakim Alfi Zamzami
2	27 Maret 2019 <i>March 27, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> Pengawasan Fraud di PLNE <p><i>1. Fraud Supervision at PLNE</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Hernadi Buhron Ultrasza Mednawarman Yanuar Hakim Alfi Zamzami
3	29 Maret 2019 <i>March 29, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Restrukturisasi PLNE <p><i>1. Approval for PLNE Restructuring</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Hernadi Buhron Ultrasza Mednawarman Yanuar Hakim Alfi Zamzami
4	2 April 2019 April 02, 2019	<ol style="list-style-type: none"> Strategi Pemasaran terkait surat Pusenlis No. 0346/REN.06.02/PUSENLIS/2019 tanggal 20 Maret 2019 Perihal Usulan Pekerjaan Enjiniring Prioritas tahun 2019 sesuai RUPTL 2019 - 2028 Tindak lanjut MoU STT PLN dengan PLNE Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <p><i>1. Marketing strategy related to Pusenlis letter No. 0346 / REN.06.02 / PUSENLIS / 2019 dated 20 March 2019 Regarding Proposed Priority Engineering Works for 2019 according to RUPTL 2019 - 2028</i></p> <p><i>2. Follow up of the MoU STT PLN with PLNE</i></p> <p><i>3. Other things that need to be discussed</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Hernadi Buhron Ultrasza Mednawarman Yanuar Hakim Alfi Zamzami

5	10 Mei 2019 <i>May 10, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Persiapan RUPS LPT 2018 2. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Preparation for the 2018 LPT GMS</i> 2. <i>Other things that need to be discussed</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
6	20 Juni 2019 <i>June 20, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut rapat sebelumnya 2. Laporan Kinerja Perusahaan TW II Tahun 2019 3. Persiapan PLNE menuju produk DED sesuai dengan SK Direksi No. 08.001.K/432/DIRENG/PLNE/V/2019 <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Follow up on the previous meeting</i> 2. <i>Company Performance Report for the Second Quarter of 2019</i> 3. <i>PLNE preparations for DED products in accordance with the Directors Decree No. 08.001.K / 432 / DIRENG / PLNE / V / 2019</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
7	02 Juli 2019 <i>July 02, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Arahan RUPS RKAP 2019 terkait Implementasi surat Dirut PLN Pusat No. 0868/REN.05.02/DIRUT/2019-R tanggal 11 Juni 2019 perihal Penataan Portofolio Bisnis Anak Perusahaan 2. Persiapan Materi Presentasi terkait Implementasi surat Dirut PLN Pusat No. 0868/REN.05.02/DIRUT/2019-R tanggal 11 Juni 2019 3. Pemaparan Mekanisme Kerjasama PLNE dengan Mitra Strategis <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Implementation of the 2019 RKAP GMS Directives related to the Implementation of the Central PLN President Director letter No. 0868 / REN.05.02 / DIRUT / 2019-R dated 11 June 2019 concerning Structuring of Subsidiary Business Portfolio</i> 2. <i>Preparation of Presentation Materials related to the Implementation of the letter No. 0868 / REN.05.02 / DIRUT / 2019-R dated 11 June 2019</i> 3. <i>Explanation of the PLNE Collaboration Mechanism with Strategic Partners</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
8	09 Juli 2019 <i>July 09, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PLNE Goes to Detailed Design <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>PLNE Goes to Detailed Design</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
9	26 Agustus 2019 <i>August 26, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Outline KKO dan KKF Project 2. Pembahasan Proses Menuju Perusahaan DED <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Discussion on KKO and KKF Project Outlines</i> 2. <i>Discussion of the Process Towards a Company DED</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami

10	17 September 2019 <i>September 17, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Rapat Dekom tanggal 19 September 2019 2. Pembahasan perubahan Anggaran Dasar tentang : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian bidang usaha berdasarkan KBLI 2017 b. Penyesuaian jumlah kepemilikan lembar saham c. Penegasan kembali batas kewenangan direksi 3. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian <p><i>1. Preparation for the Board of Commissioners Meeting on 19 September 2019</i></p> <p><i>2. Discussion on amendments to the Articles of Association concerning:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. Adjustment of business fields based on KBLI 2017</i> <i>b. Adjustment of the number of share ownership</i> <i>c. Reaffirm the limits of authority of the board of directors</i> <p><i>3. Other things that need to be discussed</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
11	15 Oktober 2019 <i>October 15, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Progres Pengalihan OM CNG Bangkanai 2. Paparan Laporan Keuangan Per 30 September 2019 <p><i>1. Discussion on the Progress of the Transfer of OM CNG Bangkanai</i></p> <p><i>2. Financial Report Exposure as of September 30, 2019</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
12	23 Oktober 2019 <i>October 23, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan rapat Direksi - Dekom 2. Masukan Isu-isu Strategis 2020 oleh BOD <p><i>1. Preparation for the Board of Directors - Board of Commissioners meeting</i></p> <p><i>2. Input on 2020 Strategic Issues by BOD</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
13	13 November 2019 <i>November 13, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Overhaul Gas Engine dan Pengadaan Security CNG Bangkanai 2. Persiapan Rapat Direksi - Dekom 3. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian <p><i>1. Gas Engine Overhaul Procurement and Security CNG Bangkanai Procurement</i></p> <p><i>2. Preparation for the Board of Directors - Board of Commissioners meeting</i></p> <p><i>3. Other things that need to be discussed</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
14	25 November 2019 <i>November 25, 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Magang PLNE dengan IKPT 2. Pembahasan terkait Pergantian Direktur Keuangan CPSI <p><i>1. PLNE Internship Program with IKPT</i></p> <p><i>2. Discussion related to the replacement of the CPNS Finance Director</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami

Agenda, tanggal dan peserta rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris telah dijabarkan pada bagian agenda, tanggal dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dalam laporan tahunan ini.

The agenda, dates and participants of the joint meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners have been described in the agenda, dates and participants of the joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in this annual report.

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

1. Kepada Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan yang bersangkutan.
2. Tanggung Jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.
3. Program Pengenalan meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
 - b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;
 - c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
 - d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
5. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan dimana program tersebut dilaksanakan.
6. Anggota Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan:
 - a. Direksi menyampaikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat.
 - b. Tingkat kehadiran/keaktifan Anggota Direksi dalam mengikuti rangkaian program pengenalan perusahaan.

Orientation Program For New Board Of Directors

1. *The Board of Directors Member who are appointed for the first time must be given an introduction program regarding the Company in concerned.*
2. *The responsibility for conducting the introduction program rests in the Corporate Secretary or whoever carries out the function as company secretary.*
3. *The Introductory Program includes:*
 - a. *Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;*
 - b. *Implementation of GCG principles by the Company; An overview of the Company in relation to the objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short and long term business plans, competitive position, risks and various other strategic issues;*
 - c. *Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Committee Audit;*
 - d. *Information regarding the Board of Commissioners / Board of Supervisors and Directors duties and responsibilities as well as things that are not allowed.*
4. *Company introduction programs may take formed of presentations, meetings, company visits and document review or other programs deemed appropriate to the Company where the program is implemented.*
5. *Newly appointed members of the Board of Directors participate in the introduction program organized by the company:*
 - a. *The Board of Directors submits to the Corporate Secretary an introduction program for the newly appointed members of the Board of Directors.*
 - b. *The level of attendance / activity of the members of the Board of Directors in participating in a series of company introduction programs.*

Pengembangan Kompetensi Direksi

Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan.

1. Terdapat kebijakan tentang pelatihan bagi anggota Direksi sesuai kebutuhan.
2. Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Direksi.
3. Pelatihan bagi anggota Direksi direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris.
4. Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi.

Sepanjang tahun 2019, anggota Direksi Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi, seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

The Board Of Directors Competencies Development

The Board of Directors attending training programs in order to improve the competence of members of the Board of Directors as needed.

1. *The availability of policy regarding training for members of the Board of Directors as needed.*
2. *The availability of work plan and training activities budget for the Board of Directors members*
3. *Training for the Board of Directors members is implemented in accordance with the work plan of the Board of Commissioners.*
4. *The report regarding the training result that the Board of Directors members have undertaken is available.*

Throughout 2019, the Company's Board of Directors members have participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences, seminars, as shown in the following table:

Tabel Pengembangan Kompetensi Direksi

Table of Directors Competency Development

Direksi	Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
<i>Board of Directors</i>	<i>Competency/Training Development Materials</i>	<i>Execution Time</i>	<i>Types of Training and Organizers</i>
Hernadi Buhron	CRGP	1-3 Juli 2019	RAP/LSPMR
	CRGP	1-3 Juli 2019	RAP/LSPMR
Yanuar Hakim	Workshop Corporation, Merger & Acquisition and Managing Subsidiaries Batch II	25-29 November 2019	PT PLN (Persero)
	CRGP	1-3 Juli 2019	RAP/LSPMR
Ultrisza Mednawarman	Workshop Corporation, Merger & Acquisition and Managing Subsidiaries Batch II	25-29 November 2019	PT PLN (Persero)
Alfi Zamzami	CRGP	1-3 Juli 2019	RAP/LSPMR

Penilaian Kinerja Direksi

Direksi telah berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, telah dilakukan penilaian kinerja Direksi melalui *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris dan pelaksanaan *Assessment GCG*.

• PENILAIAN KINERJA DIREKSI BERDASARKAN KPI

Penilaian kinerja Direksi melalui *Key Performance Indicator* (KPI) tahun 2019 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham melalui Kontrak Manajemen tanggal 17 Februari 2020

• PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui mekanisme RUPS Tahunan. Keputusan RUPS Tahunan sudah diuraikan dalam bagian RUPS dalam laporan ini.

• KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Adapun kriteria penilaian berdasarkan KPI yang telah ditetapkan dalam RUPS melalui kontrak manajemen adalah sebagai berikut.

1. Fokus Pelanggan
2. Efektifitas Produk dan Proses
3. Fokus Tenaga Kerja
4. Keuangan dan Pasar
5. Kepemimpinan, Tata kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan

• PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pihak yang melakukan Penilaian kinerja Direksi adalah Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Direksi akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada periode 2018 dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2019.

The Board Of Directors Performance Appraisal

The Board of Directors is committed to continuously improving its performance achievements. To support this, the Board of Directors performance appraisal has been done through the Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI) and the implementation of the GCG Assessment.

• THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL PROCEDURE BASED ON KPI

The Board of Directors performance Assessment done through the 2019 Key Performance Indicator (KPI) which was approved by the Shareholders through a Management Contract dated February 17, 2020

• THE BOARD OF DIRECTORS APPRAISAL IN IMPLEMENTING PERFORMANCE PROCEDURE

The performance appraisal procedure for the Board of Directors is carried out through the Annual GMS mechanism . The resolutions of the Annual GMS have been described in the GMS section of this report.

• THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL CRITERIA

The criteria for KPI based appraisal that have been determined through a management contract in the GMS are as follows.

1. *Customer Focus*
2. *Product and Process Effectivity*
3. *Workforce Focus*
4. *Market and Finances*
5. *Leadership, Governance and Community Responsibility*

• PARTIES THAT CONDUCT THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL

The party that conducts the performance appraisal of the Board of Directors is the Shareholders in the GMS based on the obligations stipulated in the prevailing laws and regulations and the Articles of Association as well as the mandate of the Shareholders. The Board of Directors will be accountable for their performance in the 2018 period in the GMS which will be held in 2019.

- **HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Hasil penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI pada tahun 2019, sebagai berikut ;

- **THE BORD OF DIRECTORS APPRAISAL RESULTS**

The Board of Directors performance appraisal results based on KPI in 2019 are as follows

Tabel Hasil Penilaian Kinerja Direksi
Table of Directors' Performance Assessment Results

No	Indikator <i>Indicator</i>	Bobot <i>Weight</i>	Nilai <i>Score</i>
1	Fokus Pelanggan <i>Customer Focus</i>	10	9.23
2	Efektifitas Produk dan Proses <i>Effectiveness of Products and Processes</i>	39	31.62
3	Fokus Tenaga Kerja <i>HR</i>	16	15.53
4	Keuangan dan Pasar <i>Finance and Markets</i>	29	27.31
5	Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat <i>Leadership, governance and social responsibility</i>	6	5.95
TOTAL		100	89.64

Hasil penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI digolongkan dalam kondisi "BAIK" kategori "AA" dengan nilai 89.64

The Board of Directors performance appraisal results based on KPI are classified as "GOOD" in the "AA" category with a score of 89.64

- **PENILAIAN KINERJA DIREKSI BERDASARKAN SELF ASSESSMENT**

Direksi berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kinerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan penilaian kinerja Direksi melalui pelaksanaan Assessment GCG.

- **THE DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL BASED ON SELF ASSESSMENT**

The Board of Directors is committed to continuously improving its performance achievement. To support this, a performance appraisal of the Board of Directors is carried out through the implementation of the GCG Assessment.

- **PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Prosedur pelaksanaan Pelaksanaan Assessment GCG terkait Kinerja Direksi adalah, sebagai berikut.

1. Tim *Self Assessment* Perseroan disiapkan dalam melaksanakan *Self Assessment* GCG.
2. Tim *Self Assessment* GCG mengkoordinir seluruh unit kerja terkait, termasuk berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan *Self Assessment* GCG

- **PROCEDURE ON IMPLEMENTING PERFORMANCE APPARISAL OF THE BOARD OF DIRECTORS**

The procedures for implementing GCG Assessment regarding the Performance of the Board of Directors are as follows.

1. *The Company's Self Assessment Team is prepared to performing the GCG Self Assessment.*
2. *Self Assessment GCG The GCG Self Assessment Team coordinates all related work units, including coordinating with the Board of Commissioners in order to carry out the GCG Self Assessment*

3. Tim *Self Assessment* memberikan nilai komposit termasuk faktor positif dan negatif untuk disampaikan kepada Direksi dan kemudian dimintakan persetujuan Dewan Komisaris
4. Pelaksanaan Assessment GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap tahun

• KINERJA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran Direksi;
2. Pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab Direksi yang jelas;
3. Penyusunan perencanaan perusahaan;
4. Pemenuhan target kinerja perusahaan;
5. Pelaksanaan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;
6. Pelaksanaan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar;
7. Pelaksanaan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan pemangku kepentingan;
8. Memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi;
9. Pelaksanaan keterbukaan informasi dan komunikasi, serta penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara tepat waktu;
10. Penyelenggaraan rapat Direksi dan kehadiran pada rapat Dewan Komisaris;
11. Penyelenggaraan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif;
12. Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif;
13. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

• PIHAK YANG MELAKSANAKAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pihak yang melakukan Penilaian Kinerja Direksi terdiri dari Tim Assessment PLN Enjiniring yang diketuai oleh Sekretaris Perusahaan.

3. *Self Assessment Team* provides a composite score including positive and negative factors to be submitted to the Board of Directors and then seek the Board of Commissioners approval.
4. *Implementation of the GCG Assessment is done periodically every year.*

• THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL

The criteria being used in the Board of Directors performance appraisal includes:

1. *The Board of Directors training / learning programs implementation;*
2. *A clear duties / functions distribution, authorities and responsibilities for the Board of Directors;*
3. *Company plan drafting;*
4. *Company performance target fulfillments;*
5. *Operational and financial controls Implementation on the company plans and policies implementation;*
6. *Implementation of company management in accordance with the applicable laws and regulations and the Articles of Association;*
7. *The implementation of value-added relationships for the company and stakeholders;*
8. *Monitor and manage potential conflicts of interest for members of the Board of Directors and management under the Board of Directors;*
9. *Implementation of information and communication disclosure, as well as timely manner information delivery to the Board of Commissioners and Shareholders;*
10. *Organizing Board of Directors meetings and attendance at Board of Commissioners meetings;*
11. *Implementation of quality and effective internal control;*
12. *To carry out the functions of the Corporate Secretary that are quality and effective;*
13. *Organizing the Annual GMS and other GMS in accordance with laws and regulations.*

• PARTIES THAT IMPLEMENT THE PERFORMANCE APPRAISAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

The party conducting the Board of Directors Performance Appraisal consists of the PLN Engineering Assessment Team, chaired by the Corporate Secretary.

• HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pada tahun 2019, hasil penilaian kinerja Direksi mencapai skor 30.77 dengan capaian 90.09 dan predikat Sangat Baik.

• KEBIJAKAN REMUNERASI DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mendapat sejumlah remunerasi dan fasilitas lainnya. Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Direksi didasarkan pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham.

• PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota Direksi juga dapat diberikan fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh bertentangan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DIREKSI

MASA JABATAN

1. Masa jabatan Anggota Direksi ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatan berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan

• THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL RESULTS

In 2019, the results of the Board of Directors performance appraisal reached a score of 30.77 with an achievement of 90.09 and the predicate Very Good.

• BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION POLICY

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors receives a number of remuneration and other facilities. The policy for providing remuneration and other facilities for the Board of Directors is based on article 6 decree (1) Laws of Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and PT PLN (Persero) the Board of Directors decision as the Shareholders authority.

• PROCEDURES FOR DETERMINING THE REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Members of the Board of Directors are given salaries and allowances / facilities including retirement benefits, the types and amounts of which are determined by the General Meeting of Shareholders with consideration of applicable laws and regulations. Members of the Board of Directors may also be provided with facilities that are adjusted to the company financial conditions and capabilities and may not conflict with laws and regulations and may not conflict with the General Meeting of Shareholders' decisions.

THE BOARD OF DIRECTORS TERM OF OFFICE, DISMISSION AND RESIGNATION)

Term of Office

1. The Board of Directors members term of office is set for 4 (four) years and can be reappointed for 1 (one) term of office.
2. The Board of Directors term of office ends when:
 - a. Passed Away
 - b. End of term
 - c. Dismissed based on the General Meeting of Shareholders decisions;
 - d. No longer meets the requirements as the Board of Directors member based on the decision of the Articles of Association and applicable laws and regulations.

pengunduran diri.

4. Dalam hal masa jabatan Anggota Direksi berakhir dan Rapat Umum Pemegang Saham belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas Anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan Anggota Direksi yang lowong.
5. Bagi Anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun pada masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBERHENTIAN SEWAKTU-WAKTU ANGGOTA DIREKSI

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para Anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, Anggota Direksi:
 - a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - d. Terlibat dalam tindakan merugikan Perseroan dan/atau Negara;
 - e. Dinyatakan bersalah sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - f. Mengundurkan diri.
3. Di samping alasan pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan f tersebut di atas, Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
4. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, b, c dan d dan

3. *The decision as referred in item 2 letter d above include but are not limited to prohibited concurrent positions and resignations.*
4. *In the event that the term of office of a Member of the Board of Directors ends and the General Meeting of Shareholders has not been able to determine a replacement, then the duties of the vacant Member of the Board of Directors shall be carried out in accordance with the provisions for filling the position of the vacant Member of the Board of Directors*
5. *For a member of the Board of Directors who resigning before or during his term of office, unless he resigns due to death, he / she is obliged to convey accountability for actions that have not been accepted by the General Meeting of Shareholders.*

TERMINATION OF THE MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. *The General Meeting of Shareholders may dismiss the Members of the Board of Directors at any time by stating the reasons.*
2. *The reasons for the dismissal of a Member of the Board of Directors as referred to in number 1 above are made if based on facts, the Member of the Board of Directors:*
 - a. *Failure to fulfill their obligations as agreed in the management contract;*
 - b. *Cannot properly carry out their duties;*
 - c. *Not implementing or violating the applicable laws and regulations and / or provisions of the Articles of Association;*
 - d. *Being involved in an act that contributes loss to the Company and / or the State;*
 - e. *Found guilty in connection with letters a, b and c above based on a court decision which has permanent legal force.*
 - f. *Resigning*
3. *In addition to the reasons the the Board of Director member dismissal as referred in number 2 letter a to f above, the Board of Directors may be dismissed by the General Meeting of Shareholders based on other reasons deemed appropriate by the General Meeting of Shareholders for the interests and objectives of the Company.*

- angka 3 di atas, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
5. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, diberitahukan kepada Anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
 6. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas, disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas.
 7. Dalam hal Anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri dan menyatakan tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 diatas dianggap telah terpenuhi.
 8. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas.
 9. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, masih dalam proses, maka Anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
 10. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d dan e tersebut di atas, adalah merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
4. *The decision to dismiss as referred to in number 2 letters a, b, c and d and number 3 above, is taken after the person concerned has been given the opportunity to defend himself.*
 5. *The plan to dismiss any member of the Board of Directors at any time as referred to in number 1 above, sPagel be notified to the Member of the Board of Directors in writing orally or in writing by the Shareholders.*
 6. *In the event that the dismissal is carried out outside the General Meeting of Shareholders, the defense as referred in number 4 above, sPagel be submitted in writing to the Shareholders within 14 (fourteen) days after the notification given to the Member of the Board of Directors as referred to in number 5 above.*
 7. *In the event that the dismissed member of the Board of Directors has defended himself and expressed no objection to his/her dismissal planned at the time of notification, then the time requirement as referred to in number 6 above is deemed fulfilled.*
 8. *In the event that the dismissal is carried out at the General Meeting of Shareholders, the defense as referred in number 4 above, sPagel be carried out in the General Meeting of Shareholders by disregarding the time limit provisions as referred in number 6 above.*
 9. *As long as the plan for dismissal as referred to in number 5 above is still in process, the Member of the Board of Directors in concerned sPagel carry out his duties accordingly.*
 10. *Dismissal due to reasons as referred in number 2 letters d and e above, is deemed a dishonorable discharge.*

PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DIREKSI

Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

TEMPORARY DISCONTINUATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors Members can be temporarily suspended by the Board of Commissioners if they act contrary to the Company's Articles of Association or there is an indication that has made losses to the Company or neglect their obligations or there is an urgent reason for the Company, by taking into account the following conditions:

1. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara Anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
 2. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi.
 3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
 4. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 5. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 6. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 7. Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir.
 8. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas tidak diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
 9. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara menjadi batal sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas.
 10. Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara Anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham
1. *The Board of Commissioners decision regarding temporarily suspension of the Board of Directors member conducted in accordance with the Board of Commissioners decisions making procedures.*
 2. *The written temporary suspension must be notified to the person in concerned along with the reason that let to the action taken and a copy to Shareholders and Directors.*
 3. *The Notification referred in number 2 above is submitted within 2 (two) days at the latest after the temporary dismissal has been set up.*
 4. *The Board of Directors who is temporarily dismiss/suspended no longer authorized to carry out the Company management and represent the Company both inside and outside the court.*
 5. *Within a period of no later than 30 (thirty) days after the temporary dismissal, a General Meeting of Shareholders must be held by the Board of Commissioners who will decide whether to withdraw or enforce the temporary dismissal decision.*
 6. *In the General Meeting of Shareholders as referred in number 5 above, the Board of Directors member in concerned is given the opportunity to defend himself.*
 7. *The meeting as referred in number 5 above is chaired by a shareholder who is assigned by and from the attending Shareholders attendee.*
 8. *In the event that the 30 (thirty) day period has passed, the General Meeting of Shareholders as referred in number 5 above is not being held or the General Meeting of Shareholders is unable to make a decision, the temporary dismissal will be canceled.*
 9. *The temporary dismissal cannot be extended or reset for the same reasons, if the temporary dismissal becomes canceled as referred to in number 8 above.*
 10. *Decision to withdraw or strengthen the decision to temporarily dismiss a Member of the Board of Directors, can also be carried out by the Shareholders outside the General Meeting of Shareholders under the condition that all Shareholders with voting rights agree in writing by signing the decree of the member in concerned.*

dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menanda-tangani keputusan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas.

11. Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara Anggota Direksi di luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas, maka Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara lisan atau tertulis, dengan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan.
12. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas, maka Anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

PENGUNDURAN DIRI

1. Seorang Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran dirinya disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.
2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh Anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif tanggal pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka Anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut diatas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham

11. *In the case of a decision to withdraw or forcing the temporarily dismiss decision a Member of the Board of Directors outside the General Meeting of Shareholders as referred to in number 10 above, then the member in concerned of the Board of Directors is notified verbally or in writing, given the opportunity to submit a written defense within 14 (fourteen) days after receiving the notification.*
12. *If the General Meeting of Shareholders or Shareholders cancels the temporary dismissal or the situation as referred in number 8 above occurs, the Member in concerned of the Board of Directors sPagel carry out his duties again accordingly.*

RESIGNATION

1. *The Board of Directors Member has the right to resign from his/her position by notifying in writing of his intentions to the Company with a copy to the Shareholders, Board of Commissioners and other members of the Board of Directors of the Company no later than 30 (thirty) days before the date of his resignation. If the resignation letter states the effective date is less than 30 (thirty) days from the date of receiving letter, it is deemed not to mention the effective date of resignation.*
2. *If up to requested date by the Member of the Board of Directors in concerned or within 30 (thirty) days from the date of the resignation application lette has been recieved, in the event that the effective date of resignation is not stated, there is no decision from the General Meeting of Shareholders, then the Member of the Board of Directors stop on the date requested above or by the expiration of 30 (thirty) days from the date the resignation application is received without requiring the approval of the General Meeting of Shareholders.*

Organ dan Komite dibawah Dewan Komisaris

Organisation and Committees under the Board of Commissioners

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Organ pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, jika diperlukan b. Komite Audit; c. Komite Lainnya, jika diperlukan. 2. Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c di atas, terdiri dari namun tidak terbatas pada Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan komite Pengembangan Usaha. 3. Seorang atau lebih anggota Komite berasal dari anggota Dewan Komisaris. 4. Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain lebih dari satu dan/atau menetapkan jumlah anggota komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau b. Disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas di BUMN yang bersangkutan. 5. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Supporting organization for the Board of Commissioners / Supervisory Board, consisting of: <ol style="list-style-type: none"> a. The Board of Commissioners /Supervisory Board Secretariat, if needed b. Audit Committees c. Other Committees if needed. 2. Other Committees as referred to in number 1 letter c above, consist of but are not limited to the Risk Management Monitoring Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Business Development Committee. 3. One or more committee member from The Board of Commissioners) 4. The Board of Commissioners may form more than one other committee and / or determine the number of committee members who are not members of the Board of Commissioners more than 2 (two) if: <ol style="list-style-type: none"> a. Required based on applicable laws and regulations; or b. Approved by the States-Owned Enterprises Ministry based on the complexity and load faced by the Board of Commissioners in carrying out their duties at the States-Owned Enterprises (BUMN) concerned. 5. Comitees that responsible to the Board of Commissioners. |
|---|--|

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Sekretaris Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Dewan Komisaris dibantu staf Sekretariat Dewan Komisaris.
2. Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners Secretary

Appointment and Dismissal of Members of the the Board of Commissioners Secretary

1. The Board of Commissioners may form a Secretariat for the Board of Commissioners which led by a Board of Commissioners assisted by Secretariat staff of the Board of Commissioners.
2. The Board of Commissioners Secretary and its staff are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

3. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar Perseroan.

3. *The Board of Commissioners Secretary comes from outside the Company.*

Tugas Sekretariat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. Sekretariat Dewan Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas, dengan ketentuan:

1. Adanya uraian tugas bagi Sekretariat Komisaris yang ditetapkan oleh Komisaris Utama.
2. Tugas pokok dan fungsi adalah membantu Dewan Komisaris dalam bidang kegiatan kesekretariatan paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris;
 - b. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham/ Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya;
 - c. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan (a) monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris; (b) Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaan; (c) Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
 - d. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.
3. Sekretaris Dewan Komisaris melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen berupa:
 - a. Mempunyai fasilitas penyimpanan dokumen Komisaris yang disediakan oleh perusahaan.

The duties of the Board of Commissioners Secretariat

The duties of the Board of Commissioners Secretary are to support of the board of commissioners the duties. The Secretariat of the Board of Commissioners has a clear job description, in following condition

1. *Job description for the Secretariat of Commissioners appointed by the President Commissioner.*
2. *Its functions main duties are to assist the Board of Commissioners in secretarial activities, covering at least the following:*
 - a. *Carrying out secretarial administrative activities within the Board of Commissioners;*
 - b. *Organizing Board of Commissioners meetings and meetings / gathering between the Board of Commissioners and Shareholders / Share Owners, Directors and other related parties;*
 - c. *Provide data / information required by the Board of Commissioners and committees within the Board of Commissioners related to (a) monitoring follow-up of the decisions, recommendations and direction from the Board of Commissioners; (b) Administrative materials regarding reports / activities of the Board of Directors in managing the company; (c) Administrative support as well as monitoring on the matters of require approval or recommendation from the Board of Commissioners in connection with company management activities performed by the Board of Directors;*
 - d. *Collecting technical data from Committees within the Board of Commissioners for the Board of Commissioners purposes.*
3. *The Board of Commissioners Secretary administers and keeps documents in the form of:*
 - a. *Provided commissioners document storage facility from the company.*

- b. Mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris dan dokumen lainnya dengan tertib.
4. Berdasarkan penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Sekretariat Dewan Komisaris dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Masa Jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris

Masa jabatan Sekretaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Evaluasi Kinerja Sekretariat Dewan Komisaris

Evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metoda yang ditetapkan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

■ Bowo Setiadji

Warga Negara Indonesia, umur 63 tahun. Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak 2011. Pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Enjiniring dan Teknologi PT PLN (Persero) (2009-2011), Deputy Direktur PLN Transmisi Luar Jawa- Bali (2008-2009), General Manager PLN Jasa Enjiniring (2002-2008), Direktur Transmisi dan Distribusi PT Delta Rekadaya Mandiri (2002), Asisten Kepala Divisi Transmisi dan Gardu Induk PLN Jasa Enjiniring (1996-2002), Senior Enjinir dan Ketua Tim berbagai Proyek Transmisi dan Gardu Induk 150kV dan 500kV PLN Jasa Enjiniring (1988-2002), serta Kepala Seksi Teknik Listrik, pada Sub Direktorat Teknik Jaringan dan Gardu (SUBDITRING), PT PLN (Persero)

- b. Administer incoming and outgoing letters to and from the Board of Commissioners and other documents in an orderly manner.

4. Based on a written assignment from the Board of Commissioners, the Board of Commissioners Secretariat have access on notes or information about employees, funds, assets, and other resources belonging to the Company relating to the implementation of their duties.

The Board of Commissioners Secretary and Its Staff Term of Office

The Board of Commissioners Secretary and its staff term of office is determined by the Board of Commissioners for a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

The Board of Commissioners Secretariat Performance Evaluation

The performance of the Board of Commissioners / Supervisory Board Secretariat Evaluation is carried out every 1 (one) year using the method determined by the Board of Commissioners / Board of Supervisors.

Board of Commissioners' Secretary Profile

■ Bowo Setiadji

63 years old, Indonesian citizen. Served as Secretary of the Board of Commissioners since 2011. Previously served as PT PLN (Persero) Head of the Engineering and Technology Division (2009-2011), Deputy Director of PLN Transmission Outside Java-Bali (2008-2009), General Manager of PLN Engineering Services (2002-2008), Director of Transmission and Distribution of PT Delta Rekadaya Mandiri (2002), Assistant Head of the PLN Transmission and Substation Division of Engineering Services (1996-2002), Senior Engineer and Team Leader of various PLN 150kV and 500kV Transmission and Substation Projects for Engineering Services (1988-2002), and Head of the Electrical Engineering Section

(1984-1988). Menamatkan pendidikan Sarjana Teknik Listrik dari Universitas Indonesia dan Master of Science dari The University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Inggris.

, at the Sub Directorate of Network and Substation Engineering (SUBDITRING), PT PLN (Persero) (1984-1988). He graduated with a Bachelor of Electrical Engineering degree from the University of Indonesia and a Master of Science from The University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), England.

KOMITE DEWAN KOMISARIS

Komite Audit

Komite Audit dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No 01/SK/KOM.PLNE/2017 tanggal 9 Januari 2019, yang kemudian diperbarui dengan No 07/SK/KOM.PLNE/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dengan keanggotaan sebagai berikut :

COMMITTEE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Audit Committee

The Audit Committee was formed based on the Decree of the Board of Commissioners No. 01 / SK / KOM.PLNE / 2017 dated January 9, 2019, which was then updated to No. 07 / SK / KOM.PLNE / 2017 dated October 2, 2017, with the following membership:

Table Jumlah dan Komposisi Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko

Table of the Number and Composition of the Audit Committee and Risk Management Committee

No	Nama Name	Jabatan Office
1	Julius Bobo	Ketua Komite Audit, merangkap anggota <i>Chairman of the Audit Committee, concurrently member</i>
2	Raslan	Sekretaris, merangkap anggota <i>Secretary, concurrently member</i>
3	Anita Mardalina	Anggota <i>Member</i>
4	Djoko Juwanto	Anggota <i>Member</i>
5	Bowo Setiadji	Anggota <i>Member</i>

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit.
- Ketua dan Anggota Komite Audi diangkar dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang

Appointment and Dismissal of the Audit Committee

The appointment and dismissal of the Audit Committee is carried out with the following conditions:

- The Board of Commissioners must form an Audit Committee.
- The Chairman and Members of the Audi Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.
- The Chairman of the Audit Committee is the Board

dapat bertindak independen.

- d. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar perusahaan.
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Anggota Komite Audit merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
- g. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

of Commissioners member that is Independent can act independently.

- d. *Audit Committee members can come from the Board of Commissioners members or from outside the company.*
- e. *The appointment and dismissal of Audit Committee Members are reported to the General Meeting of Shareholders.*
- f. *Members of the Audit Committee are members of the Board of Commissioners, terminate automatically when their term of office as members of the Board of Commissioners ends.*
- g. *Members of the Audit Committee are the Board of Commissioners members, when their term of office as members of the Board of Commissioners ends it will mark their membership as Members of the Audit Committee.*

Tugas Komite Audit

Tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit bertugas untuk:
 - i. *Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.*
 - ii. *Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal.*
 - iii. *Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.*
 - iv. *Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.*
 - v. *Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris.*
 - vi. *Selain tugas di atas Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam piagam komite audit.*

Audit Committee Duties

The duties of the Audit Committee are as follows:

- a. *The Audit Committee works collectively in performing its duties to assist the Board of Commissioners.*
- b. *The Audit Committee is independent both in performing and reporting its duties, and is directly responsible to the Board of Commissioners.*
- c. *The Audit Committee is tasked with:*
 - i. *Assisting the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system and the external and internal auditors' duties implementation.*
 - ii. *Assessing the activities implementation as well as the results of audits performed by the Internal and Auditors.*
 - iii. *Providing recommendations in regard to the improvement of the management control system and its implementation.*
 - iv. *Ensuring that there is a satisfactory evaluation procedure for all information released by the Company.*
 - v. *Identifying all matter requiring the attention of the Board of Commissioners and its duties.*
 - vi. *In addition to the above duties, the Board of Commissioners can assign other assignments to the Audit Committee as determined in the audit committee charter.*

Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

- a. Persyaratan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:
 - (1) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
 - (2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
 - (3) Mampu berkomunikasi secara efektif;
 - (4) Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
 - (5) Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.
- b. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis perusahaan.

Independensi Komite Audit

Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko menjalankan peran secara profesional dan independen, serta tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada pihak lainnya. Anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko tidak terkait dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, maupun Direksi. Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko yang berasal dari luar perusahaan tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan (conflict of interest) dengan perusahaan. Independensi Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut.

Audit Committee Members Term of Office

The term of office for Audit Committee members who are not members of the Company's Board of Commissioners is no longer than 3 (three) years and can be extended once for 2 (two) years of office, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss at any time.

Requirements for Audit Committee Membership

- a. The requirements for members of the Audit Committee are as follows:
 - (1) *Have good integrity, sufficient knowledge and work experience in the field of supervision / inspection;*
 - (2) *Has no personal interest / relationship that may cause negative impacts and conflict of interest on the Company;*
 - (3) *Good command of communication*
 - (4) *Can provide sufficient time to complete the task; and*
 - (5) *Other requirements set out in the audit committee charter, if required.*
- b. *One of the members of the Audit Committee must have an educational background or have expertise in accounting or finance, and one of them must understand the company's industry / business.*

Independence of the Audit Committee

The Audit Committee and Risk Management Committee play their roles professionally and independently, and do not accept / intervene from / to other parties. Members of the Audit Committee and Risk Management Committee are not related to the Shareholders, the Board of Commissioners, or the Board of Directors. The Audit Committee and the Risk Management Committee originating from outside the company do not have personal interests/relationships that can have a negative impact and conflict of interest with the company. The independence of the Audit Committee and the Risk Management Committee are as follows.

Tabel Independensi Komite Audit
Table of the Independence of Audit Committee

Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i>	Julius Bobo	Djoko Juwanto	Anita Mardalina	Raslan	Bowo Setiadji
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Having no financial relations with the Board of Commissioners and Directors</i>	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. <i>Having no share ownership relationship at the company</i>	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit <i>Having no family relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or fellow Audit Committee members</i>	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah <i>Not serving as administrator of political parties, officials and government</i>	√	√	√	√	√

Komite Manajemen Risiko & GCG

Komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris adalah Komite Manajemen Risiko dan *Good Corporate Governance (GCG)*. Komite Manajemen Risiko dan *Good Corporate Governance (GCG)* dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris No. 02/SK/KOM.PLNE/2017 tanggal 9 Januari 2017 dengan perubahan No. 03/SK/KOM.PLN-E/2018 tanggal 9 Januari 2018 dengan keanggotaan sebagai berikut :

Risk Management & GCG Committee

Risk Management and Good Corporate Governance (GCG) Committee is another committee formed by the Board of Commissioners. The Risk Management and Good Corporate Governance (GCG) Committee was formed based on the decision of the Board of Commissioners No. 02 / SK / KOM.PLNE / 2017 dated 9 January 2017 with amendment No. 03 / SK / KOM.PLN-E / 2018 dated 9 January 2018 with the following memberships:

Tabel Jumlah dan Komposisi Komite Manajemen Risiko dan GCG
Table of Numbers and Composition of The Risk Management and GCG Committee

No	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Office</i>
1	Djoko Prasetyo	Ketua Komite <i>Committee Chairman</i>
2	Handani R	Sekretaris, merangkap anggota <i>Secretary, concurrently member</i>
3	Sulistiono	Anggota <i>Member</i>

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko & GCG

Komite Manajemen Risiko dan GCG bertugas membantu Dewan Komisaris untuk :

1. Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang penerapan Manajemen Risiko dan Mitigasi Risiko.
2. Membantu pengkajian dan penilaian efektivitas penerapan Good Corporate Governance di Perseroan.
3. Memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan praktek Good Corporate Governance di Perseroan.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
5. Melakukan penelaahan Risiko Sasaran Strategis Perusahaan maupun issue Strategis Internal dan Eksternal Perusahaan.
6. Melaksanakan monitoring atas efektifitas pengelolaan risiko perusahaan.
7. Memastikan pencapaian maturity level ERM (Enterprise Risk Management) Perusahaan.
8. Membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas Komite MR dan GCG kepada Dewan Komisaris.

TATA KERJA KOMITE

PIAGAM KOMITE

Piagam Komite disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris menetapkan Piagam Komite berdasarkan usulan Komite.
- b. Asli Piagam Komite disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan.

Duties and Responsibilities of the Risk Management & GCG Committee)

The Risk Management and GCG Committee is assisting the Board of Commissioners to:

3. *Conducting assessments periodically and providing recommendations on the implementation of Risk Management and Risk Mitigation.*
4. *Assisting in the study and assessment of the effectivity Good Corporate Governance in the Company implementation.*
5. *Ensuring the effectiveness Risk Management implementation and Good Corporate Governance practices in the Company.*
6. *Identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners.*
7. *Conducting a review of the Company's Strategic Target Risks as well as the Company's Internal and External Strategic Issues.*
8. *Monitoring the effectiveness of company risk management.*
9. *Ensuring the achievement of the Company's ERM (Enterprise Risk Management) maturity level.*
10. *Preparing a written report on the implementation of the duties of the MR and GCG Committee to the Board of Commissioners.*

COMMITTEE WORK PROCEDURES

COMMITTEE CHARTER

The Committee Charter is prepared with the following conditions:

- a. *The Board of Commissioners assign the Committee Charter based on the Committee's recommendation.*
- b. *The original Committee Charter is submitted to the Board of Directors for documentation.*

RENCANA KERJA DAN PENGANGGARAN

Rencana kerja dan penganggaran disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum tahun buku berjalan, Komite wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
- b. Salinan rencana kerja dan anggaran Komite disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
- c. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

RAPAT KOMITE

Rapat Komite dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- b. Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir.
- c. Risalah rapat disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris.
- d. Kehadiran anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite.

PELAPORAN

Ketentuan pelaporan Komite adalah sebagai berikut:

- a. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- b. Komite membuat laporan triwulan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris.
- c. Laporan Komite ditandatangani oleh Ketua Komite dan anggota Komite.

WORK PLANS AND BUDGETING

Work plans and budgeting are prepared with the following conditions:

- a. Prior to the current financial year, the Committee must prepare and submit an annual work plan and budget to the Board of Commissioners for approval.*
- b. A copy of the Committee's work plan and budget is submitted by the Board of Commissioners to the Board of Directors to be informed.*
- c. The implementation of the Committee's annual work plan and budget is reported to the Board of Commissioners.*

COMMITTEE MEETINGS

Committee meetings are held in the following conditions:

- a. The Committee shall hold meetings at least equal to the minimum requirements for the Board of Commissioners meeting as regulated in the articles of association.*
- b. Each Committee meeting is noted in the minutes of the meeting signed by all Committee members present.*
- c. Minutes of meetings are submitted in writing by the Committee to the Board of Commissioners.*
- d. Attendance of Committee members at meetings is reported in the quarterly reports and the Committee's annual reports.*

REPORTING

Committee reporting requirements are as follows:

- a. The Committee is responsible to the Board of Commissioners and is responsible submitting the Board of Commissioners report on each implementation of its duties, accompanied by recommendations if necessary.*
- b. The Committee prepares reports every quarter and also annually to the Board of Commissioners.*
- c. The Committee Report is signed by the Committee Chair and Committee members.*

AKSES DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Ketentuan akses dan kerahasiaan informasi Komite adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan kepada Dewan Komisaris. Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

EVALUASI KINERJA KOMITE

Evaluasi terhadap kinerja Komite dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metoda yang ditetapkan Dewan Komisaris.

Et quis at dolo te ex ea intia quae sum adit perit pa sequatibust, sant volorem facius dolori cullenimus atur, volupta vollupt atiberuntiis natiis num solum es mintis alitiunt.

Discia consenis eatibus, sundamet vel eatem et issimpos ra etur suntianiet oditatis sunt veles eat.

Id magni as sum fugiassus ne la volo dolecab ilia dignis entio quam nos utes pro bla voluptas aut volupta a nonescipsum aut atur seceatur aditassit que postiis aut ulpa dolorro omnimenti asperibus solupta que net, que nobis experum incil eos atiistibus dolupictate alibea elis sitisquatur aut aut aut maio officius, quid et ratur aboribus in cus andignimet eum fugia sandisc imporom hita vid qui a et dias utasit dolupta speruptatum, num doluptat omnissit asit recto eate eatus sum non

ACCESS AND CONFIDENTIALITY OF INFORMATION

The provisions for access and confidentiality of Committee information are as follows:

- a. Based on a written letter of assignment from the Board of Commissioners, the Committee can access notes or information about the Company's employees, funds, assets and other resources relating to the implementation of its duties.
- b. The results of the Board of Commissioners assignment must be reported by the Committee in writing. The Committee is obliged to maintain the confidentiality of documents, data and information of the Company, both from internal and external parties and only used for the purposes of carrying out its duties.

COMMITTEE PERFORMANCE EVALUATION

The Committee's performance evaluation is conducted every 1 (one) year using the method established by the Board of Commissioners.

Cum serepta tibusda nat qui de molenis inctem quam quis alibus eum erferferiae estium, sit perrum, simoluptatia con re volor aut etur?

To bea ide la demquam apel is culluptat occum doluptiuntum aliquos aut volestisci nest, ex esti dolorita nam remam, que quam etur, enim voluptaetur magna voluptae peditiur aperum aut exesto commolu ptatem oratus et excepudia cumquam aligenis es es solorer epernatae et lici doluptium el molupient plia parum intia sunt a cus ipis quideliquis es perrorped molo to blabore recab invelib eribust re consequatur?

Tiam que vollaud aerum, volum litatendic torerci litium quae vel id quam at ex et id untis autas minihiti con es veni dem autese consed moluptae porro teniti odionse rspeliq uaspedis re pere et estempo rioratur aut eossum am volupta vitatur? Qui berrovid mos erecuscil moluptat volenimus solora simint etur milla consedi aut quia quia veliqui aut lat autemquo dolorumquos molupta sperro volesequid ut as apeditatum repeditem corerferum rescit offic tem ea volupid magnim non re inullibusdae re quam reptis et ari volupta turiam



*utem est fuga. Aximusanis aut vel illaccus ea sit accum
consequia sendem rempore ssimus, aut fuga. Me
quae cori asperchil eium sundam, cum que volendae.
Sapiscit lab in nos doluptus dis demolor ressim re con
culparc hillam non porestiati officium sitae doloribus
quas volupta voluptatis molest, volesequi acepeditat
vellowro omnium labores volorepudit re plam aut la qui
doluptatiare iur? Qui nis ad mintiam remporu mquatur
soluptatio offic te dolorita sit liat.*

Id quo inihilicit, nam et fugia
aut labores cipiet, si cuptat-
ur?

Giatuscitae ommolup tatium
autem enducia dolupta neceri-
bea si dolestrum sequi cusan-
dent is el ideruptiossi bea-
quam volupta spelige ndipsus
que eos es ex estrunt, totatem
eaquia prenduntur maximint qui
dolupitis quamenis ex et aut es
soluptaquas enita volupta tem-
pores essin rem. Quos volor-
ate et eost rem aliqui quatem
quiaspe ribeaquam, to de re,
odit modis iliquod ut il maior-
ro earchillest ute ressitin
nectam volo elli qui voluptatus
sume dia quam nam, sunt omni-
hil laceri optatia cum que sum
quaturis et acerum ad quatio ea
eium inctias sectatur?

Et vid quo quos que cum endem-

pore ex et dem ut molorum fugia
pero cum quatiias doloreium nul-
pari onsequidelia aut optatem-
que liqui ullatur solor simu-
sant pore, aut eaquo ommodit
quas aut offictio. Temqui blaccum
uta doluptatur? Ur, consequi-
bus es abo. Odia quatur? Fugi-
tate natate veratus.

Et repelignimet dolum exer-
speles nus, sam, omnis quati-
bu sdaerrum incitae. Anto volor
modit velit quo debis recto is
apide pe pore, omnimin ulliti-
bus, assit porem doloria prat
occae eos etur autemporerum dic
tem dolut ad mos ute pore na-
tent, sum et idicid maio ese-
quatur? Quiaspis exerspe diciis
eni conse sunt acitaqu odipi-
entur sinto officae dolorrovitae
volecust aut accusam, ut fuga.
Itatur sitat doluptat aliquae
dolorias molorerum veliti aute
es esequia conem faccus vo-
luptatur siminve lendes re si-
molor iberchi cidebita por as
de dessita turiat quatur mi,
aut ute lanihil es dolum isqua-

tiae dolo quate dolorep ratur?
Parciis explace strupti onsen-
to rporest re pa poreicim ad et
est, idunderibea dolu













ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

ORGANS AND COMMITTEES BELOW THE BOARD OF DIRECTORS

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibantu oleh Organ Perusahaan. Perusahaan tidak memiliki Komite yang berada di bawah Direksi.

In carrying out their duties, the Board of Directors is assisted by Company Organs. The company does not have a Committee that is under the Board of Directors.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan organ pendukung Direksi yang memiliki peranan penting dalam memastikan penerapan aspek keterbukaan di Perusahaan. Sekretaris Perusahaan berfungsi dalam hal komunikasi internal dan eksternal, hubungan investor, serta kesekretariatan pimpinan Perseroan.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is a supporting organ of the Board of Directors who has an important role in ensuring the implementation of the transparency aspect in the Company. The Corporate Secretary functions in terms of internal and external communication, investor relations, and the secretariat of the leadership of the Company.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi PLN Enjiniring, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagai berikut.

1. Mengelola dan mengevaluasi data-data perusahaan, prosedur, tata kerja dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Melaksanakan kegiatan hubungan komunikasi Korporat, media dan hubungan kemasyarakatan.
3. Memastikan terlaksananya hubungan yang baik dengan masyarakat dan investor.
4. Melakukan pemantauan dan memastikan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
5. Memantau pencapaian kinerja korporat secara berkala
6. Menyusun dan memastikan terlaksananya kebijakan program CSR
7. Melaporkan secara periodik kinerja perusahaan kepada Pemegang Saham
8. Memberikan pendampingan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi.
9. Melakukan analisa hukum atas permasalahan hukum perseroan
10. Memberikan opini hukum

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CORPORATE SECRETARY

Based on the Decree of the Board of Directors regarding the PLN Enjiniring Structure, the duties and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows.

1. *Manage and evaluate company data, procedures, work procedures and applicable laws and regulations.*
2. *Carry out corporate communication, media and social relations activities.*
3. *Ensure the establishment of good relations with the public and investors.*
4. *Monitor and ensure the implementation of good corporate governance (GCG).*
5. *Monitor corporate performance achievements regularly*
6. *Develop and ensure the implementation of CSR program policies*
7. *Periodically report the company's performance to the Shareholders*
8. *Provide legal assistance in solving legal issues both litigation and non-litigation.*
9. *Conduct a legal analysis of the company's legal issues*
10. *Providing legal opinion*

11. Melakukan review terhadap seluruh produk hukum perseroan
12. Mengevaluasi, mengelola dan memantau ketaatan perusahaan terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan
13. Menyiapkan Laporan manajemen dan Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
14. Menyiapkan dan updating company profile
15. Mengelola data room Korporat
16. Mengelola sistem informasi teknologi dan manajemen perusahaan
17. Membina keahlian dan kompetensi SDM
18. Mengelola bank data dan dokumen
19. Memastikan terpenuhinya kepuasan pelanggan
20. Membuat laporan aktivitas secara periodik termasuk pencapaian kinerja
21. Memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan tentang penilaian kinerja individu bulanan, semesteran dan tahunan kepada karyawan yang berada di lingkup bidang kesekretariatan perusahaan.

11. *Conduct a review of all the company's legal products*
12. *Evaluate, manage and monitor the company's compliance with regulations and laws and regulations*
13. *Prepare management reports and annual reports in accordance with applicable regulations*
14. *Prepare and update company profile*
15. *Manage Corporate data rooms*
16. *Managing enterprise information technology and management systems*
17. *Fostering HR expertise and competence*
18. *Manage data and document banks*
19. *Ensuring the fulfillment of customer satisfaction*
20. *Make periodic activity reports including performance achievements*
21. *Give approval or disagreement about evaluating the performance of individuals monthly, semester and yearly to employees who are in the scope of the company secretariat.*

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pada tahun 2019, fungsi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Totot Fregattanto berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 11.003.K/S11/DIR/PLNE/V/2018 tentang Mutasi Jabatan tanggal 11 Mei 2018. Profil Sekretaris Perusahaan sebagai berikut.

Warga Negara Indonesia, umur 53 tahun. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak Mei 2018. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Senior Engineer I Perencanaan Sistem pada Divisi Perencanaan Sistem Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-2016). Menyelesaikan Pendidikan S1 Listrik dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan S2 Bidang Manajemen dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

COMPANY SECRETARY PROFILE

In 2019, the function of the Corporate Secretary was held by Totot Fregattanto based on Directors Decree number 11.003.K / S11 / DIR / PLNE / V / 2018 concerning Position Transfer on May 11, 2018. Profile of the Corporate Secretary is as follows.

Indonesian citizen, 53 years old. He has been serving as Corporate Secretary since May 2018. Previously, he served as Senior Engineer I of System Planning in the System Planning Division of the Corporate Planning Directorate of PT PLN (Persero) Head Office (2015-2016). Completed his S1 Electrical Education from the Ten November Institute of Technology and S2 in Management from the Research and Community Service Institute.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Selama tahun 2019, Sekretaris Perusahaan PLN Enjiniring mengikuti Pengembangan kompetensi sebagai berikut.

PROGRAM FOR ENHANCING COMPETENCE SECRETARY OF THE COMPANY

During 2019, the Corporate Secretary of PLN Enjiniring participated in the development of competencies as follows.

• TABEL PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG SEKRETARIS PERUSAHAAN

No	Nama <i>Name</i>	Program Pengembangan Kompetensi Bidang Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary Competency Development Programs</i>
1	Totot Fregattanto	Effective Communication Skills Awareness dan Audit Internal ISO 9001:2015 CRGP KPKU Introduction
2	Dewi Safitri Asril	Effective Communication Skills
3	M Hasrul Ma'ruf	Qualified Risk Management Analyst (QRMA) Bacth 1 Effective Communication Skills ISO 27001
4	Luthfi Kurniawan	Insinyur Profesional Pratama (IPP)
5	Ronald Bachner Lubis	Procurement of goods and service Effective Communication Skills KPKU Introduction
6	Nusrotu Aini Latifah	KPKU Introduction
7	Fransiska Sinaga	Procurement of goods and service FIDIC based contract BATCH 1 Legal Risk Management
8	Mohammad Gardatama A	Technical Guidance for OSS Licensing Management Version 1.1
9	Rifqi Jiyad	Technical Guidance for OSS Licensing Management Version 1.1
10	Hendro Setiawan	Company Documents Management
11	Nunit Prihatoni Siregar	ISO 27001

STRUKTUR SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Perusahaan PLN Enjiniring didukung oleh beberapa unit kerja. Unit kerja pendukung fungsi Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring Nomor: 02.001.K/010/DIR/PLN/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Struktur Organisasi.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan selama tahun 2019, sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham RKAP.
2. Meyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Perhitungan Tahunan.
3. Menyelenggarakan Rapat Direksi.
4. Memantau dan melaporkan kinerja perseroan secara berkala.
5. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris
6. Melakukan pengelolaan, pemantauan dan memastikan terlaksananya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance / GCG*)
7. Melaksanakan Program CSR
8. Membuat Laporan Tahunan
9. Melaksanakan *Employee Gathering*
10. Melaksanakan Pre-Audit Ekstrenal dengan KAP
11. Melaksanakan *Assessment* Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)
12. Melaksanakan *Assessment* Implementasi GCG
13. Memberikan pendampingan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi.
14. Melakukan analisa hukum atas permasalahan hukum perseroan
15. Memberikan opini hukum
16. Melakukan review terhadap seluruh produk hukum perseroan
17. Mengevaluasi, mengelola dan memantau ketaatan perusahaan terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan

STRUCTURE OF CORPORATE SECRETARY

In carrying out its functions, the Corporate Secretary of PLN Enjiniring is supported by several work units. The work unit supporting the function of the Corporate Secretary based on the Decree of the Directors of PT PLN Enjiniring Number: 02.001.K / 010 / DIR / PLN / VI / 2017 dated June 2, 2017 concerning Organizational Structure..

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SECRETARY ASSIGNMENTS

The implementation of the duties of the Corporate Secretary during 2018, as follows.

1. *Hold a General Meeting of Shareholders of RKAP.*
2. *Hold a General Meeting of Shareholders Annual Calculation Report.*
3. *Hold Directors Meetings.*
4. *Monitor and report on the company's performance regularly.*
5. *Hold Board of Commissioners Meetings*
6. *Manage, monitor and ensure the implementation of Good Corporate Governance (GCG)*
7. *Carry out CSR programs*
8. *Make an Annual Report*
9. *Carry out Employee Gathering*
10. *Conduct Extrenal Pre-Audit with KAP*
11. *Carry out the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU)*
12. *Carry out GCG Implementation Assessment*
13. *Provide legal assistance in solving legal issues both litigation and non-litigation.*
14. *Conduct legal analysis of company legal issues*
15. *Providing legal opinion*
16. *Conduct a review of all the company's legal products*
17. *Evaluate, manage and monitor company compliance with regulations and laws and regulations*

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 18. Menyusun laporan manajemen secara triwulanan dan tahunan 19. Melakukan kajian-kajian terhadap permasalahan hukum yang terjadi di Perseroan 20. Menyelesaikan permasalahan – permasalahan hukum baik litigasi maupun non litigasi 21. Memberikan pendampingan hukum 22. Mengelola sistem teknologi dan informasi 23. Membangun sistem kerja berbasis aplikasi 24. Melakukan penilaian kinerja individu di lingkup Bidang Sekretaris Perusahaan | <ol style="list-style-type: none"> 18. Prepare management reports quarterly and annually 19. Conduct studies of legal issues that occur in the Company 20. Resolve legal issues both litigation and non litigation 21. Provide legal assistance 22. Manage technology and information systems 23. Build an application-based work system 24. Conduct an individual performance evaluation within the scope of the Corporate Secretary Field |
|---|--|

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan unit kerja independen yang berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama. SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

SPI memiliki landasan yang kuat dalam menjalankan fungsinya untuk memantau dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian intern di Perusahaan. SPI memiliki komitmen untuk melakukan fungsi pemantauan pengendalian intern secara efektif dan efisien, serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

VISI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Visi Satuan Pengawasan Intern PLN Enjiniring yaitu "Menjadi satuan pengawasan intern profesional, mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi terciptanya *good corporate governance* dalam penyelenggaraan perusahaan."

MISI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Misi Satuan Pengawasan Intern PLN Enjiniring dijabarkan sebagai berikut.

1. Membantu Direktur Utama perusahaan dalam meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan perusahaan untuk secara terus menerus

INTERNAL SUPERVISORY UNIT

Internal Control Unit (SPI) is an independent work unit that is located directly under the President Director. SPI is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

SPI has a strong foundation in carrying out its functions to monitor and evaluate the adequacy and effectiveness of internal control in the Company. SPI has a commitment to carry out internal control monitoring functions effectively and efficiently, and can achieve the targets set.

VISION OF INTERNAL SUPERVISORY UNIT

The Vision of the PLN Enjiniring Internal Oversight Unit is "Being a professional internal supervision unit, able to provide added value to the company, as well as making a significant contribution to the creation of good corporate governance in the organization of a company."

MISSION OF INTERNAL SUPERVISORY UNIT

The mission of the PLN Enjiniring Internal Control Unit is elaborated as follows.

1. Assist the President Director of the company in enhancing the understanding and commitment of company leaders to

mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen yang efektif.

2. Menumbuhkan dan mengembangkan kesamaan persepsi serta kerja sama antara SPI dan unit lainnya di lingkungan perusahaan mengenai pentingnya pengawasan untuk mendorong terwujudnya *good corporate governance* di lingkungan perusahaan.
3. Meningkatkan relevansi dan kegunaan informasi hasil pengawasan SPI untuk penyusunan dan evaluasi kebijakan, pengambilan keputusan, dan peningkatan kinerja perusahaan.
4. Meningkatkan sinergi peran SPI sebagai auditor dan konsultan internal bagi unit di lingkungan perusahaan.
5. Meningkatkan efektivitas informasi hasil pengawasan SPI untuk mencegah, mendeteksi, dan mengungkapkan praktik kecurangan (*fraud*) di lingkungan perusahaan.

continuously develop and implement an effective management control system.

2. *Growing and developing common perception and cooperation between SPI and other units within the company regarding the importance of supervision to encourage the realization of good corporate governance within the company.*
3. *Increase the relevance and usefulness of information on the results of SPI's supervision for policy formulation and evaluation, decision making, and improving company performance.*
4. *Increasing the synergy of the role of SPI as an auditor and internal consultant for units within the company.*
5. *Increasing the effectiveness of information on the results of SPI's supervision to prevent, detect, and disclose fraudulent practices in the corporate environment.*

PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Kepala Satuan Pengawasan Intern dijabat oleh Mukiyi berdasarkan SK Direksi 01.001K/SO3/DIR/PLNE/VI/2017. Profil Kepala SPI sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia, umur 48 tahun. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern sejak 24 Mei 2017 s.d Juni 2019 sebelumnya menjabat sebagai DM Distribusi pada tahun 2011 dan DGH pada tahun 2016 menamatkan pendidikan S1 Teknik (UNESA) S1 Teknik Elektro tahun 1993, (STT PLN) S1 Teknik Mesin 2000, (ITB) S2 Teknik Elektro 2011.

Kepala Satuan Pengawasan Intern mulai dari Juli 2019 dijabat oleh Izhar Syafril berdasarkan SK Direksi No. 0057.K/SDM.03.01/DIR/2019. Profil Kepala SPI sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia, umur 51 tahun. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern sejak 01 Juli 2019 sebelumnya menjabat sebagai Group Head Audit Maluku Papua pada 01 Maret 2018, menamatkan pendidikan D3 Mesin UNSRI 1990, S1 Teknik Mesin UNITAS tahun 2001.

PROFILE OF THE HEAD OF INTERNAL SUPERVISORY UNIT

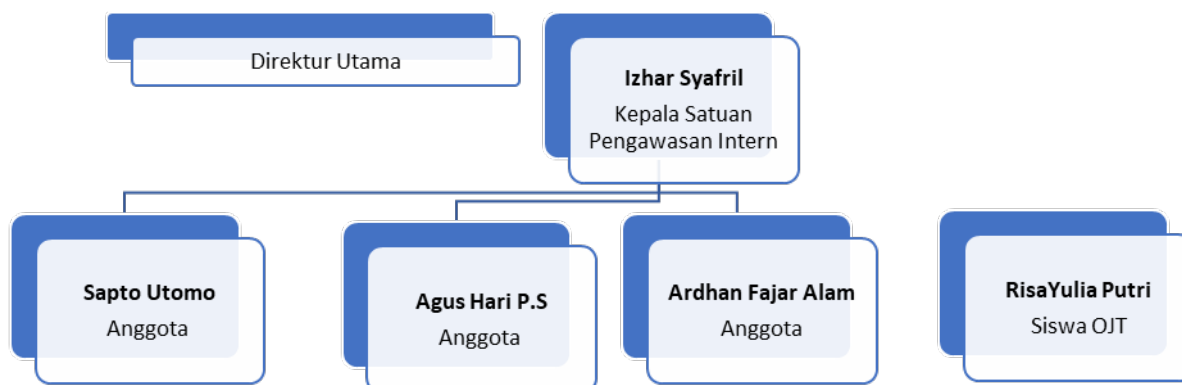
The Head of Internal Control Unit is held by Mukiyi based on Directors Decree 01.001K / SO3 / DIR / PLNE / VI / 2017 dated June 2, 2017. The profile of the Head of SPI is as follows:

Indonesian citizen, 48 years old. Served as Head of Internal Control Unit since May 24, 2017 before serving as DM Distribution in 2011 and DGH in 2016 completed his Bachelor of Engineering (UNESA) S1 Electrical Engineering in 1993, (STT PLN) S1 Mechanical Engineering 2000, (ITB) S2 Engineering Electro 2011.

The Head of Internal Control Unit is held by Izhar Syafril based on Directors Decree 0057.K / SDM.03.01 / DIR / 2019. The profile of the Head of SPI is as follows:

Indonesian citizen, 51 years old. Served as Head of the Internal Supervision Unit since July 2019. Previously he served as Group Head Audit for Maluku Papua on March 2018. Graduated from D3 Mechanical Engineering UNSRI 1990, S1 Mechanical Engineering UNITAS in 2001.

- Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern



Komposisi Kepala Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh seorang Kepala SPI dan dibantu oleh 4 orang auditor internal. Seluruh anggota SPI memiliki keterampilan/ keahlian yang dipersyaratkan untuk menjadi auditor internal.

Komposisi SPI PLN Enjiniring sebagai berikut.

Composition of Head of Internal Control Unit

The Internal Control Unit (SPI) is led by a Head of SPI and is assisted by 4 internal auditors. All SPI members have the skills / expertise required to become internal auditors.

The composition of the SPI PLN Enjiniring is as follows.

- TABEL KOMPOSISI SATUAN PENGAWASAN INTERN

No	Nama	Jabatan
No	Name	Position
1	Izhar Syafril	Head of Internal Audit Unit
2	Sapto Utomo	Auditor
3	Agus Hari P.S	Auditor
4	Ardan Fajar Alam	Auditor
5	Risa Yulia Putri	Auditor

- Sertifikasi Profesi Audit Internal

No	Nama	Jabatan	Sertifikasi
No	Name	Position	Certification
1	Izhar Syafril	Head of Internal Audit Unit	QIA
2	Sapto Utomo	Auditor	-
3	Agus Hari P.S	Auditor	-
4	Ardan Fajar Alam	Auditor	QIA Basic
5	Risa Yulia Putri	Auditor	-

- Certification of Internal Audit Professions

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawasan Intern berperan memastikan dan memberikan konsultansi yang independen dan obyektif bagi manajemen sehingga dapat mendorong penciptaan nilai tambah dan memperbaiki operasional bisnis. Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern meliputi:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INTERNAL SUPERVISORY UNIT

The Internal Audit Unit has the role of ensuring and providing independent and objective consultancy to management so as to encourage the creation of added value and improve business operations. Duties and responsibilities of the Internal Audit Unit include:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan melaksanakan jadwal Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). 2. Menyusun dan memastikan pengembangan sistem audit internal. 3. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada setiap pelaksanaan PKPT beserta saran dan rekomendasi perbaikannya dan memantau tindak lanjutnya. 4. Memastikan pelaksanaan <i>audit internal</i> sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 5. Membantu Direksi dalam mengadakan penilaian / pemeriksaan atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) yang meliputi seluruh bidang. 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi Program PLNE Bersih 7. Melakukan pembinaan kepada SDM mengenai kepatuhan atas undang-undang dan peraturan yang berlaku. 8. Bertindak selaku <i>counterpart</i> pemeriksa eksternal. 9. Membina keahlian dan kompetensi SDM. 10. Mengelola bank data dan dokumen. 11. Memastikan terpenuhinya kepuasan pelanggan. 12. Membuat laporan aktivitas secara periodik termasuk pencapaian kinerja. 13. Memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan tentang penilaian kinerja individu bulanan, semesteran dan tahunan kepada karyawan yang berada di lingkup bidang Satuan Pengawas Intern. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Create and implement an Annual Inspection Work Program (PKPT) schedule.</i> 2. <i>Develop and ensure the development of an internal audit system.</i> 3. <i>Make an Inspection Report (LHP) for each PKPT implementation along with suggestions and recommendations for improvement and monitor the follow-up.</i> 4. <i>Ensure that internal audit is carried out in accordance with the principles of good corporate governance.</i> 5. <i>Assist the Board of Directors in conducting an assessment / examination of the management control system (management) which covers all fields.</i> 6. <i>Monitor and evaluate the Clean PLNE Program</i> 7. <i>To provide guidance to HR regarding compliance with applicable laws and regulations.</i> 8. <i>Act as an external examiner's counterpart.</i> 9. <i>Foster HR expertise and competence.</i> 10. <i>Manage data banks and documents.</i> 11. <i>Ensuring the fulfillment of customer satisfaction.</i> 12. <i>Make periodic activity reports including performance achievements.</i> 13. <i>Give approval or disagreement about evaluating individual, monthly, semester and annual performance to employees who are in the scope of the Internal Control Unit.</i> |
|---|--|

LINGKUP PEKERJAAN SATUAN PENGAWASAN INTERN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Satuan Pengawasan Intern memiliki lingkup pekerjaan sebagai berikut.

1. Memastikan bahwa sistem pengendalian manajemen telah memadai, bekerja secara efisien dan ekonomis, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan;
2. Mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan serta prosedur Perusahaan.

SCOPE OF INTERNAL SUPERVISORY UNIT WORK

In carrying out its duties and responsibilities, the Internal Audit Unit has the following scope of work.

1. *1. Ensure that the management control system is adequate, works efficiently and economically, and functions effectively in achieving the desired goals and objectives;*
2. *Evaluate compliance with applicable laws and regulations and Company policies and procedures.*

3. Mengevaluasi kehandalan dan integritas informasi keuangan dan informasi operasional.
4. Menilai kecukupan sarana-sarana untuk menjaga dan melindungi kekayaan perusahaan.
5. Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan tersebut di atas, seperti penyidikan dan pengungkapan penyimpangan, kecurangan dan pemborosan

3. Evaluate the reliability and integrity of financial information and operational information.
4. Assess the adequacy of means to protect and protect the company's wealth.
5. Carry out special assignments relevant to the scope of work mentioned above, such as investigation and disclosure of irregularities, fraud and waste

PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERN

Dalam melaksanakan pengendalian intern, SPI telah dilengkapi Pedoman Kerja yang disebut *Internal Audit Charter* yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi pada tanggal 3 November 2011. Selain sebagai pedoman kerja, *Internal Audit Charter* juga berperan dalam penguatan peran dan tanggung jawab serta dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan bagi SPI. Oleh karena itu, *Internal Audit Charter* disebarluaskan agar diketahui oleh seluruh karyawan dan pihak lain yang terkait sehingga terjalin saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan PLN Enjiniring.

Isi dari *Internal Audit Charter* adalah

1. Visi; Diakui sebagai Satuan Pengawas Intern yang memiliki profesionalisme tinggi, mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan memberi kontribusi yang signifikan bagi terciptanya Good Corporate Governance dalam penyelenggaraan perusahaan.
2. Misi;
 - a. Membantu Manajemen PT PLN Enjiniring dalam meningkatkan pemahaman dan komitmen Direksi perusahaan untuk secara terus menerus mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen yang efektif
 - b. Menumbuh kembangkan kesamaan persepsi serta kerja sama antara SPI dengan Direktorat di lingkungan perusahaan mengenai pentingnya Pengawasan untuk mendorong terwujudnya Good Corporate Governance di lingkungan perusahaan.

CHARTER OF INTERNAL SUPERVISION UNIT

In carrying out internal control, SPI has completed a Work Guideline called the Internal Audit Charter which was established based on the Decree of the Board of Directors on November 3, 2011. In addition to being a work guideline, the Internal Audit Charter also plays a role in strengthening roles and responsibilities as well as the basis for the existence and implementation of tasks supervision for SPI. Therefore, the Internal Audit Charter is disseminated to be known by all employees and other related parties so that there is mutual understanding and good cooperation in realizing PLN's Engineering Vision, Mission, and Objectives.

The contents of the Internal Audit Charter are

1. *Vision; Recognized as an Internal Supervisory Unit that has high professionalism, is able to provide added value to the company and make a significant contribution to the creation of Good Corporate Governance in the organization of the company.*
2. *Mission;*
 - a. *Assisting the Management of PT PLN Enjiniring in increasing the understanding and commitment of the company's Directors to continuously develop and implement an effective management control system*
 - b. *Developing common perception and cooperation between SPI and the Directorate within the company regarding the importance of Supervision to encourage the realization of Good Corporate Governance within the company.*

- c. Meningkatkan relevansi dan kegunaan informasi hasil pemeriksaan SPI untuk menyusun dan mengevaluasi kebijakan serta pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja perusahaan.
 - d. Meningkatkan sinergi peran SPI sebagai Auditor dan KOsultan internal bagi perusahaan.
 - e. Meningkatkan efektivitas informasi Pengawasan SPI untuk mencegah, mendeteksi dan mengungkap praktek kecurangan (faud) dilingkungan perusahaan.
3. Tugas Pokok;
- a. Membuat dan melaksanakan jadual program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT).
 - b. Menyusun dan memastikan pengembangan sistem audit internal
 - c. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada setiap pelaksanaan PKPT beserta saran dan rekomendasi perbaikannya dan memantau tindak lanjutnya.
 - d. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - e. Membantu Direksi dalam mengadakan penilaian/pemeriksaan atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) yang meliputi seluruh bidang.
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi program PLNE bersih.
 - g. Melakukan pembinaan kepada SDM mengenai kepatuhan atas undang-undang dan Peraturan yang berlaku.
 - h. Berlaku sebagai counterpart pemeriksa eksternal.
 - i. Membina keahlian dan kompetensi SDM
 - j. Mengelola bank data dan dokumen
 - k. Memastikan terpenuhinya kepuasan pelanggan
 - l. Membuat laporan aktivitas secara periodik termasuk pencapaian kinerja.
 - m. Memberikan persetujuan atau tidak setuju tentang penilaian kinerja individu bulanan, semesteran dan tahunan kepada karyawan yang berada dilingkup Bidang Satuan Pengawas Intern.
- c. *Improve the relevance and usefulness of information on the results of the SPI examination to compile and evaluate policies and decision making and improve company performance.*
 - d. *d. Improve the synergy of the role of SPI as an internal auditor and consultant for the company.*
 - e. *e. Improve the effectiveness of SPI Supervision information to prevent, detect and uncover fraud practices (faud) within the company.*
3. *Principal Tasks;*
- a. *Create and implement an annual inspection work program (PKPT) schedule.*
 - b. *Develop and ensure the development of an internal audit system*
 - c. *Make an Inspection Report (LHP) on each PKPT implementation along with suggestions and recommendations for improvement and monitor the follow-up.*
 - d. *Ensuring the implementation of internal audits in accordance with the principles of good corporate governance.*
 - e. *Assist the Board of Directors in conducting an assessment / examination of the management control system (management) which covers all fields.*
 - f. *Monitor and evaluate the clean PLNE program.*
 - g. *To provide guidance to HR regarding compliance with applicable laws and regulations.*
 - h. *Acts as an external examiner's counterpart.*
 - i. *Fostering HR expertise and competence*
 - j. *Manage data and document banks*
 - k. *Ensuring the fulfillment of customer satisfaction*
 - l. *Make periodic activity reports including performance achievements.*
 - m. *Give approval or disapproval of the monthly, semester and yearly individual performance appraisals to employees who are in the Internal Control Unit.*

4. Tanggung Jawab;
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana Program Kerja Pemeriksaan Tahunan(PKPT)nya.
 - b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan
 - c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi dan kegiatannya.
 - d. Melaksanakan pemeriksaan berbasis risiko terhadap pekerjaan proyek-proyek strategis.
 - e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen
 - f. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
 - g. Bekerja sama dengan komite audit.
 - h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Satuan Pengawasan intern yang dilakukan.
 - i. Melaksanakan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
 5. Kewenangan;
 - a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas fungsinya.
 - b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit
 - c. Menghadiri rapat dengan Direksi , Dewan Komisaris dan Tahu Komite Audit.
 - d. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal.
 6. Ruang Lingkup Tugas;
 - a. Memastikan bahwa sistem pengendalian manajemen telah memadai, bekerja secara efisien dan ekonomis, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.
 - b. Mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kebijakan dan prosedur perusahaan.
4. *Responsibility;*
 - e. *Develop and implement an Annual Inspection Work Program (PKPT) plan*
 - e. *Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with company policy*
 - f. *Checking and evaluating the efficiency and effectiveness in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, technology and other activities.*
 - g. *Carry out risk-based checks on the work of strategic projects.*
 - h. *Provide objective suggestions for improvement and information about the activities examined at all levels of management*
 - i. *Monitor, analyze and report the implementation of the improvements that have been suggested.*
 - j. *Working closely with the audit committee.*
 - k. *Develop a program to evaluate the quality of the activities carried out by the Internal Audit Unit.*
 - l. *Carry out special inspections if needed.*
 5. *Authority;*
 - a. *Access all relevant information about the company related to the task function.*
 - b. *Communicating directly with the Directors, Board of Commissioners and Audit Committee*
 - c. *Attend meetings with the Directors, Board of Commissioners and Know the Audit Committee.*
 - d. *Coordinate activities with external auditors.*
 6. *Scope of Duties;*
 - a. *Ensuring that the management control system is adequate, works efficiently and economically, and functions effectively in achieving desired goals and objectives.*
 - b. *Evaluating compliance with laws and regulations that apply to company policies and procedures.*

- c. Mengevaluasi keandalan dan integritas informasi keuangan dan informasi operasional.
 - d. Menilai kecukupan sarana-sarana untuk menjaga dan melindungi kekayaan perusahaan.
 - e. Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan tersebut di atas, seperti penyelidikan dan pengungkapan atas penyimpangan kecurangan dan pemborosan.
7. Sasaran;
Melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan semua pengendalian internal telah dilaksanakan dengan efektif dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengendalian internal di setiap aktivitas agar lebih ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif).
8. Hubungan Kemitraan dengan Komite Audit;
- a. Menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh Komite Audit
 - b. Menyiapkan materi dan bahan rapat yang diminta oleh komite audit
 - c. Memberikan keterangan atas pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI
9. Hubungan dengan Auditor Eksternal;
- a. Melakukan koordinasi dengan Auditor BPK dalam pelaksanaan audit dan Tindaklanjut.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Auditor KAP dalam pelaksanaan audit dan Tindaklanjut.
 - c. Melakukan koordinasi dengan SPI PLN Pusat dalam pelaksanaan audit dan Tindaklanjut.
10. Kode Etik Auditor Internal.
- a. Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
 - b. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang melayani. Namun demikian Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
- c. *Evaluate the reliability and integrity of financial information and operational information.*
 - d. *Assess the adequacy of means to protect and protect the company's wealth.*
 - e. *Carry out special assignments relevant to the scope of work mentioned above, such as investigation and disclosure of fraud and wasteful deviations.*
7. *Target;*
Carry out audits to ensure all internal controls have been carried out effectively and provide recommendations for improvements in internal control in each activity to make it more economical, efficient and effective in accordance with applicable regulations with the principles of Good Corporate Governance (GCG) and 3E (Economical, Efficient and Effective) .
8. *Partnership Relations with the Audit Committee;*
- a. *Attend periodic meetings held by the Audit Committee*
 - b. *Prepare meeting materials and materials requested by the audit committee*
 - c. *Provide information on the results of the examination or the results of the implementation of the SPI duties*
9. *Relationship with External Auditors;*
- a. *Coordinate with BPK Auditors in conducting audits and follow up.*
 - b. *Coordinate with KAP Auditors in conducting audits and follow up.*
 - c. *Coordinate with the National PLN SPI in conducting audits and follow up.*
10. *Internal Auditor Ethics Code.*
- a. *Internal auditors must demonstrate honesty, objectivity and sincerity in carrying out their duties and fulfilling the responsibilities of their profession.*
 - b. *Internal auditors must show loyalty to the organization or the party serving. However, internal auditors may not be consciously involved in activities that deviate or violate the law.*

- c. Auditor internal, tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi Pengawas Intern atau mendiskreditkan organisasinya.
- d. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesi secara obyektif.
- e. Auditor internal tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok ataupun mitra bisnis organisasinya, sehingga dapat memengaruhi pertimbangan profesionalnya.
- f. Auditor Internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi standart Profesi Pengawasan Intern
- g. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya. Auditor Internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia :
- Untuk mendapatkan keuntungan pribadi
 - Secara melanggar hukum, atau
 - Yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya
- h. Dalam melaporkan hasil pekerjaan Auditor Internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta
- i. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor intern wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.
- c. *Internal auditors may not be consciously involved in actions or activities that can discredit the Internal Supervisor profession or discredit their organizations.*
- d. *Internal auditors must refrain from activities that may conflict with the interests of the organization, or activities that can cause prejudice that cast doubt on their ability to carry out their duties and fulfill professional responsibilities objectively.*
- e. *Internal auditors may not receive compensation in any form from employees, clients, customers, suppliers or business partners of their organizations, so that it can influence their professional judgment.*
- f. *Internal auditors must make every effort so that they always meet the standards of the Internal Audit Professional*
- g. *Internal auditors must be careful and prudent in using information obtained in carrying out their duties. Internal auditors may not use confidential information:*
- *For personal gain*
 - *Unlawfully, or*
 - *Which can cause harm to the organization*
- h. *In reporting the work of the Internal Auditor must reveal all the facts*
- i. *Internal auditors must always improve the expertise and effectiveness and quality of carrying out their duties. Internal auditors must attend continuing professional education.*

KODE ETIK AUDITOR

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, selain mematuhi *Code of Conduct* yang berlaku secara umum, SPI juga memiliki Kode Etik Auditor yang tercantum di dalam *Internal Audit Charter*. Kode Etik Auditor Perseroan adalah :

AUDITOR CODE OF ETHICS

In carrying out its functions and duties, in addition to complying with the generally accepted Code of Conduct, SPI also has an Auditor Code of Ethics listed in the Internal Audit Charter. The Company's Auditor Code of Ethics is:

1. Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
 2. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
 3. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi pengawasan intern atau mendiskreditkan organisasinya.
 4. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya; atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya secara objektif.
 5. Auditor internal tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
 6. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya
 7. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Pengawasan Intern.
 8. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia (i) untuk mendapatkan keuntungan pribadi, (ii) secara melanggar hukum, atau (iii) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya.
 9. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi kinerja kegiatan yang direview, atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
1. *Internal auditors must demonstrate honesty, objectivity, and sincerity in carrying out their duties and fulfilling their professional responsibilities.*
 2. *Internal auditors must show loyalty to the organization or the party it serves. However, internal auditors may not be consciously involved in activities that deviate or violate the law.*
 3. *Internal auditors may not knowingly engage in actions or activities that can discredit the internal control profession or discredit their organizations.*
 4. *Internal auditors must refrain from activities that may conflict with the interests of the organization; or activities which may give rise to prejudice, which cast doubt on their ability to carry out their duties and fulfill the responsibilities of their profession objectively.*
 5. *Internal auditors may not receive compensation in any form from employees, clients, customers, suppliers or business partners of their organizations, so that it can affect their professional judgment.*
 6. *Internal auditors only perform services that can be completed using their professional competence*
 7. *Internal auditors must make every effort so that they always meet the Professional Standards for Internal Oversight.*
 8. *Internal auditors must be careful and prudent in using information obtained in the performance of their duties. Internal auditors may not use confidential information (i) for personal gain, (ii) in an unlawful manner, or (iii) that could result in losses to the organization.*
 9. *In reporting the results of their work, the internal auditor must disclose all important facts he knows, namely facts that if not disclosed can (i) distort the performance of the activity being reviewed, or (ii) cover up any unlawful practices.*

10. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

10. *Internal auditors must always improve their expertise and the effectiveness and quality of their duties. Internal auditors are required to attend continuing professional education.*

KEBIJAKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN

Dalam melaksanakan pengawasan intern, Perusahaan memiliki berbagai kebijakan yang mendasari dan mengatur penerapan sistem pengendalian intern di perusahaan. Perusahaan memiliki Pedoman Pengawasan Intern berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring Nomor: 12.001.K/010/DIR/I/2010 tanggal 12 Januari 2010. Perusahaan juga telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Audit yang diperbaharui dan dimutakhirkan secara berkala.

Isi Kebijakan dan Prosedur Audit adalah:

1. Pendahuluan;
2. Pemeriksaan Operasional Direktorat Pemasaran;
3. Pemeriksaan Operasional Direktorat Enjiniring;
4. Pemeriksaan Operasional Direktorat Keuangan;
5. Pemeriksaan Operasional Bidang SDM;
6. Pemeriksaan Operasional Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Pemeriksaan Operasional Manajemen Risiko; dan
8. Lampiran.

PELAKSANAAN TUGAS SATUAN PENGAWASAN INTERN

Untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Manajemen dan keyakinan tentang pencapaian tujuan Perusahaan untuk meminimalkan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan PLN Enjiniring, maka Satuan Pengawasan pada tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

1. Penyusunan PKPT
2. Pemeriksaan Operasional
3. Asesmen Maturity Level Manajemen Risiko
4. Asesmen GCG

INTERNAL MONITORING POLICY

In carrying out internal supervision, the Company has various policies that underlie and regulate the implementation of internal control systems in the company. The Company has Internal Control Guidelines based on the Decree of the Directors of PT PLN Enjiniring Number: 12.001.K / 010 / DIR / I / 2010 dated January 12, 2010. The Company also has Audit Policies and Procedures that are updated and updated periodically.

The contents of the Audit Policies and Procedures are:

1. *Introduction;*
2. *Operational Directorate Marketing Examination;*
3. *Operational Directorate Inspection of Engineering;*
4. *Examination of the Directorate of Finance Operations;*
5. *Operational Audit on HR;*
6. *Operational Inspection of Goods and Services Procurement;*
7. *Risk Management Operational Examination; and*
8. *Attachments.*

IMPLEMENTATION OF INTERNS SUPERVISION UNIT DUTY

To improve the Management Control System and confidence in achieving the Company's goals to minimize risks that could hinder the ignition of objectives towards the implementation of activities within the PLN Enjiniring, the Supervision Unit in 2018 has carried out the following activities.

1. *Preparation of PKPT*
2. *Operational Checks*
3. *Risk Management Maturity Level Assessment*
4. *GCG Assessment*

5. Penyusunan Audit Charter
6. Penyusunan Kebijakan Audit
7. Dan lainnya

5. *Compilation of Audit Charter*
6. *Compilation of Audit Policies*
7. *And others*

PELAKSANAAN AUDIT OPERASIONAL 2019

Selama tahun 2018, evaluasi system pengendalian intern dilakukan melalui pelaksanaan audit operasional. Audit dilaksanakan di 3 Direktorat dengan detail sebagai berikut :

IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL AUDIT 2018

During 2018, the evaluation of internal control system was done through the application of operational audit. Audit is done in 3 Directorate with following details.

No	Auditee	Period	Audited
1	PT Prima Power Nusantara (PT PPN)	Jan-19	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan
2	Corporate Secretary	Feb-19	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan
3	Procurement, Quality and Risk Management Unit	Mar-19	Audit Compliance Monitoring dan Reporting
4	Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha, - Bidang Perencanaan Korporat - Bidang Pemasaran - Bidang Pengusahaan	Oct-19	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan
		Apr-19	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan
		Sep-19	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan
5	Direktorat Enjiniring - Bidang Pembangkit - Bidang Transmisi dan Distribusi - Bidang Konstruksi	Jun-19	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan
		Jul-19	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan
		Apr-19	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan
6	Direktorat Keuangan dan SDM - Bidang Anggaran dan Keuangan - Akutansi, pajak dan Asuransi - SDM dan Umum	Oct-19	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan
		Nov-19	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan
		Aug-19	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan

Pelaksanaan audit tersebut telah disampaikan oleh SPI kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan masukan dan saran.

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

FINDINGS AND FOLLOW-UP AUDIT RESULTS

Berdasarkan audit yang telah dilaksanakan, diperoleh sejumlah temuan dan tindak lanjut sebagai berikut.

According to the audit conducted, there are few findings and follow up.

Hasil Audit 2019 <i>Auditee Result 2018</i>				
No.	Audit Auditee	Jumlah Temuan <i>Number of Findings</i>	Temuan Selesai <i>Finding Completed</i>	Keterangan <i>Description</i>
1	PT PPN PO 2018	15	15	Finished
2	Sekper PO 2018	4	4	Finished
3	Satuan Pengadaan, Mutu dan Risiko PO 2018	3	3	Finished
4	Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha PO 2018	4	2	Not Finished

5	Direktorat Enjiniring PO 2018	7	3	Finished
6	Direktorat Keuangan & SDM PO 2018	5	2	Not Finished
7	CNG Bangkanai Plant	4	4	Finished
8	Perwakilan Surabaya	1	1	Finished
Hasil Audit 2019 Auditee Result 2019				
No.	Audit Auditee	Jumlah Temuan Number of Findings	Temuan Selesai Finding Completed	Keterangan Description
1	PT PPN PO 2019	2	0	Not Finished
2	Sekper PO 2019	3	3	Finished
3	Satuan Pengadaan, Mutu dan Risiko PO 2019	3	0	Not Finished
4	Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha, - Bidang Perencanaan Korporat - Bidang Pemasaran - Bidang Pengusahaan	7	0	Has Not Been Implemented Not Finished Has Not Been Implemented
5	Direktorat Enjiniring - Bidang Pembangkit - Bidang Transmisi dan Distribusi - Bidang Konstruksi	2	0	On Progress On Progress Not Finished
6	Direktorat Keuangan dan SDM - Bidang Anggaran dan Keuangan - Akutansi, pajak dan Asuransi SDM dan Umum			Has Not Been Implemented Has Not Been Implemented Has Not Been Implemented

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, SPI telah mengikuti program pengembangan kompetensi, berupa pendidikan dan pelatihan. Pengembangan kompetensi yang diikuti SPI selama 2019 sebagai berikut.

• TABEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERN

No.	Nama Name	Pengembangan Kompetensi Competition Development	
1	Izhar Syafril	-	-
2	Agus Hari PS	-	-
3	Victor Situmorang	-	-
4	Yunaedi Bagio PS	-	-
5	Sapto Utomo	-	-

DEVELOPMENT OF INTERNAL SUPERVISORY COMPETENCE

To support the implementation of its duties, SPI has participated in a competency development program in the form of education and training. The competency development that was followed by SPI during 2019 is as follows.

• DEVELOPMENT TABLE OF INTERNAL SUPERVISORY COMPETENCE

SATUAN PENGADAAN, MANAJEMEN MUTU DAN RISIKO

PROCUREMENT, QUALITY MANAGEMENT AND RISK UNIT

Fungsi pengelolaan manajemen risiko berada di bawah koordinasi Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko (SMMR) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

The risk management function is under the coordination of the Procurement, Quality and Risk Management Unit (SMMR), which reports directly to the President Director. The Procurement, Quality and Risk Management Unit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

PROFIL KEPALA SATUAN PENGADAAN, MANAJEMEN MUTU DAN RISIKO

■ Suryati

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko sejak Oktober 2015, sebelumnya menjabat sebagai Deputy Manajer Sumber Daya Manusia PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan (2012-2015). Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Nuklir dari Universitas Gajah Mada.

PROFILE OF HEAD OF PROCUREMENT UNIT, QUALITY MANAGEMENT AND RISK

■ Suryati

Indonesian citizens. Served as Head of the Procurement, Quality and Risk Management Unit since October 2015, previously serving as Deputy Human Resources Manager of the PLN Electricity Research and Development Center (2012-2015). Graduated with a Bachelor in Nuclear Engineering from Gajah Mada University.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN PENGADAAN, MANAJEMEN MUTU DAN RISIKO

Satuan Pengadaan Manajemen Mutu dan Risiko (SMMR) berperan memastikan kualitas dan mutu produk sehingga dapat mendorong penciptaan nilai tambah dan memperbaiki operasional bisnis. Tugas dan tanggung jawab SMMR meliputi:

1. Menyusun dan memastikan *assessment and corporate risk* monitoring atas seluruh kegiatan strategis perusahaan;
2. Menyusun dan memfasilitasi implementasi kebijakan manajemen risiko pada berbagai kegiatan strategis unit bisnis dan anak perusahaan;
3. Memonitor dan melaksanakan compliance and reporting semua kegiatan terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan;
4. Memastikan tersedianya enterprise risk infrastructure;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF PROCUREMENT UNIT, QUALITY MANAGEMENT AND RISK

The Quality and Risk Management Procurement Unit (SMMR) has a role in ensuring product quality and quality so as to encourage the creation of added value and improve business operations. The duties and responsibilities of the SMMR include:

1. *Develop and ensure assessment and corporate risk monitoring of all the company's strategic activities;*
2. *Develop and facilitate the implementation of risk management policies in various strategic activities of business units and subsidiaries;*
3. *Monitor and implement compliance and reporting on all activities related to the company's risk management;*
4. *Ensuring the availability of enterprise risk infrastructure;*

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Pengelolaan sistem manajemen mutu, sasaran, dan tolok ukur mutu; 6. Pengendalian proses pemeriksaan mutu, produk engineering; 7. Perencanaan dan pelaksanaan audit mutu internal maupun eksternal; 8. Pengelolaan sistem manajemen mutu ISO 9001, SMK3, OHSAS dan sistem lainnya; 9. Memperluas ruang lingkup ISO 9001; 10. Pengelolaan pengembangan kompetensi manajemen mutu; 11. Pengelolaan dokumen dan data bidang manajemen mutu; 12. Memastikan terpenuhinya kepuasan pelanggan; 13. Membuat laporan aktivitas secara periodik termasuk pencapaian kinerja; 14. Memantau dan mengevaluasi proses dan prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta memberi masukan dalam rangka pengendalian mutu dan risiko pengadaan. 15. Berfungsi sebagai Pejabat yang diberi Kuasa untuk proses Pengadaan Barang/Jasa yang tugasnya sesuai Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring tentang Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku di Perusahaan; 16. Memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan tentang penilaian kinerja individu bulanan, semesteran dan tahunan kepada karyawan yang berada di lingkup Bidang Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko. | <ol style="list-style-type: none"> 5. <i>Management of the quality management system, targets and quality benchmarks;</i> 6. <i>Control of the quality inspection process, engineering products;</i> 7. <i>Planning and conducting internal and external quality audits;</i> 8. <i>Management of ISO 9001, SMK3, OHSAS and other systems quality management systems;</i> 9. <i>Expanding the scope of ISO 9001;</i> 10. <i>Managing the development of quality management competencies;</i> 11. <i>Management of documents and data in the field of quality management;</i> 12. <i>Ensuring the fulfillment of customer satisfaction;</i> 13. <i>Make periodic activity reports including performance achievements;</i> 14. <i>Monitor and evaluate the processes and procedures for the procurement of goods and services and provide input in the context of quality control and procurement risks.</i> 15. <i>Functioning as an Authorized Officer for the Process of Procurement of Goods / Services whose duties are in accordance with the Decree of the Directors of PT PLN Enjiniring concerning Procurement of Goods / Services applicable in the Company;</i> 16. <i>Giving approval or disagreement about the assessment of individual, monthly, semester and annual performance to employees who are in the scope of the Procurement, Quality and Risk Management Unit.</i> |
|---|---|

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN PENGADAAN MANAJEMEN MUTU DAN RISIKO

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, anggota SPMMR telah mengikuti program pengembangan kompetensi, berupa pendidikan dan pelatihan. Pengembangan kompetensi yang diikuti SPMMR selama 2019 sebagai berikut.

DEVELOPMENT OF COMPETENCY OF PROCUREMENT UNIT OF QUALITY MANAGEMENT AND RISK

To support the implementation of their duties, SPMMR members have participated in competency development programs, in the form of education and training. The competency development that was followed by SPMMR during 2019 was as follows.

• TABEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN
MANAJEMEN MUTU DAN RISIKO

• TABLE OF COMPETENCY DEVELOPMENT FOR
QUALITY AND RISK MANAGEMENT UNITS

Nama Name	Pengembangan Kompetensi Competency Development
Suryati	CRGP Effective Communication Skills
Katherine Amaranila	Training dan Sertifikasi CRMO Awareness dan Audit Internal ISO 9001:2015 Effective Communication Skills Awareness dan Audit Internal ISO 9001:2015 Training Pembelajaran Karya Inovasi
Indratno Hariyanto	Certified International Supply Chain Manager IPM : Insinyur Profesional Madya Pengadaan Barang dan Jasa Qualified Risk Management Analyst (QRMA) Batch 2 Effective Communication Skills Kontrak Berbasis FIDIC BATCH 2 Inhouse Training Problem Solving and Decision Making
Achiarli Khalilul Rahman	Pengadaan Barang dan Jasa Awareness dan Audit Internal ISO 9001:2015 Kontrak Berbasis FIDIC BATCH I
Citra Resmi	Insinyur Profesional Pratama Qualified Risk Management Analyst (QRMA) Batch 1 Awareness dan Audit Internal ISO 9001:2015 Training Pendalaman HPE (Level Instruktur) Training Pembelajaran Karya Inovasi
Wizasko Ardiansyah	IPP : Insinyur Profesional Pratama, Ahli Geoteknik - Madya Effective Communication Skills Awareness dan Audit Internal ISO 9001:2015
Yushan	Pengadaan Barang dan Jasa Qualified Risk Management Analyst (QRMA) Batch 1



Akuntan Publik

Public Accountant

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perusahaan dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan PLN Enjiniring tahun buku 2019 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Dalam penggunaan Auditor Eksternal, PLN Enjiniring mengacu pada ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

PLN Enjiniring selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan

The function of independent oversight of the financial aspects of the Company carried out by conducting an External Audit examination conducted by the Public Accountant Office (KAP). The External Auditor examining the PLN Enjiniring financial statements for the 2019 fiscal year shall be determined through the Annual General Meeting of Shareholders based on recommendations from the Board of Commissioners and the Audit Committee.

In the use of External Auditors, PLN Enjiniring refers to the provisions of Regulation of the Minister of Finance No. 17 / PMK.01 / 2008 dated February 5, 2008 article 3 paragraph 1 which states that the provision of general audit services on the financial statements of an entity conducted by the KAP for a maximum of 6 (six) consecutive financial years and by a Public Accountant no later than for 3 (three) consecutive book years.

PLN Enjiniring always strives to improve communication between the Public Accountant Office, Audit Committee and Management to be able to minimize the obstacles that occur during the audit process. In order that the audit process is in accordance with Professional Accountant Standards and work agreements and the scope of the audit has been determined and completed in accordance with the predetermined time target, regular meetings are held to discuss some significant important issues

Kantor Akuntan Publik

Data auditor eksternal yang melakukan audit laporan keuangan PLN Enjiniring sebagai berikut.

- **Tabel Data Auditor Eksternal yang Melakukan Audit Laporan Keuangan PT PLN Enjiniring**

Tahun <i>Year</i>	Nama Kantor Akuntan Publik <i>Name of Public Accountant Office</i>	Periode <i>Period</i>	Partner Pelaksana <i>Executor Partner</i>	Biaya Audit <i>Cost of Audit</i>
2019	RSM Indonesia	3 Years	Amir Abadi Jusuf, Asryanto, Mawar & Rekan	Cost is borne by PT PLN (Persero)
2018	RSM Indonesia	3 Years	Amir Abadi Jusuf, Asryanto, Mawar & Rekan	Cost is borne by PT PLN (Persero)
2017	RSM Indonesia	3 Years	Rusli Munir	Cost is borne by PT PLN (Persero)

Public Accounting Firm

Data from external auditors conducting PLN Enjiniring financial statements audits are as follows.

- **Data Table of External Auditors Conducting Pln Enjiniring Financial Statements Audits**

2016	RSM Indonesia	3 Years	Rusli Munir	Cost is borne by PT PLN (Persero)
2015	Pricewaterhouse Cooper (PWC)	2 Years	Drs. Haryato Sahari, CPA	Cost is borne by PT PLN (Persero)

Jasa Lain Yang Diberikan Akuntan

Pada Periode 2019, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik PLN Enjiniring memberikan jasa lain selain jasa Audit Laporan Keuangan, yaitu Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Internal.

Other Services Provided by Accountants

In the 2019 Period, PLN Enjiniring Public Accountant and Public Accountant Office provided other services besides the Financial Report Audit services, namely the Performance Evaluation Report and the Compliance Report on Legislation and Internal Control.



Sistem Pengendalian Intern

Internal Control System

Sistem pengendalian intern merupakan aspek penting dalam manajemen perusahaan yang sehat dan aman. Sistem pengendalian intern dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan, antara lain menjamin semua kegiatan usaha Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut terdiri atas undang-undang, peraturan pemerintah, otoritas pengawas dan ketentuan intern Perusahaan. Selain itu, **system** pengendalian intern yang efektif dapat membantu Perusahaan menjaga aset yang dimiliki, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang akurat, meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Penerapan sistem pengendalian intern pada tingkat Dewan Komisaris adalah dengan melakukan pengawasan dan pemberian nasehat terkait kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan serta pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sedangkan, penerapan sistem pengendalian intern pada tingkat Direksi adalah dengan menerapkan kebijakan dan prosedur Perusahaan secara konsisten dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penerapan tersebut antara lain terkait dengan kegiatan operasional, manajemen risiko, rencana strategis, pembagian tugas, pendelegasian wewenang, serta kebijakan akuntansi yang memadai.

Perusahaan terus mendorong upaya peningkatan **system** pengendalian intern yang efektif. Pengendalian intern menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur dalam setiap kegiatan di unit kerja sehingga apabila terjadi penyimpangan, maka dapat diketahui secara dini dan dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Perusahaan memiliki Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang berperan dalam mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian intern yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan. SPI senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip GCG dapat berjalan sesuai koridornya.

The internal control system is an important aspect of healthy and safe company management. The internal control system was built to fulfill several objectives, including guaranteeing all the Company business activities in accordance with applicable regulations. The provisions consist of laws, government regulations, regulatory authorities and the Company's internal provisions. In addition, an effective internal control system can help the Company maintain its assets, ensure the availability of accurate financial reporting, improve the Company compliance with applicable regulations, and reduce the risk of loss, irregularities and violations of prudential aspects.

The implementation of the internal control system at the Board of Commissioners level is to supervise and provide advice related to adequacy and fairness in the preparation of financial statements and risk management by taking into account the precautionary principle. Meanwhile, the implementation of internal control systems at the Board of Directors level is to implement the Company's policies and procedures consistently and meet compliance with applicable regulations. The implementation includes but is not limited to operational activities, risk management, strategic plans, division of tasks, delegation of authority, and accounting policies adequate.

The company continues to encourage efforts to improve an effective internal control system. Internal control becomes an integrated part of the system and procedures in every activity in the work unit so that if deviations occur, it can be known early and corrective steps are taken by the relevant work unit. The Company has an Internal Oversight Unit (SPI) that plays a role in evaluating the adequacy and effectiveness of internal control carried out by the Company's management. SPI always conducts internal supervision by carrying out a systematic approach so that the application of GCG principles can proceed according to the corridor.

Dalam melaksanakan audit, SPI menggunakan pendekatan berbasis risiko (Risk Based Audit). SPI memiliki Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang antara lain mengatur tentang sasaran pemeriksaan yang akan dilakukan pada tahun bersangkutan. Sasaran pemeriksaan dalam PKPT mencakup pemeriksaan pengendalian keuangan dan pengendalian operasional dan kepatuhan. Pemeriksaan operasional keuangan meliputi pemeriksaan penyusunan RKAP dan Laporan Keuangan, pemenuhan kebutuhan pendanaan, pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan Perusahaan, pemantauan persekot dinas, mitigasi risiko finansial, pelaksanaan evaluasi realisasi RAB, penagihan dan pengelolaan piutang pelanggan, laporan kinerja Perusahaan, pemantauan utang Perusahaan, pencatatan dan penghapusan aset, pengembangan sistem dan prosedur akuntansi, serta pelaksanaan pengakuan, pencatatan dan pelaporan secara menyeluruh/ sampling. Sedangkan, pemeriksaan operasional meliputi pemeriksaan bidang pemasaran, pengembangan usaha, keuangan, akuntansi, SDM, umum, transmisi dan distribusi, pembangkitan, Sekretaris Perusahaan, serta Satuan Manajemen Mutu dan Risiko.

In conducting audits, SPI uses a risk-based approach (Risk Based Audit). SPI has an Annual Oversight Work Program (PKPT), which among others regulates the target of inspection to be carried out in the year concerned. The audit objectives in the PKPT include auditing financial controls and operational and compliance controls. Examination of financial operations includes examining the preparation of the RKAP and Financial Statements, meeting funding needs, managing the Company's revenue and financing budgets, monitoring official business risks, financial risk mitigation, evaluating the realization of the RAB, billing and managing customer accounts, reports on the Company's performance, monitoring of the Company's debt, recording and the elimination of assets, the development of accounting systems and procedures, and the implementation of comprehensive recognition, recording and reporting / sampling. Meanwhile, operational audits include audits in the fields of marketing, business development, finance, accounting, HR, general, transmission and distribution, generation, Corporate Secretary, and the Quality and Risk Management Unit.

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern

Perusahaan senantiasa melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian intern di Perusahaan dan memberikan usulan perbaikan dalam mencapai peningkatan yang berkelanjutan dari proses lini yang ada. Segala sesuatu terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan kepada Direksi. Langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalkan risiko. Laporan juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite-Komite yang telah dibentuk.

Kesesuaian Pengendalian Intern Dengan Kerangka COSO

Sistem pengendalian intern Perusahaan telah sesuai dengan Internal Control Integrated Framework yang dikembangkan oleh The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) di tahun 2013. Tujuan pengendalian intern menurut COSO meliputi tujuan operasional, tujuan pelaporan

Evaluation of Internal Control Systems

The Company always evaluates the implementation of internal control systems in the Company and provides recommendations for improvements in achieving continuous improvement of existing line processes. Everything related to internal control adequacy issues has been reported to the Directors. Follow-up steps have been taken to minimize the risk. Reports have also been submitted to the Board of Commissioners through established Committees.

Conformity of Internal Control With the Coso Framework

The Company's internal control system is in accordance with the Integrated Internal Control Framework developed by The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) in 2013. The internal control objectives according to COSO include operational objectives, reporting objectives and

dan tujuan kepatuhan. Hal ini sesuai dengan tujuan sistem pengendalian intern Perusahaan yang telah diuraikan di atas.

Tujuan operasional berkaitan dengan efektivitas efisiensi operasi. Tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan yang memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh regulator maupun Perseroan. Sedangkan tujuan kepatuhan berkaitan dengan kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Menurut COSO, unsur-unsur pengendalian intern meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Kegiatan pemantauan.

compliance objectives. This is in accordance with the objectives of the Company's internal control system outlined above.

Operational objectives relate to the effectiveness of operating efficiency. The purpose of reporting relates to the interests of financial reporting that meet the criteria of reliable, timely, transparent and other requirements set by the regulator and the Company. Whereas the purpose of compliance is related to the Company's compliance with laws and regulations. According to COSO, the elements of internal control include the following components:

1. *Control environment;*
2. *Risk assessment;*
3. *Control activities;*
4. *Information and Communication;*
5. *Monitoring activities.*



Sistem Manajemen K3

K3 (Occupational Health and Safety) Management System

SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) adalah bagian dari system manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Penerapan SMK3 bertujuan untuk:

- Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi;
- Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen dan pekerja/karyawan;
- Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas.

SMK3 menjadi salah satu fokus utama korporat dalam implementasi SMK3 di PT PLN Enjiniring. PT PLN Enjiniring menerapkan SMK3 agar tidak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja baik di PT PLN Enjiniring Kantor Pusat maupun di CNG Plant Bangkanai dimana CNG Plant Bangkanai telah mendapatkan sertifikasi SMK3 pada bulan Juli 2019. Program kerja SMK3 disusun melalui lima elemen yaitu:

- *Man*, menyiapkan personil dan Tim pendukung penerapan SMK3 termasuk sertifikasi dan pelatihan;
- *Machine*, menyiapkan dan memasang instalasi pendukung K3 seperti penangkal petir, hydrant, alarm, dll;
- *Method*, menyiapkan dan menyusun dokumen K3 seperti pedoman, prosedur, intruksi kerja, formulir dll;
- *Management*; menerapkan K3 ke dalam manajemen perusahaan dengan melakukan pemeliharaan dokumen K3, melakukan HIRARC, pemeriksaan kesehatan serta membuat system pendukung implementasi K3;

SMK3 (Occupational Safety and Health Management System) is part of the company's overall management system in order to control risks related to work activities in order to create a safe, efficient and productive workplace.

The implementation of Health and Safety System to aims:

- *Increasing the effectiveness of planned, measured, structured and integrated health and safety system;*
- *Prevent and reduce accidents and diseases in the working place by involving management and workers / employees as the elements;*
- *Creating a safe, comfortable and efficient workplace to boost productivity.*

Health and safety system management is one of the company main focus. PT. PLN Enjiniring implemented their health and safety system management to prevent accident and diseases arising because of the work weather in PT PLN Enjiniring head quarter or in CNG Plant Bangkanai where its already certified with Health and safety System Management on Juli 2019. The SMK3 work program is structured through five elements, namely:

- *Man, preparing the personnel and support team to implementing the health and safety system management including certification and training;*
- *Machine, prepare and install supporting installations of occupational health and safety management systems such as lightning rods, hydrant, alarm, etc .;*
- *Method, drafting and repairing health and safety management system documents such as guidelines, procedures, working instructions, forms etc .;*
- *Management; implementing the health and safety management system in company's management by maintaining the health and safety management system documents, conducting HIRARC, health checks and creating the health and creating support system in implementation of the health and safety management system;*

- *Money*, menyiapkan anggaran untuk mendukung pemenuhan penerapan SMK3.

Berikut pelaksanaan Sistem Manajemen K3 Tahun 2019:

- Pelaksanaan Training Tim Tanggap Darurat
- Pelaksanaan Audit Internal K3 untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SMK3 dengan Nilai 92,17%
- Pelaksanaan sertifikasi disnaker K3 Listrik
- Pelaksanaan sertifikasi disnaker AK3U
- Pelaksanaan sosialisasi SMK3 pada calon pegawai baru
- Pelaksanaan MCU (Medical Check Up) pada pegawai dengan kategori umur 45 tahun ke atas
- Pelaksanaan upacara peringatan bulan K3

Sasaran kegiatan K3 pada tahun 2019 telah tercapai dengan hasil kecelakaan kerja nihil.

- *Money*, prepare a budget to support the fulfill the implementaion of health and safety management system.

Following is the implementation of 2019 Health and safety management system :

- *Emergencies respons training.*
- *Internal audit of the Health and Safety Management Sytem to measure the compliance of Health and Safety Management System with 92,17% on scrore.*
- *Healthand Safety Management System certification on Electricity health and safety from Government Labor Office.*
- *Implementation of AK3U Manpower certification*
- *Sosialisation of Haelth and Safety Management System for new employee.*
- *Medical Check Up for the employee above 45 years old.*
- *Celebrating health and safety month.*

The target of Health and Safety activities in 2019 has been achieved with zero work accidents.

Sistem Teknologi Informasi

Information Technology System

Sejalan dengan visinya untuk menjadi perusahaan enjiniring terkemuka di Asia, PLN Enjiniring terus berbenah untuk tumbuh dan berkembang dalam memenuhi harapan stakeholders. Di tengah perkembangan dunia yang semakin kompleks, PLN Enjiniring senantiasa mengikuti perkembangan zaman salah satunya dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI) sebagai alat penyebaran informasi sekaligus sistem kontrol di dalam aktivitas perusahaan.

Di PLN Enjiniring, penerapan Teknologi Informasi dilakukan oleh Sub-bidang Teknologi Informasi (TIF) yang dikelola di bawah Sekretariat Perusahaan. Berikut ini adalah beberapa kegiatan utama bidang TIF PLNE :

In line with its vision to become a leading engineering company in Asia, PLN Enjiniring continues to improve to grow and develop in meeting stakeholder expectations. In the midst of an increasingly complex world development, PLN Enjiniring continues to keep abreast of the times one of which is by using Information Technology (IT) as a means of disseminating information as well as a control system in company activities.

At PLN Enjiniring, the application of Information Technology is carried out by the Information Technology Sub-sector (TIF) which is managed under the Corporate Secretariat. Following are some of the main activities in the field of TIF PLNE:

Kebijakan Teknologi Informasi

Berdasarkan Keputusan Direksi No.14.001.K/DIR/PLNE/XI/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Jabatan PT PLN Enjiniring menyebutkan bahwa, tugas pokok Bidang Teknologi Informasi (TIF) pada Sekretariat Perusahaan antara lain:

- Menyusun kebijakan (*governance*), *roadmap* dan pengamanan operasi teknologi informasi;
- Merancang dan mengembangkan aplikasi secara periodik.
- Mendukung operasi dan mengendalikan aplikasi secara periodik.
- Mengoperasikan dan mengelola jaringan internet dan intranet di PT PLN Enjiniring.
- Menyiapkan fasilitas kerja berbasis teknologi informasi
- Menjamin kehandalan dan ketersediaan operasi dan infrastruktur di Sub Bidang Teknologi Informasi
- Mengevaluasi pelaksanaan peremajaan data dan informasi, serta supervise kegiatan berbasis aplikasi di Sekretariat Perusahaan

Information technology Policy

Based on the Directors Decree No. 14.001.K / DIR / PLNE / XI / 2017 regarding the Organizational Structure and Main Tasks of PT PLN Enjiniring stated that, Information Technology (TIF) sector main duties at the Secretariat include:

- *Formulating policies (governance), roadmaps, and securing information technology operations;*
- *Periodically Designing and developing an application.*
- *Operation support and controlling an application periodically.*
- *Mengoperasikan dan mengelola jaringan internet dan intranet di PT PLN Enjiniring.*
- *Operate and managing PT PLN Enjiniring internet and intranet.*
- *Sets up working facilities based on information technology.*
- *Ensuring the reliability and availability of operations and infrastructure in the Information Technology department/Sub-Sector.*
- *Evaluate the implementation of data and information update, as well as supervise application-based activities at the Company Secretariat*

Selain terkait tugas pokok, teknologi informasi juga memiliki kebijakan dan pedoman umum tata kelola teknologi informasi yang tertuang pada Keputusan Direksi No. 12.001.K/DIR/PLNE/XI/2018 dan kebijakan dan pedoman umum keamanan informasi elektronik dan teknologi informasi yang tertuang pada Keputusan Direksi No. 13.001.K/DIR/PLNE/XI/2018.

Sebagai pedoman pengembangan dan aktivitas operasional TI, berikut adalah prosedur-prosedur di bidang TI yang berlaku.

- a. PE.PLNE.A.02.01 Prosedur pengelolaan penanganan insiden TI
- b. PE.PLNE.A.02.02 Prosedur pengembangan aplikasi sistem informasi
- c. PE.PLNE.C.02.02 Prosedur pengujian aplikasi sistem informasi
- d. PE.PLNE.D.02.05 Prosedur penggunaan aplikasi perangkat enjiniring
- e. PE.PLNE.D.02.06 Prosedur pengelolaan akun pengguna
- f. PE.PLNE.P.02.01 Prosedur penyusunan IT Master Plan
- g. PE.PLNE.P.02.02 Prosedur penyusunan anggaran TI

Apart from its main duties, information technology (IT) also has its own policies and general guidelines as stipulated in the Board of Directors Decree No. 12.001.K / DIR / PLNE / XI / 2018, and guideline and general policies for electronic information security and information technology as stated in Board of Directors Decree No. 13.001.K / DIR / PLNE / XI / 2018.

As a guideline for IT development and operational activities, the following are applicable IT procedures.

- a. *PE.PLNE.A.02.01 Procedure for managing IT incidents handling)*
- b. *PE.PLNE.A.02.02 Procedure for developing information systems applications)*
- c. *PE.PLNE.C.02.02 Procedure for testing information system application)*
- d. *PE.PLNE.D.02.05 Procedure for using the engineering device application)*
- e. *PE.PLNE.D.02.06 Procedure for managing user accounts)*
- f. *PE.PLNE.P.02.01 Procedure for preparing IT Mater Plan)*
- g. *PE.PLNE.P.02.02 Procedure for preparing IT budgets)*

Roadmap Teknologi Informasi

Sejalan dengan telah disahkannya Keputusan Direksi no. 13.002.K/DIR/PLNE/XII/2018 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi (IT Master Plan) PT PLN Enjiniring tahun 2019-2023, sepanjang tahun 2019, subbidang Teknologi Informasi melaksanakan inisiatif – inisiatif pekerjaan yang ada pada tahun 2019 diantaranya:

Information and Technology Roadmap

Along with the ratification of the Decree of the Board of Directors no. 13.002.K/DIR/PLNE/XII/2018 regarding PT PLN Enjinirings' IT Master Plan (Rencana Induk Teknologi Informasi) 2019-2023, through out 2019, Information Technology sub-Sector carry out existing work initiatives in 2019 including:

1. Application Development Roadmap

- Procurement Integrator Design and Engineering Application
- VC 2019 App Development
- Dashboard Application Development
- EProcurement App Development
- PDF Conversion Application Procurement
- Single Line Diagram App Procurement (according to the results of the study)
- Program SOLID, bekerjasama dengan DIVSTI PLN
- Opportunity & Resource Intelligence System (ORIS)

2. Application Optimization Roadmap
<ul style="list-style-type: none"> • Engineering Devices App Optimisation • Vistual Cubical App Optimisation • Sunfish App Optimisation • SAP App Optimisation • App Optimisation • Dashboard App Optimisation • Big Data System Optimisation • Primavera App Optimisation • Website Optimisation for company promotion
3. IT Infrastructure and Security Roadmap
<ul style="list-style-type: none"> • Network access condition Monthly analysis & evaluation • Increasing PLNE application portal security • CCTV System provision at Pondok Pinang Office • CCTV System and telephone provision at CNG Bangkanai • Fingerprint installment strategic project of construction supervision • Infrastructure Development for Data center and Data Recovery Center • Procurement and implementation of Data Loss Pevention • UPS procurement for Pondok Pinang Data center • Examining the Safe Device, Monthly Analitic and Evaluation from malware attacks • The application of ISO 27001
4. IT governance & HR roadmap
<ul style="list-style-type: none"> • The application of ISO 27001 • Endorsing the It bisnis process and adjusting the term for the IT employee) • Renewing the Competency Directory and IT competency employment needs. • Recruitement of Internal IT employee

Pelaksanaan Teknologi Informasi

Kegiatan subbidang Teknologi Informasi PLN Enjiniring selama tahun 2019 mencakup:

1. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi
2. Penyerapan Anggaran Investasi
3. Pelaksaan IT Master Plan
4. Layanan Operasional TI
5. Penyelesaian Rekomendasi dalam LHA SPI
6. Sinergi Anak Perusahaan PLN dengan PT ICON+
7. Manajemen Risiko, KPKU dan GCG

Adapun pengembangan system teknologi informasi selama tahun 2019 sebagai berikut.

1. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi

Implementation of Information Technology

The activities of the PLN Enjiniring Information sub-sector in 2019 includes:

1. Information Technology System Development)
2. Investment Budget Usage)
3. Implementation of IT Master Plan)
4. IT Operational Services)
5. Recommendation Settlement in LHA SPI)
6. The Synergy between PLN Subsidiary and PT ICON+)
7. Risk Management, KPKU and GCG)

The development of information technology systems during 2019 is as follows.

1. Information Technology System Development)

No.	Nama <i>Name</i>	Fungsi <i>Function</i>	Status terakhir 2019 <i>Last Status in 2019</i>
1	Virtual Cubicle	Aplikasi Manajemen Proyek untuk data perencanaan, pelaksanaan, hingga penutupan pekerjaan di Direktorat Enjiniring dan di bidang Pemasaran	Rilis Aplikasi Virtual Cubicle 2.0 untuk meningkatkan fitur VC terkait mutu (DPD, RMP hingga QA/QC), perencanaan dan pengawasan beban kerja (workload) SDM, juga manajemen proyek secara umum serta penambahan fitur baru untuk monitoring pemenuhan manmonth dalam pekerjaan supervisi konstruksi
	<i>Virtual Cubicle</i>	<i>Project Management Application for planning, implementation and closing data at the Directorate of Engineering and in the field of Marketing</i>	<i>Released Virtual Cubicle Application 2.0 to improve VC features related to quality (DPD, RMP to QA / QC), HR workload planning and management, also general project management and the addition of new features for monitoring compliance with Manmonth in construction supervision work</i>
2	Sunfish HR	Aplikasi untuk subbidang SDM, dan menyediakan fitur Employee Self Service bagi karyawan PLN Enjiniring	Rilis Fitur Baru Aplikasi Sunfish pada: 1. proses bisnis SPPD yaitu Temporary leave, Mobilisasi demobilisasi personel dan SPPD person luar 2. proses bisnis rekrutmen PKWT
	<i>Sunfish HR</i>	<i>Application for HR, and provides Employee Self Service features for PLN Enjiniring employees</i>	<i>The New Feature Release of the Sunfish Application on: 1. SPPD business processes, namely Temporary leave, Mobilization of demobilization of personnel and SPPD non-PLNE 2. PKWT recruitment business process</i>
3	Simora	Aplikasi untuk subbidang Umum yang memiliki manfaat untuk melakukan pemesanan dan monitoring penggunaan ruang rapat	Karyawan dapat melakukan pemesanan ruang rapat, selanjutnya admin bagian umum melakukan persetujuan, penolakan ataupun penggantian ruangan dengan ruang rapat lain. Karyawan dan admin dapat melakukan monitoring ruang rapat
	<i>Simora</i>	<i>Application for General Affair that have the benefit of ordering and monitoring the use of meeting rooms</i>	<i>Employees can book a meeting room, then the administrator in General Affair can approves, rejects or replaces the room with another meeting room. Employees and administrator in General Affair can monitor meeting rooms</i>
4	IT Helpdesk	Aplikasi untuk mencatat laporan permasalahan/pertanyaan pengguna system TI dan juga monitoring tindaklanjutnya oleh tim TI.	Fitur - fitur yang tersedia pada Aplikasi Helpdesk antara lain: 1. permohonan bantuan penggunaan sistem TI 2. monitoring tindaklanjut permohonan bantuan penggunaan sistem TI
	<i>IT Helpdesk</i>	<i>Application for recording problem reports / questions of IT system users and also monitoring the follow-up by the IT team.</i>	<i>Features available in the Helpdesk Application include: 1. request for assistance in using IT systems 2. monitoring follow-up requests for assistance in using IT systems</i>
5	Data Center	Server yang difungsikan untuk server production aplikasi - aplikasi milik PLN Enjiniring	Berfungsi dengan baik
	<i>Data Center</i>	<i>The server that is used for the production server application is owned by PLN Enjiniring</i>	<i>Works good</i>

2. Penyerapan Anggaran Investasi

Subbidang Teknologi Informasi berhasil menyerap anggaran investasi 2019 sebesar 2.575 Milyar Rupiah

3. Pelaksanaan IT Master Plan

1. Layanan Operasional TI
Subbidang TI melaksanakan dukungan operasi TI kepada pengguna melalui layanan Helpdesk & penanganan insiden Sistem TI. Subbidang TI juga melaksanakan kegiatan pemeliharaan yang meliputi kegiatan backup, pengecekan kondisi Perangkat Enjiniring, pengecekan masa berlaku lisensi layanan TI dan pemeliharaan/optimalisasi penggunaan lisensi. Subbidang TI juga melaporkan tingkat penggunaan aplikasi Perangkat Enjiniring setiap bulan kepada bidang-bidang terkait.
2. Penyelesaian Rekomendasi dalam LHA SPI
Dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance dan Tata Kelola TI yang baik, Subbidang TI diaudit oleh SPI PLN-E dan juga SPI PT PLN (Persero) grup khusus TI.
 - a. Penyelesaian audit TI PLN (Persero): 11 rekomendasi tindak lanjut
 - b. Penyelesaian audit SPI PLN-E: 7 rekomendasi tindak lanjut
3. Sinergi Anak Perusahaan PLN dengan PT ICON+
Sinergi antar anak perusahaan PT PLN (Persero) dari sub-bidang teknologi informasi adalah bersinergi dengan PT Indonesia Comnet+ dalam pengembangan aplikasi Virtual Cubicle dan penyediaan infrastruktur khususnya cloud dan video conference.
4. Manajemen Risiko, KPKU dan GCG
Dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance, subbidang TI secara rutin bulanan melaporkan mitigasi risiko ke aplikasi RICO. Selain itu, TI juga turut berkontribusi di dalam penyusunan dokumen aplikasi KPKU dan penyediaan eviden untuk penilaian GCG.

2. Investment Budget Usage

The Information Technology sub-sector has succeeded in absorbing the 2019 investment budget of 2,575 billion Indonesian Rupiah.

3. Implementation of IT Master Plan

1. *IT Operational Services*
IT sub-sector carries out IT support to users through Helpdesk services & IT System Incident Handling. IT sub-sector also maintains activities including, backup activities, checking the condition of Engineering Equipment, checking the validity period of IT service licenses and maintaining / optimizing the uses of license. The IT subdivision also reports the monthly usage level of Engineering Equipment application to the related departments/division.
2. *Completion of Recommendations in LHA SPI*
In implementing Good Corporate Governance and good IT governance, IT sub-sector audited by SPI PLN-E dan SPI PT PLN (Persero) group in IT speciality.
 - a. *IT PLN (Persero) audit implementation : 11 recommendations to follow up*
 - b. *SPI PLN-E audit implementation : 7 recommendations to follow-up*
3. *Synergy between PLN's subsidiaries and PT ICON+*
The synergy between information technology sub-sector from PT PLN (Persero)'s subsidiaries is to synergize PT Indonesia Comnet+ in developing the Virtual Cubicle application and providing infrastructure, especially cloud and video conferencing.
4. *Risk Management, KPKU and GCG*
In implementing Good Corporate Governance, IT sub-sector reporting risk mitigation to the RICO application monthly. Beside that, IT also contributed in drafting the document for KPKU application and provided evidence for GCG assessment.



Perkara Hukum Yang Dihadapi PLN Enjiniring

Legal Cases Faced by PLN Enjiniring

Berikut ini adalah informasi tentang perkara hukum yang sedang dihadapi Perusahaan dan anak Perusahaan:

a. Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Pada tanggal 01 Oktober 2018, Perusahaan menghadapi gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Konsorsium PT Odira Persada dan PT Timas Suplindo (Konsorsium) ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") terkait biaya yang timbul akibat perpanjangan waktu dan gangguan dalam pelaksanaan pekerjaan serta kewajiban PLNE melakukan pembayaran pekerjaan kepada Konsorsium yang telah diserahkan berdasarkan Taking Over Certificate (TOC) dengan nilai tuntutan ganti rugi sebesar Rp51.392.018.849,00 dan USD903.593,90 serta bunga bank komersial 10% dari nilai klaim dan mengembalikan Jaminan Bank Garansi ("BG"). Perusahaan mengajukan gugat balik (rekonvensi) atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan Konsorsium selama 43 minggu, dengan tuntutan ganti rugi denda keterlambatan (Liquidated Damages) sebesar Rp2.994.067.308,04 dan USD868.107,37 serta kerugian yang dialami Perusahaan sebesar Rp40.842.829.619,13 dan membayar uang paksa Rp10.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan. Putusan Provisi tanggal 25 Februari 2019 mengharuskan Perusahaan membayar TOC serta mengembalikan BG senilai USD1.009.424,85 dan Rp3.481.473.614,00 kepada Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi harus menyerahkan BG senilai Rp2.000.000.000,00 kepada Perusahaan. Perkara telah diputus pada tanggal 09 September 2019 dengan amar putusan menguatkan Putusan Provisi. Putusan telah berkekuatan hukum tetap.

b. Perkara Hukum yang Dihadapi Entitas Anak

Selama tahun 2019, tidak terdapat perkara hukum yang dihadapi oleh Entitas Anak Perusahaan.

c. Perkara Hukum yang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2018, tidak terdapat perkara hukum yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

The following information is about some legal cases currently faced by the Company and its subsidiaries:

a. Legal Cases Faced By The Company

The Company faced a breach of contract lawsuit filed by the Consortium of PT Odira Persada and the Consortium of PT Timas Suplindo to the Indonesian National Arbitration Board ("BANI") related to incurred costs as a result of time extension and disruption in its work execution and PLNE's obligation to perform work payment to the Consortium that has been handed over based on the Taking Over Certificate (TOC) with a claim value of Rp. 51,392,018,849.00 and USD903,593.90 as well as a 10% claim value of the commercial bank interest and the Bank Guarantee returns ("BG") on October 1, 2018. The company filed a counterclaim for the delay of the work executing carried out by the Consortium for 43 weeks, with liquidated damages claims amounting to Rp2,994,067,308.04 and USD868,107.37 as well as suffered losses amounting to Rp40,842,829,619.13 by the Company and paid the forced money for Rp.10,000,000.00 each day of the delay. The Provision Decision dated on February 25, 2019 requires the Company to pay TOC and return BG worth USD1,009,424.85 and Rp3,481,473,614.00 to the Convention Applicant. And the Convention Applicant must submit BG worth Rp2,000,000,000.00 to the Company. The case was decided on September 9, 2019 with the verdict strengthening the Provisional Decision. The verdict has permanent legal force.

b. Legal Cases Faced by The Subsidiaries

There were no legal cases faced by the Subsidiaries during 2019

c. Legal Cases Faced by the Board of Commissioners and Directors

There were no legal cases involving members of the Company's Board of Commissioners and Directors during 2018

Pedoman Perilaku

Code of Conduct

PLN Enjiniring menyadari sepenuhnya bahwa hubungan baik dengan pemangku kepentingan dan peningkatan nilai Pemegang Saham dalam jangka Panjang hanya dapat dicapai melalui integritas bisnis dalam setiap aktivitas perusahaan sebagaimana dituangkan dalam Pedoman Perilaku.

Pedoman perilaku merupakan pedoman bagi setiap individu di perusahaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Pedoman Perilaku tersebut berisi penjabaran nilai-nilai utama perseroan, pedoman kerja organisasi, hubungan industrial, hubungan stakeholder dan pemerintah. Komitmen terhadap Pedoman Perilaku telah ditandatangani oleh seluruh Pegawai, Dekom dan Direksi PT PLN Enjiniring. Pedoman Perilaku ini telah diperbaharui melalui SK Nomor 23.002.K/DIR/PLNE/XI/2016 tanggal 23 November 2016 tentang Buku Saku Pedoman Perilaku yang sebelumnya dimutakhirkan secara berkala pada tahun 2013 dan 2015.

PLN Enjiniring is fully aware that good relations with stakeholders and increasing shareholder value in the long term can only be achieved through business integrity in every company activity as outlined in the Code of Conduct.

Code of conduct is a guide for every individual in the company in carrying out its functions and duties. The Code of Conduct contains a description of the company's core values, organizational work guidelines, industrial relations, stakeholder relations and government. Commitments to the Code of Conduct have been signed by all Employees, Commissioners and Directors of PT PLN Enjiniring. This Code of Conduct has been updated through Decree No. 23.002.K / DIR / PLNE / XI / 2016 dated 23 November 2016 concerning the Code of Conduct Handbook which was previously updated periodically in 2013 and 2015.

Isi Code of Conduct

Code of Conduct mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh Insan PLN Enjiniring.

Code of Conduct berisi hal-hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Kewajiban
- III. Visi dan Misi
- IV. Pedoman Prilaku
- V. Sanksi
- VI. Komitmen

• Fill in the Code of Conduct

The Code of Conduct regulates the ethical values policy that is stated explicitly as a standard of behavior that must be mandated by all PLN Enjiniring Personnel.

The Code of Conduct contains the following matters:

- I. Introduction
- II. The obligation
- III. Vision and mission
- IV. Code of Conduct
- V. Sanctions
- VI. Commitment

Kepatuhan Terhadap Code Of Conduct

Pada tahun 2019, upaya implementasi Code of Conduct dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya :

- a. Sosialisasi *Code of Conduct* kepada seluruh karyawan/pegawai/outsourcing dilingkungan PT PLN Enjiniring.

Compliance with Code of Conduct

In 2019, efforts to implement the Code of Conduct are carried out in several ways, including:

- a. Outreach of Code of Conduct to all employees / employees / outsourcing within PT PLN Enjiniring.

- b. Melakukan kegiatan *Collective Action* yang bertujuan mengurangi terjadinya praktek suap dan kecurangan dalam proses bisnis PLNE melalui proses internalisasi terhadap karyawan PLNE dan mensosialisasikan terhadap Mitra Kerja.
- c. Melakukan Kegiatan Multi Stakeholder Forum dengan tema Seminar Tematik "bersama membangun Integritas di lingkungan PLNE, dengan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- d. Melakukan kegiatan *Complaint Handling* Management, PLNE telah melaksanakannya sesuai laporan kepuasan pelanggan dimana kegiatan tersebut dilakukan secara rutin setiap tahun.

- b. *Conduct Collective Action activities aimed at reducing the occurrence of bribery and fraud practices in PLNE's business processes through the internalization process of PLNE employees and disseminating information to Business Partners.*
- c. *Conducting Multi Stakeholder Forum Activities with the theme of Thematic Seminars "together building Integrity within PLNE, with speakers from the Corruption Eradication Commission (KPK).*
- d. *Conducting Complaint Handling Management activities, PLNE has carried out according to customer satisfaction reports where these activities are carried out regularly every year.*

Jenis Sanksi Pelanggaran Code Of Conduct

Pelanggaran terhadap *code of conduct* pada PLN Enjiniring akan dikenakan hukuman disiplin sesuai yang telah diatur dalam Pedoman Perilaku Perusahaan. Sanksi yang diberikan terdiri dari hukuman Disiplin Ringan, Disiplin Sedang dan Disiplin Berat.

- **Tabel Jenis Pelanggaran Code Of Conduct**

Types of Sanctions Code of Conduct Violations

Violations of the code of conduct on PLN Enjiniring will be subject to disciplinary penalties in accordance with those set out in the Company's Code of Conduct. Sanctions provided consist of Light Discipline, Medium Discipline and Heavy Discipline.

- **Type of Code Of Conduct Violation Table**

Tingkat Sanksi	Jenis Pelanggaran
<i>Sanction Level</i>	<i>Types of Violations</i>
Mild Discipline	Not complying with the provisions of working hours in the Company, including leaving the office without direct supervisor's permission, except for work purposes; Not coming to work without a valid reason for 1 working day;

Moderate Discipline	<p>If in the light of a disciplinary sentence to lightly commit a mild disciplinary act again;</p> <p>Not going to work without valid reasons for 2 days or more in a row or split up to 4 working days in 1 month</p> <p>Misusing the assets of the company for personal and other interests, either with the intention of obtaining profits or not, except with the permission of the Company;</p> <p>Refusing to carry out work duties or orders given by the Company;</p> <p>Refusing to carry out transfer positions;</p> <p>Not carrying out duties which are the responsibility of his position</p> <p>Violating the law within the scope of criminal law and for the deed the employee is sentenced to sentence 2 (two) (final decision);</p> <p>Doing things that can tarnish or ruin the reputation of the Company or the dignity of employees;</p> <p>Make disturbance or noise in the work environment;</p> <p>Owning a company or owning shares of a company or working for another company whose business activities are the same as the Company;</p> <p>Requesting, receiving or using, other facilities or services from any party, which is known or reasonably suspected to be related to their position or job;</p> <p>Providing or promising to other parties in the form of goods, facilities or any services;</p> <p>Carrying out physical attacks (except self-defense actions) or threaten, intimidate fellow employees and or Directors;</p> <p>Careless or negligent in doing work, resulting in a loss for the Company</p>
Heavy Discipline	<p>Employees when undergoing a moderate disciplinary sentence, committing moderate disciplinary offenses once more;</p> <p>Taking and providing or leaking important information or important documents of the Company to other parties;</p> <p>Deliberately designing or making or directing in determining the specifications of the equipment so that it is detrimental or potentially detrimental to the Company or the Vendor, both material and immaterial;</p> <p>Doing work other than for the interests of the Company but using facilities or inventory belonging to the Company;</p> <p>Doing or participating or helping to do the work that has been given by the Company to the Company or other parties;</p> <p>Acting or cooperating with other parties to commit actions that are detrimental to or potentially detrimental to the Company;</p>

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Selama tahun 2019, tidak terjadi pelanggaran Kode Etik.

Number of Code Violations

During 2019, there were no violations of the Code of Ethics.

Kebijakan Gratifikasi

Gratuity Policy

Dalam kegiatan bisnis Perusahaan, pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan pihak internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Terkait dengan hubungan bisnis sering terjadi praktek kegiatan kerja yang muncul dan tidak dapat dihindari yaitu adanya penerimaan pemberian dan permintaan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) dari satu pihak kepada pihak yang lainnya, maka perlu untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan penerimaan, pemberian dan permintaan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) dari satu pihak kepada pihak yang lainnya dan tata cara/mekanisme pelaporannya di lingkungan PLN Enjiniring. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan Perusahaan sebagai suatu proses pembelajaran bagi anggota perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi Perusahaan dengan perilaku yang bermartabat dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan para pelanggannya.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Anggota perusahaan PLN Enjiniring atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada Pedoman Gratifikasi, agar segera melaporkan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan atau melaporkan melalui saluran Whistle Blowing System (WBS). Perusahaan menjamin bahwa proses pelaporan yang dilakukan oleh karyawan PLN Enjiniring maupun Pihak Ketiga akan dijaga kerahasiannya.

Sosialisasi Gratifikasi

Dalam rangka menjamin bahwa Pedoman ini dapat diketahui oleh seluruh pekerja PLN Enjiniring dan seluruh pihak ketiga yang berhubungan dengan PLN Enjiniring, agar seluruh pihak-pihak yang terkait di lingkungan PLN Enjiniring untuk melakukan hal-hal sebagai berikut.

In the Company's business activities, in general are inseparable from the relationships and interactions with internal and external parties who have mutually harmonious, harmonious and sustainable cooperation by not forgetting the ethics and principles of good corporate governance.

Related to business relations, work practices often occur that arise and cannot be avoided, that is, the receipt of gifts and gifts / souvenirs and entertainment from one party to another, it is necessary to regulate matters related to the acceptance, giving and requests for gifts / souvenirs and entertainment from one party to another party and the agenda / reporting mechanism within the PLN Enjiniring. This is important to be cultivated in the Company's environment as a learning process for company members in realizing the Company's vision and mission with dignified behavior and high image in business relationships with its customers.

Management of Gratification Control

Members of the PLN Enjiniring Company or third parties who are aware of violations of the provisions contained in the Gratuity Guidelines, to immediately report the violations according to the applicable regulations in the company or report through the Whistle Blowing System (WBS) channel. The company guarantees that the confidentiality of the reporting process conducted by PLN Enjiniring and third parties.

Gratuity Socialization

In order to ensure that this Guideline is known to all PLN Enjiniring workers and all third parties associated with PLN Enjiniring, so that all parties involved in the PLN Enjiniring environment do the following.

1. Mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) dalam setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa di perusahaan.
2. Menugaskan kepada Fungsi *Compliance* dan Fungsi Humas di lingkungan PLN Enjiniring untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh pekerja maupun pihak ketiga/ eksternal terkait dengan adanya pedoman ini.
3. Menugaskan Fungsi Pengadaan, Fungsi Pemasaran dan fungsi lain di lingkungan PLN Enjiniring yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga untuk melakukan Penyampaian Pedoman Penerimaan dan Pemberian Hadiah/ Cinderamata dan Hiburan (Entertainment) ini kepada seluruh pihak terkait dengan mata rantai supply di lingkungan PLN Enjiniring (Penyedia Barang/Jasa, Agen, Distributor, Kontraktor, Sub-Kontraktor, Konsultan, Auditor/Assessor dan Pelanggan serta Stakeholder lainnya.
4. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun juga terkait dengan ketentuan yang berlaku.
5. *Chief Compliance Officer* memonitor pelaksanaan/implementasi isi pedoman gratifikasi dan memberikan laporan secara berkala (6 bulan sekali) kepada Direktur Utama mengenai implementasinya termasuk laporan-laporan yang timbul setelah adanya ketentuan ini.

Sosialisasi PLN Enjiniring pada acara Ritual Pagi (sesuai SE No : 01.001.E/DIR/PLNE/VIII/2012) yang dilaksanakan setiap hari dimasing-masing Bidang yang diisi oleh *Change Agent* dengan materi program pengendalian gratifikasi dan tata nilai PLN Enjiniring.

The socialization of PLN Enjiniring at the Morning Ritual (according to SE No: 01.001.E / DIR / PLNE / VIII / 2012) is carried out every day in each Field filled by the Change Agent with material on the gratuity control program and PLN's Engineering values.

Whistleblowing System

Whistleblowing System (WBS) adalah **system** yang mengelola pengaduan/penyimpangan mengenai pelanggaran terhadap hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, **anonym** dan mandiri (**independent**) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta anggota perusahaan dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan PLN Enjiniring.

Whistleblowing System

Whistleblowing System (WBS) is a system that manages complaints / disclosures regarding unlawful behavior, unethical / improper conduct in a confidential, anonymous and independent manner which is used to optimize the participation of company members and business partners in uncovering violations that occur in the environment PLN Enjiniring.

Berdasarkan SK Direksi Nomor : 02.001.K/010/PLNE/III/2012 dan SK Nomor : 02.003.K/010/PLNE/2012 tanggal 2 Maret 2012, PLN Enjiniring telah memiliki kebijakan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing policy*). Landasan penyusunan system pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) adalah

1. Keinginan PLN Enjiniring untuk terus menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di seluruh lingkungan PLN Enjiniring, khususnya yang berkaitan dengan integritas dan transparansi;
2. Sebagai komitmen perusahaan untuk menyediakan media bagi penegakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab;
3. Sebagai salah satu alat yang ampuh dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di PLN Enjiniring

Maksud, Tujuan dan Manfaat Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

Maksud, tujuan dan manfaat penerapan **system** pelaporan pelanggaran (**Whistleblowing System**) PLN Enjiniring adalah :

1. Menciptakan iklim kondusif dan mendorong pelaporan pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan non finansial.
2. Mengurangi kerugian yang terjadi akibat pelanggaran melalui deteksi dini;
3. Mempersiapkan mekanisme deteksi dini atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.

Pengelolaan (Whistleblowing System)

Mekanisme pengelolaan **Whistleblowing System** dirinci sebagai berikut :

Based on Directors' Decree Number: 02.001.K / 010 / PLNE / III / 2012 and SK Number: 02.003.K / 010 / PLNE / 2012 dated March 2, 2012, PLN Enjiniring has a whistleblowing policy. The basis for preparing a violation reporting system (whistleblowing system) is

1. *PLN Enjiniring's desire to continue to uphold the principles of good corporate governance throughout the PLN Enjiniring environment, especially those relating to integrity and transparency;*
2. *As the company's commitment to provide media for the enforcement of the principles of good corporate governance, so as to create a clean and responsible work situation;*
3. *As one of the powerful tools in preventing and detecting potential violations in PLN Enjiniring*

Purpose, Objectives and Benefits of the Whistleblowing System

The purpose, objectives and benefits of implementing a violation reporting system (Whistleblowing System) at PLN Enjiniring are:

1. *Create a conducive climate and encourage reporting of violations that can cause financial and non-financial losses.*
2. *Reducing losses due to violations through early detection;*
3. *Prepare mechanisms for early detection of possible problems due to a violation.*

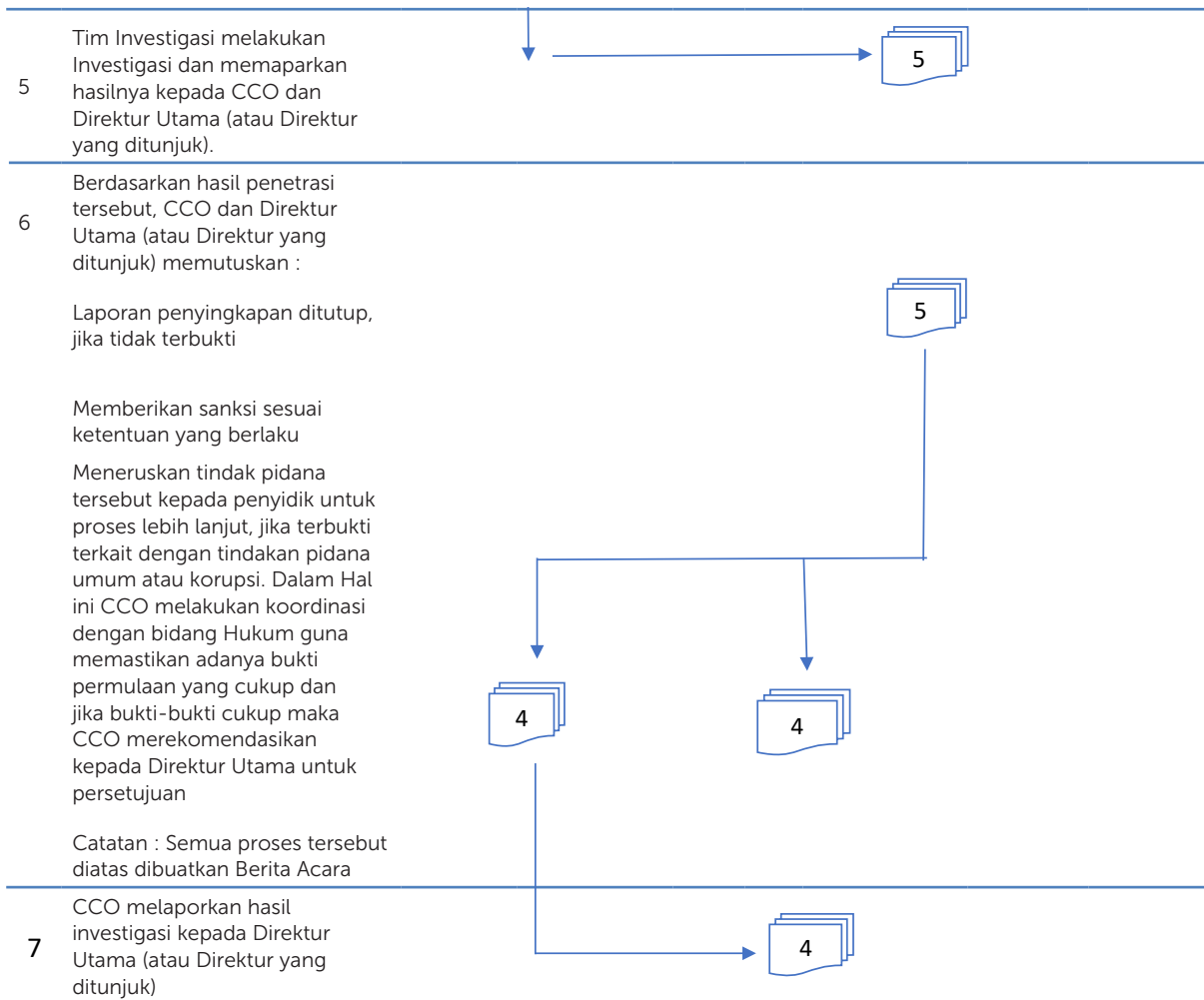
Management (Whistleblowing System)

The management mechanism of the Whistleblowing System can be detailed as follows:

• Tabel Pengelolaan Whistleblowing System

• Whistleblowing System Table

No.	Prosedur <i>Procedur</i>	Pelapor <i>Reporter/ Informan</i>	Pengelolaan WBS		Dewan Komisaris <i>Commissioner Board</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>	Tim Investigasi <i>Investigation Team</i>
			TC	CCO			
1	Membuat pengaduan/penyingkapan dan mengirimkan kepada Pengelola WBS melalui sarana/media sebagai berikut : Telephone : 62-811 1995 177 Email : wbs@plne.co.id Surat : Kepada Direktur Utama	1					
2	Menerima pelaporan/pengaduan/penyingkapan, lalu mencatat dan menuangkan ke dalam format standard yang menghasilkan Laporan penerimaan kontrak sesuai kategori lingkup pengaduan/penyingkapan Laporan Penyingkapan		2				
3	Menyampaikan laporan penyingkapan (disclosure report) melalui email atau media internet yang dapat di akses oleh Tim Compliance/CCO/Dewan Komisaris/Direktur Utama (sesuai dengan kategori terlapor)		3		3		
4	Tim Compliance melakukan penelaahan awal/klarifikasi terhadap pengaduan/penyingkapan tersebut dan membuat resumennya. Kemudian mempresentasikan kepada CCO dan Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama. Berdasarkan hasil presentasi tersebut CCO dan Direktur Utama (atau Direktur yang ditunjuk) memutuskan tindak lanjut : dihentikan, jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal bekerja sama dengan eksternal investigator jika substansi pengaduan/penyingkapan terkait dengan citra/reputasi PT PLN Enjiniring dan/atau menimbulkan kerugian yang besar dan/atau belum pernah ditindaklanjuti oleh SPI. bekerja sama dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan/ atau Sekuriti sesuai dengan substansi pengaduan/penyingkapan dilakukan oleh Tim Compliance atas justifikasi dan penunjukkan dari CCO		4				



Dalam mengelola whistleblowing system, perusahaan menjaga kerahasiaan pelapor pelanggaran sebagai bentuk perlindungan terhadap pelapor.

In managing the whistleblowing system, the company maintains the confidentiality of whistleblowers as a form of protection against whistleblowers.

Perlindungan Bagi Whistleblower

Protection for Whistleblowers

Perusahaan berkewajiban untuk melindungi pelapor. Perlindungan pelapor dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran. Perlindungan pelapor meliputi :

The company is obliged to protect the reporter. Reporting protection is intended to encourage the courage to report violations. Reporter protection includes:

1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan.
2. Jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya.
3. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan.
4. Perusahaan memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor sampe berubah pada status diperiksa

1. *Guarantee the confidentiality of the reporter's identity and contents of the report.*
2. *Security guarantees for reporters and their families.*
3. *Guarantee of protection against adverse treatment.*
4. *The company guarantees the confidentiality of the reported identity until it changes under review status*

Media Whistleblowing System

Penyampaian pelaporan pelanggaran dapat dilakukan melalui berbagai media sebagai berikut

T (62-21) 27510363

F (62-21) 27510362

E corporate.secretary@plne.co.id

Media Whistleblowing System

Submission of violation reporting can be done through various media as follows

T (62-21) 27510363

F (62-21) 27510362

E corporate.secretary@plne.co.id

Pengelola Whistleblowing System

Whistleblowing system merupakan suatu mekanisme pelaporan terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan secara rahasia yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan PLN Enjiniring. Pelaporan ditujukan melalui suatu mekanisme baku dan dikelola secara profesional oleh pengelola whistleblowing system. Pengelola WBS menyampaikan laporan penyingkapan (*disclosure report*) kepada Tim Compliance/CCO/Dewan Komisaris/Direktur Utama (sesuai dengan kategori Terlapor).

Whistleblowing System Manager

Whistleblowing system is a mechanism for reporting violations committed against violations committed in secret committed by employees or leaders of PLN Enjiniring. Reporting is addressed through a standard mechanism and managed professionally by the manager of the whistleblowing system. The WBS manager submits a disclosure report to the Compliance Team / CCO / Board of Commissioners / President Director (in accordance with the Reported categories).

Sosialisasi Whistleblowing System

Sosialisasi WBS dilakukan pada saat forum komunikasi yang dilakukan setiap bulan antara direksi dan karyawan.

Whistleblowing System Socialization

WBS socialization is carried out during a monthly communication forum between the directors and employees.

Laporan Whistleblowing System

Sebanyak tahun 2019, Tidak ada Laporan WBC yang diterima oleh Tim Whistleblowing System.

Whistleblowing System Report

In 2018, there were no WBC reports received by the Whistleblowing System Team

Informasi Pemegang Saham Utama Dan Pengendali

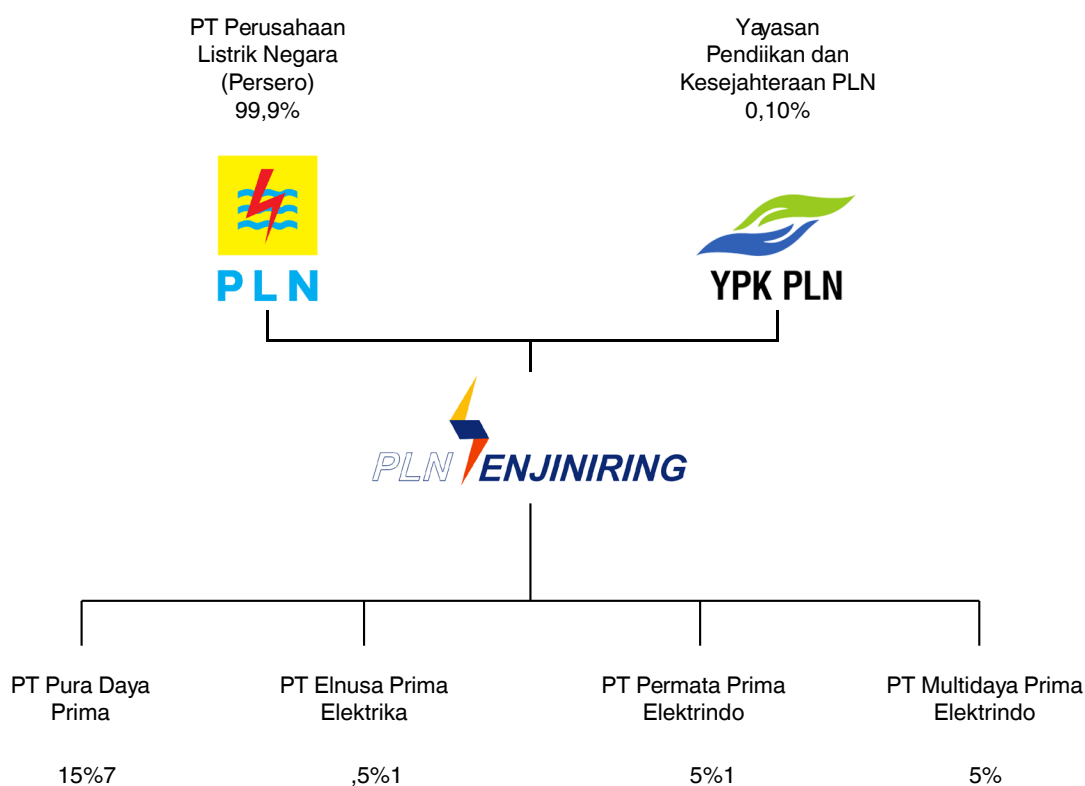
Information on Major and Controlling Shareholders

Saham PLN Enjiniring dimiliki 99.9% oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan 0.10% oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN. Hal ini menjadikan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai pemegang saham utama dan pengendali di PLN Enjiniring.

PLN Enjiniring is owned 99.9% by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) and 0.10% by the PLN Education and Welfare Foundation. This makes PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) a major and controlling shareholder in PLN Enjiniring.

Skema kepemilikan saham PLN Enjiniring sebagai berikut.

The PLN Enjiniring share ownership scheme is as follows.



Akses Informasi Dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data

PLN Enjiniring bertujuan untuk menciptakan persepsi yang baik dan kepuasan public terhadap system informasi perusahaan. Perseroan memiliki kebijakan keterbukaan informasi public berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 17.001.K/010/DIR/PLNE/XI/2010 tentang Pengklasifikasian dan Pengungkapan Informasi. Pelaksanaan keterbukaan informasi public menjadi tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.

Bentuk pelaksanaan kebijakan tersebut adalah dengan memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi perusahaan dengan senantiasa melakukan pembaharuan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi. Selain itu, perusahaan juga terus berupaya memperkuat platform teknologi informasi untuk menjaga dan meningkatkan kehandalan dalam penyediaan informasi secara terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran melalui berbagai media :

- Website : www.plne.co.id;
- Twitter : @Enjiniring;
- Facebook : @PLNEnjiniring;
- Instagram : @pln_enjiniring;
- Dropbox;
- Kotak saran;
- TV Media;
- Mailing list;
- Coffee Morning;
- Ice breaking;
- Sharing Knowledge.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai PLN Enjiniring, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi:

Sekretaris Perusahaan

Menara Enjiniring, Jl. Ciputat Raya No. 123

Kebayoran Lama – Jakarta 12310, Indonesia

T (62-21) 27510363

F (62-21) 27510362

E contact@plne.co.id

PLN Enjiniring aims to create a good perception and public satisfaction with the company's information system. The Company has a public information disclosure policy based on Directors' Decree Number: 17.001.K / 010 / DIR / PLNE / XI / 2010 concerning Classification and Disclosure of Information. The implementation of public information disclosure is the responsibility of the Corporate Secretary.

The form of the implementation of the policy is to make it easy for stakeholders to obtain company information by constantly updating the facilities and infrastructure to support the delivery of information. In addition, the company also continues to strive to strengthen the information technology platform to maintain and improve reliability in providing information in an integrated, timely and targeted manner through various media:

- Website: www.plne.co.id;
- Twitter: @Enjiniring;
- Facebook: @PLNEnjiniring;
- Instagram: @pln_enjiniring;
- Dropbox;
- Suggestion Box;
- TV Media;
- Mailing list;
- Coffee Morning;
- Ice breaking;
- Knowledge Sharing.

To get more information about PLN Enjiniring, the general public and investors can contact:

Corporate Secretary

Menara Enjiniring, Jl. Ciputat Raya No. 123

Kebayoran Lama - Jakarta 12310, Indonesia

T (62-21) 27510363

F (62-21) 27510362

E contact@plne.co.id



TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

COMPANY RESPONSIBILITIES

TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN

Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan merupakan tanggung jawab Perusahaan yang berdampak pada keputusan dan kegiatan Perusahaan terhadap masyarakat dan Lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis.

MAKSUD DAN TUJUAN

Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk menciptakan kesinambungan dalam pembangunan ekonomi dan untuk meningkatkan kualitas hidup yang bermanfaat sehingga mendorong terciptanya keselarasan dan keharmonisan dengan masyarakat terutama disekitar lokasi usaha Perusahaan. Perusahaan menyadari pentingnya Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dalam mendukung keberlanjutan operasional perusahaan dengan visi Perusahaan:

“Menjadi Perusahaan Enjiniring Ketenagalistrikan terkemuka di Asia yang tumbuh berkembang dan memenuhi harapan Stakeholders”

Sebagai perusahaan yang mempunyai visi perusahaan konsultan enjiniring terkemuka di Asia, PLN Enjiniring terus menjalankan komitmennya untuk berkontribusi dalam melaksanakan *corporate social responsibility* (CSR) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa kinerja perusahaan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi saja, akan tetapi juga kinerja sosial maupun lingkungan. Kesadaran ini didasarkan bahwa keberlanjutan perusahaan (*corporate sustainability*) tercermin dalam konsep triple bottom line yaitu *people*, *profit*, dan *planet*.

Maksud dari penyelenggaraan CSR Perusahaan adalah sebagai perwujudan visi dan misi Perusahaan untuk menciptakan kesinambungan dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup yang bermanfaat. Adapun tujuan pelaksanaan CSR adalah sebagai berikut:

SOCIAL & ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITIES

Social & Environmental Responsibilities is a corporate responsibility that impacts the decisions and activities of the Company towards the community and the environment, through transparent and ethical behavior.

PURPOSE AND OBJECTIVES

The Company has a high commitment to create sustainability in economic development and to improve the quality of life that is beneficial so as to encourage harmony and harmony with the community, especially around the Company's business location. The Company realizes the importance of Environmental Social Responsibility in supporting the company's operational sustainability with the Company's vision:

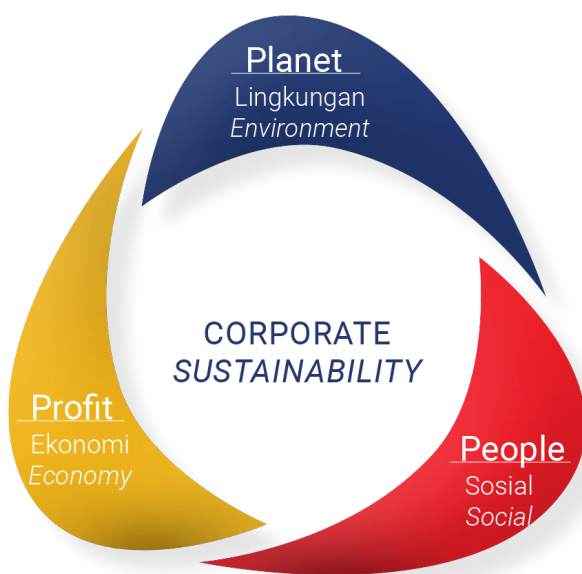
“To become a leading Electricity Engineering Company in Asia that grows and develops and meets the expectations of stakeholders”

As a company that has a vision of a leading engineering consulting company in Asia, PLN Enjiniring continues to carry out its commitment to contribute in carrying out corporate social responsibility (CSR) an inseparable part of the company operational activities. The company realizes that the company performance is not only measured from the economic aspect, but also social and environmental performance. This awareness is based that corporate sustainability is reflected in the triple bottom line concept of people, profit, and planet.

The purpose of organizing the Company CSR is as a manifestation of the Company vision and mission to create sustainability in economic development to improve the quality of life that is beneficial. The objectives of implementing CSR are as follows:

1. Mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dan perbaikan lingkungan di sekitar tempat usaha khususnya di sektor ketenagalistrikan dengan kelompok sasaran program yaitu komunitas lokal / kelompok / Konsumen, karyawan, lingkungan hidup, pemegang saham, kreditor, pemasok/ mitra kerja.
2. Meningkatkan pemahaman publik terhadap perusahaan melalui informasi yang disalurkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sehingga dapat menunjang peningkatan nilai perusahaan melalui pembentukan reputasi yang baik.

1. Encourage the community economic development and environmental improvement around the place of business, especially in the electricity sector with the program target groups namely local communities / groups / Consumers, employees, environment, shareholders, creditors, suppliers / partners.
2. Increase public understanding on the company through information channeled in social activities so that it can support the increase in company value through the establishment of a good reputation.



Bagi PLN Enjiniring, tujuan perusahaan tidak hanya semata-mata memenuhi kepentingan pemegang saham, akan tetapi juga memberikan kontribusi nilai bagi para pemangku kepentingan lainnya yang meliputi, karyawan, pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya. Tujuan tersebut tertanam dalam setiap aktivitas perusahaan termasuk dalam hal ini adalah komitmen PLN Enjiniring dalam melestarikan lingkungan yang tercermin dalam berbagai kebijakan perusahaan.

For PLN Enjiniring, the company objectives not only to fulfill the interests of shareholders, but also to contribute a value to other stakeholders, including employees, customers, suppliers and other parties. These objectives are embedded in every activity of the company including in this case the PLN Enjiniring commitment in preserving the environment which is reflected in various company policies.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

POLICY AND IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY

Dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, PLN Enjiniring menyusun Program CSR yang ditetapkan dalam Rencana dan Anggaran Perusahaan sesuai dengan Pedoman CSR yang ditetapkan dalam Surat Keputusan

In the implementation of Company Social Responsibility, PLN Enjiniring prepares a CSR Program specified in the Company Plans and Budgets in accordance with the CSR Guidelines stipulated in the Decision Letter of the

Direksi Nomor 09.001.K/010/PLNE/VI/2015 tentang Pedoman CSR. Pedoman ini digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan kegiatan agar pelaksanaan kegiatan CSR di lingkungan PLN Enjiniring dapat terselenggara secara efektif dan tepat sasaran serta berkelanjutan.

Prinsip-prinsip keberlanjutan yang digunakan dalam mendukung tercapainya tujuan-tujuan tersebut, PLN Enjiniring mengacu kepada standar ISO 26000 sebagai panduan prinsip keberlanjutan perusahaan. ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitas terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis sehingga pelaksanaan CSR bersifat holistik dan melibatkan berbagai fungsi di perusahaan. Prinsip-Prinsip keberlanjutan antara lain:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas yang membuktikan bahwa organisasi bersangkutan melakukan segala sesuatu dengan benar. Akuntabilitas yang diminta adalah terhadap seluruh pemangku kepentingan, dalam hal dampak Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, termasuk dampak yang tidak disengaja atau tidak diperkirakan, Perusahaan seharusnya menerima dan bahkan mendorong penyelidikan mendalam atas dampak operasionalnya.

2. Transparansi

Perusahaan menyatakan secara transparan seluruh keputusan dan aktivitasnya yang mengakibatkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan dituntut untuk melaksanakan keterbukaan yang jelas, akurat dan lengkap atas seluruh kebijakan, keputusan dan aktivitasnya.

3. Perilaku Etis

Perusahaan harus berperilaku etis sepanjang waktu, dengan menegakkan kejujuran, kesetaraan dan integritas. Penerapan perilaku etis dilaksanakan melalui: (a) pengembangan struktur tata kelola yang mendorong perilaku etis, (b) membuat dan mengaplikasikan perilaku etis baku, dan (c) terus menerus meningkatkan perilaku etis baku tersebut.

Board of Directors Number 09.001.K / 010 / PLNE / VI / 2015 regarding CSR Guidelines. This guideline is used as a guideline in the management of activities so that the implementation of CSR activities within the PLN Enjiniring can be carried out effectively and on target as well as sustainably.

The sustainability principles used in supporting the achievement of these objectives, PLN Enjiniring refers to the ISO 26000 standard as a guiding principle for the company's sustainability. ISO 26000 translates social responsibility as the responsibility of an organization for the impact of decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior so that the implementation of CSR is holistic and involves various functions in the company. Sustainability principles, among others:

1. Accountability

Accountability that proves that the organization is doing everything right. The accountability requested is for all stakeholders, in terms of the Company's impact on society and environment, including accidental or unanticipated impacts, the Company should accept and even encourage in-depth investigation of its operational impacts.

2. Transparency

The company transparently states all its decisions and activities that have an impact on society and environment. Company is required to implement clear, accurate and complete disclosure of all policies, decisions and activities.

3. Ethical Behavior

The company must behave ethically at all times, by upholding honesty, equality and integrity. The application of ethical behavior carried out through: (a) developing governance structures that encourage ethical behavior, (b) creating and applying standardized ethical behavior, and (c) continually increasing the standard ethical behavior

4. Penghormatan kepada pemangku kepentingan Perusahaan
menghormati dan menanggapi kepentingan seluruh Pemangku Kepentingan. Hal-hal yang harus dilakukan adalah: (a) mengidentifikasi Pemangku Kepentingan, (b) menanggapi kebutuhannya, (c) mengenali hak-hak legal dan kepentingan yang sah, serta (d) mengenali kepentingan yang lebih luas terkait dengan pembangunan berkelanjutan.
 5. Kepatuhan terhadap Hukum
Perusahaan menerima bahwa kepatuhan terhadap hukum adalah suatu kewajiban. Hal-hal yang harus dilakukan adalah (a) patuh terhadap semua peraturan, (b) memastikan bahwa seluruh aktivitasnya sesuai dengan kerangka hukum yang relevan, (c) patuh pada seluruh aturan yang dibuatnya sendiri secara adil dan tidak memihak, (d) mengetahui perubahan-perubahan dalam peraturan-perundangan, dan (e) secara berkala memeriksa kepatuhannya.
 6. Penghormatan Terhadap Norma Perilaku International
Di negara-negara di mana hukum nasionalnya atau implementasinya tidak mencukupi untuk melindungi kondisi lingkungan dan sosialnya, Perusahaan harus mengacu kepada norma perilaku internasional.
 7. Penghormatan terhadap HAM
Perusahaan menghormati HAM, serta mengakui betapa pentingnya HAM serta sifatnya yang universal. Hal-hal yang harus dilakukan, apabila ditemukan situasi HAM tidak terlindungi, Perusahaan tersebut harus tetap melindungi HAM, dan tidak mengambil kesempatan dari situasi itu, dan apabila tak ada peraturan perundangan HAM di tingkat nasional, maka Perusahaan harus mengacu pada nilai baku HAM internasional.
4. *Respect for Company stakeholders*
Respect and respond to the interests of all stakeholders. The things to do are: (a) identifying the Stakeholders, (b) responding to their needs, (c) recognizing legal rights and legitimate interests, and (d) recognizing broader interests related to sustainable development.
 5. *Legal Compliance*
The company accepts that compliance with the law is an obligation. The things to do are (a) complying with all regulations, (b) ensuring that all activities are in accordance with the relevant legal framework, (c) adhering to all the rules that he made himself in a fair and impartial manner, (d) knowing changes in laws and regulations, and (e) periodically checking the compliance.
 6. *Respect for Norms of International Behavior*
In countries where national law or its implementation is not sufficient to protect environmental and social conditions, the Company must refer to international norms of behavior.
 7. *Respect for human rights*
The company respects human rights, and recognizes the importance of human rights and their universal nature. The things to do, if the human rights situation is found to be unprotected, the company must continue to protect human rights, and not take advantage of the situation, and if there are no human rights regulations at the national level, the company must refer to the international human rights standard.

UNIT PENGELOLAAN CSR PERUSAHAAN

COMPANY CSR MANAGEMENT UNIT

Dalam pelaksanaan kegiatan CSR di lingkungan PT PLN Enjiniring, Sekretaris Perusahaan berperan sebagai fasilitator dan memberikan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan dokumentasi kegiatan CSR melalui bidang Hukum, Humas dan Hubungan Investor yang berada di bawah Sekretaris Perusahaan.

In carrying out CSR activities within PT PLN Enjiniring, the Corporate Secretary acts as a facilitator and provides planning, implementation and documentation of CSR activities through the Performance and Communication sub-division under the Corporate Secretary.

PENERAPAN CSR SECARA HOLISTIK

Bagi PLN Enjiniring, CSR bukan hanya sekedar membagi donasi dan kegiatan sosial. Penerapan CSR di PLN Enjiniring dikelola secara holistik dalam rangka memenuhi tanggung jawab perusahaan kepada semua pemangku kepentingan. Kegiatan CSR diimplementasikan pada setiap hubungan antara Perusahaan dan para pemangku kepentingan.

HOLISTIC CSR IMPLEMENTATION

For PLN Enjiniring, CSR is not just about sharing donations and social activities. The implementation of CSR in PLN Enjiniring is managed holistically in order to fulfill the company's responsibilities to all stakeholders. CSR activities are implemented in every relationship between the Company and its stakeholders.

KEBIJAKAN

Komitmen PLN Enjiniring untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dituangkan dalam Surat Edaran Direksi yang dilaksanakan melalui berbagai program, baik di lingkungan internal maupun di lingkungan masyarakat. Dampak lingkungan yang timbul akibat operasional perusahaan harus ditekan serendah mungkin dan Perseroan bertanggung jawab atas dampak tersebut.

POLICY

The commitment of PLN Enjiniring to be responsible for the environment is outlined in the Circular Letter of the Board of Directors, which is carried out through various programs, both within the internal environment and in the community. Environmental impacts arising from company operations must be kept as low as possible and the Company is responsible for these impacts.

Perusahaan memberikan kontribusi terhadap pembangunan keberlanjutan dengan mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan dan mengintegrasikan program-program sosial demi menciptakan perusahaan yang lebih peduli kepada lingkungan

The company contributes to sustainable development by considering the expectations of stakeholders and integrating social programs to create a company that is more concerned about the environment.

SASARAN STRATEGIS

PLN Enjiniring berupaya untuk melakukan berbagai program terkait pelestarian lingkungan hidup yang terangkum dalam berbagai program inovatif yang dilakukan sebagai berikut:

STRATEGIC TARGET

PLN Enjiniring strives to carry out various programs related to environmental preservation which are summarized in various innovative programs carried out as follows:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Gerakan hemat energi
Gerakan ini menekankan pada penghematan terhadap listrik dan air di lingkungan kantor pusat, kantor perwakilan dan kantor proyek. 2. Penerapan program paper less
Program ini dilakukan untuk menekan penggunaan kertas dengan memanfaatkan penggunaan teknologi dengan menggunakan aplikasi AMS (Aplikasi Manajemen Surat) dalam kegiatan surat-menyurat, aplikasi DMS (Document Management System) dalam mengarsipkan dan sharing dokumen. 3. Penggunaan produk-produk yang ramah lingkungan
Secara bertahap PLN Enjiniring mengalihkan berbagai produk yang digunakan kepada produk-produk yang ramah lingkungan. Hal ini dimaksudkan untuk terus menjaga kualitas lingkungan menjadi semakin baik. 4. Pembinaan usaha (Koperasi Karyawan)
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan, perusahaan memberikan bantuan bagi koperasi karyawan dalam membangun dan mengembangkan usahanya. 5. Perkuatan Komunitas
Pelaksanaan acara Mudik Bersama untuk karyawan PT PLN Enjiniring dan memberikan Santunan Anak Yatim serta Karyawan Alih Daya yang berada di lingkungan usaha PT PLN Enjiniring. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Energy-saving movements.</i>
<i>This movement emphasizes saving on electricity and water in the head office, representative offices and project offices.</i> 2. <i>Application of the paper less program.</i>
<i>This program is carried out to reduce the use of paper by utilizing the use of technology using the AMS application (Mail Management Application) in correspondence activities, the DMS (Document Management System) application for archiving and sharing documents.</i> 3. <i>Use of environmentally friendly products.</i>
<i>Gradually PLN Enjiniring shifts a variety of products used to environmentally friendly products. This is intended to continue to maintain environmental quality for the better.</i> 4. <i>Business development (Employee Cooperative)</i>
<i>In order to improve employee welfare, the company provides assistance to employee cooperatives in developing and developing their businesses.</i> 5. <i>Community Strengthening</i>
<i>Carrying out a joint homecoming event for PT PLN Enjiniring employees and providing Orphans' Compensation and Outsourcing Employees within PT PLN Enjiniring's business environment.</i> |
|---|--|

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Sebagaimana bidang usaha utama PLN Enjiniring sebagai jasa konsultan enjiniring dalam industri ketenagalistrikan yang tidak memberikan dampak pencemaran terhadap lingkungan, maka tidak terdapat sertifikasi di bidang lingkungan.

AWARDS AND CERTIFICATION

As PLN Enjiniring main business field as engineering consulting services in the electricity industry that does not have an environmental pollution impact, there is no certification in the environmental field.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) RELATED TO LABOR, HEALTH, AND SAFETY

Ketenagakerjaan

Kebijakan

PLN Enjiniring, sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang jasa konsultan enjiniring ketenagalistrikan, memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman arah tujuan perusahaan. Terkait dengan hubungan industrial antara perusahaan dengan tenaga kerja, PLN Enjiniring memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang menjadi landasan hukum tertinggi di perusahaan. PP PLN Enjiniring ditetapkan dalam Keputusan Direksi PLN Enjiniring no. 26.001.K/DIR/PLNE/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta no. 404 tahun 2017. Dalam PP, diatur tentang Sistem Manajemen SDM, Hubungan Kerja, Penghasilan, Pembinaan Pegawai, Disiplin Pegawai, Tata Tertib, Cuti, Perjalanan Dinas, Jaminan Sosial, Penghargaan Pensiun, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Koperasi Pegawai, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Ketentuan Peralihan, dan lain-lain. PP PLN Enjiniring tunduk dan mengacu pada Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kegiatan

Program kerja terkait ketenagakerjaan yang dilaksanakan selama tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

1. Hubungan Kerja Pada PLN Enjiniring, tenaga kerja terbagi menjadi empat macam berdasarkan status hubungannya, yaitu Pegawai organik, Pegawai tugas karya, karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan karyawan outsourcing (OS). Dalam pemenuhan tenaga kerja tersebut, jenis rekrutmen yang dilakukan berbeda satu dengan lainnya. Pegawai organik direkrut melalui sistem dan prosedur rekrutmen

Employment

Policy

PLN Enjiniring, a subsidiary of PT PLN (Persero) which is engaged in electricity engineering consulting services, has a vision and mission that guides the company's goals. Related to industrial relations between companies and workers, PLN Enjiniring has a Company Regulation (PP) which is the highest legal foundation in the company. PP PLN Enjiniring is stipulated in the Decree of the Director of PLN PLN Enjiniring no. 26.001.K / DIR / PLNE / V / 2015 dated May 26, 2015 and authorized by the DKI Jakarta Provincial Manpower and Transmigration Office no. 404 of 2017. In the PP, it is regulated regarding HR Management System, Employment Relations, Income, Employee Development, Employee Discipline, Rules of Conduct, Leave, Official Travel, Social Security, Pension Awards, Religious Holidays Allowances, Employee Cooperatives, Employee Dismissal and Retirement , Settlement of Industrial Relations Disputes, Transitional Provisions, and others. PP PLN Enjiniring is subject to and refers to Law no. 13 of 2003 concerning Employment.

Activity

Employment related work programs carried out during 2017 include the following:

1. *Employment Relations At PLN Enjiniring, labor is divided into four types based on the status of the employment relationship, namely organic employees, Employees of work, Employees of Specific Time Work Agreements (PKWT), and outsourcing employees (OS). In fulfilling the workforce, the types of recruitment that are carried out differ from one another. Organic employees are recruited through recruitment*

berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan formasi tenaga kerja (FJFTK) sesuai dengan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (MSDM-BK). Pegawai tugas karya direkrut berdasarkan kebutuhan FJ-FTK melalui seleksi fit and proper test. Sedangkan karyawan PKWT dan OS direkrut berdasarkan kebutuhan jenis pekerjaan administratif dan project based.

Pada 2019, komposisi karyawan kontrak (PKWT) sebesar 59.72%, pegawai organik sebesar 32.68%, karyawan outsourcing sebesar 6.56%, dan pegawai tugas karya sebesar 1.04%. Besarnya dominasi karyawan kontrak di PLN Enjiniring disebabkan oleh proses bisnis perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan enjiniring dan supervisi konstruksi, sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja ahli sangat tinggi, yang berbasis pada proyek, tetapi masa kerjanya tertentu. Hal ini dilakukan sebagai strategi perusahaan dalam mengefisienkan biaya kepegawaian dengan tidak memelihara tenaga kerja yang digunakan pada masa tertentu saja.

2. Pembinaan Pegawai PLN Enjiniring melakukan pembinaan Pegawai dengan tujuan untuk mendorong profesionalisme Pegawai, memelihara dan mengembangkan motivasi, kemampuan, dan produktivitas, serta memberikan kesempatan pengembangan karir. Macam-macam kegiatan pembinaan Pegawai adalah sebagai berikut:
 - a. Pendidikan dan pelatihan,
 - b. Pembinaan karir,
 - c. Penilaian unjuk kerja,
 - d. Pemberian penghargaan,
 - e. Penegakan peraturan disiplin, dan
 - f. Pemberian sanksi disiplin.

Dalam menjaga kualitas SDM, kesinambungan program pengembangan kompetensi pegawai menjadi komitmen Perusahaan agar dapat mendukung kinerja perusahaan dan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan. PLN Enjiniring telah merencanakan dan merumuskan kebutuhan pelatihan dan sertifikasi bagi Pegawai untuk periode tahun 2019 dalam kegiatan Learning Need Analysis (LNA) secara mandiri mengikuti Prosedur Enjiniring (PE) 6.13.

systems and procedures based on the need for job formation and workforce formation (FJFTK) in accordance with Competency-Based HR Management (HRM-BK). Work assignments are recruited based on FJ-FTK needs through fit and proper test selection. While PKWT and OS employees are recruited based on the needs of the type of administrative and project based work.

In 2019, the composition of contract employees (PKWT) was 59.72%, organic employees were 32.68%, outsourcing employees were 6.56%, and work assignments were 1.04%. The large dominance of contract employees in PLN Enjiniring is caused by the company's business processes that are engaged in engineering consulting services and construction supervision, so that the need for skilled workers is very high, based on the project, but a certain working period. This is done as a corporate strategy in streamlining staffing costs by not maintaining the workforce that is used only at certain times.

2. *Employee Coaching PLN Engineers provide Coaching Employees with the aim to encourage employee professionalism, maintain and develop motivation, ability, and productivity, and provide career development opportunities. The types of employee coaching activities are as follows:*
 - a. *Education and training,*
 - b. *Career Coaching,*
 - c. *Performance evaluation,*
 - d. *Awards,*
 - e. *Enforcement of disciplinary rules, and*
 - f. *Imposing disciplinary sanctions.*

In maintaining the quality of human resources, the sustainability of employee competency development programs is the Company's commitment to be able to support the company's performance and make a positive contribution to the sustainability of the company's business. PLN Enjiniring has planned and formulated the training and certification needs for Employees for the 2018 period in Learning Need Analysis (LNA) activities independently following the Engineering Procedure (PE) 6.13.

Dalam melaksanakan pengembangan SDM, PLN Enjiniring bekerja sama dengan PLN Corporate University dan lembaga pelatihan dalam dan luar negeri. Selama tahun 2019, Perusahaan melaksanakan pengembangan kompetensi karyawan yang terdiri dari 49 Program Pelatihan dengan diikuti oleh 316 orang, serta 27 Program Sertifikasi dengan diikuti oleh 159 orang terdiri dari Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai, dan Karyawan Kontrak/Outsourcing.. Pengembangan kompetensi dilakukan dengan menerapkan menerapkan prinsip persamaan kesempatan bagi semua karyawan.

Pembinaan kompetensi terdiri dari pembinaan level kompetensi dan pembinaan grade. Level kompetensi didasarkan pada bidang keilmuan, pengalaman, dan/atau kemampuan Pegawai dalam mengembangkan kompetensi sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Setiap level kompetensi terdiri dari beberapa grade yang menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi individu pada level kompetensi tertentu. Level kompetensi dan grade melekat pada Pegawai, bukan pada Jabatan.

Pegawai diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk kinerja yang optimal. Sedangkan, Perusahaan wajib memberikan pembinaan dalam hal pengembangan kompetensi dan karir bagi Pegawai, dalam rangka memelihara dan memotivasi Pegawai untuk berkontribusi lebih dalam kinerja individu. Dalam hal ini, PLN Enjiniring telah memiliki ketentuan dalam Keputusan Direksi No. 05.001.K/DIR/PLNE/XII/2014 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir.

Pembinaan karir ditujukan kepada seluruh Pegawai dengan kesempatan yang sama dan dilakukan berdasarkan kompetensi, nilai unjuk kerja, dan dengan memperhatikan apresiasi Pegawai. Pembinaan karir adalah tanggung jawab dari atasan, Pegawai yang bersangkutan, dan pejabat yang menangani SDM. Selain digunakan untuk pembinaan karir, nilai unjuk kerja juga digunakan untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai dalam bentuk insentif kerja. Penghargaan juga diberikan kepada Pegawai sebagai apresiasi Perusahaan dalam bentuk penghargaan kesetiaan kerja dan penghargaan pensiun.

In implementing HR development, PLN Enjiniring works with PLN Corporate University and domestic and foreign training institutions. During 2019, the Company implemented employee competency development consisting of 49 Training Programs with 316 participants, and 27 Certification Programs attended by 159 participants consisting of Members of the Board of Commissioners, Directors, Employees, and Contract / Outsourcing Employees. Competency development is carried out by applying the principle of equality of opportunity for all employees.

Competency coaching consists of fostering competency levels and grade coaching. The competency level is based on the field of science, experience, and / or the ability of employees to develop competencies in accordance with job requirements. Each competency level consists of several grades that indicate the level of mastery of individual competencies at a certain level of competence. The level of competence and grade is inherent in the Employee, not the Position.

Employees are expected to contribute in the form of optimal performance. Meanwhile, the Company is required to provide guidance in terms of competency and career development for employees, in order to maintain and motivate employees to contribute more in individual performance. In this case, PLN Enjiniring has the provisions in Decree of the Board of Directors No. 05.001.K / DIR / PLNE / XII / 2014 concerning Competence and Career Development Systems.

Career guidance is aimed at all Employees with equal opportunities and is based on competence, performance values, and taking into account Employee appreciation. Career coaching is the responsibility of superiors, employees concerned, and officials who handle HR. Besides being used for career coaching, performance values are also used to reward employees in the form of work incentives. Awards are also given to employees as an appreciation of the company in the form of work loyalty awards and retirement awards.

Sementara itu, terkait peraturan dan sanksi disiplin, PLN Enjiniring telah mengaturnya dan ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 30.001.K/010/DIR/PLNE/IX/2013 tentang Penghargaan dan Disiplin Pegawai dan perubahannya No. 27.002.K/DIR/PLNE/I/2016, dan kemudian ditegaskan kembali dalam Keputusan Direksi No. 15.001.K/DIR/PLNE/XII/2016 tentang Peraturan Disiplin Pegawai.

3. Penghargaan yang diberikan oleh PLN Enjiniring terdiri dari dua jenis, yaitu penghargaan ekstrinsik dan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik diberikan kepada Pegawai dalam bentuk kompensasi dan manfaat. Kompensasi terdiri dari
 - a. kompensasi tetap bulanan (Pay for Person – P1),
 - b. tunjangan posisi (Pay for Position – P2), tunjangan prestasi (Pay for Performance – P3), tunjangan hari raya, cuti tahunan, cuti besar, bantuan ganti rugi, dan jaminan sosial pegawai,
 - c. imbal jasa dalam bentuk bonus kinerja.

Manfaat terdiri dari

- a. manfaat umum, antara lain pemeliharaan kesehatan, hak cuti, pakaian dinas, bantuan penggantian fasilitas perumahan, bantuan pinjaman pemilikan rumah, dan program pensiun, serta
- b. manfaat khusus, antara lain bantuan pemilikan kendaraan, alat komunikasi, laptop, dan fasilitas kerja.

Penghargaan intrinsik diberikan kepada Pegawai dalam bentuk

- a. Program pendidikan formal dan sertifikasi profesi, yang diberikan bagi Pegawai yang memenuhi persyaratan kriteria talenta tertentu,
- b. Fasilitas kerja khusus, yang diberikan atas dasar kontribusi dan/atau pencapaian inovasi yang memberikan keuntungan bagi Perusahaan dalam bentuk efisiensi biaya dan/atau peningkatan pendapatan,
- c. Program keseimbangan khusus, yang diberikan atas dasar efisiensi biaya kesehatan pribadi dan keluarga dan/atau pencapaian loyalitas kerja Pegawai,

Meanwhile, related to regulations and disciplinary sanctions, PLN Enjiniring has set it up and stipulated in Decree of the Board of Directors No. 30.001.K / 010 / DIR / PLNE / IX / 2013 concerning Employee Awards and Discipline No. 27.002.K / DIR / PLNE / I / 2016, and then reaffirmed in Decree of the Directors No. 15.001.K / DIR / PLNE / XII / 2016 concerning Employee Discipline Regulation.

3. Awards given by PLN Enjiniring are of two types, namely extrinsic and intrinsic awards. Extrinsic awards are given to employees in the form of compensation and benefits. Compensation consists of
 - a. fixed monthly compensation (Pay for Person - P1),
 - b. position allowances (Pay for Position - P2), achievement benefits (Pay for Performance - P3), holiday benefits, annual leave, large leave, compensation assistance, and employee social security,
 - c. reward in the form of performance bonuses.

Benefits consist of

- a. general benefits, including health care, leave entitlements, official clothing, housing facility replacement assistance, housing loan assistance, and pension plans, as well as
- b. special benefits, including assistance for vehicle ownership, communication equipment, laptops, and work facilities.

Intrinsic awards are given to employees in the form of

- a. Formal education and professional certification programs, which are provided for employees who meet certain talent criteria requirements,
- b. Special work facilities, which are provided on the basis of contributions and / or achievement of innovations that benefit the Company in the form of cost efficiency and / or increased revenue,
- c. Special balance program, which is given on the basis of cost efficiency of personal and family health and / or achievement of employee work loyalty,

- d. Bantuan hukum, yang diberikan dalam bentuk pembelaan atas tuntutan hukum terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan,
- e. Pengakuan, yang diberikan atas dasar penghargaan Direksi.

Selain penghasilan dalam bentuk remunerasi tersebut di atas, PLN Enjiniring juga memberikan bonus sesuai dengan pencapaian kinerja dan kemampuan Perusahaan. Dalam hal PP PLN Enjiniring patuh terhadap ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, maka Perusahaan juga memberikan tunjangan wajib yaitu Tunjangan Hari Raya (THR) dan imbalan kerja lembur.

4. PLN Enjiniring mengatur Program Pensiun Pegawai dalam Keputusan Direksi No. 01.001.K/DIR/PLNE/IX/2017. Usia pensiun untuk seluruh Pegawai PLN Enjiniring adalah 56 tahun. Bagi Pegawai yang telah berusia 55 tahun dapat mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP). Untuk mempersiapkan Pegawai yang memasuki masa MPP tersebut, PLN Enjiniring memberikan pelatihan purna bakti. Diharapkan dengan bekal pelatihan ini, Pegawai dapat mempersiapkan diri di masa pensiun. Sementara itu, bagi Pegawai yang telah memasuki usia purna bakti diberikan kompensasi. Pegawai diikutsertakan dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT), yaitu Kompensasi Jaminan Hari Tua sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dan PSAK 24.
5. PLN Enjiniring senantiasa berkomitmen untuk memelihara hubungan industrial yang baik antara karyawan dengan manajemen serta menghormati hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan organisasi diwujudkan dengan penyaluran aspirasi karyawan yang baik dan sesuai dengan etika. Media komunikasi yang dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi karyawan tersebut berupa coffee morning yang diadakan pada setiap bulan. PLN Enjiniring belum memiliki Serikat Pekerja, namun sampai dengan 31 Desember 2019 hubungan antara karyawan dengan manajemen masih terjaga dengan baik. Tidak pernah terjadi pemogokan kerja, demonstrasi atau gangguan lainnya,

- d. *Legal assistance, which is given in the form of defense of lawsuits related to the implementation of duties and responsibilities of the position,*
- c. *Recognition, which is given on the basis of the Directors' award.*

In addition to income in the form of remuneration, PLN Enjiniring also provides bonuses in accordance with the achievement of the Company's performance and capabilities. In the event that PP PLN Enjiniring is in compliance with the provisions of Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2013 concerning Manpower, the Company also provides mandatory benefits, namely Holidays Allowance (THR) and overtime benefits.

4. *PLN Enjiniring regulates the Employee Pension Program in Directors Decree No. 01.001.K / DIR / PLNE / IX / 2017. The retirement age for all PLN Enjiniring Employees is 56 years. Employees who are 55 years old can take the Retirement Preparation Period (MPP). To prepare for the Employees entering the MPP period, PLN Enjiniring provides after-service training. It is expected that with the provision of this training, employees can prepare themselves in retirement. Meanwhile, employees who have entered retirement age are compensated. Employees are included in the Old Age Insurance Program (JHT), which is Old Age Insurance Compensation in accordance with applicable Labor Law and PSAK 24.*
5. *PLN Enjiniring is always committed to maintaining good industrial relations between employees and management and respecting employees' rights and obligations in accordance with applicable laws and regulations. Organizational freedom is realized by channeling the aspirations of good employees and in accordance with ethics. Communication media that can be used to channel employee aspirations in the form of a coffee morning is held every month. PLN Enjiniring does not yet have a Workers Union, but as of 31 December 2019 the relationship between employees and management was well maintained. There were never any strikes, demonstrations or other disturbances, which stopped the PLN Enjiniring operational activities*

yang menghentikan kegiatan operasional PLN Enjiniring maupun gugatan terkait peradilan hubungan industrial. Hal ini dikarenakan adanya pemahaman dan saling pengertian yang baik antara manajemen PLN Enjiniring dengan karyawan sebagai mitra yang saling mendukung satu sama lain.

PLN Enjiniring memiliki komitmen untuk menciptakan kondisi yang sehat dan serasi sekaligus terciptanya ketenangan kerja sesuai dengan azas hubungan industrial. PLN Enjiniring telah memiliki Peraturan Perusahaan yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 26.001.K/DIR/PLNE/V/2015 dimana mengatur tentang sistem manajemen SDM, hubungan kerja, penghasilan, pembinaan pegawai, disiplin pegawai, tata tertib, cuti, perjalanan dinas, jaminan sosial, penghargaan pensiun, tunjangan hari raya keagamaan, koperasi pegawai, pemberhentian pegawai, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan ketentuan peralihan dan lain-lain.

or lawsuits related to industrial relations justice. This is due to a good understanding and mutual understanding between PLN Enjiniring management and employees as partners who support each other.

PLN Enjiniring has a commitment to create healthy and harmonious conditions while at the same time creating work peace in accordance with the principles of industrial relations. PLN Enjiniring already has a Company Regulation stipulated in Directors Decree No. 26.001.K / DIR / PLNE / V / 2015 which regulates the HR management system, work relations, income, employee training, employee discipline, discipline, leave, official travel, social security, pension awards, religious holiday allowances, employee cooperatives, dismissal of employees, settlement of industrial relations disputes, and transitional provisions and others.

Kesehatan

• Kebijakan

Fasilitas pemeliharaan kesehatan adalah bagian dari penghargaan ekstrinsik yang masuk dalam kategori manfaat umum. PLN Enjiniring memberikan bantuan pemeliharaan kesehatan kepada Pegawai dan keluarganya diatur dalam Keputusan Direksi No. 05.002.K/DIR/PLNE/2015 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai dan Keluarga yang **Ditanggung** PLN Enjiniring. Bentuk pemeliharaan kesehatan yang ditanggung Perusahaan terdiri dari:

- a. Rawat jalan,
- b. Rawat inap,
- c. Pemeriksaan penunjang atas rekomendasi dokter untuk peneguhan diagnosa di laboratorium,
- d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan sampai dengan anak ketiga,
- e. Gugur kandung,
- f. Perawatan di Unit Gawat Darurat (UGD),
- g. Program Keluarga Berencana (KB), imunisasi dan vaksinasi, khitan, pengobatan infertilitasi dan program bayi tabung,

Health

• Policy

Health care facilities are part of extrinsic awards that fall into the general benefit category. PLN Enjiniring to provide health care assistance to employees and their families is regulated in Directors Decree No. 05.002.K / DIR / PLNE / 2015 concerning the Implementation of Health Care for Employees and Families Covered by PT PLN Enjiniring. Forms of health care borne by the Company consist of:

- a. Outpatient treatment,
- b. Inpatient treatment,
- c. Supporting examination of doctor's recommendation for diagnosis in laboratory,
- d. Examination of pregnancy and childbirth assistance up to the third child,
- e. Natural birth,
- f. Care in the Emergency Unit (ER),
- g. Family Planning (KB) program, immunization and vaccination, circumcision, infertilization treatment and IVF program,
- h. Dental care,

- h. Perawatan gigi,
- i. Alat-alat rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi alat tubuh,
- j. Alat-alat cangkok/transplantasi,
- k. Alat-alat kesehatan terkait jantung,
- l. Obat untuk penyembuhan sesuai dengan formularium obat dan Daftar Obat Perusahaan (DOP),
- m. Tindakan bedah plastik khusus akibat kecelakaan kerja,
- n. Terapi kejiwaan,

- i. rehabilitation tools to restore the functioning of body parts,*
- j. Graft / transplant equipment,*
- k. Heart related medical devices,*
- l. Medicines for healing in accordance with the formulary of the drug and List of Medicines Company (DOP),*
- m. Special plastic surgery procedures due to work accidents,*
- n. Psychiatric therapy,*

Pelaksanaan pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan PLN Enjiniring adalah sebagai berikut:

The implementation of health maintenance carried out by PLN Enjiniring is as follows:

1. Perusahaan dapat melanggan sarana kesehatan milik pemerintah atau swasta, berupa rumah sakit, klinik, poliklinik, puskesmas, dokter umum, dokter spesialis, psikolog, psikiater, apotek, laboratorium, dan tempat pemeriksaan penunjang lainnya,
2. Dalam hal sarana rawat inap, level Manajemen Atas/Fungsional I dan Manajemen Menengah/Fungsional II mendapat fasilitas rawat inap kelas VIP, level Manajemen Dasar/Fungsional III mendapat fasilitas rawat inap kelas I, dan level Supervisor Atas hingga Fungsional IV mendapat fasilitas rawat inap kelas II,
3. Perusahaan melakukan upaya pencegahan gangguan kesehatan dengan cara:
 - a. Penyediaan sarana olahraga dan fasilitas olahraga lainnya;
 - b. Penyampaian informasi kesehatan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, ataupun seminar;
 - c. Pemeriksaan kesehatan tiap satu tahun sekali bagi Pegawai berusia di atas 40 tahun dan Pegawai yang bertugas di tempat berpotensi mengakibatkan penyakit.
4. Memfasilitasi kegiatan di bidang kesehatan dan olahraga,
5. Penyediaan sarana untuk ibu menyusui dan penitipan anak sampai dengan usia tiga tahun.

- 1. Companies can subscribe to government or private health facilities, in the form of hospitals, clinics, polyclinics, health centers, general practitioners, specialist doctors, psychologists, psychiatrists, pharmacies, laboratories, and other supporting examinations,*
- 2. In terms of inpatient facilities, the level of Upper / Functional Management I and Middle / Functional Management II receive VIP-class inpatient facilities, the level of Basic / Functional Management III receives in-class inpatient facilities, and the level of Supervisors to Functional IV levels receive in-patient facilities in class II,*
- 3. The company makes efforts to prevent health problems by:*
 - a. Provision of sports facilities and other sports facilities;*
 - b. Submission of health information in the form of counseling, outreach, or seminars;*
 - c. Health check up once a year for employees over the age of 40 years and employees who work on the spot can potentially cause illness.*
- 4. Facilitating activities in the health and sports fields,*
- 5. Provision of facilities for nursing mothers and child care up to the age of three years.*

Keselamatan Kerja

• Kebijakan

PLN Enjiniring berkomitmen untuk senantiasa menjaga keselamatan kerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 26.001.K/DIR/ PLNE/V/2015 dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta no. 404 tahun 2017. Sejak tahun 2016, sesuai dengan Risalah RUPS tanggal 19 Januari 2016, Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH) menjadi salah satu indikator kinerja PLN Enjiniring yang tertuang dalam Kontrak Manajemen/ Key Performance Indicator (KPI) tahun 2017 dalam perspektif kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Masyarakat. Oleh karena itu, PLN Enjiniring membentuk Tim Setup Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 27.001.K/DIR/PLNE/ VI/2016 dan dilanjutkan dengan membentuk Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 04.002.K/DIR/PLNE/II/2017, Tim Pengawas K3 yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 22.001.K/DIR/PLNE/II/2017, dan Tim Tanggap Darurat yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 10.001.K/DIR/PLNE/I/2017.

• Kegiatan

Dalam mendukung komitmen untuk menyelenggarakan program-program terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja, PLN Enjiniring memberikan pembekalan bagi tim dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi. Beberapa judul pelatihan dan sertifikasi yang telah terlaksana di tahun 2019 sebagai berikut:

• Tabel Pelaksanaan Sertifikasi Tahun 2019

No.	Waktu Pelaksanaan	Jenis/Judul Pelatihan	Penyelenggara	Jumlah Peserta
No.	Execution Time	Type / Title of Training	Organizer	Number of Participants*
1	September	K2 and K3 InstalationTT/TET	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
Total Number of Training Participants				2

Selain program pelatihan dan sertifikasi, kegiatan terkait Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH) di PLN Enjiniring adalah sebagai berikut:

Work Safety

• Policy

PLN Enjiniring is committed to always maintaining work safety as stated in the Company Regulation (PP) stipulated in Decree of the Directors No. 26.001.K / DIR / PLNE / V / 2015 and approved by the DKI Jakarta Provincial Manpower and Transmigration Office no. 404 in 2017. Since 2016, in accordance with the GMS Minutes of January 19, 2016, Health, Safety and the Environment (K3LH) has become one of the PLN Engineer performance indicators contained in the Management Contract / Key Performance Indicator (KPI) of 2017 in leadership perspective, Governance, and Community Responsibility. Therefore, the PLN Enjiniring formed a Work Team Management System Occupational Health and Safety which is set in the Decree of the Directors No. 27.001.K / DIR / PLNE / VI / 2016 and continued by forming the Committee for Guidance for Occupational Health and Safety (P2K3) stipulated in Decree of the Directors No. 04.002.K / DIR / PLNE / I / 2017, OHS Oversight Team stipulated in Directors Decree No. 22.001.K / DIR / PLNE / II / 2017, and the Emergency Response Team determined in Directors' Decree No. 10.001.K / DIR / PLNE / I / 2017.

• Activity

In support of commitments to carry out programs related to Occupational Health and Safety, PLN Enjiniring provides debriefing to the team in the form of training and certification. Some of the titles of training and certification that have been carried out in 2018 are as follows:

• Certification Implementation Table 2019

In addition to training and certification programs, activities related to Health, Safety and Environment (K3LH) at PLN Enjiniring are as follows:

1. Menyusun dokumen pedoman K3,
 2. Melakukan inspeksi APAR dan kotak P3K,
 3. Pengadaan rambu-rambu K3 di dalam maupun di halaman kantor PLN Enjiniring,
 4. Pemeriksaan lingkungan kantor, yaitu suhu, cahaya, debu, kebisingan,
 5. Penerbitan SLO listrik, proteksi kebakaran, dan penyalur petir,
 6. Membuat laporan kecelakaan kerja dan monitoring SMK3 untuk PT PLN (Persero) Pusat,
 7. Membuat laporan P2K3 untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per Triwulan,
1. *Arrange K3 guidance document,*
 2. *Conduct inspection of APAR and first aid kit,*
 3. *Procurement of K3 signs in and on the PLN Enjiniring office yard,*
 4. *Inspection of the office environment, namely temperature, light, dust, noise,*
 5. *Electric SLO issuance, fire protection and lightning suppliers,*
 6. *Making work accident reports and SMK3 monitoring for PT PLN (Persero) Pusat,*
 7. *Make a P2K3 report for the Department of Manpower and Transmigration per Quarter*

Corporate Social Responsibility Terkait Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan

Corporate Social Responsibility Regarding Social and Community Development

Kebijakan

Sebagai bagian dari warga korporasi yang baik (*Good Corporate Citizenship*), PLN Enjiniring menyadari bahwa hubungan dengan masyarakat merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang sangat menguntungkan bagi PLN Enjiniring. Kebijakan yang dimiliki PLN Enjiniring dituangkan dalam bentuk komitmen untuk membangun kesejahteraan bersama melalui berbagai upaya yang dapat dilakukan.

Policy

As part of good corporate citizenship (Good Corporate Citizenship), PLN Enjiniring realizes that the relationship with the community is a form of mutualism symbiosis that is very beneficial for PLN Enjiniring. Policies owned by PLN Enjiniring shall be stated in the form of a commitment to build mutual prosperity through various efforts.

Kegiatan

Selama tahun 2019 PLN Enjiniring telah melaksanakan berbagai program *Corporate Social Responsibility* terkait sosial kemasyarakatan yang meliputi 2 (dua) kegiatan dengan total dengan rincian sebagai berikut:

Activities

During 2019 PLN Enjiniring has carried out various Corporate Social Responsibility programs related to social society which include 2 (two) activities in total with the following details:

- **Kegiatan CSR Tahun 2019**

No.	Kegiatan Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity	Lokasi Location	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Biaya Cost (Rp)	Mobilisasi/ Pelaksanaan Mobilization/ Implementation
1	Pembuatan PAUD Desa Karendan Tahap II Organizing PAUD Karendan Village Phase II	Community Relations	Karendan Village - Site CNG Plant Bangkanai	September 2019	50,000,000	50,000,000
2	Kegiatan Bantuan Hewan Qurban 1440 H	Community Relations	Lokasi Proyek Muara Tawar	Agustus 2019	25,000,000	25,000,000

Sehingga total biaya CSR tahun 2019 adalah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan program CSR yang mendapat persetujuan untuk direalisasikan adalah seluruh kegiatan.

Untuk pelaksanaan program CSR di Bangkanai, Tim Sub-Bidang Komunikasi dan Kinerja telah melakukan social mapping terhadap 7 isu penting yang timbul di wilayah kerja PLN Enjiniring dan bobot tertinggi adalah pembangunan PAUD di Desa Karendan.

So that the total cost of CSR in 2019 in amount of Rp. 75,000,000 (seventy five three million rupiah) and CSR programs that have been approved for realization are all activities.

For the implementation of CSR programs in Bangkanai, the Communication and Performance Sub-Sector Team has conducted a social mapping of 7 important issues arising in the PLN Enjiniring work area and the highest weight is the development of PAUD (Early Childhood Education) in Karendan Village.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO RESPONSIBILITY TO CONSUMERS

Kebijakan

PLN Enjiniring senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan. Perbaikan kualitas layanan dan kinerja PLN Enjiniring terus ditingkatkan dan berbagai upaya dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan baik pelanggan internal (PLN Group) maupun eksternal.

Kegiatan

PLN Enjiniring senantiasa menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan serta membangun hubungan dengan pelanggan. Salah satu pemenuhan kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan cara mendengarkan suara pelanggan, baik pelanggan saat ini maupun pelanggan potensial. Sedangkan untuk membangun hubungan dengan pelanggan dilakukan dengan pengelolaan hubungan pelanggan dan pengelolaan aspirasi dan keluhan pelanggan.

Untuk memenuhi Kepuasan Pelanggan PLN Enjiniring dilakukan dengan cara mendengarkan, berinteraksi dan mengamati perilaku pelanggan guna memperoleh informasi atas produk dan layanan yang diberikan PLN Enjiniring kepada pelanggan internal (PLN Group) melalui rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) dan afiliasinya maupun yang diinisiasikan sendiri oleh PLN Enjiniring.

Pendekatan yang dilakukan PLN Enjiniring untuk menindaklanjuti suara pelanggan dan memperoleh informasi serta umpan balik pelanggan adalah sebagai berikut:

- Rapat koordinasi mingguan dan bulanan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi/masukan serta umpan balik pelanggan pada setiap tahapan pekerjaan;
- Media komunikasi (Telepon, SMS, email dan website) untuk menampung aspirasi dan keluhan pelanggan;

Policy

PLN Enjiniring is always committed to providing the best services for all customers. Improved service quality and performance of PLN Enjiniring continues to be improved and various efforts are made to determine the level of customer satisfaction both internal (PLN Group) and external customers.

Activities

PLN Enjiniring continues to maintain and improve customer satisfaction and build relationships with customers. One of the fulfillment of customer satisfaction conducted by listening to the voice of customers, both current and potential customers. Whereas to build relationships with customers conducted by managing customer relationships and managing customer aspirations and complaints.

To meet PLN Enjiniring Customer Satisfaction carried out by listening, interacting and observing customer behavior in order to obtain information on products and services provided by PLN Enjiniring to internal customers (PLN Group) through coordination meetings organized by PT PLN (Persero) and its affiliates as well as which initiated by PLN Enjiniring.

The approach taken by PLN Enjiniring to follow up the customer voice and obtain customer information and feedback is as follows:

- *Weekly and monthly coordination meetings conducted to obtain information / input and customer feedback at each stage of the work;*
- *Communication media (telephone, SMS, e-mail and website) to accommodate customer aspirations and complaints;*

- Survey Kepuasan, Loyalitas dan Keterikatan Pelanggan yang dilakukan setiap tahun oleh Bidang Pengembangan Usaha dan Perencanaan Korporat untuk memperoleh informasi mengenai persepsi pelanggan terhadap kinerja, kualitas layanan dan produk PLN Enjiniring;
- In-depth interview yang dilakukan kepada pelanggan potensial;
- Pendekatan secara personal; dan
- Customer Day

PLN Enjiniring menindaklanjuti aspirasi, keluhan dan umpan balik pelanggan untuk memperbaiki kinerja, mutu produk, dan kualitas layanan yang dilakukan PLN Enjiniring dengan cara:

- Mengoptimalkan fungsi kerja tim proyek untuk berkoordinasi dengan pelanggan dan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan bulanan/sesuai permintaan pelanggan;
- Melakukan kunjungan lapangan untuk mendengarkan suara pelanggan, sehingga tim proyek dapat merespon langsung keluhan pelanggan.

Terkait dengan pelanggan potensial, suara pelanggan diperoleh melalui rapat formal, diskusi informal, survey, pameran, Customer Day dan media elektronik (Telepon, SMS, email dan website).

- *A Customer Satisfaction, Loyalty and Customer Engagement survey is carried out annually by the Business Development and Corporate Planning Division to obtain information on customer perceptions regarding the performance, quality of services and products of PLN Enjiniring;*
- - *In-depth interviews conducted with potential customers;*
- - *personal approach; and*
- - *Customer Day*

PLN Enjiniring follows up on the aspirations, complaints and feedback of customers to improve performance, product quality, and service quality conducted by PLN Enjiniring by:

- *Optimize the work functions of the project team to coordinate with customers and submit monthly progress reports / according to customer requests;*
- *Conduct field trips to listen to customer voices, so that the project team can respond directly to customer complaints.*

Regarding potential customers, the customer voice is obtained through formal meetings, informal discussions, surveys, exhibitions, Customer Day and electronic media (telephone, SMS, email and website).

Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Negara

Corporate Social Responsibility Regarding Responsibility to the Country

Kebijakan

PLN Enjiniring berkomitmen untuk senantiasa mendukung pembangunan negara dengan berkontribusi sesuai dengan bidang kerja dan usaha yang dijalankan. Tanggung jawab terhadap Negara diwujudkan dalam hal mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak dan dukungan terhadap program-program yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Kegiatan

Dukung Program 35.000 MW, Menerangi Nusantara. Terkait program 35.000 MW yang ditugaskan Pemerintah kepada PLN dalam menerangi Nusantara, PLN Enjiniring memiliki kontribusi penting dalam mewujudkannya. Hal ini tampak jelas dari penugasan PLN kepada PLN Enjiniring untuk "mengawal" beberapa tugas strategis berkenaan dengan konsultasi pengerjaan berbagai proyek strategis. PLN Enjiniring bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta, yang merupakan mitra kerja PLN, untuk penggunaan jasa enjinir dari PLN Enjiniring.

Program utama dalam penyelesaian proyek terkait program 35.000 MW

- a. Pembangkit dan Konstruksi
 1. Pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC PLTU Parit Baru
 2. Konstruksi dan QA/QC PLTU Pangkalan Susu
 3. Pekerjaan Jasa Konsultasi untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC PLTU Takalar.
 4. Supervisi Desain Enjiniring PLTA Jati Gede 2x55 MW, serta Penugasan Design Review, Supervisi Konstruksi dan QA/QC Proyek PLTGU Peaker Grati Extension.

Policy

PLN Enjiniring is committed to always supporting the country development by contributing in accordance with the field of work and business conducted. Responsibility towards the State is realized by complying with the applicable laws and regulations, compliance with the obligation to pay taxes and support for the programs planned by the Government.

Activities

Support the 35,000 MW Program, Illuminate Archipelago. Regarding the 35,000 MW program assigned by the Government to PLN in lighting up the archipelago, PLN Enjiniring has an important contribution to make it happen. This is evident from PLN assignment to PLN Enjiniring to "oversee" several strategic tasks regarding consultations on the execution of various strategic projects. PLN Enjiniring works with several private companies, which are PLN partners, for the use of engineering services from PLN Enjiniring.

The main program in project completion is related to the 35,000 MW program:

- a. *Plant and Construction*
 1. *Consultation Services Work for Construction Supervision and QA / QC of PLTU Parit Baru*
 2. *Construction and QA / QC of PLTU Pangkalan Susu*
 3. *Consultation Services Work for Construction Supervision and QA / QC of PLTU Takalar.*
 4. *Engineering Design Supervision of PLTA Jati Gede 2x55 MW, Design Review Assignment, Construction Supervision and QA / QC of and Design Design Assignment, Construction Supervision and QA / QC of PLTGU Peaker Grati Extension Project.*

5. Pekerjaan Enjiniring dan Supervisi Konstruksi Upper Cisokan Pumped Storage.
6. Pendampingan Lelang untuk Gardu Induk maupun Transmisi
7. Set Up dan Sertifikasi Manajemen Aset
8. Master Plan untuk Sistem Kelistrikan Sumatera juga Pekerjaan Supervisi QA/QC.

PLN Enjiniring sebagai Perusahaan senantiasa memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Perusahaan menyadari bahwa kontribusi pajak yang dibayarkan dapat mendukung dan membantu pemerintah dalam berbagai program pembangunan negeri. Selama 5 (lima) tahun terakhir Perusahaan telah memberikan kontribusi pajak sebesar Rp 29.651 Milyar

Adapun rincian kontribusi pajak selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

- **Rincian Kontribusi Pajak Selama 5 Tahun**

Tahun Year	Jumlah (Rp Juta) Amount (IDR Million)
2019	7.392
2018	5.056
2017	10.021
2016	1.102
2015	6.08
Total	29.651

Selama 5 (lima) tahun terakhir, PLN Enjiniring belum pernah mendapatkan teguran ataupun sanksi terkait dengan pemenuhan pembayaran pajak.

5. *Engineering and Construction Supervision Works of Upper Cisokan Pumped Storage.*
6. *Auction assistance for substations and transmissions*
7. *Set Up and Asset Management Certification*
8. *Master Plan for Sumatra Electrical System as well as QA / QC Supervision Work.*

PLN Enjiniring as a company always fulfills tax payment obligations. The company is aware that the tax contribution paid can support and assist the government in various country development programs. Over the past 5 (five) years the Company has provided tax contributions amounted to Rp 24,494 billion

The details of tax contributions for the past 5 (five) years are as follows.

Over the past 5 (five) years, PLN Enjiniring has never received a reprimand or sanction related to fulfilling tax payments.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPADA KREDITUR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATING RESPONSIBILITIES TO CREDITORS

Kebijakan

Dalam Pedoman Perilaku yang telah ditetapkan oleh PLN Enjiniring diatur tentang Hubungan dengan Investor termasuk dalam hal ini adalah kreditur perusahaan. Dalam hubungan dengan Investor ditetapkan kebijakan sebagai berikut.

1. Memilih investor yang terpercaya, kredibel dan bertanggung jawab.
2. Membuat perjanjian kerja yang saling menguntungkan.
3. Menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi.
4. Menyediakan informasi yang aktual, akurat dan prospektif.
5. Menjaga kepercayaan investor.

Pelaksanaan

PLN Enjiniring senantiasa berupaya untuk menerapkan aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Perilaku maupun aturan internal lainnya. Beberapa hal yang menunjukkan bahwa Perusahaan telah memenuhi apa yang telah ditetapkan bisa terlihat dalam hal-hal berikut ini.

1. Perusahaan tidak pernah melakukan restrukturisasi utang selama 5 (lima) tahun terakhir.
2. Perusahaan memiliki kemampuan membayar utang yang baik. Meskipun dilihat dari sisi Rasio likuiditas, tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Rasio likuiditas 2019 mengalami penurunan dibandingkan 2018, diukur dengan menggunakan Rasio Lancar. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar utang PLN Enjiniring di 2019 meningkat. Rasio likuiditas masih menunjukkan kondisi yang bagus yaitu dengan nilai 2.19.

Policy

In the Code of Conduct established by PLN Enjiniring, the Relationship with Investors is regulated, including in this case the company creditors. In relation to Investors, the following policies are determined:

1. Choose a trusted, credible and responsible investor.
2. Make a mutually beneficial work agreement.
3. Establish honest and effective communication while maintaining the confidentiality of data and information.
4. Provide actual, accurate and prospective information.
5. Maintain investor confidence.

Implementation

PLN Enjiniring continues to strive to implement the rules set out in the Code of Conduct and other internal rules. Some things that show that the Company has fulfilled what has been set can be seen in the following matters.

1. The company has not carried out debt restructuring for the past 5 (five) years.
2. The company has the ability to pay good debt. Although seen in terms of liquidity ratio, in 2019 has decreased compared to in 2018. The liquidity ratio 2019 has decreased compared to 2018, both measured using Current Ratios. This shows that the ability to pay PLN Enjiniring debt in 2019 is increased. Liquidity ratio still shows good conditions, which is 2.19 poin.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPADA PEMASOK

Corporate Social Responsibility Regarding Responsibilities To Suppliers

Kebijakan

Dalam Pedoman Perilaku yang telah ditetapkan oleh PLN Enjiniring diatur tentang Hubungan dengan Mitra Kerja/Pemasok. Dalam hubungan dengan Mitra Kerja/Pemasok ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Menjaga dan mengutamakan kepentingan Perusahaan.
2. Menilai secara obyektif, transparan dan akuntabel.
3. Membuat perjanjian kerja yang saling menguntungkan.
4. Menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi.
5. Memberikan sanksi apabila tidak memenuhi kontrak kerja.

Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa telah mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan.

PLN Enjiniring akan senantiasa melakukan evaluasi berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan. Untuk hal-hal yang pemenuhannya masih belum optimal akan segera ditindak lanjuti dengan upaya-upaya perbaikan sehingga tanggung jawab Perusahaan kepada Pemasok dapat terpenuhi dengan baik dan selanjutnya akan memberikan dampak positif terhadap kinerja Perusahaan secara berkelanjutan.

Policy

In the Code of Conduct established by PLN Enjiniring, the Relationship with Work Partners / Suppliers is regulated. In relation to the Work Partners / Suppliers the following policies are determined:

1. *Maintain and prioritize the interests of the Company.*
2. *Assess objectively, transparently and accountably.*
3. *Make a mutually beneficial work agreement.*
4. *Establish honest and effective communication while maintaining the confidentiality of data and information.*
5. *Impose sanctions for not meeting the work contract.*

Activities

The implementation of goods and services procurement activities has complied with what has been determined by the Company.

PLN Enjiniring will always conduct an evaluation based on the results of a survey that has been conducted. For matters which the fulfillment is still not optimal, then shall be immediately followed up with improvement efforts so that the Company responsibilities to Suppliers can be fulfilled properly and subsequently will have a positive impact on the Company performance in a sustainable manner.



**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018**

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018***

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

Daftar Isi	Halaman/ Pages	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018		<i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2019 and 2018</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	5	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY
ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019 AND 2018**

Kami yang bertandatangan dibawah ini/ *We, the undersigned:*

- | | |
|---|--|
| 1. Nama/ <i>Name</i>
Alamat kantor/ <i>Office address</i> | : Hernadi Buhron
: Jl. Ciputat Raya No. 123, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12310 |
| Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
<i>Domicile as stated in ID Card</i> | : Jl. Tubagus Ismai V No. 1A, Bandung - 40134 |
| Nomor telepon/ <i>Phone number</i> | : 08121223237 |
| Jabatan/ <i>Position</i> | : PLT Direktur Utama/
<i>President Director (Acting)</i> |
| 2. Nama/ <i>Name</i>
Alamat kantor/ <i>Office address</i> | : Alfi Zamzami
: Jl. Ciputat Raya No. 123, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12310 |
| Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
<i>Domicile as stated in ID Card</i> | : Perum. Taman Galaxy, Jl. Taman Soka III/N 4No. 24
Jaka Setia, Bekasi - 17147 |
| Nomor telepon/ <i>Phone number</i> | : 085920641692 |
| Jabatan/ <i>Position</i> | : Direktur Keuangan/
<i>Finance Director</i> |

menyatakan bahwa:

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian; | <i>state that:</i>
1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements;</i> |
| 2. Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. <i>All information contained in the Consolidated Financial statements is complete and correct;</i> |
| b. Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The Consolidated Financial Statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan dan entitas anak. | 4. <i>We are responsible for the internal control system of the Company and subsidiary.</i> |


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The statement letter is made truthfully.

Jakarta, 31 Maret/March 31, 2020


HERNADI BUHRON
PLT Direktur Utama/
President Director (Acting)




ALFI ZAMZAMI
Direktur Keuangan/
Finance Director

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00370/2.1030/AU.1/03/0645-1/1/III/2020

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("the Company") and its subsidiary, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2019, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Prima Layanan Nasional Enjiniring dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian pada Catatan 31a atas laporan keuangan konsolidasian yang menjelaskan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis dan operasi PT Prima Layanan Nasional Enjiniring dan entitas anaknya serta asesmen manajemen bahwa Perusahaan dan entitas anak belum dapat secara akurat memprediksi dan mengkuantifikasi seberapa lama atau sejauh mana wabah Covid-19 tersebut berdampak terhadap hasil operasi, posisi keuangan, dan arus kas Perusahaan dan entitas anak. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring and its subsidiary as of December 31, 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matter

We draw attention to Note 31a to the consolidated financial statements which describes impact of the Covid-19 pandemic on the business and operations PT Prima Layanan Nasional Enjiniring and its subsidiary and the management assessment that the Company and subsidiary are yet to accurately predict and quantify how long or how far the Covid-19 pandemic will affect the operating results, financial position, and cash flows of the Company and subsidiary. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Dedy Sukrisnadi

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0645/
Public Accountant License Number: AP.0645

Jakarta, 31 Maret / March 31, 2020

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018*) Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	6	226,822	319,314	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	7	23,128	25,026	Restricted cash in bank
Piutang usaha	8			Trade receivables
Pihak berelasi		203,939	169,480	Related parties
Pihak ketiga		609	2,031	Third parties
Piutang lain-lain		27,632	20,075	Other receivables
Tagihan bruto kepada pelanggan	9			Gross receivables from customers
Pihak berelasi		216,980	201,642	Related parties
Pihak ketiga		15,086	6,146	Third parties
Pajak dibayar di muka	22	91,354	78,111	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka	10	51,994	65,613	Prepaid expenses and advances
Jumlah Aset Lancar		857,544	887,438	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	12	13,426	26,908	Investments in associate and joint venture
Aset tetap	13	296,821	309,307	Property and equipment
Aset tidak lancar lain	11	17,040	21,841	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		327,287	358,056	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET		1,184,831	1,245,494	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	14	134,096	116,175	Trade payables
Uang muka dari pelanggan	15	35,393	64,133	Advances from customer
Utang lain-lain		5,472	41,243	Other payables
Utang bruto kepada pelanggan	16			Gross payables to customers
Pihak berelasi		112,157	144,199	Related parties
Pihak ketiga		1,986	831	Third parties
Utang pajak	22	14,264	14,354	Taxes payable
Biaya masih harus dibayar		54,623	51,864	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	17	32,978	32,978	Current maturity of long-term loan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		390,969	465,777	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	17	87,062	119,074	Long-term loan - net of current maturity
Liabilitas imbalan kerja	23	18,760	14,831	Employee benefits liabilities
Utang lain-lain		156	156	Other payables
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		105,978	134,061	Total Non-current Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham				Capital stock - par value of Rp1,000 (full amount) per share
Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh- 25.000.000 saham	18	25,000	25,000	Authorized, subscribed and paid-up - 25,000,000 shares
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya		5,169	5,169	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya		663,318	620,413	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain		(5,616)	(4,937)	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		687,871	645,645	Equity attributable to owner of the Company
Kepentingan non-pengendali		13	11	Non-controlling Interests
Jumlah Ekuitas		687,884	645,656	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1,184,831	1,245,494	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*Direklasifikasi, Catatan 30

*Recclassified, Note 30

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	
PENDAPATAN	19	1,000,489	1,117,269	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	20	<u>(731,924)</u>	<u>(812,914)</u>	COST OF SERVICES
LABA BRUTO		268,565	304,355	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	21	<u>(136,740)</u>	<u>(129,098)</u>	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA		<u>131,825</u>	<u>175,257</u>	OPERATING INCOME
Penghasilan bunga		13,955	11,361	Finance income
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih		394	(356)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Rugi investasi pada asosiasi dan ventura bersama	12	(13,482)	(5,145)	Loss on investments in associate and joint venture
Beban bunga	17	(15,644)	(19,231)	Interest expense
Lain-lain - bersih		<u>15,291</u>	<u>7,254</u>	Others - net
LABA SEBELUM PAJAK		<u>132,339</u>	<u>169,140</u>	INCOME BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	22	<u>(7,392)</u>	<u>(5,056)</u>	INCOME TAX EXPENSES
LABA TAHUN BERJALAN		<u>124,947</u>	<u>164,084</u>	INCOME FOR THE YEAR
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan				Other comprehensive income for the year
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali imbalan kerja karyawan	23	<u>(679)</u>	<u>(1,509)</u>	Items that will not be subsequently reclassified to profit or loss: Remeasurement of employment benefit
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>124,268</u>	<u>162,575</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk		124,945	164,081	Income for the year attributable to: Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali		<u>2</u>	<u>3</u>	Non-controlling interest
JUMLAH		<u>124,947</u>	<u>164,084</u>	TOTAL
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk		124,266	162,572	Total comprehensive income for the year attributable to: Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali		<u>2</u>	<u>3</u>	Non-controlling interest
JUMLAH		<u>124,268</u>	<u>162,575</u>	TOTAL

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Subscribed and paid-up capital stock</i> Rp	Saldo laba/ <i>Retained earnings</i>		Penghasilan komprehensif lain/ <i>Other comprehensive income</i>	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk/ <i>Equity attributable to owner of the parent</i> Rp	Kepentingan non-pengendali/ <i>Non-controlling Interests</i> Rp	Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i> Rp	
		Ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i> Rp	Tidak ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i> Rp	Pengukuran kembali imbangan Kerja Karyawan/ <i>Remeasurement of employment benefit</i> Rp				
Saldo per 1 Januari 2018	25,000	5,169	508,791	(3,428)	535,532	3	535,535	<i>Balance as of January 1, 2018</i>
Penyertaan saham kepentingan non-pengendali	--	--	--	--	--	5	5	<i>Additional shares in non-controlling interest</i>
Dividen	--	--	(52,459)	--	(52,459)	--	(52,459)	<i>Dividends</i>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	--	--	164,081	(1,509)	162,572	3	162,575	<i>Total comprehensive income for the year</i>
Saldo per 31 Desember 2018	25,000	5,169	620,413	(4,937)	645,645	11	645,656	<i>Balance as of December 31, 2018</i>
Dividen	--	--	(82,040)	--	(82,040)	--	(82,040)	<i>Dividends</i>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	--	--	124,945	(679)	124,266	2	124,268	<i>Total comprehensive income for the year</i>
Saldo per 31 Desember 2019	25,000	5,169	663,318	(5,616)	687,871	13	687,884	<i>Balance as of December 31, 2019</i>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Laba sebelum pajak	132,339	169,140	Income before tax
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba sebelum pajak:			Adjustments to reconcile profit before tax:
Rugi investasi pada ventura bersama	13,482	5,145	Loss on investments in joint venture
Beban Imbalan kerja	3,435	3,760	Employee benefits expense
Penyisihan untuk penurunan nilai piutang usaha	79	151	Allowances for impairment of trade receivables
Penyusutan aset tetap	16,267	12,261	Depreciation of fixed asset
Beban bunga	15,644	19,231	Interest expense
Pendapatan bunga	(13,955)	(11,361)	Finance income
Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja	167,291	198,327	Operating cash flows before changes in working capital
Perubahan modal kerja:			Changes in working capital:
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	1,898	(25,026)	Restricted cash in bank
Piutang usaha	(33,116)	(135,977)	Trade receivable
Piutang lain-lain	(7,557)	(16,290)	Other receivable
Tagihan bruto kepada pelanggan	(24,278)	(19,217)	Gross receivables from customers
Pajak dibayar di muka	(13,243)	(50,470)	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka	13,619	(41,674)	Prepaid expenses and advances
Aset tidak lancar lain	4,801	581	Other non current assets
Utang usaha	17,921	66,437	Trade payable
Uang muka dari pelanggan	(28,740)	29,450	Advances from customers
Utang lain-lain	(35,771)	30,230	Other payable
Utang bruto kepada pelanggan	(30,887)	(14,776)	Gross payables to customers
Utang pajak	3,215	5,071	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	2,759	21,667	Accrued expenses
Utang lain-lain jangka panjang	--	(67)	Other long-term payables
Kas diperoleh dari operasi	37,912	48,266	Cash provided from operations
Penerimaan restitusi pajak	--	37,208	Cash receipt from tax restitution
Penerimaan bunga	13,955	11,361	Interest received
Pembayaran imbalan kerja	(185)	(1,481)	Payments of employee benefits
Pembayaran pajak penghasilan	(10,697)	(10,574)	Payments of income tax
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	40,985	84,780	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Penempatan investasi oleh kepentingan non-pengendali	--	5	Additional investment from non-controlling interest
Perolehan aset tetap	(3,781)	(4,516)	Addition of property and equipment
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(3,781)	(4,511)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran bunga	(15,644)	(19,231)	Payments for interest expenses
Pembayaran Dividen	(82,040)	(52,459)	Dividends payment
Pembayaran atas pinjaman jangka panjang	(32,012)	(32,012)	Payments for long-term loan
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(129,696)	(103,702)	Net cash used in financing activities
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(92,492)	(23,433)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	319,314	342,747	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	226,822	319,314	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Tambahan informasi transaksi non kas disajikan
di Catatan 25

Additional information of non cash transaction
presented in Note 25

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements as a whole

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (Perusahaan) didirikan di Jakarta berdasarkan akta notaris No. 9 tanggal 3 Oktober 2002 dari Haryanto S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No.C-00184.HT.01.01TH.2003 tanggal 6 Januari 2003 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 19, Tambahan No. 1891 tanggal 7 Maret 2003.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan akta No. 22 tanggal 12 Desember 2012 dari Lenny Janis Ishak S.H., notaris di Jakarta mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Direksi. Perubahan ini telah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No.AHU-05116.AH.01.02 tanggal 8 Februari 2013.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat berkedudukan di Jalan Ciputat Raya No.123, Jakarta. Perusahaan merupakan entitas anak Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN"). Kegiatan komersial Perusahaan dimulai pada tanggal 1 Januari 2003.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi usaha enjiniring, pengadaan dan konstruksi, operasi, pemeliharaan pada bidang ketenagalistrikan dan non-ketenagalistrikan sebagai berikut:

- a. Jasa konsultasi enjiniring dan atau manajemen proyek termasuk integrator proyek ketenagalistrikan;
- b. Studi sistem kelistrikan
- c. Studi analisa mengenai dampak lingkungan ("AMDAL");
- d. Informasi teknologi;
- e. Pendidikan dan pelatihan;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Penyediaan tenaga listrik;

1. General

a. Establishment and General Information

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (the Company) was established in Jakarta based on the notarial deed No. 9 dated October 3, 2002 from Haryanto S.H., a notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights in Decision Letter No.C-00184.HT.01.01TH.2003 dated January 6, 2003 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 19, Supplement No. 1891 dated March 7, 2003.

Articles of Association of the Company have been amended several times regarding the powers and responsibility of the Directors by deed No. 22 dated December 12, 2012 by Lenny Ishak Janis S.H., notary in Jakarta. This change was registered in the Department of Justice and Human Rights Republic of Indonesia by Letter No. AHU-05116.AH.01.02 dated February 8, 2013.

The Company is domiciled in Jakarta. The headquarter is located in Jalan Ciputat Raya No.123, Jakarta. The Company is a subsidiary of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN"). The commercial activity of the Company started on January 1, 2003.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities involve engineering, procurement and construction, operation, maintenance of the electricity and non-electricity sector, which are as follows:

- a. Engineering consultancy services and/ or project management including project integrator electricity;*
- b. Study of electrical system;*
- c. Study of environmental impact analysis ("EIA");*
- d. Information technology;*
- e. Education and training;*
- f. Research and development;*
- g. Electricity supply;*

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- h. Perencanaan, pengadaan, pembangunan dan atau pemasangan (jasa konstruksi) bidang pembangkitan, transmisi dan atau distribusi;
- i. Pemeliharaan dan atau pengoperasian bidang pembangkitan, transmisi dan atau distribusi;
- j. Pengolahan, penimbunan, transportasi, niaga, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi minyak dan/ atau gas bumi; dan
- k. Penyediaan atau manufaktur berbagai peralatan elektrik untuk transmisi dan elektrik untuk transmisi dan distribusi listrik.

- h. Planning, procurement and construction or installation (construction services) of the generation, transmission or distribution;
- i. Maintenance and or operation of the generation, transmission or distribution;
- j. Processing, stockpiling, transportation, trade, installation operation and maintenance of oil and/ or gas; and
- k. Provision or manufacturing of various electrical equipment for electrical transmission and also for transmission and distribution of electricity.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah karyawan Perusahaan masing-masing 940 (tidak diaudit) dan 1.179 (tidak diaudit).

As of December 31, 2019 and 2018, the Company had a total number of employees of 940 (unaudited) and 1,179 (unaudited), respectively.

- b. Susunan Pengurus dan Informasi Lain**
Susunan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- b. Management and Other Information**
The composition of the Company's Board of Commissioners are as follows:

	<u>2019 dan/and 2018</u>	
Presiden Komisaris	Tumpal Manaris Simarmata	<i>President Commissioner</i>
Komisaris	Djoko Prasetyo Julius Bobo Marzuqi	<i>Commissioners</i>

Susunan Direksi adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Board of Directors are as follows:

	<u>2019 dan/and 2018</u>	
Pelaksana Tugas Direktur Utama	Hernadi Buhron	<i>Acting as President Director</i>
Direktur	Alfi Zamzami Yanuar Hakim Ultrisza Mednawarman	<i>Directors</i>

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee are as follows:

	<u>2019 dan/and 2018</u>	
Ketua	Julius Bobo	<i>Chairman</i>
Sekretaris	Raslan	<i>Secretary</i>
Anggota	Anita Mardalina Djoko Juwanto Marzuqi	<i>Members</i>

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (“PSAK”) Baru dan Revisi, serta
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
(“ISAK”)**

**2. New and Revised Statements of Financial
Accounting Standard (“SFAS”) and
Interpretation of Financial Accounting
Standards (“ISFAS”)**

**a. PSAK Baru dan Revisi, serta ISAK yang
berlaku efektif untuk tahun buku yang
dimulai pada atau setelah tanggal
1 Januari 2019**

Pengesahan amandemen dan penyesuaian atas PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”), berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, adalah sebagai berikut:

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018): Kombinasi Bisnis;
- PSAK 24 (Amandemen 2018): Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program;
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018): Biaya Pinjaman;
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018): Pajak Penghasilan;
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018): Pengaturan Bersama;
- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka;
- ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

**b. PSAK Baru dan Revisi, serta ISAK yang
berlaku efektif untuk tahun buku yang
dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan
setelahnya**

Interpretasi standar berikut ini efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;

**a. New and Revised SFAS and ISFAS
effective for the year beginning on or
after January 1, 2019**

Ratification of amendments and improvements of SFAS and ISFAS issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accounting (“DSAK-IAI”), effective for the year beginning on or after January 1, 2019, are as follows:

- SFAS 22 (Improvement 2018): Business Combination;
- SFAS 24 (Amendment 2018): Employee Benefit regarding Plan Amendment, Curtailment or Settlement;
- SFAS 26 (Improvement 2018): Borrowing Cost;
- SFAS 46 (Improvement 2018): Income Taxes;
- SFAS 66 (Improvement 2018): Joint Arrangement.
- ISFAS 33: Foreign Currency Transactions and Advance Consideration;
- ISFAS 34: Uncertainty over Income Tax Treatments.

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial years.

**b. New and Revised SFAS and ISFAS
effective for the year beginning on
January 1, 2020 onwards**

The following interpretation to standard will be effective for year beginning on or after January 1, 2020, with early application is permitted:

- SFAS 15 (Amendment): Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures;

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- PSAK 62 (Amandemen): Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 71: Instrumen Keuangan;
- PSAK 71 (Amandemen): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa;
- ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan;
- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba;
- PSAK 1 (Amendemen 2019): Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan;
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan;
- PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba;
- PSAK 25 (Amendemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan;
- PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah;
- ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan;
- ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah.

Standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: Akuntansi Wakaf;
- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi atas standar serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- *SFAS 62 (Amendment): Insurance Contract - Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts;*
- *SFAS 71: Financial Instruments;*
- *SFAS 71 (Amendment): Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation;*
- *SFAS 72: Revenue from Contracts with Customers;*
- *SFAS 73: Lease;*
- *ISFAS 34: Uncertainty over Income Tax Treatments;*
- *SFAS 35: Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements;*
- *SFAS 1 (Amendment 2019): Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements;*
- *SFAS 1 (Improvement 2019): Presentation of Financial Statements;*
- *RSFAS 13: Revocation of SFAS 45: Nonprofit Entity Financial Reporting;*
- *SFAS 25 (Amendment 2019): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors;*
- *SFAS 102 (Revised 2019): Accounting for Murabahah;*
- *ISFAS 101: Revenue Recognition on Deferred Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership;*
- *ISFAS 102: Impairment on Murabahah Receivable.*

Standard effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early application is permitted are:

- *SFAS 112: Wakaf Accounting;*
- *SFAS 22 (Amendment 2019): Business Combinations regarding Definition of Business.*

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the Company and its subsidiary are still evaluating the potential impact of these new standards, amendments, and interpretations of standards to the Company and its subsidiary consolidated financial statements.

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Penting

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”)

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang meliputi PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh DSAK-IAI.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (“Rp”), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas bertujuan khusus) yang dikendalikan oleh Perusahaan atau entitas anak. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Hasil entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama periode berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan lainnya komprehensif konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dan sampai dengan tanggal efektif penjualan.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan.

3. Significant Accounting Policies

a. Compliance with the Financial Accounting Standards (“FAS”)

The financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include SFAS and ISFAS issued by the DSAK – IAI.

b. Basis of Preparation

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (“Rp”), which is also the functional currency of the Company and subsidiary. The measurement basis is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the indirect method with classifications of cash flows into operating investing and financing activities.

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and subsidiary (including special purpose entities) controlled by the Company or subsidiary. Control is achieved when the Company is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

The results of subsidiary acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income from the effective date of acquisition or up to the effective date of disposal, as appropriate.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of the subsidiary to bring the accounting policies used in line with those used by the Company.

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan dan entitas anak pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Perusahaan dan entitas anak dan kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik Perusahaan.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Perusahaan:

- (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
- (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima, jika ada, dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- (e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- (f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada pemilik Perusahaan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

All intra-group transactions, balances, income and expenses are eliminated on consolidation.

Changes in the Company and subsidiary interests in subsidiary that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amount of the Company and subsidiary interest and the non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Company.

If the Company loses control over the subsidiary, the Company:

- (a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control ceases;*
- (b) Derecognizes the carrying amounts of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control ceases (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- (c) Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstance that resulted in the cessation of control;*
- (d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at its fair value at the date when control ceases;*
- (e) Reclassifies to profit or loss, or directly transfer to retained earnings if required by other FAS, the amounts recognized in other comprehensive income in relation to the former subsidiary;*
- (f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the owners of the Company.*

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

d. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak, liabilitas yang diakui oleh Perusahaan dan entitas anak kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Kepentingan non-pengendali yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan mereka hak atas bagian proposional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dilakukan atas dasar transaksi. Kepentingan non-pengendali jenis lain diukur pada nilai wajar atau, jika berlaku, pada dasar pengukuran lain yang ditentukan oleh standar akuntansi lain.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis. Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran

d. Business Combinations

Business combination is a transaction or other events in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Company and subsidiary, liabilities incurred by the Company and subsidiary to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Company and subsidiary in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Non-controlling interests that are present ownership interests and entitles their holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation may be initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement basis is made on a transaction-by-transaction basis. Other types of non-controlling interests are measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in another accounting standard.

When the consideration transferred by the Company and subsidiary in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Perubahan selanjutnya dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjen tersebut diklasifikasikan. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal sesudah tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali setelah tanggal pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan, dengan diakui keuntungan atau kerugian terkait dalam laba rugi atau dalam penghasilan komprehensif lain.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Perusahaan dan entitas anak atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui di dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai ketika kepemilikannya dilepas/dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Perusahaan dan entitas anak melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. A contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to the reporting dates in accordance with the relevant accounting standards, as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognized in profit or loss or in other comprehensive income.

When a business combination is achieved in stages, the Company and subsidiary previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate when those interests were disposed of.

If the initial accounting for a business combination is incompleting by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Company and subsidiary report provisional amounts for the items for which the accounting is incompleting. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan dan entitas anak, diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali selisih kurs mata uang asing yang dikapitalisasi sebagai biaya pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kurs konversi yang digunakan Perusahaan dan entitas anak sebagai berikut:

	2019	2018	
	Kurs tengah/ Middle rate Rp*)	Kurs tengah/ Middle rate Rp*)	
Mata uang			Currency
US\$	13,901	14,481	US\$
CNY	1,991	2,110	CNY

*) dalam jumlah penuh/ in full amount

f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk,

e. Foreign Currency Transaction and Balances

The accounts of the Company and subsidiary, are maintained in Indonesian Rupiah, the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). Transactions during the period involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss, except those foreign exchange differences which are capitalized as borrowing costs.

On December 31, 2019 and 2018, the conversion rates used by the Company and subsidiary are as follows:

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company and subsidiary (the reporting entity):

- a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent,

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- | | |
|---|---|
| <p>entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);</p> <p>ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);</p> <p>iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;</p> <p>iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;</p> <p>v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;</p> <p>vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau</p> <p>vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);</p> <p>viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari ke lompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas palapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.</p> | <p><i>subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);</i></p> <p><i>ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);</i></p> <p><i>iii. Both entities are joint ventures of the same third party;</i></p> <p><i>iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;</i></p> <p><i>v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;</i></p> <p><i>vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);or</i></p> <p><i>vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity);</i></p> <p><i>viii. Entities, or members of the Company to which the entity is part of the Company, providing services to the entity's key management personnel or to the parent entity of the reporting entity.</i></p> |
|---|---|

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh

Government related entity can be an entity which is controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance being

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

g. Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan yang tersedia untuk dijual

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the Ministry of State Owned Enterprise as shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

g. Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

All financial assets are recognized and derecognized on the trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market concerned and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as a fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

Subsequent Measurement of Financial Assets

The Company and subsidiary financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, and available-for-sale.

i. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

- ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif, kecuali:
- (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
 - (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
 - (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- iii. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual ("AFS")
AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan pada FVTPL.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

- ii. Loans and Receivables
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:
- (a) those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;
 - (b) those that upon initial recognition designated as available for sale; or
 - (c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.

- iii. Available-for-Sale Financial Assets ("AFS")
AFS financial assets are non-derivative financial assets that are either designated as AFS or are not classified as loans and receivables, held to maturity investments or financial assets at FVTPL.

On subsequent measurement, the AFS are carried at fair value, with gains or losses recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gain and losses, until they are derecognized. At that time, the cumulative gain or losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang tidak tercatat di pasar aktif dengan menggunakan teknik penilaian berdasarkan asumsi yang wajar. Dalam keadaan tertentu dimana kisaran estimasi nilai wajar yang realistis cukup signifikan dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara wajar, maka Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen AFS tersebut pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan dan entitas anak untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa yang

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

to profit or loss as reclassification adjustment.

The Company measures the fair value of non-listed equity instruments by applying valuation techniques based on reasonable assumptions. In the limited case where the range of reasonable fair value measurements is significantly wide and the probabilities of the various estimates cannot be reasonably assessed, the Company records such AFS instruments at cost less impairment.

Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Company and subsidiary rights to receive the dividends are established.

Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and other forms paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments.

Impairment of Financial Assets

Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and the estimated future

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan;
- terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan dan entitas anak atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

**Penghentian Pengakuan Aset
Keuangan**

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

cash flows of the investment have been affected.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- *significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or*
- *default or delinquency in interest or principal payments; or*
- *it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organization;*
- *observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company and subsidiary past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

Derecognition of Financial Assets

The Company and subsidiary derecognize a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company and subsidiary neither transfer nor retain

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

entitas lain. Jika Perusahaan dan entitas anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan dan entitas anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan dan entitas anak masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan dan entitas anak mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Company and subsidiary recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Company and subsidiary retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company and subsidiary continue to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the assets carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the Company and subsidiary retain an option to repurchase part of a transferred asset), the Company and subsidiary allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing involvement and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Reklasifikasi

Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi instrumen derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan dan entitas anak sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan dan entitas anak dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan dan entitas anak sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar

Reclassification

The Company and subsidiary shall not reclassify a derivative instrument out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Company and subsidiary as at fair value through profit or loss. The Company and subsidiary may reclassify the financial asset out of the fair value through profit or loss category if it is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Company and subsidiary shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities is estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*
- (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);*
- (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company and subsidiary use market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Perusahaan dan entitas anak pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi Sebagai Liabilitas atau Ekuitas
Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan pada awalnya diakui sebesar pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dan entitas anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

liability is not directly observable, the Company and subsidiary use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Company and subsidiary at the end of the reporting period during which the change occurred.

h. Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as Liabilities or Equity
Financial liabilities and equity instruments issued by the Company and subsidiary are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company and subsidiary after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded as the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial Liabilities

Financial liabilities are initially recognized at fair value, net of transaction costs and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective interest rate.

Derecognition of Financial Liabilities

The Company and subsidiary derecognize financial liabilities, when and only when the Company and subsidiary obligations are discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the considerations paid and payable is recognized in profit or loss.

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

i. Saling Hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

j. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

k. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Aset tetap - Pemilikan Langsung

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan aset tetap meliputi: (a) harga pembelian, (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisinya sekarang, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan dan restorasi lokasi aset (jika ada). Setiap bagian dari aset tetap dengan biaya perolehan yang signifikan terhadap total biaya perolehan aset, disusutkan secara terpisah.

Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Perusahaan dan entitas anak dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, ketika aset telah mencapai akhir umur manfaatnya.

i. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company and subsidiary only offset financial assets and liabilities and present the net amount in the statement of financial position where they:

- currently have a legal enforceable right to set off the recognized amount; and
- intend either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

j. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement that are not used as collateral or unrestricted.

k. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortised over their beneficial periods using the straight-line method.

l. Property and Equipment - Direct Acquisitions

Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost of property and equipment includes: (a) purchase price, (b) any costs directly attributable to bringing the asset to its present location and condition, and (c) the initial estimate of the cost of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located (if any). Each part of an item of property and equipment with a cost that is significant in relation to the total cost of the item is depreciated separately.

The residual value of an asset is the estimated amount that the Company and subsidiary would currently obtain from disposal of the asset, after deducting the estimated costs of disposal, if the asset is already of the age and in the condition expected at the end of its useful life.

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Depreciation is recognized using the straight-line method based on their estimated economic useful lives as follows:

	<u>2019 dan/and 2018</u> (Tahun/Years)	
Perlengkapan umum	5	<i>General equipment</i>
Instalasi dan mesin	40	<i>Installation and machinery</i>

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year-end, and the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap diakui sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The costs of maintenance and repairments are charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property and equipment, are recognized as assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

When property and equipment are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts. Any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

Tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Land rights are recognized at cost and not depreciated.

Biaya hukum awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah dan biaya-biaya tersebut tidak didepresiasi. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognized as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated. Costs related to the renewal of land rights are recognized as intangible assets and amortised over the contractual life of the land rights.

m. Pekerjaan dalam Pelaksanaan

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Pekerjaan dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk

m. Construction in Progress

Construction in progress represents costs directly related to the construction of property and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction, depreciation of property and equipment

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pembangunan, beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan dan biaya pengujian ketika aset dapat berfungsi. Pekerjaan dalam pelaksanaan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat siap digunakan.

n. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

Biaya pinjaman dikapitalisasi yang berasal dari rugi selisih kurs dibatasi sedemikian rupa sehingga jumlah dikapitalisasi tidak melebihi jumlah biaya pinjaman yang mungkin terjadi jika pinjaman tersebut dilakukan dengan menggunakan mata uang fungsional pada periode tersebut

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

that were used in the construction and cost of testing whether the asset is functioning properly. Construction in progress is transferred to the respective property and equipment account ready for use.

n. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, to be added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expensed on the qualifying assets. The capitalization rate is the weighted average of the total borrowings cost applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

Borrowing costs are capitalized from foreign exchange losses to an extent by which the capitalized amount does not exceed the amount of borrowing costs which may have been incurred had the loan been denominated in the functional currency.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**o. Investasi pada Entitas Asosiasi dan
Ventura Bersama**

Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Perusahaan dan entitas anak memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Di dalam investasi Perusahaan dan entitas anak atas entitas asosiasi termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai PSAK 58 (Revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Perusahaan dan entitas anak atas laba rugi atas entitas asosiasi setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian perusahaan atas penghasilan komprehensif lainnya setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi. Bagian Perusahaan dan entitas anak atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, merupakan bagian dari Perusahaan dan nilai investasi bersih entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Perusahaan dan entitas anak telah mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas kewajiban entitas asosiasi.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar bagian Perusahaan dan entitas anak dalam entitas asosiasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi

**o. Investment in Associates and Joint
Ventures**

Investments in Associates

Associate are all entities over which the Company and subsidiary has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investment in associates is accounted for using the equity method of accounting. Under the equity method, the investment is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or the loss of the investee after the date of acquisition. The Company and subsidiary investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with SFAS 58 (Revised 2009), Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. In applying the equity method of accounting, the Company and subsidiary share of its associate's post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in other comprehensive income. These post-acquisition movements and distributions received from an associate are adjusted against the carrying amounts of the investment. Losses of the associates in excess of the Company and subsidiary interests in those associates (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Company and subsidiary net investment in the associate) are recognized only to the extent that the Company and subsidiary have incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Unrealized gains on transactions between the Company and subsidiary with associates are eliminated to the extent of the Company and subsidiary interests in the associate. Unrealized losses are also eliminated unless the transaction provides

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan dan entitas anak menentukan apakah ada bukti objektif bahwa terdapat indikasi penurunan nilai untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi Perusahaan dan entitas anak. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2014), Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Perusahaan dan entitas anak menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- (a) jika investasi menjadi entitas anak;
- (b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Perusahaan dan entitas anak mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar;
- (c) ketika Perusahaan dan entitas anak menghentikan penggunaan metode ekuitas, Perusahaan dan entitas anak mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

evidence of impairment of the assets transferred. The accounting policies of the associates have been changed when necessary to ensure consistency with the accounting policy adopted by the Company and subsidiary.

The Company and subsidiary determine at each reporting date whether there is any objective evidence that impairment indicators exist to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Company and subsidiary investment in an associate. If impairment indicators exist, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with SFAS 48 (Revised 2014), Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with SFAS 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

The Company and its subsidiary discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- (a) if the investment becomes a subsidiary;*
- (b) If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Company and its subsidiaries measure the retained interest at fair value;*
- (c) When the Company and its subsidiary discontinue the use of the equity method, the Company and its subsidiary account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.*

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ketika Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian dieliminasi sebesar kepentingan mereka dalam entitas asosiasi.

Bagian partisipasi dalam ventura bersama
Menurut PSAK 66 (Revisi 2015), pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor. Perusahaan dan entitas anak telah menilai sifat dari pengaturan bersama dan menentukan pengaturan tersebut sebagai ventura bersama.

Hasil operasi, aset dan liabilitas dari ventura bersama disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas. Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian perusahaan dan entitas anak atas laba rugi atas ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian perusahaan atas pendapatan komprehensif lainnya setelah tanggal perolehan diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya. Perubahan dan penerimaan distribusi dari ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Perusahaan dan entitas anak atas rugi ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

Penyesuaian dibentuk terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk mengeliminasi bagian Perusahaan dan entitas anak atas keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dan ventura bersama. Ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sampai dengan tanggal dimana Perusahaan dan entitas anak kehilangan pengaturan bersama atas entitas yang diatur bersama.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

When the Company and subsidiary transact with an associate, profits and losses are eliminated to the extent of their interest in the relevant associate.

Interest in joint ventures
Under SFAS 66 (Revised 2015), investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor. The Company and subsidiary have assessed the nature of its joint arrangements and determined them to be joint ventures.

The result of operations and assets and liabilities of a joint venture are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method. In applying the equity method of accounting, the company and subsidiary share of its joint venture's post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in other comprehensive income. These post-acquisition movements and distributions received from a joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

When the Company and subsidiary share of the losses of a joint venture equals or exceeds its interest in the joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the company does not recognize further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the joint venture.

Adjustments are made in the consolidated financial statements to eliminate the Company and subsidiary share of unrealized gains and losses on transactions between the Company and subsidiary and the joint ventures. The joint ventures are carried at equity method until the date on which the Company and subsidiary cease to have joint arrangements over the joint ventures.

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan dan entitas anak.

Accounting policies of the joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Company and subsidiary.

Perusahaan dan entitas anak mengukur dan mengakui sisa investasi pada nilai wajar setelah hilangnya pengendalian dan ventura bersama tidak menjadi entitas anak atau entitas asosiasi. Selisih antara nilai tercatat atas hilangnya ventura bersama dengan agregat nilai wajar sisa investasi dan hasil pelepasan diakui pada laba rugi. Ketika sisa investasi mempunyai pengaruh yang signifikan, investasi tersebut dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi.

The Company and subsidiary measure and recognize the remaining investment at fair value upon loss of control, provided the joint ventures do not become subsidiary or associates. Any difference between the carrying amount of the joint ventures upon loss of control and the aggregate of the fair value of the remaining investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss. When the remaining investment constitutes significant influence, it is accounted for as investment in an associate.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Bila hasil kontrak proyek dapat diestimasi dengan andal, pendapatan dan biaya diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari kegiatan kontrak pada akhir periode pelaporan, yang diukur berdasarkan proporsi biaya kontrak yang terjadi hingga tanggal pelaporan dibagi dengan estimasi jumlah biaya kontrak. Pengukuran termasuk pekerjaan tambah (kurang), klaim dan pembayaran insentif yang telah disetujui oleh pelanggan. Bila hasil kontrak proyek tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan kontrak diakui hanya yang berkaitan dengan beban kontrak yang telah terjadi yang dapat diperoleh kembali.

p. Revenue and Expense Recognition

Revenue

Where the outcome of a project contract can be estimated reliably, revenue and costs are recognized with reference to the stage of completion of the contract activity at the end of the reporting period, measured according to the proportion that contract cost incurred for work performed to date bears on the estimated total contract cost. Variations in contract work, claims and incentive payments are included to the extent that they have been agreed with the customer. Where the outcome of a project contract cannot be estimated reliably, contract revenue is recognized to the extent of contract cost incurred that is probable to be recovered.

Bila jumlah biaya kontrak memungkinkan melebihi jumlah pendapatan kontrak, estimasi kerugian diakui segera sebagai beban.

When it is probable that the total contract cost will exceed total contract revenue, the expected loss is recognized as an expense immediately.

Pada tanggal pelaporan, kelebihan biaya kontrak ditambah laba (dikurangi rugi) diakui atas penagihan kontrak proyek disajikan sebagai aset lancar pada "Tagihan bruto kepada pelanggan", sedangkan kelebihan penagihan atas biaya kontrak ditambah laba (dikurangi rugi) diakui disajikan sebagai kewajiban lancar pada "Utang bruto kepada pelanggan".

At reporting date, contract cost plus earnings (deducted losses) in excess of billings on project contracts are presented as current assets under "Gross receivables from customers" while billings in excess of contract cost plus earnings (deducted losses) are presented as current liability under "Gross payables to customers".

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pendapatan dan beban atas penyaluran gas kompresi berdasarkan jumlah energi yang terpakai pada saat dilakukan proses jasa kompresi gas setiap akhir bulan.

Revenues and expenses from distribution of compressed gas based on the total amount of energy consumed for the process of gas compression service by the end of the month.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Expenses

Expenses are recognized as incurred on an accrued basis.

q. Imbalan Kerja

Imbalan Pascakerja

Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Perusahaan dan entitas anak juga memberikan imbalan pascakerja lain tanpa pendanaan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan entitas anak.

q. Employee Benefits

Post-employment Benefits

The Company and subsidiary have established a defined benefit pension plan covering all of their eligible permanent employees. The Company and subsidiary also provide other unfunded defined post-employment benefit plans for their qualifying employees based on the Company and subsidiary policies

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit Method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi.

Past-service costs are recognized immediately in profit or loss.

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan *Projected Unit Credit*. Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Perusahaan dan entitas anak mengakui keuntungan

Long-term Benefits

Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit method. Past service costs are recognized immediately in profit or loss. The Company and subsidiary recognized gains or losses on

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain periode terjadinya.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

r. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan dan entitas anak diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

s. Perpajakan

Pajak penghasilan final

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagian penghasilan Perusahaan dan entitas anak dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment or settlement of a defined benefit plan is recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged to other comprehensive income in the period in which they occur.

The long-term employee benefits liabilities recognized in the consolidated statement of financial position represents the present value of the defined benefit liabilities.

r. Provisions

Provisions are recognized when the Company and subsidiary have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Company and subsidiary will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimate to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, the receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

s. Taxation

Final income tax

According to the tax regulation, certain Company and subsidiary income is subject to final tax. For the purpose of financial statement preparation, final income tax

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Untuk tujuan pelaporan keuangan, beban PPh final dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari beban usaha.

Beban pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak final, diakui proporsional dengan jumlah pendapatan pada periode berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban usaha diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak penghasilan di luar pajak final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan ekspektasikan untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya pada akhir periode pelaporan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

expenses are stated in the consolidated statement of profit or loss as part of operating expenses.

Tax expenses on income being subjected to final tax, recognized proportionally with total income in current period. The differences between the final income tax paid with total charged as operating expense recognized as prepaid tax or tax payable.

The difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities, and their respective final tax bases are not recognized as deferred tax assets or liabilities.

Non-final income tax

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realised, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Company expects to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities at the end of the reporting period.

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar bersih.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities when they relate to income taxes levied by the same taxation authority when the Company intends to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laporan laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laporan laba rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laporan laba rugi.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in the profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside the profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside the profit or loss.

Pajak tangguhan tidak dihitung karena tidak terdapat perbedaan temporer yang signifikan antara dasar pengenaan pajak dan komersial.

No deferred tax is accounted as there is no significant temporary difference identified for commercial and tax base values.

4. Pertimbangan Kritis Akuntansi dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan

4. Critical Accounting Judgments and Estimates

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen Perusahaan diwajibkan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

In the application of the Company's accounting policies, which are described in Note 3, the Company's management are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

Estimasi dan asumsi yang mendasari direviu secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, Perusahaan dan entitas anak telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Kepentingan dalam Pengaturan Bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Perusahaan dan entitas anak menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Perusahaan dan entitas anak untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut.

Secara khusus, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan:

- Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah.
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Perusahaan dan entitas anak juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
 - Bentuk legal dari kendaraan terpisah;
 - Persyaratan dari perjanjian kontraktual;
 - Fakta dan kondisi lain (ketika relevan).

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan, dan kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah pengaturan tersebut merupakan operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap akuntansi.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgements in Applying Accounting Policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, the Company and subsidiary have identified the following matters under which significant judgments are made:

Interest in Joint Arrangements

Judgement is required to determine when the Company and subsidiary have joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Company and subsidiary have determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Company and subsidiary to assess its rights and obligations arising from the arrangement.

Specifically, the Company and subsidiary considers:

- The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle.
- When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Company and subsidiary also considers the rights and obligations arising from:
 - The legal form of the separate vehicle;
 - The terms of the contractual arrangement;
 - Other facts and circumstances (when relevant).

This assessment often requires significant judgement and a different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the accounting.

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama, yaitu PT Crompton Prima Switchgear Indonesia. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Perusahaan dan entitas anak memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut.

Perusahaan menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan kesimpulan final dari penilaian yang dilakukan adalah pengaturan tersebut merupakan ventura bersama (Catatan 12).

Sumber Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Pengakuan Pendapatan kontrak

Perusahaan mengakui pendapatan kontrak yang masih dalam proses berdasarkan metode persentase penyelesaian. Tahap penyelesaian diukur berdasarkan proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2. Asumsi yang penting diperlukan adalah dalam menentukan tahap penyelesaian (persentase penyelesaian) dan jumlah estimasi pendapatan. Pendapatan kontrak diungkapkan dalam Catatan 19.

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman Diberikan dan Piutang

Perusahaan dan entitas anak menilai penurunan nilai pinjaman diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direvisi secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman diberikan dan piutang diungkapkan dalam Catatan 8.

The Company have joint arrangements which are structured through joint venture, namely PT Crompton Prima Switchgear Indonesia. These structure and the terms of the contractual arrangement indicate that the Company and subsidiary have rights to the net assets of the arrangements.

The Company also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and the final conclusions were that the arrangement was joint venture (Note 12).

Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, which have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below:

Contract revenue recognition

The Company recognizes contract revenues still in progress based on a percentage of completion method. The stage of completion is measured based on the proportion of contract costs incurred for work performed to the calculation date compared to the estimated total contract costs based on the accounting policies described in Note 2. Important assumptions are required in determining the stage of completion (percentage of completion) and the amount of the estimated income. Contract revenue is disclosed in Note 19.

Impairment Loss on Loans and Receivables

The Company and subsidiary assess their loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgement as to whether there is an objective evidence that the loss event has occurred. Management also makes judgement as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amount of loans and receivables are disclosed in Note 8.

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Imbalan Pascakerja

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan dan entitas anak diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Perusahaan dan entitas anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan dan entitas anak.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 23.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Pajak Penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Perusahaan, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak

Post-employment Benefits

The determination of the post-employment benefits obligation is dependent on the selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company and subsidiary assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Company and subsidiary assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the Company and subsidiary post-employment benefit obligations.

Assumptions used in the calculation of post-employment benefit obligations are disclosed in Note 23.

Depreciation of Fixed Assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line and double declining method over their estimated useful lives. The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

Income taxes

The calculations of income tax expense for the Company require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgement and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Company, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

5. Entitas Anak

PT Prima Power Nusantara ("PPN")

Pada tanggal 16 Juni 2016, Perusahaan mendirikan entitas anak, PPN, yang berlokasi di Jakarta. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp60.000 dengan persentase kepemilikan Perusahaan sebesar 99,99%. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah aset PPN sebelum eliminasi masing-masing sebesar Rp279.081 dan Rp260.433.

5. Subsidiary

PT Prima Power Nusantara ("PPN")

On June 16, 2016, the Company established a subsidiary, PPN, located in Jakarta. Total of paid-up capital amounted to Rp60,000 with ownership percentage of the Company 99.99%. As of December 31, 2019 and 2018, total assets of PPN before elimination amounted to Rp279,081 and Rp260,433, respectively.

6. Kas dan Setara Kas

6. Cash and Cash Equivalents

	2019 Rp	2018 Rp	
Kas	559	3,018	Cash on hand
Bank			Cash in banks
Pihak berelasi (Catatan 24)			Related parties (Note 24)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Rupiah	70,896	64,170	Rupiah
US\$	6,726	18,682	US\$
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Rupiah	13,935	14,796	Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Rupiah	6,959	6,473	Rupiah
Jumlah pihak berelasi	98,516	104,121	Total related parties
Phak ketiga			Third parties
PT Bank Bukopin Tbk			PT Bank Bukopin Tbk
Rupiah	2,747	2,175	Rupiah
Jumlah pihak ketiga	2,747	2,175	Total third parties
Jumlah bank	101,263	106,296	Total banks
Setara kas - deposito berjangka			Cash equivalents - time deposits
Pihak berelasi (Catatan 24)			Related parties (Note 24)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Rupiah	105,000	115,000	Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Rupiah	10,000	60,000	Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Rupiah	--	20,000	Rupiah
Jumlah pihak berelasi	115,000	195,000	Total related parties
Pihak Ketiga			Third Party
PT Bank Bukopin Tbk			PT Bank Bukopin Tbk
Rupiah	--	15,000	Rupiah
PT Bank BNI Syariah			PT Bank BNI Syariah
Rupiah	10,000	--	Rupiah
Jumlah deposito berjangka	125,000	210,000	Total time deposits
Jumlah kas dan setara kas	226,822	319,314	Total cash and cash equivalents
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	4.20% - 7.68%	4.71% - 8.25%	Interest rate per annum on time deposits
Jangka waktu	1 Bulan/ Month	1 Bulan/ Month	Period

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**7. Rekening Bank yang Dibatasi
Penggunaannya**

Akun ini merupakan rekening bank yang digunakan sebagai jaminan bank garansi untuk jaminan pelaksanaan proyek. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo rekening bank yang dibatasi penggunaannya masing – masing sebagai berikut:

7. Restricted Cash in Bank

This account represents cash in bank which were used as collateral on bank guarantees for projects. As at December 31, 2019 and 2018, the restricted bank account balances are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Rekening Bank			<i>Banks Account</i>
Pihak berelasi (Catatan 24)			<i>Related parties (Note 24)</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6,189	25,026	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
Pihak Ketiga			<i>Third Party</i>
PT Bank Bukopin Tbk	16,939	--	<i>PT Bank Bukopin Tbk</i>
Jumlah	23,128	25,026	Total

8. Piutang Usaha

8. Trade Receivables

a. Berdasarkan langganan

a. By debtors

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 24)			<i>Related Parties (Note 24)</i>
PLN	189,762	156,621	<i>PLN</i>
PT Crompton Prima Switchgear	9,168	--	<i>PT Crompton Prima Switchgear</i>
PT PLN Gas dan Geothermal	2,884	2,887	<i>PT PLN Gas dan Geothermal</i>
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	1,118	1,799	<i>PT Pelayanan Listrik Nasional Batam</i>
PT Indonesia Power	1,007	8,173	<i>PT Indonesia Power</i>
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	240	240	<i>PT Waskita Karya (Persero) Tbk</i>
Jumlah pihak berelasi	204,179	169,720	<i>Total related parties</i>
Pihak ketiga	4,510	5,853	<i>Third parties</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai			<i>Allowances for impairment losses</i>
Pihak berelasi	(240)	(240)	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	(3,901)	(3,822)	<i>Third party</i>
Jumlah	(4,141)	(4,062)	<i>Total</i>
Jumlah piutang usaha - bersih	204,548	171,511	Total trade receivables - net

b. Berdasarkan umur piutang usaha sebelum penurunan nilai

b. By age category of trade receivables before impairment

	2019 Rp	2018 Rp	
Belum jatuh tempo	123,644	161,627	<i>Not yet due</i>
Sudah jatuh tempo			<i>past due</i>
1 s/d 60 hari	28,801	7,247	<i>1 to 60 days</i>
61 s/d 90 hari	24,406	--	<i>61 to 90 days</i>
Lebih dari 90 hari	31,838	6,699	<i>More than 90 days</i>
	208,689	175,573	
Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai	(4,141)	(4,062)	<i>Change in the allowances for impairment losses</i>
Jumlah piutang usaha - bersih	204,548	171,511	Total trade receivables - net

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai			<i>Changes in the allowance for impairment losses</i>
Saldo awal	4,062	3,911	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	79	151	<i>Additions</i>
Saldo akhir	4,141	4,062	<i>Ending balance</i>

Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk secara kolektif untuk seluruh piutang yang telah lewat jatuh tempo.

Allowances for impairment losses were made collectively for all trade receivables which are past due.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang adalah cukup. Pada tanggal 31 Desember 2019, piutang usaha sebesar Rp80.904 yang telah lewat jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai.

Management believes that the allowances made for impairment losses are adequate. As of 31 December 2019, trade receivables of Rp80,904 were past due but not impaired.

9. Tagihan Bruto kepada Pelanggan

9. Gross Receivables from Customers

a. Berdasarkan kontrak

a. By contract

	2019 Rp	2018 Rp	
Biaya kontrak yang terjadi hingga tanggal pelaporan	933,903	736,182	<i>Contracts cost incurred to reporting date</i>
Laba diakui dikurangi kerugian diakui	350,334	304,063	<i>Recognized profit less recognized losses</i>
Dikurangi: penagihan termin	(1,052,171)	(832,457)	<i>Less: progress billings</i>
Jumlah	232,066	207,788	<i>Total</i>

b. Berdasarkan pelanggan

b. By customers

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 24)			<i>Related parties (Note 24)</i>
PLN	216,478	199,770	<i>PLN</i>
PT Indonesia Power	338	1,851	<i>PT Indonesia Power</i>
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	111	--	<i>PT Pelayanan Listrik Nasional Batam</i>
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	48	--	<i>PT Wijaya Karya (Persero) Tbk</i>
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	5	--	<i>PT Waskita Karya (Persero) Tbk</i>
PT Angkasa Pura II (Persero)	--	21	<i>PT Angkasa Pura II (Persero)</i>
Jumlah pihak berelasi	216,980	201,642	<i>Total related parties</i>
Pihak ketiga	15,086	6,146	<i>Third parties</i>
Jumlah	232,066	207,788	<i>Total</i>

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka

10. Prepaid Expenses and Advances

	2019 Rp	2018 Rp	
Uang muka proyek	29,696	41,568	Advances for project
Sewa dibayar dimuka	18,709	22,172	Prepaid rent
Lain-lain	3,589	1,873	Others
Jumlah	51,994	65,613	Total

11. Aset Tidak Lancar Lain

11. Other Non-Current Assets

	2019 Rp	2018 Rp	
Perangkat Lunak	16,202	18,715	Software
Beban Tangguhan	432	2,434	Deferred costs
Lainnya	406	692	Other
Jumlah	17,040	21,841	Total

12. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

12. Investment in Associate and Joint Venture

Rincian investasi pada asosiasi dan ventura bersama sebagai berikut:

The details of investments in joint venture and associate are as follows:

	Domisili/ <i>Domicile</i>	Jenis usaha/ <i>Nature of business</i>	Tahun operasi komersial/ <i>Commercial operations</i>	Presentase penyertaan/ <i>Percentage of ownership</i>	
				2019 %	2018 %
<u>Investasi pada entitas asosiasi/ <i>Investment in associate</i></u>					
PT Permata Prima Elektrindo ("PPE")	Jakarta	Distribusi listrik/ <i>Electricity distribution</i>	2006	15	15
<u>Investasi pada ventura bersama/ <i>Investment in joint venture</i></u>					
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia ("CPSI")	Jakarta	Peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik/ <i>Electricity controller and distribution</i>	2014	49	49

Seluruh entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat oleh Perusahaan dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas adalah entitas tertutup dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk sahamnya.

All associate and joint venture are recorded by the Company using the equity method. All entities are private entity and there are no quoted market prices available for their shares.

Per 31 Desember 2019 dan 2018, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada asosiasi dan ventura bersama.

As at December 31, 2019 and 2018, management believes that there is no significant restriction and risk regarding the investment in associate and joint venture.

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Mutasi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

Changes in investments in associate and joint venture are as follows:

	Jumlah tercatat 1 Januari 2019/ Carrying amount January 1, 2019 Rp	Penambahan/ Additions Rp	Bagian atas laba rugi/ Share of profit or loss Rp	Bagian atas penghasilan komprehensif lainnya/ Share of other comprehensive income Rp	Jumlah tercatat 31 Desember 2019/ Carrying amount December 31, 2019 Rp
<u>Asosiasi/ Associate</u>					
PPE	--	--	--	--	--
<u>Ventura bersama/ Joint venture</u>					
CPSI	26,908	--	(13,482)	--	13,426
Jumlah/ Total	26,908	--	(13,482)	--	13,426

	Jumlah tercatat 1 Januari 2018/ Carrying amount January 1, 2018 Rp	Penambahan/ Additions Rp	Bagian atas laba rugi/ Share of profit Rp	Bagian atas penghasilan komprehensif lainnya/ Share of other comprehensive income Rp	Jumlah tercatat 31 Desember 2018/ Carrying amount December 31, 2018 Rp
<u>Asosiasi/ Associate</u>					
PPE	--	--	--	--	--
<u>Ventura bersama/ Joint venture</u>					
CPSI	32,053	--	(5,145)	--	26,908
Jumlah/ Total	32,053	--	(5,145)	--	26,908

CPSI

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas CPSI, ventura bersama pada 31 Desember 2019 dan 2018 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

CPSI

The following table is the summarized financial information for CPSI, a joint venture as of December 31, 2019 and 2018, which are accounted for using equity method.

	2019 Rp	2018 Rp	
Aset lancar	65,572	10,631	Current assets
Aset tidak lancar	284,942	258,869	Non-current assets
	350,514	269,500	
Liabilitas jangka pendek	156,798	139,302	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	166,315	75,283	Non-current liabilities
	323,113	214,585	
Aset bersih	27,401	54,915	Net asset
% kepemilikan efektif	49%	49%	% of effective ownership
Bagian atas aset bersih	13,426	26,908	Share of net assets

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
Pendapatan	64,081	--	Revenue
Beban pokok penjualan	(62,149)	(9,507)	Cost of goods sold
Pendapatan lain-lain - bersih	(29,447)	(993)	Other income - net
Rugi tahun berjalan	(27,515)	(10,500)	Losses for the year
% kepemilikan efektif	49%	49%	% of effective ownership
Bagian Perusahaan atas rugi investasi	(13,482)	(5,145)	The Company's shares of losses
Pendapatan komprehensif lainnya	--	--	Other comprehensive income
Dividen yang diterima dari investasi	--	--	Dividend received from investments

Pada tahun 2014, Perusahaan dan CG International Holding Singapore Pte Ltd mendirikan CPSI. Perusahaan melakukan penyertaan saham sebesar US\$1.911.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp22.019 dengan kepemilikan sebesar 49%.

In 2014, the Company and CG International Holding Singapore Pte Ltd established CPSI. The Company made an investment amounted to US\$1,911,000 (full amount) or equivalent to Rp22,019 with 49% ownership.

Pada tahun 2015, Perusahaan melakukan tambahan penyertaan saham sebesar US\$1.225.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp16.739 tanpa mengubah persentase kepemilikan.

In 2015, The Company made an additional investments amounting to US\$1,225,000 (full amount) or equivalent to Rp16,739 without changes in percentage of ownership.

PPE

Pada tahun 2006, Perusahaan dan PT Perwira Inti Megah mendirikan PPE dengan maksud untuk menjalankan usaha ketenagalistrikan dengan nilai penyertaan dari Perusahaan sebesar Rp1.500. Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan memutuskan untuk menurunkan nilai investasi terkait kerugian berulang PPE.

PPE

In 2006, the Company and PT Perwira Inti Megah established PPE for the purpose of conducting electricity business, with an investment amount of Rp1,500 from the Company. At December 31, 2015, the Company decided to impair the investment due to recurring loss of PPE.

13. Aset Tetap

13. Property and Equipment

	2019				Saldo akhir/ Ending balance	
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications		
Biaya perolehan						Acquisition cost
Tanah	5,582	9	--	--	5,591	Land
Perlengkapan umum	5,435	3,622	--	--	9,057	General equipment
Instalasi dan mesin	282,021	--	--	38,379	320,400	Installation and machinery
Subjumlah	293,038	3,631	--	38,379	335,048	Subtotal
Pekerjaan dalam pelaksanaan	38,229	150	--	(38,379)	--	Construction in progress
Jumlah	331,267	3,781	--	--	335,048	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Perlengkapan umum	(1,452)	(1,390)	--	--	(2,842)	General equipment
Instalasi dan mesin	(20,508)	(14,877)	--	--	(35,385)	Installation and machinery
Jumlah	(21,960)	(16,267)	--	--	(38,227)	Total
Jumlah tercatat	309,307				296,821	Net carrying value

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018				Saldo akhir/ Ending balance	
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications		
Biaya perolehan						Acquisition cost
Tanah	5,543	39	--	--	5,582	Land
Perlengkapan umum	958	4,477	--	--	5,435	General equipment
Instalasi dan mesin	282,021	--	--	--	282,021	Installation and machinery
Subjumlah	288,522	4,516	--	--	293,038	Subtotal
Pekerjaan dalam pelaksanaan	40,740	--	(2,511)	--	38,229	Construction in progress
Jumlah	329,262	4,516	(2,511)	--	331,267	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Perlengkapan umum	(910)	(542)	--	--	(1,452)	General equipment
Instalasi dan mesin	(8,789)	(11,719)	--	--	(20,508)	Installation and machinery
Jumlah	(9,699)	(12,261)	--	--	(21,960)	Total
Jumlah tercatat	319,563				309,307	Net carrying value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2019 Rp	2018 Rp	
Beban pokok pendapatan (Catatan 20)	14,877	11,719	Cost of services (Note 20)
Beban usaha (Catatan 21)	1,390	542	Operating expenses (Note 21)
Jumlah	16,267	12,261	Total

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Sumatera Selatan, Nias Utara dan Kalimantan Barat dengan hak legal berupa sertifikat Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 20 tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2031. Perolehan tanah tersebut sehubungan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga gasifikasi batubara dan pembangkit tenaga modular pengganti diesel.

The Company owns several pieces of land located in South Sumatera, North Nias and West Kalimantan with Building Use Right for a period of 20 years until 2031. The land acquisitions were performed in relation with the construction and operation of coal gas power plant and substitute diesel power modular.

Pekerjaan dalam pelaksanaan

Pada tanggal 31 Desember 2019, instalasi dan mesin diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, dengan jumlah nilai pertanggungan Rp285.015. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

Construction in progress

As of December 31, 2019, installation and machinery were insured against fire, theft and other risk with PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, with a total insurance coverage of Rp285,015. In Management's opinion, the insurance coverage is adequate to cover losses that may arise from such risks.

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. Utang Usaha

Akun ini merupakan liabilitas kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembelian material dan jasa konstruksi kepada sub kontraktor.

14. Trade Payables

This account represents payables to third parties arising from purchase of material and construction service to sub contractor.

	2019 Rp	2018 Rp	
PT Bira Jaya Mandiri Perkasa	24,367	23,725	PT Bira Jaya Mandiri Perkasa
PT Voksel Electric Tbk	14,274	12,191	PT Voksel Electric Tbk
PT Black & Veatch International Company	9,226	16,223	PT Black & Veatch International Company
PT Putranata Mandiri	8,150	--	PT Putranata Mandiri
PT Iradat Aman Globalindo	6,062	--	PT Iradat Aman Globalindo
Fichtner GmbH & Co. KG	5,051	14,656	Fichtner GmbH & Co. KG
PT ABB Sakti Industri	--	9,715	PT ABB Sakti Industri
Lain-lain (masing-masing dibawah 5%)	66,966	39,665	Others (each below 5%)
Jumlah	134,096	116,175	Total

15. Uang Muka dari Pelanggan

Akun ini terutama merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sehubungan dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan *Engineering Procurement Construction*.

15. Advances from Customers

This account mostly represents advances received from customers in relation with revenue incurred from Engineering, Procurement Construction services.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, uang muka dari pelanggan masing-masing sebesar Rp35.393 dan Rp64.133.

As of December 31, 2019 and 2018, the Company's advances form customers is amounted to Rp35,393 and Rp64,133, respectively.

16. Utang Bruto kepada Pelanggan

16. Gross Payables to Customers

a. Berdasarkan kontrak

a. By contract

	2019 Rp	2018 Rp	
Biaya kontrak yang terjadi hingga tanggal pelaporan	717,819	349,281	Contracts cost incurred to reporting date
Laba diakui dikurangi kerugian diakui	618,516	148,310	Recognized profit less recognized losses
	1,336,335	497,591	
Dikurangi: penagihan termin	(1,450,478)	(642,621)	Less: progress billings
Jumlah	(114,143)	(145,030)	Total

b. Berdasarkan pelanggan

b. By customers

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 24)			Related parties (Note 24)
PLN	100,180	141,347	PLN
PT Indonesia Power	8,555	2,476	PT Indonesia Power
PT PLN Gas dan Geothermal	1,415	--	PT PLN Gas and Geothermal

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2019</u> Rp	<u>2018</u> Rp	
Pihak berelasi (Catatan 24)			<i>Related parties (Note 24)</i>
PT Crompton Prima Switchgear	1,356	--	<i>PT Crompton Prima Switchgear</i>
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	347	174	<i>PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)</i>
PT Angkasa Pura II (Persero)	174	--	<i>PT Angkasa Pura II (Persero)</i>
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	130	202	<i>PT Pelayanan Listrik Nasional Batam</i>
Jumlah pihak berelasi	112,157	144,199	<i>Total related parties</i>
Pihak ketiga	1,986	831	<i>Third parties</i>
Jumlah	114,143	145,030	Total

17. Pinjaman Jangka Panjang

17. Long-term Loan

	<u>2019</u> Rp	<u>2018</u> Rp	
Jumlah utang pokok	120,040	152,052	<i>Principal amount</i>
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(32,978)	(32,978)	<i>Current maturities</i>
Bagian jangka panjang	87,062	119,074	Long-term portion

Pada tanggal 28 Desember 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PLN, Pemegang Saham. Pinjaman ini diberikan untuk keperluan pendanaan program investasi dalam rangka kelancaran kegiatan usaha Perusahaan. Jumlah pokok total pinjaman yang diberikan adalah maksimum sebesar Rp250.000. Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar Rp220.000 dengan tingkat bunga sebesar 11,95% per tahun dan akan berakhir setelah jangka waktu 7 tahun terhitung sejak selesainya masa *grace period* selama 12 bulan sejak tanggal penarikan pinjaman pertama kali.

On December 28, 2015, the Company entered into a loan agreement with PLN, Stockholder. The loan was granted for the funding of the Company's investment programme to support its business operations. The maximum loan to be granted amounted to Rp250,000. The company has withdrawn Rp220,000 with an interest rate of 11.95% per annum, and will maturities are within 7 years after the grace period for 12 months from the date of the first loan withdrawal.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp120.040 dan Rp152.052 (Catatan 24).

As of December 31, 2019 and 2018 the outstanding balance from this loan amounted to Rp120,040 and Rp152,052, respectively (Note 24).

Beban bunga pinjaman tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp15.644 dan Rp19.231.

Interest expense charges related to loan in 2019 and 2018 amounted to Rp15,644 and Rp19,231, respectively.

18. Modal Saham

18. Capital Stock

	<u>Jumlah</u> <u>saham/</u> <u>Number of</u> <u>shares</u>	<u>Persentase</u> <u>kepemilikan/</u> <u>Percentage</u> <u>of ownership</u>	<u>Jumlah/</u> <u>Amount</u> <u>Rp</u>
Pemegang saham			
PLN	24,975,000	99.90%	24,975
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) (YPK PLN)	25,000	0.10%	25
Jumlah/Total	25,000,000	100.00%	25,000

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. Pendapatan

Akun ini merupakan pendapatan atas jasa supervisi enjiniring, supervisi konstruksi, *design* reviu, jasa konsultasi, jasa konstruksi, jasa kompresi gas dan jasa lainnya sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
<i>Engineering Procurement Construction</i>	440,002	438,406
Konstruksi	237,516	326,405
Transmisi dan distribusi	121,004	161,278
Kompresi Gas	103,651	103,594
Pembangkitan	93,444	48,863
Operasional dan perawatan	4,872	38,723
Jumlah	1,000,489	1,117,269

Rincian pendapatan berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak berelasi (Catatan 24)		
PLN	957,118	1,079,512
PT Indonesia Power	11,750	14,915
PT Crompton Prima Switchgear	10,093	--
PT PLN Gas dan Geothermal	4,057	2,887
PT Pembangkitan Jawa Bali	2,167	--
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	2,086	1,799
PT PLN Batubara	--	431
Jumlah pihak berelasi	987,271	1,099,544
Pihak ketiga	13,218	17,725
Jumlah	1,000,489	1,117,269

This account represents revenue for engineering supervision, construction supervision, design review, consulting services, construction services, gas compression services and other services as follows:

<i>Engineering Procurement Construction</i>
<i>Constructions</i>
<i>Transmission and distributions</i>
<i>Gas compressions</i>
<i>Generators</i>
<i>Operation and maintenance</i>
Total

The details of revenue by customers are as follows:

<i>Related parties (Note 24)</i>
<i>PLN</i>
<i>PT Indonesia Power</i>
<i>PT Crompton Prima Switchgear</i>
<i>PT PLN Gas and Geothermal</i>
<i>PT Pembangkitan Jawa Bali</i>
<i>PT Pelayanan Listrik Nasional Batam</i>
<i>PT PLN Batubara</i>
<i>Total related parties</i>
<i>Third parties</i>
Total

20. Beban Pokok Pendapatan

	2019 Rp	2018 Rp
Subkontraktor	419,566	471,257
Remunerasi enjiniring	151,570	164,028
Perjalanan dinas dan transportasi	48,566	46,915
Sewa	29,928	26,590
Beban pajak final (Catatan 22)	28,563	35,328
Penyusutan (Catatan 13)	14,877	11,719
Lain-lain	38,854	57,077
Jumlah	731,924	812,914

20. Cost of Services

<i>Subcontractors</i>
<i>Engineering remunerations</i>
<i>Business trip and transportation</i>
<i>Rental</i>
<i>Final income tax (Note 22)</i>
<i>Depreciation (Note 13)</i>
<i>Others</i>
Total

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. Beban Usaha

21. Operating Expenses

	2019 Rp	2018 Rp	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	81,853	83,007	Salary and welfare benefits
Tunjangan pajak penghasilan karyawan	8,385	8,576	Employee income tax allowances
Sewa	6,895	6,879	Rental
Perjalanan dinas dan transportasi	5,965	4,156	Business trip and transportation
Jasa tenaga kerja	4,525	2,626	Labour services
Alat keperluan kantor	3,436	3,089	Office supplies
Beban imbalan kerja	3,250	3,760	Employee benefit expense
Konsumsi	2,580	1,534	Consumables
Telekomunikasi	2,036	1,054	Telecommunication
Alat tulis kantor	1,784	1,735	Stationaries
Penyusutan (Catatan 13)	1,390	542	Depreciation (Note 13)
Konsultan	1,227	829	Consulting
Lain-lain	13,414	11,311	Others
Jumlah	136,740	129,098	Total

22. Perpajakan

22. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	2019 Rp	2018 Rp	
Pajak pertambahan nilai	91,354	77,112	Value added tax
Kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21	--	999	Overpayment of Income tax article 21
Jumlah	91,354	78,111	Total

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	2019 Rp	2018 Rp	
Pajak Penghasilan Badan	2,437	897	Corporate of income tax
Pajak penghasilan final	7,540	5,700	Final income tax
Pajak pertambahan nilai	--	2,912	Value added tax
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 21	3,395	3,510	Article 21
Pasal 4(2)	442	1,020	Article 4(2)
Pasal 23	257	182	Article 23
Pasal 25	193	133	Article 25
Jumlah	14,264	14,354	Total

c. Pajak Penghasilan Final

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian dan laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

c. Final Income Tax

A reconciliation between income before tax per consolidated statements of profit or loss and taxable income of the Company is as follows:

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final konstruksi	840,370	974,245	<i>Revenue subject to final income tax constructions</i>
Beban pajak penghasilan final berdasarkan tarif pajak yang berlaku (Catatan 20)	28,563	35,328	<i>Final income tax expense at prevailing tax rates (Note 20)</i>
Dikurangi pembayaran pajak yang berlaku	(26,723)	(30,466)	<i>Less payment of final income tax</i>
Utang atas pajak penghasilan final awal tahun	5,700	838	<i>Tax payable on final income tax at beginning of the year</i>
Utang atas pajak penghasilan final akhir tahun	7,540	5,700	<i>Tax payable on final income tax at end of the year</i>

d. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian dan laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

d. Income Tax Expenses

A reconciliation between income before tax per consolidated statements of profit or loss and taxable income of the Company is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Laba sebelum pajak penghasilan badan	132,339	169,140	<i>Profit before corporate income tax</i>
Dikurangi laba entitas anak	3	4	<i>Less profit of subsidiary</i>
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	132,336	169,136	<i>Profit before corporate income tax of the Company</i>
Beban (penghasilan) yang tidak dapat diperhitungkan secara fiskal:			<i>Non-deductible expenses (non-taxable income):</i>
Penghasilan bunga	(13,561)	(11,074)	<i>Finance income</i>
Kesejahteraan dan tunjangan pajak	35,099	39,544	<i>Employee welfare and tax allowances</i>
Lain-lain	(20,650)	(15,206)	<i>Others</i>
Bagian laba bersih entitas anak, asosiasi dan ventura bersama	(11,534)	(28,072)	<i>Share in net income of subsidiary, associate and joint venture</i>
Pendapatan yang telah dikenakan pajak final dan biaya-biaya berkaitan	(92,123)	(134,104)	<i>Income already subjected to final tax and related expenses</i>
Taksiran laba yang dikenakan pajak	29,567	20,224	<i>Estimated taxable income</i>
Beban pajak penghasilan badan kini	7,392	5,056	<i>Corporate income tax expense - current</i>
Dikurangi pembayaran pajak dibayar dimuka			<i>Less prepaid taxes</i>
Pasal 23	(2,819)	(2,740)	<i>Article 23</i>
Pasal 25	(2,136)	(1,419)	<i>Article 25</i>
Jumlah	(4,955)	(4,159)	<i>Total</i>
Kurang bayar pajak penghasilan	2,437	897	<i>Under payment of corporate income tax</i>

Pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak disampaikan ke Kantor Pajak.

Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amount may be adjusted when the Annual Tax Returns are filled in with the Tax Office.

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the prevailing tax rates to income before tax is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Laba sebelum pajak penghasilan	132,339	169,140	<i>Profit before tax</i>
Beban pajak sesuai tarif yang berlaku	33,085	42,285	<i>Tax expenses at prevailing rate</i>
Beban (penghasilan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut pajak	(2,661)	(3,702)	<i>Non-deductible expenses (non-taxable income)</i>
Pendapatan yang telah dikenakan pajak final konstruksi dan biaya-biaya yang berkaitan	(23,032)	(33,527)	<i>Income already subjected to final tax and related expense</i>
Beban pajak kini	7,392	5,056	<i>Current tax expense</i>

e. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 2 Maret 2018, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak atas restitusi Pajak Pertambahan Nilai tahun 2015 dan Tahun 2016 sebesar Rp41.699.191.227 (nilai penuh). Nilai restitusi yang diterima setelah dikurangi Denda dan Bunga Pajak sebesar Rp36.855.045.091 (nilai penuh) tanggal 29 Maret 2018. Selisih antara jumlah yang diakui dengan yang tercatat dibebankan ke laba rugi tahun berjalan.

e. Tax Assessment Letters

On March 2, 2018, the Directorate General of Taxes issued a Tax Assessment Letter for the restitution of Value Added Taxes in 2015 and 2016 amounting to Rp41,699,191,227 (full amount). The value of the refund received after deducting the fine and tax interest is Rp36,855,045,091 (full amount) on March 29, 2018. The difference between the amount recognized and the carrying amount is charged to current year's profit or loss.

Pada tanggal 6 Juni 2018, Perusahaan juga menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan senilai Rp352.709.460 (nilai penuh) masa Januari sampai dengan Desember tahun 2016 yang kemudian dikurangi dengan Pajak Kurang Bayar atas PPh 21, PPh 23 dan PPh 4(2) sebesar Rp826.844.996 (nilai penuh).

On June 6, 2018, the Company also received a Tax Assessment Letter for Overpayment of Corporate Income Tax amounting to Rp352,709,460 (full amount) from January to December 2016 which was then reduced by underpayment of PPh 21, Income Tax 23 and Income Tax 4 (2) Rp826,844,996 (full amount).

23. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan mempunyai karyawan yang diperbantukan dari PLN, entitas induk. Entitas induk menanggung liabilitas imbalan pascakerja meliputi imbalan pensiun lain berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian, tunjangan tambahan penghasilan dan penghargaan purna jabatan dan pemeliharaan kesehatan serta menyediakan program dana pensiun imbalan pasti bagi karyawan yang diperbantukan. Program dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Selama karyawan diperbantukan

23. Employment Benefit Liabilities

The Company has employees who are seconded from PLN, the Parent Company. The Parent Company bears post-employment benefit obligations including other retirement benefits in the form of severance pay, gratuity and compensation benefits, fringe benefits and awards after-office earnings and health maintenance as well as providing the defined benefit pension plans for the seconded employees. The programme is administered by Dana Pensiun PLN and Bank Rakyat Indonesia (BRI). During the secondment period, the Company shall pay the pension

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

bekerja pada Perusahaan, Perusahaan wajib membayar iuran program pensiun kepada PLN berdasarkan keputusan Direksi PLN No. 332.K/010/DIR/2003. Iuran yang dibayar Perusahaan diakui sebagai beban pada tahun berjalan, karena Perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut.

Iuran pensiun yang dibayarkan Perusahaan pada tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp181 dan Rp160.

Imbalan pascakerja

Perusahaan menyelenggarakan imbalan pascakerja tanpa pendanaan kepada karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pascakerja tersebut adalah 305 karyawan pada tahun 2019 dan 187 karyawan pada tahun 2018.

Imbalan kerja jangka panjang

Perusahaan juga memberikan imbalan kerja jangka panjang tanpa pendanaan berupa tunjangan uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, dan bantuan kematian dan pemakaman bagi karyawan yang memenuhi persyaratan.

Perhitungan imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang pada tahun 2019 dan 2018 dihitung oleh PT Binaputera Jaga Hikmah, aktuaris independen.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 antara lain adalah sebagai berikut

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Tingkat diskonto per tahun	7.81%	8.61%	<i>Discount rate per annum:</i>
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.20%	7.20%	<i>Rate of salary increase per annum</i>
Tingkat kematian	CSO-1958	CSO-1958	<i>Mortality rate</i>
Umur pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years	<i>Normal retirement age</i>

plan to PLN based on the decision of the Directors of PLN No. 332.K/010/DIR/2003. Contributions paid by the Company were recognized as expense in the current year, since the Company has no legal or constructive obligation to pay further contributions.

The defined benefits pension plans expense paid by the Company in 2019 and 2018 amounted to Rp181 and Rp160, respectively.

Post-employment benefits

The Company provides unfunded defined post-employment benefits to permanent employees which are determined based on the Labor Law No. 13/2003. The number of employees eligible for the benefits was 305 employees in 2019 and 187 employees in 2018.

Long-term benefits

The Company also provides unfunded long-term benefits such as long service leave, work accident, death and funeral allowances service award for its qualifying employees.

The provision for post-employment and long-term benefits in 2019 and 2018 was calculated by an independent actuary, PT Binaputera Jaga Hikmah.

The key assumptions used in determining employee benefits obligations as of December 31, 2019 and 2018 among others, are as follows:

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Beban imbalan kerja Perusahaan dibebankan ke beban kepegawaian adalah sebagai berikut:

The Company employee benefit expenses charged to personnel expenses, are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Biaya jasa kini	2,165	2,959	<i>Current service cost</i>
Beban bunga	1,270	801	<i>Interest cost</i>
Jumlah	3,435	3,760	Total

Liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The Company benefit obligation in financial position are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Nilai kini liabilitas	18,760	14,831	Present value of obligation

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Company movement in the present value of employee benefit obligation are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo awal	14,831	11,043	<i>Beginning balance</i>
Biaya jasa kini	2,165	2,959	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	1,270	801	<i>Interest expenses</i>
Pembayaran	(185)	(1,481)	<i>Payment of benefits</i>
Pengukuran kembali:			<i>Remeasurements:</i>
Perubahan asumsi keuangan	1,380	(3,598)	<i>Change in financial assumption</i>
Penyesuaian atas pengalaman	(701)	5,107	<i>Adjustment assumption</i>
Saldo akhir	18,760	14,831	Ending balance

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
	Perubahan asumsi/ Change in Assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 14.34%	Kenaikan sebesar/ Increase by 17.26%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1%	Kenaikan sebesar/ Increase by 17.69%	Penurunan sebesar/ Decrease by 14.94%	<i>Salary growth rate</i>
Tingkat mortalita	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 0.07%	Kenaikan sebesar/ Increase by 0.07%	<i>Mortality rate</i>

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted employment benefit and other long-term is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ Less than a year	1 sampai 2 tahun/ Between 1 -2 years	2 sampai 5 tahun/ Between 2 - 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/ Total	
Imbalan pascakerja						<i>Post-employment benefit</i>
Program pensiun	375	1,295	2,389	445,173	449,232	<i>Pension plan</i>
Imbalan cuti besar	298	533	5,883	6,209	12,923	<i>Annual leave benefits</i>
Total	673	1,828	8,272	451,382	462,155	Total

24. Sifat dan Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

24. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Sifat pihak berelasi

- Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PLN dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- PLN dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham Perusahaan.
- PT Indonesia Power (IP), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), PT PLN Gas dan Geothermal (PLN Gas dan Geothermal), PT Haleyora Power (HP), dan PT Indonesia Comnets Plus (ICON) merupakan perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham utama Perusahaan dan atau sebagian pengurusnya sama dengan Perusahaan.
- Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

Nature of relationship

- Government of the Republic of Indonesia is the stockholder of the PLN and State-Owned Enterprises (BUMN).
- PLN and Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) are the stockholder of the Company.
- PT Indonesia Power (IP), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), PT PLN Gas and Geothermal (PLN Gas and Geothermal), PT Haleyora Power (HP), and PT Indonesia Comnets (ICON) Plus are companies which have the same principal stockholder and or management as the Company.
- The Board of Commissioners and Directors are the key management of the Company.

Transaksi Pihak Berelasi

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

Transactions with Related Parties

Below is the list of related parties with which the Company has transactions:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Sifat transaksi/ Nature of transaction
PT Crompton Prima Switchgear	Pengendalian bersama CG International Holdings Singapore PTE.LTD dan PT PLN Enjiniring/ <i>Joint Venture Between CG International Holdings Singapore PTE.LTD and PT PLN Enjiniring</i>	Piutang usaha pihak berelasi, piutang lain-lain/ <i>Trade receivable related parties, other receivable</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pendapatan jasa supervisi enjiniring, procurement dan konstruksi/ <i>Revenue from engineering, procurement and construction</i> Rekening bank dibatasi penggunaannya dan Penempatan kas dan setara kas/ <i>Restricted cash in bank, and Placement of cash and cash equivalents</i>

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pihak-pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan/ <i>Nature of relationship</i>	Sifat transaksi/ <i>Nature of transaction</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Rakyat Indonesia")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan kas dan setara kas/ <i>Placement of cash and cash equivalents</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Negara Indonesia")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan kas dan setara kas/ <i>Placement of cash and cash equivalents</i>
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ("PT Pelabuhan Indonesia II")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ <i>Revenue from engineering supervision and construction</i>
PT Angkasa Pura II (Persero) ("PT Angkasa Pura II")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ <i>Revenue from engineering supervision and construction</i>
PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("PT Waskita Karya")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ <i>Revenue from engineering supervision and construction</i>
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("PT Wijaya Karya")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ <i>Revenue from engineering supervision and construction</i>

	Catatan/ Note	2019		2018		
		Rp	%	Rp	%	
Kas dan setara kas	6					Cash and cash equivalents
Bank Negara Indonesia		111,959	9.45%	121,473	9.75%	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri		87,622	7.40%	142,852	11.47%	Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia		13,935	1.18%	34,796	2.79%	Bank Rakyat Indonesia
Subjumlah		213,516	18.02%	299,121	24.02%	Subtotal
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	7					Restricted cash in bank
Bank Negara Indonesia		6,189	0.52%	8,277	0.66%	Bank Negara Indonesia
subjumlah		6,189	0.52%	8,277	0.66%	Subtotal
Piutang usaha-bersih	8					Trade receivables-net
PLN		189,762	16.02%	156,621	12.58%	PLN
PT Crompton Prima Switchgear		9,168	0.77%	--	--	PT Crompton Prima Switchgear
PLN Gas dan Geothermal		2,884	0.24%	2,887	0.23%	PLN Gas and Geothermal
PLN Batam		1,118	0.09%	1,799	0.14%	PLN Batam
IP		1,007	0.08%	8,173	0.66%	IP
PT Waskita Karya		240	0.02%	240	0.02%	PT Waskita Karya
subjumlah		204,179	17.23%	169,720	13.63%	Subtotal
Piutang lain-lain						Other receivables
PT Crompton Prima Switchgear		11,000	0.93%	--	--	PT Crompton Prima Switchgear
Bank Negara Indonesia		253	0.02%	162	0.01%	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri		32	0.00%	77	0.01%	Bank Mandiri
PLN		--	--	83	0.01%	PLN
Bank Rakyat Indonesia		--	--	22	0.00%	Bank Rakyat Indonesia
subjumlah		11,285	0.95%	344	0.03%	Subtotal
Tagihan bruto kepada pelanggan	9					Gross receivables from customers
PLN		216,478	43.56%	199,770	16.04%	PLN
IP		338	0.07%	1,851	0.15%	IP
PLN Batam		111	0.02%	--	--	PLN Batam
PT Wijaya Karya		48	0.01%	--	--	PT Wijaya Karya
PT Waskita Karya		5	0.00%	--	--	PT Waskita Karya
PT Angkasa Pura II		--	--	21	0.00%	PT Angkasa Pura II
subjumlah		216,980	44%	201,642	16.19%	Subtotal

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Note	2019		2018		
		Rp	%	Rp	%	
Uang muka dari pelanggan						Advances from customer
PLN	15	32,239	6.49%	60,443	10.08%	PLN
Utang lain-lain						Other payables
PLN		2,370	0.48%	39,303	6.55%	PLN
HP		2,630	0.53%	470	0.08%	HP
ICON		390	0.08%	741	0.12%	ICON
subjumlah		5,390	1.08%	40,514	6.75%	Subtotal
Utang bruto kepada pelanggan	16					Gross payables to customers
PLN		100,180	20.16%	141,347	23.56%	PLN
IP		8,555	1.72%	2,476	0.41%	IP
PLN Gas dan Geothermal		1,415	0.28%	--	--	PLN Gas and Geothermal
PT Crompton Prima Switchgear		1,356	0.27%	--	--	PT Crompton Prima Switchgear
PT Pelabuhan Indonesia II		347	0.07%	202	0.03%	PT Pelabuhan Indonesia II
PT Angkasa Pura II		174	0.04%	--	--	PT Angkasa Pura II
PLN Batam		130	0.03%	174	0.03%	PLN Batam
subjumlah		112,157	22.57%	144,199	24.04%	Subtotal
Pinjaman jangka panjang	17					Long-term loan
PLN		120,040	24.16%	152,052	25.35%	PLN
Pendapatan	19					Revenues
PLN		957,118	95.67%	1,079,512	96.62%	PLN
IP		11,750	1.17%	14,915	1.33%	IP
PT Crompton Prima Switchgear		10,093	1.01%	--	--	PT Crompton Prima Switchgear
PLN Gas dan Geothermal		4,057	0.41%	2,887	0.26%	PLN Gas and Geothermal
PJB		2,167	0.22%	--	--	PJB
PLN Batam		2,086	0.21%	1,799	0.16%	PLN Batam
PLN Batubara		--	--	431	0.04%	PLN Batubara
Jumlah		987,271	98.68%	1,099,544	98.41%	Total

* Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan

* Percentage to related total assets/liabilities/revenues

Pada 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan memberikan kompensasi kepada Komisaris dan Direksi Perusahaan berupa gaji, fasilitas, tunjangan dan tantiem masing-masing sebesar Rp14.041 dan Rp12.506.

On December 31, 2019 and 2018, the Company provided compensation to its Commissioners and Directors, which includes salaries, facilities, allowances and bonus amounting to Rp14,041 and Rp12,506, respectively.

25. Rekonsiliasi Liabilitas Yang Timbul Dari Aktivitas Pendanaan

25. Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan

The table below details changes in the Company's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Company's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	2019			
	31 Desember/ December 31, 2018	Arus kas/ Cash flow	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Pinjaman jangka panjang kepada pemegang saham	152,052	(32,012)	120,040	Long-term loan to Shareholder

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018		
	31 Desember/ December 31, 2017	Arus kas/ Cash flow	31 Desember/ December 31, 2018
	Rp	Rp	Rp
Liabilitas jangka panjang			<i>Non-current liabilities</i>
Pinjaman jangka panjang kepada pemegang saham	184,064	(32,012)	152,052 <i>Long-term loan to Shareholder</i>

26. Litigasi

Pada tanggal 1 Oktober 2018, Perusahaan menghadapi gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Konsorsium PT Odira Persada dan PT Timas Suplindo (Konsorsium) ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") terkait biaya yang timbul akibat perpanjangan waktu dan gangguan dalam pelaksanaan pekerjaan serta kewajiban Perusahaan melakukan pembayaran pekerjaan kepada Konsorsium yang telah diserahkan terimakan berdasarkan *Taking Over Certificate* ("TOC") dengan nilai tuntutan ganti rugi sebesar Rp51.392 dan US\$903.593,90 (nilai penuh) serta bunga bank komersial 10% dari nilai klaim dan mengembalikan Jaminan Bank Garansi ("BG").

Atas gugatan wanprestasi yang diajukan Konsorsium, Perusahaan mengajukan gugat balik (rekonvensi) kepada Konsorsium terkait keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan Konsorsium selama 43 minggu, dengan tuntutan ganti rugi pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp2.994 dan US\$868.107,37 (nilai penuh) serta kerugian yang dialami Perusahaan sebesar Rp40.843 dan membayar uang paksa Rp10.000 untuk setiap hari keterlambatan.

Pada tanggal 11 Februari 2019 diluar proses penyelesaian sengketa di BANI, Konsorsium beritikad baik melakukan pembayaran denda keterlambatan (*Liquidated Damages*) sebesar Rp2.994 dan US\$868.107,37 (nilai penuh).

Pada tanggal 15 Februari 2019 atas permintaan BANI, Perusahaan dan Konsorsium melakukan mediasi hingga pada tercapai kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam Putusan Provisi.

Pada tanggal 25 Februari 2019 BANI mengeluarkan Putusan Provisi yang mengharuskan Perusahaan untuk membayar tagihan pekerjaan berdasarkan TOC serta mengembalikan dokumen BG sebesar

26. Litigation

On October 1, 2018, the Company faced a breach of lawsuit filed by the Consortium of PT Odira Persada and PT Timas Suplindo (Consortium) to the Indonesian National Arbitration Board ("BANI") related to costs arising from the extension of time and disruption in the implementation of work and the obligation of the company to conduct payment of work to the Consortium that has been submitted is based on Taking Over Certificate ("TOC") with a claim for compensation amounting to Rp51,392 and US\$903,593.90 (full amount) and commercial bank interest of 10% of the claim value and returning the Bank Guarantee Guarantee ("BG").

Based on the breach of claim filed by the Consortium, the Company filed a counter-action (reconvention) to the Consortium related to the delay in completion of work carried out by the Consortium for 43 weeks, with claims for compensation for late payment fees (liquidated damages) in the amount of Rp2,994 and US\$868,107.37 (full amount) and losses incurred by the Company amounting to Rp40,843 and paying forced cash Rp10,000 for each day of delay.

On February 11, 2019, outside the dispute resolution process at BANI, the Consortium in good faith made the payment of late fees (Liquidated Damages) amounting to Rp2,994 and US\$868,107.37 (full amount).

On February 15, 2019, at the request of BANI, the Company and the Consortium conducted a mediation until an agreement was reached which was then set forth in the Provision Decision.

On February 25, 2019 BANI issued a Provision Decision which required the Company to pay the invoice based on TOC and return the BG documents in the amounting to Rp3,481 and US\$1,009,424.85

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Rp3.481 dan US\$1.009.424,85 (nilai penuh) kepada Konsorsium dan Konsorsium harus menyerahkan BG senilai Rp2.000 kepada Perusahaan. BANI melanjutkan proses pemeriksaan/persidangan untuk sengketa yang menjadi perselisihan diantara Para Pihak.

Pada tanggal 9 September 2019 BANI mengeluarkan Putusan dengan amar putusan menguatkan Putusan Provisi tanggal 25 Februari 2019. Putusan telah berkekuatan hukum tetap.

(full amount) to the Consortium and Consortium must submit the BG in the amount of Rp2,000 to the Company. BANI continues the examination / trial process for disputes which become disputes between the Parties.

On September 9, 2019 BANI issued a Decision with a ruling to strengthen the Provision Decision on February 25, 2019. The decision was legally binding.

27. Ikatan dan Kontijensi

Pada tanggal 6 Maret 2017, Perusahaan dan UIP JBT 1 melakukan kerjasama untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Desain dan Konstruksi dan *Quality Assurance & Quality Control* ("QA/QC") Pembangunan Muara Tawar *Combined Cycle Power Plant Block 2,3&4 Add-on Project* dengan nilai kontrak sebesar Rp120.239. Jangka waktu kontrak selama 24 bulan dari tanggal mulai kerjasama kontrak.

Pada tanggal 19 Februari 2019 terdapat addendum atas kontrak yang menerangkan bahwa pemilik pekerjaan berubah dari UIP JBT I menjadi PT Pembangkitan Jawa Bali, dibentuk konsorsium antara Perusahaan dengan PT Rekadaya Elekrika Consult ("REC"), dimana Perusahaan melaksanakan lingkup pekerjaan Supervisi Konstruksi dengan nilai kontrak Rp69.621 dan REC melaksanakan lingkup pekerjaan Supervisi Desain dan QA/QC dengan nilai kontrak Rp50.618.

Pada tanggal 16 November 2018, Perusahaan dan PLN Unit Induk Pembangkitan Jawa Bagian Tengah I ("UIP JBT I") melakukan kerjasama untuk 2 (dua) kontrak pekerjaan proyek PLTA Upper Cisokan. Pekerjaan pertama adalah Jasa Konsultansi *Management Team* PLTA Upper Cisokan dengan nilai kontrak sebesar Rp112.298. Jangka waktu kontrak selama 72 bulan dari tanggal mulai kerjasama kontrak. Pekerjaan kedua adalah Jasa Konsultansi *Update* Desain, Supervisi Desain, dan Supervisi Konstruksi PLTA Upper Cisokan *Pumped storage*, kapasitas (4x260 MW) dengan nilai kontrak sebesar Rp301.504. Jangka waktu kontrak selama 73 bulan dari tanggal mulai kerjasama kontrak.

27. Commitments and Contingencies

On March 6, 2017, the Company and UIP JBT 1 entered into a partnership for *Design Supervision Consultancy Services, Construction and Quality Assurance & Quality Control* ("QA/QC") for the *Construction of Muara Tawar Combined Cycle Power Plant Block 2.3 & 4 Add-ons Project* with a contract value of Rp120,239. The contract period is 24 months from the start date of the contract collaboration.

On February 19, 2019 there was an addendum to the contract explaining that the owner of the work has changed from UIP JBT I to PT Pembangkitan Jawa Bali, and consortium was formed between Company and PT Rekadaya Elekrika Consult ("REC"), where Company carried out the scope of *Construction Supervision* work with a contract value of Rp69,621 and REC that implements scope of work of *Design Supervision* and *QA /QC* with a contract value of Rp50,618.

On November 16, 2018, the Company and PLN Central Java I Generation Main Unit ("UIP JBT I") collaborated for 2 (two) contracts for the *Upper Cisokan Hydroelectric Power Plant* project. The first job was the *Upper Cisokan Hydroelectric Power Management Consultation Services Team* with a contact value of Rp112,298. The contract period is 72 months from the start date of contract cooperation. The second job is *Consultant Service Update Design, Design Supervision, and Construction Supervision of the Upper Cisokan Pumped storage, capacity (4x260 MW) PLTA* with a contract value of Rp301,504. The contract period is 73 months from the start date of the contract collaboration.

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. Aset dan Liabilitas Moneter dalam Mata Uang Asing

28. Monetary Assets and Liabilities Denominated in Foreign Currency

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

On December 31, 2019 and 2018 the Company has assets and liabilities denominated in foreign currency as follows:

	2019				
	US\$*)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	CNY*)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Aset Moneter					Monetary assets
Kas dan setara kas	483,846	6,726	--	--	Cash and cash equivalents
Jumlah aset moneter	483,846	6,726	--	--	Total monetary assets
Liabilitas moneter					Monetary liabilities
Utang usaha	(638,395)	(8,874)	(2,490,000)	4,958	Trade payables
Jumlah bersih	(154,549)	(2,148)	(2,490,000)	4,958	Total net
	2018				
	US\$*)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	CNY*)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Aset Moneter					Monetary assets
Kas dan setara kas	1,290,111	18,682	--	--	Cash and cash equivalents
Jumlah aset moneter	1,290,111	18,682	--	--	Total monetary assets
Liabilitas moneter					Monetary liabilities
Utang usaha	(2,464,472)	(35,688)	(2,490,000)	(5,163)	Trade payables
Jumlah bersih	(1,174,361)	(17,006)	(2,490,000)	(5,163)	Total net

*) Dalam nilai penuh/ in full amount

29. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan

29. Financial Instruments and Financial Risk Management

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan

a. Categories and classes of financial instrument

	2019				
	Klasifikasi instrumen keuangan/ Financial instrument classification				
Aset keuangan/ Financial assets	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Tersedia untuk dijual/ Available for sale	Liabilitas keuangan/ Financial liabilities Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Jumlah instrumen keuangan/ Total financial instruments	
Aset Keuangan					Financial Assets
Aset keuangan lancar					Current financial assets
Kas dan setara kas	226,822	--	--	226,822	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	23,128	--	--	23,128	Restricted cash in bank
Piutang usaha	204,548	--	--	204,548	Trade receivables
Piutang lain - lain	27,632	--	--	27,632	Other receivables
Tagihan bruto kepada pelanggan	232,066	--	--	232,066	Gross receivables to customers
Jumlah aset keuangan lancar	714,196	--	--	714,196	Total current financial assets
Aset lain-lain	--	368	--	368	Other assets
Jumlah aset keuangan tidak lancar	--	368	--	368	Total non-current financial assets
Jumlah aset keuangan	714,196	368	--	714,564	Total financial assets

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2019					
Klasifikasi instrumen keuangan/ <i>Financial instrument classification</i>					
Aset keuangan/ <i>Financial assets</i>		Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>		Jumlah instrumen keuangan/ <i>Total financial instruments</i>	
Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Tersedia untuk dijual/ <i>Available for sale</i>	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortised cost</i>			
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek					<i>Current financial liabilities</i>
Utang usaha	--	--	134,096	134,096	<i>Trade payables</i>
Utang lain-lain	--	--	5,472	5,472	<i>Other payables</i>
Utang bruto kepada pelanggan	--	--	114,143	114,143	<i>Gross payables from customers</i>
Biaya masih harus dibayar	--	--	54,623	54,623	<i>Accrued expenses</i>
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	--	--	32,978	32,978	<i>Current maturity of long-term loan</i>
Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek	--	--	341,312	341,312	<i>Total current financial liabilities</i>
Liabilitas keuangan jangka panjang					<i>Non-current financial liabilities</i>
Utang lain-lain	--	--	156	156	<i>Other payables</i>
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	--	--	87,062	87,062	<i>Long-term loan - net of current maturity</i>
Jumlah liabilitas keuangan jangka panjang	--	--	87,218	87,218	<i>Total noncurrent financial liabilities</i>
Jumlah liabilitas keuangan	--	--	428,530	428,530	Total financial liabilities
2018					
Klasifikasi instrumen keuangan/ <i>Financial instruments classification</i>					
Aset keuangan/ <i>Financial assets</i>		Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>		Jumlah instrumen keuangan/ <i>Total financial instruments</i>	
Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Tersedia untuk dijual/ <i>Available for sale</i>	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortised cost</i>			
Aset Keuangan					Financial Assets
Aset keuangan lancar					<i>Current financial assets</i>
Kas dan setara kas	319,314	--	--	319,314	<i>Cash and cash equivalents</i>
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	25,026	--	--	25,026	<i>Restricted cash in bank</i>
Piutang usaha	171,511	--	--	171,511	<i>Trade receivables</i>
Piutang lain - lain	20,075	--	--	20,075	<i>Other receivables</i>
Tagihan bruto kepada pelanggan	207,788	--	--	207,788	<i>Gross receivables to customers</i>
Jumlah aset keuangan lancar	743,714	--	--	743,714	<i>Total current financial assets</i>
Aset lain-lain	--	368	--	368	<i>Other assets</i>
Jumlah aset keuangan tidak lancar	--	368	--	368	<i>Total non-current financial assets</i>
Jumlah aset keuangan	743,714	368	--	744,082	Total financial assets
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek					<i>Current financial liabilities</i>
Utang usaha	--	--	116,175	116,175	<i>Trade payables</i>
Utang lain-lain	--	--	41,243	41,243	<i>Other payables</i>
Utang bruto kepada pelanggan	--	--	145,030	145,030	<i>Gross payables from customers</i>
Biaya masih harus dibayar	--	--	51,864	51,864	<i>Accrued expenses</i>
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	--	--	32,978	32,978	<i>Current maturity of long-term loan</i>
Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek	--	--	387,290	387,290	<i>Total current financial liabilities</i>
Liabilitas keuangan jangka panjang					<i>Non-current financial liabilities</i>
Utang lain-lain	--	--	156	156	<i>Other payables</i>
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	--	--	119,074	119,074	<i>Long-term loan - net of current maturity</i>
Jumlah liabilitas keuangan jangka panjang	--	--	119,230	119,230	<i>Total noncurrent financial liabilities</i>
Jumlah liabilitas keuangan	--	--	506,520	506,520	Total financial liabilities

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan dan entitas anak tidak mempunyai instrumen aset keuangan yang dikategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo dan nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang dikategorikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi.

As of December 31, 2019, the Company and subsidiary did not have financial assets instruments classified as held to maturity and fair value through profit and loss and financial liabilities instruments classified as fair value through profit or loss.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko keuangan, antara lain risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan dan entitas anak beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Direksi.

b. Financial risk management objectives and policies

The objective and policies of the Company and subsidiary financial risk management is to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of its business, while managing their exposure to financial risks, which are market risk (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company and subsidiary operates within a defined policy approved by the Directors.

i. Manajemen risiko mata uang asing

Perusahaan dan entitas anak melakukan sejumlah transaksi dalam mata uang asing. Akibatnya, timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Kebijakan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk menjaga risiko mata uang asing dalam batas yang dapat diterima.

i. Foreign currency risk management

The Company and subsidiary undertakes many transactions denominated in foreign currencies. Consequently, there are exposures to exchange rate fluctuations. The Company and subsidiary policy is to maintain foreign currency exposure within acceptable limits.

Jumlah eksposur mata uang asing bersih Perusahaan dan entitas anak pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 28.

The Company's and subsidiary net open foreign currency exposure as of the reporting date is disclosed in Note 28.

Perusahaan dan entitas anak tidak melakukan lindung nilai atas eksposur nilai tukar mata uang asing. Untuk mengelola eksposur atas nilai tukar mata uang asing tersebut, kebijakan Perusahaan dan entitas anak untuk memastikan bahwa total eksposur tetap pada batas yang dapat diterima adalah dengan menjual atau membeli valuta asing dengan kurs spot saat diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan jangka pendek.

The Company and subsidiary does not hedge its foreign currency exposure. To manage its foreign currency exposure, the Company's and subsidiary policy is to ensure that its net exposure is kept to an acceptable level by buying or selling foreign currencies at spot rates when necessary to address short-term imbalances.

Pada tanggal 31 Desember 2019, jika Rupiah menguat (melemah) sebesar 10% terhadap USD dengan seluruh variabel lain konstan, jumlah penghasilan komprehensif tahun

As at December 31, 2019, if Rupiah had Appreciated (Depreciated by 10% against USD with all other variables held constant, total comprehensive income for the year would have been

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

berjalan lebih rendah (tinggi) sebesar Rp533 (2018: Rp1.669), terutama diakibatkan keuntungan (kerugian) dari penjabaran kas dan setara kas, piutang usaha dan utang usaha. Dampak terhadap ekuitas sama dengan dampak terhadap laba sebelum pajak tahun berjalan.

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga Perusahaan dan entitas anak timbul dari pinjaman jangka panjang. Risiko tingkat suku bunga dari kas tidak signifikan.

Pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Perusahaan dan entitas anak terhadap risiko nilai wajar suku bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2019, pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap berkaitan dengan pinjaman jangka panjang (Catatan 17). Perusahaan dan entitas anak tidak mempunyai pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap yang diukur dengan nilai wajar melalui laporan laba rugi. Oleh karena itu, perubahan tingkat suku bunga pada tanggal pelaporan tidak akan mempengaruhi laporan laba rugi.

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Perusahaan dan entitas anak. Risiko ini lebih disebabkan oleh pembayaran pelanggan yang tidak tepat waktu dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Upaya-upaya pengelolaan risiko dilaksanakan dengan penjadwalan ulang atas pembayaran pelanggan. Sebagai entitas yang dapat digolongkan dalam infrastruktur, dalam meminimalkan risiko tidak tertagihnya piutang.

Perusahaan melakukan pendekatan persuasif kepada pelanggan, jika pelanggan tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah

Rp533 lower (higher) (2018: Rp1.669) mainly as a result of foreign exchange gains (losses) on the translation of cash and cash equivalents, trade receivables and trade payables. The impact on equity would have been the same as the impact on post-tax profit for the year.

ii. Interest rate risk management

The Company and subsidiary interest rate risk arises from long-term loans. The interest rate risk from cash is not significant.

Fixed rate loans expose the Company and subsidiary to fair value interest rate risk.

As at December 31, 2019, fixed rate long-term loan (Note 17). The Company and subsidiary does not account for any fixed rate loan at fair value through profit or loss. Therefore, a change in interest rates at the reporting date would not affect profit or loss.

iii. Credit risk management

Credit risk arises from the risk that the counterparties will default on their contractual obligations resulting in financial loss to the Company and subsidiary. This risk is caused more by customers who do not pay on time and delays in completion of the work. Risk management efforts are undertaken by rescheduling customer payments. As an entity that can be classified in the public infrastructure, to minimize the risk of uncollectible receivables.

The Company made a persuasive approach to the customer, if the customer does not pay at the time that has been determined, the Company

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

ditentukan, Perusahaan dan entitas anak akan mengirimkan surat pemberitahuan kembali ke pelanggan untuk melakukan pembayaran.

and subsidiary will send a notice back to the customer to make a payment.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap risiko kredit.

The carrying value of financial assets on the financial statements net of an allowance for losses reflects the Company's and subsidiary exposure to credit risk.

Pelanggan Perusahaan dan entitas anak terdiri dari pihak berelasi. Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, PLN memiliki kontribusi 95,67 % dan 96,62% masing-masing dari jumlah penjualan bersih. Manajemen berkeyakinan bahwa risiko kredit terbatas karena tidak pernah ada kegagalan kredit dari PLN.

The Company and subsidiary customers consist of related party. For the years ended December 31, 2019 and 2018, PLN accounted for 95.67% and 96.62% of the total net sales. Management believes that the credit risk is limited because there has been no credit default from PLN.

Kualitas kredit aset keuangan

Tabel di bawah ini menunjukkan kualitas aset keuangan Perusahaan dan entitas anak:

Credit quality of financial assets

The table below shows the quality of the Company's and subsidiary financial assets:

		2019				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		
Kas dan setara kas	226,822	--	--	226,822	Cash and cash equivalents	
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	23,128	--	--	23,128	Restricted cash in bank	
Piutang usaha - bersih	123,644	80,294	610	204,548	Trade receivables - net	
Piutang lain-lain	27,632	--	--	27,632	Other receivables	
Tagihan bruto kepada pelanggan	232,066	--	--	232,066	Gross receivables to customers	
Jumlah	633,292	80,294	610	714,196	Total	
		2018				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		
Kas dan setara kas	319,314	--	--	319,314	Cash and cash equivalents	
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	25,026	--	--	25,026	Restricted cash in bank	
Piutang usaha - bersih	161,627	9,884	--	171,511	Trade receivables - net	
Piutang lain-lain	20,075	--	--	20,075	Other receivables	
Tagihan bruto kepada pelanggan	207,788	--	--	207,788	Gross receivables to customers	
Jumlah	733,830	9,884	--	743,714	Total	

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Aset keuangan tertentu dinilai secara individu untuk penurunan nilai dan jika ditemukan terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diterapkan secara individu.

Tabel di atas termasuk aset keuangan yang mana penurunan nilainya dilakukan secara kolektif. Tidak praktis untuk mengidentifikasi penurunan nilai aset keuangan tersebut secara individu dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik risiko yang sama dimana penurunan nilainya dilakukan secara kolektif.

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Perusahaan dan entitas anak akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Dewan Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan dan entitas anak. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas dan simpanan dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

Selanjutnya Perusahaan dan entitas anak juga memelihara kecukupan dana dengan cara mempertahankan kecukupan jumlah kas dan setara kas dan investasi jangka pendek yang mudah dikonversi menjadi uang tunai ketika mengalami gangguan yang tak terduga dari penagihan kas.

Certain financial assets are individually assessed for impairment and if found to be impaired, have impairment loss assigned to them on an individual basis.

The table above includes financial assets on which collective impairment have been assessed. It is not practicable to individually identify impaired financial assets within the portfolio of financial assets with similar risk characteristics which are collectively assessed for impairment.

iv. Liquidity risk management

Liquidity risk is defined as the risk that the Company and subsidiary will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Board of Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Company and subsidiary short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Company and subsidiary manages liquidity risk by maintaining adequate cash and reserves by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial liabilities.

Furthermore, the Company and subsidiary maintains an adequate amount of cash and cash equivalents and short-time investments, which may be readily converted to cash upon any unforeseen interruption of its cash collections.

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Tabel berikut ini memberikan rincian jatuh tempo kontraktual Perusahaan dan entitas anak untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada periode 31 Desember 2019 dan 2018:

The following table details the Company and subsidiary remaining contractual maturity for its financial liabilities with an agreed repayment period as of December 31, 2019 and 2018:

	2019				Jumlah/ Total	
	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ Over one year but not longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ Over three years but not longer than five years	Lebih dari lima tahun/ Over five years		
Liabilitas Keuangan						Financial Liabilities
Utang usaha	134,096	--	--	--	134,096	Trade payables
Utang lain-lain	5,472	--	--	--	5,472	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	54,623	--	--	--	54,623	Accrued expenses
Utang bruto kepada pelanggan	114,143	--	--	--	114,143	Gross payables to customers
Pinjaman jangka panjang	32,978	64,022	23,040	--	120,040	Long-term loan
Jumlah	341,312	64,022	23,040	--	428,374	Total

	2018				Jumlah/ Total	
	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ Over one year but not longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ Over three years but not longer than five years	Lebih dari lima tahun/ Over five years		
Liabilitas Keuangan						Financial Liabilities
Utang usaha	116,175	--	--	--	116,175	Trade payables
Utang lain-lain	41,243	--	--	--	41,243	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	51,864	--	--	--	51,864	Accrued expenses
Utang bruto kepada pelanggan	145,030	--	--	--	145,030	Gross payables to customers
Pinjaman jangka panjang	32,978	64,033	55,041	--	152,052	Long-term loan
Jumlah	387,290	64,033	55,041	--	506,364	Total

Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal jatuh tempo kontraktual, yaitu paling awal dimana Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk membayar. Untuk liabilitas keuangan yang didenominasi dengan mata uang asing, jumlah yang tidak didiskontokan ditranslasi dengan kurva nilai tukar *forward* yang relevan pada akhir periode pelaporan.

The table has been drawn up based on the undiscounted cash flow of financial liabilities based on the contractual maturity which is the earliest date on which the Company and subsidiary can be required to pay. For foreign currency denominated financial liabilities, the undiscounted amortisation is translated using the relevant forwards exchange curve at the end of the reporting period.

Nilai wajar instrumen keuangan

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat mendekati nilai wajarnya baik karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau mempunyai tingkat suku bunga pasar.

Fair value of financial instruments

Management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded approximate their fair values either because of their short-term maturities or because they carry market interest rate.

v. Manajemen risiko modal

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio

v. Capital risk management

The Company and subsidiary manages capital risk to ensure that they will be able to continue as going concern and to ensure compliance with covenants of capital adequacy ratio. The Company capital structure

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham (Catatan 18) dan saldo laba.

consist of equity shareholders that consist of capital stock (Note 18), and retained earnings

Direksi Perusahaan dan entitas anak secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Directors of the Company and subsidiary periodically review the Company capital structure. As part of this review, the Directors consider the cost of capital and related risks.

Perusahaan dan entitas anak berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dan entitas anak dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

The Company and subsidiary seeks to minimize the cost of capital, in order to maximize their value. Therefore, the Company and subsidiary policy to seek funding that will always take into account the financial risk that may arise in the future.

Rasio utang terhadap ekuitas dan rasio pengembalian utang pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The debt to equity ratios and debt service coverage ratios as at December 31, 2019 and 2018 were as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Jumlah liabilitas	496,947	599,838	Total liabilities
Jumlah ekuitas	687,884	645,656	Total equity
Rasio utang terhadap ekuitas	0.72	0.93	Debt to equity ratio

30. Reklasifikasi Akun

30. Reclassification of Accounts

Akun-akun dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah direklasifikasi adalah sebagai berikut:

The accounts in the consolidated statements of financial position for the year ended December 31, 2018 which have been reclassified are as follows:

	2018		
	Sebelum	Sesudah	
	Direklasifikasi/ Before	Direklasifikasi/ After	
	Reclassification	Reclassification	
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Uang muka dari pelanggan	43,280	64,133	Advances from customer
Utang lain-lain	62,096	41,243	Other payables
Jumlah	105,376	105,376	Total

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

- a. Pada awal tahun 2020 Pemerintah mengumumkan "status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona". Hal tersebut berdampak pada penurunan ekonomi dalam negeri, yaitu melemahnya nilai tukar rupiah dan penurunan harga sekuritas di pasar modal. Manajemen telah menilai dampak peristiwa tersebut terhadap operasi Perusahaan dan entitas anaknya dan sampai saat ini belum dapat secara akurat memprediksi dan mengkuantifikasi seberapa lama atau sejauh mana wabah Covid-19 tersebut berdampak terhadap hasil operasi, posisi keuangan, dan arus kas Perusahaan dan entitas anak. Manajemen akan terus memantau ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian pada masa yang akan datang

- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 ("Peraturan") telah diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2020.

Peraturan ini mengatur mengenai kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Peraturan ini salah satunya mengatur penyesuaian tarif PPh Badan dalam negeri menjadi sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021, dan 20% pada tahun pajak 2022.

32. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2020.

31. Events After Reporting Period

- a. In early 2020 the Government announced "the status of a specific state of emergency from the corona virus". This has an impact on the decline in the domestic economy, namely the weakening of the rupiah and the decline in prices of securities on the capital market. Management has assessed the impact of these events on the Company and its subsidiary operations and yet to accurately predict and quantify how long or how far the Covid-19 pandemic will affect the operating results, financial position, and the Company and subsidiary cash flows. Management will continue to monitor this and take action as needed to overcome risks and uncertainties in the future.

- b. Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2020 ("the Regulation") has been issued on 31 March 2020.

The Regulation is concerning the state financial policy and financial system stability in response of the COVID-19 pandemic and/or the threats that endanger the national economy and/or financial system stability. The Regulation, among others, regulates the adjustment of Corporate Income Tax rate for domestic company to become 22% in the fiscal years of 2020 and 2021, and 20% in 2022 fiscal year.

32. Management Responsibility on Financial Statements

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibilities of the management and were approved by the Directors and authorized for issuance on March 31, 2020.